Direksi
Board of Directors

Direksi merupakan Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengangkatan Direksi dilakukan oleh RUPS, dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi sebesar-besarnya kepentingan Perusahaan, dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas Perusahaan.

Pedoman Kerja/Piagam Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi memiliki Pedoman Panduan Kerja Direksi (*Charter of Board Directors*), yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direksi. Panduan Kerja Direksi menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang di dalamnya memuat ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, hal-hal yang ditetapkan dalam Rapat umum Pemegang Saham (RUPS), serta praktik-praktik terbaik GCG.

Secara berkala Panduan Kerja Direksi dievaluasi dan disempurnakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, dan kebutuhan Perusahaan.

Sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh MIND ID selaku *holding* PTBA, di tahun 2023, PTBA melakukan penyelarasan kebijakan internal PTBA. Salah satu yang menjadi penyelarasan yaitu perubahan Panduan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Panduan Kerja Direksi yang sebelumnya menjadi satu dengan Panduan Kerja Dewan Komisaris, di tahun 2023 panduan tersebut dipisahkan menjadi suatu kebijakan sendiri menjadi Pedoman Kerja Direksi. Pedoman Kerja Direksi telah disahkan oleh Dewan Direksi berdasarkan Keputusan Direksi No. 250H/0100/2023 tentang Pedoman Kerja Direksi (*Charter to Board of Directors*) PT Bukit Asam Tbk. Secara garis besar Pedoman Kerja Direksi PTBA dengan mencakup:

1. Ketentuan Umum;
2. Keanggotaan Direksi;
3. Program Pengenalan, Remunerasi, dan Pelatihan;
4. Tugas dan Kewajiban;
5. Wewenang, Pembagian Tugas, dan Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan;
6. Pelaksanaan Tugas Pengurusan Perusahaan;
7. Rapat Direksi;

The Board of Directors is a Company Organ with authority and full responsibility for managing the Company for the interests and objectives of the Company as well as representing the Company both inside and outside the court. The appointment of Directors is carried out by the GMS, from candidates proposed by Series A Dwiwarna Shareholders or their proxies. The Board of Directors is obliged to manage the Company in accordance with its authority and responsibility, as regulated in the Articles of Association and the provisions of the laws and regulations, which is carried out in good faith and full responsibility for the greatest interests of the Company, while still paying attention to the balance of interests of all parties related to the activities Company.

Board of Directors' Work Guidelines/Charter

In carrying out its duties and functions, the Board of Directors has a Board of Directors Work Guidelines (Charter of Board Directors), which is determined and signed by the Board of Directors. The Directors' Work Guide is a reference for the Directors to carry out their duties and functions, which contains provisions that refer to the principles of corporate law, applicable laws and regulations, the Articles of Association, others stipulated at the General Meeting of Shareholders (GMS), and at the GCG best practices.

The Directors' Work Guide is periodically evaluated and refined by considering the provisions of applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and the Company's needs.

In line with the policies set by MIND ID as PTBA's holding company, in 2023, PTBA aligned its internal policies. One of the areas of alignment is the change to the Board of Directors and Board of Commissioners Work Guide. The Directors' Work Guidelines were previously integrated with the Board of Commissioners' Work Guidelines, however, in 2023 these guidelines were separated into their own policy to become the Directors' Work Guidelines. It has been ratified by the Board of Directors based on the Board of Directors Decree No. 250H/0100/2023 concerning the Charter to Board of Directors of PTBA with guideline such as:

1. General Provisions;
2. Membership of the Board of Directors;
3. Introduction, Remuneration, and Training Program;
4. Duties and Obligations;
5. Authority, Division of Duties, and Decision-Making Principles;
6. Implementation of Company Management Duties;
7. Board of Directors Meeting;

8. Hubungan Antara Direksi dan Dewan Komisaris;
9. Evaluasi Kinerja Direksi;
10. Fungsi di bawah Direksi yang Wajib Dibentuk Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Persetujuan Tindakan.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan Direksi terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, namun tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ketentuan masa jabatan tersebut tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan para Anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Masa jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
1. Mengundurkan diri;
2. Meninggal dunia;
3. Masa jabatannya berakhir;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Anggota Direksi mengundurkan diri, maka:

1. Anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan, dengan tembusan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B terbanyak, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
2. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut, Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Anggota Direksi;
3. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya efektif.

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan,

8. Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners;
9. Evaluation of Directors' Performance;
10. Functions under the Board of Directors which must be formed based on statutory provisions;
11. Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners for Approval of Actions.

Term of Office

The Board of Directors' term of office starts from the closing of the GMS or the date determined by the GMS appointing them and ends at the close of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of appointment, provided that the term must not exceed 5 (five) years, but still considering the statutory regulations in the capital markets sector. These term of office provisions do not reduce the right of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time before their term of office ends. Members of the Board of Directors can be reappointed by the GMS for one term of office.

Mechanism for Resignation and Dismissal of Directors

The term of office of a member of the Board of Directors ends if:
1. Resign;
2. Passed away;
3. The end of the term of office;
4. Dismissed based on GMS decision;
5. Declared bankrupt by the Commercial Court which has permanent legal force or placed under guardianship based on a Court decision; or
6. No longer meets the requirements as a member of the Board of Directors based on applicable laws and regulations.

In the event that a member of the Board of Directors resigns, then:
1. The member of the Board of Directors concerned must submit a written request for resignation regarding this intention to the Company, with a copy to the Series A Dwiwarna shareholder and the largest Series B shareholder, the Board of Commissioners, and other members of the Board of Directors at least 30 (thirty) days before the date of resignation;
2. No later than 90 (ninety) days after receiving the letter of resignation, the Company is obliged to hold a GMS to decide on the request for resignation of the Member of the Board of Directors;
3. Members of the Board of Directors who resign can still be held accountable from the time of their appointment until the effective date of their resignation.

Members of the Board of Directors may at any time be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by stating the reasons if they act contrary to the Articles of Association or there are indications of taking actions that are detrimental to the Company or neglecting their obligations or there are urgent reasons for the Company, considering the

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberhentian sementara harus diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi, dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
2. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara, atau lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara;
3. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara;
4. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
5. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara, diberi kesempatan untuk membela diri;
6. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila dinyatakan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS;
7. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau dinyatakan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS, maka Anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
8. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
9. Apabila Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;
10. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat/publik dan menyampaikan kepada OJK mengenai keputusan pemberhentian sementara serta hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Susunan, Jumlah, Komposisi, dan Dasar Pengangkatan Anggota Direksi di Sepanjang Tahun 2023

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi, jumlah anggota Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan, yakni sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua)

following provisions:

1. The temporary dismissal must be notified in writing to the member of the Board of Directors concerned along with the reason, with a copy from the Board of Directors, no later than 2 (two) working days after the provision of the temporary dismissal;
2. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are not authorized to carry out management of the Company for the interests of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company and represent the Company both inside and outside the court, which comes effective from the decision to temporarily dismiss them by the Board of Commissioners until a GMS decision confirming or canceling temporary dismissal, or the expiry of the period for holding the GMS to revoke or confirm the decision to temporarily dismiss,
3. Within a period of no later than 90 (ninety) days after the temporary dismissal, the Board of Commissioners must convene a GMS to revoke or confirm the decision on the temporary dismissal;
4. If the time period for holding the GMS has expired or the GMS is unable to make a decision, the temporary dismissal will be cancelled;
5. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are given the opportunity to defend themselves;
6. Temporary suspension cannot be extended or re-established for the same reason, it it is exceeding the GMS period;
7. If the GMS cancels the temporary dismissal or it is declared that the period for holding the GMS has expired, then the relevant member of the Board of Directors is obliged to carry out his/her duties again;
8. If the GMS confirms the decision to temporarily dismissal, the member of the Board of Directors concerned will be permanently dismissed;
9. If the temporarily dismissed member of the Board of Directors does not attend the GMS after being summoned in writing, then the temporarily dismissed member of the Board of Directors is deemed not to have exercised his right to defend themselves at the GMS and has accepted the GMS decision;
10. The Company is obliged to disclose information to the public/public and submit to the OJK regarding the decision on temporary dismissal as well as the results of holding a GMS to revoke or strengthen the decision on temporary dismissal or information regarding the cancellation of the temporary dismissal by the Board of Commissioners due to the failure to hold the GMS until the expiry of the time period, no later than no later than 2 (two) working days after the event occurs.

Position, Number, Composition, and Basis for Board of Directors Appointment in 2023

Based on the Articles of Association and the Board of Directors' Work Guidelines, the number of members of the Board of Directors is adjusted to the needs of the Company,

orang, diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Susunan, jumlah, dan komposisi Direksi tahun 2023 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yakni berjumlah 5 (lima). Adapun susunan Direksi tahun 2023, adalah sebagai berikut:

namely consisting of at least 2 (two) people, of whom are appointed as President Director.

The position, number, and composition of the Board of Directors in 2023 did not change from the previous year, namely 5 (five). The composition of the Board of Directors in 2023 is as follows:

Tabel Susunan Anggota Direksi Tahun 2023
Table of Directors Composition in 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Ketetapan Legal basis	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	Keputusan RUPS Luar Biasa 23 Desember 2021 Resolution of Extraordinary GMS on December 23, 2021	2021 – 2026	Pertama First
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Keputusan RUPS Tahunan 5 April 2021 Resolution of Annual GMS on April 5, 2021	2021 – 2026	Pertama First
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operations and Production Director	Keputusan RUPS Tahunan 5 April 2021 Resolution of Annual GMS on April 5, 2021	2021 – 2026	Pertama First
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	Keputusan RUPS Luar Biasa 23 Desember 2021 Resolution of Extraordinary GMS on December 23, 2021	2021 – 2026	Pertama First
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	Keputusan RUPS Luar Biasa 23 Desember 2021 Resolution of Extraordinary GMS on December 23, 2021	2021 – 2026	Pertama First

Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS termasuk kewajiban menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Dalam pelaksanaan tugas Direksi, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan.
b. Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
c. Setiap Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan itikad baik , penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku.
d. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
e. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Duties and Responsibilities

The Board of Directors must carry out all actions related to and being responsible for the management of the Company for the interests of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company, while still paying attention to and complying with the provisions and representing the Company both inside and outside the Court regarding all matters and all events with the limitations as stated in stipulated in statutory regulations, Articles of Association, and/or GMS decisions including the obligation to hold Annual GMS and other GMS as regulated in statutory regulations and Articles of Association.

In carrying out the duties of the Board of Directors, they must consider these principles:

a. The Board of Directors is obliged to devote full energy, thought, attention and dedication to the duties, obligations, and achievement of the Company's objectives.
b. Members of the Board of Directors must comply with the Company's Articles of Association and statutory regulations and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, and fairness.
c. Each member of the Board of Directors is obliged to carry out their duties and responsibilities for the interests and business of the Company in good faith, with full responsibility and prudence, by complying with applicable laws.
d. Each member of the Board of Directors is fully and jointly responsible for losses to the Company caused by errors or negligence of members of the Board of Directors in carrying out their duties.
e. Members of the Board of Directors cannot be held responsible for the Company's losses if they can prove that the losses were not due to their fault or negligence, have carried out management in good faith, full responsibility, and prudence for the benefit and in accordance with the aims and objectives of the Company, and have no conflict

Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

of interest directly or indirectly for management actions that result in losses, and have taken action to prevent the occurrence or continuation of such losses.

Adapun tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dalam melaksanakan fungsi pengurusan Perusahaan, diatur sebagai berikut:

The duties, responsibilities and authority of the Board of Directors in carrying out the Company's management functions are regulated as follows:

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan di bidang badan Usaha Milik Negara dan Anggaran Dasar Perusahaan, dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban untuk:

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya, serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan ketentuan persetujuan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
c. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi.
d. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan, yang terdiri dari catatan (yaitu neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan), bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha Perusahaan.
e. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit.
f. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
g. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
h. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi urusan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i. Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada triwulanan dan tahunan terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
j. Memelihara dan menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

In accordance with the provisions of the Regulations in the State-Owned Enterprises and the Company's Articles of Association, in carrying out their duties, the Board of Directors is obliged to:

a. Endeavor and guarantee the implementation of the Company's business and activities in accordance with its aims and objectives and business activities.
b. Prepare the Company's Long Term Plan, the Company's Annual Work Plan and Budget and other work plans, as well as amendments to be submitted to the Board of Commissioners and obtain approval from the Board of Commissioners, provided that the approval of the Board of Commissioners is determined after obtaining approval from the Series A Dwiwarna Shareholders.
c. Create a Shareholders List, Special List, minutes of GMS, and minutes of Directors' meetings.
d. Prepare an Annual Report, containing, among other things, Financial Reports, as a form of accountability for the management of the Company, as well as the Company's financial documents as intended in the Law on Company Documents, which consist of notes (annual balance sheets, annual profit and loss calculations, accounts, daily transaction journals, or any writing containing information regarding rights and obligations as well as matters relating to the Company's business activities), evidence of bookkeeping, and supporting financial administration data, which is proof of the existence of rights and obligations as well as the Company's business activities.
e. Prepare Financial Reports based on Financial Accounting Standards and submit them to public accountants for audit.
f. Submit the Annual Report after being reviewed by the Board of Commissioners no later than 5 (five) months after the Company's financial year ends to the GMS for approval and ratification.
g. Provide an explanation to the GMS regarding the Annual Report.
h. Submit the Balance Sheet and Profit and Loss Report approved by the GMS to the Minister in charge of legal affairs in accordance with the provisions of statutory regulations.
i. Prepare other reports required by statutory regulations, including but not limited to quarterly and annual reports related to the implementation of the Social and Environmental Responsibility Program (CSR)
j. Maintain and store at the Company's place of residence the Register of Shareholders, Special Register, minutes of the

risalah RUPS, risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen Perseroan lainnya.

k. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan.
l. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
m. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
n. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
o. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, (yang dilakukan melalui atau dikoordinasikan oleh kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna) dengan memperhatikan peraturan perundang undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku.
p. Membentuk unit Sekretaris Perusahaan.
q. Membentuk unit SPI.
r. Membentuk unit Manajemen Risiko.
s. Membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi.
t. Memiliki fungsi tata kelola terintegrasi.
u. Membentuk Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
v. Kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
w. Memenuhi dan melaksanakan tindakan-tindakan dalam rangka memenuhi hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perusahaan, dalam rangka hubungan dengan Dewan Komisaris, maka Direksi memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pemeriksaan oleh SPI kepada Dewan Komisaris.
b. Direksi berkewajiban menyampaikan kepada Dewan Komisaris kajian risiko untuk setiap aksi korporasi yang dilakukan dan pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan.
c. Direksi berkewajiban menyampaikan kepada Dewan Komisaris pelaksanaan dan implementasi Tata Kelola Terintegrasi di Perseroan.
d. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan atas sistem teknologi dan informasi yang digunakan oleh Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

GMS, minutes of meetings of the Board of Commissioners and minutes of meetings of the Board of Directors, Annual Report, and financial documents of the Company, and other Company documents.
k. Organize and maintain the Company's bookkeeping and administration in accordance with the applicable regulations.
l. Prepare an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and internal control principles, especially the functions of management, recording, storage and supervision.
m. Provide periodic reports according to the method and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies by considering the provisions of laws and regulations, especially regulations in the market sector. Capital.
n. Prepare the Company's organizational structure complete with details and duties.
o. Provide explanations regarding all matters asked or requested by Members of the Board of Commissioners and/or Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies of Series A Dwiwarna Shareholders, (which are carried out through or coordinated by the proxies of Series A Dwiwarna Shareholders) taking into account the laws and regulations, especially regulations in the Capital Market.

p. Establish a Corporate Secretary unit.
q. Establish an Internal Audit unit.
r. Establish a Risk Management unit.
s. Establish an Information Technology Steering Committee.
t. Has an integrated governance function.
u. Establish a Social and Environmental Responsibility Committee (TJSL).
v. Other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and determined by the GMS based on statutory regulations.
w. Fulfill and carry out actions in order to fulfill the rights of Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies.

Besides the obligations as referred to in the Company's Articles of Association, in the context of relations with the Board of Commissioners, the Board of Directors has the following obligations:

a. Obliged to submit a report on the implementation of the inspection by Internal Audit to the Board of Commissioners.
b. Obliged to submit to the Board of Commissioners the risk assessment for every corporate action carried out and the implementation of risk management in the Company.
c. Obliged to report to the Board of Commissioners the implementation of Integrated Governance in the Company.
d. Obliged to submit reports on the technology and information systems used by the Company to the Board of Commissioners.

e. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Perusahaan.
f. Direksi selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan berkewajiban menyampaikan laporan kinerja Anak Perusahaan setiap 3 (tiga) bulan.
g. Direksi berkewajiban menyampaikan pelaksanaan perjanjian dan pemenuhan hak-hak pihak ketiga atas perjanjian.

e. Obliged to submit reports on the procurement of goods and services carried out by the Company.
f. The Board of Directors as Shareholders of Subsidiaries are obliged to submit Subsidiary performance reports every 3 (three) months.
g. The Board of Directors is obliged to convey the implementation of the agreement and fulfill the rights of third parties regarding the agreement.

Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Perusahaan memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perusahaan.
b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang Anggota Direksi atau kepada seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk khusus untuk itu termasuk pegawai Perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain.
c. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pegawai Perusahaan, termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
f. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
g. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perusahaan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
h. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Authority of the Board of Directors

In carrying out their duties, the Board of Directors have the following authorities:

a. Establish appropriate policies in the management of the Company.
b. Regulate the transfer of the powers of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court to one or several members of the Board of Directors or to a person or several people specially appointed for this purpose including Company employees either individually or jointly and/or other bodies.
c. Regulate provisions regarding Company employees including determining wages, pensions or old age security, and other income for Company employees based on applicable laws and regulations.
d. Appoint and dismiss Company employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations.
e. Appoint and dismiss the Corporate Secretary and/or Head of the Internal Audit Unit with approval from the Board of Commissioners.
f. Write off bad debts according to the provisions in the Articles of Association and report to the Board of Commissioners to be later reported in the Annual Report.
g. No further collection of receivables for interest, fines, fees, and other receivables beyond the principal amount carried out in the context of restructuring and/or settlement of receivables as well as other acts in the context of settlement of the Company's receivables with the obligation to report to the Board of Commissioners whose terms and reporting procedures are determined by the Board Commissioner.
h. Carrying out all actions and other actions regarding the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company inside and outside the Court regarding all matters and all events, with restrictions as regulated in the regulations, Articles of Association, and/or GMS Decisions.

Pembagian Tugas Antar Direksi

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi, maka dilakukan pembagian tugas Direksi sesuai dengan fungsi masing-masing berdasarkan Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No.242/0100/2021 tentang Tugas,

Division of Duties Between Directors

In order to support the implementation of the duties of the Board of Directors, their duties are divided according to their respective functions based on the Decree of the Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 242/0100/2021 concerning the

Wewenang, Tanggung Jawab Direksi PT Bukit Asam Tbk dan dan Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 115/0100/2023 tentang Pembinaan Anak dan Afiliasi Serta Badan Hukum Terafiliasi PT Bukit Asam Tbk, dengan uraian berikut:

Duties, Authorities, and Responsibilities of the Directors of PT Bukit Asam Tbk and the Decree of the Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 115/0100/2023 concerning Subsidiaries Development and Affiliates and Affiliated Legal Entities PT Bukit Asam Tbk, with the following description:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Bidang Tugas** Scope of work
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	1. Berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta Keputusan Direksi; 2. Bertugas untuk mengkoordinasikan anggota Direksi lainnya, agar seluruh kebijakan berjalan sesuai dengan visi, misi, sasaran strategis, dan kebijakan yang ditetapkan; 3. Bertanggung jawab untuk menyelaraskan seluruh inisiatif internal Perusahaan dan memastikan terjadinya peningkatan kemampuan bersaing Perusahaan; 4. Mengarahkan, mengembangkan, dan menetapkan strategi pengelolaan Perusahaan secara menyeluruh sehingga menjamin terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance); 5. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; 6. Menyiapkan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP; 7. Menyiapkan kebijakan umum sistem pengendalian intern dan mengambil langkah- langkah yang diperlukan atas laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI); 8. Bertanggung jawab di bidang keterbukaan informasi kepada publik yang terkait dengan fungsi Sekretaris Perusahaan dan Administrasi Korporat, Audit Internal, Sistem Manajemen Perusahaan dan *Good Corporate Governance*; 9. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perusahaan; 10. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; 11. Melakukan pembinaan dan bertanggung jawab terhadap satuan-satuan kerja yang berada di bawah kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi, dan berwenang untuk mewakili dan menandatangani seluruh perikatan dan dokumen sehubungan dengan fungsi dan tugas satuan kerja yang berada di bawahnya ataupun perikatan yang merupakan kewenangannya berdasarkan Keputusan Direksi tersendiri; 12. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. 1. Has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company inside and outside the court in line with the provisions of the Company's Articles of Association and Directors' Decisions; 2. Tasked with coordinating other members of the Board of Directors, to manage all policies run in line with the vision, mission, strategic targets, and established policies; 3. Responsible for aligning all internal initiatives of the Company and ensuring improvement in the Company's competitive capabilities; 4. Directing, developing, and establishing a comprehensive Company management strategy to ensure the creation of good corporate governance; 5. Prepare the Company's Long-Term Plan, Company Annual Work Plan and Budget, and other work plans and amendments to be submitted to the Board of Commissioners and obtain approval from the Board of Commissioners; 6. Prepare WP&B which is an annual elaboration of RJPP; 7. Prepare general policies for the internal control system and take the necessary steps based on audit results reports prepared by the Internal Audit Unit (SPI); 8. Responsible for information disclosure to the public related to the functions of Corporate Secretary and Corporate Administration, Internal Audit, Company Management System, and Good Corporate Governance; 9. Establish appropriate policies in the Company's management; 10. Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities in line with its target and objectives and business activities; 11. Provide guidance and be responsible for work units under his authority as stipulated in the Board of Directors Decree, and have the authority to represent and sign all engagements and documents relating to the functions and duties of work units under his authority or activities that fall under his authority based on Separate Board of Directors decision; 12. Carry out other duties and responsibilities as regulated in the laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of work
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	1. Berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta Keputusan Direksi; 2. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional di bidang keuangan, anggaran, akuntansi, sekaligus memastikan ketersedian dana bagi pengembangan Perusahaan; 3. Bertanggung jawab dalam meningkatkan nilai Perusahaan (*corporate value*) melalui pengelolaan dana; 4. Melakukan pembinaan pendanaan dan keuangan terhadap Anak Perusahaan; 5. Memastikan ketersediaan dan berfungsinya sistem informasi Perusahaan; 6. Memastikan fungsi Manajemen Risiko Perusahaan berjalan efektif; 7. Bertanggung jawab atas evaluasi kinerja Anak Perusahaan; 8. Melakukan pembinaan dan bertanggung jawab terhadap satuan-satuan kerja yang berada di bawah kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi ini, dan berwenang untuk mewakili dan menandatangani seluruh perikatan dan dokumen sehubungan dengan fungsi dan tugas satuan kerja yang berada di bawahnya ataupun perikatan yang merupakan kewenangannya berdasarkan Keputusan Direksi tersendiri; 9. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. 10. Bertanggung jawab untuk melakukan Pembinaan terhadap Anak dan Afiliasi PTBA yang memiliki bidang usaha dan/atau kegiatan terkait investasi/portofolio murni (*absolute investment company*) yang kegiatannya hanya sebatas pada pengelolaan investasi anak perusahaan (baik *direct* ataupun *indirect subsidiary*) serta badan hukum terafiliasi PTBA sebagai berikut: a. PT Bukit Multi Investama; b. Dana Pensiun Bukit Asam; c. Yayasan Bukit Asam; d. Anak dan Afiliasi PTBA yang dibentuk, didirikan dan/atau berasal dari aksi korporasi di kemudian hari yang memiliki bidang usaha investasi/portofolio murni (*absolute investment company*), badan hukum terafiliasi lainnya dimana PTBA sebagai pendiri/*founder* (apabila dibutuhkan pembinaan), serta Anak dan Afiliasi PTBA lainnya yang ditetapkan oleh Direksi PTBA dikemudian hari menjadi bertanggung jawab Pembinaan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. 1. Has the authority to act on behalf of the Board of Directors and represent the company inside and outside the court in line with the provisions of the Company's Articles of Association and Directors' decisions; 2. Responsible for coordinating, controlling, and evaluating the implementation of operational tasks in the fields of finance, budgeting, accounting, as well as ensuring the availability of funds for the Company's development; 3. Responsible for increasing corporate value through fund management; 4. Provide funding and financial guidance to Subsidiaries; 5. Ensure the availability and function of the Company's information system; 6. Ensure that the Company's Risk Management function runs effectively; 7. Responsible for evaluating the performance of Subsidiaries; 8. Provide guidance and be responsible for work units under her authority as stipulated in this Board of Directors Decree, and have the authority to represent and sign all engagements and documents relating to the functions and duties of work units under her authority or engagements that fall under her authority based on a separate Board of Directors Decision; 9. Carry out other duties and responsibilities as regulated in the laws and regulations and the Company's Articles of Association. 10. Responsible for providing guidance to PTBA Subsidiaries and Affiliates who have business fields and/or activities related to investments/pure portfolios (absolute investment companies) whose activities are only limited to manage investments of subsidiary companies (either direct or indirect subsidiaries) as well as PTBA affiliated legal entities as follows: a. PT Bukit Multi Investama; b. Bukit Asam Pension Fund; c. Bukit Asam Foundation; d. PTBA's subsidiaries and affiliates formed, established, and/or originating from corporate actions at a later date which has a pure investment/portfolio business sector (absolute investment company), other affiliated legal entities where PTBA is the founder (if guidance is required), and other PTBA subsidiaries and affiliates determined by the PTBA Board of Directors will later become the responsibility of the Director of Finance and Risk Management.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of work
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	1. Berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta Keputusan Direksi; 2. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang penambangan batu bara, teknik, keselamatan pertambangan dan K3L, serta mengembangkan program efisiensi proses penambangan maupun produksi secara berkelanjutan, serta memastikan kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan *good mining practice*; 3. Melakukan pembinaan unit-unit operasional yang terdiri dari Unit Pertambangan Tanjung Enim, Unit Pertambangan Ombilin, termasuk melakukan pembinaan terhadap fungsi penunjang (fungsi pergudangan, keuangan, administrasi kepegawaian, pengadaan aset tanah dan briket), serta unit-unit pertambangan yang akan dibentuk di kemudian hari; 4. Bertanggung jawab untuk mengembangkan program efisiensi proses penambangan maupun produksi secara berkelanjutan; 5. Melakukan pembinaan terhadap unit-unit pelabuhan dan/atau dermaga meliputi Dermaga Kertapati, Pelabuhan Tarahan, dan Dermaga Teluk Bayur, serta unit-unit pelabuhan/dermaga yang akan dibentuk kemudian hari; 6. Bertanggung jawab terhadap bidang layanan umum yang berkaitan dengan penambangan; 7. bertanggungjawab untuk melakukan Pembinaan terhadap Anak dan Afiliasi PTBA yang telah memasuki tahap operasi dan produksi dan Anak Afiliasi PTBA yang merupakan penunjang operasi dan produksi (termasuk *investment company* yang memiliki kegiatan operasional) sebagai berikut: a. PT Internasional Prima Coal; b. PT Satria Bahana Sarana; c. PT Bukit Pembangkit Innovative; d. PT Bukit Energi Investama; e. PT Bukit Energi Service Terpadu; f. PT Bumi Sawindo Permai; g. PT Nasional Hijau Lestari; h. Anak dan Afiliasi PTBA yang dibentuk, didirikan dan/atau berasal dari aksi korporasi di kemudian yang telah memasuki tahap operasi dan produksi dan/atau memiliki kegiatan usaha penunjang operasi dan produksi (termasuk *investment company* yang memiliki kegiatan operasional), serta Anak dan Afiliasi PTBA lainnya yang ditetapkan oleh Direksi PTBA dikemudian hari menjadi tanggung jawab Pembinaan Direktur Operasi dan Produksi. 8. Melakukan pembinaan dan bertanggung jawab terhadap satuan-satuan kerja yang berada di bawah kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi ini dan berwenang untuk mewakili dan menandatangani seluruh perikatan dan dokumen sehubungan dengan fungsi dan tugas satuan kerja yang berada di bawahnya ataupun perikatan yang merupakan kewenangannya berdasarkan Keputusan Direksi tersendiri; 9. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. 1. Has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company inside and outside the court in line with the provisions of the Company's Articles of Association and Directors' Decisions; 2. Coordinate, control, and evaluate the implementation of operational tasks in the fields of coal mining, engineering, mining safety, and HSE, as well as developing sustainable mining and production process efficiency programs and also ensuring mining activities complying with the provisions of good mining practice; 3. Carry out development of operational units at Tanjung Enim Mining Unit and Ombilin Mining Unit, including providing guidance on supporting functions (warehousing, finance, personnel administration, procurement of land assets and briquettes), as well as mining units that will be established in the future; 4. Responsible for developing sustainable mining and production process efficiency programs; 5. Provide guidance to port and/or barging port units including Kertapati Barging Port, Tarahan Port, and Teluk Bayur Barging Port, as well as upcoming port/barging port in the future; 6. Responsible for public services related to mining; 7. Responsible for providing guidance to PTBA's subsidiaries and affiliates which have entered the operations and production stage and PTBA's affiliated subsidiaries which support operations and production (including investment companies which have operational activities) as follows: a. PT Internasional Prima Coal; b. PT Satria Bahana Sarana; c. PT Bukit Pembangkit Innovative; d. PT Bukit Energi Investama; e. PT Bukit Energi Service Terpadu; f. PT Bumi Sawindo Permai; g. PT Nasional Hijau Lestari; h. Subsidiaries and Affiliates of PTBA which were formed, established, and/or originated from corporate actions in the future which have entered the operation and production stage and/or have business activities supporting operations and production (including investment companies which have operational activities), as well as Subsidiaries and Affiliates Other PTBA determined by the PTBA Board of Directors will later become the responsibility of the Director of Operations and Production. 8. Carry out guidance and be responsible for the work units under his authority as stipulated in this Board of Directors Decree and have the authority to represent and sign all engagements and documents relating to the functions and duties of the work units under him or engagements that fall under his authority based on Separate Board of Directors decision; 9. 9. Carry out other duties and responsibilities as regulated in the Laws and Regulations and the Company's Articles of Association.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of work
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	1. Berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Direksi; 2. Bertanggung jawab atas proses penerimaan, pembinaan, dan pembangunan serta strategi pengelolaan SDM agar memiliki daya saing dan unggul; 3. Bertanggung jawab atas bidang hukum, perizinan, dan memastikan Perusahaan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Bertanggung jawab di bidang aset Perusahaan diantaranya tanah dan bangunan (selain aset Perusahaan yang merupakan kewenangan dari Direktur Pengembangan Usaha), layanan umum (khusus perumahan dan perkantoran) dan perawatan serta utilitas, dan pembangunan sipil; 5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Melakukan monitoring atas pembinaan dan pengembangan SDM pada anak Perusahaan, sehingga memberikan nilai tambah bagi Perusahaan; 7. Bertanggung jawab atas bidang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi; 8. Bertanggung jawab atas pembinaan terhadap Anak dan Afiliasi PTBA sebagai berikut: a. PT Bukit Asam Medika; b. PT Bukit Multi Properti; c. PT Batubara Bukit Kendi; d. Anak dan Afiliasi PTBA yang dibentuk, didirikan dan/atau berasal dari aksi korporasi di kemudian hari yang berkaitan dengan pengelolaan dan/atau pegembangan *human capital, human resources*, pendayagunaan/optimalisasi aset PTBA/Anak dan Afiliasi PTBA, dan perumahsakitan, serta Anak dan Afiliasi PTBA lainnya yang ditetapkan oleh Direksi PTBA dikemudian hari menjadi tanggungjawab Pembinaan Direktur Sumber Daya Manusia. 9. Melakukan pembinaan dan bertanggung jawab terhadap satuan-satuan kerja yang berada di bawah kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi ini dan berwenang untuk mewakili dan menandatangani seluruh perikatan dan dokumen sehubungan dengan fungsi dan tugas satuan kerja yang berada di bawahnya ataupun perikatan yang merupakan kewenangannya berdasarkan Keputusan Direksi tersendiri. 10. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. 1. Has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company inside and outside the court in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Directors' Decisions; 2. Responsible for the recruitment, coaching, and development process as well as HC management strategies to bring competitiveness and excellence in the Company's employees; 3. Responsible for legal issues, licensing, and ensuring the Company complies with the provisions of applicable laws and regulations; 4. Responsible for the Company's assets including land and buildings (aside from Company assets which are the authority of the Director of Business Development), public services (specifically housing and offices) and maintenance and utilities, and civil construction; 5. Appoint and dismiss Company employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations; 6. Monitoring the guidance and development of human capital in subsidiaries, thereby providing added value to the Company; 7. Responsible for the procurement of goods and services in line with the authority determined by the Directors' Decree; 8. Responsible for the development of PTBA Subsidiaries and Affiliates as follows: a. PT Bukit Asam Medika; b. PT Bukit Multi Properti; c. PT Batubara Bukit Kendi; d. PTBA Subsidiaries and Affiliates formed, established and/or originating from corporate actions in the future related to the management and/or development of human capital, human resources, utilization/optimization of PTBA/Subsidiary and PTBA Affiliate assets, and hospitals, as well as Subsidiaries and other PTBA Affiliates determined by the PTBA Board of Directors will later become the responsibility of the Human Resources Director. 9. Carry out guidance and be responsible for work units under his authority as stipulated in this Board of Directors Decree and have the authority to represent and sign all engagements and documents relating to the functions and duties of work units under his authority or engagements that fall under his authority based on Separate decision of the Board of Directors. 10. Carry out other duties and responsibilities as regulated in the Laws and Regulations and the Company's Articles of Association.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of work
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	1. Berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Direksi; 2. Bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi sumber daya dan cadangan batu bara yang berada di kawasan area kelolaan Perusahaan; 3. Bertanggung jawab terhadap fungsi strategi korporasi Perusahaan; 4. Melakukan kajian dan upaya pemberian nilai tambah sumber daya cadangan batu bara di area kelolaan Perusahaan; 5. Melakukan kajian dan merealisasikan rencana pengembangan usaha dengan dukungan inovasi SDM dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, ekonomis dan akuntabel; 6. Menginkubasi unit usaha baru yang terbentuk di bidang penambangan, energi, infrastruktur dan pembangkit listrik; 7. Bertanggung jawab terhadap pembangunan/proyek strategis infrastruktur perseroan dan pengembangan aset Perusahaan yang bersifat strategis; 8. Bertanggung jawab atas bidang komersial yang mencangkup pemasaran, penjualan dan distribusi, beserta dengan pengembangan dan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan bagi Perusahaan; 9. Bertanggung jawab atas pengembangan dan perluasan pemasaran produk Perusahaan; 10. Melakukan Pembinaan terhadap Anak dan Afiliasi PTBA yang masih dalam tahap pra-produksi, dalam proses pengembangan (*development*), inkubasi, dan *dormant,* serta Anak dan Afiliasi yang bergerak di bidang rantai pasok (*supply chain*) dan logistik (termasuk diantaranya yang memiliki kegiatan usaha jasa kepelabuhan/ dermaga, angkutan perairan, angkutan darat, dan angkutan perkeretaapian) sebagai berikut: a. PT Bukit Asam Prima; b. PT Bukit Prima Bahari; c. PT Pelabuhan Bukit Prima; d. PT Penajam International Terminal; e. PT Huadian Bukit Asam Power; f. PT Bukit Asam Banko; g. PT Bukit Asam Pasific Railways; h. PT Bukit Asam Metana Enim; i. PT Bukit Asam Metana Ombilin; j. Anak dan Afiliasi PTBA yang dibentuk, didirikan dan/atau berasal dari aksi korporasi di kemudian hari, namun masih tahap pra-produksi, dalam proses pengembangan (*development*), inkubasi, dan *dormant,* serta Anak dan Afiliasi yang bergerak di bidang rantai pasok (*supply chain*) dan logistik (termasuk diantaranya yang memiliki kegiatan usaha jasa kepelabuhan/dermaga, angkutan perairan, angkutan darat, dan angkutan perkeretaapian) serta Anak dan Afiliasi PTBA lainnya yang ditetapkan oleh Direksi PTBA dikemudian hari menjadi tanggungjawab Pembinaan Direktur Pengembangan Usaha. 11. Anak dan cucu Perusahaan lainnya yang didirikan kemudian atau menjadi anak atau cucu Perusahaan dari aksi korporasi Perusahaan di kemudian hari; 12. Melakukan pembinaan dan bertanggung jawab terhadap satuan-satuan kerja yang berada di bawah kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi ini dan berwenang untuk mewakili dan menandatangani seluruh perikatan dan dokumen sehubungan dengan fungsi dan tugas satuan kerja yang berada di bawahnya ataupun perikatan yang merupakan kewenangannya berdasarkan Keputusan Direksi tersendiri; 13. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. 1. Has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company inside and outside the court in line with the provisions of the Company's Articles of Association and Directors' Decisions; 2. Responsible for developing potential coal reserve resources in the Company's managed areas; 3. Responsible for the Company's corporate strategy function; 4. Conduct studies and efforts to provide added value to coal reserve resources in the Company's managed areas; 5. Conduct studies and realize business development plans with the support of HR innovation by utilizing appropriate, economical, and accountable technology; 6. Incubate new business units formed in the mining, energy, infrastructure, and power generation sectors; 7. Responsible for the development/strategic projects of the Company's infrastructure and the development of strategic company assets; 8. Responsible for the commercial sector which includes marketing, sales and distribution, along with the development and sustainable growth of income for the Company; 9. Responsible for the development and expansion of marketing of the Company's products; 10. Provide guidance to PTBA Subsidiaries and Affiliates in the pre-production stage, in the development, incubation and dormant processes, as well as Subsidiaries and Affiliates who are engaged in supply chain and logistics (including those with port/barging port service business activities, water transportation, land transportation, and railway transportation) are as follows: a. PT Bukit Asam Prima; b. PT Bukit Prima Bahari; c. PT Pelabuhan Bukit Prima; d. PT Penajam International Terminal; e. PT Huadian Bukit Asam Power; f. PT Bukit Asam Banko; g. PT Bukit Asam Pacific Railways; h. PT Bukit Asam Metana Enim; i. PT Bukit Asam Metana Ombilin; j. PTBA Subsidiaries and Affiliates which were formed, established and/or originate from corporate actions in the future, but are still in the pre-production stage, in the development, incubation and dormant process, as well as Subsidiaries and Affiliates which operate in the supply chain sector (supply chain) and logistics (including those with port/barging port service business activities, water transportation, land transportation, and rail transportation) as well as other PTBA subsidiaries and affiliates determined by the PTBA Board of Directors in the future to be the responsibility of the Director of Business Development. 11. Subsidiaries established in the future under PTBA from corporate actions of the Company at a later date; 12. Carry out guidance and be responsible for work units under his authority as stipulated in this Board of Directors Decree and have the authority to represent and sign all engagements and documents relating to the functions and duties of work units under his authority or engagements under his authority based on Separate Board of Directors decision; 13. Carry out other duties and responsibilities as regulated in the Laws and Regulations and the Company's Articles of Association.

Keputusan Direksi yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasa, dan RUPS

Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya, atau RUPS atau RUPS, untuk perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-581/MBU/09/2018 tanggal 6 September 2018 hal Persetujuan Usulan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk ("*Threshold*"), dan Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) No. SKK-19/MBU/03/2023 terkait kuasa pelaksanaan hak seri A Dwiwarna pada PT Bukit Asam Tbk beserta dengan perubahan-perubahannya yang meliputi pada aspek dan tingkat persetujuan sebagai berikut:

a. Level Persetujuan Berdasarkan Threshold Perseroan (RUPS, Dewan Komisaris & Seri A Dwiwarna, Dewan Komisaris, dan Direksi)

Board of Directors' Decisions Requiring Approval from the Board of Commissioners, Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies, and the GMS

The Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners, Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies, or the GMS, for actions classified in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Letter from the Minister of State-Owned Enterprises No. S-581/MBU/09/2018 dated September 6, 2018, regarding Approval of Proposed Limits and/or Criteria for the Authority of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk ("Threshold"), and Special Power of Attorney from the Minister of State-Owned Enterprises to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) No. SKK-19/MBU/03/2023 regarding the power to implement Dwiwarna series A rights at PT Bukit Asam Tbk along with changes including the following aspects and levels of approval:

a. Approval Level Based on Company Threshold (GMS, Board of Commissioners & Series A Dwiwarna, Board of Commissioners and Directors)

No	Tindakan Action	RUPS GMS	Dewan Komisaris & Seri A/ Kuasanya Board of Commissioner & Serie A/Proxies	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
1	Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perusahaan, kecuali yang dicatat sebagai persediaan Releasing/transferring and/or pledging Company assets, except those recorded as inventory	>50% total kekayaan bersih Perseroan *audited* terakhir >50% of the Company's total net assets from the last audit	≥100 Miliar* ≥100 billion*	≥75 Miliar* ≥75 Billion*	<75 Miliar* <75 Billion*
2	Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk KSO, KSU, kerjasama lisensi, BGS, BSG, BGM, dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama Establish cooperation with business entities or other parties, in the form of KSO, KSU, licensing cooperation, BGS, BSG, BGM, and other agreements of the same nature		≥100 Miliar atau jangka waktu >10 tahun-20 tahun ≥100 Billion or in term >10 years-20 years	≥75 Miliar atau jangka waktu >5 tahun-10 tahun ≥75 Billion or in term>5 years-10 years	≥75 Miliar atau jangka waktu <5 tahun ≥75 Billion or in term of <5 years
3	Melakukan penyertaan, melepskan penyertaan, serta perubahan struktur permodalan pada perusahaan lain Make an investment, release an investment, and changes in capital structure in other companies		≥75 Miliar ≥75 Billion	≥50 Miliar ≥50 Billion	<50 Miliar <50 Billion
4	Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan Establishing subsidiaries and/or joint ventures		≥75 Miliar ≥75 Billion	≥50 Miliar ≥50 Billion	<50 Miliar <50 Billion
5	Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran Anak Perusahaan dan *Joint Venture*, termasuk penyertaan modal pada perusahaan lain melalui Anak Perusahaan Conducting mergers, consolidations, takeovers, separations, dissolution of Subsidiaries and Joint Ventures, including capital participation in other companies through Subsidiaries		≥75 Miliar ≥75 Billion	≥50 Miliar ≥50 Billion	<50 Miliar <50 Billion
6	Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg/avalist*) Binding the Company as guarantor (borg/avalist)		≥300 Miliar ≥300 Billion	≥150 Miliar ≥150 Billion	<150 Miliar <150 Billion
7	Menerima pinjaman jangka panjang/menengah dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang bersifat operasional Receive long/medium term loans and give operational medium/long term loans		≥1 Triliun ≥1 Trillion	≥750 Miliar ≥750 Billion	<750 Miliar <750 Billion
8	Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/ panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada Anak Perusahaan Give non-operational short/medium/long term loans, except for loans to Subsidiaries		≥300 Miliar ≥300 Billion	≥150 Miliar ≥150 Billion	<150 Miliar <150 Billion
9	Menghapuskan piutang macet dan persediaan barang mati Erase bad debts and dead inventory		≥100 Miliar ≥100 Billion	≥75 Miliar ≥75 Billion	<75 Miliar <75 Billion

No	Tindakan Action	RUPS GMS	Dewan Komisaris & Seri A/ Kuasanya Board of Commissioner & Serie A/Proxies	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
10	Mengusulkan wakil Perusahaan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Propose Company representatives to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in Subsidiaries who make significant contributions to the Company and/or have strategic value as determined by the Board of Commissioners		Dirut dan Komut untuk seluruh Anak Perusahaan President Director and President Commissioner for all Subsidiaries		
			Seluruh Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan yang total Asetnya ≥50% dari aset induk dan/atau *revenue* anak ≥50% dari *revenue* induk (berdasarkan audit terakhir) All Directors and Commissioners of Subsidiaries whose total assets are ≥50% of all Directors and Commissioners of Subsidiaries whose total assets are ≥50% of parent assets and/or subsidiary revenue ≥50% of parent revenue (based on the last audit)	Seluruh Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan (Kecuali Direktur Utama dan Komisaris Utama) yang total Asetnya <50% dari aset induk dan/atau *revenue* anak <50% dari revenue induk (berdasarkan *audit* terakhir) All Directors and Commissioners of Subsidiaries (Except the President Director and President Commissioner) whose total assets are <50% of the parent's assets and/or subsidiary revenue <50% of the parent's revenue (based on the last audit)	

*nilai yang tertera hanya berlaku jika nilai tersebut <50% kekayaan bersih perusahaan (Pasal 102 ayat (1) UU 40/2007).
*the value stated is only valid if the value is <50% of the company's net assets (Article 102 paragraph (1) Law 40/2007)

b. Level Persetujuan di Luar *Threshold*

1. Tindakan-tindakan ini, merupakan tindakan Direksi Perusahaan yang tidak diatur dalam *Threshold*, namun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, SKK MIND, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk di bidang pasar modal), perlu mendapatkan persetujuan korporasi.
2. Tindakan-tindakan sebagaimana huruf b.1) di atas diantaranya:
   a. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan;
   b. Pengangkatan pemberhentian kepala/VP Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit) yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan;
   c. Persetujuan penetapan dan/atau perubahan *Charter* SPI;
   d. Perubahan logo Perusahaan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan;
   e. Penetapan/perubahan struktur organisasi satu tingkat di bawah Direksi Perusahaan, yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya;
   f. Persetujuan dan termasuk perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya;
   g. Persetujuan dan termasuk perubahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya;

b. Approval Level Beyond Threshold

1. These are actions of the Company's Board of Directors which are not regulated in the Threshold, but based on the provisions of the Company's Articles of Association, SKK MIND, and the provisions of applicable laws and regulations (including in the capital markets sector), that require corporate approval.
2. Actions as stated in letter b.1) include:
   a. Appointment and dismissal of the Corporate Secretary which requires approval from the Company's Board of Commissioners;
   b. Appointment and dismissal of the head/VP of the Internal Audit Unit which requires approval from the Company's Board of Commissioners;
   c. Approval of the determination and/or changes to the Internal Audit Charter;
   d. Changes to the Company's logo that require approval from the Company's Board of Commissioners;
   e. Determination/change to the organizational structure one level below the Company's Board of Directors, which requires approval from the Board of Commissioners and Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies;
   f. Approval and including changes to the Company's Work Plan and Budget which require approval from the Board of Commissioners and Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies;
   g. Approval and including changes to the Company's Long-Term Plan which require approval from the Board of Commissioners and Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies;

h. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perusahaan di mana sebelum persetujuan RUPS perlu mendapatkan persetujuan pemegang saham seri A Dwiwarna/kuasanya (apabila usulan berasal dari Direksi Perusahaan);
i. Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham pada Perusahaan yang perlu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham seri A Dwiwarna;
j. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran serta pengambilalihan Perusahaan oleh perusahaan lain, di mana sebelum ditetapkan oleh RUPS wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham seri A Dwiwarna.;
k. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Perusahaan, di mana berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham seri A/kuasanya;
l. Tindakan untuk melepaskan hak atas izin usaha pertambangan operasi produksi atau hak atas izin usaha pertambangan dalam bentuk lain yang sah yang sudah memasuki tahap operasi produksi, yang di mana berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham seri A/kuasanya;
m. Tindakan-tindakan transaksi yang bersifat material dengan mengacu level persetujuan sebagaimana a.1 s.d. a.9 di atas, kecuali berdasarkan peraturan di bidang pasar modal pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan (seperti pemegang saham utama/pengendali) tidak diperkenankan untuk memberikan persetujuan korporasi;
n. Tindakan Direksi yang merupakan transaksi afiliasi di bidang pasar modal yang membutuhkan persetujuan Organ UUPT, dengan ketentuan setiap pihak-pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan tidak diperkenankan untuk memberikan persetujuan dan/atau pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;
o. Tindakan Direksi yang merupakan transaksi benturan kepentingan, yang berdasarkan ketentuan peraturan di bidang pasar modal, diisyaratkan mendapatkan persetujuan korporasi seperti dari pemegang saham independen atau pihak lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan;
p. Tindakan Direksi yang masuk klasifikasi gabungan beberapa/semua transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi benturan kepentingan di bidang pasar modal yang diisyaratkan oleh peraturan di bidang pasar modal mendapatkan persetujuan korporasi;
q. Tindakan Direksi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku wajib mendapatkan persetujuan organ Perusahaan.

h. Approval of changes to the Company's articles of association where prior to approval of the GMS it is necessary to obtain approval from the Dwiwarna series A shareholders/their proxies (if the proposal comes from the Company's Directors);
i. Approval of changes to the share ownership structure of the Company which requires approval from Dwiwarna series A shareholders;
j. Approval regarding the merger, consolidation, separation, dissolution, and takeover of the Company by another company, which before being determined by the GMS must obtain approval from the Dwiwarna series A shareholders;
k. Actions that have not been determined within the Company, which based on the provisions of the Company's Articles of Association are required to obtain approval from the Board of Commissioners and series A shareholders/their proxies;
l. Actions to release the right to a mining business permit for production operations or the right to a mining business permit in other legal forms that has entered the production operation stage, which based on the provisions of the Articles of Association requires approval from the Board of Commissioners and series A shareholders/their proxies;
m. Material transaction actions refer to the level of approval as a.1 to a.9 points above, except that based on regulations in the capital market sector, parties who have a conflict of interest (such as the main/controlling shareholder) are not allowed to give corporate approval;
n. Actions of the Board of Directors which constitute affiliated transactions in the capital markets sector which require approval from the UUPT Organs, provided that any parties who have a potential conflict of interest are not allowed to provide approval and/or ratification in accordance with the applicable provisions in the capital markets sector;
o. Actions by the Board of Directors which constitute transactions which constitute a conflict of interest transaction, which, based on the provisions of regulations in the capital market sector, are required to obtain corporate approval such as from independent shareholders or other parties as required by the regulations;
p. Directors' actions that are classified as a combination of several/all material transactions, affiliated transactions, and/or conflict of interest transactions in the capital markets sector as required by regulations in the capital markets sector obtain corporate approval;
q. Directors' actions based on the provisions of other applicable laws and regulations must obtain approval from the Company's organs.

Kebijakan Rangkap Jabatan

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi Perusahaan mengacu kepada:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Usaha Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
2. Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Surat Edaran MIND ID No. SE-002/DIR/2020 tentang Petunjuk Pengusulan Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan di Lingkungan MIND ID;
4. Surat Wakil Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) No. 033/E.WADIRUT/IV/2023 tanggal 17 April 2023 Perihal Penyampaian Arahan Terkait Keberlakuan Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023;
5. Pedoman Kerja Direksi.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pasal 11 ayat (28) Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman Kerja Direksi, seorang anggota Direksi Perusahaan dilarang untuk merangkap jabatan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:
   a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
   b. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
   c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
   d. Pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
   e. Menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
   f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
   g. Jabatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap jabatan.
2. Rangkap jabatan di luar butir a di atas perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, dan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada huruf b, Anggota Direksi Perusahaan dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris pada badan usaha lain, kecuali:
   a. Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/perusahaan terafiliasi Perusahaan, selain sebagai Komisaris Utama; dan
   b. Dewan Komisaris pada badan usaha lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan Perusahaan sepanjang memperoleh izin dari Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Concurrent Position Policy

The Company's Concurrent Position Policy for Directors refers to:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
2. Company Articles of Association;
3. MIND ID Circular No. SE-002/DIR/2020 concerning Instructions for Nominating Candidates for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Companies within MIND ID;
4. Letter from the Deputy Director of PT Mineral Industri Indonesia (Persero) No. 033/E.WADIRUT/IV/2023 dated April 17, 2023, concerning the Submission of Directions Regarding the Implementation of SOEs Ministerial Regulation PER-3/MBU/03/2023;
5. Board of Directors' Work Guidelines.

In accordance with the provisions of applicable laws and regulations and Article 11 paragraph (28) of the Company's Articles of Association and Directors' Work Guidelines, a member of the Company's Board of Directors is prohibited from holding the following positions:

1. Members of the Board of Directors are prohibited from holding multiple positions as stated below:
   a. Member of the Board of Directors of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises;
   b. Members of the Board of Commissioners and/or Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
   c. Other structural and functional positions in central and regional government agencies/institutions;
   d. Political party administrators, members of the DPR, DPD, provincial DPRD, and district/city DPRD and/or regional heads/deputy regional heads;
   e. Become a candidate/member of the DPR, DPD, provincial DPRD, and district/city DPRD or a candidate for regional head/deputy regional head;
   f. Other positions that may rise a conflict of interest; and/or
   g. Other positions in accordance with statutory provisions are prohibited from being held concurrently.
2. Multiple positions outside of point a above require approval from the Board of Commissioners, and can be carried out as long as they do not conflict with the Articles of Association and applicable laws.
3. Apart from holding concurrent positions as referred to in letter b, members of the Company's Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as Members of the Board of Commissioners in other business entities, except:
   a. Board of Commissioners in Subsidiaries/affiliated companies of the Company, other than as President Commissioner; and
   b. Board of Commissioners in other business entities to represent/fight for the Company's interests as long as they obtain permission from the Minister of State-Owned Enterprises.

Berikut merupakan transparansi rangkap jabatan anggota Direksi Perusahaan per 31 Desember 2023.

Below is transparency of the concurrent positions of members of the Company's Board of Directors as of December 31, 2023.

Nama Name	PT Bukit Asam Tbk	Perusahaan /Intansi Lain Other Company/Institution	
	Jabatan Position	Perusahaan/ Badan Hukum Company/Insitution	Jabatan Position
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	Tidak ada None	Tidak ada None
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Tidak ada None	Tidak ada None
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	Tidak ada None	Tidak ada None
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	Tidak ada None	Tidak ada None
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	PT Internasional Prima Coal	Komisaris Commissioner

Kepemilikan Saham Direksi

Informasi kepemilikan saham Direksi pada PT Bukit Asam Tbk dapat dilihat di bagian Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

The Board of Directors' Shares Ownership

Information on the share ownership of the Board of Directors at PT Bukit Asam Tbk can be seen in the Company Share Ownership section by the Board of Commissioners and Directors in the Company Profile Chapter in this Annual Report book.

Rapat Direksi

Kebijakan

Rapat Direksi diselenggarakan oleh Direksi, dan segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi, baik yang dilakukan secara fisik maupun sirkuler dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan dan keputusan yang diambil demikian memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Hal-Hal yang Memerlukan Pengambilan Keputusan Melalui Rapat Direksi

Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui rapat Direksi sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, yaitu:
   a. Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direksi;
   b. Kewenangan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
   c. Kewenangan yang memerlukan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan Pemegang Saham Seri A atau Kuasanya;.
   d. Kewenangan yang memerlukan persetujuan RUPS.
2. Tindakan terkait pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
3. Tindakan strategis lainnya, dengan batasan:
   a. Bersifat strategis/signifikan mempengaruhi operasional Perusahaan;
   b. Di luar rencana dalam RKAP;
   c. Bersifat mendesak, atau;
   d. Menyangkut pegawai dalam jabatan strategis.

Board of Directors Meeting

Policy

Board of Directors meetings are held by the Board of Directors, and all Board of Directors decisions are taken at Board of Directors meetings, both physically and circularly, as long as all members of the Board of Directors have been notified in writing and all members of the Board of Directors have given their approval regarding the proposals submitted. Therefore, all decisions taken have the same force with decisions legally taken at the Board of Directors meeting.

Matters that Require Decision Making in Board of Directors Meetings

The Board of Directors determines matters that require decision making process through Board of Directors meetings as follows:

1. Actions related to the implementation of authority in accordance with the provisions of the Articles of Association, namely:
   a. Authority that requires approval from the Board of Directors;
   b. Authority that requires approval from the Board of Commissioners;
   c. Authority that requires a written response from the Board of Commissioners and approval from Series A Shareholders/Proxies;
   d. Authority that requires GMS approval.
2. Actions related to the procurement of goods and services in accordance with the provisions applicable to the Company.
3. Other strategic actions, with limitations:
   a. Strategically/significantly affecting the Company's operations;
   b. Outside the plan in the WP&B;
   c. Urgent, or;
   d. Concerning employees in strategic positions.

Jadwal Rapat

1. Rapat Direksi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila:
   a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi;
   b. Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris.

Agenda Rapat

1. Proses Penetapan Agenda Rapat
   Agenda rapat Direksi ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   a. Setiap anggota Direksi berhak mengajukan usulan agenda rapat;
   b. Usulan agenda rapat dapat diajukan selain oleh Direksi, namun tetap harus mendapatkan persetujuan dari Direktur terkait;
   c. Usulan agenda rapat dikumpulkan oleh Sekretaris Perusahaan untuk diverifikasi kecukupan syarat-syaratnya untuk diajukan sebagai agenda rapat;
   d. Anggota Direksi, yang usulan agendanya ditetapkan sebagai agenda rapat harus mempersiapkan materi yang memadai sesuai agenda yang diusulkannya.
2. Agenda Rapat Susulan
   Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Usulan agenda rapat tersebut harus dilengkapi dengan materi yang memadai;
   b. Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh anggota Direksi, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat. Untuk itu, anggota Direksi yang tidak hadir harus dihubungi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas agenda susulan tersebut;
   c. Apabila anggota Direksi yang tidak hadir tidak dapat dihubungi dalam waktu yang wajar, maka persetujuan agenda susulan tersebut diserahkan pada keputusan peserta rapat.
3. Kuorum Rapat
   Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah. Ketentuan mengenai pemberian kuasa tertulis dalam rapat diatur sebagai berikut:

   a. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.
   b. Seorang Direktur hanya dapat mewakili kehadiran seorang Direktur lainnya.
   c. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama

Meeting Schedule

1. Board of Directors meetings are held at least once every 1 (one) month.
2. The Board of Directors is obliged to hold regular meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners at least once every 4 (four) months.
3. Board of Directors meetings can be held at any time if:

   a. Deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;
   b. Upon written request from the Board of Commissioners.

Meeting Agenda

1. Meeting Agenda Determination Process
   The Board of Directors' meeting agenda is determined based on the following provisions:
   a. Each member of the Board of Directors has the right to submit a proposal for the meeting agenda;
   b. Proposed meeting agendas can be submitted by other than the Board of Directors, but must be approved from the relevant Director;
   c. The proposed meeting agenda is collected by the Corporate Secretary to verify the adequacy of the requirements to be submitted as a meeting agenda;
   d. Members of the Board of Directors, whose proposed agenda is set as the meeting agenda, must prepare adequate material according to their proposed agenda.
2. Follow-up Meeting Agenda
   Additional meeting agenda prior to the meeting date must comply these following provisions:

   a. The proposed meeting agenda must be accompanied by adequate materials;
   b. The agenda for the follow-up meeting must be approved by all members of the Board of Directors, both those present at the meeting and those not present at the meeting. For this reason, members of the Board of Directors who are absent must be contacted to obtain approval or rejection of the follow-up agenda;
   c. If a member of the Board of Directors who is absent cannot be contacted within a reasonable time, then approval of the follow-up agenda is left to the decision of the meeting participants.
3. Meeting Quorum
   A Board of Directors meeting is valid and has the right to make binding decisions if it is attended by more than ½ (half) of the number of members of the Board of Directors or their authorized representatives. Provisions regarding the granting of written power of attorney at meetings are regulated as follows:
   a. A member of the Board of Directors may be represented at a Board of Directors meeting only by another member of the Board of Directors based on a power of attorney.
   b. A Director can only represent the presence of another Director.
   c. Members of the Board of Directors who are unable to attend the Board of Directors meeting can submit their opinion in writing and sign it and then submit it to the President Director or Deputy President Director or to

atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin rapat Direksi tersebut, mengenai apakah akan mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat tersebut akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Direksi.

d. Kehadiran dalam rapat Direksi yang dilakukan melalui sarana elektronik.

Anggota Direksi dapat turut serta dalam rapat Direksi yang diadakan melalui melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat dan keturutsertaan tersebut menyatakan kehadiran yang bersangkutan dalam rapat Direksi tersebut.

Risalah Rapat

Setiap rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/ *dissenting opinion* anggota Direksi jika ada), dan hal-hal yang diputuskan. Satu salinan risalah rapat agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.

Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi. Risalah rapat harus dibuat kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

Setiap anggota Direksi berhak mendapatkan salinan risalah rapat, terlepas apakah Anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut.

Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, kepada yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 39 kali dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 14 kali, dengan agenda sebagai berikut:

other members of the Board of Directors who will chair the Board of Directors meeting, regarding whether they will support or not support the matters to be discussed and their opinions. These will be considered valid votes cast at the Board of Directors meeting.

d. Attendance at Board of Directors meetings conducted via electronic means.

Members of the Board of Directors can participate in Board of Directors meetings held via teleconference, video conference, or other electronic means that enable all Directors meeting participants to see and hear each other directly as well as participate in the meeting and participation indicates the person's presence at the Board of Directors meeting.

Minutes of Meetings

Each Board of Directors meeting must be written in the minutes of the meeting signed by the chairman of the Board of Directors meeting and all members of the Board of Directors present, containing the matters discussed (including statements of disapproval/dissenting opinions of members of the Board of Directors if any) and matters decided. A copy of the minutes of the meeting must be submitted to the Board of Commissioners.

Minutes of meetings are prepared and administered by the Corporate Secretary or other official appointed by the Board of Directors. Minutes of the meeting must be prepared and then signed by all members of the Board of Directors present and submitted to all members of the Board of Directors.

Every member of the Board of Directors has the right to receive a copy of the minutes of the meeting, regardless of whether the member of the Board of Directors concerned was present or not at the meeting.

If there is a member of the Board of Directors who does not sign the results of the meeting, the person concerned is obliged to state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.

The 2023 Board of Directors Meeting

Throughout 2023, the Board of Directors has held 39 internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners 14 times, with the following agenda:

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi
Tabel of Board of Directors Internal Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
1	6 Januari 2023 January 6, 2023	Update Perkembangan Insentif Jangka Panjang Update on Long-Term Incentive Development	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi

Tabel of Board of Directors Internal Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
2	10 Januari 2023 January 10, 2023	Rencana Rekruitmen Pegawai Jenjang S1 Recruitment plan for undergraduate employees	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
3	12 Januari 2023 January 12, 2023	Rapat *Talent Committee* PTBA Meeting on PTBA Talent Committee	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
4	21 Februari 2023 February 21, 2023	1. *Cost Overrun* PLTU Sumsel 8 2. Harga Penjualan di bawah RKAP 3. Skema harga *Free on Truck* Mulut Tambang (FOMT) 1. Cost Overrun Sumsel-8 CFPP 2. Sales price below WP&B 3. Free on Truck Mine Mouth (FOMT) price scheme	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
5	9 Maret 2023 March 9, 2023	1. *Long Term Incentives (LTI) Presentation with Delloitte Consulting* 2. Rencana Penggunaan tanah di Kalimantan untuk kantor IPC 3. Rencana pengadaan tanah di Lampung 4. *Bulk Trading* 1. Long Term Incentives (LTI) Presentation with Delloitte Consulting 2. Land use plan in Kalimantan for the IPC office 3. Land acquisition plan in Lampung 4. Bulk Trading	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
6	13 Maret 2023 March 13, 2023	1. Paparan hasil rapat optimasi 2. Pelepasan IPPKH 3. Kontrak penambangan 4. Paparan project PLTS BEI 5. PLTU-Smelter Beginjan 6. *Update* paparan negosiasi kepada BPH Migas 1. Presentation of the results of the optimization meeting 2. Release of IPPKH 3. Mining contracts 4. Presentation to the BEI SPPP project 5. Beginjan Coal Power Plant Smelter 6. Update on negotiation presentation to Regulatory Agency for Upstream Oil and Gas	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
7	27 Maret 2023 March 27, 2023	1. Pengelolaan remunerasi dan *Human Capital cost* 2. Draft KPI Manajemen 2023 3. Update progress aset lain-lain DPBA 4. Rencana likuidasi BAMO 5. Presentasi BSP 6. Update BBK 7. Tantiem Direksi 1. Management of remuneration and Human Capital costs 2. Draft Management 2023 KPI 3. Update progress on other DPBA assets 4. BAMO liquidation plan 5. BSP Presentation 6. Update BBK 7. Bonus for directors	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
8	3 April 2023 April 3, 2023	1. Pengembangan *Hydrogen to Power* 2. Presentasi draft SSA HBAP 1. Development on Hydrogen to Power 2. Presentation on SSA HBAP draft	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
9	13 April 2023 April 13, 2023	Pembahasan Proyek Tarahan 2 Discussing Tarahan 2 project	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
10	5 Mei 2023 May 5, 2023	1. Pembahasan Kinerja Q1 2023 2. Persiapan *Analyst Meeting* 1. Discussion on 2023 Q1 performance 2. Analyst meeting preparation	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
11	19 Mei 2023 May 19, 2023	1. Persiapan Pendampingan Komisi VII 2. Kondisi proyeksi TW II 3. Perubahan Anggaran Dasar MIND ID 4. Implementasi Permen BUMN No. 3 1. Preparation for Assistance to Commission VII 2. TW II projection conditions 3. Changes to MIND ID's Articles of Association 4. Implementation of SOEs Ministerial Regulation Number 3	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi

Tabel of Board of Directors Internal Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
12	22 Mei 2023 May 22, 2023	1. Perhitungan MIP 2. Potensi Bisnis BAP 1. MIP Calculation 2. BAP business potential	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
13	28 Mei 2023 May 28, 2023	1. Pekerjaan SBS 2. Skema pengawasan & Evaluasi Kinerja AAP 1. SBS work 2. Monitoring scheme and performance evaluation on AAP	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
14	30 Mei 2023 May 30, 2023	1. Rencana RUPS Anak dan Afiliasi Perusahaan PTBA 2. Perbandingan kinerja PTBA vs *Peers* 3. Evaluasi HPP dan Rencana Tambang Banko Tengah Utara 1. GMS Plan for PTBA's Subsidiaries and Affiliate Companies 2. Comparison of PTBA vs Peers performance 3. Evaluation of HPP and Banko Tengah Utara Mine Plan	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
15	6 Juni 2023 June 6, 2023	1. Rencana pembangunan TLS 6 & 7 2. Usulan konstruksi BACBIE 3. Penambangan oleh PT Andalas Bara Sejahtera (PT ABS) di IUP PTBA 4. Hasil kajian restrukturisasi BMI 1. Development plan on TLS6&7 2. BACBIE construction proposal 3. Mining by PT Andalas Bara Sejahtera (PT ABS) at PTBA IUP 4. Results of BMI restructuring studies	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
16	9 Juni 2023 June 9, 2023	1. Paparan rencana iuran tambahan DPBA 2. Paparan kajian Penilaian Pre-Implementasi SAP 3. Paparan piutang Lianex 1. Exposure to DPBA additional contribution plans 2. Presentation of SAP Pre-Implementation assessment studies 3. Lianex receivables exposure	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
17	19 Juni 2023 June 19, 2023	Remunerasi AAP AAP remuneration	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
18	21 Juni 2023 June 21, 2023	1. Remunerasi AAP 2. *Unfreeze* BAP 3. Simulasi Kinerja 2023 4. Persiapan revisi RKAP 2023 5. Rencana jalur khusus angkutan batu bara 6. Rencana tambang Peranap 1. AAP Remuneration 2. Unfreeze BAP 3. 2023 Performance Simulation 4. Preparation for the 2023 WP&B revision 5. Plan for a special coal transportation route 6. Peranap mine plan	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
19	15 Juli 2023 July 15, 2023	1. Skema optimasi penambangan 2023 2. Rencana penjualan 2023 - revisi RKAB 3. *Update* jalan *hauling* batu bara Muara Enim 4. *Update* PETI 5. Paparan kajian pemenuhan BBM 6. Paparan efisiensi perawatan 1. Organisasi Unit Penambangan Ombilin (UPO) 2. Paparan hasil konsinyering tim *cost overrun* Sumsel 8 3. Mining optimization scheme 2023 4. 2023 sales plan - revised RKAB 5. Update on the Muara Enim coal hauling road 6. PETI Update 7. Presentation of fuel compliance studies 8. Maintenance efficiency exposure 9. Ombilin Mining Unit Organization (UPO) 10. Presentation of the results of the Sumsel 8 cost overrun team's consignment	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
20	18 Juli 2023 July 18, 2023	1. Perubahan RKAP 2023 2. Pembahasan *cost overrun* HBAP 1. Changes in 2023 WP&B 2. HBAP cost overrun discussion	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi
Tabel of Board of Directors Internal Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
21	11 Agustus 2023 August 11, 2023	1. Pembahasan Proyek Kramasan 2. Pembangunan kantor Direksi 3. Paparan gedung *IoT & Management* 4. Paparan harga jual BA-61 5. Pembahasan kinerja SBS Juli 2023 6. Pembahasan kontrak PAMA 1. Discussion of the Kramasan project 2. Construction of the Directors' office 3. IoT & Management building exposure 4. Display of selling prices for BA-61 5. Discussion of SBS performance in July 2023 6. Discussion of the PAMA contract	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
22	15 Agustus 2023 August 15, 2023	1. Pembahasan tantiem Direksi 2. Rencana pemanfaatan kendaraan listrik operasional DIreksi 1. Discussion on Board of Directors' bonus 2. Plan to use electric vehicle for Board of Directors	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
23	21 Agustus 2023 August 21, 2023	1. Pembahasan *cost overrun* HBAP 2. Pembahasan tantiem AAP 3. Pembahasan BSC 1. Discussion of HBAP cost overrun 2. Discussion of AAP bonuses 3. BSC discussion	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
24	27 Agustus 2023 August 27, 2023	Pembahasan hasil Rekrutmen Bersama BUMN Discussion on SOEs joint recruitment	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
25	28 Agustus 2023 August 28, 2023	Pembahasan usulan organisasi *Office of the Board* Discussion on Office of the Board organization	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
26	15 September 2023 September 15, 2023	1. *Update Office of the Board* 2. Paparan Proyek Keramasan 3. Paparan tantiem Anak dan Afiliasi Perusahaan PTBA 1. Office of the Board update 2. Presentation on Kramasan Project 3. Presentation on bonus for PTBA subsidiaries and affiliates	• Arsal Ismail • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
27	20 September 2023 September 20, 2023	1. Kontrak KAI 2. Pemilihan Pengurus SPBA 2023-2024 3. RKAP 2024 4. KAI Contract 5. Nomination for SPBA board in 2023-2024 6. 2024 WP&B	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
28	3 Oktober 2023 October 3, 2023	1. *Update* Project Kramasan 2. Pengurus Anak dan Afiliasi Perusahaan 3. Setoran Modal PT BAP 1. Kramasan Project Update 2. Management of PTBA Subsidiaries and Affiliates 3. PT BAP Capital Deposit	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
29	10 Oktober 2023 October 10, 2023	1. Calon pengguna Kantor dan Gedung TE 2. Penyelesaian uang muka SBS 3. *Cost overrun* HBAP 1. Prospective TE Office and Building users 2. Settlement of SBS advances 3. HBAP cost overrun	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
30	12 Oktober 2023 October 12, 2023	1. Pembahasan investasi Rumah Sakit 2. Pembahasan Peraturan Dana Pensiun PTBA 3. Penetapan pedoman pengadaan strategis 1. Discussion of Hospital investment 2. Discussion of PTBA Pension Fund Regulations 3. Establishment of strategic procurement guidelines	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
31	18 Oktober 2023 October 18, 2023	Pembahasan RKAP 2024 2024 WP&B discussion	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi
Tabel of Board of Directors Internal Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
32	23 Oktober 2023 October23, 2023	Prognosa FInal Produksi 2023 2023 final production prognosis	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
33	27 Oktober 2023 October 27, 2023	1. Tindak lanjut *Leader Workshop Alignment* 2. Penjualan *Free on Truck* 3. *Roadmap* penyehatan Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) 4. *Invoice Fuel PT KAI* 1. Follow up with Alignment Workshop Leaders 2. Free on Truck Sales 3. Roadmap for restructuring the Bukit Asam Pension Fund (DPBA) 4. PT KAI Fuel Invoice	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
34	6 November 2023 November 6, 2023	1. Rencana pengembangan bisnis BMI 2. *Update* pedoman *Free on Board Mother Vessel* (FOB MV) 3. Penyelerasan kontrak Manajemen ke KPI BSC TW-III & IV 2023 1. BMI business development plan 2. Updated Free on Board Mother Vessel (FOB MV) guidelines 3. Alignment of Management contracts to KPI BSC TW-III & IV 2023	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
35	22 November 2023 November 22, 2023	Paparan perubahan Pedoman Pengadaan PTBA Presentation on changes to the PTBA Procurement Guidelines	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
36	24 November 2023 November 24, 2023	1. FOB MV Pelabuhan lain 2. BATIC (Bukit Asam Business Analytics) 3. Nilai tunai Bumiputera 1. FOB MV other Port 2. BATIC (Bukit Asam Business Analytics) 3. Bumiputera cash value	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
37	4 Desember 2023 December 4, 2023	RKAP 2024 2024 WP&B	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
38.	6 Desember 2023 December 6. 2023	1. Pengisian Personil Organisasi 2. PSAK 24 1. Filling in Organizational Personnel 2. PSAK 24	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
39.	27 Desember 2023 December 27, 2023	1. Update Project Prajen 2. Rencana Penjualan Batu Bara 2024 3. Paparan Alternatif Project ICBT 1. Update on Project Prajen 2. 2024 Coal Sales Plan 3. Presentation of ICBT Project Alternatives	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra

Tabel Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Board of Directors and Board of Commissioners' Joint Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
1	13 Januari 2023 January 13, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Desember tahun 2022 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Desember tahun 2022 3. Pembahasan Kinerja Anak/Cucu Perusahaan Triwulan IV Tahun 2022 4. Pembahasan KPI Tahun 2022 1. Discussion of Company Performance in December 2022 2. Discussion of Strategic Project Progress up to December 2022 3. Discussion of the Performance of the Company's Subsidiaries in the Fourth Quarter of 2022 4. Discussion of 2022 KPIs	• Agus Suhartono • Andi Pahril pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Devi Pradnya Paramita • Irwandy Arif • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi

Tabel Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Board of Directors and Board of Commissioners' Joint Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
2	13 Februari 2023 February 13, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Januari tahun 2023 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Januari tahun 2023 3. Pembahasan hasil asesmen GCG Tahun 2022 1. Discussion of Company Performance in January 2023 2. Discussion of Strategic Project Progress up to January 2023 3. Discussion of the results of the 2022 GCG assessment	• Agus Suhartono • Andi Pahril pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Devi Pradnya Paramita • Irwandy Arif • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
3	13 Maret 2023 March 13, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Februari 2023 s.d Bulan Februari 2023 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis Februari s.d. Februari tahun 2023 1. Discussion of Company Performance for February 2023 to February 2023 2. Discussion of Strategic Project Progress February up to February 2023	• Agus Suhartono • Andi Pahril pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Devi Pradnya Paramita • Irwandy Arif • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
4	9 April 2023 April 9, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu Perusahaan bulan Maret 2023 dan Triwulan I 2023 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis Triwulan I tahun 2023 3. Pembahasan KPI Triwulan I tahun 2023 1. Discussion of Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries in March 2023 and 2023 Q1 2. Discussion of Strategic Project Progress for 2023 Q1 3. Discussion of Q1 KPI in 2023	• Agus Suhartono • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Irwandy Arif • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
5	15 Mei 2023 May 15, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan bulan April 2023 dan s.d. bulan April 2023 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis April s.d. April tahun 2023 3. Paparan Hasil Kajian Korn Ferry terkait Penetapan Perhitungan Tantiem tahun 2023 dan Gaji/Honorarium Tahun 2023 bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk 4. Pembahasan Evaluasi Jabatan GM Unit Pertambangan Ombilin 1. Discussion of Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries in April 2023 and up to April 2023 2. Discussion of Strategic Project Progress April to April 2023 3. Presentation of Korn Ferry Study Results regarding Determination of 2023 Bonus Calculation and 2023 Salary/Honorarium for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk 4. Discussion on the Evaluation of GM Position in Ombilin Mining Unit	• Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Irwandy Arif • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
6	8 Juni 2023 June 8, 2023	1. Pembahasan Perubahan Anggaran Dasar 2. Pembahasan Progres KPI Triwulan I 2023 dan Tindak Lanjut Monev PTBA 1. Discussion of Amendments to the Articles of Association 2. Discussion of KPI Progress for the First Quarter of 2023 and PTBA Monev Follow-up	• Irwandy Arif • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
7	14 Juni 2023 June 14, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Mei 2023 dan s.d. bulan Mei 2023 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d Mei tahun 2023 3. Pembahasan Proyek KPI April dan Mei 2023 dan Tindak Lanjut Monev PTBA (Table Monev Terlampir) 1. Discussion of Company Performance in May 2023 and up to in May 2023 2. Discussion of Strategic Project Progress until May 2023 3. Discussion of April and May 2023 KPI Projects and PTBA Monev Follow-up (Monev Table Attached)	• Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Irwandy Arif • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
8	14 Juli 2023 June 14, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Juni 2023 dan s.d. bulan Juni 2023; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d Triwulan II tahun 2023; 3. Pembahasan Progres KPI Juni s.d Triwulan II Tahun 2023; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev Triwulan I PTBA; 1. Discussion of Company Performance in June 2023 and up to June 2023 2. Discussion of Strategic Project Progress up to 2023 Q2 3. Discussion of KPI Progress June up to 2023 Q2 4. Discussion of PTBA's First Quarter Monitoring and Evaluation Follow-up	• Irwandy Arif • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Kurnia Toha • Rahmat Hidayat P • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi

Tabel Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Board of Directors and Board of Commissioners' Joint Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
9	15 Agustus 2023 August 15, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan Bulan Juli s.d. Juli tahun 2023 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. April tahun 2023 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Juli 2023 dan Tindak Lanjut Monev PTBA 1. Discussion of Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries in July up to July 2023 2. Discussion of Strategic Project Progress up to April 2023 3. Discussion of KPI Progress up to July 2023 and PTBA Monev Follow-up	• Irwandy Arif • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Kurnia Toha • Rahmat Hidayat P • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
10	8 September 2023 September 8, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan Bulan Agustus dan s.d. Agustus tahun 2023. 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Agustus tahun 2023 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Agustus 2023; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Agustus 2023; 1. Discussion of Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries in August and up to August 2023 2. Discussion of Strategic Project Progress up to August 2023 3. Discussion of KPI Progress up to August 2023 4. Discussion on follow-up monitoring and evaluation of PTBA to August 2023	• Irwandy Arif • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Kurnia Toha • Rahmat Hidayat P • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
11	22 September 2023 September 22, 2023	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan (RKAP) PT Bukit Asam Tbk Tahun 2024 Ratification of the Work Plan and Company Budget (WP&B) of PT Bukit Asam Tbk for 2024	• Irwandy Arif • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Kurnia Toha • Rahmat Hidayat P • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
12	13 Oktober 2023 October 13, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan bulan September dan Triwulan III Tahun 2023; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d Triwulan III tahun 2023; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. September 2023; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. September 2023; 5. Pembahasan terkait Keselamatan kerja, Lingkungan, dan CSR. 1. Discussion of Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries in September and 2023 Q3 2. Discussion of Strategic Project Progress up to 2023 Q3 3. Discussion of KPI Progress up to September 2023 4. Discussion on follow-up monitoring and evaluation of PTBA to September 2023 5. Discussions on to work safety, environment and CSR.	• Irwandy Arif • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Kurnia Toha • Rahmat Hidayat P • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
13	13 November 2023 November 13, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan bulan Oktober Tahun 2023; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Oktober tahun 2023; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Oktober 2023; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Oktober 2023; 1. Discussion of Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries in October 2023; 2. Discussion of Strategic Project Progress until October 2023 3. Discussion of KPI Progress up to October 2023 4. Discussion on follow-up monitoring and evaluation of PTBA to October 2023	• Irwandy Arif • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Kurnia Toha • Rahmat Hidayat P • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
14	15 Desember 2023 December 15, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan bulan November s.d. November Tahun 2023; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. November tahun 2023; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. November 2023; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. November 2023; 1. Discussion of Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries from November to November 2023 2. Discussion of Strategic Project Progress until November 2023 3. Discussion of KPI Progress up to November 2023 4. Discussion on follow-up monitoring and evaluation of PTBA to November 2023	• Irwandy Arif • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Kurnia Toha • Rahmat Hidayat P • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi

Adapun tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat, termuat dalam tabel berikut:

The attendance rate of members of the Board of Directors at meetings is detailed in the following table:

Tabel Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Direksi
Board of Directors' Attendance on Internal Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Direksi Board of Directors' Internal Meeting		
		Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance Rate
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	39	39	100%
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	39	38	97%
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	39	39	100%
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	39	39	100%
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	39	39	100%

Tabel Kehadiran Anggota Direksi Pada Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris
Board of Directors' Attendance in Joint Meetings with Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisartis Joint Meetings Board of Directors and Board of Commissioners		
		Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance Rate
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	14	14	100%
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	14	14	100%
Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	14	14	100%
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	14	14	100%
Kurnia Toha*	Komisaris Independen Independent Commissioner	7	7	100%
Rahmat Hidayat Pulungan*	Komisaris Independen Independent Commissioner	7	7	100%
Agus Suhartono**	Komisaris Utama/ Independen President Commissioner/Independent	4	4	100%
Devi Pradnya Paramita***	Komisaris Commissioner	3	3	100%
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	14	14	100%
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	14	14	100%
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	14	14	100%
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	14	14	100%
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	14	14	100%

Catatan | Notes
* menjabat sejak 15 Juni 2023
** menjabat hingga 11 April 2023
*** menjabat hingga 21 Maret 2023.
* served since June 15, 2023
** served until April 11, 2023
*** served until March 21, 2023.

Program Pengenalan Perusahaan bagi Direksi Baru

Perusahaan menyelenggarakan kegiatan program pengenalan bagi Direksi yang baru diangkat untuk pertama kali. Kegiatan ini bersifat wajib sebagaimana tercantum dalam *Board Manual*, dan bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman terkait Perusahaan kepada anggota Direksi yang baru diangkat. Penyelenggaraan program pengenalan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Direksi yang baru. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan. Apabila dibutuhkan, dapat pula dilakukan program pengenalan atas anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi. Adapun materi yang harus disampaikan pada program pengenalan mencakup:

1. Tata Kelola yang berlaku di PTBA sebagai anggota dari Grup MIND ID, termasuk mengenai pedoman dan/atau kebijakan yang melibatkan peran MIND ID selaku *holding* pertambangan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Surat Kuasa Khusus (SKK) Kementerian BUMN, maupun kebijakan lain yang berlaku;
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance)* oleh Perusahaan;
3. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal, dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
5. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Pada tahun 2023, Perusahaan tidak menyelenggarakan Program Pengenalan bagi anggota Direksi, karena sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengangkatan anggota Direksi baru.

Company Induction Program for New Directors

The company conducts an induction program for newly appointed Directors. This activity is mandatory as stated in the Board Manual, and aims to introduce and provide understanding regarding the Company to newly appointed members of the Board of Directors. The introduction program is carried out no later than 90 (ninety) calendar days after the GMS decides on the appointment of new members of the Board of Directors. The Company's introduction program is carried out in the form of presentations, meetings, visits to the Company's business units, and review of documents or other programs. If necessary, an introduction program can also be carried out for subsidiaries and affiliated companies. The material that is mandatory to be presented in the introductory program includes:

1. Governance that applies to PTBA as a member of the MIND ID Group, including guidelines and/or policies involving MIND ID's role as a mining holding company, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Special Power of Attorney (SKK) of the Ministry of SOEs, and other policies applicable;
2. Implementation of the principles of good corporate governance by the Company;
3. An overview of the Company related to its objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
4. Information related to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
5. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors as well as permitted matters

In 2023, the Company did not conduct an Introduction Program for members of the Board of Directors, since there was no appointment of new members of the Board of Directors.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Kebijakan

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi, maka Anggota Direksi harus secara teratur menerima program pelatihan, pengembangan pengetahuan, dan sertifikasi yang relevan, mandiri, dan berkelanjutan. Untuk memfasilitasi *update knowledge* tersebut, maka anggota Direksi perlu diberikan pelatihan, *workshop*, seminar, *conference* atau bentuk lainnya yang bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Direksi.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Tahun 2023

Program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh anggota Direksi sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada Bab Profil.

Competency Training and Development

Policy

In order to support the effective implementation of the duties of the Board of Directors, members of the Board of Directors must regularly receive relevant, independent and sustainable training, knowledge development, and certification programs. To facilitate this update knowledge, they need to receive training, workshops, seminars, conferences, and other forms to increase their effectiveness in the Company.

Training and/or Competency Improvement in 2023

The training and competency improvement programs attended by members of the Board of Directors can be seen in the Profile Chapter.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Sepanjang tahun 2023, Direksi Perusahaan telah melakukan tindakan atau membuat keputusan strategis utamanya terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Aktifikasi kegiatan bisnis PT Bukit Asam Prima yang merupakan entitas anak perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan batu bara;
2. Pengakhiran rencana akuisisi PT Tabalong Prima Resources dan PT Mitra Hasrat Bersama yang dilakukan melalui entitas anak perusahaan PT Internasional Prima Coal;
3. Menetapkan rencana dekarbonisasi dan manajemen karbon;
4. Rencana diversifikasi usaha melalui hilirisasi batubara;
5. Menyusun *roadmap* ESG dalam rangka mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan;
6. Pengembangan kapasitas angkutan batu bara Tanjung Enim-Kramasan dengan melakukan *groundbreaking Train Loading Station* (TLS) 6 dan 7 di Tanjung Enim.

Komite di Bawah Direksi dan Penilaiannya

Dalam rangka mendukung kinerja Direksi PTBA, selain terdapat satuan kerja, Direksi PTBA pun membentuk beberapa komite, yakni:

1. Komite Lingkungan
   Komite lingkungan merupakan komite yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan PTBA. Komite lingkungan berada di lokasi kerja (i) Unit Pertambangan Tanjung Enim, (ii) Pelabuhan Tarahan, dan (iii) Dermaga Kertapati.
   Komite Lingkungan sendiri memiliki detail fungsi, yakni:
   - Sistem manajemen lingkungan;
   - Penilaian daur hidup dan dekarbonisasi;
   - Efisiensi energi;
   - Penurunan emisi;
   - Efisiensi air dan penurunan beban air limbah;
   - Pengurangan dan pemanfaatan limbah B3;
   - Pengurangan dan pemanfaatan limbah non-B3;
   - Perlindungan keanekaragaman hayati;
   - Pembinaan masyarakat/inovasi sosial;
   - Tanggap bencana;
   - Kendali kerusakan lahan;
   - Dokumen lingkungan dan dokumen SIMPEL.

   Evaluasi kinerja Komite Lingkungan yang dilakukan oleh Direksi PTBA, yakni dengan ketercapaian atas target penghargaan PROPER yang diterima oleh setiap unitnya.

2. Komite Investasi dan Lindung Nilai
   Komite ini memiliki tugas penting sebagai berikut:
   a. Melakukan analisa tingkat risiko dan pengembalian dari jenis-jenis investasi pada instrumen keuangan dan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas nilai tukar valuta asing yang tersedia di pasar;

Decisions and Implementation of Board of Directors' Duties

In 2023, PTBA Board of Directors has taken actions or made strategic decisions primarily related to the following matters:

1. Activation of the business activities of PT Bukit Asam Prima, which is a subsidiary entity engaged in coal trading;
2. Termination of the planned acquisition of PT Tabalong Prima Resources and PT Mitra Hasrat Bersama which was carried out through the subsidiary PT Internasional Prima Coal;
3. Establish a decarbonization and carbon management plan;
4. Business diversification plans through coal downstreaming;
5. Develop an ESG roadmap to support the company's business sustainability;
6. Developing Tanjung Enim-Kramasan coal transportation capacity by groundbreaking Train Loading Station (TLS) 6 and 7 in Tanjung Enim.

Committees Under the Board of Directors and Their Assessment

In order to support the performance of the Bukit Asam Board of Directors, besides having work units, the Bukit Asam Board of Directors also formed several committees, namely:

1. Environmental Committee
   This committee is responsible for environmental management in the PTBA environment. Environmental committees are located at work locations (i) Tanjung Enim Mining Unit, (ii) Tarahan Port, and (iii) Kertapati Barging Port. The Environmental Committee itself has detailed functions, namely:
   - Environmental management system
   - Life cycle assessment (LCA) and decarbonization
   - Energy efficiency
   - Emissions reduction
   - Water efficiency and reduced waste water load
   - Reduction and utilization of B3 waste
   - Reduction and utilization of non-B3 waste
   - Protection of biodiversity
   - Community development/social innovation
   - Disaster response
   - Control land damage
   - Environmental documents and SIMPEL documents.

   Evaluation of the Environmental Committee's performance by the PTBA Board of Directors, namely by the achievement of the PROPER target. PROPER awards received by each unit.

2. Investment and Hedging Committee
   This committee has the following important duties:
   a. Analyze the level of risk and return of the types of investments in financial instruments and hedging transactions on foreign currency exchange rates available on the market

b. Melakukan penilaian terhadap kelayakan dan reputasi institusi keuangan (*counterparty*) yang akan dijadikan mitra kerja;
c. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko mengenai:
   - Jenis-jenis investasi (portofolio) dan limit transaksi dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan pengembalian investasi pada instrumen keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang ada;
   - Usulan melakukan lindung nilai (*hedging*) berdasarkan analisis posisi valuta asing yang dimiliki perusahaan serta prediksi pergerakan nilai tukar/ kurs;
   - Pemilihan institusi keuangan (*counterparty*) untuk melakukan aktivitas transaksi investasi pada instrumen keuangan dan aktivitas lindung nilai atas nilai tukar valuta asing dengan berpedoman kepada kebijakan yang ada;
   - Setiap rekomendasi yang disampaikan kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko harus disertai dengan analisis yang lengkap mengenai tingkat risiko dan tingkat pengembalian / keuntungan, serta kelayakan dan reputasi institusi keuangan (*counterparty*) yang akan dijadikan mitra kerja.
d. Melakukan transaksi investasi pada instrumen keuangan dan lindung nilai atas nilai tukar valuta asing dengan institusi keuangan berdasarkan persetujuan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
e. Membukukan transaksi yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku; dan
f. Melaporkan secara berkala atau dalam keadaan terjadi perubahan parameter yang signifikan atas investasi yang telah dilakukan.

Evaluasi Komite dilakukan oleh Direktur pembina, dalam hal ini Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, utamanya atas keberhasilan dalam tugas-tugas komite.

3. *Talent Committee*
Komite ini berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk suksesi *talent* yang ada di PTBA. Adapun 3 (tiga) fungsi utama dari *Talent Committee,* yakni:
   - Melakukan *review* dan pengelompokkan *talent* dalam kelas-kelas *talent* berdasarkan kriteria potensi dan kinerja *talent*, sesuai dengan jenjang jabatannya;
   - Mengusulkan evaluasi dan rekomendasi program pengembangan *talent* terhadap *top talent* yang dinominasikan sebagai *successor* dalam *succession planning;*
   - Mengusulkan kepada Direksi PTBA daftar *talent* yang akan dinominasikan sebagai *selected talent*, daftar *talent* yang akan diangkat sebagai pengurus Anak/Afiliasi perusahaan dan daftar *talent* yang akan dipromosikan untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan penetapan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penilaian keberhasilan dari komite ini diukur dengan tersedianya *talent* PTBA sesuai dengan *succession plan* yang disusun.

b. Assess the suitability and reputation of the financial institution (counterparty) that will be partnered with;
c. Provide recommendations to the Director of Finance and Risk Management regarding:
   - Types of investment (portfolio) and transaction limits taking into account the level of risk and return on investment in financial instruments guided by existing policies;
   - Proposal to hedge based on analysis of the company's foreign exchange position and predictions of exchange rate movements;
   - Selection of financial institutions (counterparties) to carry out investment transaction activities in financial instruments and hedging activities on foreign exchange rates guided by existing policies;
   - Every recommendation submitted to the Director of Finance and Risk Management must be accompanied by a complete analysis regarding the level of risk and rate of return/profit, as well as the suitability and reputation of the financial institution (counterparty) as a working partner.
d. Conduct investment transactions in financial instruments and hedge foreign exchange rates with financial institutions based on the approval of the Director of Finance and Risk Management;
e. Record transactions that have been carried out in accordance with applicable accounting principles; And
f. Report periodically or when significant changes occur in the parameters of investments that have been made.

Committee evaluation is carried out by the supervisory director, in this case the Director of Finance and Risk Management, primarily for the success in the committee's duties.

3. Talent Committee
This committee plays a role to provide recommendations to the Board of Directors for the succession of talent at PTBA. There are 3 (three) main functions of the Talent Committee, namely:
   - Review and group talent into talent classes based on talent potential and performance criteria, according to their position level;
   - Propose evaluations and recommendations for talent development programs for top talents nominated as successors in succession planning;
   - Propose to the Directors of PTBA a list of talents who will be nominated as selected talents, a list of talents who will be appointed as managers of the company's Subsidiaries/Affiliates and a list of talents who will be promoted to further obtain approval for the determination in accordance with applicable procedures.

The success of this committee is measured by the availability of PTBA talent in accordance with the succession plan prepared.

4. Komite TJSL dan ESG

Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berdasarkan Keputusan Direksi PTBA No. 134A/0100/2023. Adapun tugas komite ini yaitu:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan, sasaran, *roadmap*, strategi, action plan terkait ESG;
b. Malakukan fungsi Komite TJSL BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023, antara lain namun tidak terbatas pada:
   - berkoordinasi dengan satuan kerja terkait/lintas direktorat untuk menetapkan prioritas dan tujuan TJSL Perusahaan;
   - bersinergi dengan satuan kerja terkait/lintas direktorat dalam implementasi TJSL perusahaan;
   - membantu Direksi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TJSL Perusahaan;
   - Melaporkan pelaksanaan program TJSL Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Memastikan pemenuhan terhadap kriteria lembaga pemeringkat ESG, diantaranya Morgan Stanley Capital International (MSCI), Sustainalytic, dan Carbon Disclosure Program (CDP), International Council on Mining & Metals (ICMM), UN Global Compact, Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) meliputi:
   - Menyusun dokumen penilaian dan memastikan pemenuhan seluruh kriteria penilaian secara maksimal;
   - Memonitor pencapaian kinerja perusahaan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan serta melakukan pendampingan sesuai kriteria penilaian;
   - Melaporkan kinerja berkelanjutan sesuai ketentuan aspek berkelanjutan dalam laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan TJSL, dan laporan pemeringkat ESG, *website* perusahaan, dan laporan lain sesuai kebutuhan.
d. Mendukung tercapainya pendanaan eksternal perusahaan berbasis keberlanjutan, antara lain namun tidak terbatas pada *sustainability financing, green financing*, dan lain-lain dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur internal perusahaan.

Evaluasi Komite ini didasarkan pada pencapaian ESG yang dicapai oleh Perusahaan berdasarkan rating/penilaian yang diberikan oleh organisasi, lembaga, institusi nasional maupun internasional.

4. CSR and ESG Committee

The Social and Environmental Responsibility (CSR) and Environmental, Social, and Governance (ESG) Committee based on the Decision of the Board of Directors of PTBA No. 134A/0100/2023. The tasks of this committee are as follows:

a. Develop and implement policies, targets, roadmaps, strategies, action plans related to ESG;
b. Perform the functions of the SOEs CSR Committee as regulated in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-1/MBU/03/2023, including but not limited to:
   - Coordinate with relevant work units/cross-directorates to establish priorities and goals for the Company's CSR;
   - Synergize with relevant work units/cross-directorates in the implementation of the Company's CSR;
   - Assist the Board of Directors in monitoring and evaluating the implementation of the Company's CSR programs;
   - Report on the implementation of the Company's CSR programs according to applicable regulations.
c. Ensure compliance with the criteria of ESG rating agencies, including Morgan Stanley Capital International (MSCI), Sustainalytics, and Carbon Disclosure Program (CDP), International Council on Mining & Metals (ICMM), UN Global Compact, Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) including:
   - Prepare assessment documents and ensure compliance with all assessment criteria to the maximum extent;
   - Monitor the achievement of company performance according to established deadlines and provide assistance according to assessment criteria;
   - Report sustainable performance in accordance with sustainable aspects in annual reports, sustainability reports, CSR reports, ESG rating reports, company websites, and other reports as needed.
d. Support the achievement of the company's external funding based on sustainability, including but not limited to sustainability financing, green financing, and others, while still considering applicable regulations and internal company procedures.

Evaluation of this committee is based on the achievement of ESG attained by the Company according to ratings/assessments provided by national and international organizations, institutions, and agencies.

5. Komite Pengarah Strategi Teknologi Informasi dan Komite Pengarah Implementasi Teknologi Informasi
   Sesuai dengan kewajiban Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023, PTBA telah membentuk Komite Pengarah Strategi Teknologi Informasi dan Komite Pengarah Implementasi Teknologi Informasi sebagaimana tertuang pada Keputusan Direksi PTBA No. 007/0100/2024 yang merupakan pembaharuan dari Komite yang ditetapkan pada tahun 2021. Komite Pengarah Strategi Teknologi Informasi ini memiliki tujuan untuk memastikan rencana strategis teknologi informasi (TI) sesuai dengan kebutuhan bisnis dan digitaliasi PTBA dengan tetap mengacu pada perkembangan teknologi informasi baik domestik dan global. Sedangkan, untuk Komite Pengarah Implementasi TI memiliki tujuan untuk memastikan TI sesuai dengan rencana strategis TI yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan Tata Kelola yang berlaku, serta secara efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat yang optimal. Penilaian komite ini didasarkan pada pencapaian atas kinerja/capaian TI sesuai dengan rencana strategis TI, sehingga dapat memberikan nilai tambah optimal bagi perusahaan. Untuk informasi lebih lanjut berkaitan dengan Teknologi Informasi, dapat dilihat pada Sub Bab Teknologi Informasi pada bab ini.

Selain komite-komite di atas, Direksi dibantu oleh organ pendukung, yaitu Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit (SPI). Kinerja Komite di bawah Direksi dinilai berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas, saran, dan rekomendasi yang diberikan oleh kedua organ tersebut. Direksi telah menilai bahwa Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tahun 2023 dengan baik.

Penilaian kinerja organ pendukung Direksi berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan dalam setiap satuan kerja yang merupakan *Key Performance Indicator* (KPI), termasuk untuk satuan kerja Sekretaris Perusahaan dan SPI. Penetapan KPI tersebut tertuang dalam *Balance Scorecard* yang dilakukan evaluasi secara berkala setiap tiga bulannya oleh audit internal Perusahaan.

5. Information Technology Steering Committee and Information Technology Implementation Steering Committee
   In accordance with the obligations of Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/03/2023, PTBA has established the Information Technology Steering Committee and Information Technology Implementation Steering Committee as stipulated in the Board of Directors' Decision of PTBA No. 007/0100/2024, which is a renewal of the Committee established in 2021. The Information Technology Steering Committee aims to ensure that the IT strategic plans align with the business needs and digitalization of PTBA while referring to both domestic and global IT developments. Meanwhile, the Information Technology Implementation Steering Committee aims to ensure that IT aligns with the established IT strategic plans and complies with applicable Governance provisions, effectively and efficiently obtaining optimal benefits. The assessment of these committees is based on the achievement of IT performance according to the IT strategic plans, thereby providing optimal added value to the company. For further information regarding Information Technology, please refer to the Information Technology subsection in this section.

In addition to the above committees, the Board of Directors is supported by supporting organs, namely the Corporate Secretary and Internal Audit. The performance of Committees under the Board of Directors is evaluated based on the realization of tasks, advice, and recommendations provided by both organs. The Board of Directors has assessed that the Corporate Secretary and Internal Audit have performed their duties and responsibilities well in 2023.

The performance assessment of supporting organs of the Board of Directors is based on the evaluation criteria established in each work unit, which are Key Performance Indicators (KPIs), including for the Corporate Secretary and Internal Audit Unit. The determination of KPIs is outlined in the Balance Scorecard, which undergoes periodic evaluation every three months by the Company's internal audit.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Appraisal of The Board of Commissioners and Board of Directors

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Setiap tahunnya, Dewan Komisaris menetapkan Program Kerja tahunan Dewan Komisaris dan KPI sebagai sasaran capaian kinerja Dewan Komisaris. Capaian atas KPI menjadi objek penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama satu tahun. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil perbandingan realisasi dengan target dikalikan dengan bobot. Apabila realisasi tercapai di atas 100%, maka nilai/skor yang diberikan dapat melebihi bobot maksimal. Apabila realisasi KPI tercapai di bawah 100%, maka nilai akan diberikan secara proporsional terhadap bobot.

Berdasarkan jumlah skor, dapat ditentukan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Skor 100% ≥ x > 95%, kriteria Sangat Baik.
2. Skor 95% ≥ x > 80%, kriteria Baik.
3. Skor 80% ≥ x > 65%, kriteria Cukup.
4. Skor 65% ≥ x > 50%, kriteria Kurang.
5. Skor ≤ 50%, kriteria Sangat Kurang.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja tahunan Dewan Komisaris dilakukan dengan sistem *self-assessment*, terhadap capaian KPI Dewan Komisaris, dan atas hasil penilaiannya disampaikan kepada Pemegang Saham seri A atau kuasanya untuk diputuskan lebih lanjut melalui RUPS, dengan memberikan Keputusan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan termasuk Laporan Dewan Komisaris terkait tugas pengawasan Perusahaan untuk tahun buku sebelumnya.

Kriteria Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris didasarkan pada pemenuhan KPI Dewan Komisaris untuk periode tahun penilaian. KPI Dewan Komisaris mencakup perspektif penilaian kinerja sebagai berikut:

1. Kontribusi pencapaian atas KPI Direksi;
2. Aspek pengawasan;
3. Aspek dinamis dan penguatan tata kelola;

Performance Appraisal of the Board of Commissioners

Appraisal Procedures

Every year, the Board of Commissioners determines the annual Work Program of the Board of Commissioners and KPIs as performance targets for the Board of Commissioners. KPI Achievements becomes the object of assessment of the performance of the Board of Commissioners for one year. The assessment is carried out based on the results of a comparison of the realization with the target multiplied by the weight. If the realization is above 100%, the value/score given may exceed the maximum weight. If the KPI realization is below 100%, the value will be given proportional to the weight.

Based on the total score, the following assessment criteria can be determined:

1. Score 100% ≥ x > 95%, Very Good criteria.
2. Score 95% ≥ x > 80%, Good criteria.
3. Score 80% ≥ x > 65%, Average criteria.
4. Score 65% ≥ x > 50%, Poor criteria.
5. Score ≤ 50%, Very Poor criteria.

Appraiser

The annual performance assessment of the Board of Commissioners is carried out using a self-assessment system, towards the KPI achievements of the Board of Commissioners, and the results of the assessment are submitted to Series A Shareholders or their proxies for further decisions through the GMS, by providing a decision to approve and ratify the Annual Report and Financial Reports including Board of Commissioners report regarding the Company's supervisory duties for the previous financial year.

Appraisal Criteria

The performance appraisal of the Board of Commissioners is based on the fulfillment of the Board of Commissioners' KPIs for the assessment year period. The Board of Commissioners' KPI includes the following performance assessment perspectives:

1. Contribution to the achievement of the Board of Directors' KPI;
2. Supervisory aspect;
3. Dynamic aspects and governance routing;

Hasil Penilaian KPI Dewan Komisaris

Result of Board of Commissioners' KPI Appraisal

Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Contribution of Board of Directors' KPI Achievement Aspect		Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Skor Score
Aspek Kontribusi Pencapaian KPI Direksi Contribution of Board of Directors' KPI Achievement Aspect				**20**			**19,46**
Pencapaian KPI Direksi Directors' KPI achievement		Realiasi Pencapaian KPI Direksi Realization of Directors' KPI achievement	%	20	100	97,30	19,46
Aspek Pengawasan dan Penasihatan Supervisory and Advisory Aspect				**60**			**61,50**
1	Memberikan persetujuan/rekomendasi/ tanggapan atas aksi korporasi yang disampaikan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Provide approval/recommendations/ responses to corporate actions submitted by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association	Persetujuan/ rekomendasi/ tanggapan yang diberikan kepada Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan AD Approval/recommendations/responses given to the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the AD	Dokumen Document	8	2	19	8,80
2	Memberikan nasihat atau saran kepada Direksi guna mengoptimalkan kinerja sesuai dengan rencana kerja, arahan RUPS, dan meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Provide advice or suggestions to the Board of Directors to optimize performance in accordance with the work plan, GMS directions, and increase the Company's compliance with statutory regulations.	Nasihat atau saran yang diberikan kepada Direksi guna mengoptimalkan kinerja sesuai dengan rencana kerja, arahan RUPS, dan meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Advice on suggestions given to the Board of Directors to optimize performance in accordance with the work plan, GMS directions, and increase the Company's compliance with statutory regulations.	Dokumen Document	8	1	1	8
3	Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan strategis Perusahaan melalui kunjungan lapangan (*site visit*) Conduct monitoring to PTBA's strategic activities (site visit)	Kunjungan lapangan (site visit) untuk memonitor kegiatan-kegiatan strategis perusahaan Site visit to monitor PTBA's strategic activities	Dokumen Document	7	3	10	7,70
4	Tanggapan terhadap RKAP dan/atau RJPP yang disiapkan oleh Direksi Response to WP&B and RJPP prepared by Board of Directors	Pembahasan RKAP yang telah disiapkan Direksi WP&B discussion prepared by Board of Director	Dokumen Document	8	1	1	8
5	Meneliti dan menelaah laporan berkala yang disiapkan oleh Direksi Examine and review periodic reports prepared by the Board of Directors	Jumlah surat evaluasi laporan berkala The number of periodic evaluation reports	Surat Letter	7	12	12	7
6	Menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris pada RUPS Tahunan Submitting the Board of Commissioners' Supervision Report at the Annual GMS	Laporan pengawasan yang disampaikan pada RUPS Tahunan Supervision report conveyed at the annual GMS	Dokumen Document	7	1	1	7
7	Pengawasan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pengendalian intern. Supervision of compliance with legislation and internal control.	Pembahasan Upaya tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi Laporan Auditor Indpenden (LAI) atas kepatuhan perundang-undangan dan pengendalian intern Discussion of follow-up efforts to the findings and recommendations of the Independent Auditor's Report (LAI) on statutory compliance and internal control	Risalah/ Surat Summary/ Letter	7	1	1	7
8	Mengusulkan KAP yang mengaudit laporan keuangan Perusahaan. Suggesting Public Accountant Office (KAP) to audit the Company's finance report	Pengusulan kepada RUPS/Menteri mengenai KAP yang mengaudit laporan keuangan Proposal to the GMS/Minister regarding KAP auditing financial reports	Surat Letter	8	1	1	8

Hasil Penilaian KPI Dewan Komisaris
Result of Board of Commissioners' KPI Appraisal

Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Contribution of Board of Directors' KPI Achievement Aspect	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Skor Score
Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola Dynamics and Governance Strengthening Aspect			**20**			**21,34**
1 Kegiatan Pengembangan Development Activities			6			6,60
Mengikuti FGD/Pelatihan/ Seminar/ *Workshop* Join FGD/Training/Seminar/Workshop	Kegiatan FGD/ Pelatihan/ Seminar/ *Workshop* yang diikuti oleh Dekom dan/ atau Organ FGD/Training/Seminar/Workshop followed by the Board of Commissioner and/or its organs	Laporan/ Sertfikat Report/ Certification	6	2	12	6,60
2 Penguatan Tata Kelola Governance Strengthening			14			14,74
a. Menerapkan Tata Kelola Dewan Komisaris Implementing Board of Commissioners' GCG	Skor GCG Dewan Komisaris Board of Commissioners' GCG score	Skor Score	4	33	34,22	4,14
b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris 2024 Planning the 2024 Board of Commissioners WP&B	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang telah ditandatangani Signed Board of Commissioners' WP&B	dokumen Document	4	1	1	4
c. Menghadiri rapat-rapat: Attending meetings:			6			6,59
• Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners internal meetings	Rata-Rata persentase kehadiran Dekom Average percentage of Board of Commissioners' attendance	% Kehadiran Attendance	1	80	100	1,10
• Rapat Koordinasi/ Gabungan Dewan Komisaris dan DIreksi Joint Coordination meeting between the Board of Directors and Comissioners	Rata-Rata persentase kehadiran Dekom Average percentage of Board of Commissioners' attendance	% kehadiran Dekom Board of Commissioner Attendance	1	80	100	1,10
• Pengesahan RKAP WP&B ratification	Rata-Rata persentase kehadiran Dekom Average percentage of Board of Commissioners' attendance	% Kehadiran Dekom Board of Commissioner Attendance	1	80	100	1,10
• RUPS Tahunan Annual GMS	Rata-Rata persentase kehadiran Dekom Average percentage of Board of Commissioners' attendance	% Kehadiran Attendance	1	80	100	1,10
• Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting	Rata-rata persentase kehadiran Komite Audit pada rapat Komite Average percentage of Audit Committee attendance on Committee meetings	% Kehadiran Attendance	1	80	100	1,10
• Rapat Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, CSR,Nominasi, Remunerasi dan PSDM Meeting of Committee for Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration, and HCD	Rata-rata persentase kehadiran Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM pada rapat komite Average percentage of Committee for Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration, and HCD on Committee meetings	% Kehadiran Attendance	1	80	87	1,09
Jumlah **Total**			**100**			**102,30**

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Setiap tahunnya Direksi menandatangani Kontrak Manajemen dengan pemegang saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya (MIND ID), yang di dalamnya terdapat *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai penjabaran dari RKAP yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan MIND ID. KPI Direksi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kolegial dan individu, yang atas capaian keduanya menjadi objek penilaian atas kinerja Direksi selama satu tahun. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Akuntan Publik melakukan evaluasi kinerja Direksi kemudian disampaikan kepada RUPS dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya melalui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan setiap tahun terhadap capaian KPI Direksi, baik kolegial maupun individu, yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Akuntan Publik.

Kriteria Penilaian

Penilaian Direksi mengacu pada *Key Performance Indicator* (KPI) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang bertujuan sebagai alat penilaian bagi Pemegang Saham atas kinerja Direksi sampai dengan akhir tahun.

Pada penilaian kinerja Direksi, terdapat 5 perspektif yang digunakan, adapun pada tahun 2023 pencapaian dibandingkan target yaitu:

The Board of Directors' Performance Appraisal

Appraisal Procedures

Every year the Board of Directors signs a Management Contract with Series A Dwiwarna/Proxy (MIND ID) shareholders, which includes Key Performance Indicators (KPI) as an elaboration of the WP&B which has been approved by the Board of Commissioners and MIND ID. The KPI of the Board of Directors is divided into 2 (two), namely collegial and individual, the achievements of both of which become the object of assessment of the performance of the Board of Directors for one year. The Board of Commissioners, assisted by the Public Accountant, evaluates the performance of the Board of Directors and then submits it to the GMS and/or Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies through the Board of Commissioners' Supervisory Task Report.

Appraiser

The Directors' performance assessment is carried out every year on the KPI achievements of the Directors, both collegial and individual, which is carried out by the Board of Commissioners with the assistance of a Public Accountant.

Appraisal Criteria

The Board of Directors' assessment refers to the Key Performance Indicator (KPI) which is based on SOEs Ministerial Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as an assessment tool for Shareholders regarding the performance of the Board of Directors until the end of the year.

In assessing the performance of the Board of Directors, there are 5 perspectives used, while in 2023 the achievements compared to targets are:



Pencapaian KPI Direksi Berdasarkan Perspektif
KPI Achievements for Board of Directors Based on Perspective

No	KPI Unit KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Pencapaian Achievement		
						REAL REAL	%	Bobot Weight
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia A. Economic and Social Value for Indonesia								
A.1 Finansial A.1 Financial								
1	*EBITDA*	Rp Miliar Rp Billion	5.673	Maksimal Maximum	2	8.902	110,00	2,20
2	*ROIC ≥ WACC*	%	5,8	Maksimal Maximum	1	21	110,00	1,10
3	Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash flow from operations	Rp Miliar Rp Billion	4.989	Maksimal Maximum	2	3.105	62,23	1,24
4	Pencapaian Skor TKP Kinerja 2023 Achievement of 2023 TKP Performance Scores	Indeks	AA	Maksimal Maximum	2	AA	100,00	2,00
5	Serapan investasi: Investment uptake:							
	a. Investasi Rutin Routine Investment	Rp Miliar Rp Billion	1.844	Stabilize	2	1.448	78,52	1,57
	b. Investasi Non-Rutin (termasuk anggaran *contingency*) Non-Routine Investments (including budget contingency)	Rp Miliar Rp Billion	1.236	Range	3	570	57,60	1,73
A.2 Operasional A.2 Operational								
6	Internalisasi budaya *safety* - Pencapaian KPI HSE Internalization of safety culture - Achievement of HSE KPIs	%	100	Maksimal Maximum	5	96	96,00	4,80
7	Unit/anak usaha yang memperoleh peringkat PROPER: Units/subsidiaries that received ratings PROPER:							
	a. Jumlah unit/Anak Usaha yang meningkat peringkat PROPER dari Biru ke Hijau Number of units/Subsidiaries that have increased in rank PROPER from Blue to Green	Jumlah Unit/ Anak Usaha Number of Units/ Subsidiaries	1	Maksimal Maximum	1	1	100,00	1,00
	b. Jumlah unit/Anak Usaha yang meningkat peringkat PROPER dari Hijau ke Emas Number of units/Subsidiaries that have increased in rank PROPER from Green to Gold	Jumlah Unit/ Anak Usaha Number of Units/ Subsidiaries	1	Maksimal Maximum	1	1	100,00	1,00
	c. Jumlah unit/Anak Usaha yang mempertahankan peringkat PROPER Emas Number of units/Subsidiaries that maintain Gold PROPER rating	Jumlah Unit/ Anak Usaha Number of Units/ Subsidiaries	1	Stabilize	1	1	100,00	1,00
8	Produksi komoditas : Commodity production:							
	Batu bara Coal	Ton Tons	43.000.000	Maksimal Maximum	7	41.751.980	97,10	6,80
9	Pengurangan emisi karbon di grup MIND ID terhadap total emisi *business-as-usual* yang dihasilkan di 2023 Reduction of carbon emissions in the MIND ID group against total business-as-usual emissions generated in 2023	%	2	Maksimal Maximum	1	8,79	110,00	1,10
10	Penurunan Intensitas Energi dari rata-rata *Business-as-usual* yang dihasilkan di tahun 2023 Decrease in Energy Intensity from average Businessas-normal produced in 2023	%	2	Maksimal Maximum	1	14,49	110,00	1,10
11	Implementasi & Sertifikasi SNI ISO 50001:2018 Sistem Manajemen Energi Implementation & Certification of SNI ISO 50001:2018 System Energy Management	Waktu Times	Dec-23	Minimal Minimum	1	Dec-23	100,00	1,00

Pencapaian KPI Direksi Berdasarkan Perspektif
KPI Achievements for Board of Directors Based on Perspective

No	KPI Unit KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Pencapaian Achievement		
						REAL REAL	%	Bobot Weight
12	Pelaksanaan program Sub-Komite Manajemen Risiko Tahun 2023 dalam rangka sinergi Grup MIND ID dan pemenuhan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 terkait Manajemen Risiko Implementation of the 2023 Risk Management Sub-Committee program in the context of synergy with the MIND ID Group and compliance with the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 regarding Risk Management	%	100	Maksimal Maximum	4	104	104,05	4,16
13	Optimasi kinerja TJSL : CSR performance optimization:							
	Rasio *Social Return on Investment* (SROI) dari Dampak/Manfaat Program TJSL/PPM > 1 Social Return on Investment (SROI) ratio of Impact/Benefits of the CSR/PPM Program > 1	Program	3	Maksimal Maximum	1	5	110,00	1,10
B. Inovasi Model Bisnis B. Business Model Innovation								
14	Kontribusi EAT Anak & Cucu Perusahaan serta *Joint Ventures & Associated Companies* EAT Contributions of Company Subsidiaries & Subsubsidiaries and Joint Ventures Ventures & Associated Companies	Rp Miliar Rp Billion	1.063	Maksimal Maximum	5	1.149	108,06	5,40
15	Penjualan listrik HBAP ke PLN HBAP electricity sales to PLN	MWH	4.606.368	Maksimal Maximum	5	100%	100,00	5,00
16	Implementasi digitalisasi produksi/teknologi robotik pada *smelter/site* tambang Implementation of digitalization of production/robotic technology at smelters/mining sites	Program	1	Maksimal Maximum	2	2	110,00	2,20
17	Penjualan komoditas Batu bara melalui MIND ID Trading Sales of Coal commodities through MIND ID Trading	Ton	1.650.000	Maksimal Maximum	2	2.867.728	110,00	2,20
18	Penyelesaian Program Kerja *Sub Committee Procurement* di tahun 2023 Completion of the Procurement Sub Committee Work Program in 2023	%	100	Maksimal Maximum	4	80	80,00	3,20
19	Mendukung implementasi fungsi sentralisasi di Grup MIND ID Supports the implementation of centralized functions in the MIND ID Group	Ton	1.630	Maksimal Maximum	5	1.634	100,27	5,01
20	Penurunan *Cash Cost* per ton Reducing Cash Cost per ton	%	3,0	Maksimal Maximum	3	14,0	110,00	3,30
21	Kepatuhan terhadap kajian remunerasi dengan standar P75 Compliance with remuneration review with standard P75							
	1. *EC/Revenue*	%	3,80	Minimal Minimum	3.2	5,00	68,47	2,19
	2. EC/EBITDA	%	12,70	Minimal Minimum	1.6	20,64	37,48	0,60
	3. EC/Total Cost	%	5,50	Minimal Minimum	3.2	5,90	92,73	2,97
22	Efisiensi Biaya Kontrak Jasa Penambangan untuk Pekerjaan Tahunan 2025 Mining Service Contract Cost Efficiency for 2025 Annual Work	%	10	Range	5	13	110,0	5,50
23	Penambahan alokasi pekerjaan jasa penambangan batu bara untuk anak usaha *Mining Services* PTBA Additional allocation of coal mining services work for PTBA's Mining Services subsidiary	%	160	Maksimal Maximum	1	164	102,50	1,03
24	Kajian potensi *unlocking logistic* dari mulut tambang Study of the potential for unlocking logistics from the mine mouth	Waktu Times	Sep-23	Minimal Minimum	2	Sep-23	100,00	2,00

Pencapaian KPI Direksi Berdasarkan Perspektif
KPI Achievements for Board of Directors Based on Perspective

No	KPI Unit KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Pencapaian Achievement		
						REAL REAL	%	Bobot Weight
C. Kepemimpinan Teknologi C. Technology Leadership								
25	Pra Sertifikasi ISO 20001 *Information Technology Service Management* (ITSM) *Implementation* di MIND ID Pre-Certification ISO 20001 Information Technology Service Management (ITSM) Implementation at MIND ID	Waktu Times	Dec-23	Minimal Minimum	1	Nov-23	110,00	1,10
26	*MCT Development*	Waktu Times	Dec-23	Minimal Minimum	2	Dec-23	100,00	2,00
27	Pengembangan teknologi sintesis *artificial graphite* dari *coalite* Development of artificial graphite synthesis technology from coalite	TRL	5	Maksimal Maximum	3	5	100,00	3,00
D. Peningkatan Investasi D. Investment Enhancement								
28	Penyelesaian FEED atas inisiatif *Coal to Activated Carbon* FEED completion of the Coal to Activated Carbon initiative	Waktu Times	Dec-23	Minimal Minimum	3	Oct-23	110,00	3,30
29	Proyek TE-Keramasan - *Groundbreaking* CHF & TLS TE-Keramasan Project - CHF & TLS ground breaking	Waktu Times	Dec-23	Minimal Minimum	4	Dec-23	100,00	4,00
30	Proyek TE-Perajen - Penyelesaian dokumen TOR untuk pengadaan konsultan *preliminary design* CHF & TLS (bila FID diterima) TE-Perajen Project - Completion of TOR documents for procurement of CHF & TLS preliminary design consultants (if FID is accepted)	Waktu Times	Dec-23	Minimal Minimum	2	100%	100,00	2,00
31	Pekerjaan pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan BACBIE BACBIE Area Basic Infrastructure development work	Waktu Times	Dec-23	Minimal Minimum	1	100%	100,00	1,00
E. Pengembangan Talenta E. Talent Development								
32	% Perempuan dalam *nominated talent* % Women in nominated talent	%	10	Maksimal Maximum	1	15	110,00	1,10
33	% milenial (< 42 tahun) dalam *nominated talent* % of millennials (< 42 years old) in nominated talents	%	5	Maksimal Maximum	1	69	110,00	1,10
34	Rotasi *Talent* (talent mobility) di perusahaan grup MIND ID atau lingkungan KBUMN Talent Rotation (talent mobility) in MIND ID group companies or KBUMN environment	Orang People	8	Maksimal Maximum	1	10	110,00	1,10
35	Pemenuhan data Perusahaan dan Pengurusan Hasil RUPS dalam Pergantian Pengurus dari Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi di Grup PTBA Fulfillment of Company Data and Management of GMS Results in Changing Management of Subsidiaries and Affiliated Companies in the PTBA Group	Waktu Times	30 hari setelah pelaksanaan RUPS pada entitas terkait 30 days after GMS on related entity	Minimal Minimum	1	16	109,5	1,10
36	Pemenuhan kapabilitas Tenaga Kerja Spesialis dalam bidang lingkungan – Sertifikasi *Lead Auditor* ISO 14001 Fulfillment of specialist workforce capabilities in the environmental sector - ISO 14001 Lead Auditor Certification	Orang People	2	Maksimal Maximum	1	2	100,00	1,00
37	Penyelesaian *Roadmap* Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti Completion of the Roadmap for Restructuring Defined Benefit Pension Funds	Waktu Times	Oct-23	Minimal Minimum	2	Oct-23	100,00	2,00
	Jumlah **Total**				**100**			**97,30**

Pencapaian KPI Secara Individual
Individual KPI Achievement

Nama Name	Jabatan Position	Nilai Value
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	97,30*
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	102,18
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	102,34
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	102,62
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	101,67

Catatan | Notes :
*Skor penilaian mengacu pada KPI Kolegial
The assessment score refers to the collegial KPI



Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration for Board of Directors and Commissioners

Pengangkatan dan pemberhentian serta penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan wewenang Pemegang Saham yang dilakukan melalui mekanisme RUPS.

Prosedur Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan kewenangan Pemegang Saham. Sebagai anggota *holding*, prosedur pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PTBA mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Seluruh calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi PTBA harus memenuhi persyaratan formil, materil, serta persyaratan lainnya yang telah ditetapkan pada ketentuan tersebut, termasuk telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham melalui Keputusan RUPS.

Kriteria Dewan Komisaris

Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dan;
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan;

Appointment and dismissal as well as determining the amount of remuneration for members of the Board of Directors and Commissioners are under the authority of Shareholders which is carried out through the GMS mechanism.

Procedure for Nomination of Members of the Board of Commissioners and Directors

The appointment of members of the Company's Board of Commissioners and Directors is within the authority of the Shareholders. As a holding member, the appointment procedures for the Board of Commissioners and Directors of PTBA refer to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

All prospective members of the Board of Commissioners and Directors of PTBA must meet formal and material requirements, as well as other requirements stipulated in these provisions; including passing the Fit and Proper Test (UKK). The appointment of the Board of Commissioners and Directors is carried out by Shareholders through a GMS Resolution.

Criteria for Board of Commissioners

Persons who can be appointed as members of the Board of Commissioners are individuals who can fulfill the following requirements at the time of appointment and during their term of office:

1. Have good morals and integrity;
2. Capable of carrying out legal actions;
3. Within 5 (five) years before appointment and during office must:
   a. Never declared bankruptcy;
   b. Never been a member of the Board of Directors and/ or Board of Commissioners who was found guilty of causing bankruptcy in a company;
   c. Never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector and;
   d. Never been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners while serving:
      - Never held an Annual GMS;
      - Their accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never given their accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS and;

- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan tahunan dan/atau Laporan keuangan kepada OJK.

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan;
6. Memenuhi persyaratan lain sebagaimana ketentuan nominasi diantaranya persyaratan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan pasar modal, peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Perusahaan dan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Kriteria Direksi

Kriteria persyaratan calon anggota Direksi yang terdapat pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi PTBA, yaitu:

1. Memiliki akhlak, moral, dan integritas baik;
2. Memiliki jiwa kepemimpinan dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
3. Cakap melakukan perbuatan hukum;
4. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dipailitkan;
   b. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
   d. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - Pertanggungjawaban sebagai Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan/atau
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

- Have ever led a company to obtain a permit agreement or registration from OJK does not fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial reports to OJK.

4. Have a commitment to comply with statutory regulations;
5. Have knowledge and/or expertise in the field required by the Company;
6. Fulfill other requirements as stipulated in the nomination provisions, including the requirements in the Limited Liability Company Law, capital market regulations, and other laws and regulations applied to the Company and other laws related to the Company's business activities.

Criteria for Board of Directors

The criteria for members of the Board of Directors contained in the Articles of Association and Work Guidelines for the Board of Directors of PTBA are:

1. Have good morals and integrity;
2. Have a high leadership spirit and dedication to advance and develop the Company;
3. Capable of carrying out legal actions;
4. Within 5 (five) years before appointment and during office the concerned person must:
   a. Never been bankrupted;
   b. Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a bankruptcy in the company;
   c. Never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector;
   d. Never been a Member of the Board of Directors and/or Member of the Board of Commissioners during their term of office:
      - Never held an annual GMS;
      - Accountability as a Member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never performed accountability as a Member of the Board of Directors and/or Member of the Board of Commissioners to the GMS; and/or
      - Has ever caused a company that obtained a permit, approval or registration from the OJK to fail to fulfill its obligation to submit annual reports and/or financial reports to the OJK.

5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, serta tunduk pada ketentuan dalam Kontrak Manajemen yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan, Dewan Komisaris Perusahaan, dan perwakilan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan;
7. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memenuhi ketentuan tersebut di atas kemudian akan dibahas oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Setelah dilakukan pembahasan, usulan tersebut kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan kepada RUPS untuk disahkan.

5. Have a commitment to comply with statutory regulations, and comply with the provisions in the Management Contract signed by the Company's Directors, the Company's Board of Commissioners, and representatives of the Series A Dwiwarna Shareholders;
6. Have knowledge and/or expertise in the field required by the Company;
7. Fulfill other requirements as stipulated in the Company's Articles of Association and other requirements determined by Series A Dwiwarna shareholders or their proxies as long as they do not conflict with applicable laws and regulations.

Nomination Mechanism for Board of Directors and Commissioners

Candidates for members of the Board of Commissioners and Directors who meet the above provisions will then be discussed by the Nomination and Remuneration Committee. After discussion, the proposal will be submitted to the Board of Commissioners and then submitted to the GMS for ratification.

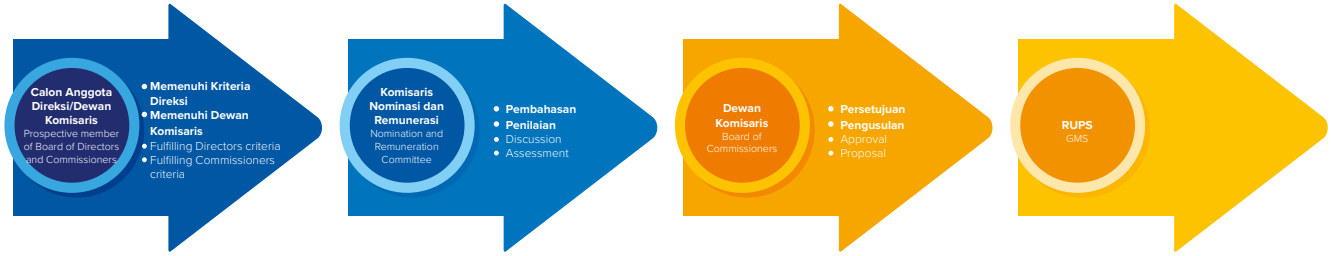

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Terkait penetapannya, itu mengacu pada hasil RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman oleh Pemegang Saham. Keputusan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS Tahunan.

Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners

Remuneration Determination Procedure

The procedure to determine the remuneration of the Board of Commissioners and Directors is based on Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on March 3, 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The determination refers to the results of the GMS by considering the results of studies carried out by the Board of Commissioners through in-depth research by Shareholders. Decisions on determining the remuneration of the Board of Commissioners and Directors are agreed upon the Annual GMS.

Bagan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Chart of Procedures for Determining Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

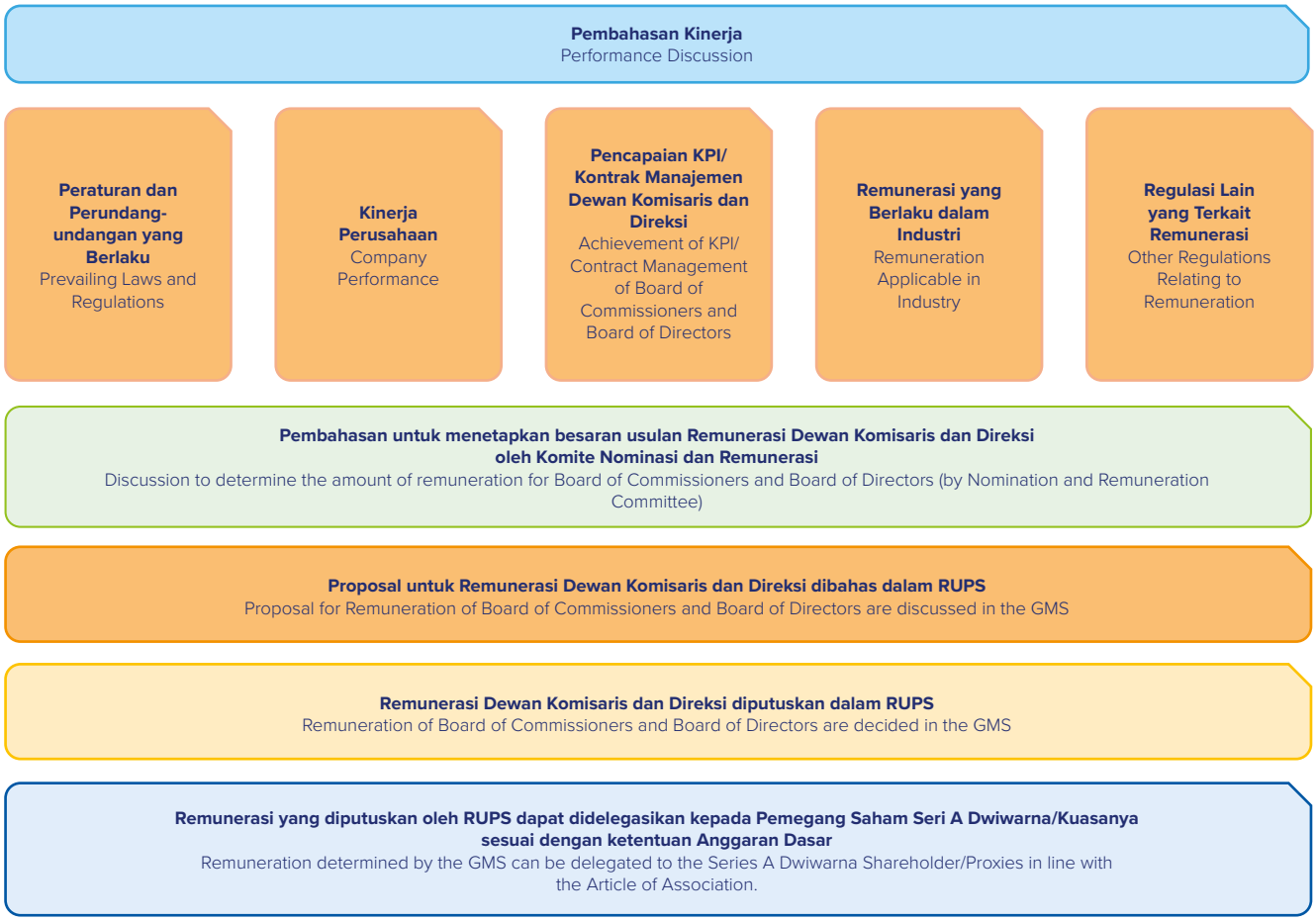

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Kinerja Perusahaan;
3. Prestasi kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Remunerasi yang berlaku dalam industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan yang mempunyai jenis dan skala usaha yang sama dengan Perusahaan;
5. Regulasi lain yang terkait.

Hasil kajian disampaikan oleh Dewan Komisaris sebagai bahan usulan penetapan remunerasi kepada Pemegang Saham, berdasarkan aturan remunerasi yang berlaku di Kementerian BUMN.

Indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2023, diberikan berdasarkan pencapaian kinerja Perusahaan pada tahun buku 2022 sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan Audit serta penilaian KPI tahun 2022, yang merupakan bahan pertimbangan dalam menetapkan tantiem dan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Indicators to Determine the Remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors

The structure, policy, and amount of remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors must consider the following matters:

1. Prevailing laws and regulations;
2. Company Performance;
3. Performance of Board of Commissioners and Board of Directors;
4. Applicable remuneration in the industry following the business activities of the Company, which has the same type and scale of business as the Company;
5. Other related regulations.

The results of the study are submitted by the Board of Commissioners as material for proposals to determine remuneration to Shareholders, based on the remuneration regulations at the SOEs Ministry.

Indicators for determining the remuneration of the Board of Commissioners and Directors for 2023 are given based on the Company's performance achievements in the 2022 financial year as stated in the Audit Financial Report and the 2022 KPI assessment, which is a consideration in determining bonuses and remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors.

Struktur Remunerasi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2023, pada mata acara ketiga RUPS memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besaran tantiem untuk Tahun Buku 2022 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk Tahun 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak seteiah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besaran tantiem untuk Tahun Buku 2022 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi Perusahaan untuk Tahun 2023. Berikut struktur remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi PTBA tahun 2023.

Selanjutnya berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 57/DEKOM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Perihal Penetapan Perhitungan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 dan Gaji/Honorarium Berikut Tunjangan dan Fasilitas Tahun Buku 2023 PT Bukit Asam Tbk serta Surat Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Mineral Industri Indonesi (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. 271/E.DIRPPU/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 Perihal Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Gaji/Honorarium dan Penghasilan Tahun 2023 bagi Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk ("PTBA"), maka susunan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PTBA adalah sebagai berikut:

Remuneration Structure

Based on the resolution of the Annual General Meeting on June 15, 2023, the third agenda of the meeting decided:

1. Granted authority and power to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the majority shareholder for the Series B Shares by first consulting with Series A Dwiwarna Shareholders to determine the amount of the bonus for the 2022 Financial Year and determine the honorarium, allowance, other facilities and incentives for members of the Company's Board of Commissioners in 2023.
2. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners by first obtaining written approval from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the majority shareholder of the Series B Shares after consulting with Dwiwarna Series A Shareholders to determine the amount of the bonus for the 2022 Financial Year and determine the salary, allowance, facilities, and other incentives for the Company's Board of Directors in 2023. The following is the remuneration structure for the Board of Commissioners and Directors of PTBA in 2023.

Furthermore, based on the Letter of the Board of Commissioners No. 57/DEKOM/VIII/2023 on August 14, 2023, concerning the Determination of the Bonus Calculation for the Directors and Board of Commissioners for the 2022 Financial Year and Salary/Honorarium as well as the Benefits and Facilities for the 2023 Financial Year of PT Bukit Asam Tbk and the Portfolio Director's Letter and Business Development PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as Proxy for Series A Dwiwarna Shareholder No. 271/E.DIRPPU/VIII/2023 on August 11, 2023, Regarding the Determination of Bonus for the 2022 Financial Year and Salary, Honorarium, and Income for for Directors and Members of the Board of Commissioners PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") in 2023, the remuneration structure for PTBA's Directors and Board of Commissioners is as follows:

No.	Jenis Penghasilan Type of Income	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors
1	Honorarium dengan pengaturan: • Komisaris Utama sebesar 45% gaji Direktur Utama. • Komisaris sebesar 90% gaji/honorarium Komisaris Utama. Honorarium with arrangements: • President Commissioner: 45% of salary/honorarium of President Director. • Commissioner: 90% salary/honorarium of President Commissioner	Gaji dengan pengaturan: • Direktur Utama sebesar 100%. • Direktur lainnya sebesar 85% dari gaji/honorarium Presiden Direktur. Salary with arrangements: • President Director at 100%. • Directors at 85% of salary/honorarium president director
2	Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali honorarium. Religious holiday allowance of 1 (one) time honorarium.	Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali gaji. Religious holiday allowance of 1 (one) time salary.
3	Asuransi Purna Jabatan dengan premi sebesar maksimal 25% gaji/honorarium per tahun. Post-employment insurance with a maximum premium of 25% honorarium per year.	Asuransi Purna Jabatan dengan premi sebesar maksimal 25% gaji/honorarium per tahun. Post-employment insurance with a maximum premium of 25% salary/honorarium per year.
4	Tidak Ada Tunjangan Perumahan No housing allowance	Tunjangan Perumahan Rp22.500.000 per bulan. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 apabila Direksi masih mendapatkan fasilitas rumah dinas dapat tetap mengunakan fasilitas tersebut paling lambat 31 Desember 2023. Housing Allowance of Rp22,500,000 per month. In accordance with SOEs Ministerial Regulation Number PER-03/MBU/03/2023, if the Directors still using official housing facilities, they can continue to use the facility no later than December 31, 2023.

No.	Jenis Penghasilan Type of Income	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors
5	Tunjangan Transportasi 20%/honorarium per tahun Transportation Allowance: 20%/honorarium per month	Fasilitas kendaraan sebanyak 1 (satu) unit. dengan spesfikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc untuk kendaraan berbahan bakar minyak atau batas maksimal 100 kWh untuk kendaraan bermotor listrik berbasi baterai (*battery electric vehicle*). Vehicle facilities of 1 (one) unit with vehicle specifications and types regulated by the Board of Commissioners with a maximum limit of 3,500 cc for fuel-based vehicles or a maximum limit of 100 kWh for battery electric vehicles.
6	Fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan sesuai dengan pemakaian (*at cost*). Health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost).	Fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan sesuai dengan pemakaian (*at cost*). Health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost).
7	Pemberian fasilitas bantuan hukum sebesar pemakaian (*at cost*). Providing legal aid facilities in the amount of usage (at cost)	Pemberian fasilitas bantuan hukum sebesar pemakaian (*at cost*). Providing legal aid facilities in the amount of usage (at cost)
8	Komposisi besarnya tantiem sesuai dengan keputusan RUPS yang didelegasikan kepada Dewan Komisaris. The composition of the amount of the bonus is according to the GMS resolution delegated to the Board of Commissioners.	Komposisi besarnya tantiem sesuai dengan keputusan RUPS yang didelegasikan kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) sebagai kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna. The amount of the bonus composition is according to the resolution delegated to PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) as the proxy for Series A Dwiwarna shareholder.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi

Besaran remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2023 sebagai berikut:

Nominal Amount/Component of Remuneration

The amount of remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors in the 2023 fiscal year is as follows:

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Honorarium	Tunjangan Incentive	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tantiem atas Tahun 2022 2022 Bonus	Jumlah Total
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	1.379.970.000	275.994.000	108.945.000	4.799.250.000	6.564.159.000
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	1.307.340.000	261.468.000	108.945.000	4.799.250.000	6.477.003.000
E. Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	1.307.340.000	261.468.000	108.945.000	4.799.250.000	6.477.003.000
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	1.307.340.000	261.468.000	108.945.000	4.799.250.000	6.477.003.000
Kurnia Toha*	Komisaris Independen Independent Commissioner	762.615.000	152.523.000	-	-	915.138.000
Rahmat Hidayat Pulungan*	Komisaris Independen Independent Commissioner	762.615.000	152.523.000	-	-	915.138.000
Agus Suhartono*	Komisaris Utama/Independen President Commissioner/Independent	484.200.000	96.840.000	121.050.000	5.332.500.000	6.034.590.000
Devi Pradnya Paramita*	Komisaris Commissioner	326.835.000	65.367.000	-	-	392.202.000

*Catatan | Notes:
1) Pada tanggal 21 Maret 2023, Sdri. Devi Pradnya Paramita (Komisaris) masa jabatannya berakhir karena hukum. mengingat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PTBA yang bersangkutan dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Komisaris di PTBA. pasca dialihtugaskannya dari Direktur *Holding* (MIND ID) menjadi sebagai Direktur Keuangan PT Indonesia Asahan Aluminium (sister company PTBA).
2) Pada tanggal 11 April 2023, Sdr Agus Suhartono (Komisaris Utama/Independen) berakhir jabatannya karena hukum untuk periode kedua.
3) Sdr. Kurnia Toha dan Sdr. Rahmat Hidayat Pulungan menjabat terhitung sejak tanggal RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 15 Juni 2023.
4) Tantiem atas tahun buku 2022 sebagaimana di atas termasuk tantiem yang di *lock* oleh PTBA sebagaimana ketentuan persyaratan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023
1) On March 21, 2023, Devi Pradnya Paramita (Commissioner)'s term of office ended due to applicable law considering that in accordance with the provisions of the PTBA Articles of Association, the person concerned is prohibited from holding concurrent positions as Commissioner at PTBA after being transferred from Director of Holding (MIND ID) to Director of Finance at PT Indonesia Asahan Aluminum (PTBA Sister Company).
2) On April 11, 2023, Agus Suhartono (Main/Independent Commissioner) ended his position due to applicable law for the second period.
3) Kurnia Toha and Rahmat Hidayat Pulungan took office since the date of the 2022 Annual GMS on June 15, 2023.
4) Bonuses for the 2022 financial year as written above include bonuses locked by PTBA in accordance with the requirements of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-03/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Direksi
Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Honorarium	Tunjangan Incentive	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tantiem atas Tahun 2022 2022 Bonus	Jumlah Total
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	3.228.000.000	270.000.000	269.000.000	11.850.000.000	15.617.000.000
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	2.743.800.000	270.000.000	228.650.000	10.072.500.000	13.314.950.000
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Director of Operational and Production	2.743.800.000	270.000.000	228.650.000	10.072.500.000	13.314.950.000
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	2.743.800.000	270.000.000	228.650.000	10.072.500.000	13.314.950.000
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Resources	2.743.800.000	270.000.000	228.650.000	10.072.500.000	13.314.950.000

*Catatan | Notes:
Tantiem atas tahun buku 2022 sebagaimana di atas termasuk tantiem yang di *lock* oleh PTBA sebagaimana ketentuan persyaratan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
Bonuses for the 2022 financial year as written above includes the bonus locked by PTBA in accordance with the regulation of the Minister of SOEs Number PER-03/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

The Amount of Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors in 2023

Uraian Description	Jumlah (Rp) Total (Rp)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris The Amount of Remuneration for Board of Commissioners	34.252.236.000
Jumlah Remunerasi Direksi The Amount of Remuneration for Board of Directors	68.876.800.000

Informasi Mengenai Rasio Gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perusahaan

Information on the salary ratio of Board of Commissioners, Board of Directors, and PTBA Employees

Perihal Description	2023	2022	2021
Direktur Utama terhadap Direktur President Director to Directors	1 : 1	1 : 2	1 : 1
Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris President Commissioner to the Board of Commissioners	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director to President Commissioner	1 : 0.4	1 : 2	1 : 1
Direktur Utama terhadap Karyawan tertinggi President Director to the Highest Employee	1 : 0.231	1 : 0.968	1 : 0.283
Direktur Utama terhadap Karyawan terendah *Full Year* President Director to the Lowest Full Year Employee	1 : 0.01	1 : 0.028	1 : 0.013
Direktur Utama terhadap Karyawan terendah President Director to the Lowest Employee	1 : 0.001	1 : 0.002	1 : 0.001
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah *Full Year* President Director to the Lowest Full Year Employee	1 : 0.042	1 : 0.029	1 : 0.047
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah Highest Employee to the Lowest Employee	1 : 0.004	1 : 0.002	1 : 0.01
Karyawan Terendah *Full Year* terhadap UMP Lowest Full Year Employee to the Provincial Minimum Wage	1 : 0.271	1 : 0.348	1 : 0.332
Karyawan Terendah terhadap UMP Lowest Employee to the Provincial Minimum Wage	1 : 3	1 : 6	1 : 3

Yang dimaksud karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah karyawan dengan jumlah penghasilan tertinggi selama satu tahun buku, sementara karyawan terendah *full year* adalah karyawan dengan penghasilan terendah selama satu tahun buku yang masa kerjanya selama 12 bulan, dan karyawan terendah adalah karyawan dengan penghasilan terendah selama satu tahun buku yang masa kerja nya kurang dari 12 bulan.

The highest employee in the table above is an employee with the highest amount of income for one fiscal year, while the lowest full-year employee is an employee with the lowest salary for one fiscal year with 12 months working period. The lowest employee is an employee with the lowest salary for one fiscal year with a working period of less than 12 months.

Hubungan Afiliasi Antara Direksi dan Dewan Komisaris

Affiliations among Board of Directors and Board of Commissioners

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dilarang untuk memiliki hubungan afiliasi antar anggota Dewan Komisaris, antar anggota Direksi, atau Direksi dengan Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan sehingga Dewan Komisaris maupun Direksi akan sanggup mengambil keputusan tanpa merugikan Perusahaan.

The Company's Board of Commissioners and Board of Directors are prohibited from having affiliated relationships between members of Board of Commissioners, between members of Board of Directors, or between Board of Directors and Board of Commissioners, or with Shareholders as stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This aims to avoid conflicts of interest so that Board of Commissioners and Board of Directors will be able to make decisions without harming the Company.

Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/Pengendali dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Family relationships of members of Board of Commissioners with fellow members of Board of Commissioners and/or members of Board of Directors and Major/Controlling Shareholders can be seen in the table below:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Hubungan Afiliasi** Affiliation					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham Utama/ Pengendali** Main/Controlling Shareholder	
		Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
Dewan Komisaris Board of Commissioners							
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	-	√	-	√	-	√
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√
E. Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	-	√	-	√	-	√
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	-	√	-	√	-	√
Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√
Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√
Direksi Board of Directors							
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	-	√	-	√	-	√
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	-	√	-	√	-	√
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	-	√	-	√	-	√
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	-	√	-	√	-	√
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	-	√	-	√	-	√

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Composition Diversity

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang menyatakan bahwa komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ maupun secara individu masing-masing. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dan pengurusan oleh Direksi.

Based on the recommendation from the Financial Services Authority as outlined in the Appendix to Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance, the composition of members of Board of Commissioners and Board of Directors is a combination of characteristics both in terms of organs and individually respectively. These characteristics can be reflected in the determination of expertise, knowledge, and experience required in carrying out supervisory and advisory duties by Board of Commissioners and management by Board of Directors.

Komposisi keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki oleh Perusahaan terdiri dari anggota yang memiliki latar belakang berbeda mulai dari pendidikan/ bidang keilmuan, kompetensi, keahlian, gender, usia dan pengalaman kerja. Keberagaman komposisi tersebut dianggap perlu oleh Perusahaan ketika proses pengambilan sebuah keputusan yang lebih objektif dan komprehensif dan dapat memberikan alternatif pemecahan masalah.

The composition of Board of Commissioners and Board of Directors owned by the Company consists of members who have different backgrounds ranging from education/ scientific fields, competencies, expertise, gender, age, and work experience. The Company's diversity of composition is needed to create a more objective and comprehensive decision-making process. It is also expected to provide alternative solutions.

Keberagaman komposisi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi PTBA yang menjabat di tahun 2023, disampaikan pada tabel berikut.

The following is the diversity of composition by each member of PTBA's Board of Commissioners and Board of Directors in 2023.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023
Tabel of Board of Commissioners and Board of Directors Diversity in 2023

No	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Sex	Pendidikan Education	Pengalaman Experience
1	Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commisioner	72	Pria Male	• S3, Ecole des Mines de Nancy, Perancis (1991) • S2, Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1985) • S1, Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung (1976) • Postgraduate at the Ecoles des Mines de Nancy, France (1991) • Master of Industrial Engineering at Bandung Institute of Technology (1985) • Bachelor Degree in Mining at Bandung Institute of Technology (1976)	• Komisaris Independen PT Vale Indonesia Tbk (2018) • Advisor Tambang Bawah Tanah PT Cibaliung Sumber Daya Mineral (2011) • Komisaris Independen PT Antam Tbk (2009) • Independent Commissioner at PT Vale Indonesia Tbk (2018) • Underground Mining Advisor at PT Cibaliung Sumber Daya Mineral (2011) • Independent Commissioner at PT Antam Tbk (2009) • Independent Commissioner at PT Vale Indonesia Tbk (2018)
2	Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	61	Pria Male	• Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) (2008) • Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) (1998) • Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (Sekkau) (1993) • Indonesian Air Force Academy (1985) • Army Forces Staff and Command School (2008) • Air Forces Staff and Command School (1998) • Air Force Unit Command School (1993) • Indonesian Air Force Academy (1985)	• Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan BIN (2017-2020) • Expert Staff for Defense and Security of BIN (2017-2020) • Kepala Biro Pengamanan Sekretariat Militer Presiden (2014-2017) • Head of Security Bureau of the Presidential Military Secretariat (2014-2017) • Kepala Biro Personel TNI dan Polri Sekretariat Militer Presiden (2012-2014) • Head of the Indonesian Armed Forces and Police Personnel Bureau, Presidential Military Secretariat (2012-2014)

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Tabel of Board of Commissioners and Board of Directors Diversity in 2023

No	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Sex	Pendidikan Education	Pengalaman Experience
3	E. Piterdono Hz	Komisaris Commissioner	63	Pria Male	• S2, Magister Manajemen di Universitas Bandar Lampung (2001) • S1, Ekonomi Manajemen di Universitas Saburai Lampung (2001) • S1, Teknik Geologi di UPN Veteran Yogyakarta (1986) • Master Degree of Bandar Lampung University (2001) • Bachelor Degree in Economy Management of Saburai Lampung University (2001) • Bachelor Degree in Geological Engineering of UPN Veteran Yogyakarta (1986)	• Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (2017-2020) • Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung (2014) • Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung (2012) • Head of Lampung Province Regional Revenue Agency (2017-2020) • Head of Lampung Province Mining and Energy Service (2014) • Head of of Lampung Province Manpower and Transmigration Service (2012)
4	Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	61	Pria Male	• Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi Polri (2008) • Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (2005) • Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (1998) • Akademi Kepolisian (1994) • Police Staff and High-Level Leadership School of National Police of the Republic of Indonesia (2008) • National Defense Institute of the Republic of Indonesia (2005) • Police Staff and Leadership School (1998) • Police Academy (1994)	• Tenaga Ahli Menteri BUMN bidang Mediasi (2023-sekarang) • Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN (2020-2023) • Deputi Bidang Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (2016) • Pjs. Gubernur Sulawesi Barat (2016) • Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (2015) • Expert Staff of the Minister of SOEs in Mediation (2023-present) • Deputy for Law and Legislation, Ministry of SOEs (2020-Present) • Deputy for Coordination of Security and Public Order at the Coordinating Ministry for Politics, Legal, and Security Affairs (2016) • West Sulawesi Acting Governor (2016) • Director of Criminal Acts for Criminal Investigation of National Police of the Republic of Indonesia (2015)
5	Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	62	Pria Male	• S3, University of Washington School of Law (2007) • S2, University of Washington School of Law (1998) • S1, Hukum, Universitas Indonesia (1987) • Doctoral Degree from the University of Washington School of Law (2007) • Master Degree from the Washington School of Law (1998) • Bachelor Degree in Law from Universitas Indonesia (1987)	• Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN (2016-2018) • Head of Law and Public Relations Department at the Agrarian and Spatial Planning Ministry (2016-2018) • Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI (2018-2020) • Chairman of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) (2018-2020) • Chairman of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) (2018-2023)
6	Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	45	Pria Male	• S3, Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2020. • S2, Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016 • S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute pada tahun 2012 • S1, Fakultas Syariah IAIN Jakarta pada tahun 2001 • Doctoral Degree at Jakarta State University (2020) • Master Degree at Jakarta State University (2016) • S1, Faculty of Economics and Business, Perbanas Institute in 2012 • S1, Sharia Faculty at IAIN Jakarta in 2001	• Komisaris PT Berdikari (2013-2015) • Komisaris PT Rekayasa Industri (2015-2017) • Komisaris Independen PT KAI (Persero) (2017-2021) • Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk (2021-2023) • Commissioner of PT Berdikari (2013-2015) • Commissioner of PT Rekayasa Industri (2015-2017) • Independent Commissioner of PT KAI (2017-2021) • Independent Commissioner of PT Kimia Farma Tbk (2021-2023)
7	Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	59	Pria Male	• S2, Administrasi dan Kebijakan Bisnis, Universitas Indonesia (2004) • Master of Business Administration and Policy, University of Indonesia (2004)	• Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2020-2021) • *President Director* PT Nuansa Cipta Coal Investment (2016-2020) • *President Director* PT Muba Coal (2016-2020) • Direktur Marketing PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal (2015-2016) • Business Development Director of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2020-2021) • President Director of PT Nuansa Cipta Coal Investment (2016-2020) • President Director of PT Muba Coal (2016-2020) • Marketing Director of PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal (2015-2016)

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023
Tabel of Board of Commissioners and Board of Directors Diversity in 2023

No	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Sex	Pendidikan Education	Pengalaman Experience
8	Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	51	Wanita Female	S1, Teknik Sipil Universitas Indonesia (1996) Bachelor of Civil Engineering, University of Indonesia (1996)	• *Group Head Corporate Solution* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-April 2021) • *Group Head Treasury* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019) • *Group Head Market Risk* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016) • Group Head Corporate Solution of PT Bank Mandiri Tbk (2019-April 2021) • Group Head Treasury of PT Bank Mandiri Persero (2016-2019) • Group Head Market Risk of PT Bank Mandiri Persero (2015-2016)
9	Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	60	Pria Male	S1, Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (1990) Bachelor of Geology Engineering from Gadjah Mada University (1990)	• General Manajer Unit Pertambangan Tanjung Enim PT Bukit Asam Tbk (2016-2020) • General Manajer Unit Pertambangan Tanjung Enim PT Bukit Asam Tbk (2016-2020) • General Manager for Tanjung Enim Mining Unit of PT Bukit Asam Tbk (2016-2020)
10	Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	54	Pria Male	• Master of Business Administration, George Simon Ohm – Management Institut Nurnberg, Jerman (2015) • S2, Manajemen di Universitas Sriwijaya (2012) • S1, Teknik Sipil di Universitas Andalas (1995) • Master of Business Administration, George Simon Ohm – Management Institut Nurnberg, Jerman (2015) • Master in Management of Sriwijaya University (2012) • Bachelor in Civil Engineering of Andalas University (1995)	• *Vice President* Penanganan dan Angkutan Batu bara PT Bukit Asam Tbk (2020-2021) • Direktur Utama PT Bukit Prima Bahari (2019-2020) • *Vice President* Pemasaran dan Penjualan Ekspor PT Bukit Asam Tbk (2017-2019) • Vice President of Coal Handling and Transportation of PT Bukit Asam Tbk (2020-2021) • President Director of PT Bukit Prima Bahari (2019-2020) • Vice President Marketing and Export Sales of PT Bukit Asam Tbk (2017-2019)
11	Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	57	Pria Male	• S2, Manajemen Universitas Sriwijaya (2007) • S1, Ekonomi Universitas Sriwijaya (1990) • Master in Management, Sriwijaya University (2007) • Bachelor in Economics, Sriwijaya University (1990)	• Direktur Utama PT Bukit Multi Investama (2020-2021) • Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk (2017-2020) • Senior Manajer Perbendaharaan dan Anggaran PT Bukit AsamTbk (2016-2017) • Senior Manajer Perbendaharaan dan Pendanaan PT Bukit Asam Tbk (2014-2016) • Senior Manajer Akuntansi dan Anggaran PT Bukit Asam Tbk (2009-2014) • President Director of PT Bukit Multi Investama (2020-2021) • Corporate Secretary of PT Bukit Asam Tbk (2017-2020) • Senior Manager of Treasury and Budget of PT Bukit Asam Tbk (2016-2017) • Senior Manager of Treasury and Funding of PT Bukit Asam Tbk (2014-2016) • Senior Manager of Accounting and Budgeting of PT Bukit Asam Tbk (2009-2014)

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of Board of Commissioners

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung yang berada di bawahnya. Organ pendukung Dewan Komisaris Bukit Asam, yaitu:

1. Sekretariat Dewan Komisaris;
2. Komite Audit;
3. Komite Risiko Usaha, Pasca tambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) (Dimana sejak tanggal 15 Desember 2023 Komite tersebut dipecah menjadi 2 yaitu (i) Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dan (ii) Komite Nominasi dan Remunerasi).

Sekretariat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris membentuk Sekretariat Dewan Komisaris guna membantu kelancaran pekerjaan terkait kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Di samping tugas kesekretariatan, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat juga bertugas untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris harus memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan.

Kriteria

Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berasal dari luar Perusahaan;
2. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan Perusahaan;
3. Memiliki integritas yang baik;
4. Memahami fungsi kesekretariatan;
5. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

In order to support the effective implementation of supervisory duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs, namely:

1. Secretariat of the Board of Commissioners;
2. Audit Committee;
3. Business Risk, Post Mining, CSR, Nomination, Remuneration & Human Capital Development Committee (Whereas since December 15, 2023, the Committee has been divided into two, namely (i) Risk Monitoring and Integrated Governance Committee and (ii) Nomination and Remuneration Committee).

Secretary of Board of Commissioners

The Board of Commissioners needs a secretary to assist them in all activities related to their responsibilities. The Secretariat of the Board of Commissioners is led by a Secretary of the Board of Commissioners, who is appointed and dismissed by the Board of Commissioners. Besides secretarial duties, the Secretary of the Board of Commissioners as head of the Secretariat is also responsible to ensure that the Board of Commissioners complies with statutory regulations and applies the principles of good corporate governance in carrying out their duties. In the context of orderly administration and implementation of good corporate governance, the Secretariat of the Board of Commissioners must ensure that documents for carrying out the activities of the Board of Commissioners are stored properly in the Company.

Criteria

The Secretary to the Board of Commissioners must fulfill the following requirements:

1. Comes from outside the Company;
2. Understand the system of management, supervision, and development of the Company;
3. Have good integrity;
4. Understand secretarial functions;
5. Have the ability to communicate and coordinate well.

Term of Office

Based on the provisions of Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the term of office of the Secretary of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners at 3 (three) years and can be reappointed for 2 (two) years, without reducing the rights of the Board Commissioner to dismiss the concerned person at any time.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris
Profile of the Secretary of the Board of Commissioners

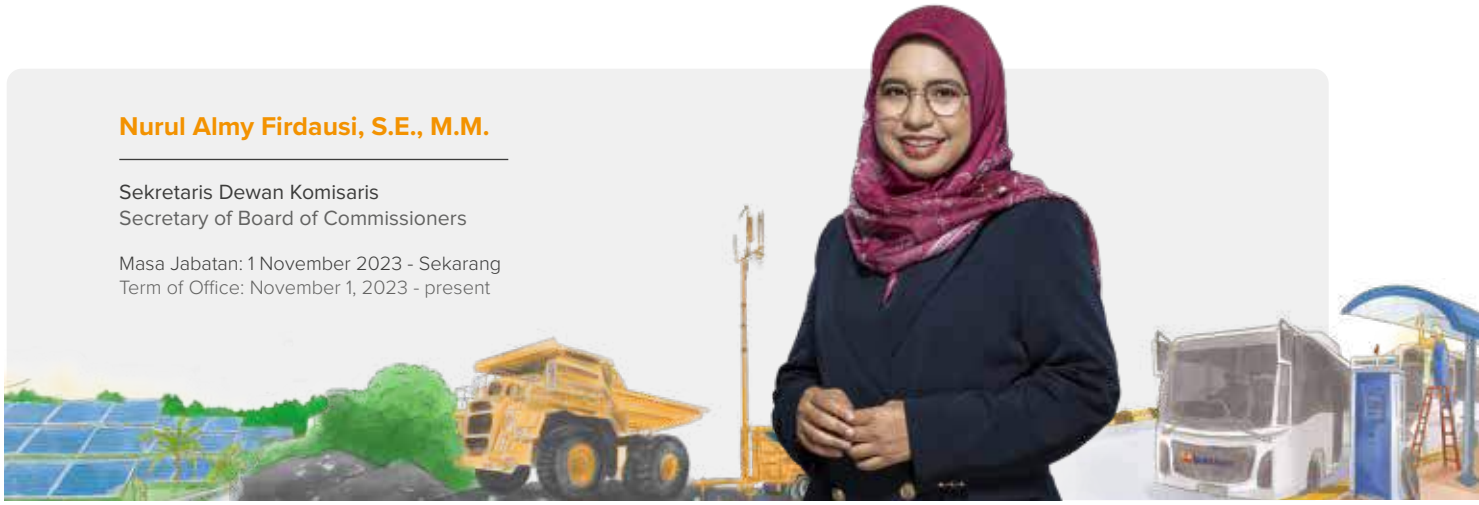

Nurul Almy Firdausi, S.E., M.M.

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioners

Masa Jabatan: 1 November 2023 - Sekarang
Term of Office: November 1, 2023 - present

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Place, Date of Birth/Age	Bogor, 7 April 1985/ 38 Tahun Bogor, April 7, 1985/ 38 Years Old
Domisili Domicile	Bogor
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 06/SK/PTBA-DEKOM/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 Board of Commissioners Decree No. 06/SK/PTBA-DEKOM/X/2023 on October 31, 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2, Manajemen Bisnis, Bina Nusantara Business School (2021) • S1, Ekonomi – Akuntansi, Universitas Indonesia (2009) • D3, Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2003) • Master Degree at Business Management from Bina Nusantara Business School (2021) • Bachelor's Degree in Economics – Accounting from University of Indonesia (2009) • Diploma in Accounting from Indonesian State College of Accountancy (2003)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Koordinator Bidang Jasa Pariwisata & Pendukung, Kementerian BUMN (2023 – sekarang) • Subkoordinator Bidang Jasa Pariwisata & Pendukung, Kementerian BUMN (2021-2023) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2018-2023) • Subkoordinator Bidang Usaha Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Kementerian BUMN (2020-2021) • Tourism & Support Services Coordinator at SOEs Ministry (2023-present) • Sub-coordinator for Tourism & Support Services at SOEs Ministry (2021-2023) • Secretary of Board of Commissioners at PT Wijaya Karya Tbk (2018-2023) • Sub-coordinator for Logistics, Regional and Tourism Business Sector at SOES Ministry (2020-2021)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	PNS Kementerian BUMN Civil servants of the Ministry of SOEs
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholders.
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Wilma Darwin, E.E., M.S., Ak.

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioners

Masa Jabatan: 1 Januari 2023 - 30 Oktober 2023
Term of Office: January 1, 2023 - October 30, 2023

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Place, Date of Birth/Age	Padang, 26 November 1972/51 tahun Padang, November 26, 1972/51 years
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Kedua kali diangkat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Bukit Asam tanggal 26 April 2022, 01/SK/PTBA-DEKOM/IV/2022 Second time appointed as Secretary of the Board of Commissioners of Bukit Asam on April 26, 2022, 01/SK/PTBA-DEKOM/IV/2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi, Universitas Indonesia (2008) • S1 Manajemen, Universitas Andalas (1995) • Master Degree in Accounting Science Postgraduate Program, University of Indonesia (2008) • Bachelor Degree of Management, Andalas University (1995)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Sekretaris Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk (2019-2023) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Timah Tbk (2016-2019) • Pegawai Negeri Sipil (PNS) (1996-sekarang) • Secretary of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk (2019-2023) • Secretary of the Board of Commissioners of PT Timah Tbk (2016-2019) • Civil Servants (PNS) (1996-present)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	PNS Kementerian BUMN Civil servants of the Ministry of SOEs
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 17/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Penetapan Pedoman kerja Sekretariat Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk., berdasarkan hal tersebut tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan Sekretaris Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tugas Sekretariat Dewan Komisaris:

a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;

c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
d. Menyusun RKA Dewan Komisaris;
e. Menyusun rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;

Duties and Responsibilities

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 17/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 dated December 31, 2023, regarding the Establishment of the Guidelines for the Secretariat of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk., the duties and responsibilities related to the Secretary of the Board of Commissioners are as follows:

The Duties of the Secretariat of the Board of Commissioners include, among others:

a. Prepare meetings, including briefing sheets for the Board of Commissioners;
b. Prepare minutes of meetings of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the company's Articles of Association;
c. Administering Board of Commissioners documents, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
d. Prepare RKA for the Board of Commissioners;
e. Prepare draft reports for the Board of Commissioners;

f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Sedangkan tugas yang menjadi tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris, yaitu:
a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip GCG;
b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
c. Mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
d. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

f. Carry out other duties of the Board of Commissioners.

Meanwhile, the responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners are:
a. Ensuring the Board of Commissioners complies with statutory regulations and applies GCG principles;
b. Providing information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
c. Coordinating committee members, if necessary in order to facilitate the duties of the Board of Commissioners;
d. As a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.

Pengembangan Kompetensi

Program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:

Competency Development

The competency development program carried out by the Secretary of the Board of Commissioners throughout 2023 is as follows:

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2023
Table of Competency Development for the Secretary to the Board of Commissioners in 2023

Nama Peserta Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Date and Place
Wilma Darwin	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of Board of Commissioners	*Driving Collaborative Leadership in Charging Time*	PTBA	• 12 Januari 2023, Tanjung Enim • January 12, 2023, Tanjung Enim
		Webinar INSIGHT "Direksi Bercerita" INSIGHT Webinar "Direksi Bercerita"	Kementerian BUMN SOEs Ministry	• 31 Januari 2023, Online • January 31, 2023, online
		1. Mining Industry Outlook & Top Risk 2023 2. Overview Aspek Penerapapan Manajemen Risiko dalam Permen BUMN no 2/MBU/03/2023 3. Fraud Risk Management 1. Mining Industry Outlook & Top Risk 2023 2. Overview Aspek Penerapapan Manajemen Risiko dalam Permen BUMN no 2/MBU/03/2023 3. Fraud Risk Management	Delloitte -MIND ID-PTBA	• 30 Maret 2023, Online • March 30, 2023, online
		BSE GRC MasterClass-Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & anak Perusahaan BUMN BSE GRC MasterClass-Socialization of the Ranking of SOEs & SOEs subsidiaries	BUMN School of excellence	• 14 September 2023, Online • September 14, 2023
		ESG for Boards – Governance of ESG	BUMN School of excellence	• 27 September 2023, Online • September 27, 2023, online
		GRC Integrated Information for Supervisionary Board	BUMN School of excellence	• 25 Oktober 2023, Online • October 25, 2023, online
		CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	BUMN School of excellence	• 25 Oktober 2023, Online • October 25, 2023, online
Nurul Almy F	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of Board of Commissioners	*Managing For Development Result*	PLN Training Center	• 3 Oktober 2023, Jakarta • October 3, 2023, Jakarta
		Result-Focused Project Design & Monitoring Framework	Mandiri University & Asian Development Bank	• 9 Juni 2023, Jakarta • June 9, 2023, Jakarta
		Idea Talks Vol 3 : Scaling Up SMEs Through Digitalization and Social Function	OJK Institute	• 9 Februari 2023 (*online*) • February 9, 2023, online
		Short Course: "Seminar on Reform and Governance of State-Owned Enterprise in China"	International Cooperation Center (ICC) of National Development and Reform Commission (NDRC) China	• 31 Agustus – 20 September 2023, Tiongkok • August 31-September 20, 2023, China

Kebijakan dan Besaran Remunerasi

Penetapan remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 17/SK/PTBA-DEKOM/

Remuneration Policy and Amount

The determination of the remuneration for the Secretary of the Board of Commissioners is regulated in Board of Commissioners Decision No. 17/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023

XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Penetapan Pedoman kerja Sekretariat Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, dan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala setiap tahunnya berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas administrasi, termasuk mengkoordinasikan anggota Komite dan sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Secara umum, di tahun 2023 Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tercermin dari realisasi KPI Sekretaris Dewan Komisaris sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

dated December 31, 2023, regarding the Establishment of the Guidelines for the Secretariat of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, and in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Board of Commissioners' Assessment on the Secretary of Board of Commissioners Performance

The performance of Secretary of Board of Commissioners is periodically evaluated by Board of Commissioners based on the implementation of duties and responsibilities of Secretary of Board of Commissioners in carrying out administrative duties, including coordinating Committee members and serving as a liaison officer for Board of Commissioners with other parties.

In 2023, the Secretary of the Board of Commissioners has carried out its duties and functions well, as reflected in the realization of the Secretary of the Board of Commissioners' KPI as contained in the following table.

Tabel Realisasi KPI Sekretaris Dewan Komisaris
Table of KPI Realization of the Secretary of Board of Commissioners

Program Kerja Work Program	Uraian Description	Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	%	Skor Score
Kegiatan Internal Dewan Komisaris Internal Activities of Board of Commissioners			**20**			**21,20**
Menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris Organizing internal meetings of Board of Commissioners	Terselenggaranya rapat internal Dekom setiap bulan The Board of Commissioners internal meeting is being held every month	12x (Kali / Times)	12	15	125	13,2
Menyelenggarakan program pengenalan dan peningkatan kompetensi Dekom dan Organ Organizing induction and competency development program of Board of Commissioners and Organs	Keikutsertaan Dewan Komisaris dan/ atau Organ pada program pengenalan dan peningkatan kompetensi. Participation of Board of Commissioners and/or Organs in induction and competency development programs.	12x (Kali / Times)	4	2	100	4
Menyelenggarakan kunjungan kerja lapangan Organizing site visits	Terselenggaranya kunjungan lapangan ke Anak Perusahaan/ Unit Site visit to Subsidiaries/Units	4x (Kali / Times)	4	4	100	4
Kegiatan Dewan Komisaris dengan Direksi Activities of Board of Commissioners with Board of Directors			**36**			**37,8**
Menyelenggarakan Rapat Komisaris – Direksi Organizing Board of Commissioners – Board of Directors Meetings	Terselenggaranya Rapat Dewan Komisaris - Direksi The implementation of meetings for Board of Commissioners and Board of Directors	12x (Kali / Times)	18	14	116	19,8
Menyusun RKA dan KPI Dekom Develop RKA and KPI of Board of Commissioners	Tersusunnya RKA dan KPI Dewan Komisaris RKA and KPI of Board of Commissioners is done	1x (Kali / Times)	18	1	100	18
Kegiatan Dewan Komisaris dengan MIND ID Activities of Board of Commissioners with MIND ID			**33**			**33**
Menyusun laporan Kinerja Bulanan Prepare Monthly Performance reports	Tersusunnya Laporan Kinerja Bulanan Monthly Performance Reports are done	12 Surat 12 letters	12	12	100	12
Penyusunan laporan Progres Proyek Strategis Preparation of Strategic Project Progress reports	Tersusunnya Laporan progres proyek strategis Strategic Project Progress reports are done	12 Surat 12 letters	12	12	100	12
Menyusun laporan KPI Triwulanan Prepare Quarterly KPI reports	Tersusunnya Laporan KPI Triwulanan Quarterly KPI reports are done	3 Surat 3 letters	6	3	100	6

Tabel Realisasi KPI Sekretaris Dewan Komisaris
Table of KPI Realization of the Secretary of Board of Commissioners

Program Kerja Work Program	Uraian Description	Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	%	Skor Score
Menyusun Laporan Kinerja Anak Perusahaan Triwulanan Prepare Quarterly Subsidiary Performance Reports Company	Tersusunnya Laporan Kinerja Anak Perusahaan Triwulanan Quarterly Subsidiary Performance Reports are done	3 Surat 3 letters	3	3	100	3
Kegiatan RUPS GMS Activities			**11**			**11**
Penyusunan Tugas Pengawasan Dekom Preparation of Board of Commissioners Supervisory Duties	Tersusunnya Laporan Tugas Pengawasan Dekom Board of Commissioners Supervisory Duties Report is done	1x	11	1	100	11
Jumlah Total			**100**			**103**

Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Implementation of Duties in 2023

In 2023, Secretary of Board of Commissioners has carried out the following activities:

Tabel Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris
Table of Duties of Board of Commissioners' Secretary

No	Program Kerja Work Program	Jumlah Pelaksanaan Realization	Satuan Unit
1	Penyelenggaraan Rapat: Organizing Meetings:		Kali Times
	a. Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Meeting of the Board of Commissioners	15	
	b. Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi Joint Meeting of the Board of Commissioners - Board of Directors	14	
	c. Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting	14	
	d. Rapat Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi, dan PSDM Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration and PSDM Committee meetings	14	
2	Penyusunan RKA dan KPI Dewan Komisaris Preparation of RKA and KPI for the Board of Commissioners	1	Dokumen Documents
3	Persuratan: Letters:		
	a. Surat Dewan Komisaris Board of Commissioners Letter	107	Dokumen Documents
	b. Nota Dinas Komite Audit Audit Committee Service Note	62	
	c. Nota Dinas Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi, dan PSDM Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration and PSDM Committee Service Note	49	
4	Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Organizing the Annual GMS and Preparing the Supervisory Duties Report for the Board of Commissioners	1	Kali Times
5	Kunjungan kerja atau secara virtual Work visit or virtual	10	Pertemuan Meetings
6	Keikutsertaan Diklat Participation in training	5	Diklat Trainings

Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committee Under Board of Commissioners

Sejalan dengan ditetapkannya Nomor:PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("Peraturan Menteri BUMN No.2/2023") dan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko No. SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Di Lingkungan BUMN, MIND ID selaku induk dari PTBA telah menetapkan klasifikasi risiko PTBA berdasarkan Surat Direktur Manajemen Risiko dan HSSE No. 171/E.DIRMRHSSE/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 Perihal Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Berdasarkan penetapan dari MIND ID, PTBA tergolong anak perusahaan MIND ID dengan klasifikasi Sistemik A Individu. Atas penetapan tersebut, maka Komite di bawah Dewan Komisaris PTBA perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Kementerian BUMN yang terdiri dari (i) Komite Audit, (ii) Komite Pemantau Risiko merangkap Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan (iii) Komite Nominasi dan Remunerasi.

In line with the enactment of Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Significant State-Owned Enterprises Governance and Corporate Activities ("Minister of SOEs Regulation No. 2/2023") and Deputy Deputy for Finance and Risk Management Decision No. SK-3/DKU.MBU/05/2023 concerning Technical Instructions on the Composition and Qualifications of Risk Management Organ in SOE Environment, MIND ID as the parent company of PTBA has established the risk classification of PTBA based on the Letter of Risk Management and HSSE Director No. 171/E.DIRMRHSSE/X/2023 dated October 9, 2023, regarding the Determination of Risk Categories and Classifications of PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Based on MIND ID's determination, PTBA is classified as a MIND ID subsidiary with a Systemic A Individual classification. Following this determination, adjustments need to be made to the Committees under the PTBA Board of Commissioners in accordance with the regulations applicable in the Ministry of SOEs, which consist of (i) Audit Committee, (ii) Risk Monitoring Committee concurrently serving as the Integrated Governance Committee, and (iii) Nomination and Remuneration Committee.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 15 Desember 2023, Dewan Komisaris PTBA telah menetapkan susunan Komite di bawah Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

Following up on this matter, during the Internal Board of Commissioners Meeting on December 15, 2023, the PTBA Board of Commissioners determined the composition of Committees under the Board of Commissioners as follows:

Komite Audit
Audit Committee

Jabatan di Komite Position at Committee	Nama Name	Keterangan Description
Ketua Chairman	Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner
Wakil Ketua Deputy Chairman	Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner
Anggota Member	Dody Masykur	Pihak Independen Independent Party
Anggota Member	Fadhila Achmadi Rosyid	Pihak Independen Independent Party

Profil Komite Audit
Profile of the Audit Committee



Ketua Komite Audit
Chairman of Audit Committee

Marsda TNI (Purn) Andi Pahril Pawi, S.Sos

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan: 10 Juni 2020 - Sekarang
Term of Office: June 10, 2020 - Present

Usia Age	61 tahun 61 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Bone, 4 April 1962 Bone, April 4, 1962
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) (2008) • Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) (1998) • Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (Sekkau) (1993) • Akademi Angkatan Udara (1985) • Army Forces Staff and Command School (2008) • Air Forces Staff and Command School (1998) • Air Force Unit Command School (1993) • Indonesian Air Force Academy (1985)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan BIN (2017-2020) • Kepala Biro Pengamanan Sekretariat Militer Presiden (2014-2017) • Kepala Biro Personel TNI dan Polri Sekretariat Militer Presiden (2012-2014) • Expert Staff for Defense and Security of BIN (2017-2020) • Head of Security Bureau of the Presidential Military Secretariat (2014-2017) • Head of the Indonesian Armed Forces and Police Personnel Bureau, Presidential Military Secretariat (2012-2014)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 10, 2020
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

Wakil Ketua Komite Audit
Vice Chairman of Audit Committee

Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan: 15 Juni 2023- Sekarang
Term of Office: June 15, 2023 – Sekarang



Usia Age	62 tahun 62 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Lampung, 16 Juni 1961 Lampung, June 16, 1961
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3, University of Washington School of Law pada tahun 2007 • S2, University of Washington School of Law pada tahun 1998 • S1, Hukum, Universitas Indonesia tahun 1987 • Doctoral Degree from the University of Washington School of Law (2007) • Master Degree from the Washington School of Law (1998) • Bachelor of Law, University of Indonesia (1987)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI (2018-2020) • Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN (2016-2018) • Chairman of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) (2018-2020) • Head of Legal and Public Relations Center at the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (2016-2018)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Profesor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Professor at the Faculty of Law at University of Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 15, 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

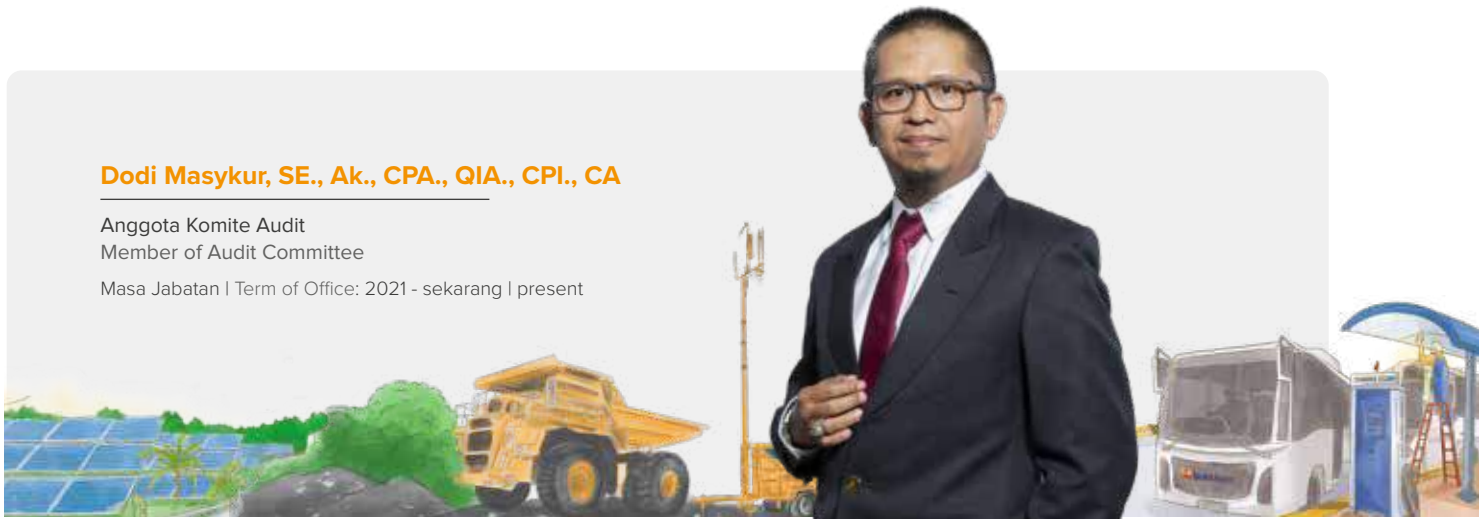

Dodi Masykur, SE., Ak., CPA., QIA., CPI., CA

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Masa Jabatan | Term of Office: 2021 - sekarang | present

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Place, Date of Birth/Age	Padang, 20 Oktober 1974/49 tahun Padang, October 20, 1974/49 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 02/SK/PTBA-DEKOM/III/2021 Board of Commissioners Decree Number 02/SK/PTBA-DEKOM/III/2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 Akuntansi, Universitas Andalas (1998) Bachelor Degree of Accountant from Andalas University (1998)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Audit Partner di KAP Hertanto Grace Karunawan – The International Accounting Group (TIAG) (2016 – sekarang) • Komite Audit di PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2017-2017) • Internal Audit di PT Pertamina Patra Niaga (2012-2016) • IFRS & ICoFR Specialist di PT Pertamina Patra Niaga (2011-2012) • Komite Audit di PT Barata Indonesia (Persero) (2011-2012) • Nonresident Lecturer di Universitas Sahid (2011-2012) • Managing Director di DDM Consulting – Accounting, Assurance, Finance & Business Advisory Services (2009-2011) • Group Head Finance, Tax & Accounting di PT Energi Tata Persada / Catur Khita Persada Group Integrated Drilling and Project Management Services (2008-2009) • Audit Asisten Manajer di PricewaterhouseCoopers – KAP Haryanto Sahari & Rekan (2006-2008) • Audit Asisten Manajer di RSM Indonesia – KAP Aryanto Amir Jusuf & Mawar (2000-2006) • Auditor Akuntan Publik di KJA Sumatera Barat (1995-1997) • Audit Partner at Hertanto Grace Karunawan KAP – The International Accounting Group (TIAG) (2016-present) • Audit Committee at PT Adhi Karya Tbk (2017) • Internal Audit at PT Pertamina Patra Niaga (2012-2016) • IFRS & ICoFR Specialist at PT Pertamina Patra Niaga (2011-2012) • Audit Committee at PT Barata Indonesia (2011-2012) • Nonresident Lecturer at Sahid University (2011-2012) • Managing Director at DDM Consulting – Accounting, Assurance, Finance & Business Advisory Services (2009-2011) • Group Head Finance, Tax & Accounting at PT Energi Tata Persada / Catur Khita Persada Group Integrated Drilling and Project Management Services (2008-2009) • Audit Assistant Manager at PricewaterhouseCoopers – KAP Haryanto Sahari & Partner (2006-2008) • Audit Assistant Manager at RSM Indonesia – KAP Aryanto Amir Jusuf&Mawar (2000-2006) • Auditor at KJA Public Accountant in West Sumatera (1995-1997)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Partner KAP Hertanto Grace Karunawan – The International Accounting Group (TIAG) KAP kepanjangannya Kantor Akuntan Publik – The International Accounting Group (TIAG)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Dr. Eng. Ir. Fadhila Achmadi Rosyid, S.T., M.T.

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Masa Jabatan | Term of Office: 2020 - sekarang | present

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Place, Date of Birth/Age	Semarang, 19 Agustus 1982/41 tahun Semarang, August 19, 1982 / 41 years old
Domisili Domicile	Bandung
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode I: SK Dewan Komisaris No.05/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2020 Periode II: SK Dewan Komisaris No. 04/SK/PTBA-DEKOM/IX/2023 Period I: Board of Commissioners Decree Number 05/SK/PTBA/DEKOM/VIII/2020 Period II: Board of Commissioners Decree Number 04/SK/PTBA-DEKOM/IX/2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3 Engineering bidang Ekonomi Mineral, Akita University, Jepang (2017) • S2 Teknik dalam bidang Ekonomi Mineral, Institut Teknologi Bandung (2007) • S1 Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Bandung (2004) • Doctoral Degree on Mineral Economy of Akita University, Japan (2017) • Master Degree of Mineral Economy of Bandung Institute of Technology (2007) • Bachelor Degree of Mining Engineering of Bandung Insitute of Technology (2004)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Dosen (Asisten Profesor) di Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung • Ketua Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (2020-sekarang) • Peneliti pada Center of Research Excellence (CoRE) Ekonomi dan Manajemen Mineral dan Batubara Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (2012-sekarang) • Lecturer (Professor Assistant) at Mining Engineering of Bandung Institute of Technology • Head of the Undergraduate Mining Engineering Study Program of Bandung Institute of Technology (2020-present) • Researcher at the Center of Research Excellence (CoRE) Economics and Management of Minerals and Coal, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Bandung Institute of Technology (2012-present)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Dosen (Asisten Profesor) di Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung Lecturer (Professor Assistant) at Mining Engineering of Bandung Institute of Technology
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbkv

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Risk Monitoring and Governance Committee

Jabatan di Komite Position at Committee	Nama Name	Keterangan Description
Ketua Chairman	Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner
Wakil Ketua Bidang Risiko Usaha & TKT Deputy Chairman of Business Risk & TKT	E. Piterdono H.Z	Komisaris Commissioner
Wakil Ketua Bidang GCG, CSR/PKBL dan IT Deputy Chairman of GCG, CSR/PKBL, and IT	Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner
Anggota Member	Tri Winarno	Pihak Independen Independent Party
Anggota Member	Helmiansyah Irawan	Pihak Independen Independent Party
Anggota Member	Ganda Marihot Simangunsong	Pihak Independen Independent Party

Profil Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Profile of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee



Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi (Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Chairman of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee(Previously the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & PSDM Committee)

Prof. Dr. Irwandy Arif, DEA., M.Sc

Komisaris Utama
President Commissioner

Masa Jabatan: 10 Juni 2020 - Sekarang
Term of Office: June 10, 2020 – Present

Usia Age	72 tahun 72 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Ujung Pandang, 28 Desember 1951 Ujung Pandang, December 28, 1951
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3, Ecole des Mines de Nancy, Perancis (1991) • S2, Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1985) • S1, Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung (1976) • Doctoral Degree from Ecole des Mines de Nancy, France (1991) • Master of Industrial Engineering at Bandung Institute of Technology (1985) • Bachelor of Mining Engineering at Bandung Institute of Technology (1976)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Komisaris PT Bukit Asam Tbk (2020-2023) • Komisaris Independen PT Vale Indonesia Tbk (2018) • Advisor Tambang Bawah Tanah PT Cibaliung Sumber Daya Mineral (2011) • Komisaris Independen PT Antam Tbk (2009) • Independent Commissioner of PT Vale Indonesia Tbk (2018) • Underground Mining Advisor of PT Cibaliung Sumber Daya Mineral (2011) • Independent Commissioner of PT Antam Tbk (2009)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Staf Khusus Menteri Energi Sumber Daya Mineral (2020 - sekarang) Special Staff of the Minister of Energy and Mineral Resources (2020 - present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020, pengangkatan sebagai Komisaris; • Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023, alih tugas sebagai Komisaris Utama. • 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution on June 10, 2020 • 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution on June 15, 2023 as President Commissioner.
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Bidang Risiko Usaha & TKT (Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Deputy Chairman of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee for Business Risk & TKT (Previously the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & PSDM Committee)

Ir. E. Piterdono HZ, S.E., M.M.

Komisaris
Commisioner

Masa Jabatan: 10 Juni 2020 - Sekarang
Term of Office: June 10, 2020 – Present

Usia Age	63 tahun 63 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Ogan Kemering Ulu, 22 November 1960 Ogan Komering Ulu, November 22, 1960
Domisili Domicile	Bandar Lampung, Lampung
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2, Magister Manajemen di Universitas Bandar Lampung (2001) • S1, Ekonomi Manajemen di Universitas Saburai Lampung (2001) • S1, Teknik Geologi di UPN Veteran Yogyakarta (1986) • Master of Management at the University of Bandar Lampung (2001) • Bachelor of Economy Management at the Saburai University Lampung (2001) • Bachelor of Geological Engineering at UPN Veteran Yogyakarta (1986)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (2017-2020) • Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung (2014) • Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung (2013) • Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung (2012) • Head of Lampung Province Regional Revenue Agency (2017-2020) • Head of Lampung Province Mining and Energy Service (2014) • Head of the Provincial Environmental Management Agency of Lampung Province (2013) • Head of of Lampung Province Manpower and Transmigration Service (2012)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 10, 2020
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Bidang GCG, CSR/PKBL dan IT (Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Deputy Chairman of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee for GCG, CSR/PKBL and IT (Previously the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & HR Committee)

Can Dr. Rahmat Hidayat Pulungan, S.E., M.Pd.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan: 15 Juni 2023- Sekarang
Term of Office: June 15, 2023 – Present

Usia Age	45 tahun 45 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 16 Agustus 1978 Jakarta, August 16, 1978
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3, Universitas Negeri Jakarta (2020) • S2, Universitas Negeri Jakarta (2016) • S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute (2012) • S1, Fakultas Syariah IAIN Jakarta pada tahun (2001) • Doctoral Degree at Jakarta State University (2020) • Master Degree at Jakarta State University (2016) • Bachelor's degree (S1) from the Faculty of Economics and Business, Perbanas Institute (2012) • Bachelor's degree from the Sharia Faculty of Jakarta Islamic State University (2001)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk (2021-2023) • Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017-2021) • Komisaris Utama PT Niaga Prima Jaya (2015-2019) • Komisaris PT Rekayasa Industri (2016-2017) • Komisaris PT Cipta Media Permasindo (2014-2017) • Komisaris PT Berdikari (Persero) (2013-2015) • Komisaris PT Niaga Permasindo (2011-2014) • Independent Commissioner at PT Kimia Farma Tbk (2021-2023) • Independent Commissioner at PT KAI (2017-2011) • President Commissioner at PT Niaga Prima Jaya (2015-2019) • Commissioner at PT Rekayasa Industri (2016-2017) • Commissioner at PT Cipta Media Permasindo (2014-2017) • Commissioner at PT Berdikari (2013-2015) • Commissioner at PT Niaga Permasindo (2011-2014)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 15, 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi (Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Member of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee (formerly the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HR Committee)

Dr. Ing Tri Winarno, ST, MT

Masa Jabatan | Term of Office: 2021 - Sekarang | Present



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Place, Date of Birth/Age	Yogyakarta, 5 November 1972/50 tahun Yogyakarta, November 5, 1972/50 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Pertama kali diangkat sebagai Anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM Perusahaan sejak tahun 2018 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Bukit Asam No. 3/PTBA-DEKOM/ VIII/2018. • Kedua kali diangkat sebagai Anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM Perusahaan sejak tahun 2021 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Bukit Asam No. 4/SK/PTBA-DEKOM/ VIII/2021. • First appointed as Member of the Company's Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HRD Committee since 2018, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, Number 3/PTBA-DEKOM/VIII/2018 • Appointed for the second time as Member of the Company's Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HRD Committee since 2021 based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk Number 4/SK/PTBA-DEKOM/ VIII/2021.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3 Geoscience & Mining Technische Universität Bergakademie Freiberg, Germany (2016) • S2 Teknik Geologi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2006) • S1 Teknik Pertambangan, UPN "Veteran" Yogyakarta (1997) • Doctoral Degree in Geoscience and Mining Technische of Universität Bergakademie Freiberg, Germany (2016) • Master Degree in Geological Engineering of Gadjah Mada University (2006) • Bachelor Degree in Mining Engineering of UPN Veteran Yogyakarta (1997)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara (2022-sekarang) • Kepala Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara (2017-sekarang). • Analis Konservasi Mineral dan Batubara (2013-2017) • Kepala Seksi Konservasi Batubara (2011-2013) • Kepala Seksi Standarisasi Mineral dan Batubara (2009-2011) • Director of Mineral and Coal Program Development (2022-present) • Head of Sub-Directorate for Supervision of Mineral and Coal Revenue (2017-present). • Mineral and Coal Conservation Analyst (2013-2017) • Head of Coal Conservation Section (2011-2013) • Head of Mineral and Coal Standardization Section (2009-2011)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara dan Kepala Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batu bara Director of Mineral and Coal Program Development and Head of Sub-Directorate for Supervision of Mineral and Coal Revenue
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintergrasi (Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee (formerly the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HR Committee)

Helmiansyah Irawan., SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., ASEAN CPI., CIIB., ANZIIF (Snr. Assc) CIP., CACP.

Masa Jabatan | Term of Office: 2023 - Sekarang | Present



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Place, Date of Birth/Age	Jakarta, 22 Januari 1987/36 tahun Jakarta, January 22, 1987 / 36 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Pertama kali diangkat sebagai Anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM Perusahaan sejak 30 September 2020. Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Bukit Asam No. 16/SK/PTBADEKOM/IX/2020. • Selanjutnya diangkat untuk Periode Kedua sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Bukit Asam No.05/SK/PTBA-DEKOM/X/2023 • First appointed as Member of the Company's Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HRD Committee since September 30, 2020, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, Number 16/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 • Subsequently appointed for the Second Period based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk Number 07/SK/PTBA-DEKOM/X/2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S1, Ekonomi, Universitas Persada Indonesia Y.A.I (2008) • S2, Akuntansi Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI (2015) • S3, Ekonomi, Universitas Trisakti (masih menempuh pendidikan) • Bachelor Degree in Economy of YAI Persada University (2008) • Master Degree in Financial Accounting of YAI College of Economy (2015) • Doctoral Degree in Economy of Trisakti University (on-going)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Auditor pada Kantor Akuntan Publik sejak tahun (2008 s/d sekarang) • Anggota Komite Audit PT Reasuransi Nasional Indonesia (2016-2020). • Auditor at Public Accountant Office (2008-present) • Member of Audit Committee of PT Reasuransi Nasional Indonesia (2016-2020)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Partner di KAP Antadaya, Helmiansyah, Yassirli - Member Firm of EURA Audit International Partner at Antadaya, Helmiansyah, Yassirli Public Accountant Office - Member Firm of EURA Audit International.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi (Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee (formerly the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HR Committee)

Dr. Eng. Ganda Marihot Simangunsong, ST, MT

Masa Jabatan | Term of Office: 2023 - Sekarang | Present

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Place, Date of Birth/Age	Bandung, 13 Mei 1976/ 47 tahun Bandung, May 13, 1976/47 years old
Domisili Domicile	Bandung
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM Perusahaan sejak 1 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/SK/PTBA-DEKOM/XI/2023. First appointed as Member of the Company's Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HRD Committee since December 1, 2023, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, Number 08/SK/PTBA-DEKOM/XI/2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3 Kyushu University Japan (2005) • S2 Rekayasa Pertambangan, Institut Teknologi Bandung (2002) • S1 Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Bandung (1999) • Phd of Kyushu University, Japan (2005) • Master Degree in Mining Engineering of Bandung Institute of Technology (2002) • Bachelor Degree in Mining Engineering of Bandung Institute of Technology (1999)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Manajer Laboratorium Geomekanika & Peralatan Tambang (2015 s.d. sekarang) • Ketua Program Studi Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Banding (2016-2020) • Manajer Laboratorium Perencanaan dan Valuasi Tambang (2012-2015) • Staf Pengajar, Lektor Kepala di Intitut Teknologi Bandung (2007 s.d. sekarang) • Geomechanics & Mining Equipment Laboratory Manager (2015-present) • Head of the Mining Engineering Study Program of Bandung Institute of Technology (2016-2020) • Mining Planning and Valuation Laboratory Manager (2012-2015) • Teaching Staff, Associate Professor at Bandung Institute of Technology (2007-present)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Staf Pengajar, Lektor Kepala di Intitut Teknologi Bandung dan Manajer Laboratorium Geomekanika & Peralatan Tambang Teaching Staff, Associate Professor at Bandung Institute of Technology and Geomechanics & Mining Equipment Laboratory Manager
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

Jabatan di Komite Position at Committee	Nama Name	Keterangan Description
Ketua Chairman	Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner
Wakil Ketua Vice Chairman	Carlo B. Tewu	Komisaris Commissioner
Anggota Member	Nora Sri Hendriyeni	Pihak Independen Independent Party

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi
Profile of the Nomination and Remuneration Committee



Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee. Formerly the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & PSDM Committee)

Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan: 15 Juni 2023- Sekarang
Term of Office: June 15, 2023 – Present

Usia Age	62 tahun 62 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Lampung, 16 Juni 1961 Lampung, June 16, 1961
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3 University of Washington School of Law pada tahun 2007 • S2 University of Washington School of Law pada tahun 1998 • S1 Hukum, Universitas Indonesia tahun 1987 • Doctoral Degree from the University of Washington School of Law (2007) • Master Degree from the Washington School of Law (1998) • Bachelor of Law, University of Indonesia (1987)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI (2018-2020) • Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN (2016-2018) • Chairman of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) (2018-2020) • Head of Legal and Public Relations Center at the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (2016-2018)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Profesor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Professor at the Faculty of Law at University of Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 15, 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Vice Chairman of the Nomination and Remuneration Committee (Previously the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & PSDM Committee)

Irjen. Pol. (Purn) Drs. Carlo Brix Tewu

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan: 10 Juni 2020 - Sekarang
Term of Office: June 10, 2020 – Present

Usia Age	61 tahun 61 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Tondano, 13 September 1962 Tondano, September 13, 1962
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi Polri (2008) • Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (2005) • Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (1998) • Akademi Kepolisian (1994 • Police Staff and High-Level Leadership School of National Police of the Republic of Indonesia (2008) • National Defense Institute of the Republic of Indonesia (2005) • Police Staff and Leadership School (1998) • Police Academy (1994)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Tenaga Ahli Menteri BUMN Bidang Mediasi (2023-sekarang) • Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN (2022-2023) • Deputi Bidang Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (2016) • Pjs. Gubernur Sulawesi Barat (2016) • Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (2015) • Expert Staff to the Minister of SOEs in the field of Mediation (2023-present) • Deputy for Law and Legislation, Ministry of SOEs (2020-Present) • Bidang Politik Hukum dan Keamanan (2016) • Deputy for Coordination of Security and Public Order at the Coordinating Ministry for Politics, Legal, and Security Affairs (2016) • West Sulawesi Acting Governor (2016) • Director of Criminal Acts for Criminal Investigation of National Police of the Republic of Indonesia (2015)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Tenaga Ahli Menteri BUMN Bidang Mediasi (2023-sekarang) Expert Staff to the Minister of SOEs in the field of Mediation (2023-present)
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 10, 2020
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Member of the Nomination and Remuneration Committee (formerly the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HRD Committee)

Nora Sri Hendriyeni, Ph.D., CA., CSRA., CSP., CACP

Masa Jabatan | Term of Office: 2023 - Sekarang | Present

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/ Usia Place, Date of Birth/ Age	Padang, 15 Januari 1973/50 tahun Padang, January 15, 1973/50 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Pertama kali diangkat sebagai Anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan SDM Perusahaan sejak 2 November 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, No. 18/SK/PTBA-DEKOM/XI/2020 • Periode Kedua berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No.07/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2023 • First appointed as Member of the Company's Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HRD Committee since November 2, 2020, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, Number 18/SK/PTBA-DEKOM/XI/2020 • Second Period based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No.07/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3 Akuntansi, University of Central Lancashire, United Kingdom (2018) • S2 Manajemen, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1998) • S1 Akuntansi, Universitas Andalas (1996) • Doctoral Degree in Accounting of Central Lancashire University, United Kingdom (2018) • Master Degree in Management of Gadjah Mada University (1998) • Bachelor Degree in Accounting of Andalas University (1996)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Dosen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM (2008 - sekarang) • Ketua Program Studi Akuntansi Bisnis (2009-2014) • Ketua Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen PPM • Lecturer at PPM Management Institute (2008-present) • Head of the Business Accounting Study Program (2009-2014) • Head of the Master of Management Study Program at PPM Management Institute
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Dosen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM Lecturer at PPM Management Institute
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

Tambahan Informasi Komite di Bawah Dewan Komisaris

Mengingat pada tanggal 15 Desember 2023 terdapat perubahan struktur komite di bawah Dewan Komisaris dari dua komite menjadi tiga komite, maka pada laporan tahunan ini hanya akan dijelaskan tentang Komite Audit dan Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Additional Information on Committees Under the Board of Commissioners

Given the restructuring of the committees under the Board of Commissioners on December 15, 2023, from two committees to three committees, this annual report will only explain the Audit Committee and the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration, and Human Capital Development Committee.

Komite Audit

Komite Audit merupakan salah satu organ pendukung Dewan Komisaris yang pembentukannya bersifat wajib berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas pengurusan Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

Komite Audit Perusahaan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/ MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/ MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang dijabarkan dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, bahwa Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Dewan Komisaris (Dekom);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023, tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
10. Akta Notaris Jose Dima Satria, SH, M.Kn. No. 43 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk
11. Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 18/ SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Penetapan Piagam Komite Audit.

Audit Committee

Audit Committee is one of supporting organs of Board of Commissioners that was formed based on the Regulation of Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/2023. The Committee helps the Board of Commissioners in the supervisory function and gives advice to Board of Directors regarding the Company's management, in accordance with the applicable law.

Legal Basis

The Company's Audit Committee was formed based on statutory provisions, as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Republic of Indonesia Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dismissal of State-Owned Enterprises;
4. Financial Services Authority Regulation No. 33/ POJK.04/2014 dated December 8, 2014, concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
5. Financial Services Authority Regulation No. 55/ POJK.04/2015 dated December 23 ,2015, concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee;
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
8. Financial Services Authority Regulation No. 21/ POJK.04/2015 dated November 16, 2015, concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines as outlined in OJK Circular Letter No. 32/ SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015, concerning Public Company Governance Guidelines, that the Board of Commissioners can form a Board of Commissioners Committee (Dekom);
9. Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 dated July 11, 2023, concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities;
10. Notarial Deed of Jose Dima Satria, SH, M.Kn. No. 43 dated June 10, 2020, concerning Amendments to the Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk
11. Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 18/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 dated December 31, 2023, regarding the Establishment of the Audit Committee Charter.

Visi dan Misi Komite Audit

Visi

Menjadi mitra kerja yang independen dan profesional bagi Dewan Komisaris PTBA dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk menciptakan terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Misi

Mendorong dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal dan internal auditor, mendorong adanya peningkatan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, guna meningkatkan nilai tambah perusahaan.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam (*Charter*) Komite Audit sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya, yang substansinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan tugas Komite Audit. Piagam (*Charter*) Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi secara berkala memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya.

Pemutakhiran terhadap Piagam (*Charter*) Komite Audit dilakukan pada tahun 2023 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 18/SK/PTBA-KOM/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Piagam Komite Audit Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk.

Piagam (*Charter*) Komite Audit memuat pengaturan mengenai kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Komite Audit, serta batasan dan pengaturan tata hubungan kerja antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.

Adapun muatan dalam Piagam (*Charter*) Komite Audit, sebagai berikut:

1. Pendahuluan;
2. Organisasi;
3. Tugas, Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Kewenangan;
4. Rapat;
5. Penutup.

Kriteria Anggota Komite Audit

Persyaratan dan kualifikasi anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Menteri BUMN No, PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Kompetensi

Ketua dan anggota Komite Audit Perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/ pemeriksaan;

Vision and Mission of Audit Committee

Vision

Become an independent and professional partner for Board of Commissioners of PTBA to support the duties and functions of Board of Commissioners to realize the implementation of Good Corporate Governance.

Mission

To encourage and ensure the effectiveness of internal control system and the effectiveness of external and internal auditors' duties, promote increased business success and corporate accountability to increase the Company's added value.

Audit Committee Work Guidelines/Charter

The Audit Committee has a Charter as a guideline in carrying out its duties, which the substance is in accordance with applicable regulations relating to the duties of the Audit Committee. The Audit Committee Charter is determined by the Board of Commissioners and evaluated periodically to ensure the Company's compliance with OJK provisions and other related regulations.

The update to the Audit Committee Charter was carried out in the year 2023 and was stipulated through Board of Commissioners Decree No. 18/SK/PTBA-KOM/XII/2023 dated December 31, 2023 concerning Audit Committee Charter of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk

The Audit Committee Charter contains regulations regarding the position, authority, duties, and responsibilities of the Audit Committee, as well as boundaries and regulations for working relations between the Audit Committee and the Board of Commissioners, Directors, Internal Auditors, and External Auditors.

The contents of the Audit Committee Charter are as follows:

1. Introduction;
2. Organization;
3. Duties, Obligations, Responsibilities, and Authorities;
4. Meetings;
5. Closing.

Criteria for Audit Committee Members

The requirements and qualifications of the Company's Audit Committee members must meet the competency and independence requirements as stipulated in OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Work Implementation of Audit Committee and the State-Owned Enterprises Ministry Regulations No. Per-3/MBU/03/2023 regarding Organs and Human Resources of the State-Owned Enterprises.

Competencies

The chairman and members of the Company's Audit Committee must meet the following requirements:

1. Have a good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/ inspection;

2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami Laporan Keuangan, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Memiliki pemahaman yang memadai atas aspek bisnis dan pengelolaan/ kontrol Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran dan pandangan yang konstruktif, memiliki integritas yang tinggi, dedikasi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
5. Memiliki reputasi baik, yang antara lain dibuktikan dengan:
   a. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
   b. Tidak pernah dinyatakan pailit maupun dalam pengampuan;
   c. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang pernah atau sedang dipimpinnya dinyatakan pailit;
   d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan.
6. Memiliki sikap mental, etika, dan tanggung jawab profesi yang baik;
7. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya bagi pelaksanaan tugas Komite Audit.

Independensi

Ketua dan anggota Komite Audit harus memiliki independensi yang tidak terbatas diukur dengan:

1. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham pengendali;
3. Bukan merupakan Pemegang Saham, Komisaris, Direktur, atau karyawan dari Perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi, keuangan, maupun bisnis dengan Perusahaan;
4. Bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan atau jasa konsultan lainnya kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
5. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan PTBA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
6. Tidak mempunyai:
   a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Mayoritas PTBA dan atau;
   b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PTBA.
7. Tidak memiliki konflik kepentingan terhadap informasi yang material tentang PTBA.

2. Have sufficient knowledge to read and understand financial statements, audit processes, and laws and regulations in the capital market sector;
3. Have an adequate understanding of the business aspects and management/control of the Company following the laws and regulations;
4. Able to communicate effectively and have the ability to provide constructive suggestions and views, having high integrity, dedication, ability, adequate knowledge, and experience according to their educational background;
5. Have a good reputation, as evidenced by, among other things:
   a. Never been convicted of a criminal act;
   b. Never been declared bankrupt or in custody;
   c. Has never been found guilty of causing the Company owned or is currently leading to be declared bankrupt;
   d. Never been dishonorably dismissed from a job. 6. Have a good mental attitude, ethics, and professional responsibility;
6. Possessing good mental attitude, ethics, and professional responsibility;
7. Able to allocate sufficient time to fulfill responsibilities for the Audit Committee tasks.

Independence

The chairman and members of Audit Committee must have absolute independence as measured by:

1. Has no personal interests/relationships that can have a negative impact and conflict of interest on the Company;
2. Has no affiliation with Board of Directors, Board of Commissioners, or controlling shareholder;
3. Not a shareholder, commissioner, director, or employee of a Company that has affiliated, financial, or business relationships with the Company;
4. Not a person in a KAP, Legal Consulting Firm, or other party providing audit services and or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months before being appointed by Board of Commissioners;
5. Does not have the authority and responsibility to plan, lead, or control PTBA within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners, except the Independent Commissioner;
6. Has no:
   a. Family relationship due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically with Board of Commissioners, Board of Directors, or Majority Shareholders of PTBA and or;
   b. Business relationship, either directly or indirectly, which is related to PTBA's business activities.
7. Has no conflict of interest with material information about PTBA.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris akan mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Perusahaan, sedangkan masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Term of Office

The term of office of Audit Committee members who are also a member of Board of Commissioners will follow the term of office as Commissioner of the Company. While the term of office of members of Audit Committee who are not members of Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended for a 2 (two) year term of office, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss at any time.

Susunan dan Komposisi Komite Audit

Susunan Komite Audit tahun 2023 mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali sehingga susunan Komite Audit per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Structure and Composition of Audit Committee

The composition of the Audit Committee for 2023 has changed 2 (two) times from the previous year The composition of the Audit Committee as of December 31, 2023, is as follows

Periode 15 Desember 2023 - 31 Desember 2023
December 15, 2023-December 31, 2023 Period

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	SK Pengangkatan Apppointment Decree	Periode Jabatan Term of Office
Andi Pahril Pawi	Ketua/Komisaris Independen Chairman/ Independent Commissioner	Manajemen Strategi Strategic Management	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	2020 – berakhirnya jabatan sebagai Dewan Komisaris 2020 – end of position ad Board of Commissioners
Kurnia Toha	Wakil Ketua/Komisaris Independen Vice Chairman/ Independent Commissioner	Hukum Law	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	2023 – berakhirnya jabatan sebagai Dewan Komisaris 2020 – end of position ad Board of Commissioners
Dodi Masykur	Anggota Member	Akuntansi Accounting	02/SK/PTBA-DEKOM/III/2021	2021 – 2024
Fadhila Achmadi Rosyid	Anggota Member	Teknik Pertambangan/ Ekonomi Mineral dan Batu bara Mining Engineering/ Economy Mining and Coal	05/SK/PTBA-DEKOM/ VIII/2020	2020 – 2023
			04/SK/PTBA-DEKOM/IX/2023	2023 – 2026

Periode 1 Januari 2023 - 14 Desember 2023
January 1, 2023- December 14, 2023 Period

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	SK Pengangkatan Apppointment Decree	Periode Jabatan Term of Office
Andi Pahril Pawi	Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner	Manajemen Strategi Strategic Management	04/SK/PTBA-DEKOM/VI/2020 01/SK/PTBA-DEKOM/VI/2023	2020 – berakhirnya jabatan sebagai Dewan Komisaris 2020-end of position ad Board of Commissioners
E. Piterdono HZ	Wakil Ketua/Komisaris Vice Chairman/ Commissioner	Manajemen dan Teknik Geologi Management and Geological Engineering	07/SK/PTBA-DEKOM/XII/2021 01/SK/PTBA-DEKOM/VI/2023	2021 – 2023
Dodi Masykur	Anggota Member	Akuntansi Accounting	02/SK/PTBA-DEKOM/III/2021	2021 – 2024
Fadhila Achmadi Rosyid	Anggota Member	Teknik Pertambangan/Ekonomi Mineral dan Batu bara Mining Engineering/Economy Mining and Coal	05/SK/PTBA-DEKOM/ VIII/2020	2020 – 2023
			04/SK/PTBA-DEKOM/IX/2023	2023 – 2026

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit dapat dilihat pada bagian atas Sub-bab ini.

Audit Committee Profile

The profiles of the Audit Committee can be viewed at the top of this Subsection.

Independensi Anggota Komite Audit

Ketua dan Anggota Komite Audit merupakan pribadi profesional yang tidak memiliki hubungan dengan Perusahaan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota Komite Audit Perusahaan telah memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit, serta Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Pemenuhan independensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Independence of Audit Committee Members

The Chair and Members of the Audit Committee are professional individuals who have no relationship with the Company in order to maintain independence in carrying out their duties and responsibilities. Members of the Company's Audit Committee have fulfilled the independence requirements in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015, concerning the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee, as well as State-Owned Enterprises Ministry Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Fulfillment of this independence can be seen in the following table.

Tabel Independensi Anggota Komite Audit
Independence Table of Member of Audit Committee

Kriteria Criteria	Andi Pahril Pawi	Kurnia Toha	Dodi Masykur	Fadhila Achmadi Rosyid
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi Has no management relationship in the Company, Subsidiaries, or Affiliated Companies	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan Has no shareholding relationship in the Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Audit Committee	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus Partai Politik, Pejabat, dan Pemerintah Not serving as an administrator of Political Parties, Officials, and Government	√	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab

Piagam (*Charter*) Komite Audit mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
2. Memberikan rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik;
3. Mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan Akuntan Publik;
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern;
5. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan, termasuk intern di dalam penelaahan atas pengaduan masyarakat;
6. Mendorong ditetapkannya Tata Kelola Perusahaan yang baik;

Duties and Responsibilities

The Audit Committee Charter regulates the duties and responsibilities of the Audit Committee as written below:

1. Review financial information that will be released by the Company, such as financial reports, projections, and other financial information;
2. Provide recommendations for the appointment of a Public Accountant;
3. Supervise and evaluate the work of Public Accountants;
4. Review the implementation of audits by the Internal Audit Unit to ensure the effectiveness of the internal control system;
5. Review the Company's compliance with laws and regulations in the Capital Market sector and other laws and regulations related to the Company's activities, including internally in reviewing public complaints;
6. Encourage the establishment of good corporate governance;

7. Melakukan pemeriksaan terhadap dengan adanya kesalahan dalam Keputusan Rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan Keputusan Rapat Direksi PTBA. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perusahaan;
8. Memastikan terdapat dan ditetapkannya Kode Etik Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Berkaitan dengan Auditor Eksternal

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan penunjukan Auditor Eksternal, yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik (Auditor Eksternal) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbal jasa.

Atas pekerjan yang dilaksanakan oleh KAP selaku Auditor Eksternal, Komite Audit melakukan penelaahan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal. Apabila pelaksanaan pekerjaan Auditor Eksternal tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, maka Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberhentian Auditor Eksternal.

Wewenang

1. Mengakses secara penuh dan bebas atas catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Memperoleh informasi, masukan, penjelasan yang dibutuhkan dari Direksi PTBA;
3. Meminta dan memperoleh informasi, masukan, penjelasan dari Pegawai dan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
4. Meminta pendapat profesional dari pihak internal melalui Direksi PTBA maupun pihak ketiga, antara lain konsultan dan ahli hukum;
5. Mengundang Direksi, jajaran eksekutif, dan pegawai PTBA melalui Direksi atau konsultan dalam rapat Komite Audit;
6. Memperoleh masukan dari pihak eksternal/ independen yang profesional apabila diperlukan, atas biaya perusahaan.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota yang paling senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir. Komite Audit dapat mengadakan rapat, baik dengan Auditor Internal maupun Auditor Eksternal sesuai kebutuhan. Komite Audit melalui Dewan Komisaris dapat meminta Direksi atau pegawai Perusahaan untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan.

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 34 kali dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

7. Conduct inspections regarding errors in Board of Directors Meeting Decisions or irregularities in the implementation of PTBA Board of Directors Meeting Decisions. The audit can be carried out by the Audit Committee or an independent party appointed by the Audit Committee at the Company's expense;
8. Ensure the implementation of the Company's Code of Ethics.

Audit Committee Duties and Responsibilities to External Auditors

The Audit Committee has duties and responsibilities related to the appointment of External Auditors, namely providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Public Accountants (External Auditors) based on independence, scope of work, and remuneration.

Regarding the work carried out by Public Accountant Office as External Auditor, the Audit Committee carries out a review to ensure the effectiveness of the External Auditor's duties. If the implementation of the External Auditor's work is not in accordance with applicable standards and regulations, the Audit Committee can provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the dismissal of the External Auditor.

Authority

1. Fully and freely access records or information about employees, funds, assets, and other company resources, which are related to the implementation of their duties;
2. Obtain the required information, inputs, and explanations from the Directors of PTBA;
3. Request and obtain information, inputs, and explanations from employees and other parties related to Company activities;
4. Request professional opinions from internal parties through the PTBA Board of Directors and third parties, including consultants and legal experts;
5. Invite the Board of Directors, executive staff, and employees of PTBA through the Board of Directors or consultants to the Audit Committee meeting;
6. Obtain input from professional external/independent parties if necessary, at the company's expense.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee holds regular meetings at least once every 1 (one) month. Audit Committee meetings are chaired by the Chair of the Audit Committee or the most senior member if the Chair of the Audit Committee is unable to attend. The Audit Committee can hold meetings with both Internal Auditors and External Auditors as needed. The Audit Committee through the Board of Commissioners can ask the Directors or Company employees to attend meetings and provide the necessary information.

Throughout 2023, the Audit Committee has held 34 meetings with the agenda and frequency of attendance as follows:

Tabel Agenda Rapat Komite Audit
Table of Audit Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	17 Januari 2023 January 17, 2023	Pembahasan Temuan Uji Tuntas Dana Pensiun Discussion of Pension Fund Due Diligence Findings
2	18 Januari 2023 January 18, 2023	Diskusi Perihal Dana Pensiun Bukit Asam Discussion regarding the Bukit Asam Pension Fund
3	24 Januari 2023 January 24, 2023	Laporan Kegiatan SPI Triwulan 4 Tahun 2023 SPI Activity Report for Quarter 4 of 2023
4	7 Februari 2023 February 7, 2023	Kick-off Meeting Pengadaan Jasa KAP untuk Audit Laporan Keuangan MIND ID Grup Tahun 2023 Kick-off Meeting Procurement of Public Accountant Office Services for the 2023 MIND ID Group Financial Report Audit
5	9 Februari 2023 February 9, 2023	Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan KAP Audit Laporan Keuangan PTBA Tahun Buku 2023 Discussion of Terms of Reference (KAK) and Self Estimated Prices (HPS) Procurement of KAP Audit of Financial Reports PTBA Fiscal Year 2023
6	12-15 Februari 2023 February 12-15, 2023	Rapat Koordinasi Komite Audit dengan SPI Grup MIND ID, Rapat di PT INALUM Paritohan Sumatera Utara Audit Committee Coordination ,Meeting with SPI MIND ID Group, Meeting at PT INALUM PAritohan North Sumatra
7	20 Februari 2023 February 20, 2023	Rapat Pengadaan KAP Grup MIND ID dengan 4 KAP (EY, PWC, Deloitte dan KPMG) MIND ID Group KAP Procurement Meeting with 4 KAPs (EY, PWC, Deloitte and KPMG)
8	21 Februari 2023 February 21, 2023	Laporan Progres Akhir Audit Laporan Keuangan PTBA dan Entitas Anak untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2022 Final Progress Report Audit of PTBA and Subsidiaries' Financial Statements for the Period ending of December 31, 2022
9	6 Maret 2023 March 6, 2023	Pembahasan Tindak Lanjut LHP BPK 2012-2013 terkait Padang Bolak Jaya Discussion of the 2012-2013 BPK LHP Follow-up regarding Padang Bolak Jaya
10	6 Maret 2023 March 6, 2023	Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Komite Audit dan Satuan Pengawas Internal MIND ID Group Tahun 2023 Discussion of Follow-up Meeting of the 2023 Audit Committee and Internal Supervisory Unit Mind ID Group Coordination Meeting
11	20 Maret 2023 March 20, 2023	Pembahasan Audit *Fee* Pengadaan KAP Tahun 2023 Discussion of 2023 Public Accountant Office Procurement Audit Fees
12	3 April 2023 April 3, 2023	Laporan Kegiatan SPI Triwulan I Tahun 2023 SPI Activity Report for the First Quarter of 2023
13	22 Mei 2023 May 22, 2023	Rapat dengan Satuan Kerja UPTE dan Anak Perusahaan PT SBS, PT BAM, dan PT BSP Meeting with UPTE Work Unit and Subsidiaries PT SBS, PT BAM, and PT BSP
14	23 Mei 2023 May 23, 2023	Rapat dengan Anak Perusahaan PLTU Sumsel-8 Meeting with Sumsel-8 CFPP Subsidiaries
15	6 Juni 2023 June 6, 2023	Rapat Koordinasi Komite Audit dan Internal Audit Grup MIND ID di PT Timah Tbk Pangkal Pinang MIND ID Group Audit and Internal Audit Committee Coordination Meeting at PT Timah Tbk Pangkal Pinang
16	13-15 Juli 2023 July 13-15, 2023	Rapat di Kertapati Meeting in Kertapati
17	18 Juli 2023 July 18, 2023	Pembahasan Rencana Perubahan RKAP 2023 Discussion of the 2023 WP&B Amendment Plan
18	21 Juli 2023 July 21, 2023	Rehabilitasi DAS Kulon Progo dan Pemanfaatan Aset Dana Pensiun PTBA di Wonosari Rehabilitation of the Kulon Progo Watershed and Utilization of PTBA Pension Fund Assets in Wonosari
19	1 Agustus 2023 August 1, 2023	Kick-off Meeting *Limited Review* atas Laporan Keuangan PT Bukit Asam, Tbk Kick-off Meeting Limited Review of the Financial Report of PT Bukit Asam, Tbk
20	4 Agustus 2023 August 4, 2023	Laporan Kegiatan SPI Triwulan II Tahun 2023 SPI Activity Report for Quarter II 2023
21	22 Agustus 2023 August 22, 2023	*Limited Review* Laporan Keuangan PTBA Per 30 Juni 2023 Limited Review of PTBA Financial Report as of June 30, 2023
22	29 Agustus 2023 August 29, 2023	Rapat Penutupan PT Bukit Asam Metana Ombilin dan Perubahan Organisasi Pertambangan Ombilin Closing Meeting of PT Bukit Asam Methane Ombilin and Changes to the Ombilin Mining Organization
23	7-8 September 2023 September 7-8, 2023	Evaluasi dan Perencanaan Kerja Komite Audit Evaluation and Work Planning of the Audit Committee
24	19 September 2023 September 19, 2023	Rapat Proyek Keramasan dengan BPKP Sumsel Keramasan Project Meeting with South Sumatra BPKP
25	22 September 2023 September 22, 2023	Pembahasan Usulan RKAP Tahun 2024 Discussion of Proposed 2024 WP&B
26	24 Oktober 2023 October 24, 2023	Laporan Kagiatan SPI Triwulan III Tahun 2023 SPI Activity Report for Quarter III 2023
27	16-18 November 2023 November 16-18, 2023	Kunjungan kerja Persiapan Penjualan *Free on Board Mother Vessel* di Palembang dan Tanjung Enim Work visit Preparation for Sales of Free on Board Mother Vessel in Palembang and Tanjung Enim
28	17 November 2023 November 17, 2023	Pembahasan Rencana Penjualan Batubara Skema FOB MV Discussion of Coal Sales Plan FOB MV Scheme
29	27 November 2023 November 27, 2023	Finalisasi *Corporate Governance Policy*, Charter Direksi, dan *Charter* Dewan Komisaris Finalization of Corporate Governance Policy, Board of Directors Charter and Board of Commissioners Charter
30	7 Desember 2023 December 7, 2023	Progres Interim Audit per 30 September 2023 dan Persiapan Audit LK FY 2023 Interim Audit Progress as of September 30, 2023, and Preparation for FY 2023 LK Audit

Tabel Agenda Rapat Komite Audit
Table of Audit Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
31	7 Desember 2023 December 7, 2023	Meeting Progres Interim Audit per 30 September 2023 dan Persiapan Audit LK 31 Desember 2023 dengan PwC di Menara Kadin lt 8 Interim Audit Progress Meeting as of September 30, 2023, and LK Audit Preparation December 31, 2023, with PwC at Kadin Tower 8th floor
32	11-12 Desember 2023 December 11-12, 2023	Kunjungan Kerja ke Pangkal Pinang berkaitan dengan proses pembangunan *Tug Boat* dan *Barges* sesuai dengan pesanan PT BPB ke PT DAK Working Visit to Pangkal Pinang related to the construction process of Tug Boats and Barges in accordance with PT BPB orders to PT DAK
33	22 Desember 2023 December 22, 2023	Paparan Rencana Audit Tahunan SPI PTBA Tahun 2024 Presentation of SPI PTBA Annual Audit Plan Year 2024
34	27 Desember 2023 December 27, 2023	Kunjungan Kerja Duri Kosambi Jakarta Barat Working Visit Duri Kosambi West Jakarta

Adapun persentase kehadiran anggota Komite Audit dalam Rapat adalah sebagai berikut:

The attendance percentage of Audit Committee members in the meetings is as follows:

Tabel Kehadiran Komite Audit dalam Rapat Komite Audit Tahun 2023
Table of Audit Committee Attendance at 2023 Audit Committee Meetings

No	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran (%) Persentase (%)
1	Andi Pahril Pawi	Ketua Chairman	34	34	100%
2	E. Piterdono H.Z*	Wakil Ketua Deputy Chairman	34	34	100%
3	Kurnia Toha**	Wakil Ketua Deputy Chairman	1	1	100%
4	Dodi Masykur	Anggota Member	34	34	100%
5	Fadhila Achmadi Rosyid	Anggota Member	34	34	100%

Catatan | Notes :
*Menjabat sampai dengan 14 Desember 2023
**Menjabat terhitung 15 Desember 2023
*In office until 14 December 2023
**To take office as of December 15, 2023

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Pengembangan kompetensi Komite Audit dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Competency Development for Audit Committee

Competency development for Audit Committee can be seen in the Education and/or Training section in the Company Profile Chapter in this Annual Report book.

Sertifikasi Profesi yang Dimiliki oleh Komite Audit
Profession Certification Owned by Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi Profesi Institution Issuing Professional Certification
Andi Pahril Pawi	Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner	-	-
E. Piterdono HZ	Anggota/Komisaris Member/Commissioner	-	-
Dodi Masykur	Anggota Member	Certified Public Accountant (CPA)	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Indonesian Institute of Public Accountants
		Qualified Internal Auditor (QIA)	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation
		Certified Professional investigator (CPI)	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Indonesian Institute of Public Accountants
		Chartered Accountant (CA)	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Institute of Indonesia Chartered Accountants
Fadhila Achmadi Rosyid	Anggota Member	Pendidikan Profesi Insinyur Professional Engineering Education	Institut Teknologi Bandung Bandung Institute of Technology (ITB)

Kebijakan dan Besaran Remunerasi bagi Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris memperoleh remunerasi berupa honorarium sebesar 20% dari gaji Direktur Utama.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian berikut:

1. Telaahan & Rekomendasi atas Tambahan Modal pada Anak Perusahaan;
2. Telaahan & Rekomendasi atas Laporan Kinerja Operasi & Keuangan bulanan perusahaan;
3. Hasil Kunjungan Lapangan serta rekomendasi terkait;
4. Telaahan dan Rekomendasi atas Kegiatan Satuan Pengawasan Intern;
5. Telaahan & Rekomendasi atas Usulan Hapus buku Aset perusahaan;
6. Telaahan & Rekomendasi serta evaluasi Laporan Keuangan Audited dan Laporan atas pelaksanaan audit oleh KAP;
7. Telaahan & Rekomendasi atas Usulan Penunjukkan KAP Perusahaan untuk melakukan audit keuangan perusahaan;
8. Telaahan dan rekomendasi atas rencana penggunaan laba bersih perusahaan.
9. Telaahan & Rekomendasi atas Rencana Kerjasama Perusahaan;
10. Telaahan & Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
11. Telaahan dan Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Tingkat Kesehatan dan Pengelolaan Dana Pensiun PTBA;
12. Telaahan dan Evaluasi atas Laporan Keuangan Triwulanan Perusahaan;
13. Telaahan dan Rekomendasi atas Rancangan RKAP PTBA;
14. Telaahan dan Rekomendasi atas Proyek PLTU Sumsel-8;
15. Telaahan dan Rekomendasi atas Usulan Lembaga Jasa Pemeringkatan Perusahaan;
16. Penyusunan Laporan Triwulanan dan Tahunan Komite.

Penilaian oleh Dewan Komisaris atas Kinerja Komite Audit

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pemantauan dan evaluasi atas laporan kinerja Komite dalam mencapai target-target KPI masing-masing Komite.

Penilaian kinerja Komite Audit tahun 2023 dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah disusun. Setiap awal tahun, Komite menyerahkan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan program kerja Komite selama satu tahun, yang di dalamnya memuat *Key Performance Indicator* Komite. Terdapat 3 (tiga) perspektif pada KPI Komite Audit, yaitu:

Policy and Amount of Remuneration for the Audit Committee

Based on State-Owned Enterprises Minister Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on March 24, 2023, concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners receive remuneration in the form of an honorarium of 20% of the President Director's salary.

Implementation of Audit Committee Duties

Throughout 2023, the Audit Committee has carried out its duties and responsibilities in detail as shown below:

1. Review & Recommendations for Additional Capital in Subsidiaries;
2. Review & Recommendations on the company's monthly Operational & Financial Performance Reports;
3. Site Visit Results and related recommendations;
4. Review and Recommendations on Internal Monitoring Unit Activities;
5. Review & Recommendations on the Proposal to Write Off Company Assets;
6. Review & Recommendations as well as evaluation of Audited Financial Reports and Reports on the implementation of audits by KAP;
7. Review & Recommendations on the Proposed Appointment of the Company's KAP to conduct the company's financial audit;
8. Review and recommendations on plans for using the company's net profit.
9. Review & Recommendations on Company Collaboration Plans;
10. Review & Recommendations on the Audit Results Report BPK;
11. Review and Recommendations on the Evaluation Results of the Health Level and Management of the PTBA Pension Fund;
12. Review and Evaluation of the Company's Quarterly Financial Reports;
13. Review and Recommendations on PTBA's Draft WP&B;
14. Review and Recommendations for the Sumsel-8 CFPP Project;
15. Review and Recommendations on Proposals from Company Rating Services Institutions;
16. Preparation of the Committee's Quarterly and Annual Reports.

Assessment by the Board of Commissioners of the Performance of the Audit Committee

The Audit Committee's performance assessment is carried out by the Board of Commissioners through monitoring and evaluation of the Committee's performance reports in achieving the KPI targets of each Committee.

The Audit Committee performance assessment in 2023 was carried out based on the realization and completion of the work program that has been prepared. At the beginning of each year, the Committee submits an Annual Work Plan containing the Committee's work program for one year, which includes the Committee's Key Performance Indicators. There are 3 (three) perspectives on the Audit Committee KPI, namely:

1. Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi;
2. Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola;
3. Rapat Komite.

Adapun realisasi atas KPI Komite Audit tahun 2023, sebagai berikut:

1. Aspects of Study and Providing Recommendations;
2. Dynamic Aspects and Strengthening Governance;
3. Committee Meeting.

The realization of the Audit Committee KPIs in 2023 is as follows:

Tabel KPI Komite Audit Tahun 2023
KPI Table for Audit Committee in 2023

No	Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Duties, Functions, and Responsibilities	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Target
1	**Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi** **Aspects of Study and Recommendations**			**60**	
	Memberikan pendapat/ rekomendasi/ tanggapan kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Give opinions/recommendations/responses to the Board of Commissioners accompanied by clear and timely reasons in accordance with the provisions of the Articles of Association	Pemberian pendapat/rekomendasi/ tanggapan kepada Direksi yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar The provision of opinions/recommendations/responses to the Board of Directors accompanied by clear and timely reasons in accordance with the provisions of the Articles of Association	Nota Dinas Official memo	10	1
	Memberikan masukan/ pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Give input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association	Pemberian masukan/pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar The provision of input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association	Nota Dinas Official memo	10	1
	Memberikan pendapat dan saran berkualitas antara lain memuat aspek legal, aspek bisnis, dan aspek risiko atas aksi korporasi beserta mitigasinya terhadap aksi korporasi yang diusulkan Direksi tahun berjalan Give quality opinions and suggestions, including legal aspects, business aspects and risk aspects of corporate actions and mitigation of corporate actions proposed by the Board of Directors for the current year.	Pemberian pendapat dan saran berkualitas antara lain memuat aspek legal, aspek bisnis dan aspek risiko atas aksi beserta mitigasinya terhadap aksi korporasi yang diusulkan Direksi tahun berjalan The provision of quality opinions and suggestions includes, among other things, legal aspects, business aspects and risk aspects of actions and their mitigation for corporate actions proposed by the Board of Directors for the current year	Nota Dinas Official memo	10	2
	Melakukan peninjauan melalui kunjungan lapangan (site visit) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN Conducting site visit to SOEs strategic activities	Kunjungan lapangan (*site visit*) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN Site visit to SOEs' strategic activities	Laporan Kunjungan Visit report	10	2
	Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP Give opinion and suggestion to the Board of Commissioners regarding RJPP and WP&B	Pemberian pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP The provision of opinion and suggestion the the Board of Commissioners regarding RJPP and WP&B	Nota Dinas Official memo	10	1
	Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai laporan Give opinion and suggestion to the Board of Commissioner regarding annual report	Pemberian tanggapan kepada Dewan Komisars mengenai laporan tahunan The provision of opinion and suggestion to the Board of Commissioners regarding annual report	Nota Dinas Official memo	10	1
2	**Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola** **Dynamic and GCG Strengthening Aspect**			**20**	
	Kegiatan Pengembangan Development Activities				
	Mengikuti Pelatihan/ Seminar/Webinar untuk meningkatkan kompetensi Participating in training/seminar/webinar to increase competency	Kegiatan Pelatihan/Seminar/ Webinar Training/Seminar/Webinar activities	Laporan / Sertifikat Report / Certificate	10	2
	Penguatan Tata Kelola GCG Strengthening				
	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Prepare the Committee's Annual Work Plan and Budget	Penyampaian kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Komite Submission to the Board of Commissioners regarding the Committee's annual Work Plan and Budget	Surat Letter	10	1

Tabel KPI Komite Audit Tahun 2023
KPI Table for Audit Committee in 2023

No	Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Duties, Functions, and Responsibilities	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Target
3	**Rapat Komite** **Committee Meeting**			**20**	
	Kehadiran Rapat Internal Komite Attendance at Internal Committee Meetings	Rata-rata jumlah komite yang menghadiri rapat dalam setahun Average number of committee members attending meetings in a year	%	10	80
	Risalah Rapat Minutes of meetings	Tersusunnya risalah rapat Completed minutes of meetings	Dokumen Risalah Minutes of meetings document	10	6
Jumlah **Total**				**100**	**100**

Tabel KPI Individu Komite Audit Tahun 2023
Tabel for Individual KPI of Audit Committee in 2023

Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Perspektif Perspective	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target
Dodi Masykur	Kolegial Collegial	Pencapaian KPI Komite Committee's KPI achievement	%	40	100
	Individu Individual	Pemberian Kajian dan Rekomendasi Providing Studies and Recommendations			
		Kebijakan mutu dan pelayanan Quality and service policy	1	10	10
		Monitoring Temuan Auditor Intern/Ekstern Monitoring Internal/External Auditor Findings	1	15	15
		Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Accounting and Preparation of Financial Reports	1	15	15
		Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Company Internal Control System			
		Pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Management of Subsidiaries/Joint Companies			
		Menghadiri Rapat Meeting Attendance	%	20	20
Jumlah **Total**			**100**		**100**

Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Perspektif Perspective	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target
Fadhila Achmadi Rosyid	Kolegial Collegial	Pencapaian KPI Komite Committee's KPI achievements	%	40	100
	Individu Individual	Pemberian Kajian dan Rekomendasi Providing Studies and Recommendations			
		Kebijakan mutu dan pelayanan Quality and service policy	1	10	1
		Monitoring Temuan Auditor Intern/Ekstern Monitoring Internal/External Auditor Findings	1	15	1
		Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Accounting and Preparation of Financial Reports	1	15	1
		Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Company Internal Control System			
		Pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Management of Subsidiaries/Joint Companies			
		Menghadiri Rapat Meeting Attendance	%	20	80
Jumlah **Total**				**100**	**100**

Berdasarkan pemenuhan target atas KPI Komite Audit, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di tahun 2023, sesuai dengan Piagam Komite, Rencana Kerja Tahunan dan capaian target KPI yang telah ditetapkan.

Based on the fulfillment of targets for the Audit Committee's KPIs, the Board of Commissioners assesses that the Audit Committee has properly carried out its duties and responsibilities in 2023, in accordance with the Committee Charter, Annual Work Plan, and achievement of the KPI targets that have been set.

Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Komite di bawah Dewan Komisaris. Komite ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, terkait pengendalian risiko usaha, pelaksanaan nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM di lingkungan PTBA.

Komite ini merupakan penggabungan dari 2 (dua) Komite Dewan Komisaris yakni Komite Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Konarba dan PSDM) dengan Komite Asuransi, Risiko Usaha dan Pascatambang, yang telah digabungkan sejak 1 Januari 2013. Secara garis besar, pelaksanaan fungsi Komite ini adalah membantu tugas Dewan Komisaris dalam memberikan pendapat terkait pengelolaan perusahaan yang berhubungan dengan risiko usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian signifikan, pengadministrasian untuk terpilihnya calon Direksi dan Pejabat Internal satu tingkat di bawah Direksi dan calon Direksi anak Perusahaan, tersusunnya besaran Gaji/ Honorarium dan Tantiem yang memadai bagi Direksi dan Dewan Komisaris, Insentif Kinerja Pegawai (IKP) berdasarkan Kinerja dan Tingkat Kesehatan Perusahaan, serta mengkaji pengembangan sumber daya manusia berdasarkan rencana strategis Perusahaan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/ MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/ MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Akta Notaris Jose Dima Satria, SH, M.Kn. No. 43 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk;
8. Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/ SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang

Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & Human Capital Development Committee

The Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & Human Capital Development Committee is under the Board of Commissioners to assist the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, related to controlling business risks, implementing nominations, remuneration, and developing human resources within PTBA.

This committee is a combination of 2 (two) Board of Commissioners Committees, namely the Nomination, Remuneration and Human Capital Development Committee (Konarba and PSDM) with the Insurance, Business Risk, and Post-mining Committee, which have been merged since January 1, 2013. In general, the implementation of this committee is to assist the Board of Commissioners in providing opinions regarding company management related to business risks with the potential to cause significant losses, administering the selection of prospective Directors and Internal Officials one level below the Directors and prospective Directors of subsidiary companies, arranging the amount of Salary/Honorarium and bonus for the Board of Directors and Board of Commissioners, Employee Performance Incentives based on the Company's Performance and Health Level, as well as reviewing human resource development based on the Company's strategic plan.

Legal Basis

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Republic of Indonesia Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dismissal of State-Owned Enterprises;
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
5. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/ MBU/03/2023 dated March 24, 2023, concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
6. Financial Services Authority Regulation No. 34/ POJK.04/2014 dated December 8, 2015, concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
7. Notarial Deed of Jose Dima Satria, SH, M.Kn. Number 43 dated June 10, 2020, concerning Amendments to the Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk;
8. Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated August 30, 2021,

Penetapan Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi komite yang profesional dan independen agar tercipta sinergi antara Dewan Komisaris dan Direksi PTBA untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.

Misi

Memberikan masukan secara komprehensif dalam rangka:

- Meminimalkan risiko perusahaan yang mungkin terjadi di bidang pengembangan usaha, operasi produksi dan pemasaran;
- Meminimalkan dampak negatif dari kegiatan perusahaan terhadap lingkungan;
- Mewujudkan sinergitas peran dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan taraf ekonomi, sosial, pendidikan masyarakat serta pelestarian lingkungan;
- Mendorong terlaksananya prosedur nominasi dan remunerasi yang sesuai dengan prinsip dan praktik *Good Corporate Governance*;
- Mendorong terciptanya sistem pengembangan SDM yang fair dan dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai PTBA.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM

Pedoman kerja atau Piagam (*Charter*) Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan SDM ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM. Pedoman ini disusun sebagai acuan tata laksana tugas Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM.

Secara berkala Piagam (*Charter*) dievaluasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Adapun muatan dalam Piagam (*Charter*) Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan SDM, sebagai berikut :

1. Tugas, fungsi, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan;
2. Ketentuan Rapat;
3. Ketentuan Pelaporan;
4. Hal-hal lain yang bersifatnya penting guna pelaksanaan tugas komite.

Kriteria Keanggotaan

Persyaratan dan kualifikasi anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan SDM salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber

concerning Determination of the Charter of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration and Human Capital Development Committee.

Vision and Mission

Vision

Become a professional and independent committee to harmonize synergy between the Board of Commissioners and Board of Directors of PTBA to support the achievement of the Company's Vision and Mission.

Mission

Provide comprehensive input in order to:

- Minimize company risks that may occur in the areas of business development, production, and marketing operations;
- Minimize the negative impact of company activities on the environment;
- Realizing the synergy of corporate social roles and responsibilities in improving the economic, social, educational level of the community, and preserving the environment;
- Encourage the implementation of nomination and remuneration procedures in accordance with the principles and practices of Good Corporate Governance;
- Encourage the creation of a fair HR development system to increase the work motivation of PTBA employees.

Work Guidelines/Charter of Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & HC Committee

Work Guidelines/Charter for this committee is based on the Board of Commissioners' Decree No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated August 30, 2021, concerning the Determination of the Charter of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration and Human Capital Development Committee. This guideline has been prepared as a reference for implementing the duties of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration and Human Capital Development Committees.

The Charter is periodically evaluated to ensure the Company's compliance with applicable regulations. The contents of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & HC Development Committee Charter are as follows:

1. Duties, functions, obligations, responsibilities and authority;
2. Meeting Terms;
3. Reporting Provisions;
4. Other important matters to carry out the committee's duties.

Membership Criteria

The requirements and qualifications for members of this committee are regulated in the Minister of SOEs Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises. As for the

Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Adapun atas persyaratan dan kualifikasinya, harus memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi, antara lain:

Kompetensi

1. Memiliki integritas yang tinggi, dedikasi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadaisesuai dengan latar belakang pendidikannya;
2. Memiliki sikap dan reputasi yang baik;
3. Memiliki sikap mental, etika dan tanggung jawab profesi yang baik;
4. Memiliki komitmen untuk memberikan dedikasi waktu dan tenaga bagi pelaksanaan tugas KRU, PT, CSR, NR & PSDM;
5. Mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran danpandangan yang konstruktif;
6. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yangmemadai atas aspek-aspek risiko usaha, pascatambang, CSR, nominasi, remunerasi, danpengembangan SDM perusahaan.

Independensi

1. Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh pihak luar;
3. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Utama PTBA;
4. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM tidak boleh memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha PTBA;
5. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM bukan merupakan karyawan PTBA dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
6. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi material perusahaan;
7. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM yang bukan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap menjadi Anggota Komite lain di lingkungan PTBA pada periode yang sama;
8. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM tidak keberatan/ bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi di atas kertas bermaterai.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan SDM yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris akan mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Perusahaan, sedangkan masa jabatan anggota Komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

requirements and qualifications, they must meet competency and independence requirements, including:

Competencies

1. Have high integrity, dedication, ability, knowledge, and adequate experience according to their educational background;
2. Have a good attitude and reputation;
3. Have a good mental attitude, ethics, and professional responsibility;
4. Committed to dedicate their time and energy for the implementation of their duties;
5. Able to communicate effectively and have the ability to provide suggestions and constructive views;
6. Have adequate knowledge and understanding of aspects of business risk, post-mining, CSR, nomination, remuneration, and human capital development of the Company.

Independence

1. Members of this committee is responsible to Board of Commissioners;
2. Members of this committee must be independent and free from external influences;
3. Members of this committee should not have blood and marriage relations up to the second degree either in a straight line or sideways with members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, and/or Major Shareholders of PTBA;
4. Members of this committee are not allowed to have a business relationship, either directly or indirectly related to PTBA's business activities;
5. Members of this committee are not employees of PTBA in the last 1 (one) year before being appointed by the Board of Commissioners;
6. Members of this committee are not allowed to have a personal interest, either directly or indirectly, with material Company information;
7. Members of this committee who are not members of Board of Commissioners are not allowed to concurrently become members of other committees within PTBA in the same period;
8. Members of this committee have no objections/are willing to make and sign a written statement regarding the independence requirements on stamped paper.

Term of Office

Members of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & HC Development Committee who are also members of Board of Commissioners, their term of office follows the term of office as a Commissioner of the Company. Meanwhile, the term office for those who are not included in the Board of Commissioners, have a maximum of 3(three) years and may be extended for a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of Board of Commissioners at any time to review and dismiss the members of this committee.

Susunan Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM

(Per 15 Desember 2023 berubah dan terbagi menjadi Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Nominasi & Remunerasi)

Di tahun 2023, terdapat perubahan komposisi Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM. Selanjutnya dalam rangka kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan dan peraturan yang berlaku, maka pada tanggal 15 Desember 2023 dilakukan perubahan nama komite menjadi Komite Pemantau RIsiko & Tata Kelola Terintegrasi. Fungsi Nominasi, Remunerasi & PSDM dilakukan oleh komite terpisah, yaitu Komite Nominasi & Remunerasi.
Adapun susunan dan komposisi Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM tahun 2023 sebagai berikut:

Composition of Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee

(As per December 15, 2023, the committee is separated into the Integrated Risk Monitoring & Governance Committee and the Nomination & Remuneration Committee)

In 2023, there were changes to the composition of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committees. In order to comply with corporate governance and applicable regulations, on December 15, 2023, the name of the committee was changed to the Integrated Risk & Governance Monitoring Committee. Meanwhile, the Nomination, Remuneration & HCD functions are carried out by a separate Committee, namely the Nomination & Remuneration Committee.

Susunan Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM (1 Januari - 14 Desember 2023)
Composition of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committees (January 1, - December 14, 2023)

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Keputusan Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Irwandy Arif	Ketua Chairman	Teknik Pertambangan Mining Engineering	01/SK/PTBA-DEKOM/VI/2023	Pertama First
Kurnia Toha	Wakil Ketua Bidang Risiko Usaha dan Pasca Tambang Vice Chairman of Business Risk and Post-Mining	Hukum Law	01/SK/PTBA-DEKOM/VI/2023	Pertama First
Rahmat Hidayat Pulungan	Wakil Ketua Bidang Remunerasi, CSR/PKBL Vice Chairmanof Remuneration and CSR/PKBL	Ekonomi & SDM Economy & HRD	01/SK/PTBA-DEKOM/VI/2023	Pertama First
Carlo Brix Tewu	Wakil Ketua Bidang Nominasi dan PSDM Vice Chairman of Nomination and HCD	Hukum Law	07/SK/PTBA-DEKOM/XII/2021	Pertama First
Nora Sri Hendriyeni	Anggota Member	Akuntansi dan Manajemen Accounting and Management	18/SK/PTBA-DEKOM/XI/2020 dan 07/SK/PTBA-DEKOM/XI/2023	Kedua Second
Tri Winarno	Anggota Member	Teknik Pertambangan Mining Engineering	03/PTBA-DEKOM/VIII/2018, 04/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2021 dan 03/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2023	Kedua Second
Helmiansyah Irawan	Anggota Member	Akuntansi dan Audit Accounting and Audit	16/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 dan 05/SK/PTBA-DEKOM/X/2023	Kedua Second
Ganda Marihot Simangunsong	Anggota Member	Teknik Pertambangan Mining Engineering	08/SK/PTBA-DEKOM/XI/2023	Pertama First

Susunan Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi (15 - 31 Desember 2023)
Composition of the Integrated Risk Monitoring & Governance Committee (December 15 - 31, 2023)

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Keputusan Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Irwandy Arif	Ketua Chairman	Teknik Pertambangan Mining Engineering	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Pertama First
E. Piterdono HZ	Wakil Ketua Bidang Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Vice Chairman of Integrated Risk Monitoring & Governance Committee	Hukum Law	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Pertama First
Rahmat Hidayat Pulungan	Wakil Ketua Bidang Pasca Tambang, CSR, GCG dan IT Vice Chairman of Post-Mining, CSR, GCG, and IT	Ekonomi & SDM Economy & HRD	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Pertama First
Tri Winarno	Anggota Member	Teknik Pertambangan Mining Engineering	03/PTBA-DEKOM/VIII/2018, 04/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2021 , 03/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2023 dan 10/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Kedua Second

Susunan Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi (15 - 31 Desember 2023)
Composition of the Integrated Risk Monitoring & Governance Committee (December 15 - 31, 2023)

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Keputusan Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Helmiansyah Irawan	Anggota Member	Akuntansi dan Audit Accounting and Audit	16/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020, 05/SK/PTBA-DEKOM/X/2023 dan 10/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Kedua Second
Ganda Marihot Simangunsong	Anggota Member	Teknik Pertambangan Mining Engineering	08/SK/PTBA-DEKOM/XI/2023 dan 10/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Pertama First

Susunan Komite Nominasi & Remunerasi (15 - 31 Desember 2023)
Composition of the Nomination & Remuneration Committee (December 15 - 31, 2023)

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Keputusan Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Kurnia Toha	Ketua Chairman	Hukum Law	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Pertama First
Carlo Brix Tewu	Wakil Ketua Vice Chairman	Hukum Law	07/SK/PTBA-DEKOM/XII/2021 dan 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Pertama First
Nora Sri Hendriyeni	Anggota Member	Akuntansi dan Manajemen Accounting and Management	18/SK/PTBA-DEKOM/XI/2020, 07/SK/PTBA-DEKOM/XI/2023, dan 11/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Kedua Second

Profil Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM

Profil Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipecah menjadi (i) Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi serta (ii) Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bagian atas Sub-BAB ini.

Profile of Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee

The profiles of the Risk Management, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration, and Human Capital Development Committee, which have been divided into (i) the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, and (ii) the Nomination and Remuneration Committee, can be seen at the top of this subsection.

Independensi Anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM

Sesuai dengan ketentuan yang mengatur terkait independensi anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM, Dewan Komisaris Perusahaan telah menetapkan persyaratan independensi dari Komite RU & NR PSDM yang dimuat pada Piagam Komite yaitu:

1. Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh pihak luar;
3. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM tidak boleh memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai dengan derajat kedua baik menurut garis lurus maupun ke samping dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Utama PTBA;
4. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM tidak boleh memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung kepada berkaitan dengan kegiatan usaha PTBA;
5. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM bukan merupakan karyawan PTBA dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
6. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi material perusahaan;
7. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM yang bukan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap

Independence of Business Risk, Post Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee Members

In accordance with the provisions governing Business Risk, Post Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee independence, the Company's Board of Commissioners determined the independence requirements of this committee, which are contained in the Committee Charter, namely:

1. Members of this committee are responsible to Board of Commissioners;
2. Members of this committee must be independent and free from external influences;
3. Members of this committees are not allowed to have blood and marriage relations up to the second degree either in a straight line or sideways with Members of Board of Commissioners, Members of Board of Directors, and/or Major Shareholders of PTBA;
4. Members of this committees are not allowed to have a business relationship, either directly or indirectly, related to PTBA's business activities;
5. Members of this committee are not employees of PTBA in the last 1 (one) year before being appointed by the Board of Commissioners;
6. Members of this committee are not allowed to have a personal interest, either directly or indirectly, with material Company information;
7. Members of this committee who are not members of Board of Commissioners are not allowed to concurrently

menjadi Anggota Komite lain di lingkungan PTBA pada periode yang sama;
8. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM tidak keberatan/ bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi di atas kertas bermaterai.

become members of other committees within PTBA in the same period;
8. Members of this committee have no objections/are willing to make and sign a written statement regarding the independence requirements on stamped paper.

Adapun pemenuhan independensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

The independence fulfillment is listed on the table below:

Tabel Independensi Anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM
Independence Table of Member of Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee

Aspek Independensi Independence Aspect	Irwandy Arif	Kurnia Toha	Rahmat Hidayat Pulungan	Carlo B. Tewu	Nora Sri Hendriyeni	Tri Winarno	Helmiansyah Irawan	Ganda Marihot Simangunsong
Bukan pegawai Aktif Perusahaan Not an Active Employee of the Company	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/ Pengendali Has no family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, or Major/Controlling Shareholders	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perusahaan Has no business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business	√	√	√	√	√	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab

Bidang Risiko Usaha

1. Melakukan penelaahan atas jenis-jenis asuransi dan risiko usaha yang dilakukan PTBA sesuai dengan tingkat kewajaran yang berlaku umum di perusahaan-perusahaan tambang;
2. Melakukan pemantauan atas permintaan Dewan Komisaris PTBA atas perkembangan situasi harga batu bara di pasar domestik maupun di pasar internasional untuk bahan evaluasi;
3. Melakukan kajian berbagai risiko yang dihadapi PTBA, dan pelaksanaan risiko oleh Direksi, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Direksi PTBA;
4. Melakukan peninjauan lapangan secara *on the spot* dan secara periodik untuk mengetahui segala risiko baik yang sudah terjadi maupun untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di lapangan sesuai dengan keperluannya;
5. Melakukan pemantauan periode pascatambang apakah telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan pikiran yang positif tentang adanya kesempatan dalam pengembangan usaha dari hasil penelitian untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris PTBA dan sebagai tindak lanjut langkah kebijakan Dewan Komisaris PTBA;
7. Menyampaikan peringatan dini atas risiko yang mungkin timbul sebagai dampak dari kegiatan penambangan, kebijakan, kontrak, penjualan, investasi, penggunaan peralatan baru dan kegiatan usaha lainnya;
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris PTBA yang berkaitan dengan asuransi, risiko usaha dan pascatambang.

Duties and Responsibilities

Business Risk Sector

1. Review the types of insurance and business risks of PTBA based on fairness generally accepted in mining companies;
2. Monitoring the request of PTBA Board of Commissioners on the development of coal price situation in the domestic and international market for evaluation material;
3. Conduct a study of various risks faced by PTBA, and the implementation of risks by Board of Directors, evaluate and provide recommendations regarding the risk management system implemented by Board of Directors of PTBA;
4. Conduct on-the-spot and periodic field visits to learn all risks, both those that have occurred, and to anticipate up-coming matters in the near future in the field according to their needs;
5. Monitor the post-mining period, to follow the procedures and laws and regulations;
6. Provide positive thoughts about opportunities in business development from research results to be submitted to PTBA Board of Commissioners and as a follow-up to PTBA Board of Commissioners' policy steps;
7. Deliver early warning of risks that may arise as a result of mining activities, policies, contracts, sales, investments, use of new equipment, and other business activities;
8. Perform other tasks assigned by Board of Commissioners of PTBA related to insurance, business risk, and post-mining.

Bidang Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM

1. Memberikan pendapat independen dan profesional serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris PTBA terhadap permasalahan yang berhubungan dengan nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM.
2. Melakukan penelaahan atas tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM.
3. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kriteria seleksi, prosedur nominasi serta penilaian bagi anggota Direksi Dewan Komisaris PTBA serta memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi di PTBA.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan perhitungan dan besaran Gaji/Honorarium, Tunjangan, Fasilitas dan Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris PTBA.
5. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia di PTBA yang meliputi sistem rekrutmen dan seleksi, sistem karier, sistem pelatihan dan pengembangan, sistem penilaian kinerja dan penggajian, serta sistem pensiun.
6. Menggali informasi mengenai pengembangan SDM Perusahaan melalui Direksi PTBA.
7. Melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui penerapan pengembangan Sumber Daya Manusia.
8. Pada akhir tahun berjalan, Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM wajib menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris PTBA untuk ditetapkan.
9. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris PTBA.

Nomination, Remuneration, and Human Capital Development Sector

1. Give independent and professional opinions and recommendations to Board of Commissioners of PTBA on nomination, remuneration, and Human Capital Development issues.
2. Review the Company's level of compliance with laws and regulations relating to nomination, remuneration, and human Capital development.
3. Assist the Board of Commissioners in compiling selection criteria, nomination procedures and assessments for members of Board of Directors of and Board of Commissioners of PTBA and provide recommendations on the number of members of Board Commissioners and Board of Directors at PTBA.
4. Assist the Board of Commissioners in proposing the calculation and amount of Salary/Honorarium, Allowances, Facilities, and Bonuses for Board of Directors and Board of Commissioners of PTBA.
5. Evaluate and provide recommendations on the implementation of Human Capital Management at PTBA, which includes the recruitment system, career system, training and development system, performance appraisal system, payroll, and the pension system.
6. Explore information regarding PTBA's Human Capital Development through Bukit Asam's Board of Directors.
7. Conduct a field survey to determine the implementation of Human Capital Development.
8. At the end of the current year, BR, PM, CSR, NR & HCD Committee is obliged to prepare and submit an annual work program to PTBA Board of Commissioners for determination.
9. Perform other tasks assigned by Board of Commissioners of PTBA.

Pelaporan

Laporan tanggung jawab Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan tertulis, yang terdiri atas:

1. Laporan tiga bulanan pelaksanaan kegiatan Komite.
2. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite yang antara lain berisikan fakta di lapangan, analisis, kesimpulan dan saran.

Reporting

Reports on the responsibilities of BR, PM, CSR, NR & HCD Committees are submitted to Board of Commissioners in the form of a written report, which consists of:

1. Quarterly reports on the implementation of Committee's activities.
2. Reports for each Committee's duties implementation, including facts on the field, analysis, conclusions, and suggestions.

Pembagian Tugas Antar Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM terbagi atas bidang tugas sebagai berikut:

Division of Duties Among Business Risk, Post Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee

In carrying out its duties, Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee is divided into the following task fields:

No	Bidang Field	Ketua Chairman	Wakil Ketua Vice Chairman	Anggota Member
1	Risiko Usaha dan Pascatambang Business and Post-mining Risks	Irwandy Arif	Kurnia Toha	Tri Winarno
2	Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM Nomination, Remuneration and HC Development		Carlo B Tewu	Nora Sri Hendriyeni
3	CSR/PKBL dan GCG CSR/PKBL and GCG		Rahmat Hidayat Pulungan	Helmiansyah Irawan

Rapat Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM

Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM wajib mengadakan rapat sekurang- kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan yang dipimpin oleh Ketua Komite atau Anggota yang paling senior apabila Ketua berhalangan hadir.

Sepanjang tahun 2023, Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM telah melaksanakan rapat sebanyak 14 dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Business Risk, Post Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee Meeting

BR, PM, CSR, NR & HCD Committee is required to conduct a meeting at least once in 1 (one) month led by Chairman of Committee or the most senior member if the Chairman cannot attend.

Throughout 2023, the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Development has held 14 Meetings, with the following agenda and frequency of attendance:

Tabel Agenda Rapat Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM
Table of Meeting Agenda of RU, PT, CSR, NR & HCD Development Committee

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	02 Januari 2023 January 2, 2023	Informasi Teknologi *Business Analytics* Business Analytics Technology Information
2	13 Januari 2023 January 13, 2023	Peninjauan UMKM Binaan PTBA Review of PTBA-assisted MSMEs
3	17 Januari 2023 January 17, 2023	Uji Tuntas Dana Pensiun Pension Fund Due Diligence
4	13 Februari2023 February 13, 2023	Peninjauan Rumah BUMN Inspection of SOEs Houses
5	27 Februari 2023 February 27, 2023	Perkembangan Terkini PT IPC Anak Usaha PTBA Latest Developments of PT IPC, a Subsidiary of PTBA
6	13 Juli 2023 July 13, 2023	Kunjungan Kerja Ke Unit Dermaga Kertapati Working Visit to the Kertapati Pier Unit
7	02 Agustus 2023 August 2, 2023	Perkembangan Terkini Informasi Teknologi PTBA Latest Developments in PTBA Technology Information
8	03 Agustus 2023 August 3, 2023	Realisasi TJSL TW II Realization of TJSL QW II
9	07 Agustus 2023 August 7, 2023	Rapat Pembahasan Proyek Strategis Terkini Latest Strategic Project Discussion Meeting
10	08 September 2023 September 8, 2023	Kunjungan Rumah BUMN Banyuasin Banyuasin SOEs Home Visit
11	21 Desember 2023 December 21, 2023	Implementasi GCG Di PTBA Implementation of GCG at PTBA
12	27 Desember 2023 December 27, 2023	Paparan Unit Pertambangan Ombilin Exposure to the Ombilin Mining Unit
13	27 Desember 2023 December 27, 2023	Kegiatan Pasca Tambang PTBA PTBA Post-Mining Activities
14	27 Desember 2023 December 27, 2023	Kinerja Anak Usaha PTBA Performance of PTBA Subsidiaries

Tabel Kehadiran Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM dalam Rapat Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM
Table of Committee Meeting Attendance of RU, PT, CSR, NR & HRD Development Committee

No	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran (%) Attendance (%)
1	Irwandy Arif	Ketua Chairman	11	11	100%
2	Carlo Brix Tewu	Wakil Ketua Vice Chairman	11	9	82%
3	Kurnia Toha*	Wakil Ketua Vice Chairman	7	7	100%
4	Rahmat Hidayat Pulungan*	Wakil Ketua Vice Chairman	7	7	100%
5	Agus Suhartono**	Ketua Chairman	4	4	100%
6	Devi Pradnya Paramita**	Wakil Ketua Vice Chairman	4	-	0%
7	E Piterdono HZ***	Wakil Ketua Vice Chairman	4	4	100%
8	Tri Winarno	Anggota Member	14	11	79%

Tabel Kehadiran Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM dalam Rapat Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM
Table of Committee Meeting Attendance of RU, PT, CSR, NR & HRD Development Committee

No	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran (%) Attendance (%)
9	Helmiansyah Irawan	Anggota Member	14	14	100%
10	Nora Sri Hendriyeni	Anggota Member	14	14	100%
11	Ganda M Simangunsong***	Anggota Member	4	4	100%

Keterangan | Information:
*Aktif sejak 30 Juni 2023
**Tidak aktif sejak 10 April 2023
***Aktif sejak 15 Desember 2023
*Active from June 30, 2023
**Inactive since April 10, 2023
***Active since December 15, 2023

Pengembangan Kompetensi Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM

Pengembangan kompetensi Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Competency Development of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & HC Development Committees

The competency development of this Committees can be seen in the Education and/or Training section in the Company Profile Chapter in this Annual Report book.

Sertifikasi Profesi yang Dimiliki oleh Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia

Profession Certification Owned by the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HC Development Committee

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi Profesi Institutions that Issue Professional Certification
Irwandy Arif	Ketua/Komisaris Utama Chairman/President Commissioner	Insinyur Profesional Utama (iPU) Principal Professional Engineer	Persatuan Insinyur Indonesia (PII) The Institution of Engineers Indonesia
		Certificate of Honorary Membership	The Asean Federation of Engineering Organization
		Dosen Lecturer	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology
Kurnia Toha	Wakil Bid. Risiko Usaha & Pasca Tambang/Komisaris Independen Vice Department of Business & Post-Mining Risk/Independent Commissioner	Dosen Lecturer	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology
Rahmat Hidayat Pulungan	Wakil Bid. Remunerasi & CSR/ PKBL/ Komisaris Independen Vice Department of Remuneration & CSR/PKBL/Independent Commissioner	Tidak ada None	
Carlo B Tewu	Wakil Bid. Nominasi & PSDM Vice Department of Nomination & HCD	Tidak ada None	
Nora Sri Hendriyeni	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	CA-Chartered Accountant	Ikatan Akuntan Indonesia Institute of Indonesia Chartered Accountants
		CACP-*Certified* Audit Committee Professional	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association
		CSRA-*Certified* Sustainability Reporting Assurance	NCCR-National Center for Corporate Reporting
		CSRS-*Certified* Sustainability Reporting Specialist	NCCR-National Center for Corporate Reporting
		CSP-*Certified* Sustainability Practitioner	NCCR-National Center for Corporate Reporting

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi Profesi Institutions that Issue Professional Certification
Helmiansyah Irawan	Anggota Member	*Certified* Public Accountant	Institut Akuntan Publik Indonesia Indonesian Institute of Public Accountants
		Certified Professional Investigator	Institut Akuntan Publik Indonesia Indonesian Institute of Public Accountants
		Certified Professional Auditor of Indonesia	Institut Akuntan Publik Indonesia Indonesian Institute of Public Accountants
		Chartered Accountant of Indonesia	Ikatan Akuntan Indonesia Institute of Indonesia Chartered Accountants
		Asean Chartered Professional Accountants	The Asean Chartered Professional Accountant Coordinating Committee
		Certified of Audit Committee Practices	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association
		Certified of Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance	The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance
		Certified Risk Associate	Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Capital Market Professional Certification Institute
		Certified of Indonesia Insurance Brokers	Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia Indonesian Insurance and Reinsurance Brokers Association
Ganda Marihot Simangunsong	Anggota Member	Insinyur Profesional Madya (IPM) Intermediate Professional Engineer	Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Indonesian Engineers Association

Pelaksanaan Tugas Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia

Di tahun 2023, Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. Telaahan & Rekomendasi atas Permohonan Persetujuan untuk Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
2. Telaahan & Rekomendasi atas Laporan Proyek Strategis Bulanan Perusahaan;
3. Hasil Site Visit /Kunjungan Lapangan serta rekomendasi terkait;
4. Laporan Implementasi Padi UMKM;
5. Telaahan & Rekomendasi atas Rencana Kerja Sama perusahaan;
6. Telaahan & Rekomendasi atas Pergantian Sekretaris Perusahaan
7. Telaahan & Rekomendasi atas Perhutungan Tantiem dan Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan;
8. Telaahan atas Progres KPI setiap bulan.
9. Telaahan & Rekomendasi atas Perubahan Organisasi;
10. Telaahan & Rekomendasi atas Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko Perusahaan
11. Telaahan dan Rekomendasi atas Laporan Kinerja TJSL;
12. Penyusunan Laporan Triwulanan dan Tahunan Komite.

Implementation of Duties of Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration & HC Development Committee

In 2023, the Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration & HC Development Committee has carried out the following duties and responsibilities as follows:

1. Review & Recommendations on Application for Approval for Appointment of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries;
2. Review & Recommendations on the Company's Monthly Strategic Project Report;
3. Site Visit / Field Visit Results and related recommendations;
4. Implementation Reports on PaDi MSMEs;
5. Review & Recommendations on the company's Cooperation Plan;
6. Review & Recommendations for the Change of Corporate Secretary
7. Review & Recommendations on Tantiem Calculations and Salaries/Honorariums for the Company's Directors and Board of Commissioners;
8. Review of KPI Progress every month.
9. Review & Recommendations for Organizational Changes;
10. Review & Recommendations for Determining Categories and Company Risk Classification
11. Review and Recommendations on the CSR Performance Report;
12. Preparation of the Committee's Quarterly and Annual Reports.

Penilaian oleh Dewan Komisaris atas kinerja Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM

Penilaian kinerja Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi Remunerasi dan PSDM dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pemantauan dan evaluasi atas laporan kinerja Komite dalam mencapai target-target KPI masing-masing Komite.

Penilaian kinerja Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi Remunerasi dan PSDM tahun 2023, dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah disusun. Setiap awal tahun, Komite menyerahkan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan program kerja Komite selama satu tahun, yang di dalamnya memuat *Key Performance Indicator* Komite. Terdapat 3 (tiga) perspektif pada KPI Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi Remunerasi dan PSDM, yaitu:

1. Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi;
2. Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola;
3. Rapat Komite.

Adapun realisasi atas KPI Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi Remunerasi dan PSDM tahun 2023, sebagai berikut:

Board of Commissioners' Assessment on the performance of Business Risk, Post-mining, Nomination, Remuneration, and HC Development Committee

The performance of this Committees is assessed by Board of Commissioners through monitoring and evaluating the Committee's performance reports in achieving KPI targets of each Committee.

The performance appraisal of this Committee in 2023 was carried out based on the realization and completion of the work program that was prepared at the beginning of the year. At the beginning of each year, the Committee submits an Annual Work Plan consist of the Committee's work plan in one year, including the Committee's Key Performance Indicator. There are 3 (three) perspective on the committee's KPI as follows:

1. Study and Giving Recommendations Aspect;
2. Dynamics and Governance Strengthening;
3. Committee Meeting.

The realization of the Committee's KPIs in 2023 is as follows:

Tabel KPI Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi Remunerasi dan PSDM tahun 2023
2023 KPI Achievements of Business Risk, Post-mining, Nomination, Remuneration, and HC Development Committee

No	Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Duties, functions, and responsibilities	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Target	Status
1	**Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi** **Review and Provision of Recommendations Aspect**					
	Memberikan pendapat/ rekomendasi/ tanggapan kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Provide opinions/recommendations/ responses to Board of Commissioners accompanied by clear and timely reasons in accordance with the Articles of Association	Pemberian pendapat/rekomendasi/ tanggapan kepada Direksi yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar The provision of opinions/ recommendations/responses to Board of Directors accompanied by clear and timely reasons in accordance with the Articles of Association	Nota Dinas Official note	10	1	Tercapai Achieved
	Memberikan masukan/ pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Provide input/opinion on corporate actions submitted by Board of Directors in a timely manner in accordance with the Articles of Association	Pemberian masukan/pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar The provision of input/opinions on corporate actions submitted by Board of Directors in a timely manner in accordance with the Articles of Association	Nota Dinas Official note	10	1	Tercapai Achieved
	Memberikan pendapat dan saran berkualitas antara lain memuat aspek legal, aspek bisnis dan aspekrisiko atas aksi korporasi besertamitigasinya terhadap aksi korporasi yang diusulkan Direksi tahun berjalan Provide quality opinions and suggestions, including legal aspects, business aspects and risk aspects of corporate actions and their mitigation of corporate actions proposed by Board of Directors for the current year	Pemberian pendapat dan saranberkualitas antara lain memuataspek legal, aspek bisnis dan aspek risiko atas aksi beserta mitigasinya terhadap aksi korporasi yang diusulkan Direksi tahun berjalan The provision of quality input/opinion, among others, in law, business, and risk aspeaspectscts in line with its mitigation for the corporate act proposed by the Board of Directors in the current year	Nota Dinas Official note	10	1	Tercapai Achieved
	Melakukan peninjauan melaluikunjungan lapangan (*site visit*) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN Conducting a review through site visits on strategic activities of SOEs	Kunjungan lapangan (*site visit*) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN Site visit to SOE strategic activities	Laporan Kunjungan Visit report	10	2	Tercapai Achieved
	Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP Provide opinions and suggestions to Board of Commissioners regarding the RJPP and WP&B	Pemberian pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP The provision of opinions and suggestions to Board of Commissioners regarding the RJPP and WP&B	Nota Dinas Official note	10	1	Tercapai Achieved

Tabel KPI Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi Remunerasi dan PSDM tahun 2023
2023 KPI Achievements of Business Risk, Post-mining, Nomination, Remuneration, and HC Development Committee

No	Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Duties, functions, and responsibilities	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Target	Status
	Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai laporan Provide opinions and suggestions to Board of Commissioners regarding reports	Pemberian tanggapan kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tahunan The provision of feedback to Board of Commissioners regarding the annual report	Nota Dinas Official note	10	1	Tercapai Achieved
2	**Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola Dynamic and Governance Strengthening Aspect**			**20**		
	Kegiatan Pengembangan Development activity					
	Mengikuti Pelatihan/ Seminar/ Webinar untuk meningkatkan Kompetensi Participate in training/seminars/ webinar to improve competency	Kegiatan Pelatihan/ Seminar/ Webinar Training/Seminars/Webinar Activities	Laporan/ Sertifikat Report/ certificate	10	1	Tercapai Achieved
	Penguatan Tata Kelola Governance Strengthening					
	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Prepare the Committee's Annual Work Plan and Budget	Penyampaian kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Komite Submission to Board of Commissioners regarding the Committee's annual Work Plan and Budget	Surat Letter	10	1	Tercapai Achieved
3	**Rapat Komite Committee Meeting**			**20**	**20**	
	Kehadiran Rapat Internal Komite Attendance of Internal Committee Meetings	Rata-rata jumlah komite yang menghadiri rapat dalam setahun Average number of committees attending meetings in a year	%	10	80	Tercapai Achieved
	Risalah Rapat Minutes of meetings	Tersusunnya risalah rapat Minutes of meetings drawn up	Dokumen Risalah Minutes document	10	6	Tercapai Achieved
Jumlah Total				**100**		

Tabel KPI Individu Komite KRU, PT, CSR, NR & PSDM Tahun 2023
Table of the BR, PM, CSR, NR & HR Development Committee Individual KPIs in 2023

Anggota Komite KRU, PT, CSR, NR & PSDM BR, PM, CSR, NR & HC Development Committee Member	Perspektif Perspective	Indikator Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Target
Tri Winarno	Kolegial Collegial	Pencapaian KPI Komite Committee KPI Achievement	%	40	100 (Tercapai) 100 (Achieved)
	Individu Individual	Pemberian Kajian dan Rekomendasi Provision of Studies and Recommendations			
		Kebijakan mutu dan pelayanan Quality and service policy			
		Pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Management of Subsidiaries/Joint Ventures	Rapat/ND Meetings/ND	15	1 (Tercapai) 1 (Achieved)
		Manajemen Risiko Perusahaan dan Pasca Tambang Corporate and Post-Mining Risk Management	Rapat/ND Meetings/ND	10	1 (Tercapai) 1 (Achieved)
		Kebijakan Pengembangan Usaha Business Development Policy	Rapat/ND Meetings/ND	15	3 (Tercapai) 3 (Achieved)
		Penerapan *Good Corporate Governance* Perusahaan Implementation of Good Corporate Governance			
		CSR			
		Kebijakan Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomination, Remuneration and Human Capital Development Policy			
		Sistem Teknologi Informasi Information Technology System			
		Menghadiri Rapat Meeting Attendance	% Kehadiran %Attendance	20	80 (Tercapai) 80 (Achieved)
Jumlah Total				**100**	

Tabel KPI Individu Komite KRU, PT, CSR, NR & PSDM Tahun 2023
Table of the BR, PM, CSR, NR & HR Development Committee Individual KPIs in 2023

Anggota Komite KRU, PT, CSR, NR & PSDM BR, PM, CSR, NR & HC Development Committee Member	Perspektif Perspective	Indikator Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Target
Helmiansyah Irawan	Kolegial Collegial	Pencapaian KPI Komite Committee KPI Achievement	%	40	100 (Tercapai) 100 (Achieved)
	Individu Individual	Pemberian Kajian dan Rekomendasi Provision of Studies and Recommendations			
		Kebijakan mutu dan pelayanan Quality and service policy			
		Pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Management of Subsidiaries/Joint Ventures	Rapat/ND Meetings/ND	10	1 (Tercapai) 1 (Achieved)
		Manajemen Risiko Perusahaan dan Paska Tambang Corporate and Post-Mining Risk Management	Rapat/ND Meetings/ND	20	2 (Tercapai) 2 (Achieved)
		Kebijakan Pengembangan Usaha Business Development Policy	Rapat/ND Meetings/ND	10	2 (Tercapai) 2 (Achieved)
		Penerapan *Good Corporate Governance* Perusahaan Implementation of Good Corporate Governance			
		CSR			
		Kebijakan Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomination, Remuneration and Human Capital Development Policy			
		Sistem Teknologi Informasi Information Technology System			
		Menghadiri Rapat Meeting Attendance	% Kehadiran %Attendance	20	80 (Tercapai) 80 (Achieved)
Jumlah Total				100	
Nora Sri Hendriyeni	Kolegial Collegial	Pencapaian KPI Komite Committee KPI Achievement	%	40	100 (Tercapai) 100 (Achieved)
	Individu Individual	Pemberian Kajian dan Rekomendasi Provision of Studies and Recommendations			
		Pemberian Kajian dan Rekomendasi Provision of Studies and Recommendations	Rapat/ND Meetings/ND	10	1 (Tercapai) 1 (Achieved)
		Pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Management of Subsidiaries/Joint Ventures			
		Manajemen Risiko Perusahaan dan Paska Tambang Corporate and Post-Mining Risk Management			
		Kebijakan Pengembangan Usaha Business Development Policy			
		Penerapan *Good Corporate Governance* Perusahaan Implementation of Good Corporate Governance			
		CSR			
		Kebijakan Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomination, Remuneration and Human Capital Development Policy	Rapat/ND Meetings/ND	30	1 (Tercapai) 1 (Achieved)
		Sistem Teknologi Informasi Information Technology System			1 (Tercapai) 1 (Achieved)
		Menghadiri Rapat Meeting Attendance	% Kehadiran %Attendance	20	80 (Tercapai) 80 (Achieved)
Jumlah Total				100	

Berdasarkan pemenuhan target atas KPI Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi Remunerasi dan PSDM, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi Remunerasi dan PSDM telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di tahun 2023, sesuai dengan Piagam Komite, Rencana Kerja Tahunan dan capaian target KPI yang telah ditetapkan.

Based on the fulfillment of the Committee's KPI, Board of Commissioners considers that the Business Risk, Post-mining, Remuneration Nomination, and HC Development Committee has properly carried out their duties and responsibilities in 2023 in accordance with the Committee Charter, Annual Work Plan, and achieved the set KPI targets.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary



Sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") diwajibkan untuk membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan. Fungsi Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan yang menjalakan peran sangat esensial bagi perusahaan seperti (i) hubungan dengan pemegang saham (ii) hubungan dengan pemangku kepentingan termasuk media, (iii) menjamin kepatuhan perusahaan (khususnya Direksi, Dewan Komisaris, serta perangkat Organ Pendukung Dewan Komisaris) dan *good corporate governance*, khususnya untuk ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal, (iv) arsip dan kesekretariatan khususnya terkait dengan dokumentasi rapat-rapat Direksi, Dewan Komisaris, rapat gabungan, dan RUPS dapat berjalan efektif dan efisien dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Activities Significantly, the State-Owned Enterprise, PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") is required to establish the Corporate Secretary. The Function of the Corporate Secretary Work Unit will carry out very essential roles for the company such as (i) relations with shareholders (ii) relations with stakeholders including the media, (iii) ensuring company compliance (especially the Board of Directors, Board of Commissioners, and supporting organs of the Board of Commissioners) and good corporate governance, especially for provisions in the capital market sector, (iv) archives and secretariat, especially related to documentation of meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, joint meetings and GMS to run effectively and efficiently by considering the provisions of laws and regulations and the principles of good corporate governance.

Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Anggaran Dasar, dan Piagam Sekretaris Perusahaan PTBA, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dilakukan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perusahaan .
2. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada OJK mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan.
3. Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, Perusahaan wajib menunjuk penggantinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Sekretaris Perusahaan.
4. Selama terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh seorang anggota Direksi atau orang perseorangan yang ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sementara tanpa memperhatikan persyaratan Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK.
5. Dalam situs web Perusahaan wajib diungkapkan informasi mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan kekosongan Sekretaris Perusahaan dengan disertai informasi pendukung.
6. Pelaporan kepada OJK atas informasi terkait dengan angka 1 dan angka 2 dan pemuatan informasi pada situs web Perusahaan sebagaimana angka 5 di atas, dilakukan oleh Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya kondisi baik itu pengangkatan, pemberhentian, dan peristiwa kekosongan Sekretaris Perusahaan.

Persyaratan Sekretaris Perusahaan

Untuk dapat menjabat/diangkat sebagai pejabat Sekretaris Perusahaan dan selama menjabat sebaga Sekretaris Perusahaan, disyaratkan untuk memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan;
4. Memahami kegiatan usaha Perusahaan;
5. Dapat berkomunikasi dengan baik; dan
6. Berdomisili di Indonesia.

Profil Pejabat Sekretaris Perusahaan

Di tahun 2023 terdapat perubahan Sekretaris Perusahaan PTBA dari Apollonius Andwie C menjadi Niko Chandra. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, perubahan Sekretaris Perusahaan Bukit Asam telah disampaikan laporannya kepada OJK berdasarkan Surat

Appointment and Dismissal of the Corporate Secretary

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Companies, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises ("SOEs") No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities State-Owned Enterprises, Articles of Association, and Charter of the Corporate Secretary of PTBA, the mechanism for appointing and dismissing the Corporate Secretary is carried out by considering the following matters:

1. The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors by first obtaining approval from the Company's Board of Commissioners.
2. The company is obliged to submit a report to the OJK regarding the appointment and dismissal of the Corporate Secretary.
3. In the event of a vacancy in the Corporate Secretary, the Company is obliged to appoint a replacement within a maximum period of 60 (sixty) days from the vacancy of the Corporate Secretary.
4. During the vacancy period in the Corporate Secretary as referred to in number 3, the Corporate Secretary is held concurrently by a member of the Board of Directors or an individual appointed as temporary Corporate Secretary without considering the requirements for the Corporate Secretary as regulated in OJK's regulations.
5. On the Company's website, information regarding the appointment, dismissal and vacancy of the Corporate Secretary must be disclosed, along with the supporting information.
6. Reporting to the OJK regarding information related to numbers 1 and 2 and disclosing of information on the Company's website as in number 5 above, is carried out by the Company no later than 2 (two) working days after conditions such as appointment, dismissal and vacancy on the Corporate Secretary.

Corporate Secretary Requirements

To be able to serve/be appointed as Corporate Secretary and while serving as Corporate Secretary, Corporate Secretary is required to fulfill the following requirements and qualifications:

1. It is prohibited to hold any position in other issuers or public companies.
2. Capable of carrying out legal actions;
3. Have knowledge and understanding in the fields of law, finance, and corporate governance;
4. Understand the Company's business activities;
5. Can communicate well; and
6. Reside in Indonesia.

Profile of Corporate Secretary Officer

In 2023 there was a change in the Corporate Secretary of PTBA from Apollonius Andwie C to Niko Chandra. In accordance with OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies, changes to the Corporate Secretary of Bukit Asam have been submitted to the OJK based on PTBA Letter

PTBA No. B/320/111000/KS.03/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 Perihal Perubahan Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk.

No. B/320/111000/KS.03/VIII/2023 dated August 10, 2023, Regarding Changes in the Corporate Secretary of PT Bukit Asam Tbk.

Profil Sekretaris Perusahaan 10 Agustus 2023-sekarang

Profile of Corporate Secretary from August 10, 2023 - Present

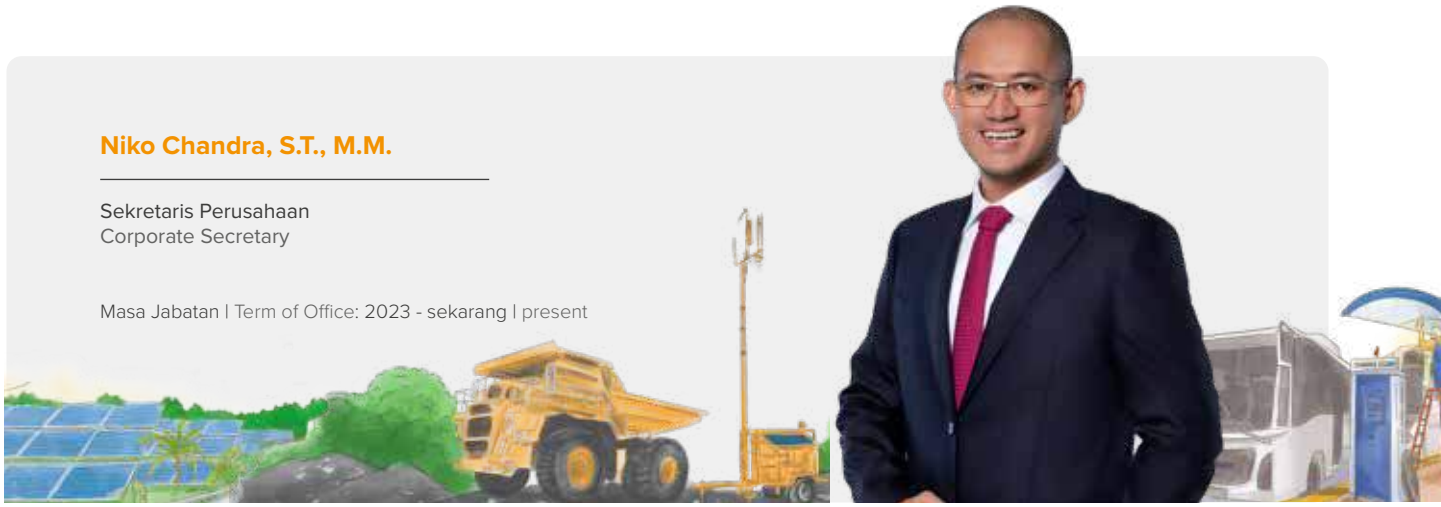

Niko Chandra, S.T., M.M.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Masa Jabatan | Term of Office: 2023 - sekarang | present

Usia Age	37 tahun 37 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Magelang, 20 April 1986 Magelang, April 20, 1986
Domisili Domicile	Serpong, Tangerang
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor: 168/0100/2023 tentang Pengangkatan Pemegang Jabatan di Lingkungan PT Bukit Asam Tbk Decree of the Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk Number: 168/0100/2023 concerning the Appointment of Position Holders within PT Bukit Asam Tbk
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Manajemen – Sekolah Tinggi Manajemen PPM (2023) • S1 Teknik Kimia – Institut Teknologi Bandung (2008) • Master of Management – PPM School of Management (2023) • Bachelor in Chemical Engineering – Bandung Institute of Technology (2008)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk (Agustus 2023 – sekarang) • Ahli Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Maret – Agustus 2023) • Kepala Divisi Institutional Relations PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Des 2021 – Maret 2023) • Kepala Divisi Mining and Mineral Industry Institute PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Jun – Des 2021) • VP Strategi dan Pengembangan Korporat PT Bukit Asam Tbk (Okt 2020 – Mei 2021) • VP Pengembangan Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Jan – Okt 2020) • VP Pemasaran dan Penjualan Ekspor PT Bukit Asam Tbk (Jan 2019 – Jan 2020) • Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk (August 2023-present) • Business Expert PT Bukit Asam Tbk (March-August 2023) • Head of Institutional Relations Division PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Dec 2021 – March 2023) • Head of Mining and Mineral Industry Institute Division PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (June – December 2021) • VP Corporate Strategy and Development PT Bukit Asam Tbk (October 2020 – May 2021) • VP Business Development PT Bukit Asam Tbk (January – October 2020) • VP Marketing and Export Sales PT Bukit Asam Tbk (January 2019 – January 2020)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Komisaris PT Bukit Service Energi Terpadu Commissioner of PT Bukit Service Energi Terpadu
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Shareholders
Kepemilikan Saham Shares Ownership	Tidak ada None

Profil Sekretaris Perusahaan sampai dengan 10 Agustus 2023

Profile of Corporate Secretary until August 10, 2023



Apollonius Andwie C., S.E., M.M.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Masa Jabatan | Term of Office: 2020 - 2023

Usia Age	54 Tahun 54 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Pekalongan, 14 Agustus 1969 Pekalongan, August 14, 1969
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 220/0100/2020 Decree of the Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 220/0100/2020
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Keuangan LPPM (1995) • S1 Akuntansi STIE Malang Kucecwara (1994) • Master Degree in Financing from LPPM (1995) • Bachelor Degree in Accounting from STIE Malang Kucecwara (1994)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk (2020-2023) • Senior Manajer Pemasaran, Penjualan Domestik dan Distribusi (2020) • Direktur Utama PT Bukit Multi Investama (2018-2020) • Senior Manajer Keuangan (2017-2018) • Senior Manajer Keuangan Korporat (2016-2017) • Senior Manajer Akuntansi dan Anggaran (2014-2016) • Corporate Secretary of PT Bukit Asam Tbk (2020-2023) • Senior Marketing Manager, Domestic Sales and Distribution (2020) • President Director of PT Bukit Multi Investama (2018-2020) • Senior Financial Manager (2017-2018) • Senior Corporate Finance Manager (2016-2017) • Senior Accounting and Budget Manager (2014-2016)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Shareholders
Kepemilikan Saham Shares Ownership	Tidak ada None

Tugas Pokok Sekretaris Perusahaan

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan investor (*investor relation*) termasuk penatausahaan serta menyimpan dokumen Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus serta risalah rapat Direksi maupun RUPS.

Corporate Secretary Main Duties

1. Monitor developments in the Capital Market, especially applicable laws and regulations in the Capital Market sector.
2. Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with statutory provisions in the Capital Market sector.
3. Carrying out activities related to the investor relations function including administration and storing Company documents including but not limited to the Shareholder Register, Special Register and minutes of Directors' meetings, and GMS.

4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat (*public relation*).
5. Membina dan mengendalikan kepatuhan hukum, perundang-undangan dan tata kelola Perusahaan dalam rangka memastikan terpenuhinya ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas pasar modal, SRO serta selalu berusaha memenuhi undang-undang dan ketentuan terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
6. Mengelola kesekretariatan Direksi untuk memberikan dukungan bagi Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
7. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
   - Keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan;
   - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
   - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
   - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
   - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Fungsi Sekretaris Perusahaan

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sekretaris Perusahaan
2. Membina dan memelihara kepatuhan Perusahaan pada hukum dan peraturan perundang-undangan, baik aspek hukum pasar modal, aspek hukum bidang usaha maupun perundang-undangan lain yang terkait.
3. Mengkoordinir dalam membangun, menjaga dan meningkatkan citra Perusahaan serta penyelenggaraan media/sarana komunikasi internal dan eksternal.
4. Melaksanakan pengelolaan informasi secara terpadu dan mengelola kewajiban pelaporan Perusahaan.
5. Mengkoordinir pelaksanaan pengendalian kegiatan kehumasan dan pembinaan kegiatan keprotokolan Perusahaan.
6. Pelaksanaan komunikasi informasi antara Perusahaan dengan *stakeholder*, khususnya Pemegang Saham, masyarakat dan media masa serta bertindak selaku wakil Perusahaan dan pejabat penghubung antara Perusahaan dengan regulator dan seluruh *stakeholder*.
7. Mengkoordinir penyelenggaraan pemeliharaan data Pemegang Saham dan melakukan pemutakhiran secara periodik.
8. Mengkoordinir penyiapan penyelenggaraan rapat Direksi dan/Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk pembuatan dan penyimpanan risalah rapat.
9. Pengelolaan kesekretariatan Direksi, serta kegiatan perkantoran Direksi.
10. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Carry out activities related to the function of public relations.
5. Fostering and controlling compliance with laws, regulations, and corporate governance in order to ensure the fulfillment of the provisions set by the capital market authority, SRO, and always trying to fulfill the laws and related provisions set by the Government.
6. Manage the secretariat of the Board of Directors to provide support for the Board of Directors in carrying out their duties and functions.
7. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance which includes:
   - Disclosure of information for decisions including the availability of information on the Company's website;
   - Submission of reports to OJK on time;
   - Organizing and documenting the GMS;
   - Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
   - Implementation of an orientation program regarding decisions for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Corporate Secretary Functions

1. Prepare the Corporate Secretary's work plan and budget
2. Develop and maintain the Company's compliance with laws and regulations, including capital market legal aspects, business sector legal aspects, and other related laws.
3. Coordinate in building, maintaining, and improving the Company's image as well as organizing internal and external media/communication facilities.
4. Carry out integrated information management and manage the Company's reporting obligations.
5. Coordinate the implementation of control of public relations activities and development of Company protocol activities.
6. Implement information communication between the Company and stakeholders, especially Shareholders, public, and the mass media as well as acting as the Company's representative and liaison officer between the Company and regulators and all stakeholders.
7. Coordinate the maintenance of Shareholder data and update it regularly.
8. Coordinate the preparation for meetings of the Board of Directors and/Board of Commissioners, General Meeting of Shareholders, including the preparation and storage of meeting minutes.
9. Manage the Directors' secretariat, as well as Directors' office activities.
10. As a liaison between the Company and shareholders, OJK and other stakeholders.

Wewenang Sekretaris Perusahaan

Wewenang Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi-informasi kepada OJK, SRO, berkaitan dengan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan.
3. Melihat catatan-catatan, risalah-risalah rapat Direksi, dokumen-dokumen Perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Direksi.
4. Meminta laporan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan Direksi.
5. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Direksi kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Direksi.
6. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan kepada unit-unit terkait untuk keperluan pelaksanaan tugas.
7. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari unit-unit kerja/pihak terkait atas penyediaan bahan-bahan/informasi/data yang dibutuhkan oleh Direksi.
8. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar dan atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan
9. Mengusulkan agenda rapat-rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar Perusahaan.
10. Menghadiri rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
11. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Guna mendukung fungsi Sekretaris Perusahaan, Direksi Perusahaan menetapkan struktur organisasi Sekretaris Perusahaan yang memuat divisi dan fungsi sebagai berikut:

1. Divisi Hubungan Investor;
2. Divisi Kantor Perwakilan, khusus kantor perwakilan Jakarta;
3. Divisi Hubungan Masyarakat dan Administrasi Korporat;
4. Divisi *Corporate Communication dan Government Relation;*
5. Divisi *Office of the Board;*
6. Fungsi *Compliance.*

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Keputusan Direksi No. 202A/0100/2023 pada tanggal 9 November 2023 tentang Struktur Organisasi Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan sebagaimana tergambarkan pada bagan di bawah ini.

Company Secretary Authority

The authority of the Corporate Secretary is as follows:

1. Submit information to OJK and SRO regarding the duties of the Corporate Secretary in accordance with applicable regulations.
2. Establish systems and procedures for correspondence and archives within the Board of Directors and the Company.
3. Check notes, minutes of Board of Directors meetings, Company documents and reports in the context of activities to provide information required by the Board of Directors.
4. Request a progress report on the implementation of the Board of Directors' decisions.
5. Request data/information/explanations required by the Board of Directors from related parties inside and outside the Company for the purposes of carrying out the Board of Directors' duties.
6. Request data/information/explanations needed from related units for the purpose of carrying out tasks.
7. Remind and request explanations from work units/related parties regarding the provision of materials/information/data required by the Board of Directors.
8. Represent the Board of Directors in dealing with external and internal parties in accordance with the assignments given and determined policies
9. Propose agendas for Board of Directors meetings with parties inside/outside the Company.
10. Attend Board of Directors meetings with external and internal parties in accordance with previously established policies.
11. Use secretarial facilities to carry out their duties.

Corporate Secretary Organizational Structure

In order to support the function of the Corporate Secretary, the Company's Board of Directors has established an organizational structure for the Corporate Secretary which contains the following divisions and functions:

1. Investor Relations Division;
2. Representative Office Division, for the Jakarta representative office;
3. Public Relations and Corporate Administration Division;
4. Corporate Communication and Government Relations Division;
5. Office of the Board Division;
6. Compliance Function;

The Organizational Structure of the Corporate Secretary is in accordance with Directors' Decree No. 202A/0100/2023 dated November 9, 2023, concerning the Organizational Structure of the Corporate Secretary Work Unit as described in the chart below.

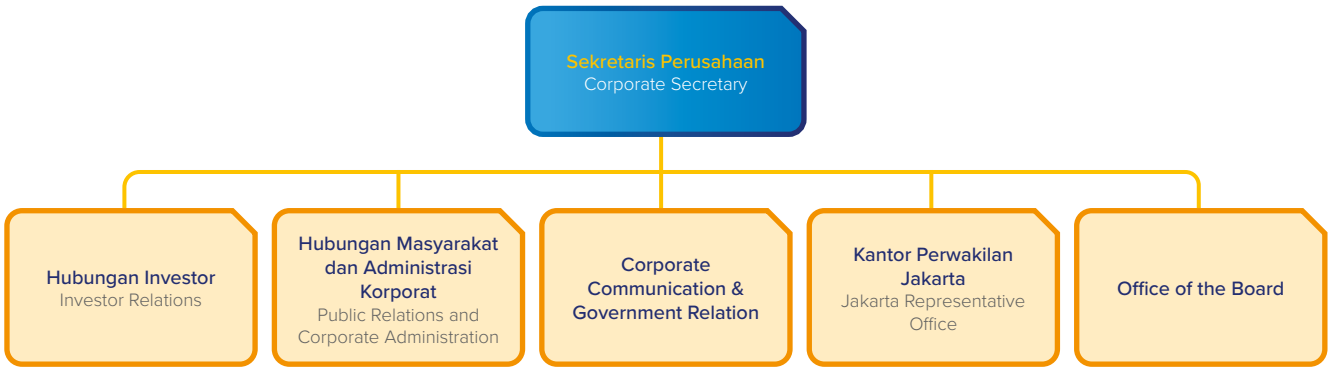

Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:

1. Mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan satuan kerja Sekretaris Perusahaan yang meliputi:
2. Pengembangan kebijakan, strategi, standar dan prosedur, penyusunan program, implementasi program untuk penanganan *corporate action;*
3. Monitoring perkembangan pasar modal;
4. Membuat kebijakan dan rekomendasi sesuai dengan peraturan pasar modal;
5. Memberikan pelayanan informasi yang menyangkut hal-hal yang perlu diketahui oleh Masyarakat atau pemegang saham mengenai emiten atau perusahaan publik;
6. Menjadi penghubung antara perusahaan publik dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat atau pemegang saham;
7. Membuat kajian berbagai laporan terbaru dari analis pasar modal;
8. Melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif atas kinerja perusahaan khususnya di bidang Keuangan;
9. Monitoring situasi dan proyeksi perekonomian (internasional, regional dan lokal, serta pasar modal berbagai negara);
10. Penanganan Administrasi Perusahaan;
11. Penanganan *corporate communication dan government relation;*
12. Penanganan hubungan investor dan kepatuhan;
13. Menjadi representasi Perusahaan (Direksi);

14. Mengelola Kantor Perwakilan Jakarta;
15. Penanganan hubungan masyarakat;
16. Publikasi kegiatan Perusahaan;
17. Penerbitan laporan perusahaan;
18. Menciptakan standar identitas perusahaan;
19. Memberikan dukungan strategis kepada Direksi sehingga citra Perusahaan meningkat, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementation of Tasks in 2023

Throughout 2023, the Corporate Secretary has carried out his duties and responsibilities in accordance with POJK No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies, including:

1. Direct and control all activities of the Corporate Secretary work unit;
2. Develop policies, strategies, standards and procedures, preparing programs, implementing programs to handle corporate actions;
3. Monitor capital market developments;
4. Form policies and recommendations in accordance with capital market regulations;
5. Provide information services regarding matters that the public or shareholders need to know regarding issuers or public companies;
6. Become a liaison between public companies and the Financial Services Authority (OJK) and the public or shareholders;
7. Review various latest reports from capital market analysts;

8. Conduct qualitative and quantitative analysis of company performance, especially in the financial sector;
9. Monitor the economic situation and projections (international, regional and local, as well as capital markets in various countries);
10. Handle Company Administration;
11. Handle corporate communications and government relations;
12. Handle investor relations and compliance;
13. Become a representative of the Company (Board of Directors);
14. Manage the Jakarta Representative Office;
15. Handle public relations;
16. Publication of Company activities;
17. Publish company reports;
18. Create corporate identity standards;
19. Provide strategic support to the Board of Directors to help the Company's image improves, and in accordance with applicable regulations.

Kegiatan Hubungan Investor

Membina hubungan dengan Pemegang Saham merupakan salah satu hal penting bagi Perusahaan. PTBA selalu memberikan informasi terkini secara berkala kepada para pemegang saham, di luar penyampaian informasi yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.

Sepanjang tahun 2023, aktivitas dan interaksi Investor Relations PTBA dengan investor, analis, dan pelaku pasar modal antara lain:

1. *Analyst meeting* sebanyak 4 (empat) kali.

Tanggal Date	Topik Topic	Lokasi Location	Keterangan Description
9 Maret 2023 March 9, 2023	Kinerja PTBA FY22 PTBA performance on 2022 Financial Year	Jakarta	*Offline*
4 Mei 2023 May 4, 2023	Kinerja PTBA 1Q23 PTBA performance on 1Q23	Jakarta	*online*
1 September 2023 September 1, 2023	Kinerja PTBA 1H23 PTBA performance on 1H23	Jakarta	*Offline*
30 Oktober 2023 October 30, 2023	Kinerja PTBA 9M23 PTBA Performance on 9M23	Jakarta	*Offline*

2. Berdiskusi melalui *teleconference, one on one meeting, group discussion* serta komunikasi aktif lainnya dengan para pemegang saham baik melalui *WhatsApp*, telepon, maupun *email*.
3. *Public Expose* tahun 2023 pada tanggal 27 November 2023 dilaksanakan secara daring melalui *video conference call* yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. Pada *public expose* ini, manajemen perusahaan memaparkan kinerja operasional dan keuangan perusahaan serta strategi pengembangan Perusahaan ke depan.
4. *Site visit* ke unit kerja PTBA yang ditujukan kepada pemegang saham eksisting, *potential investors*, *analyst*, dan publik (masyarakat umum).
5. Info memo sebanyak 4 (empat) kali.

Adapun prestasi yang telah diperoleh oleh Investor Relations PTBA sepanjang tahun 2023 antara lain:

1. Juara 2 dalam ajang Annual Report Award (ARA) Tahun 2023
2. Peringkat Platinum dalam ajang Asian Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023

Relations Activities

Establishing relationships with Shareholders is one of the important issues for the Company. PTBA always provides the latest information periodically to shareholders, apart from the information conveyed at the General Meeting of Shareholders.

Throughout 2023, PTBA Investor Relations activities and interactions with investors, analysts and capital market players include:

1. 4 (four) times analyst meetings

2. Discuss via teleconference, one on one meeting, group discussion, and also actively continue to communicate with shareholders either via WhatsApp, telephone, or email.
3. The 2023 Public Expose on November 27, 2023, was held online via video conference call in collaboration with the Indonesian Stock Exchange. In this public expose, company management explained the company's operational and financial performance as well as the company's future development strategy.
4. Site visits to PTBA work units with the involvement of existing shareholders, potential investors, analysts and the public (general public).
5. Info memo 4 (four) times.

The achievements obtained by PTBA Investor Relations throughout 2023 include:

1. Second place in the 2023 Annual Report Award (ARA).
2. Platinum Rank in the 2023 Asian Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) event

Kegiatan Corporate Communication & Government Relation

Press Release PT Bukit Asam Tbk Tahun 2023

PT Bukit Asam Tbk Press Release in 2023

Tanggal Date	Judul Title
3 Januari 2023 January 3, 2023	PTBA Beri Bantuan Bedah Rumah untuk 4 Unit Hunian Tak Layak Huni PTBA renovates four unhabitable houses
6 Januari 2023 January 6, 2023	Langkah PTBA Persiapkan Tanjung Enim Menjadi Kota Wisata PTBA's efforts in realizing Tanjung Enim as Tourism City
11 Januari 2023 January 11, 2023	Energi Surya PTBA Bikin Petani Lebih Sejahtera PTBA's solar energy increases farmers' welfare
13 Januari 2023 January 13, 2023	Ragam Dukungan PTBA untuk Sektor Pariwisata PTBA's efforts in supporting tourism sector

Corporate Communication & Government Relation Activity

Press Release PT Bukit Asam Tbk Tahun 2023

PT Bukit Asam Tbk Press Release in 2023

Tanggal Date	Judul Title
24 Januari 2023 January 24, 2023	PTBA Sabet Penghargaan dari Kanwil DJP Sumsel Babel PTBA receives award from Sumsel Babel DJP
27 Januari 2023 January 27, 2023	Lima Unit Bus Listrik Dioperasikan PTBA untuk Pelabuhan Tarahan PTBA operates five electric buses for Tarahan Port
2 Februari 2023 February 2, 2023	Bukit Asam Kirim Tim Ekspedisi ke 6 (enam) Gunung Bukit Asam sends expedition team to 6 (six) mountains
6 Februari 2023 February 6, 2023	PTBA Bangun Gedung PAUD hingga Posyandu untuk Warga Perumahan Bara Lestari PTBA builds PAUD, Posyandu buildings for Bara Lestari residents
9 Februari 2023 February 9, 2023	PTBA Gelar The 1st South Sumatera Fire and Rescue Challenge PTBA holds the 1st South Sumatera Fire and Rescue Challenge
14 Februari 2023 February 14, 2023	Berkontribusi Besar ke Penerimaan Pajak, PTBA Kembali Raih Penghargaan PTBA receives award in tax revenue
20 Februari 2023 February 20, 2023	PTBA Dorong Kearifan Lokal Go International, Batik Kujur Tampil di AS PTBA supports local culture by sending Kujur Batik to USA
27 Februari 2023 February 27, 2023	Jasa Marga dan PTBA Lanjutkan Kolaborasi Pengembangan PLTS di Jalan Tol Jasa Marga-PTBA collaborate to develop toll road Solar Panel Power Plant (SPPP)
28 Februari 2023 February 28, 2023	Sinergi Grup MIND ID! PT Timah dan Bukit Asam Jajaki Pengembangan PLTS PT Timah-Bukit Asam explore Solar Panel Power Plant (SPPP) development
2 Maret 2023 March 2, 2023	HUT ke-42, Momentum Bukit Asam Melesat Melampaui Batas Bukit Asam's Momentum to Soar Beyond Limits on 42nd Anniversary
3 Maret 2023 March 3, 2023	Jaga Kepatuhan Hukum, PTBA Gandeng Kejari Muara Enim PTBA partners with Prosecutor's Office for law compliance
6 Maret 2023 March 6, 2023	HUT ke-25 Kementerian BUMN, Bukit Asam Gelar Jalan Sehat di 6 Kabupaten Bukit Asam conducts fun walk to commemorate SOEs Ministry Anniversary
6 Maret 2023 March 6, 2023	Siapkan Tanjung Enim Jadi Kota Wisata, PTBA Hadirkan Waterpark PTBA opens water park to support Tanjung Enim as tourism city
9 Maret 2023 March 9, 2023	Tertinggi dalam Sejarah, PTBA Raih Laba Bersih Rp 12,6 Triliun PTBA generates Rp12,6 trillion Net Profit, the highest in history
13 Maret 2023 March 13, 2023	Gerak Cepat PTBA Bantu Korban Bencana Banjir di Muara Enim dan Lahat PTBA assists victims of floods in Muara Enim, Lahat
15 Maret 2023 March 15, 2023	Dukung Rehabilitasi DAS dan Pariwisata, PTBA Perluas Pusat Persemaian PTBA Expands Nursery Center to Support Watershed Rehabilitation, Tourism
16 Maret 2023 March 16, 2023	Arsal Ismail Raih Penghargaan The Best CEO Strategic Orientation Arsal Ismail awarded as the Best CEO Strategic Orientation
21 Maret 2023 March 21, 2023	Cerita Sulikin, Anak Petani yang Bisa Kuliah Berkat Beasiswa dari PTBA PTBA gives college scholarship for farmer's kid
27 Maret 2023 March 27, 2023	Bukit Asam Konservasi Terumbu Karang di Pulau Pahawang Bukit Asam Conducts Coral Reef Conservation on Pahawang Island
30 Maret 2023 March 30, 2023	Bukit Asam Bagikan 10.000 Paket Sembako di Muara Enim dan Lahat Bukit Asam disburses 10,000 staple packages at Muara Enim, Lahat
5 April 2023 April 5, 2023	PTBA Latih Warga Binaan Lapas Perempuan Olah Limbah Jadi Beragam Kerajinan PTBA opens craft class from waste for women prisoners
12 April 2023 April 12, 2023	PTBA Beri Bantuan untuk 105 Masjid dan 106 Musala PTBA provides assistance to 105 mosques and 106 prayer rooms
13 April 2023 April 13, 2023	Terapkan Green Building, Kantor Pusat Bukit Asam Bakal Pakai PLTS Atap PTBA office to use roof SPPP to realize green building
17 April 2023 April 17, 2023	Lewat Usaha Rosella, Perempuan Berdaya Bersama PTBA PTBA empowers women with Rosella business
18 April 2023 April 18, 2023	Tingkatkan Kualitas Kopi Lampung, PTBA Serahkan Bantuan Mesin Pengolah PTBA hands over coffee grinding machine to support Lampung coffee
19 April 2023 April 19, 2023	Mudik Bersama BUMN 2023, Bukit Asam Berangkatkan Ratusan Pemudik Bukit Asam accommodates hundreds of homecomers for 2023 SOEs homecoming
28 April 2023 April 28, 2023	Kinerja Operasional Meningkat, PTBA Raih Laba Bersih Rp1,2 Triliun di Triwulan I 2023 PTBA Generates Rp1,2 trillion net profit in 1Q2023
4 Mei 2023 May 4, 2023	Diversifikasi Bisnis PTBA Menjadi Perusahaan yang Berkelanjutan PTBA aims to become sustainable company through business diversification
10 Mei 2023 May 10, 2023	PLTU Sumsel-8 Masuki Tahap Uji Coba Operasi Sumsel-8 CFPP enters operational trial phase
12 Mei 2023 May 12, 2023	Dukungan Bukit Asam untuk Wujudkan Pertanian Ramah Lingkungan PTBA aims to realize environmentally friendly agriculture
16 Mei 2023 May 16, 2023	Komitmen Lindungi Pekerja, PTBA Raih Paritrana Award PTBA wins Paritrana Award for employees protection

Press Release PT Bukit Asam Tbk Tahun 2023

PT Bukit Asam Tbk Press Release in 2023

Tanggal Date	Judul Title
22 Mei 2023 May 22, 2023	Bukit Asam Sejahterakan Petani Lewat Budidaya Beras Organik Bukit Asam increases farmers' welfare through organic rice planting
25 Mei 2023 May 25, 2023	Kisah Pemuda Tanjung Enim Raih Mimpi Berkat Beasiswa dari PTBA PTBA gives a scholarship to Tanjung Enim student
8 Juni 2023 June 8, 2023	Bermula dari Gudang, UMK Batik Binaan PTBA Sukses Naik Kelas PTBA's Batik MSE enters new stage of business
9 Juni 2023 June 9, 2023	Jalankan CSR Inovatif, PTBA Borong 3 Penghargaan TOP CSR Awards PTBA wins 3 awards from TOP CSR Awards
13Juni 2023 June 13, 2023	Hari Lingkungan Hidup, PTBA Ajak Masyarakat Bersih-bersih Sungai Enim dan Sungai Kiahaan PTBA invites community to clean Enim, Kiahaan Rivers
16 Juni 2023 June 16, 2023	PTBA Tebar Dividen Rp12,6 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih PTBA Disburses Dividends of Rp12.6 Trillion, 100 Percent of Net Profit
22 Juni 2023 June 22, 2023	Berantas Buta Membaca, Bukit Asam (PTBA) Gelar Pelatihan untuk 164 Guru PTBA holds training for 164 teachers to eradicate illiteracy
24 Juni 2023 June 24, 2023	Kinerja Keuangan 5 Tahun Terakhir Moncer, PTBA Raih Penghargaan PTBA receives awards for positive financial performance in 5 years
26 Juni 2023 June 26, 2023	PTBA Gelar Tes Akademik untuk 281 Calon Penerima Beasiswa Bidiksiba PTBA holds academic test for 281 prospective scholarship beneficiaries
27 Juni 2023 June 27, 2023	Menggapai Cita-cita Berkat Beasiswa Bidiksiba dari Bukit Asam (PTBA) Achieving dreams through scholarship provided by PTBA
27 Juni 2023 June 27, 2023	Komitmen Kuat Bukit Asam (PTBA) Turunkan Emisi PTBA demonstrates willingness in reducing emission
3 Juli 2023 July 3, 2023	Idul Adha 1444 H, Bukit Asam Salurkan 145 Sapi dan 56 Kambing Bukit Asam disburses 145 cattles, 56 goats for Eid al Adha
6 Juli 2023 July 6, 2023	Cerita Istana Roti Bakery, UMK Binaan Bukit Asam (PTBA) The story of Istana Roti Bakery, SME under Bukit Asam
7 Juli 2023 July 7, 2023	Bukit Asam (PTBA) Ubah Lahan Bekas Tambang Jadi Kebun Buah PTBA converts former land mine into fruit farm
11 Juli 2023 July 11, 2023	Petani Tanjung Raja Rasakan Manfaat Pupuk Organik dari Bukit Asam Farmers generate benefits from organic fertilizer by Bukit Asam
15 Juli 2023 July 15, 2023	Bukit Asam (PTBA) Bagikan Dividen Rp 12,6 Triliun Hari Ini Bukit Asam Distributes Rp12,6 trillion devident as per today
18 Juli 2023 July 18, 2023	Bukit Asam (PTBA) Meriahkan BUMN Goes to Campus di Polsri PTBA supports SOEs goes to campus at Polsri
20 Juli 2023 July 20, 2023	Milenial Bukit Asam (PTBA) Berpartisipasi di BUMN Environmental Movement PTBA millenial participates as SOEs Environmental Movement
20 Juli 2023 July 20, 2023	PTBA Tanam 50.000 Bibit Mangrove di Kawasan Ekowisata Cuku Nyi Nyi PTBA plants 50 thousand Mangrove seeds as Cuku Nyi Nyi Ecotourism
2 Agustus 2023 August 2, 2023	Pembangkit Listrik Tenaga Surya Irigasi Bukit Asam (PTBA) Jadi Andalan Petani Desa Nanjungan Nanjungan Farmers cling to solar power plant by PTBA
3 Agustus 2023 August 3, 2023	Bukit Asam (PTBA) Gandeng China Huadian Kembangkan Energi Terbarukan PTBA works with China Huadian to develop renewable energy
7 Agustus 2023 August 7, 2023	Bantuan dari Bukit Asam (PTBA) Tingkatkan Penghasilan Petani di Lampung PTBA's assistance increases farmers welfare in Lampung
10 Agustus 2023 August 10, 2023	Sembilan Bulan Beroperasi, PLTS Tol Bali-Mandara Sukses Pangkas Emisi Operating for 9 months, Bali Mandara toll road PLTS able to reduce emission
14 Agustus 2023 August 14, 2023	Bukit Asam (PTBA) Raih 4 Penghargaan di Ajang TJSL & CSR Award 2023 PTBA gets 4 awards at 2023 TJSL&CSR Awards
18 Agustus 2023 August 18, 2023	HUT ke-78 RI, Bukit Asam (PTBA) Resmikan PLTS Irigasi Desa Karang Raja PTBA officiates Karang Raja Village irrigation on Independence Day
22 Agustus 2023 August 22, 2023	PTBA Serahkan Bantuan Truk Arm Roll hingga Mesin Pemusnah Sampah untuk Pemkab Muara Enim PTBA hands over arm roll truck, waste crusher machine to Muara Enim government
24 Agustus 2023 August 24, 2023	Kurangi Emisi, PTBA Operasikan Hybrid Dump Truck hingga Bus Listrik PTBA uses hybrid dump truck, electric bus to reduce emission
25 Agustus 2023 August 25, 2023	Kembangkan Batik Kujur, Bukit Asam (PTBA) Berdayakan Para Ibu Rumah Tangga PTBA empowers housewife with Kujur Batik production
28 Agustus 2023 August 28, 2023	Digitalisasi Pertambangan Bukit Asam (PTBA) Berbuah Prestasi PTBA mining digitalization reaps achievement

Press Release PT Bukit Asam Tbk Tahun 2023

PT Bukit Asam Tbk Press Release in 2023

Tanggal Date	Judul Title
29 Agustus 2023 August 29, 2023	Bukit Asam (PTBA) Cetak Laba Bersih Rp2,8 Triliun di Semester I 2023 PTBA Scores Rp2.8 trillion Net Profit in 1H2023
31 Agustus 2023 August 31, 2023	Terapkan Standar GRC Tinggi, Bukit Asam (PTBA) Borong 4 Penghargaan PTBA gets 4 awards in GRC compliance
4 September 2023 September 4, 2023	Kolaborasi dengan Pemerintah, Bukit Asam (PTBA) Ikut Aksi Tanam Mangrove PTBA participates in mangrove planting with government
11 September 2023 September 11, 2023	Bukit Asam (PTBA) Dukung Pelestarian Songket Silungkang Khas Sawahlunto PTBA supports Sawahlunto Silungkang Songket preservation
14 September 2023 September 14, 2023	Bukit Asam (PTBA) Gandeng Inhutani V untuk Reklamasi hingga Pengelolaan Hutan PTBA works with Inhutani V for forest management, reclamation
18 September 2023 September 18, 2023	Kolaborasi Bukit Asam (PTBA) dan UGM Tingkatkan Nilai Tambah Batu Bara PTBA works with UGM to increase coal added value
20 September 2023 September 20, 2023	Jalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Bukit Asam (PTBA) Raih Penghargaan PTBA wins awards in GCG implementation
27 September 2023 September 27, 2023	Hari Pertambangan dan Energi ke-78, PTBA Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat PTBA focuses on community welfare on mining and energy day
2 Oktober 2023 October 2, 2023	Konsistensi Bukit Asam (PTBA) Jalankan Good Mining Practice Demi Keberlanjutan PTBA consistent in implementing Good Mining Practice for sustainability
3 Oktober 2023 October 3, 2023	Bukit Asam (PTBA) Sabet 2 Penghargaan Subroto 2023 dari Kementerian ESDM Bukit Asam achieves 2 Subroto Awards from ESDM Ministry
3 Oktober 2023 October 3, 2023	Dorong Inovasi Pemanfaatan Batu Bara dan EBT, PTBA Gandeng BRIN PTBA works with BRIN to develop coal, EBT utilization
4 Oktober 2023 October 4, 2023	Inovasi Insan Bukit Asam (PTBA) Berbuah 3 Dharma Karya ESDM 2023 PTBA's People Innovation wins 3 ESDM Ministry Awards
10 Oktober 2023 October 10, 2023	Bukit Asam (PTBA) Kembangkan Energi Biomassa dari Kaliandra Merah PTBA develops Biomass energy from Calliandra
12 Oktober 2023 October 12, 2023	Tingkatkan Sinergisitas, KAI dan PTBA Tanda Tangani Perjanjian Angkutan Batu Bara PTBA-KAI sign new MoU in coal transport to increase synergy
18 Oktober 2023 October 18, 2023	Waspada Penipuan Investasi Mengatasnamakan Bukit Asam (PTBA) Beware of investment fraud misusing PTBA's name
24 Oktober 2023 October 24, 2023	4 Tahun Transformasi BUMN, Bukit Asam (PTBA) Terus Melaju PTBA continues to roar in SOEs 4th year of transformation
30 Oktober 2023 October 30, 2023	Kisah Sukses Zailani dan PTBA Budidaya Tanaman Berbasis Otomasi Zailani's success story in Automation-Based Plant Cultivation with PTBA
30 Oktober 2023 October 30, 2023	Bukit Asam (PTBA) Cetak Laba Bersih Rp 3,8 Triliun di Triwulan III 2023 PTBA Scores Net Profit of Rp3.8 Trillion in 2023 Q3
30 Oktober 2023 October 30, 2023	Cerita Febri Sumantri dan PTBA Dorong Transformasi Desa Keban Agung Febri Sumantri's story in Keban Agung Village transformation with PTBA
1 November 2023 November 1, 2023	Berdayakan Ribuan Lansia, Bukit Asam (PTBA) Raih Penghargaan PTBA gets awards from empowering thousands of elderly
2 November 2023 November 2, 2023	PLTU Sumsel-8 Resmi Beroperasi Secara Komersial Sumsel-8 CFPP officialy opens for commercial purpose
8 November 2023 November 8, 2023	Bukit Asam (PTBA) Raih Platinum di Asia Sustainability Reporting Rating 2023 PTBA wins Platinum score at the 2023 Asia Sustainability Reporting Rate
10 November 2023 November 10, 2023	Bukit Asam (PTBA) dan Kimia Farma (KAEF) Jajaki Kerja Sama di Bidang Kesehatan PTBA partners with Kimia Farma to explore health cooperation
13 November 2023 November 13, 2023	Bukit Asam (PTBA) Boyong 4 Penghargaan IDIA Awards 2023 PTBA takes home 4 IDIA Awards 2023
15 November 2023 November 15, 2023	Bukit Asam (PTBA) Sukses Pertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PTBA Successfully Maintains Anti-Bribery Management System Certification
17 November 2023 November 17, 2023	PLTS Irigasi Bukit Asam (PTBA) Sejahterakan Petani di Lampung Tengah PTBA Irrigation SPPP Increases Farmers' Welfare in Central Lampung
27 November 2023 November 27, 2023	Pertahankan Kinerja, Bukit Asam (PTBA) Genjot Produksi dan Penjualan Batu Bara PTBA boosts coal production, sales to maintain performance
29 November 2023 November 29, 2023	Bukit Asam (PTBA) Raih Annual Report Award 2022 PTBA wins 2022 Annual Report Award
30 November 2023 November 30, 2023	Ada PLTS PTBA, Petani Tetap Garap Sawah Saat Kemarau Panjang Farmers still cultivate fields during prolonged drought supported by PTBA's SPPP

Press Release PT Bukit Asam Tbk Tahun 2023
PT Bukit Asam Tbk Press Release in 2023

Tanggal Date	Judul Title
1 Desember 2023 December 1, 2023	Bukit Asam (PTBA) Sukses Pulihkan Daerah Aliran Sungai 234 Ha di Muara Enim PTBA Successfully Restores 234 Hectares River Watershed in Muara Enim
4 Desember 2023 December 4, 2023	Sinergi BUMN di COP 28, PLN dan Bukit Asam (PTBA) Jajaki Pemanfaatan FABA PTBA-PLN work to utilize FABA at SOEs cooperation in COP 28
5 Desember 2023 December 5, 2023	Bukit Asam Raih Gelar Perusahaan Terbaik di Ajang Serelo CSR Award PTBA wins the best company award at Serelo CSR Award
6 Desember 2023 December 6, 2023	Sabet 3 Penghargaan, Bukit Asam (PTBA) Cetak Prestasi di Top Digital Awards 2023 Bukit Asam (PTBA) Scores Achievements at the 2023 Top Digital Awards
7 Desember 2023 December 7, 2023	Dirut PTBA Arsal Ismail Raih Gelar The Best CEO in Beyond Coal PTBA's President Director gets the best CEO in Beyond Coal
11 Desember 2023 December 11, 2023	Jalankan CSR Berkelanjutan, Bukit Asam (PTBA) Borong 3 Penghargaan ICA 2023 PTBA wins 3 awards at 2023 ICA for implementing sustainable CSR
12 Desember 2023 December 12, 2023	Konsisten Berdayakan Masyarakat, PTBA Raih Tamasya Award dari Kementerian ESDM PTBA wins Tamasya Award from ESDM Ministry for community empowerment
14 Desember 2023 December 14, 2023	Energi Surya Bukit Asam (PTBA) Tingkatkan Panen Petani di Sawahlunto PTBA's solar power increases farmers' yield in Sawahlunto
19 Desember 2023 December 19, 2023	Dua PLTS Bukit Asam (PTBA) Pangkas Emisi 618,5 Ton, Setara Tanam 847 Pohon Two PTBA's power plants cut emission by 618,5 tons, equivalent to plant 847 trees
21 Desember 2023 December 21, 2023	Taat Pengelolaan Lingkungan, Bukit Asam (PTBA) Dianugerahi 2 PROPER Emas 2023 PTBA gets 2 PROPER Gold award for environmental management compliance

Hubungan dengan Otoritas dan Self-Regulatory Organization (SRO)

Sebagaimana salah satu tugas dari Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik salah satu tugas sekretaris perusahaan yakni berkaitan hubungan dengan OJK dan SRO, selama tahun 2023 surat, laporan, korespondensi sebanyak 85 kali yang memuat diantaranya laporan bulanan registrasi efek, laporan perubahan komite audit, laporan perubahan sekretaris perusahaan, dan keterbukaan informasi.

Relationship with Authorities and Self-Regulatory Organizations (SRO)

As one of the duties of the Corporate Secretary in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 of 2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies, one of the duties of the corporate secretary is related to relations with the OJK and SRO. In 2023 there were 85 letters, reports, and correspondence including monthly securities registration reports, audit committee change reports, company secretary change reports, and information disclosure.

Pengembangan Kompetensi

Sebagai upaya pengembangan kompetensi, Sekretaris Perusahaan difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi mencakup program pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi, adapun pelatihan dan sertifikasi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan di tahun 2023, dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Competency Development

As an effort to develop competency, the Corporate Secretary is supported by the Company to participate in education and training. Competency development includes education, training, and certification program. The training and certification taken by the Corporate Secretary in 2023 can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan tahun 2023 dilakukan dengan melakukan evaluasi *Key Performance Indikator/Balance Score Card* secara triwulan. Berdasarkan hasil perhitungan, di tahun 2023 Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan mendapatkan skor 95,21 pada Triwulan I, skor 95,91 pada Triwulan II, skor 97,27 pada Triwulan III, dan Triwulan IV mendapatkan skor 98,71.

Performance Appraisal

The performance appraisal of the Corporate Secretary Work Unit in 2023 was carried out by evaluating the Key Performance Indicators/Balance Score Card on a quarterly basis. Based on the calculation results, in 2023 the Corporate Secretary Work Unit received a score of 95.21 in 1st Quarter, a score of 95.91 in 2nd Quarter, a score of 97.27 in 3rd Quarter, and in 4th Quarter a score of 98.71,

Key Performance Indicator Sekretaris Perusahaan 2023
Corporate Secretary Key Performance Indicators in 2023

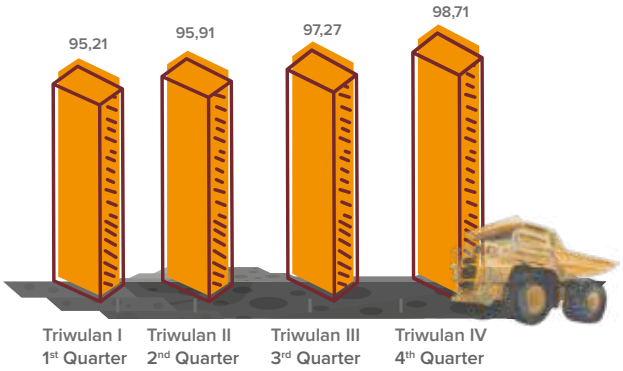



Satuan Pengawasan Internal
Internal Supervision Unit



Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan memiliki Organisasi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam menjalankan kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif melalui evaluasi sistem pengelolaan perusahaan dan pemberian rekomendasi perbaikan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan. SPI dipimpin oleh *Vice President* yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur utama dengan sepengetahuan Dewan Komisaris.

Satuan Pengawasan Intern telah dilengkapi dengan pedoman yang menjadi acuan pelaksanaan tugas yakni Piagam Satuan Pengawasan Intern PTBA yang ditandatangani bersama oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama/Komisaris Independen PTBA. Pedoman Audit dan Program Kerja Audit Tahunan yang ditetapkan oleh Direktur Utama. Ruang lingkup Satuan Pengawasan Intern meliputi pengendalian internal, evaluasi efektivitas implementasi prinsip-prinsip GCG dan evaluasi efektivitas Manajemen Risiko.

In an effort to implement GCG principles, the Company has an Internal Audit Unit to carry out independent and objective assurance and consultation activities through evaluating the company's management system and providing recommendations for improvements to bring added value to the Company. Internal Audit is led by a Vice President who is appointed by and responsible to the President Director and known by the Board of Commissioners.

The Internal Audit Unit is equipped with guidelines as a reference for carrying out its duties, namely the PTBA Internal Audit Unit Charter which was jointly signed by the President Director and the President Commissioner/Independent Commissioner of PTBA. Audit Guidelines and Annual Audit Work Program are determined by the President Director. The scope of work for the Internal Audit Unit includes internal control, evaluating the effectiveness of implementing GCG principles, and evaluating the effectiveness of Risk Management.

Satuan Pengawasan Intern memberikan bantuan berupa assurance dan konsultasi terkait analisis, penilaian, rekomendasi dan informasi mengenai aktivitas satuan kerja melalui pimpinan perusahaan serta melakukan pencatatan fisik kekayaan perusahaan di seluruh unit kerja termasuk anak perusahaan, guna mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas audit. Untuk kelancaran tugas, Satuan Pengawasan Intern berkoordinasi dengan Komite Audit dan menjadi mitra kerja dari auditor eksternal serta mempunyai hubungan dengan Satuan Pengawasan Intern entitas anak, entitas afiliasi dan yayasan milik Perusahaan dalam bentuk koordinasi pelaksanaan audit dan bantuan teknis.

Visi
Menjadi mitra bisnis strategis bagi direksi, komisaris, dan manajemen perusahaan yang profesional, independen dan terpercaya.

Misi
Ikut serta dalam meningkatkan dan melindungi nilai Perusahaan melalui aktivitas jasa assurance dan konsultasi dengan memberikan asuransi, advis dan wawasan yang berbasis risiko dan objektif.

Piagam SPI

Perusahaan memiliki Piagam SPI sebagaimana disusun pada tahun 2017 dan perubahan terakhir Piagam SPI pada tanggal 28 Februari 2023, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN serta perubahan terakhirnya, Peraturan Menteri BUMN No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Piagam ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan SPI, yakni pedoman kerja SPI yang berisi beberapa hal yaitu maksud, visi, misi, struktur hubungan kerja, fungsi dan tanggung jawab, wewenang, ruang lingkup, kebijakan, standar, kode etik, evaluasi dan penyempurnaan. Piagam SPI ditinjau secara periodik agar pelaksanaan audit internal senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

Independensi

Sebagai pemeriksa internal, SPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kebebasan bertindak (independen) secara objektif, di mana:

1. Tidak memihak kepada kepentingan para pihak dalam Perusahaan seperti manajemen dan Komisaris, baik langsung maupun tidak langsung;
2. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan kaidah dan prinsip audit internal yang diterima dan berlaku secara umum;
3. Dalam pelaksanaan tugas audit membebaskan diri dari segala kepentingan pribadi maupun unit kerja yang diperiksa, dengan tetap menjunjung teguh kode etik yang telah ditetapkan.

The Internal Audit Unit provides assistance in the form of assurance and consultation related to analysis, assessment, recommendations, and information regarding work unit activities through company leaders as well as carrying out physical records of company assets in all work units including subsidiaries, in order to obtain data and information related to the implementation of audit tasks. To carry out its duties properly, the Internal Audit Unit coordinates with the Audit Committee and is a working partner of the external auditor and has a relationship with the Internal Audit Unit of subsidiaries, affiliated entities and foundations belonging to the Company in the form of coordinating the implementation of audits and technical assistance.

Vision
Become a Strategic Business Partner for Board of Directors, Commissioners, and the Company's management in a professional, independent, and trusted manner.

Mission
Participate in enhancing and protecting the corporate value through assurance and consulting service activities by providing risk-based and objective insurance, advice and insight.

Internal Audit Unit Charter

The Company has an Internal Audit Charter as compiled in 2017 and the last amendment to Internal Audit Charter on February 28, 2023, refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs and the latest amendment of Minister of SOEs Regulation No. PER-5/MBU/09/2022 concerning the Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises, and Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charter.

This charter regulates various objects related to Internal Audit, namely the purposes, vision, mission, work relationship structure, functions and responsibilities, authorities, scope, policies, standards, Code of Conduct, evaluation, and improvement. The Internal Audit Unit Charter is reviewed periodically to optimize the implementation of internal audit.

Independence

As an internal auditor, in carrying out its duties and functions, Internal Audit has the freedom to act (independently) objectively by:

1. Not taking sides with the interests of internal parties in the Company such as management and Commissioners, either directly or indirectly;
2. Conduct audit in line with accepted and applied internal audit rules and principles;
3. In carrying out the audit task, must free themselves from all personal interests and the work unit being examined while upholding the established Code of Conduct.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh Vice President yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris. Vice President SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan berkoordinasi dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal dalam menjalankan tugasnya. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas hasil audit, maka Kepala SPI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama.

Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala SPI diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepala SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Fungsi dan Cakupan Kerja

Satuan Pengawasan Internal membantu Direktur Utama agar dapat mengamankan aset Perusahaan, berjalannya kegiatan usaha secara efisien dan efektif serta ditaatinya peraturan perusahaan dengan menjalankan 2 (dua) fungsi utama:

1. Fungsi Strategic Partner, yaitu dalam pemberian asuransi dan konsultasi yang independen dan sesuai dengan aturan perusahaan (preventive action);
2. Fungsi Assurance dan Konsultasi, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Direktur Utama pada seluruh tingkatan dan menyampaikan rekomendasi Tindakan perbaikan kepada Direktur Utama (corrective action).

Selain itu, SPI juga berkoordinasi dengan Komite Audit dan menjadi mitra kerja dari auditor eksternal serta mempunyai hubungan koordinatif dengan SPI entitas anak, entitas afiliasi dan yayasan milik Perusahaan dalam bentuk koordinasi pelaksanaan audit dan bantuan teknis.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Di tahun 2023 terdapat perubahan Kepala Satuan Pengawasan Intern PTBA dari Muhammad Bagir menjadi Nugraha Nurtyasanta. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, perubahan Kepala Satuan Pengawasan PTBA telah disampaikan laporannya kepada OJK berdasarkan Surat PTBA Nomor: B/178/111000/KS.03/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 Perihal Laporan Perubahan Vice President Satuan Pengawasan Intern PT Bukit Asam Tbk.

Appointment and Dismissal of Head of Internal Audit

Internal Audit Unit is led by a Vice President appointed and dismissed by Board of Directors with the approval of Board of Commissioners. Vice President of Internal Audit reports directly to President Director and coordinates with Audit Committee and External Auditor in carrying out his/her duties. To support independence and ensure a smooth audit and the authority to monitor follow-up on audit results, Head of Internal Audit can communicate directly with Board of Commissioners and the Committees of Board of Commissioners to inform various matters related to the audit. The provision of such information must be reported to President Director.

Every appointment, replacement, or dismissal of Head of Internal Audit is notified to the Financial Services Authority (OJK) and Head of Internal Audit is directly responsible to President Director.

Functions and Scope of Work

Internal Audit assists the President Director in securing the Company's assets, ensuring the business activities to run efficiently and effectively, and complying with Company regulations by carrying out 2 (two) main functions:

1. Strategic Partner function, providing independent assurance and consulting following Company regulations (preventive action);
2. Assurance and Consultancy Function, supervising the implementation of President Director's policies at all levels and submit recommendations for corrective actions to President Director (corrective action).

In addition, Internal Audit coordinates with Audit Committee, becomes a partner of external auditor, and has a coordinating relationship with Internal Audit's subsidiaries, affiliated entities, and foundations owned by the Company in the form of coordination of audit implementation and technical assistance.

Profile of the Head of the Internal Audit Unit

There was a change in the Head of the PTBA Internal Audit Unit in 2023 from Muhammad Bagir to Nugraha Nurtyasanta. In accordance with the provisions of OJK Regulation Number 56/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for Preparing an Internal Audit Charter, a change in the Head of the PTBA Supervision Unit has been submitted to the OJK based on PTBA Letter Number: B/178/111000/KS.03/V/2023 dated May 26, 2023, Regarding the Report on Changes to the Vice President of the Internal Audit Unit of PT Bukit Asam Tbk.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern, 26 Mei 2023-sekarang

Profile of the Head of the Internal Audit Unit, May 26, 2023-present



Nugraha Nurtyasanta, S.H., M.Hum.

VP Satuan Pengawasan Intern
VP Internal Audit

Masa Jabatan | Term of Office: 2023 - sekarang | present

Usia Age	54 Tahun 54 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Yogyakarta, 25 Agustus 1969 Yogyakarta, August 25, 1969
Domisili Domicile	Tanjung Enim
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direksi PT Bukit Asam No. 103/0100/2023 Tentang Pengangkatan Pemegang Jabatan di Lingkungan PT Bukit Asam Tbk Decree of Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 103/0100/2023 Concerning The Appointment of Position Holders within PT Bukit Asam Tbk
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Humaniora, Universitas Gadjah Mada (2003) • S1 Hukum, Universitas Gadjah Mada (1992) • Master Degree in Humanities, Gadjah Mada University (2003) • Bachelor Degree in Law, Gadjah Mada University (1992)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• VP Satuan Pengawasan Intern (2023 - sekarang) • VP Hukum dan Regulasi Tahun (2014 - 2023) • Manajer Hukum (2010 - 2014) • Spesialis Hukum (2004 - 2010) • Administrator Kontrak (1993 - 2004) • VP Internal Audit Unit (2023 - present) • VP Law and Regulation (2014 - 2023) • Legal Manager (2010 - 2014) • Legal Specialist (2004 - 2010) • Contract Administrator (1993 - 2004)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak ada None

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern sampai dengan 26 Mei 2023

Profile of the Head of the Internal Audit Unit until May 26, 2023



Muhamad Bagir, M.Si.

VP Satuan Pengawasan Intern
VP Internal Audit

Masa Jabatan | Term of Office: 2017 - 2023

Usia Age	56 Tahun 56 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Surakarta, 19 Juli 1967 Surakarta, July 19, 1967
Domisili Domicile	Tanjung Enim
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direksi Bukit Asam No. 350/KEP/Int-0100/PG.04/2017 Bukit Asam Board of Directors Decree No. 350/KEP/Int-0100/PG.04/2017
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Pengelolaan Lingkungan, Universitas Sriwijaya (2011) • S1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (1997) • Master in Environmental Management, Sriwijaya University (2011) • Bachelor Degree in Public Health, University of Indonesia (1997)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• VP Satuan Pengawasan Intern (2017 - 2023) • SM Teknologi Informasi (2017) • Direktur PT BMI (2016 - 2017) • SM CSR (2015-2016) • SM SDM (2015) • SM PLPT (2012 - 2015) • SM Hukum dan Administrasi Korporat (2010 - 2012) • SM Sarana dan Prasarana (2007 - 2010) • Manajer K3 dan Lingkungan (2002 - 2007) • Kepala Operasional K3 (1999 - 2002). • VP Internal Oversight Unit (2017 - 2023) • SM Information Technology (2017) • Director of PT BMI (2016 - 2017) • SM CSR (2015-2016) • SM HR (2015) • SM PLPT (2012 - 2015) • SM Law and Corporate Administration (2010 - 2012) • SM Facilities and Infrastructure (2007 - 2010) • K3 and Environmental Manager (2002 - 2007) • Head of K3 Operations (1999 - 2002).
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak ada None

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Jangka Panjang (RAJP) dan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) berbasis risiko dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit, dan disetujui oleh Direktur Utama.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran dan rekomendasi yang konstruktif dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diaudit/ dievaluasi pada semua tingkat Manajemen.
5. Membuat dan menyampaikan laporan hasil audit/ evaluasi kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur terkait, dan Dewan Komisaris atas persetujuan Direktur Utama.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukannya.
8. Menyusun dan mengimplementasikan program *quality assurance* dan pengembangan serta mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan fungsi audit internal dan mengidentifikasikan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan secara berkesinambungan/terus menerus untuk memastikan bahwa Divisi Internal Audit dalam melakukan perannya telah sesuai dengan Standar yang berlaku, Kode Etik serta Piagam Audit Internal dalam rangka memberikan hasil audit yang berkualitas.
9. Melakukan penilaian dan pemantauan sistem pengendalian informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa informasi penting Perusahaan terjamin keamanannya dan penyajian segala laporan dan kegiatan Perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melaksanakan tugas khusus (termasuk pendampingan/ *counterpart* Auditor Eksternal, konsultan) yang ditugaskan oleh Direktur Utama.
11. Melakukan Audit Tujuan Tertentu audit tematik atas permintaan Direktur Utama.
12. PTBA grup melaksanakan koordinasi dengan Audit Internal Anggota *Holding* yang mencakup namun tidak terbatas pada perencanaan audit tahunan, monitoring tindak lanjut hasil audit eksternal, program pengembangan, dan *quality assurance*.
13. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.

Duties and Responsibilities

Internal Audit's duties and responsibilities include:

1. Develop and implement a risk-based Long-Term Audit Plan and Annual Audit Work Program conveyed to the President Director and the Audit Committee, and approved by the President Director.
2. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with company policies.
3. Examine and evaluate efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human capital, marketing, information technology, and other activities.
4. Provide constructive suggestions and recommendations and objective information about the activities being audited/evaluated at all levels of Management.
5. Prepare and submit audit/evaluation reports to the President Director with copies to the relevant Director and the Board of Commissioners with the approval of President Director.
6. Monitor, analyze, and report on the follow-up of audit results.
7. Develop a program to evaluate the quality of internal audit activities carried out.
8. Develop and implement quality assurance and development programs as well as evaluate the efficiency and effectiveness of internal audit function activities and identify improvements that need to be carried out on an ongoing basis to ensure that the Internal Audit Division in carrying out its role complies with applicable standards, Code of Conduct and Internal Audit Charter in order to provide quality audit results.
9. Assess and monitor the information and communication control system to ensure that the Company's important information is guaranteed security and the presentation of all reports and Company activities complies with applicable laws and regulations.
10. Carry out special tasks (including mentoring/ counterpart External Auditors, consultants) assigned by the President Director.
11. Conducting Specific Purpose Audits/thematic audits as requested by President Director.
12. PTBA group coordinates with the Internal Audit of Holding Members which includes but is not limited to annual audit planning, monitoring follow-up of external audit results, development programs, and quality assurance.
13. Report significant findings to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee for corrective action in a timely manner.

Wewenang

Satuan Pengawasan Internal mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap dokumen, catatan, personal dan fisik kekayaan perusahaan di seluruh unit kerja perusahaan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas auditnya, termasuk Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala maupun insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal;
5. Menyusun, mengubah dan melaksanakan Piagam SPI termasuk menentukan prosedur dan lingkup audit;
6. Menilai keandalan informasi yang dihasilkan oleh Unit Kerja dan efektivitas kebijakan, sistem dan prosedur pengendalian yang ada;
7. Melakukan verifikasi dan uji keandalan terhadap informasi yang diperoleh dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem audit;
8. Menilai dan menganalisis aktivitas Perusahaan, namun tidak mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang dikaji/diaudit;
9. Mengalokasikan sumber daya auditor, menentukan auditee, menentukan sasaran audit, ruang lingkup dan jadwal audit, penerapan teknik audit yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil audit, meminta tanggapan lisan/ tertulis pada Auditee, memberikan saran dan rekomendasi;
10. Meminta bantuan dari unit Kerja lain atau pihak eksternal yang profesional dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu;
11. Berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya dan jika diminta oleh Pimpinan dapat memberikan peringatan atau teguran bila terjadi penyimpangan;
12. Mengusulkan staf SPI untuk promosi, rotasi, mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar dan kursus yang berkaitan dengan kelancaran tugas-tugas audit atau untuk memenuhi kompetensi staf/ auditor sesuai tuntutan dan jenjang karier yang telah ditetapkan oleh Perusahaan;
13. Mengikuti rapat yang bersifat strategis;
14. Melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas internal audit.

Pelaporan

Satuan Pengawasan Internal menyampaikan dan menyediakan laporan kepada Direksi melalui Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/ wakilnya meliputi:

1. Laporan Hasil Audit;
2. Rangkuman Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit;
3. Laporan Realisasi Kegiatan Audit; dan
4. Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan.

Authorities

Internal Audit has the following authorities as follow:

1. Full and unrestricted access to documents, records, personal and physical assets of the Company in all work units of the Company to obtain data and information related to the implementation of their audit tasks, including Subsidiaries and Sub Subsidiaries of the Company;
2. Communicate directly with Board of Directors and Board of Commissioners, including Audit Committee;
3. Hold regular or incidental meetings with Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;
4. Coordinate its activities with the activities of External Auditor;
5. Develop, amend, and implement the Internal Audit Unit Charter, including determining audit procedures and scope;
6. Assess the reliability of information produced by Work Unit and the effectiveness of existing control policies, systems, and procedures;
7. Verify and test the reliability of information obtained from the assessment of the effectiveness of audit system;
8. Assess and analyze the activities of the Company, but does not have the authority to implement and be responsible for the activities being reviewed/audited;
9. Allocate auditor resources, determine auditee, determine audit objectives, audit scope, and schedule, apply audit techniques deemed necessary to achieve audit objectives, clarify and discuss audit results, request oral/ written responses from the auditee, provide suggestions and recommendations;
10. Request assistance from other work units or professional external parties in conducting audits if deemed necessary;
11. Coordinate with other leaders and, if requested by the leaders, give a warning or reprimand in the case of deviation;
12. Propose Internal Audit staff for promotion, rotation, attending education, training, seminars, and courses related to audit tasks or to fulfill staff/auditor competencies according to the demands and career path set by the Company;
13. Participate in strategic meetings;
14. Appoint competent human capital according to the needs in carrying out internal audit tasks.

Reporting

Internal Audit submits and provides reports to Board of Directors through the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee, and the Series A Dwiwarna Shareholders/their representatives include:

1. Audit Result Report;
2. Summary of Follow-up Report on Audit Results;
3. Report on the Realization of Audit Activities.
4. Report on the Results of Evaluation of the Company's Internal Control System.

Struktur Organisasi Audit Internal dan Jumlah Pegawai

Struktur organisasi SPI ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. 297/0100/2022 tentang Struktur Organisasi Satuan Kerja Pengawasan Intern.

Internal Audit Organizational Structure and Number of Employees

The organizational structure of Internal Audit is determined according to the Decree of Board of Directors No. 297/0100/2022 concerning the Organizational Structure of Internal Audit Work Unit.

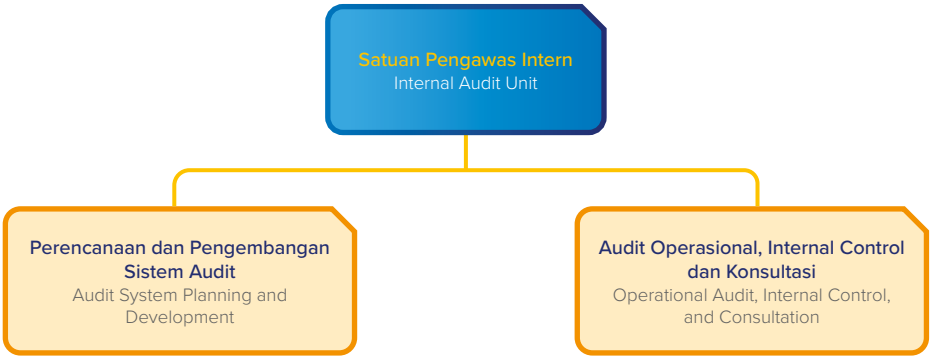

Di tahun 2023, jumlah karyawan yang berada pada unit Satuan Pengawas Internal sebanyak 16 orang.

In 2023, the number of employees who were members of Internal Audit Unit is 16 persons.

Sertifikasi Profesi Audit Internal

Internal Audit Professional Certification

Level Sertifikasi Certification Level	Jumlah Karyawan Number of Employee
Qualified Internal Auditor (QIA)	6 Orang | People
Certified Risk Management Professional (CRMP)	3 Orang | People
Professional Internal Auditor (PIA)	2 Orang | People
Qualified Risk Management Officer (QRMO)	2 Orang | People
Certified Legal Auditor (CLA)	1 Orang | People
Certified Governance Professional (CGP)	1 Orang | People
Certified Internal Auditor Executive (CIAE)	4 Orang | People
ISO 37001:2016 (SMAP) Internal Auditor Based On ISO 19011	5 Orang | People
Cobit 2015	1 Orang | People
Qualified Chief Risk Officer (QCRO)	1 Orang | People
Certified Competent Internal Auditor (CCIA)	1 Orang | People
Associate Certifed Competent Internal Auditor (ACCIA)	1 Orang | People
Certifed Internal Auditor (CIA)	1 Orang | People
Certifed Risk Management Officer (CRMO)	2 Orang | People

Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan Intern

Dalam meningkatkan kualitas personel SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas Internal Audit, Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi SPI dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai. Tentang daftar kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti Satuan Pengawasan Intern di sepanjang tahun 2023 dapat dilihat dalam bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Internal Audit Unit Competency Development

In order to improve the quality of Internal Audit personnel in accordance with the needs for carrying out Internal Audit duties, the Company facilitates development programs for Internal Audit to improve employee competencies. The list of competency development activities attended by Internal Audit Unit throughout 2023 can be seen in the Company Profile chapter of this annual report.

Rapat Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Intern secara rutin melakukan Rapat Koordinasi Internal yang dihadiri seluruh pejabat struktural dan fungsional/auditor dan staf SPI lainnya minimal 1 (satu) bulan sekali membahas dan mengevaluasi progres kinerja yang sedang berjalan dan rencana kegiatan assurance dan konsultasi/pendampingan ke depan berdasarkan Rencana Audit tahunan dan Target kinerja tahun berjalan.

Internal Audit Unit Meeting

Internal Audit Unit routinely conducts Internal Coordination Meetings attended by all structural and functional officials/auditors and other Internal Audit staffs at least once a month to discuss and evaluate ongoing performance progress and plans for future assurance and consulting/assistance activities based on the annual Audit Plan and performance targets of the current year.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Di tahun 2023, SPI telah menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Audit Operasional

Kegiatan audit operasional dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SPI Tahun 2023 yang telah disahkan oleh Direktur Utama melalui Nota Dinas Nomor: 0300.J/T/0100/PW.02/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022 dan Revisi PKAT Nomor : 141/T/0100/PW.02/VI/2023 untuk dilakukan audit sebanyak 13 Objek audit dan 39 satuan kerja untuk evaluasi internal control, sebagai berikut :

Implementation of Duties in 2023

In 2023, Internal Audit has carried out its duties and responsibilities with the following activities:

1. Operational Audit

Operational audit activities were carried out in accordance with the 2023 Annual Audit Plan as approved by President Director through the Official memo Number 0300.J/T/0100/PW.02/XI/2022 dated December 9, 2022 and PKAT Revision Number: 141/T/0100/PW.02/VI/2023 for audits of 13 (thirteen) audit objects and 39 (thirty nine) work units for internal control evaluation, as follows:

No	Objek Audit Audit Object	Jenis Audit Type of Audit	Waktu Audit Auditing Time	Keterangan Information
1.	Perawatan, Perawatan APPT, Perawatan CHF & ATU APPT, CHF & ATU Maintenance	Audit Operasional Operational Aduit	16 Januari - 17 Februari 2023 January 16 - February 17, 2023	Final
2.	Penanganan an Angkutan Batubara Coal Transport Handling	Audit Operasional Operational Audit	17 Januari - 21 Februari 2023 January 17 - February 21, 2023	Final
3.	Perencanaan, Perencanaan Tambang, eksplorasi Planning, Mining Planning, Exploration	Audit Operasional Operational Audit	18 Januari - 21 Februari 2023 January 18 - February 21, 2023	Final
4.	Penambangan Mining	Audit Operasional Operational Audit	18 Januari - 21 Februari 2023 January 18 - February 21, 2023	Final
5.	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Audit Kepatuhan Compliance Audit	25 Januari - 28 Februari 2023 January 15 - February 28, 2023	Final
6.	Pengelolaan Lingkungan & Penunjang Tambang Environmental Management and Mining Support	Audit Operasional Operational Audit	10 Mei - 15 Juni 2023 May 10 - June 15, 2023	Final
7.	K3L Korporat Corporate OHSE	Audit Operasional Operational Audit	8 Mei - 14 Juni 2023 May 8 - June 14, 2023	Final
8.	Keuangan Korporat Corporate Finance	Audit Operasional Operational Audit	15 Mei - 21 Juni 2023 May 15 - June 21, 2023	Final
9.	Distribusi, Pemasaran, Komersial Distribution, Marketing, Commercial	Audit Operasional Operational Audit	22 Mei - 27 Juni 2023 May 22 - June 27, 2023	Final
10.	Pengembangan Hilirisai Downstreaming Development	Audit Operasional Operational Audit	12 Juli - 16 Agustus 2023 July 12 - August 16, 2023	Final
11.	Pengembangan Energi Energy Development	Audit Operasional Operational Audit	17 Juli - 22 Agustus 2023 July 17 - August 22, 2023	Final
12.	GRC – SMP & GCG, Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan dan Hukum Regulasi GRC – SMP & GCG, Risk Management, Corporate Secretary, and Law Regulation	Audit Operasional Operational Audit	9 Oktober - 10 November 2023 October 9 - November 10, 2023	Final
13.	Anggaran dan Akuntansi Budgeting and Accounting	Audit Operasional Operational Audit	16 Oktober - 17 November 2023 October 16 - November 17, 2023	Final

2. Advis

Satuan Pengawasan Internal telah mengeluarkan 14 Advis yang tujuannya untuk perbaikan kinerja satuan kerja. Adapun advis yang dimaksud sebagai berikut:

2. Advice

As of November 2023, Internal Audit has issued 14 Advices to improve work unit performance with the list as follows:

No	Tanggal Date	No. Nota Dinas Number of Official Memo	Ditujukan Kepada Referred to	Saran/advis Advice
1.	23 Januari 2023 January 23, 2023	021/T/11200/PW.02/I/2023	VP Manajemen Portofolio VP of Portfolio Management	Reminder Hubungan Komunikasi PT Bukit Asam Tbk dengan Perusahaan Terkendali dan Perusahaan Afiliasi Reminder on Communication Relations between PT Bukit Asam Tbk and Controlled Companies and Affiliated Companies
2.	22 Februari 2023 February 22, 2023	048/T/11200/PW.02/II/2023	VP Penanganan dan Angkutan Batu Bara VP Coal Handling and Transportation	Struktur Organisasi dan Kelembagaan Laboratorium di Lingkup PT Bukit Asam Tbk Laboratory Organizational and Institutional Structure within PT Bukit Asam Tbk
3	22 Februari 2023 February 22, 2023	049/T/11200/PW.02/II/2023	VP Perawatan VP of Maintenance	Pergudangan PLTU 3X10 MW Tanjung Enim Warehousing CFPP 3X10 MW Tanjung Enim

No	Tanggal Date	No. Nota Dinas Number of Official Memo	Ditujukan Kepada Referred to	Saran/advis Advice
4	06 Maret 2023 March 06, 2023	061/T/11200/PW.02/III/2023	• Direktur Operasi Produksi • Direktur Pengembangan Usaha • Operations and Production Director • Business Development Director	Going Concern Operasi Produksi di Peranap Going Concern Production Operations in Peranap
5	10 April 2023 April 10, 2023	082/B/11200/PW.02/IV/2023	VP SDM Operasional VP of Operational HR	Kesetaraan Jenjang Jabatan Alih Daya dan Tarif SPPD pada Modul Travel Aplikasi CISEA on Equality in Outsourcing Position Levels and SPPD Tariffs in the CISEA Application Travel Module
6	11 April 2023 April 11, 2023	087/T/11200/PW.02/IV/2023	VP Manajemen Portofolio VP of Portfolio Management	Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada Perusahaan Terkendali dan Perusahaan Afiliasi PT Bukit Asam Tbk on Implementing an Internal Control System in Controlled Companies and Affiliated Companies of PT Bukit Asam Tbk
7	12 Juni 2023 June 12 , 2023	124/B/11200/PW.02/VI/2023	VP K3L Korporat VP of OHSE Corporate	Reviu Monitoring Tindak lanjut Inspeksi K3L atas Pengelolaan Jasa Boga Pegawai Lokasi Kerja di UPTE Review Monitoring Follow-up to OHSE Inspections on the Management of Catering Services for Work Location Employees at UPTE
8	12 Juni 2023 June 12, 2023	123/B/11200/PW.02/VI/2023	VP SDM Stratejik VP of Strategic HR	Evaluasi Ruang Lingkup, Job Description, dan Fungsi K3L Korporat Evaluation of Scope, Job Description, and Corporate OHSE Functions
9	23 Juni 2023 June 23, 2023	139/T/11200/PW.02/VI/2023	VP Keuangan Korporat VP of Corporate Financial	Strategi Pembayaran kepada Pemasok oleh Satuan Kerja Keuangan Korporat Payment Strategy Advice to Suppliers by the Corporate Finance Work Unit
10	13 Juli 2023 July 13, 2023	179/T/11200/PW.02/VII/2023	VP Pengembangan Hilirisasi VP of Downstreaming Development	Jangka Waktu SPPH 362 SPPH 362 Time Period
11	14 Juli 2023 July 14, 2023	158/T/11200/PW.02/VII/2023	VP Manajemen Portofolio VP of Portfolio Management	Optimalisasi Pemantauan Realisasi Penyetoran modal dan Pengembalian Pinjaman kepada Anak dan Afiliasi Perusahaan (AAP) on Optimizing Monitoring Realization of Capital Deposits and Repayment of Loans to Subsidiaries and Company Affiliates
12	18 Agustus 2023 August 18, 2023	181/T/11200/PW.02/VII/2023	Sekretaris Perusahaan VP Layanan Operasi UPTE GM Unit Pelabuhan Tarahan GM Unit Dermaga Kertapati GM Unit Pertambangan Ombilin Corporate Secretary VP Operation Services UPTE GM Tarahan Port Unit GM of Kertapati Pier Unit GM Ombilin Mining Unit	Advis Reminder Wewenang Pembayaran pada Unit Kerja sebagai Pengelola Keuangan Advis Remender Wewenang Pembayaran pada Unit Kerja sebagai Pengelola Keuangan Advis Reminder of Payment Authority in Work Units as Financial Manager Advis Remender of Payment Authority to Work Unit as Financial Manager as Financial Manager
13	31 Oktober 2023 October 31, 2023	239/T/11200/PW.02/X/2023	VP Pengadaan VP of Procurement	Proses Percepatan Penandatanganan Kontrak dan Addendum Kontrak Accelerated Process of Contract Signing and Contract Addendums
14	02 November 23 November 2, 2023	240/T/11200/PW.02/XI/2023	VP Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG VP of Corporate Management System and GCG	Pemutakhiran Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistleblowing System (WBS) Updating the Violation Reporting System (WBS) Guidelines

3. Konsultasi

Konsultasi yang dilakukan oleh SPI pada tahun 2023 ada sebanyak 11 kegiatan yaitu:

3. Consultation

Consultation activities carried out by Internal Audit Work there are 11 activities namely:

No	Tanggal Date	Satker Peminta Requesting Work Unit	Perihal About	Saran/Masukan Suggestion/Feedback
1	18 Januari 2023 January 18, 2023	Laboratorium Pelabuhan Tarahan Tarahan Port Laboratory	Penghapusan/ pemusnahan aset Assets write-off/destruction	• Nilai buku aset sudah nol. • Aset peralatan laboratorium sebanyak 21 item dalam keadaan rusak akan dilakukan penghapusan/ pemusnahan aset • Book value of these assets is Rp 0 • 21 items of laboratory equipment assets that are damaged will be written off/destroyed

No	Tanggal Date	Satker Peminta Requesting Work Unit	Perihal About	Saran/Masukan Suggestion/Feedback
2	27 Februari 2023 February 27, 2023	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Pemusnahan Dokumen Perusahaan Tahun 2023 2023 Company Document Write-off	• Arsip yang dimusnahkan telah dilakukan verifikasi dari Tim Penilai ANRI • Dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan arsip dengan saksi berasal dari Satker Hukreg dan SPI serta Pihak ketiga (PT Aspex Kumbong) dan Kepala ANRI" • The destroyed archives have been verified by the ANRI Assessment Team • Contained in the Minutes of Archive Destruction with witnesses coming from the Law and Regulation and SPI Working Unit as well as third parties (PT Aspex Kumbong) and the Head of ANRI
3	07 Maret 2023 March 7, 2023	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Pengecekan fisik usulan penghapusbukuan aset perawatan Physical checking of proposed write-off of maintenance assets	Kondisi aset yang akan dimusnahkan sudah tidak dipergunakan lagi dan nilai bukunya sudah nol The condition of the asset to be destroyed is no longer used and its book value is zero
4	14 Juni 2023 June 14, 2023	Perawatan Maintenance	Usulan Penghapusbukuan Aset Aktiva Non Produktif Jalur Conveyor CC-10, Transfer Station CC – 10 MTB, OLC 11 dan Jalur Conveyor OLC – 11 Proposed Write-Off of Non-Productive Assets Conveyor Line CC-10, Transfer Station CC – 10 MTB, OLC 11 and Conveyor Line OLC – 11	• Dalam upaya optimasi jalur CHF PLTU BPI Banjarsari dan pemanfaatan lahan eks jalur conveyor untuk lahan timbunan tambang MTBU • Aset tersebut akan dilakukan penghapusbukuan dan pembongkaran dan akan disampaikan kajian dari dari Tim optimasi CHF BPI untuk pemanfaatannya bagi perusahaan. • In an effort to optimize the CHF CFPP BPI Banjarsari route and utilize the former conveyor route land for MTBU mine dump land • These assets will be written off and dismantled and a study will be submitted from the CHF BPI optimization team regarding their use for the company.
5	05 Juli 2023 July 5, 2023	Pergudangan Warehousing	Pendampingan dan pengecekan barang dead stock dan penyaksian pengambilan sebagian barang oleh pemenang lelang di Pergudangan PTBA TAL Assistance and checking of dead stock goods and witnessing the collection of some goods by the auction winner at the PTBA TAL Warehouse	• Melaksanakan proses lelang sesuai dengan hasil Laporan Konsultan Kantor Jasa Penilai Publik ANA (Amin Nirwan Afiliator dan Rekan) dan melaksanakan proses lelang sesuai dengan tata kelola yang berlaku di Perusahaan • Memastikan sudah ada pembayaran oleh pemenang lelang di Keuangan PTBA sebelum material dibawa oleh pemenang lelang • Carry out the auction process in accordance with the results of the Consultant Report from the ANA Public Appraisal Services Office (Amin Nirwan Affiliate and Partners) and carry out the auction process in accordance with the governance that applies in the Company • Ensure the payment by the auction winner in PTBA Finance before the material is brought by the auction winner.
6	1 Agustus 2023 August 1, 2023	Perawatan Dermaga Kertapati Kertapati Barging Port Maintenance	Pendampingan dan pengecekan fisik asset atas permohonan lelang aset hasil pembongkaran general overhaul Unit Dermaga Kertapati Assistance and physical inspection of assets for auction requests for assets resulting from the general overhaul of the Kertapati Barging Port	Melaksanakan proses lelang sesuai dengan prosedur yang berlaku di Perusahaan Carry out the auction process in accordance with the procedures applicable in the Company
7	9 Oktober 2023 October 9, 2023	PAISP PAISP	Perihal Permohonan Penghapusan Aset Alat Kesehatan di RS BAM Application for Write-Off of Medical Device Assets at BAM Hospital	• Memproses prosedur penghapusbukuan • Melaksanakan prosedur penilaian asset • Melaksanakan proses lelang sesuai dengan prosedur yang berlaku diperusahaan • Process write-off procedures • Carry out asset assessment procedures • Carry out the auction process in accordance with applicable procedures in the company

No	Tanggal Date	Satker Peminta Requesting Work Unit	Perihal About	Saran/Masukan Suggestion/Feedback
8	13 Oktober 2023 October 13, 2023	P2SP P2SP	Pendampingan atas Pekerjaan Revitalisasi Perkantoran Assistance for Office Revitalization Work	• Jika kontrak/perjanjian masih dalam proses maka dimungkinkan dibuat SPMK/KOM/LOI yang ditandatangani pejabat berwenang • Berkoordinasi dengan satker pengadaan dan terkait lainnya untuk percepatan proses persetujuan addendum kontrak • Berkoordinasi dengan satker pengadaan memastikan PT Waskita Karya dapat memenuhi klausul-klausul dalam kontrak Memastikan bahwa: - Pekerjaan yang telah dikerjakan tidak sesuai sequence, tidak mengalami kerusakan - Seluruh yang ada dalam item pekerjaan telah memiliki sertifikat kelayakan fungsi - Pengerjaan item pekerjaan tidak melebihi batas waktu - Setelah dilakukan addendum kontrak PT Waskita Karya memiliki komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan SPPH 18527 • Menyusun langkah langkah mitigasi risiko jika PT Waskita Karya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan • If the contract/agreement is still in process, it is possible to create an SPMK/KOM/LOI signed by an authorized official • Coordinate with procurement and other related work units to accelerate the contract addendum approval process • Coordinating with the procurement work unit to ensure PT Waskita Karya can fulfill the clauses in the contract • Ensure that: - The work that has been done is not in accordance with the sequence, there is no damage - Everything in the work item has a certificate of functional suitability - Work on work items does not exceed the time limit - After the contract addendum is carried out, PT Waskita Karya is committed to completing the SPPH 18527 work • Develop risk mitigation steps if PT Waskita Karya cannot complete the work within the specified time
9	2 November 2023 November 2, 2023	Penambangan Mining	Permohonan Penghapusan Aset Spreader 701. Tripper Car 901, Conveyor Dumping 02 MTBU Asset Removal Request of Spreader 701. Tripper Car 901 and Conveyor Dumping 02 MTBU	• Spreader 701 sedang diusulkan pembuatan kajian hukumnya. • Memproses preosedur penghapusbukuan. • Spreader 701 sedang diusulkan pembuatan kajian hukumnya. • Memproses preosedur penghapusbukuan. • Spreader 701 is being proposed for legal study. • Processing the book removal procedure. • Spreader 701 is being proposed for legal study. • Processing the book removal procedure.
10	17 November 2023 November 17, 2023	Sustainability Sustainability	Bantuan Konsultasi atas Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-277/MBU/10/2023 Consultation Assistance on Decree of the Minister of SOEs Number SK-277/MBU/10/2023	• Penghapusan bukuan piutang bermasalah ini hal yang baru di PTBA atau BUMN dengan nilai piutang bermasalah yang besar dan sesuai dokumen sosialisasi SK 277 2023 diatas maka sebaiknya pelajari dulu petunjuk penghapusan bukuan ini sesuai arahan kementerian BUMN termasuk tahapan nya (harus tercantum di RKA, ada SOP nya, ada persetujuan BOD dan BOC) jika perlu ada juknis. • Meminta pendapat hukum kepada Satuan Kerja Hukum dan Regulasi terkait SK Kementerian BUMN yang terbaru. • Meminta memo perihal manajemen risiko dari Satuan Kerja Manajemen Risiko atas program terkait. • The removal of problematic debt from the books is a new matter for PTBA or state-owned enterprises with significant problematic debt values, as per the socialization document SK 277 of 2023 mentioned above. Therefore, it is advisable to first study the guidelines for book removal according to the instructions from the Ministry of State-Owned Enterprises, including its stages (which should be included in the RKA, have its SOP, have approval from the Board of Directors and the Board of Commissioners), and if necessary, there should be detailed guidelines (juknis). • Seek legal opinions from the Legal and Regulatory Work Unit regarding the latest Ministry of State-Owned Enterprises decree (SK). • Request a memo regarding risk management from the Risk Management Work Unit concerning the related program.
11	4 Desember 2023 December 4, 2023	Direktur SDM Human Resources Director	Transportasi & Uang Saku untuk Istri Suami Pegawai Peserta Pelatihan Prapensiun Transportation & Pocket Money for Pre-retirement Trainee Employee's wife	• VP SDM Stratejik selaku Kepala Satuan Kerja Tertinggi yang menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pra Pensiun dapat menetapkan kesetaraan kategori jabatan untuk tamu perusahaan, yang selanjutnya dapat memberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku dalam Keputusan Direksi Nomor 182/0100/2021 tanggal 5 Mei 2020 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi Nomor 246/0100/2022 tanggal 12 Juli 2022. • The VP of Strategic HR, as the Head of the Highest Work Unit responsible for organizing Pre-Retirement Training activities, can establish equivalent job categories for corporate guests, who can then be eligible for official travel expenses according to the provisions stated in Director's Decision Number 182/0100/2021 dated May 5, 2020, regarding Official Travel, as last amended by Director's Decision Number 246/0100/2022 dated July 12, 2022.

Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi personil Audit Internal dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga standar kualitas hasil audit internal terbaik untuk bisnis Perusahaan. Pengembangan mencakup program pelatihan dan sertifikasi. Program pelatihan disusun secara terstruktur dengan tujuan utama untuk membekali semua tenaga auditor dengan keahlian dan pengalaman yang memadai untuk pelaksanaan proses audit sesuai kebutuhan Perusahaan. Program pelatihan yang telah diikuti oleh Satuan Pengawasan Internal dapat dilihat pada Bab Profil dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Satuan Pengawasan Internal tahun 2023 dilakukan dengan melakukan evaluasi *Key Performance Indikator/Balance Score Card* secara triwulan. Berdasarkan hasil perhitungan, di tahun 2023 Satuan Pengawasan Internal mendapatkan skor 99,97 pada Triwulan I, pada Triwulan II mendapatkan skor 99,82, pada Triwulan III mendapatkan skor 99,82, dan pada Triwulan IV mendapatkan skor 99,83.

Competency Development

Competency development of Internal Audit personnel is carried out on an ongoing basis to maintain the best quality standards for internal audit results for the Company's business. Development includes training and certification programs. The training program is tailored to equip all auditors with adequate skills and experience to carry out the audit process according to the Company's needs. The training programs attended by the Internal Audit Unit can be viewed in the Profile Section of this Annual Report.

Performance assessment

The performance assessment of the Internal Audit Unit in 2023 is carried out by evaluating the Key Performance Indicators/Balance Score Card on a quarterly basis. Based on the calculation results, in 2023 the Internal Audit Unit got a score of 99.97 in 1st quarter, in 2nd quarter it got a score of 99.82, in 3rd quarter it got a score of 99.82, and in 4th quarterit got a score of 99.83.

Key Performance Indikator Satuan Pengawasan Internal 2023
Internal Audit Unit Key Performance Indicators in 2023

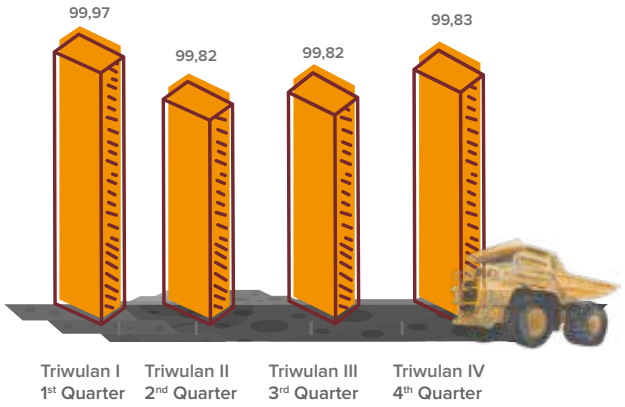

Satuan Kerja Manajemen Risiko
Risk Management Unit



Perusahaan memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dipimpin oleh seorang *Vice President* yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi PTBA. Secara struktur, Satuan Kerja Manajemen Risiko berada di bawah Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko dibentuk dengan tujuan untuk membantu pengelolaan risiko-risiko di seluruh aktivitas perusahaan, sehingga dapat menjamin kelangsungan bisnis dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan nilai tambah yang maksimal bagi pemangku kepentingan.

PTBA has a Risk Management Work Unit led by a Vice President appointed and dismissed by the Directors of PTBA. This work unit is under the Directorate of Finance and Risk Management. The Risk Management Work Unit was formed to assist the risk management in all company activities to ensure business continuity and achievement of predetermined targets, as well as providing maximum added value for stakeholders.

Visi

Menjadi satuan kerja yang andal dalam mengelola risiko korporat dan pengembangan bisnis/stratejik perusahaan sesuai standar nasional maupun internasional guna mendukung pencapaian visi-misi perusahaan.

Misi

- Mengintegrasikan manajemen risiko dalam setiap aktivitas Perusahaan;
- Menyusun dan menetapkan pendekatan yang struktur dan komprehensif dalam untuk penerapan manajemen risiko;
- Menyesuaikan kerangka kerja dan proses manajemen risiko dengan konteks internal & eksternal serta sasaran perusahaan;
- Melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan untuk meningkatkan *awareness* terkait manajemen risiko;
- Mengantisipasi dan merespon perubahan-perubahan yang terjadi secara dinamis;
- Menggunakan informasi terbaik yang tersedia sebagai input dalam manajemen risiko, baik data historis, informasi saat ini, serta prediksi di masa depan;
- Meningkatkan budaya risiko pada setiap lini perusahaan;
- Meningkatkan penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan.

Strategi Kerja Manajemen Risiko

Menyusun perencanaan yang solid merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan pengelolaan manajemen risiko di Perusahaan. Untuk itu, Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki strategi-strategi kerja sebagai berikut:

1. Mendemonstrasikan kepemimpinan dan komitmen dalam menerapkan manajemen risiko, di antaranya melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang mengatur mengenai pendekatan-pendekatan penerapan manajemen risiko;
2. Memastikan kecukupan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan risiko, termasuk jumlah dan kompetensi pegawai, organisasi, metode dan *tools* pengelolaan risiko;
3. Menetapkan otoritas, kewajiban, dan wewenang pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di setiap level organisasi;
4. Mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan dan penetapan sasaran-sasaran perusahaan;
5. Mempertimbangkan konteks eksternal dan internal perusahaan dalam mendesain kerangka kerja manajemen risiko;
6. Menguatkan tanggung jawab pengelolaan risiko oleh setiap pemilik risiko;
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan risiko di seluruh lini perusahaan.

Vision

Become a reliable work unit in managing corporate risk and Company's business/strategic development according to national and international standards to support the achievement of the Company's vision and mission.

Mission

- Integrate risk management in every activity of the Company;
- Develop and establish a structural and comprehensive approach to the implementation of risk management;
- Adjust the risk management framework and process to the internal & external context and Company goals;
- Involve all relevant stakeholders to increase awareness related to risk management;
- Anticipate and respond to changes that occur dynamically;
- Use the best available information as input in risk management, both historical data, current information and predictions in the future;
- Improve the risk culture in every line of the Company;
- Improve the implementation of risk management sustainably.

Risk Management Work Strategy

Preparing a solid and efficient plan is one of the keys in improving risk management in the Company. Therefore, the Risk Management Unit has the following work strategies:

1. Demonstrate leadership and commitment in implementing risk management, including through the establishment of policies and procedures governing approaches to risk management implementation;
2. Ensure the adequacy of resources needed in risk management, including the number and competence of employees, organization, methods and tools of risk management;
3. Establish the authority, obligations, and authorities of the parties involved in risk management at every level of the organization;
4. Consider risk in every decision making and setting Company goals;
5. Consider the external and internal context of the Company in designing the risk management framework;
6. Strengthen risk management responsibilities by each risk owner;
7. Establish effective communication and consultation to support and facilitate the implementation of risk across all lines of the Company.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko
Risk Management Organizational Structure

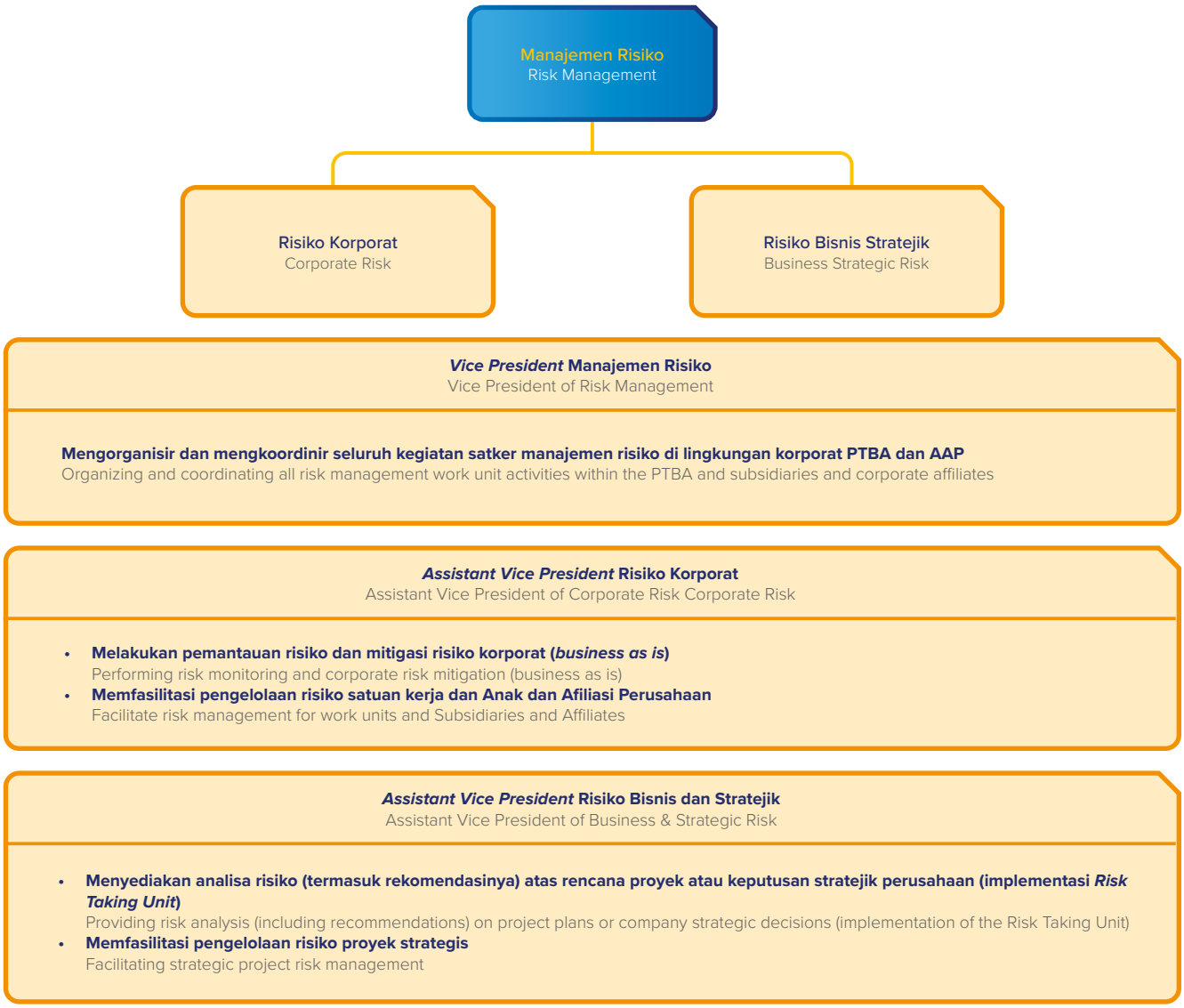

Profil Pejabat Manajemen Risiko

Di tahun 2023 terjadi perubahan *Vice President* Manajemen Risiko, dari semula dijabat oleh Andri Manendra menjadi Efi Fidinillah. Adapun informasi terkait dengan profil *Vice President* Manajemen Risiko sebagai berikut:

Risk Management Officer Profile

In 2023, there was a change in the Vice President of Risk Management, from Andri Manendra to Efi Fidinillah. The information related to the profile of the Vice President of Risk Management is as follows:

Profil *Vice President* Manajemen Risiko 26 Mei 2023-Sekarang

Profile of Risk Management Vice President from May 26, 2023-Present



Efi Fidinilah, S.T.

Vice President Manajemen Risiko
Vice President of Risk Management

Masa Jabatan : 26 Mei 2023 - sekarang
Term of Office : May 26, 2023-present

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Places, Date of Birth/Age	Cirebon, 31 Mei 1985 / 38 tahun Cirebon, May 31, 1985 / 38 years old
Domisili Domicile	Tanjung Enim
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor 103/100/2023 PT Bukit Asam Tbk Board of Directors Decree Number 103/100/2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 Teknik Industri - Universitas Diponegoro Bachelor Degree in Industrial Engineering of Diponegoro University
Riwayat Pekerjaan Working Experience	• Vice President Manajemen Risiko (Mei 2023 – sekarang) • AVP Risiko Bisnis dan Stratejik (Juni 2021– Mei 2023) • Manajer Risiko Portofolio dan Investasi Pengembangan (Juni 2019-Juni 2021) • Analis Risiko Keuangan dan Komersial (Agustus 2014-Juni 2019) • Vice President Risk Management (May 2023 – present) • AVP Business and Strategic Risk (June 2021– May 2023) • Portfolio Risk and Investment Development Manager (June 2019-June 2021) • Financial and Commercial Risk Analyst (August 2014-June 2019)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholders
Kepemilikan Saham Shares Ownership	Tidak ada None

Profil Vice President Manajemen Risiko Sampai 26 Mei 2023

Profile of Risk Management Vice President until May 26, 2023



Andri Mahendra, S.T.,MBA.

Vice President Manajemen Risiko
Vice President of Risk Management

Masa Jabatan: 2020 - 26 Mei 2023
Term of Office: 2020 - May 26, 2023

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Places, Date of Birth/Age	Keban Agung, 28 Maret 1981 / 42 tahun Keban Agung, March 28, 1981 / 42 years old
Domisili Domicile	Tanjung Enim
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Keputusan Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 111/0100/2022 tanggal 18 April 2022 Decree of PTBA Board of Directors No.111/0100/2022 on April 18, 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Administrasi Bisnis, SBM – Institut Teknologi Bandung (2021) • S1 Teknik Industri, Universitas Gadjah Mada (2006) • Bachelor Degree in Industrial Engineering from Gadjah Mada University (2006) • Master of Business Administration (MBA), SBM – Bandung Institute of Technology (2021)
Riwayat Pekerjaan Working Experience	• *Vice President* Manajemen Risiko (Januari 2020-2023) • Manajer Penjualan Ekspor (Juni 2019-Januari 2020) • Analis Pasar (September 2018-Juni 2019) • Spesialis Sistem Manajemen (Maret 2014-September 2018) • Vice President Risk Management (January 2020-Present) • Export Sales Manager (June 2019-January 2020) • Market Analyst (September 2018-June 2019) • Management Systems Specialist (March 2014-September 2018)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak Ada None
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholders
Kepemilikan Saham Shares Ownership	Tidak ada None

Komposisi Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Sertifikasi Profesi

Di tahun 2023, jumlah pegawai di Satuan Kerja Manajemen Risiko sebanyak 8 orang. Daftar sertifikasi yang dimiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Risk Management Work Unit Composition and Professional Certification

In 2023, the number of employees in the Risk Management Work Unit consisted of 8 people. The list of certifications held by the Risk Management Work Unit is as follows:

Tabel Sertifikasi Manajemen Risiko
Certification Table of Risk Management

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1	Efi Fidinilah	Vice President Manajemen Risiko Vice President of Risk Management	CRMP ERMAP
2	Boni Susanto	Assistant Vice President Risiko Korporat Vice President Assistant in Corporate Risk	ERMCP
3	Aditya Kusuma Putra	Assistant Vice President Risiko Bisnis & Stratejik Vice President Assistant in Business Risk & Strategic	CRMP ERMAP

Tabel Sertifikasi Manajemen Risiko
Certification Table of Risk Management

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
4	Nurida Sandy Karisa	Analis Risiko Bisnis & Stratejik Muda Junior Business Risk & Strategic Analyst	CRMP
5	Ayu Agustian	Analis Risiko Korporat Pratama Senior Corporate Risk Analyst	CRMP
6	Safrun Robiallah	Analis Risiko Korporat Pratama Senior Corporate Risk Analyst	CRMO
7	Zukhrufa Awalia Rahma	Analis Risiko Korporat Pratama Senior Corporate Risk Analyst	CRMP
8	Prilly Febi Pratiwi	Analis Risiko Bisnis & Stratejik Pratama Senior Business Risk & Strategic Analyst	CRMP

Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagai pelaksana fungsi Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengusulkan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko secara komprehensif;
2. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko;
3. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
4. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
5. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
6. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
   a. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
   b. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko;
   c. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan batasan Risiko (risk limit) dan ambang batas (threshold); dan
7. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities

To implement the Risk Management function, the Risk Management Work Unit has the following duties and responsibilities:

1. Develop and propose comprehensive Risk Management policies and strategies;
2. Implement Risk Management policies;
3. Develop a Risk Management culture at all levels of the organization;
4. Carry out improvements in human capital competency related to Risk Management;
5. Ensure that the Risk Management function operates independently;
6. Carry out regular reviews to ensure:
   a. accuracy of Risk assessment methodology;
   b. adequacy of implementation of the Risk Management information system;
   c. the accuracy of Risk Management policies and procedures as well as determining risk limits and thresholds; And
7. Carry out other Risk Management functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS, Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Pelaksanaan Tugas

Sepanjang tahun 2023, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

Implementation of Tasks

Throughout 2023, the Risk Management Work Unit has carried out its duties and responsibilities:

VP Manajemen Risiko VP of Risk Management	Mengorganisir dan mengkoordinir seluruh kegiatan satker manajemen risiko di lingkungan korporat PTBA dan PTBA Group yang meliputi: Perumusan dan pengembangan kebijakan serta prosedur Manajemen Risiko (pedoman, tata laksana, tata cara kerja dan formulir); Pengelolaan sistem manajemen risiko; Memfasilitasi penyusunan dokumen risiko (matriks risiko, proses bisnis, identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko): Pemasyarakatan sistem identifikasi eksposur risiko; Memfasilitasi pemetaan risiko; Pengembangan manajemen risiko berbasis IT; Pemantauan dan pengendalian risiko proses bisnis inti dan penunjang: Pembuatan profil risiko korporat dan profil risiko portofolio korporat; Melakukan evaluasi dan analisa risiko terhadap portofolio eksisting dan rencana pengembangan termasuk melakukan analisa risiko keuangan; Pendampingan penyusunan dan pemantauan Risk Based Budgeting (RBB) risk owner: serta membuat laporan Risk Management sehingga risiko Korporasi PTBA Group dapat terkendali dan dapat diminimalkan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Organize and coordinate all risk management work unit activities in the PTBA and PTBA Group corporate environment which includes: Formulating and developing Risk Management policies and procedures (guidelines, procedures, work procedures, and forms); Management of risk management systems; Facilitate the preparation of risk documents (risk matrix, business processes, risk identification, risk analysis and risk evaluation): Popularization of the risk exposure identification system; Facilitate risk mapping; Development of IT-based risk management; Risk monitoring and control of core and supporting business processes: Creation of corporate risk profiles and corporate portfolio risk profiles; Conduct risk evaluation and analysis of existing portfolios and development plans including carrying out financial risk analysis; Assistance in preparing and monitoring Risk Based Budgeting (RBB) for risk owners: as well as creating Risk Management reports to control and minimize risk at PTBA Group Corporate risks in accordance with applicable regulations.

AVP Risiko Korporat AVP of Corporate Risk	• Melakukan pemantauan risiko dan mitigasi risiko Korporat (*business as is*). • Memfasilitasi pengelolaan risiko Satuan Kerja dan Anak dan Afiliasi Perusahaan. • Carrying out risk monitoring and corporate risk mitigation (business as is). • Facilitate risk management for Work Units and Subsidiaries and Company Affiliates.
AVP Risiko Bisnis dan Stratejik AVP of Busines Risk & Strategic	• Menyediakan analisa risiko (termasuk rekomendasinya) atas rencana proyek atau keputusan stratejik perusahaan (implementasi Risk Taking Unit); • Memfasilitasi pengelolaan risiko proyek strategis. • Providing risk analysis (including recommendations) on project plans or company strategic decisions (implementation of the Risk Taking Unit); • Facilitate strategic project risk management.

Pengembangan Kompetensi

Perusahaan senantiasa meningkatkan mutu dan kompetensi Satuan Kerja Manajemen Risiko. Adapun pelatihan dan sertifikasi yang diikuti oleh personil Satuan Kerja Manajemen Risiko di tahun 2023 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Competency Development

The Company continues to improve the quality and competence of the Risk Management Work Unit with training and certification in 2023 which can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Satuan Kerja Manajemen Risiko tahun 2023 dilakukan dengan melakukan evaluasi *Key Performance Indikator/Balance Score Card* secara triwulan. Berdasarkan hasil perhitungan, di tahun 2023 Satuan Kerja Manajemen Risiko mendapatkan skor 99,97 pada Triwulan I, skor 99,76 pada Triwulan II, skor 99,81 pada Triwulan III, dan Triwulan IV mendapatkan skor 99,78.

Performance assessment

The performance assessment of the Risk Management Work Unit in 2023 is carried out by evaluating the Key Performance Indicators/Balance Score Card on a quarterly basis. Based on the calculation results, in 2023 the Risk Management Work Unit received a score of 99.97 in 1st quarter, a score of 99.76% in 2nd quarter, a score of 99.81 in 3rd quarter, and in 4th quarter a score of 99.78.

Key Performance Indikator Manajemen Risiko 2023
Key Performance Indicators Risk Management 2023

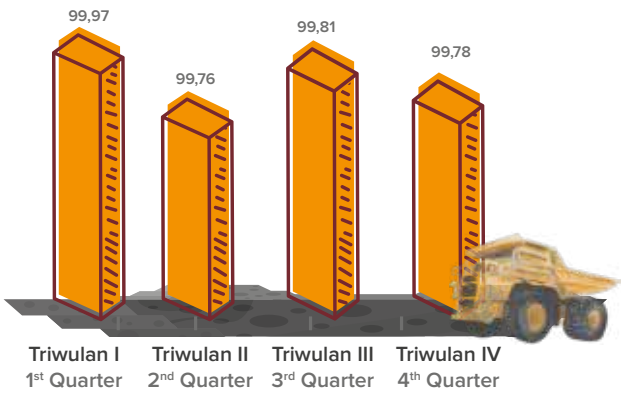

Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan & GCG

Corporate Management System & GCG Work Unit



Dalam pengelolaan Perusahaan, Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG menjadi pendukung penting yang berperan dalam mengelola dan mengendalikan sistem yang ada di Perusahaan termasuk melakukan *review* dan evaluasi terhadap sertifikasi Perusahaan, pemantau GCG dan sistem kinerja perusahaan.

In managing the Company, the Company Management System and GCG are important in managing and controlling the existing systems in the Company, including reviewing and evaluating the Company's certification, monitoring GCG, and the company's performance system.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG
The Structure Organization of Company Management System and GCG Working Unit

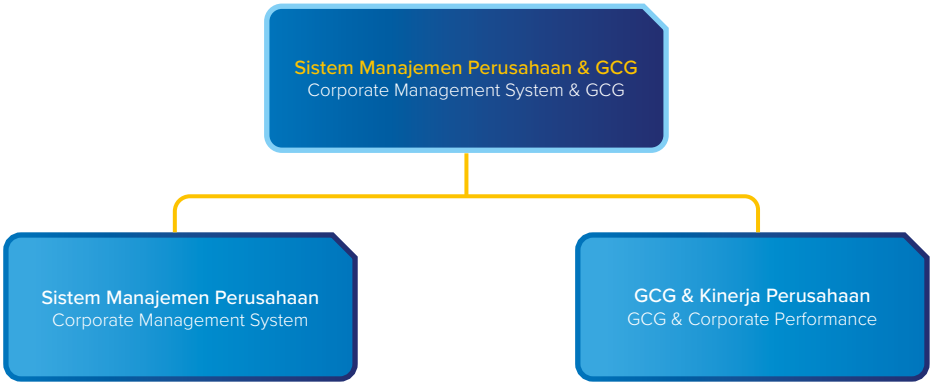

Profil Pejabat Sistem Manajemen Perusahaan & GCG

Corporate Management System & GCG Officer Profile



Tri Ubaya Sakti

Vice President Sistem Manajemen Perusahaan & GCG
Vice President of Corporate Management Systems and GCG

Masa Jabatan : 26 Mei 2023 - sekarang
Term of Office : May 26, 2023 - present

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Place, Date of Birth/Age	Palembang, 24 Januari 1970 / 53 tahun Palembang, January 24, 1970/53 years old
Domisili Domicile	Tanjung Enim
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of Appointment	SK Direksi Bukit Asam : No.009/0100/2020 Tanggal 15 Januari 2020 Bukit Asam Board of Directors Decree : No.009/0100/2020 dated January 15, 2020
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Magister Terapan Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya (2021) • S2 Master of Administration Business Hochschule Bremen, University of Applied Sciences Jerman (2015) • S1 Teknik Mesin Universitas Sriwijaya Palembang (1998) • Master in Applied Engineering Sriwijaya State Polytechnic (2021) • Master of Business Administration Hochschule Bremen, University of Applied Sciences Germany (2015) • Bachelor in Mechanical Engineering, Sriwijaya University Palembang (1998)
Riwayat Pekerjaan Working Experience	• VP Sistem Manajemen Perusahaan & GCG (2022-Sekarang) • VP Sistem Manajemen Perusahaan & GCG (2020-2022) • Manajer GCG & KP (2019-2020) • Manajer SMP & GCG (2017-2019) • Manajer Sistem Manajemen Perusahaan (2016-2017) • Spesialis Sistem Manajemen (2011-2016) • VP Corporate Management Systems & GCG (2022-Present) • VP Company Management System & GCG (2020-2022) • GCG & KP Manager (2019-2020) • SMP & GCG Manager (2017-2019) • Company Management Systems Manager (2016-2017) • Management Systems Specialist (2011-2016)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak Ada None
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliated relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.
Kepemilikan Saham Shares Ownership	Tidak Ada None

Sistem Manajemen Bukit Asam (SMBA)

Dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan, PTBA berkomitmen menciptakan Perusahaan yang efektif, efisien, dan diakui secara nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perusahaan membentuk Sistem Manajemen Bukit Asam (SMBA), yang mulai dijalankan di Perusahaan sejak tanggal 16 Juli 2010. Adapun pembentukan sistem manajemen ini memiliki manfaat dan tujuan, sebagai berikut:

Bukit Asam Management System (SMBA)

To achieve the Company's goals, PTBA is committed to creating an effective, efficient and recognizable Company, both at national and international level. For this reason, the Company established and applied Bukit Asam Management System (SMBA) since July 16, 2010. The establishment of this management system has benefits and objectives, including:

1. Adanya acuan baku dalam mengelola mutu produk, lingkungan, K3, mutu laboratorium, pengamanan, keselamatan operasi pertambangan, energi, anti penyuapan, aset serta keamanan teknologi informasi di PTBA dalam memuaskan pelanggan;
2. Adanya pengakuan internasional terhadap produk dan proses yang dihasilkan PT Bukit Asam Tbk;
3. Menjamin pemenuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
4. Turut menjamin keberlangsungan/sustainability kegiatan operasi perusahaan;
5. Meningkatkan kepercayaan jajaran manajemen dan pegawai PTBA dalam memasok produk sesuai harapan pelanggan;
6. Menjamin terciptanya *added value dan continuous improvement*.

Hingga saat ini, Sistem Manajemen Bukit Asam (SMBA) dijalankan dengan mengacu dengan standar terbaru yang diakui nasional *(mandatory)* maupun internasional serta terintegrasi, di antaranya:

1. Sistem Manajemen Mutu (SM Mutu) (ISO 9001:2015), disertifikasi oleh PT TÜV SÜDIndonesia;
2. Sistem Manajemen Lingkungan (SM Lingkungan) (ISO 14001:2015), disertifikasi oleh PT TÜV SÜD Indonesia;
3. Sistem Manajemen K3 (SMK3) (ISO 45001:2018), disertifikasi oleh PT TÜV SÜD Indonesia;
4. Sistem Manajemen K3 (SMK3) (PP No. 50 Tahun 2012), disertifikasi oleh PT BKI;
5. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) (ISO 37001:2018), disertifikasi oleh PT British Standards Institution dan telah Re-Sertifikasi oleh PT Tuv Nord Indonesia tahun 2023;
6. Sistem Manajemen Mutu Laboratorium (SMM Lab) (ISO 17025:2017), diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional;
7. Sistem Manajemen Uji Profisiensi (ISO 17043:2010), diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional;
8. Sistem Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code), disertifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
9. Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) (Permen ESDM No. 26 Tahun 2018);
10. Sistem Manajemen Pengamanan (Perpol No. 7 Tahun 2019);
11. Sistem Manajemen Energi (ISO 50001:2018), sertifikasi oleh PT TÜV SÜD Indonesia;
12. Manajemen Risiko (ISO 31000:2018);
13. Manajemen CSR (ISO 26000:2010);
14. Sistem Manajemen Aset (ISO 55001:2018);
15. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) (ISO 27001:2013) disertifikasi oleh PT TÜV SÜD Indonesia;
16. Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis (ISO 22301:2019), disertifikasi oleh PT British Standards Institution;
17. Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi (ISO 20000-I:2018).

1. Standard reference in managing product quality, environment, OHS, laboratory quality, security, mining operation safety, energy, anti bribery, assets and technology security information on PTBA in satisfactory customer;
2. International recognition of the products and processes produced by PT Bukit Asam Tbk;
3. Ensure compliance with applicable laws and regulations;
4. Participate in ensuring the sustainability of the Company's operating activities;
5. Increase management's confidence and PTBA employees in supplying products according to customer expectations;
6. Ensure the creation of added value and continuous improvement.

Thus far, Bukit Asam Management System (SMBA) has been carried out while referring to the latest standards that are recognized nationally (mandatory) and internationally, and are integrated, including:

1. Quality Management System (Quality MS) (ISO 9001:2015), certified by PT TÜV SÜD Indonesia;
2. Environmental Management System (Environment MS) (ISO 14001:2015), certified by PT TÜV SÜD Indonesia;
3. OHS Management System (OHSMS) (ISO 45001:2018), certified by PT TÜV SÜD Indonesia;
4. OHS Management System (OHSMS) (PP No. 50 Year 2012), certified by PT BKI;
5. Anti-Bribery Management System (SMAP) (ISO 37001:2018), certified by PT British Standards Institution and re-certified by PT Tuv Nord Indonesia in 2023;
6. Laboratory Quality Management System Lab QMS (ISO 17025:2017), accredited by the National Accreditation Committee;
7. Proficiency Test Management System (ISO 17043:2010), accredited by the National Accreditation Committee;
8. Ship Security and Port Facilities Management System (ISPS Code), certified by the Director General of Sea Transportation;
9. Mining Safety Management System Mining Safety MS (Minister of ESDM Regulation No. 26 of 2018);
10. Security Management System (Perpol No. 1 of 2019);
11. Energy Management System (ISO 50001:2018) certified by PT TÜV SÜD Indonesia ;
12. Risk Management (ISO 31000:2018);
13. CSR Management (ISO 26000:2010);
14. Asset Management System (ISO 55001:2018);
15. Information Security Management System (ISMS) (ISO 27001:2013) certified by PT TÜV SÜD Indonesia;
16. Business Continuity Management System (ISO 22301:2019), certified by PT British Standards Institution.
17. Information Technology Service Management System (ISO 20000-I:2018)



Pembangunan Sistem Manajemen (SM) Baru
- SM Kinerja Aset ISO 55001:2014
- SM Keamanan Informasi ISO 27001:2013
- Business Continuity Management System ISO 22301:2019

Establishment of New Management System (MS)
- MS of Asset Performance ISO 55001:2014
- MS of Information Security ISO 27001:2013
- Business Continuity Management System ISO 22301:2019

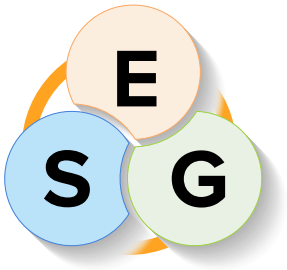

Pencapaian Sasaran Sistem Manajemen PTBA

Sejalan dengan Visi dan Misi Perusahaan, manajemen bertekad untuk mencapai kinerja setinggi-tingginya dalam pengelolaan mutu produk, lingkungan, K3, mutu laboratorium, pengamanan operasional dan pelabuhan, keselamatan operasi pertambangan, energi, anti penyuapan, aset, dan keamanan TI dan Layanan Teknologi Informasi, serta menjadikan hal-hal tersebut sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional perusahaan. PTBA menetapkan sasaran SMBA yang diturunkan menjadi *Key Performance Indicator* satuan kerja, pengukuran atas KPI tersebut dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali melalui Audit Internal Sistem Manajemen Kinerja BSC.

Target Achievement of PTBA Management System

In line with the Company's Vision and Mission, the management is determined to achieve the highest performance in the management of product quality, environment, OHS, laboratory quality, operational and port security, mining operation safety, energy, anti-bribery, assets, IT security, and IT service, and prioritize those in every operational activity of the Company. For this reason, PTBA sets the SMBA target, which is passed down to the Key Performance Indicators of work unit, and measured every three months through the Internal Audit of BSC Performance Management System.

Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen PTBA

Audit Sistem Manajemen PTBA dilaksanakan dengan mengacu pada Tata Laksana Audit Internal. Berdasarkan pelaksanaannya, PTBA menetapkan pemantauan dan pengukuran kinerja mutu produk, lingkungan, K3, mutu laboratorium, pengamanan operasional dan pelabuhan, keselamatan operasi pertambangan, energi, anti penyuapan, aset, keamanan dan Layanan Teknologi Informasi secara berkala, melalui proses audit yang dilakukan internal maupun oleh lembaga sertifikasi. Pelaksanaan audit Sistem Manajemen PTBA dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan kesesuaiannya yang didasarkan pada persyaratan standar (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; PP RI No. 50/2012; SNI ISO/IEC 17025:2017; SNI ISO/IEC 17043:2010; Perpol No 07/2019; ISPS Code; PERMEN ESDM No.26/2018; ISO 50001:2018; ISO 37001:2016; ISO 27001:2018 dan ISO 22301:2019).

Adapun waktu pelaksanaan Audit Internal dilaksanakan sebagai berikut:

PTBA Management System Audit

The PTBA Management System audit was carried out with reference to the Internal Audit Procedures. Based on the implementation, PTBA establishes monitoring and measuring the performance of product quality, environment, OHS, laboratory quality, operational and port security, mining operation safety, energy, anti-bribery, assets, security, and Information Technology Services on a regular basis, through an internal audit process and certification bodies. The audit of the PTBA Management System is carried out in accordance with a predetermined plan, with compliance based on standard requirements (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; PP RI No. 50/2012; SNI ISO/IEC 17025 :2017; SNI ISO/IEC 17043:2010; Political Regulation No. 07/2019; ISPS Code; ESDM Ministerial Regulation No.26/2018; ISO 50001:2018; ISO 37001:2016; ISO 27001:2018 and ISO 22301:2019).

The Internal Audit is carried out on:

1. Audit internal berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen K3 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) secara terintegrasi.
2. Audit terhadap Sistem Manajemen lainnya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
3. Audit *surveillance* Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen K3 terintegrasi dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.
4. *Audit surveillance* terhadap Sistem Manajemen lainnya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Dalam hal terjadi penyimpangan yang menimbulkan keraguan pada kesesuaian kebijakan, prosedur dan standar laboratorium maka Manajemen dapat melakukan audit internal tambahan.

Penetapan jadwal audit mempertimbangkan status dan pentingnya proses/area yang diaudit, perubahan yang berpengaruh pada PTBA serta hasil audit sebelumnya. Hasil audit ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang terkait sesuai dengan temuan audit, dan harus dilakukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan dan pencegahan telah sesuai dan berjalan dengan efektif. Audit internal dilakukan oleh auditor yang terlatih, mandiri, independen dan dilakukan lintas satuan kerja.

Komitmen Penerapan Sistem Manajemen PTBA

Perusahaan berkomitmen untuk selalu meningkatkan efektivitas Sistem Manajemen PTBA sehingga dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Perusahaan. Adapun langkah yang dilakukan oleh Perusahaan diantaranya:

1. Meningkatkan kompetensi dan jumlah auditor internal sesuai dengan ketentuan untuk menjamin keluaran dari kegiatan audit internal yang dilaksanakan lebih baik.
2. Perusahaan juga secara konsisten melaksanakan proses *benchmarking* terhadap *leading* dan *lagging indicator* penerapan sistem manajemen terhadap perusahaan sekelas yang menerapkan sistem sejenis.
3. Memenuhi sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan dan keamanan pegawai, menjadi kewajiban Perusahaan sekaligus untuk mencegah kerusakan dan kerugian.
4. Penerapan *good mining practice* serta pengelolaan energi yang efektif guna mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar melalui *community development.*
5. Melakukan perbaikan berkesinambungan dengan memperhatikan harapan dan keinginan dari pemangku kepentingan, perkembangan ilmu dan teknologi, serta pembangunan sistem manajemen pendukung ESG (*Environmental, Social, and Governance*) agar keberlanjutan usaha perusahaan dapat dipertahankan.

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG

Sepanjang tahun 2023, Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023, meliputi:

1. Internal audits relating to the Quality Management System, Environmental Management System, OHS Management System are carried out every 3 (three) months (quarterly) in an integrated manner.
2. Audits of other Management Systems are carried out once a year.
3. Surveillance audits of the Quality Management System, Environmental Management System, and integrated OHS Management System are carried out 2 (two) times a year.
4. Surveillance audits of other Management Systems are carried out once a year.

If there is a deviation that raise doubts about the suitability of laboratory policies, procedures, and standards, Management can conduct additional internal audits.

Determination of the audit schedule shall consider the status and importance of the process/area being audited, changes that affect PTBA, and the results of previous audits. The audit results are followed up by the relevant work units in accordance with the audit findings, and re-verification must be carried out to ensure that corrective and preventive actions are appropriate and running effectively. Internal audits are carried out by trained, independent, and independent auditors and are carried out across work units.

Commitment on PTBA Management System

The Company is committed to constantly improve the implementation of PTBA Management System to support the achievement of the Company's Vision and Mission, including by:

1. Increase the competencies and number of internal auditors per the provisions to ensure better output from internal audit activities.
2. Consistently carries out a benchmarking process against leading and lagging indicators of the implementation of a management system for companies of the same class that implement a similar system.
3. Fulfill supporting infrastructure to increase productivity, safety, and security of employees, is the Company's obligation and to prevent damage and loss.
4. Implementing good mining practices and effective energy management to prevent environmental pollution and maintain harmonious relations with the surroundings through community development.
5. Carrying out continuous improvement by taking into account the expectations and desires of stakeholders, science and technology development, and the development of ESG (Environmental, Social, and Governance) supporting management system to maintain the business sustainability.

Implementation of Duties of Corporate Management System and GCG Work Unit

In 2023, the Company's Management Systems Work Unit has carried out its duties and responsibilities in accordance with the plans prepared in the 2023 Work Plan and Budget, including:

No	Perihal Regarding	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
	Sistem Manajemen Perusahaan Company Management System	
1	Audit Internal Sistem Manajemen Bukit Asam (SMBA) diantaranya: • Audit internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (15-17 Mei 2023) • Audit internal ISO 23001 (Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis) (15-26 Mei 2023) • Audit internal Sistem Manajemen Pengamanan di unit kerja Dermaga Kertapati, Pelabuhan Tarahan dan UPTE (24 Juli-1 Agustus 2023) • Audit internal laboratorium SNI ISO/IEC 17043 pada di La boratorium Batu bara Tanjung Enim (3-4 Agustus 2023) • Audit internal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018 (23-31 Oktober 2023) • Audit internal Sistem Manajemen Energi (23-31 Oktober 2023) • Audit internal SMK3 PP No. 50 Th 2012 (23-31 Oktober 2023) • Audit internal ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan TI) (23-31 Oktober 2023) • Audit internal ISPS code telah dilaksanakan di Dermaga Teluk Bayur, Dermaga Kertapati dan Pelabuhan Tarahan (14-28 Desember 2023) • Audit internal laboratorium SNI ISO/IEC 17025 pada 5 laboratorium PTBA (27-28 Desember 2023) Internal Audit of the Bukit Asam Management System (SMBA) includes: • Internal audit of the Anti-Bribery Management System (May 15-17, 2023) • ISO 23001 (Business Continuity Management System) internal audit (May 15-26, 2023) • Internal audit of the Security Management System at the Kertapati Pier, Tarahan Harbor and UPTE work units (July 24-August 1, 2023) • Internal audit of the SNI ISO/IEC 17043 laboratory at the Tanjung Enim Coal Laboratory (August 3-4, 2023) • Internal audit of ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 (October 23-31, 2023) • Energy Management System internal audit (October 23-31, 2023) • Internal audit of SMK3 PP No. 50 2012 (October 23-31, 2023) • ISO 27001 (IT Security Management System) internal audit (October 23-31, 2023) • Internal ISPS code audits have been carried out at Teluk Bayur Pier, Kertapati Pier and Tarahan Harbor (December 14-28, 2023) • Internal laboratory audit of SNI ISO/IEC 17025 in 5 PTBA laboratories (December 27-28, 2023)	TW I-IV 2023 Q I-IV 2023
2	Audit Eksternal Sistem Manajemen Bukit Asam (SMBA) diantaranya: • Pelaksanaan surveillance audit SNI ISO / IEC 17025:2017 laboratorium mekanika tanah UPTE dilaksanakan dengan onsite assessment dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam rangka Surveillance Tidak Terjadwal untuk Laboratorium Penguji Mekanika Tanah PT Bukit Asam (Persero) Tbk (LP-075-IDN) 27 Maret 2023) • Pelaksanaan surveilance audit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018 (19-26 Mei 2023) • Pelaksanaan audit re-sertifikasi ISO 37001 oleh auditor eksternal (4-9 Juni 2023) • Pelaksanaan surveilance audit ISO 22301 (Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis) (21-27 Juli 2023) • Pelaksanaan surveillance audit SNI ISO / IEC 17025:2017 laboratorium penguji UPTE (TW II 2023) • Pelaksanaan surveillance audit SNI ISO / IEC 17025:2017 laboratorium kalibrasi UPTE (TW II 2023) • Pelaksanaan surveillance audit SNI ISO / IEC 17025:2017 laboratorium penguji Peltar (24-25 Agustus 2023) External Audit of the Bukit Asam Management System (SMBA) includes: • The surveillance audit of SNI ISO/IEC 17025:2017 UPTE soil mechanics laboratory was carried out with an onsite assessment from the National Accreditation Committee (KAN) in the context of Unscheduled Surveillance for the Soil Mechanics Testing Laboratory of PT Bukit Asam (Persero) Tbk (LP-075-IDN) March 27, 2023) • Implementation of surveillance audits ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 (May 19-26, 2023) • Implementation of ISO 37001 re-certification audit by external auditor (June 4-9, 2023) • Implementation of surveillance audit ISO 22301 (Business Continuity Management System) (July 21-27, 2023) • Implementation of surveillance audits of SNI ISO/IEC 17025:2017 UPTE testing laboratories (Q II 2023) • Implementation of surveillance audits of SNI ISO/IEC 17025:2017 UPTE calibration laboratories (Q II 2023) • Implementation of surveillance audit of SNI ISO/IEC 17025:2017 Peltar testing laboratory (August 24-25, 2023)	TW I-IV 2023 Q I-IV 2023
3	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Internal: • Sertifikasi auditor internal ISPS code (23-24 Februari 2023) • Sertifikasi auditor internal Sistem Manajemen Pengamanan (24-31 Mei 2023) • Konsinyering dan pelatihan auditor internal baru SMBA (15-16 Juni 2023) • Sertifikasi auditor internal SMKP (02-28 Agustus 2023) • Pembinaan Teknis Sistem Manajemen Pengamanan pada unit kerja Dermaga Kertapati, Tanjung Enim, dan Pelabuhan Tarahan (September-Oktober 2023) • Sertifkasi auditor internal SM Lab ISO 17025 (14-15 Desember 2023) Internal Auditor Training and Certification: • ISPS code internal auditor certification (February 23-24, 2023) • Security Management System internal auditor certification (May 24-31, 2023) • Consignment and training of new SMBA internal auditors (June 15-16, 2023) • SMKP internal auditor certification (August 2-28, 2023) • Technical Development of Security Management Systems at Kertapati Barging Port, Tanjung Enim and Tarahan Harbor work units (September-October 2023) • SM Lab ISO 17025 internal auditor certification (December 14-15, 2023)	TW I-IV 2023 Q I-IV 2023
	GCG dan Kinerja Perusahaan GCG and Company Performance	
1	Penyusunan dan penetapan KPI Balanced Scorecard (BSC) Perusahaan, Satuan Kerja/Proyek dan Anak Afiliasi Perusahaan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2023 melalui beberapa tahapan kegiatan diantaranya: Aspirasi Pemegang Saham, Aspirasi BOD, Kick Off Meeting Tim, Workshop Penyusunan Dokumen, Pembahasan KPI dengan Satuan Kerja/Proyek dan AAP, Paparan Final ke BOD dan Sirkuler Pengesahan KPI BSC oleh BOD. The preparation and determination of the KPI Balanced Scorecard (BSC) of the Company, Work Units/Projects and Affiliated Subsidiaries of PT Bukit Asam Tbk in 2023 through several stages of activities including: Shareholder Aspirations, BOD Aspirations, Team Kick Off Meeting, Document Preparation Workshop, KPI Discussion with Work Unit/Project and AAP, Final Exposure to BOD and BSC KPI Ratification Circular by BOD.	TW I 2023 Q I 2023
2	Pembekalan untuk Auditor Internal Sistem Manajemen Kinerja Balanced Scorecard (BSC), melalui kegiatan Konsinyering Auditor Tahun 2023 dan Workshop kepada BSC Officer dalam rangka peningkatan pemahaman mekanisme Audit. Provision for Internal Auditors on the Balanced Scorecard (BSC) Performance Management System, through the 2023 Auditor Conference and Workshop for BSC Officers in order to increase understanding of the Audit mechanism.	TW I-II 2023 Q I-II 2023

No	Perihal Regarding	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
3	Audit Internal Sistem Manajemen Kinerja Balanced Scorecard (BSC) Perusahaan, Satuan Kerja/Proyek PT Bukit Asam Tbk Tahun 2023 (37 Satuan Kerja) Internal Audit of the Company's Balanced Scorecard (BSC) Performance Management System, PT Bukit Asam Tbk Work Units/Projects in 2023 (37 Work Units)	TW I-IV 2023 Q I-IV 2023
4	Audit Internal Sistem Manajemen Kinerja Balanced Scorecard (BSC) Anak Afiliasi Perusahaan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2023 (Sesuai Permintaan Direktur AAP) Internal Audit of the Balanced Scorecard (BSC) Performance Management System of Affiliated Subsidiaries PT Bukit Asam Tbk in 2023 (As requested by the Director of subsidiaries and affiliates)	TW I-IV 2023 Q I-IV 2023
5	Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan melakukan penyusunan Laporan keterbukaan Informasi perubahan iklim dan penyampaian kuesioner CDP *Climate Change* Implementation of good corporate governance by preparing climate change information disclosure reports and submitting CDP Climate Change questionnaires	TW I- III 2023 Q I-III2023
6	*Roadshow* GRC (aspek GCG) kepada seluruh Satuan Kerja/ Unit/ Proyek di PTBA guna meningkatkan kesadaran terkait pentingnya GRC dalam format awareness dan pendampingan dengan Pelatihan GRC Kepada perwakilan Satuan Kerja/Proyek GRC Roadshow (GCG aspect) to all Work Units/Units/Projects at PTBA to increase awareness regarding the importance of GRC in the format of awareness and assistance with GRC Training to representatives of Work Units/Projects	TW II-IV 2023 Q II-IV 2023
7	Workshop dan tindak lanjut hasil *assessment* GCG eksternal atas penilaian tahun 2022 sebagai penetapan rencana kerja berdasarkan rekomendasi assessment di tahun 2023 kepada satuan kerja terkait serta Melakukan evaluasi mandiri terkait implementasi GCG Tahun 2023 Workshop and follow-up on the results of the external GCG assessment for the 2022 assessment as the determination of a work plan based on the recommendations of the 2023 assessment to the relevant work units as well as carrying out an independent evaluation regarding the implementation of GCG in 2023	TW I-IV 2023 Q I-IV 2023
8	Melakukan *Enhancement* (Penyempurnaan) aplikasi CISEA-GCG yang memiliki fitur diantaranya: fitur Informasi *Soft Structure* PTBA, fitur Informasi Internalisasi dan Capaian GCG PTBA, fitur Survey Pemahaman GCG, dan fitur Pengisian Pakta Integritas COC melalui Aplikasi CISEA-GCG dalam rangka internalisasi Kode etik pegawai agar berprilaku sesuai tata kelola perusahaan yang baik. Carrying out Enhancements (Refinements) to the CISEA-GCG application which has features including: PTBA Soft Structure Information feature, PTBA Internalization and GCG Achievement Information feature, GCG Understanding Survey feature, and COC Integrity Pact Filling feature via the CISEA-GCG Application in the context of internalizing the employee Code of Ethics to behave in accordance with good corporate governance.	TW I-IV 2023 Q I-IV 2023
9	Ikut serta ajang penilaian/evaluasi implementasi GCG oleh pihak eksternal (Corporate Governance Perception Index) Participate in assessment/evaluation of GCG implementation by external parties (Corporate Governance Perception Index)	TW III-IV 2023 Q III-IV 2023
10	Pemutakhiran dashboard dan konten ESG (Aspek CDP) pada website serta Mendukung kegiatan sustainability MIND ID khususnya dalam konteks GCG, dengan mempersiapkan program/system mengacu kepada 10 prinsip International Council On Mining And Metals (ICMM) guna meningkatkan citra dan kepercayaan stakeholders. Updating dashboards and ESG content (CDP Aspects) on the website and supporting MIND ID's sustainability activities, especially in the context of GCG, by preparing programs/systems referring to the 10 principles of the International Council on Mining and Metals (ICMM) to improve the image and trust of stakeholders.	TW I-IV 2023 Q I-IV 2023

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG tahun 2023 dilakukan dengan melakukan evaluasi *Key Performance Indikator/Balance Score Card* secara triwulan. Berdasarkan hasil perhitungan, di tahun 2023 Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG mendapatkan skor 99,38 pada Triwulan I, skor 99,75 pada Triwulan II, skor 99,71 pada Triwulan III, dan Triwulan IV mendapatkan skor 99,72.

Performance Appraisal

The performance assessment of the Corporate Management System and GCG Work Unit in 2023 was conducted by evaluating Key Performance Indicators/Balance Score Card quarterly. Based on the calculations, in 2023, the Corporate Management System and GCG Work Unit obtained a score of 99.38 in 1st quarter, a score of 99.75 in 2nd quarter, a score of 99.71 in 3rd quarter, and 4th quarter scored 99.72.

Key Performance Indikator Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG 2023
Key Performance Indicators of Corporate Management Systems and GCG 2023

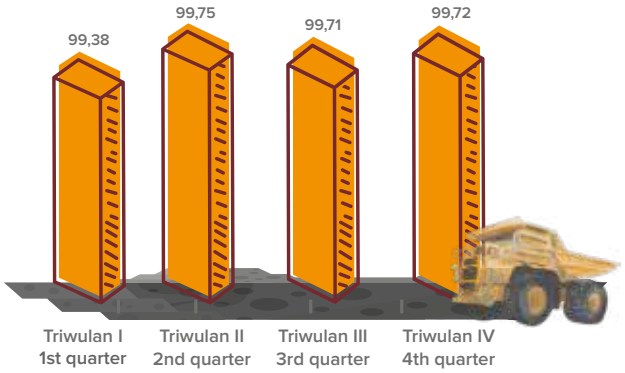

Akuntan Publik
Public Accountant



Dalam menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan, Perusahaan menggunakan jasa dari Akuntan Publik. Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

Audit atas Laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.

1. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.
2. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam Laporan keuangan.

In disclosing an opinion regarding the fairness, in all material matters, financial position, business results, changes in equity, and cash flows as contained in the Financial Statements, the Company uses the services of a Public Accountant. Financial reports are in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia.

External Audit Procedures and Audit Standards

Audits of the Company's financial statements are carried out in accordance with the Professional Standards for Public Accountants which include all audit procedures deemed necessary according to the circumstances.

1. Audit includes testing and evaluation of the internal control system, as well as examining, on a test basis, evidence that supports the amounts and disclosures in the Financial Report. The audit will also include an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an assessment of the presentation of the Financial Statements as a whole in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards issued by IAI.
2. As part of the audit process, the Public Accounting Firm also questions the management regarding management statements disclosed in the financial reports.

3. Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
4. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di review oleh badan atau otoritas terkait.
5. Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

Kebijakan Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik dilakukan melalui mekanisme RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris yang telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat Perusahaan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KAP yang ditunjuk oleh Perusahaan harus memenuhi syarat atau kriteria, sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik wajib terdaftar di OJK;
2. Mempunyai afiliasi dengan KAP Internasional yang memberikan quality control procedures;
3. Memiliki pengalaman melakukan general audit pada perusahaan yang terdaftar di OJK dan perusahaan sejenis (bergerak di bidang pertambangan);
4. Memiliki dan menugaskan tim auditor dengan kualifikasi Certified Public Accountant (CPA), ahli di bidang internal control berbasis Committee of Sponsoring Organization (COSO) atau Certified Internal Audit (CIA);
5. Menugaskan personil minimal sesuai dengan jumlah menurut Struktur Tim Audit, dengan jumlah hari penugasan masing-masing personil minimal sama dengan Rencana Waktu Audit yang didukung dengan Daftar Hadir pada setiap penugasan;
6. Mampu menyelesaikan laporan audit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Audits contain an inherent risk of material errors and irregularities. If there is such a thing, Public Accountant Office will convey it to management.

4. Management approves the Public Accountant Office audit working papers for the Company to be reviewed by the relevant bodies or authorities.
5. Audits are carried out based on the Professional Standards for Public Accountants published by the Indonesian Institute of Public Accountants. If there is financial assistance from the Indonesian Government, then the audit is carried out based on the State Financial Audit Standards issued by the Indonesian Financial Supervisory Agency.

Public Accountant Appointment Policy

The appointment of a public accounting firm and public accountant is carried out through the GMS mechanism by considering the proposal of the Board of Commissioners by considering the recommendations of the Audit Committee in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Offices in Financial Services Activities. To ensure the independence and quality of audit results, the appointed external auditor must not have a conflict of interest with any level of Company officials and consider the provisions of applicable laws and regulations. The KAP appointed by the Company must meet the following requirements or criteria:

1. Public Accounting Firms and Public Accountants must be registered with the OJK;
2. Has an affiliation with International Public Accountant Office which provides quality control procedures;
3. Experienced in conducting general audits on companies registered with the OJK and similar companies (engaged in the mining sector);
4. Have and assign a team of auditors with Certified Public Accountant (CPA) qualifications, experts in the field of internal control based on the Committee of Sponsoring Organization (COSO) or Certified Internal Audit (CIA);
5. Assign minimum personnel according to the number according to the Audit Team Structure, with the minimum number of days assigned to each personnel equal to the Audit Time Plan supported by an Attendance List for each assignment;
6. Able to complete audit reports according to the predetermined schedule.

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Juni 2023, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC), untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 dan Periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, serta audit umum atas laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023.

Based on the results of the decision of the Annual GMS on June 15, 2023, the Company appointed the Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm, a member of the PricewaterhouseCoopers (PwC) global network, to carry out a General Audit of the Company's Consolidated Financial Report for the 2023 Financial Year and other periods in the 2023 Financial Year , as well as a general audit of the financial reports of the Micro and Small Business Funding Program for the 2023 Financial Year.

Adapun Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The Public Accounting Firms that have audited the Company's Financial Reports for the last 5 years are as follows:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Accountant Name (Partner in Charge)	Periode Period	Fee (Rp)	Izin KAP PAF License
2023	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Yusron, S.E., Ak., CPA	Kelima Fifth	3.194.583.165	AP.0243
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Yusron, S.E., Ak., CPA	Keempat Fourth	3.122.482.500	AP.0243
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA	Ketiga Third	3.465.711.562	AP.0241
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA	Kedua Second	2.960.306.250	AP.0241
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA	Pertama First	1.725.000.000	AP.0241

Jasa Lain yang Diberikan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik

Di tahun 2023, tidak ada jasa lain yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan.

Other Services Provided by Public Accounting Firm and Public Accountant

In 2023, there were no other services provided by the Public Accountant Firm that conducted the audit on Company Financial Statements

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System



Sistem Pengendalian Internal diselenggarakan oleh Manajemen sebagai upaya dalam mengamankan investasi dan asset Perusahaan, melalui peningkatan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, serta memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perusahaan.

Perusahaan telah menetapkan Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Internal berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Bukit Asam, Tbk Nomor BAICM:00 tanggal 21 November 2022 tentang Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIn). Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan oleh Perusahaan mengacu pada kerangka yang diakui secara Internasional (COSO-*Internal Control Framework*). Berdasarkan COSO-*Internal Control Framework* terdapat 5 (lima) komponen Pengendalian Internal, yaitu (1) Lingkungan pengendalian, (2) pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, (3) aktivitas pengendalian, (4) sistem informasi dan komunikasi, dan (5) *monitoring*.

The Internal Control System is implemented by Management as an effort to secure the Company's investments and assets, through increasing the Company's compliance with applicable laws and regulations, ensuring the availability of correct, complete and timely financial reports and management reports, as well as meeting efficiency and effectiveness from business activities that are in accordance with the Company's vision, mission and objectives.

The Company has established Guidelines for Implementing the Internal Control System based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam, Tbk Number BAICM:00 dated November 21, 2022, regarding the Guidelines for the Implementation of Internal Control System. The Internal Control System implemented by the Company refers to an internationally recognized framework (Internal Control Framework). Based on the COSO-Internal Control Framework, there are 5 (five) components of Internal Control, namely (1) environment control, (2) business risk assessment and management, (3) activities control, (4) information and communication systems, and (5) monitoring.

Sampai dengan akhir Desember tahun 2023, telah dilaksanakan Internal control sebanyak 40 satuan kerja. Pengendalian Internal telah dilakukan kepada Satuan Kerja di Perusahaan, dengan informasi sebagai berikut:

Until the end of December 2023, internal control has been implemented for 40 work units. Internal Control has been carried out for Work Units in the Company, with the following information:

Triwulan I Quarter I	Triwulan II Quarter II	Triwulan III Quarter III	Triwulan IV Quarter IV
• Unit Pertambangan Tanjung Enim • Penambangan • Perawatan • Perawatan APPT • Perawatan CHF dan ATU • Perencanaan • Perencanaan Tambang • Perencanaan Eksplorasi • PAB • PLPT	• Optimasi Operasi Produksi • K3L Korporat • Komersial • Pemasaran • Distribusi • SDM Stratejik • SDM Operasional • Manajemen Portofolio • Keuangan Korporat • Teknologi Informasi	• Pengadaan • Pengembangan Hilirisasi • Pengembangn Logistik dan Infrastruktur • Pengembangan Tambang • Proyek Pengembangan Sarana Penunjang • Unit Dermaga Kertapati • Unit Pelabuhan Tarahan • Unit Pertambangan Ombilin • Pengembangan Energi • Proyek Pengembangan Infrastruktur	• SMP & GCG • Hukum dan Regulasi • Layanan Operasi • Sekretaris Perusahaan • PAISP • Manajemen Risiko • Sustainability • Anggaran dan Akuntansi • Project Management Ofiice • Satuan Pengawasan Intern
• Tanjung Enim Mining Unit • Mining • Treatment • APPT treatment • CHF and ATU treatment • Planning • Mine Planning • Exploration Planning • PAB • PLPT	• Optimization of Production Operations • Corporate OHSE • Commercial • Marketing • Distribution • Strategic HR • Operational HR • Portfolio Management • Corporate Finance • Information Technology	• Procurement • Downstream Development • Logistics and Infrastructure Development • Mining Development • Supporting Facilities Development Project • Kertapati Barging Port Unit • Tarahan Port Unit • Ombilin Mining Unit • Energy Development • Infrastructure Development Project	• SMP & GCG • Laws and Regulations • Operation Services • Company Secretary • PAISP • Risk Management • Sustainability • Budget and Accounting • Project Management Office • Internal Control Unit

Penjelasan Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dengan Kerangka yang Diakui secara Internasional (COSO – Internal Control Framework)

Perusahaan telah menerapkan penerapan dan pengembangan Sistem Pengendalian Internal sesuai dengan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Best Practice)* yang meliputi 5 komponen, di antaranya adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar atau pondasi dari semua komponen pengendalian internal. Demi terwujudnya Sistem Pengendalian Internal yang efektif, Perusahaan bertolak dari Lingkungan Pengendalian yang positif yang dibentuk melalui:

1. Komitmen terhadap integritas dan nilai etika di Perusahaan;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Komitmen Dewan Komisaris;
4. Komitmen filosofi dan pola manajerial;
5. Struktur organisasi yang efektif;
6. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang efektif dan bertanggung jawab; dan
7. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat dan efektif.

Explanation on the Conformity of Internal Control System with Internationally Recognized Framework (COSO – Internal Control Framework)

The Company has applied and developed an Internal Control System in accordance with the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Best Practice) which covers 5 components, including control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring.

Control Environment

The control environment is the basis or foundation of all internal control components. In order to realize an effective Internal Control System, the Company starts from a positive Control Environment which is formed through:

1. Commitment to integrity and ethical values in the Company;
2. Commitment to competence;
3. Commitment of the Board of Commissioners;
4. Commitment to managerial philosophy and patterns;
5. Effective organizational structure;
6. Effective and responsible Human Capital Management; and
7. Appropriate and effective delegation of authority and responsibility.

Penilaian Risiko

Penilaian Risiko dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Proses penilaian risiko oleh Perusahaan dimulai dengan mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Perusahaan, untuk selanjutnya Perusahaan melakukan evaluasi untuk menentukan tindakan guna meminimalisir risiko yang dihadapi.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan Perusahaan dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko yang menghambat pencapaian tujuan Perusahaan. Tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan didasarkan pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Perusahaan diwujudkan melalui:

a. Menyusun Kebijakan, Pedoman dan Prosedur sesuai Ketentuan yang berlaku
b. Melakukan kegiatan operasi berdasarkan Kebijakan, SOP, Prosedur & Peraturan yang berlaku
c. Mengembangkan teknologi digitalisasi dan melakukan pengendalian risiko secara berkala

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi diperoleh dan dihasilkan oleh Perusahaan guna mendukung fungsi dari komponen pengendalian internal lainnya. Perusahaan mengelola setiap informasi dan komunikasi, melalui pembaharuan sistem informasi dan penyediaan sarana komunikasi yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tujuan untuk meminimalisir dan mencegah timbulnya permasalahan yang diakibatkan dari informasi yang tidak relevan dan berkualitas.

Pemantauan Pengendalian Internal

Perusahaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian internal di Perusahaan secara berkala melalui:

a. Melakukan Sosialisasi terkait pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Sosialisasi cara pengisian *Form* CSA (*Control Self Assesment*) dan bukti yang dibutuhkan oleh satuan kerja yang akan dilakukan evaluasi efektivitas dan kecukupan Sistem Pengendalian Internal
b. Evaluasi efektivitas dan kecukupan Sistem Pengendalian Internal kepada 40 satuan kerja selama tahun 2023 yang di bagi 4 kali /triwulan (10 satuan kerja per triwulan)
c. Memberikan *feedback* kepada satuan kerja yang telah di lakukan evaluasi efektivitas dan kecukupannya untuk dapat ditindaklanjuti

Tindakan sebagaimana disampaikan, dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal di Perusahaan telah berjalan dengan baik. Hasil monitoring dipergunakan oleh Perusahaan untuk memperbaiki kelemahan yang terdeteksi dan memperkuat sistem yang telah dibentuk.

Risk Assessment

Risk Assessment is carried out to identify and assess risks that may affect the achievement of objectives. The Company's risk assessment process begins by identifying risks that can affect the achievement of the Company's objectives then followed by an evaluation to determine actions to minimize the risks faced.

Control Activities

Control activities are the Company's actions in an effort to prevent and reduce risks that could hamper the achievement of the Company's objectives. Actions taken by the Company are based on established policies and procedures. The control activities carried out by the Company are realized through:

a. Develop policies, guidelines and procedures in accordance with applicable provisions
b. Carry out operational activities based on applicable Policies, SOPs, Procedures & Regulations
c. Develop digitalization technology and carry out risk control regularly

Information and Communication

Information and Communication is obtained and produced by the Company to support the functions of other internal control components. The Company manages all information and communication, through updating information systems and providing effective and accountable communication facilities, to minimize and prevent the occurrence of problems resulting from irrelevant and high-quality information.

Internal Control Monitoring

The Company periodically monitors and evaluates internal control in the Company through:

a. Carrying out socialization regarding the importance of implementing the Internal Control System and socializing how to fill out the CSA (Control Self Assessment) Form and the evidence needed by the work unit that will evaluate the effectiveness and adequacy of the Internal Control System
b. Evaluation of the effectiveness and adequacy of the Internal Control System for 40 work units during 2023 which is divided into 4 times / quarter (10 work units per quarter)
c. Provide feedback to work units which effectiveness and adequacy have been evaluated so that they can be followed up

The actions are taken to ensure that the Company's internal control system is running well. The results of monitoring are used by the Company to correct detected weaknesses and strengthen the systems that have been established.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern pada Tahun Buku

Dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal, Perusahaan melakukan penerapan berbasis internasional yang meliputi aspek *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Best Practice)* dari penilaian yang dilakukan rata-rata tingkat efektivitas pengendalian internal mendapatkan predikat baik dengan rerata 91,64.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi selalu mengembangkan sistem pengendalian Internal di Perusahaan guna penerapannya dapat berfungsi secara efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Sistem Pengendalian Internal di Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam *Corporate Governance Policy* berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi.

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal di Perusahaan telah cukup dan berfungsi efektif serta memadai dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Hal tersebut tercermin melalui operasional Perusahaan yang berjalan secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.

Review on the Effectiveness of the Internal Control System in the Fiscal Year

In the implementation of the Internal Control System, the Company carries out international-based implementation which includes the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Best Practice) aspect. From the assessment carried out, the average level of internal control effectiveness received a good predicate with an average of 91.64.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the Internal Control System

The Board of Directors always develops an internal control system in the Company to maintain its implementation to function effectively to secure the Company's investments and assets. The Internal Control System in the Company is implemented in accordance with what is stipulated in the Corporate Governance Policy based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors.

The Board of Directors and Board of Commissioners stated that the Internal Control System in the Company is sufficient and works effectively and adequately in managing the risks faced by the Company. This is reflected in the Company's operations running effectively and efficiently, the reliability of financial reporting, the security of the Company's assets, and compliance with statutory regulations.

Manajemen Risiko
Risk Management



Dasar Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi dan proses bisnis yang tepat untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berhubungan dengan aktivitas Perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko maupun dampak yang ditimbulkan dari risiko, yang berpengaruh terhadap sasaran Perusahaan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan mengacu pada Pedoman Manajemen Risiko dan prosedur turunannya yang disusun berdasarkan pada beberapa referensi yang relevan, di antaranya yaitu Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan.

Basis for Implementing a Risk Management System

The Company is committed to implement appropriate strategies and business processes to identify and manage risks related to the Company's activities. This aims to minimize the possibility of risks occurring and the impacts arising from risks, which affect the Company's targets, to provide maximum benefits to shareholders and stakeholders.

The implementation of risk management in the Company refers to the Risk Management Guidelines and derivative procedures which are prepared based on several relevant references, including Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Arsitektur Manajemen Risiko

Berdasarkan ISO 31000:2018, arsitektur manajemen risiko digambarkan sebagai berikut:

Risk Management Architecture

Based on ISO 31000:2018, the risk management architecture is described as follows:

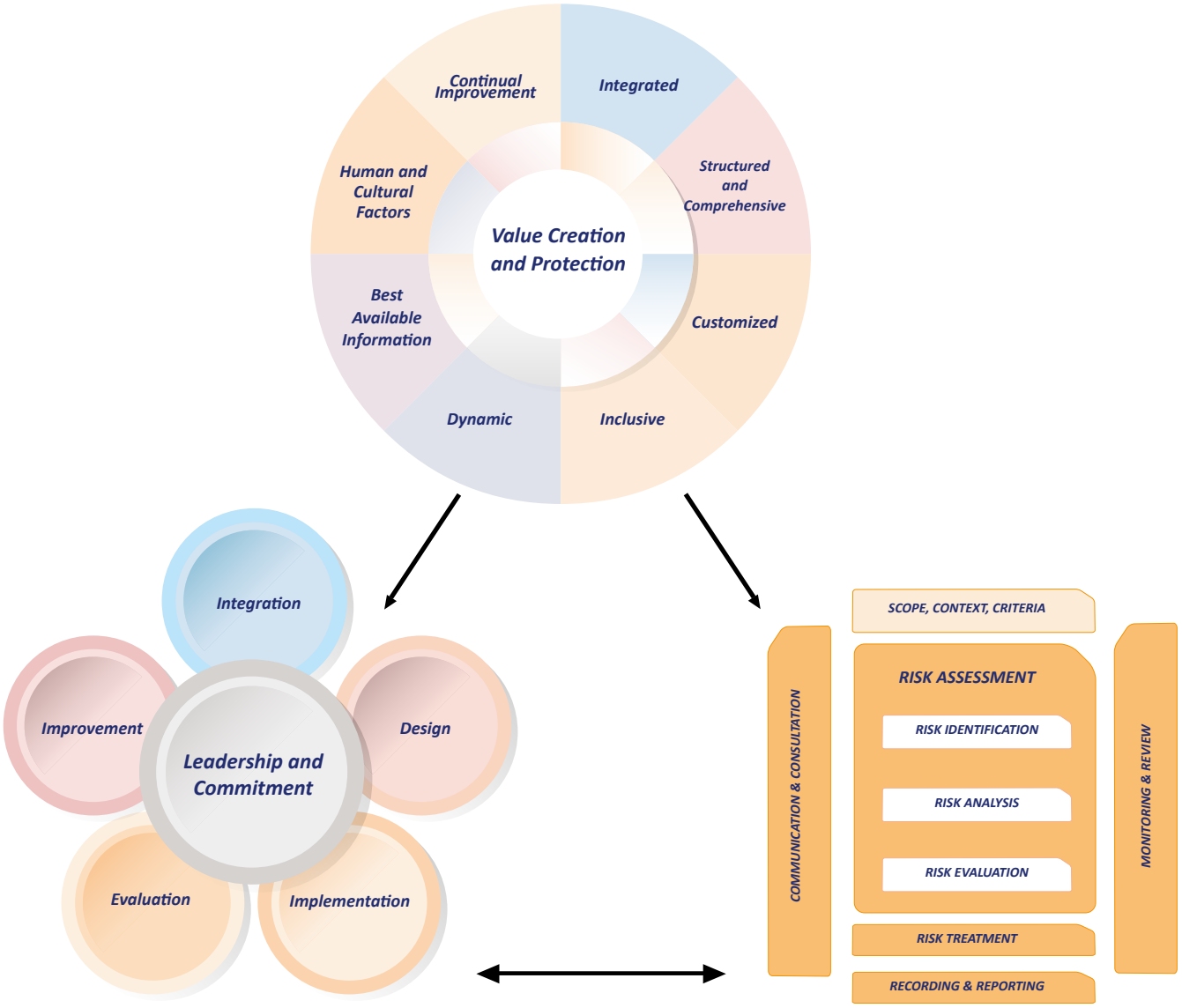

Tujuan Manajemen Risiko

Berdasarkan ISO 31000:2018 – *Risk Management Guidelines*, tujuan manajemen risiko yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Tujuan ini diwujudkan dengan meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Adapun tujuan manajemen risiko yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
   Jika risiko-risiko yang dapat menghambat proses organisasi telah diases dengan baik, maka mitigasi untuk mengatasi risiko yang dapat mengganggu kelancaran proses organisasi dapat diantisipasi. Walaupun risiko tersebut terjadi, maka organisasi telah siap untuk menanganinya dengan baik.
2. Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran Perusahaan.
   Melalui penetapan lingkup, konteks, dan kriteria risiko yang jelas, termasuk penegasan bahwa risikorisiko yang dikelola merupakan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran, manajemen risiko akan dapat meningkatkan keyakinan atas pencapaian sasaran Perusahaan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan reputasi perusahaan.
   Melalui komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, mereka mengetahui bahwa perusahaan mampu untuk menangani Risiko-risiko yang dihadapi dengan baik. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
4. Mengurangi Kejutan-Kejutan yang kurang menyenangkan.
   Melalui penerapan manajemen risiko yang baik, maka hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran perusahaan sekaligus langkah antisipasi yang perlu dilakukan.
5. Meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan menjadi semakin baik.
   Dalam penerapan manajemen risiko, perlu menemukenali para pemangku kepentingan dan harapan atau kebutuhannya. Melalui Komunikasi timbal balik yang intens dapat dicapai kesamaan persepsi untuk mencapai sasaran Perusahaan. Manajemen harus terintegrasi di dalam proses organisasi dan memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi.

Pedoman Manajemen Risiko PTBA

Pedoman Manajemen Risiko PTBA disahkan oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko serta Direktur Utama pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan nomor dokumen BARMM.01. Secara umum, Pedoman Manajemen Risiko memuat mengenai:

Risk Management Objective

Berdasarkan ISO 31000:2018 – *Risk Management Guidelines*, tujuan manajemen risiko yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Tujuan ini diwujudkan dengan meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Adapun tujuan manajemen risiko yaitu sebagai berikut:

1. Enhancing Effectiveness and Efficiency:
   By adequately identifying risks that could hinder organizational processes, mitigation measures to address potential disruptions can be anticipated. Even if such risks occur, the organization is prepared to handle them effectively.

2. Providing Reasonable Assurance of Company Goal Achievement:
   Through clear identification of the scope, context, and risk criteria, including the assertion that managed risks may affect goal achievement, risk management can enhance confidence in the company's established goals.

3. Enhancing Company Reputation:
   Effective communication with stakeholders ensures they are aware that the company is capable of managing its risks well. Stakeholders include both internal and external parties.

4. Reducing Unpleasant Surprises:
   Effective risk management helps identify significant factors affecting the company's goal achievement and facilitates proactive measures.

5. Improving Relationships with Stakeholders:

   In risk management implementation, identifying stakeholders and understanding their expectations or needs is crucial. Through intensive feedback communication, a shared perception can be achieved to reach company goals. Risk management should be integrated into the organizational process and requires leadership and commitment from top management, as well as active involvement from all organization members.

Risk Management Guidelines of PTBA

The Risk Management Guidelines of PTBA were approved by the Finance and Risk Management Director as well as the President Director on August 9, 2021, with document number BARMM.01. In general, the Risk Management Guidelines cover:

1. Kebijakan Manajemen Risiko;
2. Pendahuluan: Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, Acuan, dan Definisi;
3. Prinsip Manajemen Risiko;
4. Kerangka Manajemen Risiko;
5. Proses Manajemen Risiko.

Penerapan dan Pengembangan Sistem Manajemen Risiko di Lingkup PTBA

Dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko di PTBA. Perusahaan memiliki Pedoman, Tata Laksana (TL), dan Tata Cara Kerja (TCK) yang lengkap, mencakup:

1. Pedoman Manajemen Risiko;
2. Pedoman Business Continuity Management System;
3. Pedoman 4 Eyes Principles Pengambilan Keputusan;
4. TL Penerapan Lingkup, Konteks, dan Kriteria Risiko;
5. TL Manajemen Risiko Satker/Proyek;
6. TL Penyusunan Profil Risiko Korporat Terintegrasi;
7. TL Monitoring Pengendalian Risiko;
8. TL Evaluasi Manajemen Risiko;
9. TL Komunikasi dan Konsultasi Manajemen Risiko;
10. TL Kajian Risiko Bisnis & Stratejik;
11. TL Pendampingan Manajemen Risiko Anak dan Afiliasi Perusahaan;
12. TL Business Continuity Plan (BCP) Pelabuhan Tarahan;
13. TL Business Continuity Plan (BCP) Dermaga Kertapati;
14. TL Business Continuity Plan (BCP) Penambangan Tanjung Enim;
15. TL Business Continuity Plan (BCP) Kantor Perwakilan Jakarta;
16. TCK Identifikasi Risiko;
17. TCK Analisis Risiko;
18. TCK Inspeksi Lapangan;
19. TCK Pencatatan Kejadian Merugikan;
20. TCK Laporan Pengendalian Risiko Melalui Aplikasi ERM;
21. TCK Penyusunan Kajian Risiko;
22. TCK Penyusunan monitoring Key Risk Indicator.

Perusahaan senantiasa memastikan kesesuaian prosedur manajemen risiko dengan proses bisnis terkini dengan melakukan pembaruan terhadap Pedoman, TL, dan TCK yang dijadikan sebagai acuan dalam penerapan manajemen risiko. Berikut merupakan informasi pengembangan implementasi Manajemen Risiko di PTBA.

1. Risk Management Policy;
2. Introduction: Background, Purpose, Scope, References, and Definitions;
3. Risk Management Principles;
4. Risk Management Framework;
5. Risk Management Process.

System Implementation and Development of Risk Management in PTBA

In supporting the implementation of risk management in PTBA. The Company has a complete set of Guidelines, Procedures (TL), and Code of Conduct (TCK), which includes:

1. Risk Management Guidelines;
2. Business Continuity Management System Guidelines;
3. Guidelines for 4 Eyes Principles of Decision Making;
4. TL Implementation of Scope, Context, and Risk Criteria;
5. TL of PIU/Project Risk Management;
6. TL Preparation of Integrated Corporate Risk Profile;
7. TL Monitoring of Risk Control;
8. TL Evaluation of Risk Management;
9. TL Risk Management Communication and Consultation;
10. TL Business & Strategic Risk Assessment;
11. TL AAP Risk Management Assistance;
12. TL Business Continuity Plan (BCP) of Tarahan Port;
13. TL Business Continuity Plan (BCP) Kertapati Barging Port;
14. TL Business Continuity Plan (BCP) Tanjung Mining Enim Mining;
15. TL Business Continuity Plan (BCP) Representative Office Jakarta;
16. TCK Risk Identification;
17. TCK Risk Analysis;
18. TCK Field Inspection;
19. TCK of Adverse Event Recording;
20. TCK Risk Control Report through ERM Application;
21. TCK Preparation of Risk Assessment;
22. TCK Preparation of Key Risk Indicator monitoring.

The Company consistently ensures the alignment of risk management procedures with current business processes by updating Guidelines, Standard Operating Procedures (SOPs), and Control Test Checklists (TCKs) used as references in risk management implementation. The following information outlines the development of risk management implementation at PTBA.

Milestones Implementasi Manajemen Risiko PTBA

Milestones Perkembangan Implementasi Manajemen Risiko PTBA

2007 – 2008	• Pembangunan Manajemen Risiko (MR) PTBA Terintegrasi (Identifikasi Risiko berdasarkan Kategori Risiko) • Penetapan Pedoman, Kebijakan & Sasaran MR PTBA (Ke-1) (Acuan: AS/NZS 4360:2004)	• Development of Integrated PTBA Risk Management (MR) (Risk Identification based on Risk Category) • Determination of MR PTBA Guidelines, Policies & Targets (1st) (Reference: AS/NZS 4360:2004)
2009	Pembuatan dan Pengesahan TL Manajamen Risiko Terintegrasi (2 Prosedur)	Creation and Ratification of Integrated Risk Management RTL (2 Procedures)
2013	• Pembangunan MR Berbasis IT (ERM Application) • Identifikasi Risiko berdasarkan kejadian (Risk Event) • Penilaian & Profil Risiko (Satker – Korporat: Bottom to Top)	• IT-Based MR Development (ERM Application) • Risk identification based on events (Risk Event) • Risk Assessment & Profile (Work Unit – Corporate: Bottom to Top)
2014	Penetapan Pedoman, Kebijakan & Sasaran Manajemen Risiko PTBA (Ke-2) Acuan: ISO 31000:2009 Mixed COSO 2013 & AS/NZS 4360:2004.	Determination of PTBA Risk Management Guidelines, Policies & Targets (2nd) Reference: ISO 31000:2009 Mixed COSO 2013 & AS/NZS 4360:2004.
2015	• Go Live Enterprise Risk Management Application (ERM Application). • Pembangunan Budaya Risiko (Risk Culture).	• Go Live Enterprise Risk Management Application (ERM Application). • Risk Culture Development.
2016 – 2017	• Monitoring & Evaluasi Penerapan MR Aplikasi ERM. • Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko Satker Baru & Anak Perusahaan. • Updating & Pengesahan TL MR (5 Prosedur). • Uji coba Risk-Based Internal Audit (RBIA).	• Monitoring & Evaluation of the Implementation of MR ERM Applications. • Assistance in the Implementation of Risk Management for New Work Units & Subsidiaries. • Updating & Ratifying TL MR (5 Procedures). • Risk-Based Internal Audit (RBIA) trial.
2018	• Penetapan Pedoman, Kebijakan & Sasaran MR PTBA (Ke-3) ISO 31000:2018. • Pembangunan Database Analisa Kuantitatif & Manajemen Insiden.	• Establishment of MR PTBA Guidelines, Policies & Targets (3rd) ISO 31000:2018. • Building a Quantitative Analysis & Incident Management Database.
2019	• Tersedianya database risiko kuantitatif untuk Risk-Based Audit. • Tersedianya Pedoman RKAP berbasis risiko PTBA dan Anak Perusahaan. • 50% Anak Perusahaan telah menerapkan Manajemen Risiko (telah memiliki Dokumen Pedoman dan Prosedur MR) • 70% Risk Officer telah mendapatkan Sertifikasi Manajemen Risiko.	• Availability of a quantitative risk database for Risk-Based Audit. • Availability of risk-based WP&B guidelines for PTBA and Subsidiaries. • 50% of Subsidiaries have implemented Risk Management (have MR Guidance and Procedure Documents) • 70% of Risk Officers have obtained Risk Management Certification.
2020	• Hasil Risk Maturity Level Assessment oleh BPKP: 88,98 / 100,00. • Tersedianya dokumen Business Continuity Management System (BCMS). • Teridentifikasinya risiko terkait penyuapan di Satuan Kerja (ISO 37001:2016). • Penerapan RKAP berbasis risiko PTBA dan Anak Perusahaan. • Tersedianya Pedoman Manajemen Risiko di Anak Perusahaan.	• Risk Maturity Level Assessment results by BPKP: 88.98 / 100.00. • Availability of Business Continuity Management System (BCMS) documents. • Identification of risks related to bribery in the Work Unit (ISO 37001:2016). • Implementation of risk-based WP&B for PTBA and Subsidiaries. • Availability of Risk Management Guidelines in Subsidiaries.
2021	• Hasil asesmen Risk Maturity Index oleh Deloitte: 3,98/5,00. • Perubahan nomenklatur manajemen risiko. • Perubahan organisasi Satker Manajemen Risiko. • Enhancement Aplikasi ERM. • Tersedianya Laporan Profil Risiko Anak dan Afiliasi Perusahaan. • Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Risk Owner, Risk Officer, dan Personel Satker Manajemen Risiko. • Tersedianya Pembaruan Pedoman dan Prosedur Manajemen Risiko.	• Risk Maturity Index assessment results by Deloitte: 3.98/5.00. • Changes in risk management nomenclature. • Changes in the organization of the Risk Management Work Unit. • ERM Application Enhancement. • Availability of Risk Profile Reports for Subsidiaries and Affiliates. • Implementation of training and certification for Risk Owners, Risk Officers and Risk Management Work Unit Personnel. • Availability of updated Risk Management Guidelines and Procedures.
2022	• Hasil asesmen Risk Maturity Index oleh asesor internal dari MIND ID Group: 3,67 /5 (Established) Catatan: terdapat perbedaan parameter yang digunakan dibandingkan dengan penilaian tahun sebelumnya. • Go Live Enterprise Risk Management Application (ERMA), update / enhancement dari Aplikasi ERM. • Sertifikasi BCMS ISO 22301:2019. • Tersedianya Pedoman 4-Eyes Principles Pengambilan Keputusan. • Terlaksananya program-program peningkatan kompetensi dan budaya risiko, melalui pelatihan, sertifikasi, workshop, FGD, dan sosialisasi melalui berbagai media. • Tersedianya Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko di Anak & Afiliasi Perusahaan.	• Risk Maturity Index assessment results by internal assessors from the MIND ID Group: 3.67/5 (Established) Note: there are differences in the parameters used compared to the previous year's assessment. • Go Live Enterprise Risk Management Application (ERMA), update/ enhancement of the ERM Application. • BCMS ISO 22301:2019 certification. • Availability of 4-Eyes Principles Guidelines for Decision Making. • Implementation of competency and risk culture improvement programs, through training, certification, workshops, FGDs, and outreach through various media. • Availability of Risk Management Guidelines and Documents for Company Subsidiaries & Affiliates.
2023	• Implementasi Four Eyes Principles dalam Pengambilan Keputusan • Terlaksananya program-program peningkatan kompetensi dan budaya risiko, pelatihan, sertifikasi, workshop, FGD, dan sosialisasi melalui berbagai media. • Tersedianya Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko di Anak & Afiliasi Perusahaan. • Terlaksananya Risk Management Award untuk seluruh satuan kerja di PTBA Induk. • Enhancement Aplikasi ERMA.	• Implementation of the Four Eyes Principles in Decision Making • Implementation of competency and risk culture improvement programs, training, certification, workshops, FGDs, and outreach through various media. • Availability of Risk Management Guidelines and Documents for Company Subsidiaries & Affiliates. • Implementation of the Risk Management Award for all work units at Holding PTBA. • ERMA Application Enhancement.

Pengelolaan Risiko di Lingkup PTBA

PTBA menetapkan struktur tata kelola manajemen risiko dengan mengadopsi "Three Lines Model" yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) yaitu sebagai berikut:

Risk Management within PTBA's Scope

PTBA establishes a risk management governance structure by adopting the "Three Lines Model" developed by The Institute of Internal Auditors (IIA), as follows:

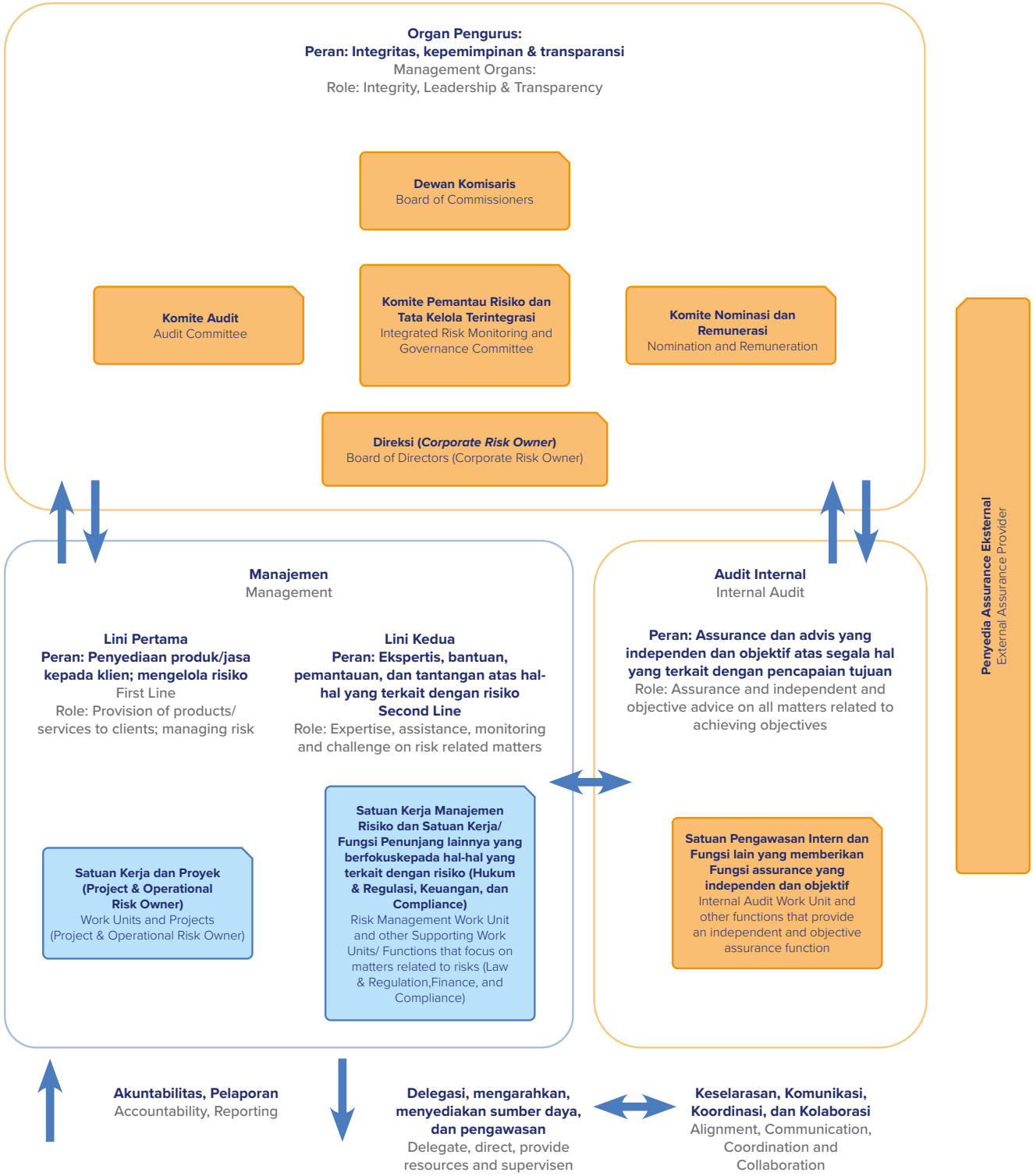

Risiko yang Dihadapi Perusahaan

Risiko-risiko Perusahaan dikelompokan dalam Risk Universe yang terdiri dari 28 Tipe Risiko dengan 3 kategori yaitu *External Environment, Operational,* dan *Organizational* sebagaimana berikut:

Risks Faced by the Company

Company risks are grouped into Risk Universe which consists of 28 Risk Types with 3 categories, namely External Environment, Operational, and Organizational as follows:

External Environment

- A1 Macro Economy
- A2 Industry
- A3 Investment
- A4 Regulation Changes
- A5 Community Relation
- A6 Security Threat
- A7 Weather

Operational

- B1 Production Cost
- B2 Sourcing
- B3 Sourcing
- B4 Production Disruption
- B5 Product Quality
- B6 Product Quality
- B7 Facility & Infrastructure
- B8 Operation Planning
- B9 Operation Planning
- B10 Business Interruption
- B11 Project
- B12 Project
- B13 Financial Reporting
- B14 Land Availability
- B15 Land Availability

Organizational

- C1 People
- C2 Governance
- C3 Business Process
- C4 Financial
- C5 Information Technology
- C6 Legal & Regulatory Compliance

Sepanjang tahun 2023, terdapat beberapa risiko utama yang dihadapi oleh Perusahaan. Berdasarkan Profil Risiko Perusahaan, risiko-risiko tersebut yaitu:

1. **Kesehatan, Keamanan, & Lingkungan (Health, Safety, & Environment / HSE)**
   Risiko HSE meliputi seluruh aspek yang dapat berdampak pada kesehatan & keselamatan pekerja serta pencemaran lingkungan sekitar Perusahaan. Risiko ini dapat berdampak lebih lanjut pada kehilangan kesempatan dalam menjalankan bisnis Perusahaan, penurunan reputasi, sanksi dari regulator, serta peningkatan biaya yang harus dikeluarkan, misalnya untuk penanganan insiden, peningkatan premi asuransi, dan kompensasi yang harus dibayarkan.

   Di tahun 2023 risiko kecelakaan kerja masih menjadi fokus Perusahaan mengingat karakteristik perusahaan tambang yang memang memiliki eksposur yang tinggi terhadap risiko-risiko kecelakaan. Pengendalian terhadap risiko ini terus dilakukan secara konsisten melalui penerapan *golden rules* dan sistem manajemen terkait keselamatan yaitu ISO 45001:2018, Sistem Manejemen K3, dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP). Pada tahun 2023 dilakukan pengendalian risiko di antaranya sebagai berikut:
   a. Pelatihan / *workshop* untuk membekali karyawan mitra kerja terkait pengetahuan K3;

In 2023, there were several main risks faced by the Company listed on the Company's Risk Profile namely:

1. **Health, Safety, & Environment (HSE)**

   HSE risks cover all aspects that can impact the health & safety of workers as well as environmental pollution around the Company. This risk can have a further impact on lost opportunities in running the Company's business, reduced reputation, sanctions from regulators, as well as increased costs that must be incurred, for example for handling incidents, increasing insurance premiums, and compensation that must be paid.

   In 2023, the risk of work accidents was still the Company's focus considering the characteristics of mining companies which have high exposure to accident risks. Control of this risk continues to be carried out consistently through the implementation of golden rules and safety-related management systems, namely ISO 45001:2018, K3 Management System, and Mining Safety Management System (SMKP). In 2023, risk controls were carried out including the following:

   a. Training/workshops to equip partner employees with HSE knowledge;

b. Inspeksi rutin dan inspeksi mendadak (sidak);
c. Mensyaratkan seluruh operator sudah memiliki izin dari instansi terkait;
d. Pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala;
e. Pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu K3;
f. Penggunaan teknologi untuk memantau pergerakan lereng dengan alat *Slope Stability Radar* (SSR) dan Synthetic Aperture Radar (SAR);
g. Perawatan dan pembuatan jalan *All Weather Road* (AWR);
h. Pemeriksaan dan perawatan alat secara rutin sesuai jadwal;
i. Pemberian tindakan disiplin (pinalti) terhadap pelanggaran *safety*/K3 ke seluruh *section*/tim yang terlibat;
j. Pembinaan berupa *incident recall, violation recall* dan *safety minute* kepada pimpinan Satuan Kerja dan mitra kerja saat pelaksanaan *safety committee meeting*, P2K3, *safety talk* dan Rakor *Supply Chain*.

2. Project

Risiko ini berkaitan dengan kegagalan untuk menyelesaikan proyek dalam hal biaya, jadwal waktu, dan kualitas. Pada tahun 2023, terdapat beberapa proyek strategis yang dilakukan untuk menunjang pencapaian sasaran-sasaran strategis sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) diantaranya adalah proyek PLTU Sumsel-8 yang telah COD pada tanggal 7 Oktober 2023.

Atas risiko keterlambatan operasional PLTU Sumsel-8, mitigasi yang telah dilakukan di antaranya:
a. Menjalankan proyek sesuai dengan *framework* manajemen proyek yang baik;
b. Menyusun asesmen dan mitigasi risiko proyek secara komprehensif serta memonitornya secara berkala;
c. Menyusun dan/atau mengupdate kajian bisnis yang komprehensif dan realistis;
d. Mengimplementasikan Pedoman dan Prosedur *Four Eyes Principles* untuk pengambilan keputusan Proyek dan Rencana Keputusan Strategis Perusahaan;
e. Melakukan eskalasi atas isu/kendala Proyek yang bersifat strategis dan *uncontrollable*.

Selain itu, atas risiko keterlambatan proyek-proyek Pengembangan bisnis lainnya, Perusahaan juga menjalankan mitigasi sebagai berikut:
a. Menyusun timeline rencana/ proyek Pengembangan bisnis secara detail dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
b. Menyusun dan/atau meng-update kajian bisnis secara komprehensif dan realistis.
c. Melakukan pemilihan konsultan atau kontraktor yang memiliki kapabilitas yang memadai.
d. Mengimplementasikan Pedoman dan Prosedur *Four Eyes Principles* untuk pengambilan keputusan Proyek dan Rencana Keputusan Strategis Perusahaan.

3. Marketing & Sales

Risiko ini berkaitan dengan kapasitas perusahaan untuk secara efektif dan efisien mengakses pelanggan saat ini dan pelanggan potensial. Risiko ini dapat terjadi

b. Routine inspections and sudden inspections (sidak);
c. Requires that all operators to have permits from the relevant agencies;
d. Regular health checks of workers;
e. Installation and maintenance of HSE signs;
f. Use of technology to monitor slope movements using Slope Stability Radar (SSR) and Synthetic Aperture Radar (SAR);
g. All Weather Road (AWR) road maintenance and construction;
h. Regular inspection and maintenance of equipment according to schedule;
i. Providing disciplinary action (penalty) for safety/HSE violations to all sections/teams involved;
j. Guidance in the form of incident recalls, violation recalls, and safety minutes for Work Unit leaders and work partners during safety committee meetings, P2K3, safety talks, and Supply Chain Coordination Meetings.

2. Projects

This risk is related to failure in completing the project in terms of cost, time schedule, and quality. In 2023, there were several strategic projects being carried out to support the achievement of strategic targets in accordance with the Company's Long-Term Plan, including the Sumsel-8 CFPP project which COD started on October 7, 2023.

Regarding the risk of operational delays at Sumsel-8 CFPP, mitigation that has been carried out includes:
a. Execute projects according to a good project management framework;
b. Develop comprehensive project risk assessments and mitigation and monitor them regularly;
c. Compile and/or update comprehensive and realistic business studies;
d. Implement Four Eyes Principles Guidelines and Procedures for Project decision making and Company Strategic Decision Plans;
e. Escalate strategic and uncontrollable Project issues/ constraints.

In addition, for the risk of delays in other business development projects, the Company also implemented the following mitigation:
a. Prepare a detailed business development plan/ project timeline and carry out regular monitoring and evaluation.
b. Compile and/or update business studies in a comprehensive and realistic manner.
c. Choose consultants or contractors who have adequate capabilities.
d. Implement Four Eyes Principles Guidelines and Procedures for decision making and Company Strategic Decision Plans.

3. Marketing & Sales

This risk is related to the company's capacity to effectively and efficiently access current and potential customers. This risk can occur due to limited coal transportation

akibat keterbatasan kapasitas angkutan batubara yang mengangkut batubara Perusahaan dari Tanjung Enim ke Dermaga Kertapati dan Pelabuhan Tarahan serta keterbatasan Perusahaan dari sisi regulasi yang berlaku. Pada tahun 2023, terdapat dua isu terkait penjualan batubara yang menjadi fokus yaitu risiko ketidaktercapaian volume penjualan batubara dan aturan terkait kompensasi DMO batubara melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) yang belum terbit serta diimplementasikan.

Target volume penjualan batubara Perusahaan yang terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk memastikan dapat mencapai target tersebut, Perusahaan melakukan upaya sebagai berikut:

a. Melakukan optimalisasi penjualan baik melalui angkutan batubara maupun skema penjualan lainnya dengan tetap patuh terhadap ketentuan yang berlaku;
b. Mengimplementasikan *operational excellence* dan koordinasi intensif dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk meminimalkan kendala-kendala dalam pengangkutan batu bara;
c. Mendapatkan pelanggan baru untuk penjualan batu bara secara ekspor.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.267.K/MB.01/MEM.B/2022 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Batu bara Dalam Negeri, maka Perusahaan wajib memenuhi *Domestic Market Obligation* (DMO) sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan karena penjualan batu bara domestik menggunakan cap harga yang telah ditetapkan Pemerintah. Adanya kompensasi DMO batu bara melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat mendukung kinerja Perusahaan yang lebih baik. Untuk mendorong terbitnya peraturan mengenai kompensasi DMO batu bara, Perusahaan melakukan koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait.

4. Security Threat

Risiko ini terkait dengan tindakan individu atau kelompok yang mengancam operasional Perusahaan. Penambangan Tanpa Izin (PETI) menjadi krusial bagi Perusahaan karena dapat mengancam operasional Perusahaan dan berdampak pada pengurangan cadangan batu bara di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki Perusahaan. Atas ancaman tersebut, Perusahaan telah melakukan beberapa mitigasi diantaranya:

a. Melakukan pemantauan dan pengontrolan batas area tambang di wilayah IUP Perusahaan.
b. Melakukan pemantauan ancaman PETI di seluruh area IUP Perusahaan.
c. Melaporkan kegiatan PETI kepada Kepolisian dan KESDM serta upaya represif sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Melakukan Pemberdayaan masyarakat sekitar PETI dan para penambang PETI agar tidak melakukan penambangan tanpa izin di wilayah IUP PTBA.

capacity that transports the Company's coal from Tanjung Enim to Kertapati Barging Port and Tarahan Port as well as the Company's limitations in terms of applicable regulations. In 2023, there were two issues related to coal sales becoming the Company's focus, namely the risk of the inability to achieve coal sales volume and regulations regarding coal DMO compensation through Management Agency Partners (MIP) which have not yet been issued and implemented.

The Company's coal sales volume target continues to increase compared to previous years. To ensure the realization of the target, the Company made the following efforts:

a. Optimizing sales both through coal transportation and other sales schemes while remaining compliant with applicable regulations;
b. Implementing operational excellence and intensive coordination with PT Kereta Api Indonesia (Persero) to minimize obstacles in coal transportation;
c. Seek for new customers for export coal sales.

Based on the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No.267.K/MB.01/MEM.B/2022 of 2022 concerning Domestic Coal Fulfillment, the Company is obliged to fulfill the Domestic Market Obligation (DMO) of 25% of the planned amount of coal production in the Work Plan and Budget Annual Fees. This is a challenge for the company because domestic coal sales use a price cap set by the government. The existence of coal DMO compensation through Management Agency Partners (MIP) can support better company performance. To encourage the issuance of regulations regarding coal DMO compensation, the Company carried out intensive coordination with relevant stakeholders.

4. Security Threats

This risk is related to individual or group actions that threaten the Company's operations. Mining Without a Permit (Penambangan Tanpa Izin / PETI) is crucial for the Company since it can threaten the Company's operations and have an impact on reducing coal reserves in the Mining Business License (Izin Usaha Pertambangan / IUP) area owned by the Company. Due to this threat, the Company has carried out several mitigations including:

a. Monitor and control mining area boundaries in the Company's IUP area.
b. Monitor PETI threats in all Company IUP areas.
c. Report PETI activities to the Police and ESDM Ministry as well as repressive efforts in accordance with applicable regulations.
d. Empower communities around PETI and PETI miners to prevent them from carrying out unauthorized mining near the PTBA IUP area.

5. *Capacity*

Risiko ini terkait dengan kapasitas yang tidak mencukupi atau yang melebihi sehingga mengancam kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan margin laba yang kompetitif. Terkait dengan risiko *capacity,* yang menjadi fokus PTBA adalah terkait kapasitas angkutan batubara yang berpotensi tidak dapat menunjang target penjualan di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena angkutan batu bara melalui Kereta Api menjadi moda angkutan utama Perusahaan untuk mengirim batubara ke Pelabuhan/ Dermaga untuk selanjutnya dikirim ke Pembeli.

Terkait risiko tersebut, Perusahaan melakukan beberapa upaya mitigasi, di antaranya:

a. Melakukan komunikasi dengan PT KAI untuk melakukan upaya pencegahan kejadian anjlokan di lingkup tanggung jawab PT KAI.
b. Memastikan ketersediaan asupan batu bara yang akan diangkut menggunakan Kereta Api dengan melakukan:
   - Memaksimalkan *rehandling* batu bara ke *live stockpile;*
   - Melakukan perawatan dan pembuatan AWR di jalan *hauling*.
c. Menjaga kehandalan CHF di tambang dan pelabuhan untuk memastikan kelancaran penanganan, pengiriman, dan pengapalan batu bara.
d. Melakukan koordinasi intensif untuk penjadwalan angkutan dan pengapalan dengan mempertimbangkan ketersediaan kargo batu bara dan kebutuhan pasar.
e. Mengupayakan alternatif pasokan listrik lain untuk mengoperasikan TLS dan melakukan koordinasi dengan PLN.

Dengan beberapa mitigasi yang dijalankan, risiko yang semula menjadi salah satu top risk pada awal tahun 2023 dapat menurun, sehingga target angkutan batu bara pada tahun 2023 dapat tercapai.

6. Perubahan Regulasi

Risiko ini terkait dengan hukum dan peraturan yang mengancam kemampuan Perusahaan untuk menjalankan transaksi, perjanjian, kontrak penting atau menerapkan strategi dan kegiatan spesifik lainnya. Terdapat perizinan yang dianggap krusial untuk didapatkan agar Perusahaan tetap dapat melakukan kegiatan operasional Penambangan sesuai dengan sekuen tambang yang sudah dijalankan. Izin tersebut terkait dengan pengalihan alur Air Kiahaan Tahap II, Lengi, dan Niru, dimana Perusahaan telah melakukan beberapa mitigasi di antaranya:

a. Menunjuk pihak ketiga/konsultan yang berkompeten untuk membuat kajian teknis, ekonomis dan lingkungan sebagai persyaratan permohonan perizinan.
b. Melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan.
c. Mengajukan izin ke instansi terkait serta melakukan monitoring & *follow up*.

Indikator Risiko (KRI)

Key Risk Indicator (KRI) merupakan ukuran yang digunakan sebagai indikator oleh suatu organisasi. KRI akan menjadi sebuah pemberitahuan dini apabila terjadi suatu perubahan

5. Capacity

This risk is related to insufficient or excess capacity, which threatens the Company's ability to generate competitive profit margins. Regarding capacity risk, PTBA's focus is related to coal transportation capacity which has the potential to not be able to support sales targets in 2023. This was caused by coal transportation via train is the Company's main mode of transportation to send coal to ports/barging port for further delivery to Buyer.

Regarding this risk, the Company has carried out several mitigation efforts, including:

a. Communicate with PT KAI to make efforts to prevent subsidence incidents within PT KAI's scope of responsibility.
b. Ensure the availability of coal stock to be transported by train by:
   - Maximizing coal rehandling to live stockpile;
   - Carry out maintenance and manufacture of AWR on hauling roads.
c. Maintain CHF reliability in mines and ports to ensure smooth handling, delivery, and shipment of coal.
d. Carry out intensive coordination for transportation and shipping scheduling by considering the availability of coal cargo and market needs.
e. Seek for alternative electricity supplies to operate TLS and coordinating with PLN.

With several mitigations implemented, the risk that was originally one of the top risks at the beginning of 2023 can be reduced and the coal transportation target in 2023 can be achieved.

6. Regulation Changes

These risks are related to laws and regulations that threaten the Company's ability to execute essential transaction, agreement and contract or implement other specific strategies and activities. There are permits that are considered crucial to obtain to help the Company carrying out mining operational activities in accordance with the mining sequence that has been carried out. This permit is related to the diversion of the Kiahaan Phase II, Lengi and Niru water channels, where the Company has carried out several mitigations, including:

a. Appoint competent third parties/consultants to carry out technical, economic, and environmental studies as requirements for licensing applications.
b. Complete the required documents.
c. Apply for permits to the relevant agencies and carry out monitoring & follow up.

Key Risk Indicator (KRI)

Key Risk Indicator (KRI) is a measure used as an indicator by an organization. KRI will act as an early notification for a change in risk exposures for several aspects of a company. In

dari *risk exposures* untuk beberapa aspek pada sebuah perusahaan. Dalam hal ini, KRI dapat menjadi sebuah indikator dari kemungkinan munculnya suatu dampak atau kerugian di masa yang akan datang.

Adapun manfaat adanya KRI di antaranya:
1. Menentukan *early warning signal;*
2. Memudahkan dalam perhitungan *likelihood* dan *impact* suatu risiko;
3. Memudahkan manajemen dalam membuat program preventif, detektif, dan korektif.

Informasi yang didapatkan dari KRI memungkinkan *risk owner* untuk melakukan tindakan mitigasi lebih awal, sehingga dapat membantu mengurangi atau mencegah terjadinya risiko. Apabila suatu KRI masuk pada kategori *Red Flag* atau berada pada batas kritis, maka hal ini mengindikasikan bahwa risiko dapat terjadi dengan kemungkinan yang tinggi.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko pada Tahun Buku 2023

Sepanjang tahun 2023, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melaksanakan program kerja melalui kegiatan-kegiatan berikut:

Pada tahun 2023, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja dan dengan beberapa kegiatan penting, di antaranya:
1. Sertifikasi Kompetensi Pegawai Satker Manajemen Risiko
   Pada tahun buku 2023, telah dilakukan sertifikasi dalam rangka pengakuan kompetensi pegawai satuan kerja Manajemen Risiko diantaranya *Certified Risk Management Professional* (CRMP) dan *Certified Risk Management Officer* (CRMO).
2. Pembangunan Budaya Risiko
   Untuk meningkatkan budaya sadar risiko di lingkungan Perusahaan, Satuan Kerja Manajemen Risiko pada tahun buku 2023 melakukan:
   a. *Executive Workshop* untuk Dewan Komisaris dan Direksi;
   b. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko untuk *leaders* (BOD-1);
   c. Pelatihan Manajemen Risiko untuk supervisor (BOD-4 struktural);
   d. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko untuk *Risk Officer*;
   e. FGD Manajemen Risiko untuk *Risk Officer*;
   f. *Risk Management Awards;*
   g. *Risk Culture Survey;*
   h. *Knowledge* Sharing/sosialisasi manajemen risiko untuk *Risk Officer* satuan kerja
   i. *Risk Awareness* melalui email, *banner*, dan/atau media lainnya.
3. Implementasi 4 *Eyes Principles.*
   PTBA telah mengimplementasikan 4 *Eyes Principles* dalam pengambilan keputusan proyek dan rencana strategis Perusahaan yaitu melakukan pengembilan keputusan dengan berdasarkan pertimbangan aspek bisnis dan aspek risiko.

this case, KRI can indicate the possibility of an impact or loss in the future.

The benefits of having a KRI include:
1. Determine early warning signal;
2. Help to calculate the likelihood and impact of a risk;
3. Help the management to create preventive, detective, and corrective programs.

Information obtained from KRI allows risk owners to take early mitigation actions as an effort to reduce or prevent risks from occurring. If a KRI is included in the Red Flag category or is at the critical limit, then it indicates that the risk can occur with a high probability.

Brief Report on the Implementation of Risk Management Work Unit Tasks in the 2023 Fiscal Year

Throughout 2023, the Risk Management Work Unit has implemented work programs through the following activities:

In 2023, the Risk Management Work Unit has carried out activities in accordance with the work program and with several important activities, including:
1. Risk Management Working Unit Employee Competency Certification
   In the 2023 financial year, certification has been carried out to recognize the competency of Risk Management work unit employees, including Certified Risk Management Professional (CRMP) and Certified Risk Management Officer (CRMO).
2. Establishing a Risk Culture
   To increase the risk awareness culture within the Company, the Risk Management Work Unit in the 2023 financial year carried out:
   a. Executive Workshop for the Board of Commissioners and Directors;
   b. Risk Management competency training and certification for leaders (BOD-1);
   c. Risk Management Training for supervisors (structural BOD-4);
   d. Risk Management competency training and certification for Risk Officers;
   e. Risk Management FGD for Risk Officers;
   f. Risk Management Awards;
   g. Risk Culture Survey;
   h. Knowledge sharing/socialization of risk management for work unit Risk Officers
   i. Risk Awareness via email, banners and/or other media.
3. Implementation of the 4 Eyes Principles.
   PTBA has implemented the 4 Eyes Principles in making project decisions and the Company's strategic plans, namely making decisions based on considering business aspects and risk aspects.

4. Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko Anak & Afiliasi Perusahaan
   Manajemen berkomitmen untuk menerapkan manajemen risiko sampai dengan Anak dan Afiliasi Perusahaan (AAP). Satuan kerja Manajemen risiko berfungsi sebagai fasilitator bagi AAP untuk pendampingan penyusunan Pedoman Manajemen Risiko di AAP serta implementasinya. Tahun 2023 telah disahkan Pedoman Manajemen Risiko di 4 AAP PTBA.
5. Penyusunan RKAP 2024 Berbasis Risiko
   Tahun buku 2024 merupakan tahun keempat penyusunan RKAP berbasis risiko bagi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap program kerja yang dijalankan oleh satuan kerja merupakan mitigasi dari risiko untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.
6. Kajian Risiko Keputusan Strategis
   Komitmen Manajemen dalam penerapan manajemen risiko secara komprehensif membuat seluruh pengambilan keputusan strategis harus dilengkapi kajian risiko. Selama tahun buku 2023, satuan kerja Manajemen Risik telah menerbitkan kajian risiko diantaranya berupa Kajian Risiko, Memo Manajemen Risiko, verifikasi atas kajian risiko yang dibuat oleh satuan kerja maupun konsultan, dan nota dinas pendapat risiko.
7. Pelaksanaan Risk Culture Survey
   Dilakukan untuk mengetahui persepsi pegawai terhadap 5 aspek yaitu *transparency, acknowledgement, responsiveness, respect* dan *operational.*

Laporan tentang Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko di Tahun 2023

Untuk memastikan efektivitas atas penerapan manajemen risiko di Perusahaan, pada tahun 2023 dilakukan beberapa kegiatan di antaranya:

1. Evaluasi atas pelaporan pengendalian risiko dan penilaian risiko satuan kerja yang dilakukan melalui aplikasi ERMA. Pelaporan dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja secara triwulanan. Evaluasi dilakukan secara berjenjang dari pemilik risiko hingga ke Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Audit Operasional berbasis risiko yang dilakukan oleh Satker SPI. Audit dilaksanakan salah satunya untuk melihat efektivitas dari pengendalian risiko yang dilaksanakan satuan kerja, dengan salah satu input dari proses audit yang dilakukan adalah risiko-risiko Satuan Kerja yang teregister di aplikasi ERMA.
3. Pelaporan kepada Direksi dan Komite Risiko Usaha mengenai risiko-risiko yang dihadapi baik secara korporasi maupun risiko dari proyek-proyek Strategis Perusahaan, termasuk mitigasi-mitigasi risiko yang perlu dilaksanakan.
4. Audit ISO atau standar kesisteman lainnya, baik oleh auditor internal maupun eksternal. Dalam audit yang dilakukan, risiko menjadi salah satu aspek yang dinilai kesesuaiannya terhadap kriteria/standar audit yang digunakan.
5. Evaluasi implementasi manajemen risiko juga dilakukan melalui pelaksanaan audit *Balanced Scorecard* (BSC). Audit BSC dilaksanakan setiap triwulan untuk mengukur pencapaian sasaransasaran yang telah ditetapkan, baik dalam tingkat korporat maupun satuan kerja.

4. Assistance in the Implementation of Risk Management for Subsidiaries & Company Affiliates
   The management is committed to implement risk management up to Subsidiaries and Company Affiliates (AAP). The Risk Management work unit functions as a facilitator for AAP to assist in the preparation of Risk Management Guidelines in AAP and their implementation. In 2023, Risk Management Guidelines in 4 PTBA AAPs have been ratified.
5. The Preparation of the Risk-Based 2024 WP&B
   The 2024 financial year is the fourth year of preparing risk-based WP&B for the company. This shows that every work program carried out by the work unit is a risk mitigation to achieve the company's goals and objectives.
6. Strategic Decision Risk Assessment
   Management's commitment to implementing comprehensive risk management means that all strategic decision making must be accompanied by a risk assessment. During the 2023 financial year, the Risk Management work unit has published risk studies including Risk Studies, Risk Management Memos, verification of risk studies made by work units and consultants, and risk opinion service notes.
7. Implementation of Risk Culture Survey
   It is conducted to determine employee perceptions of 5 aspects, namely transparency, acknowledgment, responsiveness, respect, and operations.

Report on Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System in 2023

To ensure the effectiveness of the implementation of risk management in the Company, in 2023 several activities had been carried out including:

1. Evaluation of risk control reporting and work unit risk assessments carried out through the ERMA application. Reporting is carried out by all Work Units on a quarterly basis. Evaluation is carried out in stages from the risk owner to the Risk Management Work Unit.
2. Risk-based Operational Audit carried out by the Internal Audit Working Unit. One of the audits was carried out to review the effectiveness of the risk control carried out by the work unit, with one of the inputs from the audit process carried out being the risks of the Work Unit which were registered in the ERMA application.
3. Reporting to the Board of Directors and the Business Risk Committee regarding the risks faced both corporately and risks from the Company's Strategic projects, including risk mitigations that need to be implemented.
4. ISO audit or other system standards, both by internal and external auditors. In the audit carried out, risk is one of the aspects that is assessed for its suitability to the audit criteria/standards used.
5. Evaluation of risk management implementation is also carried out through the implementation of a Balanced Scorecard (BSC) audit. BSC audits are carried out quarterly to measure the achievement of predetermined targets, both at the corporate and work unit levels.

6. Perusahaan juga melakukan evaluasi atas kejadian-kejadian merugikan dalam bentuk *loss event* database. Pengelolaan *loss event* dilakukan di antaranya sebagai evaluasi efektivitas pengendalian risiko yang telah dilakukan dan sebagai indikasi level risiko yang terkait dengan masing-masing kejadian.

6. The company also evaluates adverse events in the form of a loss event database. Loss event management is carried out, among other things, as an evaluation of the effectiveness of the risk controls that have been implemented and as an indication of the level of risk associated with each event.

Rencana Penerapan atau Pengembangan Sistem Manajemen Risiko Tahun 2024

Perusahaan telah menyusun rencana kerja atas pelaksanaan Manajemen Risiko untuk tahun 2024, sebagai berikut:

Risk Management System Implementation or Development Plan for 2024

The Company has prepared a work plan for the implementation of Risk Management for 2024, as follows:

No	Program Kerja Work Plan	Waktu Pelaksanaan Time
Budaya & Kapabilitas Risiko Risk Culture & Capabilities		
1	Pelatihan manajemen risiko untuk organ Perusahaan sesuai ketentuan juknis Permen 02/2023. Risk management training for company organs in accordance with the technical guidelines of Ministerial Decree 02/2023.	TW I-TW II 1st Quarter-2nd Quarter
2	Pelatihan Manajemen Risiko untuk *Risk Owner*/JJ1. Risk Management Training for Risk Owners/JJ1.	TW III 3rd Quarter
3	Pelatihan Manajemen Risiko untuk Pegawai JJ 4 Fungsional. Risk Management Training for JJ 4 Functional Employees.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
4	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko untuk *Risk Officer.* Risk Management competency training and certification for Risk Officers	TW III 3rd Quarter
5	Pelatihan/workshop dan/atau sertifikasi kompetensi manajemen risiko untuk personel satuan kerja Manajemen Risiko. Training/workshop and/or risk management competency certification for Risk Management work unit personnel.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
6	Pelatihan/workshop personil manajemen risiko untuk memenuhi PDU. Training/workshop for risk management personnel to fulfill PDU.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
7	*Knowledge sharing* untuk *Risk Officer* baru. Knowledge sharing for new Risk Officer	TW I – TW II 1st Quarter-2nd Quarter
8	FGD Manajemen Risiko untuk *Risk Officer.* Risk Management FGD for Risk Officer.	TW IV 4th Quarter
9	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen risiko untuk Anak Afiliasi Perusahaan (AAP). Risk Management Training and Certification for Affiliated Companies (APA).	TW III 3rd Quarter
10	*Workshop, training* dan/atau sosialisasi Manajemen risiko untuk Anak Afiliasi Perusahaan (AAP). Workshop, training, and/or socialization of risk management for Company Affiliated Subsidiaries (AAP).	TW IV 4th Quarter
11	Webinar Manajemen Risiko dengan pembicara eksternal Risk Management Webinar with external speakers	TW I 1st Quarter
12	*Risk Culture Survey*	TW III 3rd Quarter
13	*Risk Management Awards*	TW IV 4th Quarter
14	*Risk Awareness* melalui email, *banner*, dan/atau media lainnya. Risk Awareness through email, banner, and/or other media	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
Organisasi & Tata Kelola Risiko Organization & Risk Governance		
1	Rapat koordinasi dengan MIND ID. Coordination Meeting with MIND ID.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
2	Rapat koordinasi dengan Direksi dan/atau Komisaris. Coordination meeting with Directors and/or Commissioners.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
3	Pembaharuan dokumen pedoman/kebijakan dan/atau prosedur manajemen risiko sesuai tata kelola dan peraturan yang berlaku. Update guidance documents/policies and/or risk management procedures in accordance with applicable governance and regulations.	TW I – TW II 1st Quarter-2nd Quarter
Kerangka Risiko & Kepatuhan Risk & Compliance Framework		
1	Pelaksanaan Asesmen *Risk Maturity Index* (RMI) Implementation of Risk Maturity Index (RMI) Assessment	TW III 3rd Quarter
2	Penyusunan Strategi Risiko dan Profil Risiko (Top Risk) 2025. Preparation of Risk Strategy and Risk Profile (Top Risk) in 2025.	TW III – TW IV 3rd Quarter-4th Quarter
3	Pendampingan penyusunan RKAP berbasis risiko. Assistance in preparing risk-based WP&B.	TW II – TW III 2nd Quarter-3rd Quarter

No	Program Kerja Work Plan	Waktu Pelaksanaan Time
Proses & Kontrol Risiko Process and Risk Control		
1	Melakukan penyusunan Profil Risiko Korporat dan Proyek Strategis serta updating KRI seluruh risiko korporat. Preparing Corporate Risk Profiles and Strategic Projects as well as updating KRI for all corporate risks.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
2	Penyusunan kajian risiko untuk mendukung keputusan strategis manajemen. Preparation of risk studies to support strategic management decisions.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
3	Monitoring tindak lanjut rekomendasi pengendalian risiko strategis. Monitoring the follow-up to strategic risk control recommendations.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
4	Monitoring pengendalian risiko operasional on site. Monitoring operational risk control on site.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
5	Pelaksanaan training/workshop kepada anggota tim BCP. Implementation of training/workshops for BCP team members.	TW II 2nd Quarter
6	Sosialisasi dan pendampingan simulasi BCM/BCP di area *supply chain* secara periodik. Periodic socialization and assistance with BCM/BCP simulations in the supply chain area.	TW II 2nd Quarter
7	Pendampingan pelaporan manajemen risiko di satuan kerja. Assistance with risk management reporting in work units.	TW II 2nd Quarter
8	Monitoring pengendalian risiko setiap triwulan sesuai jadwal. Monitoring risk control every quarter according to schedule.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
9	Evaluasi/ updating risk register satker dan korporat secara periodik. Periodically evaluate/update the working unit and corporate risk register.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
10	Pendampingan /fasilitasi penyusunan dokumen profil risiko korporat Anak Afiliasi Perusahaan. Assistance/facilitation in the preparation of corporate risk profile documents for the Company's Affiliated Subsidiaries.	TW I- TW IV 1st Quarter-4th Quarter
Model, Data & Teknologi Risiko Model, Risk Data & Technology		
1	Maintenance aplikasi ERMA. ERMA application maintenance	TW I- TW IV 1st Quarter-4th Quarter
2	Pengembangan ERMA untuk *dashboard, loss event management* dan kebutuhan lainnya. The development of ERMA for dashboard, loss event management, and other needs.	TW I- TW IV 1st Quarter-4th Quarter

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Manajemen Risiko

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran Perusahaan yang telah ditetapkan, Manajemen berkomitmen dalam implementasi manajemen risiko di Perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia secara periodik melakukan pembahasan dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pembahasan yang dilakukan di antaranya mengenai perkembangan isu-isu internal dan eksternal Perusahaan, risiko-risiko utama (*top risk*) yang dihadapi Perusahaan, baik pada level korporasi maupun proyek-proyek strategis Perusahaan, beserta mitigasi-mitigasi yang perlu dilakukan, serta rencana dan realisasi program kerja Manajemen Risiko.

Pada tahun 2023, secara umum Manajemen menilai sistem manajemen risiko di PTBA telah diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut di antaranya dibuktikan dengan diperolehnya berbagai penghargaan yang terkait dengan kematangan pengelolaan risiko di Perusahaan.

Statement of Board of Directors and/ or Board of Commissioners or Audit Committee on the Adequacy of Risk Management System

In order to achieve the Company's goals that have been set, the Management is committed to apply risk management in the Company. Board of Directors and Board of Commissioners through Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration & Human Capital Development Committee periodically hold discussions with Risk Management Work Unit. The discussions carried out included the development of the Company's internal and external issues, the top risks faced by the Company, both at corporate level and strategic projects, along with the mitigations, as well as Risk Management work program plans and realization.

In 2023, in general, the Management considers that the risk management system at PTBA has been implemented properly, this was shown by various awards received by PTBA related to the maturity of risk management in the Company.

Teknologi Informasi
Information Technology

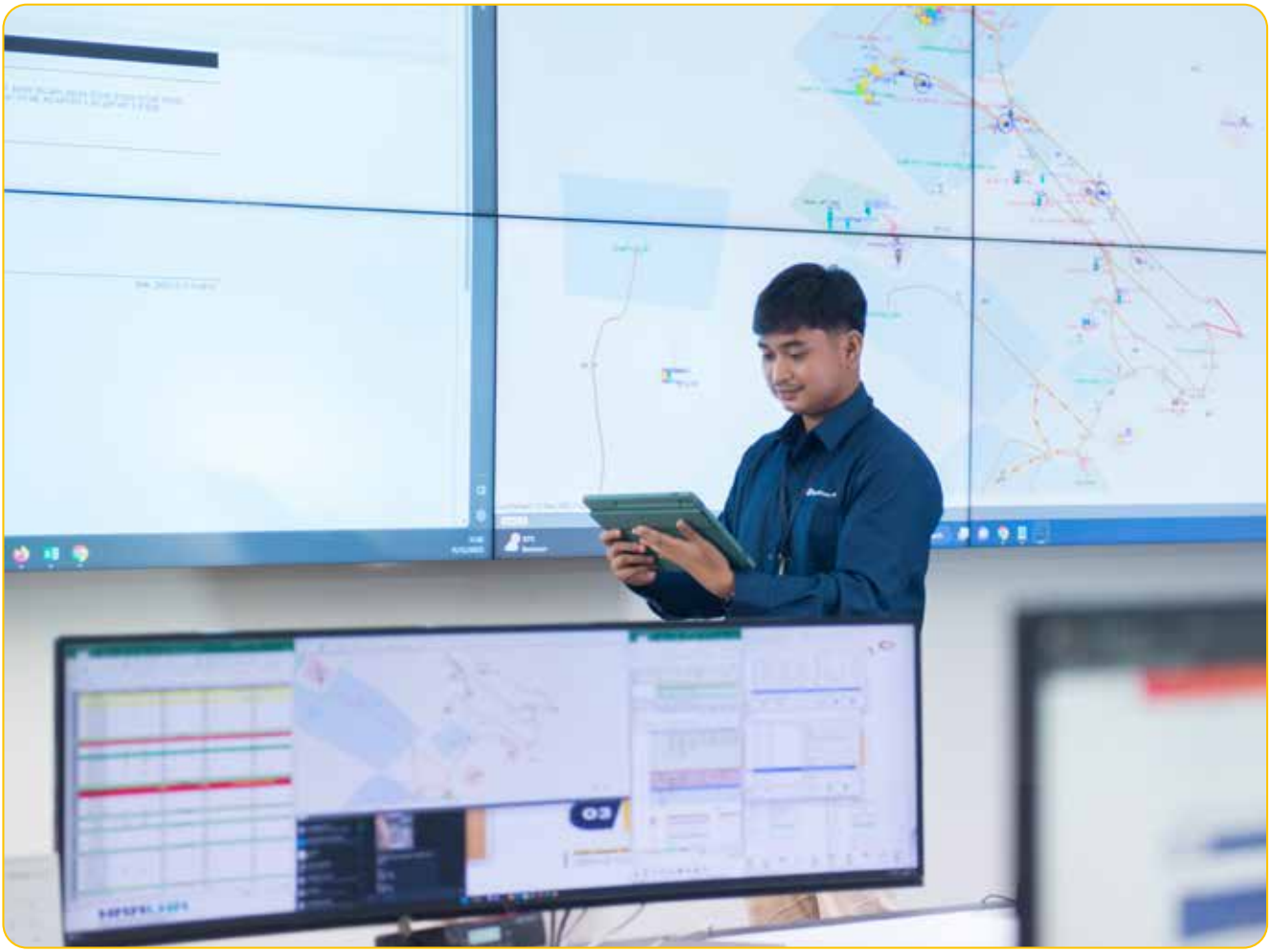

Teknologi Informasi (TI) merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan Perusahaan dalam usaha pertambangan yang terus berkembang. TI yang efektif, kompeten dan tepat akan mampu mendorong pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan dalam Perusahaan menjadi semakin efektif dan efisien, juga dapat memperkuat posisi kompetitif dalam proses bisnis yang cepat berubah. Keberadaan TI di Perusahaan juga digunakan dalam mendukung digitalisasi proses bisnis perusahaan.

Perusahaan senantiasa melibatkan teknologi terkini untuk dapat menjangkau aset-aset vital, meningkatkan efisiensi dan produksi, serta menekan serendah mungkin dampak buruk aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dalam setiap prosesnya, sehingga memudahkan dan mempercepat proses bisnis, terutama yang berkaitan dengan analisis data dan pelaporan dalam skala korporat.

Information Technology (IT) is one of the key aspects needed by the Company in the ever-growing mining business. Competent and accurate IT can encourage more effective and efficient management and decision-making within the Company, thereby strengthening its competitive position in rapidly changing business processes. This also applies when IT is used to support the development of resulting systems, namely e-commerce, e-business, or other business activities.

The company always involves the latest technology to reach vital assets, increase efficiency and production, and reduce as low as possible the negative impact of mining activities on the environment in every process, thereby facilitating and speeding up business processes, especially those related to data analysis and reporting on a corporate scale.

Kebijakan Strategis Pengelolaan dan Pengembangan TI

Dalam mendukung penerapan TI di Perusahaan, Bukit Asam telah menyusun dan menetapkan kebijakan strategis pengelolaan TI dengan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER- 2/MBU/03/2023, yang antara lain berisikan:

1. Penyelarasan program kerja TI dengan kebutuhan satuan kerja dan anak perusahaan;
2. Pembentukan IT *Shared Services* Unit untuk melayani satuan kerja dan anak perusahaan;
3. Optimalisasi teknologi informasi yang ada saat ini dalam sisi integrasi, fungsionalitas, dan tata kelola;
4. Transformasi *Digital Operational* untuk mendukung Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dalam pengembangan Industri 4.0;
5. Melakukan *Continuous Improvement* sebagai usaha atau upaya berkelanjutan untuk peluang perbaikan.

Satuan Kerja Teknologi Informasi

Satuan Kerja Teknologi Informasi adalah unit kerja yang akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengelolaan dan pengembangan TI di PTBA. Satuan kerja ini berada di Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko serta bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Satuan Kerja TI di PTBA memiliki peran untuk mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas serta meminimalisir risiko yang dihadapi perusahaan melalui simplifikasi, digitalisasi, integrasi, dan otomotisasi guna menciptakan nilai tambah di setiap aspek bisnis Perusahaan dan Anak/Afiliasi Perusahaan. Satuan Kerja Teknologi Informasi juga berperan sebagai mitra strategis serta mendukung transformasi pengembangan bisnis Perusahaan untuk menjadi Perusahaan Energi Kelas dunia yang Peduli Lingkungan.

IT Management and Strategic Policies Development

In supporting the implementation of IT in the Company, Bukit Asam has prepared and established strategic IT management policies by referring to SOEs Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, which contains:

1. Alignment of IT work programs with the needs of work units and subsidiaries;
2. Formation of an IT Shared Services Unit to serve work units and subsidiaries;
3. Optimizing existing information technology in terms of integration, functionality, and governance;
4. Digital Operational Transformation to support the Company's Long-Term Plan in the development of Industry 4.0;
5. Carry out Continuous Improvement as an ongoing business or effort for improvement opportunities.

Information Technology Work Unit

This work unit will be responsible for all IT Management and development activities in the PTBA. This work unit under the directorate of Finance and Risk Management which responsibility to Director of Finance and Risk Management.

The IT Work Unit at PTBA is responsible to increase productivity, efficiency and effectiveness as well as minimizing the risks faced by the company through simplification, digitalization, integration, and automation in order to create added value in every aspect of the Company's and the Company's Subsidiaries/Affiliates' business. The Information Technology Work Unit also acts as a strategic partner and supports the transformation of the Company's business development to become a world-class Energy Company that Cares about the Environment.

Struktur Satuan Kerja Teknologi Informasi
Structure of Information Technology Work Unit



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di perusahaan, Satuan Kerja TI menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dengan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujud dan terlaksananya secara konsisten budaya dan sikap kerja yang baik di Perusahaan yang berpedoman pada kaidah-kaidah Tata Kelola Korporasi yang baik (Good Corporate Governance) dan Tata Kelola TI yang baik (IT Governance).
2. Agar setiap praktik yang berhubungan dengan penggunaan/pemanfaatan Teknologi Informasi mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
3. Agar pelaksanaan Teknologi Informasi dilakukan secara efesien, efektif, transparan, adil, wajar, dan akuntabel untuk mendukung proses bisnis PT Bukit Asam Tbk.
4. Terwujudnya operasional Teknologi Informasi yang efesien dan efektif.
5. Menetapkan prosedur yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan Teknologi Informasi dengan cepat dan tepat.

Visi dan Misi

Visi

Teknologi informasi berperan sebagai mitra strategis dan mendukung transformasi pengembangan bisnis Perusahaan untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.

Misi

1. Penyelarasan program kerja TI dengan kebutuhan Satuan Kerja
2. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi proses bisnis perusahaan melalui digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi operasional dan informasi.
3. Menetapkan fungsi IT Shared Service untuk melayani Satuan Kerja dan Anak Afiliasi Perusahaan (AAP)
4. Melakukan peningkatan dan optimalisasi Arsitektur Teknolgi Informasi berupa solusi bisnis (aplikasi/ digitalisasi), infrastruktur dan jaringan serta keamanan dan tata kelola.

In carrying out its duties and functions in the company, the IT Work Unit implements Good Corporate Governance (GCG) as regulated in the Minister of SOEs Regulation Number PER-02/ MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises with the aim of as following:

1. The realization and consistent implementation of a good work culture and attitude in the Company which is guided by the principles of Good Corporate Governance and good IT Governance.
2. Every practice related to the use/utilization of Information Technology must follow established procedures.
3. The implementation of Information Technology must be carried out efficiently, effectively, transparently, fairly, and accountably to support the business processes of PT Bukit Asam Tbk.
4. Realization of efficient and effective Information Technology operations.
5. Establish appropriate procedures to resolve Information Technology problems quickly and precisely.

Vision and mission

Vision

Information Technology works as a strategic partner and supports the transformation of the Company's business development to become a world-class energy company that cares about the environment.

Mission

1. Alignment of IT work programs with Work Unit needs.
2. Increase the effectiveness and efficiency of the company's business processes through digitalization by utilizing operational and information technology.
3. Determine the IT Shared Service function to serve The Company's Affiliated Subsidiaries, Sub Subsidiaries, and Work Units (AAP).
4. Improve and optimize the Information Technology Architecture in the form of business solutions (applications/ digitization), infrastructure and networks as well as security and governance.



Program Strategis Tahun 2023
Strategic Program in 2023

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

STRATEGI STRATEGY	TARGET
Upgrade Microsoft Infrastructure	Triwulan 4 Quarter 4
Pembangunan Tower Jaringan Network Tower Construction	Triwulan 4 Quarter 4
Replacement Core Switch	Triwulan 4 Quarter 4
Refreshment Storage and Storage CCTV	Triwulan 4 Quarter 4
Managed Network Service	Triwulan 2 Quarter 2

PENGEMBANGAN DAN LAYANAN APLIKASI
APPLICATION DEVELOPMENT AND SERVICES

STRATEGI STRATEGY	TARGET
Enhancement CISEA Apps Existing	Triwulan 4 Quarter 4
CISEA New Apps Development	Triwulan 4 Quarter 4
Automatic Data Feeder	Triwulan 4 Quarter 4
Middleware Tools Integration	Triwulan 4 Quarter 4
Assessment Pre-Implementation SAP	Triwulan 2 Quarter 2
Business Analytics Development	Triwulan 4 Quarter 4

TATA KELOLA TI
IT GORVERNANCE

STRATEGI	TARGET
Pelaksanaan IT Awareness Pelaksanaan IT Awareness	Triwulan 2 & Triwulan 4 Quarter 2 & Quarter 4
IT Maturity Assessment	Triwulan 4 Quarter 4
Pelaksanaan Simulasi Table Top DRP Implementation of Table Top DRP Simulation	Triwulan 2 & Triwulan 4 Quarter 2 & Quarter 4

Tata Kelola TI

PTBA berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) di Perusahaan secara konsisten. Melalui penerapan Tata Kelola diharapkan aktivitas TI di Perusahaan dapat berjalan maksimal dalam mendukung pencapaian Perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan operasional, permasalahan terkait TI juga menjadi salah satu risiko yang dihadapi oleh Perusahaan, diantaranya permasalahan berkaitan dengan penanganan gangguan (*disruption*), keamanan siber (*cyber security*), dan pemulihan bencana (*disaster recovery*). Adapun penanganan yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Penanganan Gangguan (*Disruption*)
   Penanganan gangguan di PTBA menerapkan *service desk* untuk menyediakan bantuan terkait teknologi informasi bagi seluruh satuan kerja meliputi identifikasi masalah, pencatatan/logging, manajemen insiden/masalah, serta evaluasi dan *reporting*. Semua keluhan user berkaitan dengan gangguan layanan TI akan dilaporkan melalui service desk untuk dicatat, dieskalasi ke masing-masing PIC/ spesialis/administrator untuk ditindaklanjuti sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*) yang telah disepakati.

IT Governance

PTBA is committed to consistently implement Information Technology (IT) Governance in the Company. With IT Governance, IT activities at the Company are expected to run optimally in supporting the Company's achievements. In carrying out operational activities, IT-related problems are also one of the risks faced by the Company, including problems related to handling disruptions, cyber security and disaster recovery. The company's handling of this problem is as follows:

1. Disruptions Handling
   Handling disruptions at PTBA involves implementing a service desk to provide assistance related to information technology for all work units, including problem identification, logging, incident/problem management, as well as evaluation and reporting. All user complaints related to IT service disruptions will be reported through the service desk for logging, escalated to respective PICs/ specialists/administrators for follow-up according to the agreed Service Level Agreement (SLA).

2. Keamanan Siber (Cyber Security)
   Untuk memastikan keamanan siber (*cyber security*) seluruh infrastruktur jaringan PTBA telah dilengkapi dengan teknologi yang canggih untuk mendeteksi serta mencegah terjadinya serangan siber dijaringan PTBA dan terpantau dalam teknologi SIEM (*Security Information and Event Management*), selain itu PTBA juga rutin melakukan *vulnerability assessment and penetration testing* untuk mencari potensi celah keamanan serta cara untuk mengatasi celah keamanan tersebut.

3. Pemulihan Bencana
   Untuk menunjang ketersediaan (*availability*) dan keberlangsungan (*continuity*) layanan TI, Satuan kerja TI telah mengimplementasikan IT *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang merupakan bagian dari BCMS sebagai pedoman untuk dapat secara efektif menjaga keberlangsungan layanan TI penunjang proses bisnis kritikal pada kondisi bencana.

Terhadap permasalahan Risiko TI yang akan dihadapi, Perusahaan telah melakukan upaya penanganan dengan cara melakukan identifikasi terhadap risiko utama dan selanjutnya melakukan pengelolaan terhadap risiko yang telah diidentifikasi melalui tindakan-tindakan mitigasi guna menghilangkan atau meminimalisir risiko yang akan terjadi. Keseluruhan proses Tata Kelola TI termasuk penanganan atas permasalahan yang dihadapi, secara berkala dilaporkan kepada Direksi untuk dimonitor dan dievaluasi.

2. Cyber Security
   To ensure cybersecurity, PTBA has equipped its entire network infrastructure with advanced technologies to detect and prevent cyber attacks. This infrastructure is monitored through Security Information and Event Management (SIEM) technology. In addition, PTBA regularly conducts vulnerability assessments and penetration testing to identify potential security loopholes and methods to address them.

3. Disaster Recovery
   To support the availability and continuity of IT services, the IT work unit has implemented an IT Disaster Recovery Plan (DRP) as part of the Business Continuity Management System (BCMS). This plan serves as a guideline to effectively maintain the continuity of IT services supporting critical business processes during disaster conditions.

Regarding the IT problems faced, the Company continues to handle it by identifying the main risks, then managing the risks through mitigation actions to eliminate or minimize the risks. The entire IT Governance process, including problems troubleshooting, is regularly reported to the Board of Directors for monitoring and evaluation.

Corporate Information System and Enterprise Application (CISEA)



CISEA adalah singkatan dari Corporate Information System and Enterprise Application merupakan Super-Apps milik PTBA yang dikembangkan secara mandiri untuk mendukung produktifitas dalam melakukan aktivitas proses bisnis yang terintegrasi dengan semua komponen penyusunnya seperti informasi seputar ke-SDM-an, *supply chain management*, finansial, hingga informasi pribadi pegawai. Melalui aplikasi ini, user juga dapat mengakses informasi yang terupdate seputar PTBA. Dengan desain antarmuka yang menarik yang akan memanjakan user aplikasi ketika menggunakan aplikasi ini.

Terdapat 5 Modul utama yang berisi banyak menu/aplikasi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan hak akses masing-masing pegawai. Aplikasi CISEA tersedia dalam bentuk *web-application* juga dalam bentuk mobile application berbasis android maupun ios.

1. **Cisea-Executive Support**
   Pada modul ini hanya terdapat satu modul aplikasi yaitu modul EIS (Executive Information System) yang menampilkan data Produksi, Angkutan, Penjualan, Keuangan dan SDM secara realtime untuk membantu para executive dalam pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

2. **Cisea-Human Capital**
   Kategori Cisea terkait human capital memiliki sebanyak 23 modul aplikasi. Adapun beberapa modul utama pada kategori ini antara lain:

   a. **Absensi**: Modul yang digunakan oleh seluruh pegawai PTBA untuk absensi digital dengan penggunaan deteksi lokasi dan upload gambar sebagai evidence.
   b. **SPBA (Serikat Pekerja Bukit Asam)**: modul yang digunakan untuk mengakses informasi seputar kegiatan serika pegawai serta berdiskusi.
   c. **B-Pedia (Bukit Asam Pedia**): modul yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai PTBA untuk mengakses informasi dan pengetahuan seputar kesumberdayaan manusia dalam perusahaan berbentuk artikel serta ruang diskusi.
   d. **MCU (Medical Check Up):** modul yang digunakan oleh seluruh pegawai untuk digitalisasi pelaksanaan MCU bagi pegawai dan keluarga seperti penjadwalan dan akses hasil pemeriksaan.

3. **Cisea-Supply Chain**
   Kategori Cisea terkait rantai pasokan memiliki sebanyak 25 modul aplikasi. Adapun beberapa modul utama pada kategori ini antara lain:
   a. **MAPO (Map Operation)**: modul yang digunakan untuk monitoring kondisi operasional aktivitas penambangan dan alat penunjang tambang secara real time melalui tampilan map.

CISEA stands for Corporate Information System and Enterprise Application, which is a Super-App owned by PTBA developed internally to support productivity in conducting integrated business process activities with all of its constituent components, including information related to human capital, supply chain management, financials, and employee personal information. Through this application, users can also access updated information about PTBA. It features an attractive interface design to enhance user experience.

There are 5 main modules containing numerous menus/ applications that can be used according to the needs and access rights of each employee. The CISEA application is available in the form of a web application as well as a mobile application for both Android and iOS platforms.

1. **Cisea-Executive Support**
   This module consists of one application module: the Executive Information System (EIS), which displays real-time data on Production, Transportation, Sales, Finance, and HC to assist executives in making quick and accurate decisions.

2. **Cisea-Human Capital**
   The Human Capital category in Cisea includes a total of 23 application modules. Some of the main modules in this category are:

   a. **Attendance:** Used by all PTBA employees for digital attendance, with location detection and image upload as evidence.
   b. **SPBA (Bukit Asam Workers Union):** Used to access information about employee union activities and discussions.
   c. **B-Pedia (Bukit Asam Pedia):** Available to all PTBA employees for accessing information and knowledge about human resources within the company in the form of articles and discussion rooms.
   d. **MCU (Medical Check-Up):** Used by all employees for digitizing the implementation of medical check-ups for employees and their families, including scheduling and accessing examination results.

3. **Cisea-Supply Chain**
   The Supply Chain category in Cisea includes a total of 25 application modules. Some of the main modules in this category are:
   a. **MAPO (Map Operation):** Used for monitoring the operational conditions of mining activities and supporting mining equipment in real-time through map displays.

b. **SHE (Safety, Helath, and Environment) News**: modul untuk akses informasi terupdate seputaran K3 di PTBA.

c. **Angkutan KA**: modul yang digunakan untuk reporting dan monitoring proses pengangkutan batu bara, mulai dari pengisian, pembongkaran, dan monitoring integrasi dengan kereta api batu bara KAI.

d. **EPA (Equipment Performance Analysis)**: modul yang digunakan untuk reporting dan monitoring performa seluruh jenis perlatan penambangan mencakup jam jalan, hambatan, dan ritase yang dilaporkan setiap *shift*.

4. **Cisea-Finance & Accounting**
   Kategori Cisea terkait keuangan dan akuntasi memiliki sebanyak 7 modul aplikasi. Adapun beberapa modul utama pada kategori ini antara lain:
   a. **Budgeting**: modul yang digunakan oleh seluruh satuan kerja di PTBA untuk melakukan pengajuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) mencakup biaya umum dan biaya investasi.
   b. **Royalty**: modul untuk pengelolaan proses pembayaran royalti batu bara mencakup pengajuan draft pembayaran, perhitungan besaran *royalty*, penerbitan sertfikat, dan upload bukti pembayaran *royalty*.

5. **Cisea-Corporate Services**
   Kategori Cisea terkait corporate services memiliki sebanyak 21 modul aplikasi. Adapun beberapa modul utama pada kategori ini antara lain:
   a. **SPEND**: modul untuk mendukung proses bisnis pengadaan mencakup vendor management
   b. **AMS (Audit Management System)**: modul manajemen sistem audit yang ada di PTBA mencakup perencanaan, pelaksanaan audit, pemeriksaan, dan laporan akhir.
   c. **CISEA Care**: modul yang dapat digunakan oleh seluruh ppegawai PTBA sebagai *one-stop-services* dalam pengajuan layanan umum, layanan satuan pengawasan internal, layanan manajemen risiko, dan layanan optimasi operasi produksi.
   d. **ERMA (Enterprise Risk Management**): modul yang digunakan untuk melapor dan memonitor pengelolaan risiko oleh setiap satuan kerja di PTBA.
   e. **GCG (Good Corporate Governance)**: modul untuk internalisasi prinsip-prinsip GCG kepada seluruh pegawai PTBA mencakup informasi sosialisasi dan capaian GCG serta *code of conduct* pegawai.

b. SHE (Safety, Health, and Environment) News: This module provides access to updated information regarding Occupational Health and Safety (OHS) at PTBA.

c. Railway Transportation: This module is used for reporting and monitoring the coal transportation process, including loading, unloading, and integration monitoring with the Indonesian State Railway's coal trains.

d. EPA (Equipment Performance Analysis): This module is used for reporting and monitoring the performance of all types of mining equipment, including operating hours, downtime, and haulage reported every shift.

4. Cisea-Finance & Accounting
The Finance and Accounting category in Cisea includes a total of 7 application modules. Some of the main modules in this category are:
a. **Budgeting:** Used by all units in PTBA to submit the Company Budget Work Plan (WP&B), covering general and investment costs.

b. **Royalty:** Manages the coal royalty payment process, including draft payment submission, royalty calculation, certificate issuance, and royalty payment evidence upload.

5. Cisea-Corporate Services
The Corporate Services category in Cisea includes a total of 21 application modules. Some of the main modules in this category are:
a. **SPEND**: Supports procurement business processes, including vendor management.
b. **AMS (Audit Management System):** Manages the audit system at PTBA, including planning, audit execution, inspection, and final reporting.
c. **CISEA Care:** Can be used by all PTBA employees as a one-stop-service for general services, internal audit services, risk management services, and production operation optimization services.

d. **ERMA (Enterprise Risk Management):** Used to report and monitor risk management by each unit in PTBA.

e. **GCG (Good Corporate Governance):** A module for internalizing GCG principles to all PTBA employees, including information dissemination, GCG achievements, and employee code of conduct.

Digitalisasi Proses Pertambangan Secara Berkesinambungan
Continuous Digitalization of Mining Processes

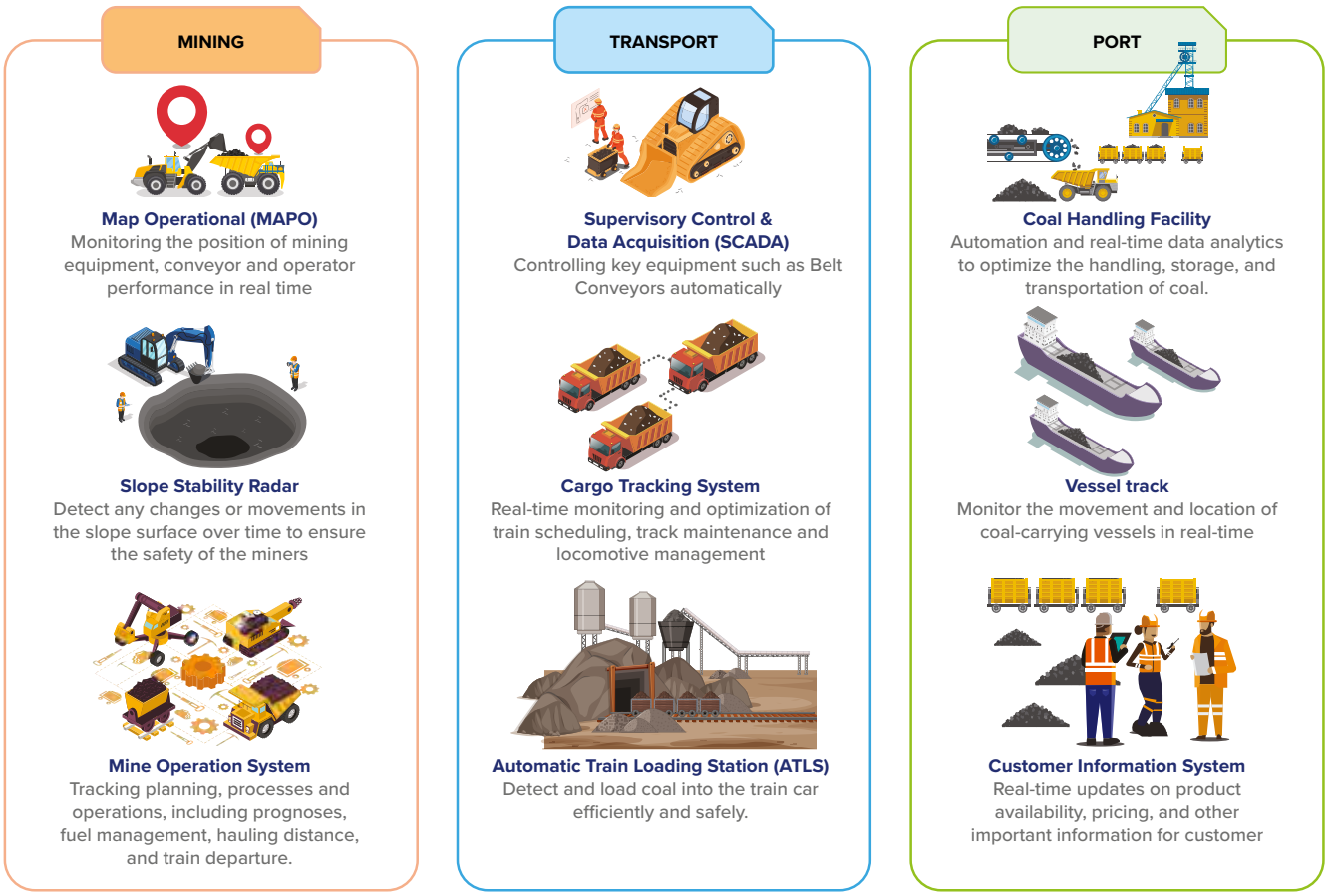

PTBA mengadopsi teknologi terkini dan mengintegrasikan antara *operation technology* (OT) dengan *information technology* (IT) dalam satu platform yaitu CISEA. Pemanfaatan OT dalam menunjang operasional tambang dari hulu ke hilir terdiri dari modul MAPO (*Map Operational*), *Slope Stability Radar,* dan *Mine Operation System* pada proses penambangan batu bara, lalu dengan modul SCADA (*Supervisory Control & Data Acquisition*), *Cargo Tracking System,* dan Automatic Loading Station untuk transportasi angkutan, serta modul *Coal Handling Facility, Vessel Track,* dan *Customer Information System* untuk proses bisnis batu bara yang terdapat di dermaga dan pelabuhan PTBA.

Pengembangan Kompetensi SDM TI

Satuan Kerja Teknologi Informasi berkomitmen untuk senantiasa memberikan manfaat yang maksimal dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Perusahaan. Untuk menunjang hal tersebut, Perusahaan juga turut meningkatkan kualitas SDM Satuan Kerja Teknologi Informasi dengan mengikutsertakan pada program pengembangan kompetensi. Di mana program tersebut berupa pelatihan yang bersifat teknis maupun untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait perkembangan teknologi terkini.

PTBA adopts the latest technology and integrates Operation Technology (OT) with Information Technology (IT) into a single platform called CISEA. The utilization of OT supports mining operations from upstream to downstream, consisting of modules such as MAPO (Map Operational), Slope Stability Radar, and Mine Operation System for coal mining processes. Additionally, OT modules include SCADA (Supervisory Control & Data Acquisition), Cargo Tracking System, and Automatic Loading Station for transportation logistics. Furthermore, modules like Coal Handling Facility, Vessel Track, and Customer Information System are utilized for coal business processes at PTBA's docks and ports.

IT HC Competency Development

The Information Technology Work Unit is committed to provide maximum benefits in supporting the achievement of the Company's Vision and Mission. To support this, the Company improves the quality of HC in the Information Technology Work Unit by participating in competency development programs in the form of technical training as well as to increase knowledge and insight regarding the latest technological developments.

Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh SDM Satuan Kerja Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Data Scientist
2. *Product Management*
3. *Business Intelligent*
4. *ESTIM Enterprise Architechture*
5. *Awareness ISO 20000*
6. *Awareness ISO 27000*
7. *Pentaho Data Integration Training*
8. *Information Security Advance*
9. *Border Gateway Protocol (BGP) Advance*

The competency development programs participated in by the HC Information Technology Work Unit are as follows:

1. Data Scientist
2. Product Management
3. Business Intelligence
4. ESTIM Enterprise Architecture
5. ISO 20000 awareness
6. ISO 27000 awareness
7. Pentaho Data Integration Training
8. Information Security Advance
9. Border Gateway Protocol (BGP) Advanced

Investasi Pengelolaan dan Pengembangan TI

PTBA menyadari bahwa optimalisasi pemanfaatan TI dapat membawa Perusahaan mencapai akselerasi perkembangan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Maka dari itu, Perusahaan senantiasa melakukan investasi di bidang TI, sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan teknologi untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efektif, efisien, dan produktif.

Di tahun 2023, Perusahaan telah menganggarkan investasi di bidang TI sebesar Rp11.648.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp11.375.000.000,- atau mencapai 98% dari anggaran yang telah ditetapkan Perusahaan.

IT Management and Development Investment

PTBA understands that optimizing IT utilization can help the Company to achieve accelerated development and sustainable business growth. Therefore, the Company continues to invest in the IT sector, as a form of the Company's commitment to managing and developing technology to create more effective, efficient, and productive business processes.

In 2023, the Company has budgeted investment in the IT sector of Rp11.648.000.000,- with a realization of Rp11.375.000.000,- or reaching 86% of the budget set by the Company.

Realisasi Biaya Investasi Pengembangan TI Tahun 2023
Realization of IT Development Investment Costs in 2023

No	Uraian Description	Biaya Cost
1	Pembangunan Tower Jaringan Data Construction of Data Network Tower	1.203.000.000
2	Refreshment Core Switch Hub	1.318.000.000
3	Pembangunan Display Monitoring Informasi Development of Information Monitoring Displays	3.961.000.000
4	Middleware Data Integration Middleware Data Integration	3.975.000.000
5	Pembangunan Interactive Monitoring Meeting Room Development of Interactive Monitoring Meeting Room	900.000.000

Pencapaian Tata Kelola TI di Tahun 2023

Salah satu bentuk keberhasilan Perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan TI adalah dengan diperolehnya berbagai penghargaan di bidang TI. Di tahun 2023, Perusahaan berhasil memperoleh penghargaan di bidang TI, yakni sebagai berikut:

IT Governance Achievements in 2023

One form of the Company's success in managing and developing IT is by obtaining various awards in the IT field. In 2023, the Company succeeded in receiving awards in the IT sector, namely as follows:

No	Jenis Penghargaan Type of Award	Diberikan Oleh Awarded by	Tahun Year
1	Top Digital Implementation – Level 5 Star	Top Digital Awards	2023
2	Top Leader on Digital Implementation	Top Digital Awards	2023
3	Golden Star – Trophy (Three Times Consecutive Win Level 5 Star)	Top Digital Awards	2023
4	Best Overall Indonesia Innovation and Achievement 2023 (Mining Industry)	Business Asia Indonesia	2023
5	Best Digital Technology and IOT Implementation 2023 (Mining Industry)	Business Asia Indonesia	2023
6	Best CEO Indonesia Digital Innovation and Achievement of The Year 2023	Business Asia Indonesia	2023
7	Best Senior Executive Indonesia Innovation and Achievement of The Year 2023	Business Asia Indonesia	2023

Rencana Pengembangan TI ke Depan
Future IT Development Plans

		2023	2024	2025
PT BUKIT ASAM	Analytics	• Implementation of BATIC through data integration from all PTBA Members	• BATIC enhancement with What-If scenario and predictive analysis	• Integrating external information and self-learning autonomous operations trough Artificial Intelligence
	CISEA	• CISEA Facelift Assessment	• CISEA Facelift Implementation (Phase 1) • CISEA Integration with SAP	• CISEA Facelift Implementation (Phase 2) • CISEA Integration with SAP
	ERP	• SAP Assessment	• SAP Implementation (Phase 1)	• SAP Implementation (Phase 2)
	Operation Technology	• Fleet Tracking Management System • Mine Water Pump Automation System	• Super Map Implementation	• Autonomous Mine Operations
	Infrastructure	• LTE Network (signal coverage) on Mining Area Assessment	• LTE Network (signal coverage) on Mining Implementation	
	Digital Mining Strategy			
	• IT & Data Governance • Enterprise Architecture • Developmnet, Security, Operation (DevSecOp) • Private & Hybrid Cloud • Managed Cyber Security Services • IT Infrastructure Automation			

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Pada tahun 2023, PTBA tidak memiliki kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja ataupun program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/ atau manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (*Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program*). Namun demikian, perusahaan melakukan investasi sumber daya manusia dengan memberikan beasiswa tugas belajar kepada pegawai perusahaan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM PTBA. Pegawai yang telah menjalani tugas belajar wajib kembali bekerja kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam kontrak tugas belajar.

Performance Based Long-Term Compensation Policy

In 2023, PTBA did not have a policy of providing long-term performance-based compensation or a stock ownership program by employees and/or management implemented by the company (Employee Stock Ownership Program/ Management Stock Ownership Program). However, the Company invests to human capital by granted scholarship for the employees, this aims to enrich the quality of PTBA's human capital. The employees who got scholarship from the company and have graduated are required to work at the Company in accordance with the duration mentioned in the contract.

Perkara Hukum
Lawsuit

Selama tahun 2023, terdapat beberapa perkara penting berkenaan dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan:

In 2023, there were several important cases related to legal issues faced by the Company:

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
State Administrative and Civil Cases

No	Perkara/Kasus Case	Keterangan Singkat Brief Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company	Konsultan Hukum Law Consultant
1.	Perkara TUN No. 152/G/2022/PTUN. PLG Tanggal 14 April 2022	Gugatan pembatalan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 64 Tanggal 10 Juni 2021 surat ukur nomor 1134/Perajen/2021 tanggal 10 Juni 2021 seluas 31.22 Ha atas nama PTBA yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. **Penggugat :** Fajar Firmansyah, SH., Mkn **Tergugat :** Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin **Tergugat II Intervensi :** PT Bukit Asam Tbk Putusan pada tingkat pertama : (13 Oktober 2022) **Dalam Eksepsi :** Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi unuk seluruhnya **Dalam Pokok Perkara :** • Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.368.000,- **Putusan pada tingkat banding : (16 Maret 2023)** • Menerima permohonan Banding dari Pembanding dahulu sebagai Penggugat; • Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 152/G/2022/PTUN.PLG tanggal 13 Oktober 2022 yang dimohonkan banding.	Dalam hal PTBA kalah, PTBA dapat kehilangan hak penguasaannya dan pemanfaatan atas lahan yang dimiliki Status perkara saat ini : Pada 2 November 2023 telah terbit Putusan Kasasi pada amarnya telah mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 12/B/2023/PT.TUN-PLG tanggal 17 Maret 2023.	Muhajir Sodruddin & Partners
	State Administration Case Number 152/G/2022/PTUN/ PLG dated April 14, 2022	Lawsuit for cancellation of Building Use Rights Certificate Number 64 dated June 10, 2021, measuring letter number 1134/Perajen/2021 dated June 10, 2021, covering an area of 31.22 Ha in the name of PTBA issued by the Banyuasin District Land Office. **Plaintiff:** Fajar Firmansyah, SH., Mkn **Defendant:** The Head of the Banyuasin District Land Office **Defendant II intervened:** PT Bukit Asam Tbk Decision at first instance: (October 13, 2022) **In Exception:** Reject the exception of the Defendant and Defendant II's intervention in its entirety **In the main case:** • Reject the Plaintiff's lawsuit in its entirety • Sentenced the Plaintiff to pay court costs amounting to Rp1,368,000,- **Decision on appeal: (March 16, 2023)** • Accept the appeal request from the Appellant first as Plaintiff; • Cancel the decision of the Palembang State Administrative Court Number 152/G/2022/PTUN.PLG dated October 13, 2022, which is being appealed.	In the event that PTBA loses, PTBA may lose its control rights and use of the land it owns. Current case status: On November 2 2023, the Cassation Decision was issued, in its ruling granting the cassation petition from the Cassation Petitioner I and the Cassation Petitioner II, and canceling the Decision of the Palembang State Administrative High Court with Decision Number 12/B/2023/PT.TUN-PLG dated March 17 2023.	Muhajir Sodruddin & Partners

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
State Administrative and Civil Cases

No	Perkara/Kasus Case	Keterangan Singkat Brief Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company	Konsultan Hukum Law Consultant
2.	Perkara Perdata No. 13/Pdt.G/2022/PN.Mre Tanggal 25 April 2022	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembebasan lahan yang dilakukan oleh PTBA dari Okta Ipriadi pada lahan yang berlokasi di Ataran Tebing Ajan, Desa Penyandingan, yang diklaim oleh Romili sebagai haknya. **Penggugat :** Romili **Tergugat :** PT Bukit Asam Tbk **Turut Tergugat :** Okta Ipriadi Putusan tingkat pertama : (28 November 2022) **Dalam Eksepsi :** Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya **Dalam Pokok Perkara :** • Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; • Menyatakan Surat Keterangan Pembelian Kebun Atas Tanah tertanggal 19 Juli 1999 yang ditandatangani saksi-saksi batas tanah seluas ± 0,5 Ha (Panjang ± 100 M dan Lebar ± 50 M) sah milik Penggugat • Menyatakan sebidang tanah a quo yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat sebagai mana Surat Keterangan Pembelian Kebun tertanggal 19 Juli 1999 seluas lebih kurang 2.990,79 M2 adalah hak milik Penggugat • Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah melakukan pembebasan/ ganti rugi dan menguasai tanah a quo milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) • Menyatakan seluruh surat-surat yang telah dibuat oleh Para Tergugat atas tanah a quo tersebut adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM • Menghukum Para Tergugat mengembalikan sebidang tanah a quo milik Penggugat tersebut kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun • Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai memenuhi keputusan ini terhitung mulai putusan diucapkan hingga dilaksanakan • Menghukum Para Tergugat untuk untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah • Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Putusan tingkat banding : (02 Februari 2023) • Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut; • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 13/Pdt.G/ 2022/ PN Mre tanggal 28 November 2022; • Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah.	Dalam hal PTBA kalah, PTBA dapat kehilangan hak penguasaannya dan pemanfaatan atas lahan yang dimiliki Status perkara saat ini : Telah ditetapkan putusan kasasi pada perkara dimaksud, dimana putusan kasasinya menguatkan putusan tingkat pertama dan putusan banding.	Hardiansyah & Partners
	Civil Case Number 13/ Pdt.G/2022/PN.Mre Date April 25, 2022	Lawsuit for Unlawful Actions against land acquisition carried out by PTBA from Okta Ipriadi on land located in Ataran Tebing Ajan, Penyandingan Village, which Romili claims as his right. **Plaintiff:** Romili **Defendant:** PT Bukit Asam Tbk **Co Defendant:** Okta Ipriadi First instance ruling: (November 28, 2022) **In Exception:** Reject the Defendant's exception in its entirety **In the main case:** • Granted the Plaintiff's lawsuit in part; • Declare that the Land Plantation Purchase Certificate dated July 19, 1999, signed by witnesses, has a land area of ± 0.5 Ha (Length ± 100 M and Width ± 50 M) as legally belonging to the Plaintiff. • Declare that the plot of land a quo which is part of the land owned by the Plaintiff as stated in the Garden Purchase Certificate dated July 19, 1999, covering an area of approximately 2,990.79 M2 is the property of the Plaintiff	In the event that PTBA loses, PTBA may lose its control rights and use of the land it owns. Current case status: The cassation decision has been determined in the case in question, where the cassation decision confirms the first instance decision and the appeal decision.	Hardiansyah & Partners

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
State Administrative and Civil Cases

No	Perkara/Kasus Case	Keterangan Singkat Brief Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company	Konsultan Hukum Law Consultant
		• Declare that the actions of the Defendants in carrying out release/ compensation and controlling the a quo land belonging to the Plaintiff is an Unlawful Act (PMH) • Declare that all documents made by the Defendants regarding the a quo land are INVALID and VOID BY LAW • Punish the Defendants to return the plot of land a quo belonging to the Plaintiff to the Plaintiff voluntarily without any conditions • Sentencing the Defendants to pay forced money (dwangsom) to the Plaintiff amounting to Rp300,000.00 (three hundred thousand rupiah) every day, if they fail to comply with this decision starting from the time the decision is pronounced until it is implemented • Sentenced the Defendants to pay court costs which to date have been set at Rp2.390.000.00 (two million three hundred and ninety thousand rupiah) • Reject the plaintiff's claim other than that. **Appeal level decision: (February 02, 2023)** • Accept the appeal request from the original Appellant, the Defendant; • Strengthening the decision of the Muara Enim District Court Number 13/Pdt.G/ 2022/ PN Mre dated November 28, 2022; • Sentenced the Appellant, the original Defendant, to pay court costs at both levels of court, which at the appeal level was set at Rp150,000.00 (one hundred and fifty thousand rupiah)		
3.	Perkara Perdata No. 20/Pdt.G/2022/ PN Mre Tanggal 03 Agustus 2022	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembebasan lahan yang dilakukan oleh PTBA dari Syamsul Komar pada lahan yang berlokasi di Ataran Tambak, Desa Penyandingan, yang diklaim H. Najamuddin sebagai haknya. **Penggugat :** H. Nadjamudin Hanap **Tergugat I :** PT Bukit Asam Tbk **Tergugat II :** Syamsul Komar **Turut Tergugat I :** Surahman **Turut Tergugat II :** Suhardi, SH.,MKn Putusan tingkat pertama : (29 Maret 2023) **Dalam Eksepsi :** Menerima Eksepsi Tergugat I **Dalam Pokok Perkara :** • Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.410.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah); • Putusan tingkat banding : (08 Juni 2023) • Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 20/ Pdt.G/2022/PN.Mre tanggal 29 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut • Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000,-	Dalam hal PTBA kalah, PTBA dapat kehilangan hak penguasaannya dan pemanfaatan atas lahan yang dimiliki Status perkara saat ini : Sudah ada putusan tingkat Banding pada tanggal 08 Juni 2023.	Hardiansyah & Partner
	Civil Case Number 20/Pdt.G/2022/PN Mre Date August 3, 2022	Lawsuit for Unlawful Actions against land acquisition carried out by PTBA from Syamsul Komar on land located in Ataran Tambak, Penyandingan Village, which H. Najamuddin claims as his right. **Plaintiff:** H. Nadjamudin Hanap **Defendant I:** PT Bukit Asam Tbk **Defendant II:** Syamsul Komar **Co Defendant:** Surahman **Co Defendant:** Suhardi, SH., MKn First instance decision: (March 29, 2023) **In Exception:** Accepting Defendant I's Exception	In the event that PTBA loses, PTBA may lose its control rights and use of the land it owns. Current case status: There has been a decision at the appeal level on June 8, 2023.	Hardiansyah & Partner

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
State Administrative and Civil Cases

No	Perkara/Kasus Case	Keterangan Singkat Brief Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company	Konsultan Hukum Law Consultant
		In the main case: • Declaring the Plaintiff's claim unacceptable (niet ontvankelijke verklaard); • Sentenced the Plaintiff to pay court costs amounting to Rp3,410,000.00 (Three Million Four Hundred and Ten Thousand Rupiah); Appeal level decision: (June 8, 2023) • Received an appeal request from the original Appellant, Plaintiff • Strengthened the decision of the Muara Enim District Court Number 20/Pdt.G/2022/PN.Mre dated March 29, 2023, which is requested to be appealed • Sentenced the Appellant, the original Plaintiff, to pay court costs at both levels of court, the appeal level of which was set at Rp150,000,000,-		
4.	Perkara Perdata No. 9/Pdt.G/2023/PN.Mre Tanggal 29 Maret 2023	Gugatan perbuatan Melawan Hukum terkait klaim warga desa Tanjung Agung atas tanah Tergugat I yang berlokasi di Desa Tanjung Agung yang berada dalam HGU No. 1 Tanggal 14 Mei 1994 seluas 1411,4 Ha **Penggugat :** Ude Indayadi, SH (Kades Tanjung Agung) **Tergugat I :** PT Bumi Sawindo Permai **Tergugat II :** PT Bukit Asam Tbk **Turut Tergugat :** Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim	Dalam hal PTBA kalah maka akan berdampak pada kegiatan pengembangan dan pertambangan PTBA Status Perkara Saat ini : Sudah ada putusan tingkat Banding pada tanggal 22 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak dan pada saat ini sedang proses kasasi di Mahkamah Agung.	Hardiansyah & Partner
	Civil Case Number 9/Pdt.G/2023/PN.Mre Dated March 29, 2023	The Unlawful Act lawsuit relates to the claims of Tanjung Agung village residents ovser Defendant I's land located in Tanjung Agung Village which is in HGU No. 1 May 14, 1994 covering an area of 1411.4 Ha **Plaintiff:** Ude Indayadi, SH (Tanjung Agung Village Head) **Defendant I:** PT Bumi Sawindo Permai **Defendant II:** PT Bukit Asam Tbk **Co Defendant:** Muara Enim District Land Office	If PTBA loses, it will have an impact on PTBA's development and mining activities. Current Case Status: There was a decision at the Appeals level on November 22, 2023, which confirmed the District Court's decision where the lawsuit submitted by the Plaintiff was rejected and is currently in the cassation process at the Supreme Court.	Hardiansyah & Partner
5.	Perkara Perdata No. 15/Pdt.G/LH/2023/PN.Lht Tanggal 22 Agustus 2023	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan klasifikasi perkara Kerusakan Lingkungan akibat Kegiatan Pertambangan, dengan dalil kerusakan lingkungan akibat tidak dilakukannya kegiatan reklamasi pada objek sengketa yang berada pada IUP MTB PTBA dengan total luas 13,65 Ha. **Penggugat** : LSM Lestari **Tergugat I :** PT Bukit Asam Tbk **Tergugat II :** Kementerian ESDM RI cq. Menteri ESDM RI	Dalam hal PTBA kalah maka akan berdampak pada reputasi perusahaan dan adanya kerugian materiil Status Perkara saat ini : Pada saat ini masing-masing Pihak telah mengirimkan kesimpulan di e-court.	Hardiansyah & Partner
	Civil Case Number 15/Pdt.G/LH/2023/PN.Lht Date August 22, 2023	Lawsuit for Unlawful Actions with the classification of cases of Environmental Damage due to Mining Activities, with the argument that environmental damage was a result of not carrying out reclamation activities on the disputed object located in PTBA's MTB IUP with a total area of 13.65 Ha. **Plaintiff:** Lestari NGO **Defendant I:** PT Bukit Asam Tbk **Defendant II:** Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia cq. Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia	In the event if PTBA loses, it will impact the company's reputation and result in material losses Current case status: At this time each party has submitted its conclusions in e-court	Hardiansyah & Partner

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
State Administrative and Civil Cases

No	Perkara/Kasus Case	Keterangan Singkat Brief Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company	Konsultan Hukum Law Consultant
6.	Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2023/ PN.Mre Tanggal 18 Oktober 2023	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Mardiansyah atas lahan yang terletak di IUP Banko Tengah B yang telah dibebaskan oleh PTBA. **Penggugat :** Mardiansyah Bin Salri **Tergugat I :** PT Bukit Asam Tbk **Tergugat II :** PT Bumi Sawindo Permai **Turut Tergugat :** PT Pama Persada Nusantara	Dalam hal PTBA kalah maka akan berdampak pada kegiatan pertambangan dan preseden bagi Pihak lain. Status Perkara saat ini : Gugatan telah dicabut oleh Penggugat.	Hardiansyah & Partner
	Civil Case Number 28/Pdt.G/2023/ PN.Mre Date October 18, 2023 2023	A lawsuit filed by Mardiansyah over land located in IUP Banko Tengah B which has been released by PTBA **Plaintiff:** Mardiansyah bin Sairi **Defendant I:** PT Bukit Asam Tbk **Defendant II:** Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia cq. Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia	In the event if PTBA loses, it will impact the mining activity and other causes on other parties Current case status: The lawsuit has been withdrawn by the Plaintiff	Hardiansyah & Partner

Sengketa Perpajakan
Tax Dispute

No	Jenis Pajak Type of Tax	Kantor Pelayanan Pajak Tax Office	Tahun Year	Status	Pemohon Gugatan/ Banding/ Keberatan/PK Petitioner of Lawsuit/ Appeal/ Objection/ Judicial Review	Termohon Gugatan/ Banding/ Keberatan/ PK Respondent of Lawsuit/ Appeal/ Objection/ Judicial Review
1	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2007	Peninjuan Kembali Judicial Review	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Directorate General of Taxes (DJP)	PTBA
2	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2012	Peninjuan Kembali Judicial Review	PTBA	DJP
3	PBB Land and Building Tax	Lahat	2012	Peninjuan Kembali Judicial Review	PTBA	DJP
4	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2014	Selesai Banding End of Appeal	PTBA	DJP
5	PBB Land and Building Tax	Lahat	2014	Selesai Banding End of Appeal	PTBA	DJP
6	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2015	Peninjuan Kembali Judicial Review	DJP	PTBA
7	PBB Land and Building Tax	Lahat	2015	Peninjuan Kembali Judicial Review	DJP	PTBA
8	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2016	Peninjuan Kembali Judicial Review	DJP	PTBA
9	PBB Land and Building Tax	Lahat	2016	Selesai Peninjuan Kembali End of Judicial Review	DJP	PTBA
10	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2019	Banding Appeal	PTBA	DJP
11	PBB Land and Building Tax	Lahat	2019	Banding Appeal	PTBA	DJP
12	STP PBB Land and Building Tax Bill	Prabumulih	2014	Selesai Peninjuan Kembali End of Judicial Review	DJP	PTBA

No	Jenis Pajak Type of Tax	Kantor Pelayanan Pajak Tax Office	Tahun Year	Status	Pemohon Gugatan/ Banding/ Keberatan/PK Petitioner of Lawsuit/ Appeal/ Objection/ Judicial Review	Termohon Gugatan/ Banding/ Keberatan/ PK Respondent of Lawsuit/ Appeal/ Objection/ Judicial Review
13	STP PBB Land and Building Tax Bill	Lahat	2015	Selesai Peninjuan Kembali End of Judicial Review	PTBA	DJP
14	STP PBB Land and Building Tax Bill	Prabumulih	2017	Selesai Peninjuan Kembali End of Judicial Review	DJP	PTBA
15	STP PBB Land and Building Tax Bill	Prabumulih	2018	Selesai Peninjuan Kembali End of Judicial Review	DJP	PTBA
16	PPh 23 Income Tax 23	Prabumulih	2011	Peninjuan Kembali Judicial Review	PTBA	DJP
17	SKPLB PPh Badan Overpaid Tax Assessment Letter of Agency Income Tax	LTO 3	2016	Peninjuan Kembali Judicial Review	DJP	PTBA
18	SKPLB PPh Badan Overpaid Tax Assessment Letter of Agency Income Tax	LTO 3	2017	Keberatan Objection	PTBA	DJP

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu terhitung sejak awal tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2023, Perusahaan tidak pernah memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi berkaitan dengan pajak maupun sengketa pajak.

In the last 3 (three) years, starting from the beginning of 2021 to the end of 2023, the Company has never received a guilty verdict from the highest tax court regarding taxes or tax disputes.

Sanksi Administratif

Sepanjang tahun 2023, baik Perusahaan maupun anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak pernah mendapatkan sanksi administratif, termasuk sanksi administratif yang bersifat material yang dikenakan oleh regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting (material event). Perusahaan juga tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran atau belum mematuhi peraturan dan peraturan pencatatan selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan.

Administrative Sanctions

During the year, neither the Company nor any member of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors have been subject to any administrative sanctions, including material administrative sanctions imposed by regulators for not making announcements within the prescribed timeframe for material events. The Company has also not been found to have violated or not complied with any listing rules and regulations during the past year other than disclosure rules.

Ketidakpatuhan Terhadap Hukum, Aturan Dan Peraturan Berkaitan Dengan Pihak Berelasi

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan, dan peraturan berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material.

Non-Compliance with Laws, Rules and Regulations Relating to Related Parties

During the last 3 (three) years, the Company has never committed any violations related to non-compliance with laws, rules, and regulations related to significant or material related party transactions.

Pelanggaran Hukum Terkait Perburuhan, Ketenagakerjaan, Konsumen, Kepailitan, Komersial, Persaingan atau Lingkungan

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum apapun ataupun terlibat kasus yang berkaitan dengan masalah perburuhan, ketenagakerjaan, konsumen, kepailitan, komersial, persaingan ataupun lingkungan.

Violations of Labor, Employment, Consumer, Bankruptcy, Commercial, Competition, or Environmental Laws

Throughout 2023, the Company has never committed any legal violations or been involved in cases related to labor, employment, consumer, bankruptcy, commercial, competition, or environmental issues.

Kebijakan Pengungkapan Informasi
Information Disclosure Policy

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berkewajiban untuk melaporkan kepemilikan atas saham Perusahaan, termasuk setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Kewajiban pelaporan merupakan bagian dari Pengungkapan Informasi, yang pengaturannya secara internal Perusahaan diatur dalam Pedoman Kerja Direksi dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

Pelaksanaan atas kebijakan Pengungkapan Informasi diwujudkan melalui kepatuhan Perusahaan dalam melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan mengungkapkannya dalam Laporan Tahunan maupun *website* resmi Perusahaan. Pengungkapan informasi berkenaan dengan kepemilikan saham Perusahaan oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat di bagian Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are obliged to report ownership of Company shares, including any changes in ownership of Company shares either directly or indirectly, to the Financial Services Authority (OJK). This obligation is regulated in Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Ownership of Public Company Shares. The reporting obligation is part of Information Disclosure, which is regulated internally by the Company in the Directors' Work Guidelines and the Board of Commissioners' Work Guidelines.

Implementation of the Information Disclosure policy is realized through the Company's compliance in reporting ownership and any changes in ownership of the Company's shares by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, by disclosing this in the Annual Report or the Company's official website. Disclosure of information regarding Company share ownership by Members of the Board of Commissioners and Directors can be accessed in the Company Share Ownership by the Board of Commissioners and Directors chapter in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access Company Information and Data



Komitmen penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik salah satunya diwujudkan oleh Bukit Asam melalui keterbukaan informasi. Perusahaan memberikan informasi untuk publik dan pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang pelaksanaannya di Perusahaan dikelola oleh Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterbukaan informasi bagi publik dapat diakses melalui situs web Perusahaan pada alamat *website* www.ptba.co.id, dan atas informasi serta data perusahaan pada *website*, disediakan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sementara, penyediaan informasi bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan, dapat lebih lanjut diakses melalui beberapa cara, antara lain melalui:

One of the commitments to implement the principles of Good Corporate Governance is carried out through information disclosure. The company provides information to the public and shareholders as specified in Law no. 14 of 2008 concerning Public Information Openness, in which the implementation is managed by the Corporate Secretary in accordance with applicable regulations.

Information disclosure to the public can be accessed via the Company's website at the website address www.ptba.co.id, and company information and data on the website is provided in two languages, namely Indonesian and English. Meanwhile, the provision of information for Shareholders and stakeholders can be accessed in several ways, including through:

Kantor

Alamat Kantor : Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia, 31716
Telepon : +62 734 451096, 452352
Fax : +62 734 451095, 452993
Email : corsec@bukitasam.co.id

Media Sosial

Facebook : PT Bukit Asam Tbk
Twitter : @BukitAsamPTBA
Instagram : bukitasamptba
YouTube : PT Bukit Asam Tbk

Laporan-Laporan

Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan agar mengetahui kondisi Perusahaan, terhadap laporan-laporan yang dibuat oleh Perusahaan, dipublikasikan pada website Perusahaan. Laporan Perusahaan yang dapat diakses melalui *website* antara lain, Laporan Audit Keuangan, Laporan Keuangan Triwulan, Ikhtisar Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan PKBL. Perusahaan juga menyampaikan Laporan Tahunan yang telah dibuat kepada regulator sebagai pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Siaran Pers

Perusahaan memanfaatkan media massa sebagai mitra untuk menyebarluaskan informasi tentang Perusahaan kepada masyarakat luas. Pada tahun 2023, PTBA telah menyampaikan sebanyak sebanyak 103 siaran pers.

Aktivitas Investor Relations

Perusahaan memberikan informasi melalui aktivitas yang berkaitan dengan *Investor Relations*. Penyediaan informasi ini merupakan penghubung Perusahaan dengan komunitas pasar modal dan pihak eksternal lain, sehingga para pemegang saham, calon investor, dan masyarakat luas mendapatkan informasi terkini mengenai Perusahaan

Office

Office Address : Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, South Sumatera, Indonesia, 31716
Telephone : +62 734 451096, 452352
Fax : +62 734 451095, 452993
Email : corsec@bukitasam.co.id

Social media

Facebook : PT Bukit Asam Tbk
Twitter : @BukitAsamPTBA
Instagram : Bukitasamptba
YouTube : PT Bukit Asam Tbk

Reports

As a form of information disclosure to stakeholders to understand the condition of the Company, reports made by the Company are published on the Company's website. Company reports that can be accessed via the website include Financial Audit Reports, Quarterly Financial Reports, Financial Overview, Annual Reports, Sustainability Reports and PKBL Reports. The company also submits the Annual Report that has been prepared to the regulator to fulfill its obligations under applicable laws and regulations.

Press Release

The Company utilizes mass media as a partner to disseminate information about the Company to the wider community. In 2023, PTBA issued 103 press releases.

Investor Relations Activities

The Company provides information through activities related to Investor Relations. This information provision is a link between the Company and the capital market community and other external parties. Therefore, shareholders, potential investors, and the wider community can receive the latest information regarding the Company.

Kode Etik
Code of Conducts



Perusahaan memiliki pedoman Kode Etik yang mengatur nilai-nilai etis dan standar perilaku yang harus dipedomani oleh Insan PTBA. Pedoman Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 dan No. 277/0100/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk *(Code of Conduct)*. Pedoman memuat pengaturan 2 (dua) aspek mendasar dalam perilaku, yakni Etika Bisnis dan Etika Perilaku Individu sebagai standar perilaku bagi setiap Insan Perusahaan.

Pedoman Kode Etik diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis antara kepentingan operasi dan bisnis yang dilakukan Perusahaan dengan kepentingan dari setiap pemangku kepentingan yang berada dalam lingkaran operasi dan bisnis Perusahaan, maupun yang terkena dampak kegiatan operasi dan bisnis Perusahaan.

The company has a Code of Conducts guidelines that regulate ethical values and standards of behavior that must be adhered to by PTBA employees. Code of Conducts guidelines are established by Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 and No. 277/0100/2023 dated December 29, 2023, concerning the Behaviour and Business Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). The Guidelines contain regulations on 2 (two) fundamental aspects of behavior, namely Business Ethics and Individual Behavior Ethics as standards of behavior for every Company Person.

The Code of Conducts guidelines are expected to build a harmonious relationship between the interests of the Company's operations and business and the interests of every stakeholder within the Company's operations and business circle, as well as those affected by the Company's operations and business activities.

Pokok-Pokok Kode Etik

Etika Bisnis

Etika Bisnis Perusahaan memiliki aspek kritis terhadap jalannya operasional Perusahaan, mencakup:

1. Target yang harus dicapai oleh jajaran Manajemen dan pegawai;
2. Pengendalian internal Perusahaan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Pemberian donasi;
5. Pemberian dan penerimaan hadiah;
6. Lingkungan;
7. Ketenagakerjaan;
8. Etika hubungan dengan pemangku kepentingan;
9. Pemberian kesempatan yang sama untuk menjadi rekanan Perusahaan;
10. Hak atas kekayaan intelektual;
11. Transaksi afiliasi.

Etika Perilaku Individu

Etika perilaku yang harus dipenuhi oleh Insan Perusahaan, meliputi:

1. Integritas dan komitmen;
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Kerahasiaan informasi;
4. Benturan kepentingan;
5. Transaksi orang dalam;
6. Manajemen risiko;
7. Menjaga mutu, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja serta keamanan Perusahaan;
8. Citra Perusahaan;
9. Keterlibatan dalam aktivitas politik;
10. Pemberian dan penerimaan hadiah;
11. Perlindungan dan penggunaan aset Perusahaan secara efisien;
12. Pencatatan data, pelaporan, dan dokumentasi;
13. Perilaku etis terhadap sesama pegawai;
14. Penggunaan media sosial.

Tujuan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

Tujuan pedoman Kode Etik Perusahaan terbagi atas 2 (dua) yaitu Makro dan Mikro, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Makro

Mengembangkan standar etika bisnis terbaik yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG di bidang energi berbasis batu bara sehingga mendorong terciptanya budaya Perusahaan maupun yang diharapkan, baik yang secara langsung meningkatkan nilai Perusahaan.

Mikro

1. Menjabarkan nilai-nilai Perusahaan sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh seluruh jajaran Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.

Code of Conducts Principles

Business Ethics

The Company's Business Ethics have critical aspects to the Company's operations, including:

1. Mandatory targets achieved by management and employees;
2. Company internal control;
3. Compliance with laws and regulations;
4. Donations;
5. Giving and receiving gifts;
6. Environment;
7. Employment;
8. Ethics of relationships with stakeholders;
9. Providing equal opportunities to become Company partners;
10. Intellectual property rights;
11. Affiliate transactions.

Ethics of Individual Behavior

The ethical behavior that must be complied by Company Personnel includes:

1. Integrity and commitment;
2. Compliance with laws and regulations;
3. Confidentiality of information;
4. Conflict of interest;
5. Insider transactions;
6. Risk management;
7. Maintain quality, environment, occupational health and safety as well as Company security;
8. Company Image;
9. Involvement in political activities;
10. Giving and receiving gifts;
11. Protection and efficient use of Company assets;
12. Data recording, reporting, and documentation;
13. Ethical behavior towards fellow employees;
14. Use of social media.

Purpose of Code of Conducts and Business Ethics

The purpose of the Company Code of Conducts guidelines are divided into 2 (two), namely Macro and Micro, as described below:

Macro

Develop the best business ethical standards that are in accordance with GCG principles in the coal-based energy sector to encourage the creation of the Company's culture and expectations, both of which directly increase the value of the Company.

Micro

1. Describe the Company's values as an ethical foundation that must be followed by all levels of the Company in carrying out daily operational activities.

2. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Pelanggan, Mitra Kerja, jajaran Perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya dengan Perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip korporasi dan etika bisnis yang sehat.

Manfaat Penerapan Kode Etik

Manfaat yang diperoleh dari penerapan Kode Etik, sebagai berikut:

1. Perusahaan
   a. Mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif;
   b. Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para *stakeholders* dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
2. Pemegang Saham Menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola secara amanah (*duty of loyalty*) dan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*), efisien, transparan, akuntabel, dan adil untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.
3. Jajaran Perusahaan
   a. Memberikan pedoman kepada setiap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pegawai tentang perilaku yang diinginkan atau yang dilarang oleh Perusahaan.
   b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pegawai secara menyeluruh.
4. Masyarakat dan Pihak lain yang Terkait Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Perusahaan, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

Pengungkapan Kepatuhan bahwa Kode Etik Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Pedoman Kode Etik berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan pada semua level organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan Perusahaan, termasuk yang berada pada entitas anak. Pedoman Kode Etik wajib dibaca dan dipahami isinya, serta terhadap lembar pernyataan kepatuhan atas Pedoman Kode Etik, wajib untuk ditandatangani.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Sosialisasi kode etik Perusahaan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan dan *Good Corporate Governance* sebagai penanggung jawab implementasi GCG, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Sumber Daya Manusia Operasional (SDMO).

2. Develop harmonious, synergistic, and mutually beneficial relationships between customers, business partners, company staff, and other interested parties (stakeholders) with the company based on corporate principles and sound business ethics.

Benefits of Code of Conducts Implementation

The benefits obtained from implementing the Code of Conducts are as follows:

1. Company
   a. Encourage the Company's operational activities to be more efficient and effective;
   b. Increase the value of the Company by providing certainty and protection to stakeholders related to the Company, resulting in a good reputation, which ultimately yields long-term business success.

2. Shareholders increased confidence in the company's management (duty of loyalty) and based on the principle of prudence (duty of care), efficiently, transparently, accountably, and fairness to achieve the level of profitability expected by Shareholders while still paying attention to the interests of the Company .

3. Company Rankings
   a. Provide guidelines to each member of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and employees regarding behavior that is desired or prohibited by the Company.
   b. Creating a work environment that upholds the values of honesty, ethics, and openness to improve the performance and productivity of members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and employees as a whole.
4. Community and other related parties Creating a harmonious and mutually beneficial relationship with the Company, which will ultimately create social economic prosperity for the community and other related parties.

Compliance Disclosure that the Code of Conducts Apply to All Levels of Organization

The Code of Conducts guidelines apply to all Company Personnel at all organizational levels, starting from the Board of Commissioners, Directors, Company Employees, including those in subsidiaries. The contents of the Code of Conducts Guidelines must be read and understood, and the statement sheet regarding compliance with the Code of Conducts Guidelines must be signed.

Socialization and Dissemination of the Code of Conducts

Socialization of the Company's Code of Conduct is carried out by the Company Management System and Good Corporate Governance Work Unit as the party responsible for implementing GCG, in coordination with the Human Capital (HC) Work Unit.

Sosialisasi kode etik atau *code of conduct* dilakukan setiap triwulan, yang dilaksanakan melalui email perusahaan maupun melalui aplikasi CISEA GSG. Selain itu, ditahun 2023 sosialisasi Kode Etik juga dilaksanakan dengan mendistribusikan buku Pedoman Kode Etik kepada seluruh pegawai PTBA. Seluruh pegawai PTBA telah melakukan pengisian pakta integritas COC melalui aplikasi CISEA GCG, dengan status 100% untuk periode penyampaian tahun 2023.

Upaya Penegakan Kode Etik dan Pengaduan Pelanggaran

Upaya penegakan Kode Etik di PTBA dilakukan melalui:

1. Pengisian Pakta Integritas;
2. Sosialisasi Pedoman Kode Etik dan Kebijakan lain yang terkait;
3. Penegakan dan implementasi secara efektif terhadap Kebijakan lain yang mendukung penerapan Kode Etik; dan
4. Tindak lanjut terhadap Laporan Pengaduan Pelanggaran.

Dalam mendukung penegakan Kode Etik, Perusahaan menyediakan sarana/media pelaporan pelanggaran terhadap Kode Etik. Adapun mekanisme pelaporan pelanggaran Kode Etik dapat dilakukan melalui:

1. Mekanisme pelaporan pelanggaran internal yang dikelola secara internal organisasi Perusahaan;
2. Mekanisme dan ketentuan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) yang telah dimiliki dan dikembangkan Perusahaan, yang memberikan kerahasiaan bagi pelapor.

Jenis Sanksi untuk Masing-Masing Jenis Pelanggaran yang Diatur dalam Kode Etik (Normatif)

Pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan oleh Insan PTBA akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama. Sedangkan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pelanggan dan mitra kerja, akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik beserta Sanksi yang Diberikan pada Tahun Buku

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat pelanggaran Kode Etik maupun penjatuhan sanksi atas pelanggaran Kode Etik di PTBA, hal ini menunjukan bahwa Insan PTBA memahami pentingnya berperilaku baik selaras dengan Kode Etik yang berlaku.

The socialization of the code of ethics or code of conduct is conducted quarterly, disseminated through company emails as well as through the CISEA GSG application. Additionally, in 2023, the Code of Ethics socialization was also carried out by distributing the Code of Ethics Guidelines book to all PTBA employees. All PTBA employees have completed the integrity pact COC filling via the CISEA GCG application, with a status of 100% for the reporting period of 2023.

Efforts to Enforce the Code of Conduct and Complaint of Violations

Efforts to enforce the Code of Conducts in PTBA are carried out through:

1. Filling out the Integrity Pact;
2. Socialization of the Code of Conducts Guidelines and other related policies;
3. Effective enforcement and implementation of other policies that support the implementation of the Code of Conducts; and
4. Follow up on Violation Complaint Reports.

In supporting the enforcement of the Code of Conducts, the Company provides facilities/media for reporting violations of the Code of Conducts. The mechanism for reporting violations can be carried out through:

1. Internal violation reporting mechanism managed internally by the Company's organization;
2. Mechanisms and provisions for the Whistleblowing System (WBS), which provides confidentiality for the reporter.

Types of Sanctions for Each Type of Violation Regulated in the Code of Conduct (Normative)

Violations of the Code of Conducts committed by PTBA employees will be subject to sanctions in accordance with the applicable rules and regulations in the Company based on the provisions of the Collective Labor Agreement. Meanwhile, violations of the Code of Conducts committed by customers and work partners will be dealt in accordance with the provisions stated in the contract.

Number of Code of Conducts Violations along with the Sanctions Imposed in the Fiscal Year

In 2023, there were no violations of the Code of Conducts or imposition of sanctions for violations of the Code of Conducts in PTBA, this shows that PTBA employee understand the importance of behaving well according to the Code of Conducts.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

Dalam mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PTBA menyediakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau dikenal dengan *Whistleblowing System* (WBS). SPP merupakan sistem yang mengelola pengaduan pelanggaran, yang memungkinkan Insan Perusahaan atau siapapun untuk melaporkan indikasi penyimpangan yang terjadi di PTBA, dengan tetap mengutamakan perlindungan dan kerahasiaan identitas pelapor.

Perusahaan menetapkan SPP melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 06/DEKOM/VIII/2020 dan No. 395/0100/2020 tanggal 31 Agustus 2020 mengenai Pengesahan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP). Adapun tujuan dari implementasi SPP di Perusahaan, yaitu:

1. Deteksi dini (peringatan dini) dari masalah yang mungkin disebabkan dari pelanggaran;
2. Mengurangi risiko yang dihadapi oleh Perusahaan, akibat dari pelanggaran dari segi keuangan, operasional, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi;
3. Memberikan masukan kepada Perusahaan untuk memiliki perspektif dan proses kerja kritis yang lebih luas yang memiliki kelemahan pengendalian internal dan merencanakan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Jenis Pelanggaran

Jenis-jenis pelanggaran yang tercakup dan dapat dilaporkan melalui SPP meliputi:

1. Korupsi;
2. Penyuapan;
3. Kejahatan, termasuk pencurian, kekerasan terhadap karyawan atau pemimpin, pemerasan, narkoba, pelecehan, dan kriminal lainnya;
4. Pelanggaran peraturan perpajakan;
5. Pelanggaran hukum dan peraturan yang terkait dengan bisnis Perusahaan seperti pertambangan, lingkungan, ketenagakerjaan, dan perlindungan konsumen;
6. Pelanggaran aturan internal Perusahaan;
7. Pelanggaran untuk Kode Etik Karyawan;
8. Kewajiban Dewan atau melanggar norma-norma kesusilaan umum.

Saluran Pengaduan

Pelaporan Pelanggaran dapat disampaikan kepada Perusahaan melalui media yang telah disediakan, yaitu:

Website : http://www.ptba.co.id
Email : spp@bukitasam.co.id
Telepon : +62 21 527 4635

In supporting the implementation of Good Corporate Governance, PTBA provides a Whistleblowing System (WBS). WBS is a system that manages complaints of violations, which allows Company Personnel or anyone to report indications of irregularities that occur in PTBA, while still prioritizing the protection and confidentiality of the identity of the reporter.

The Company determines WBS through Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. 06/DEKOM/VIII/2020 and No. 395/0100/2020 dated August 31, 2020, concerning Ratification of the Violation Reporting System Guidelines. The objectives of WBS implementation in the Company are:

1. Early detection of problems that may result from violations;
2. Reduce the risks faced by the Company, resulting from violations in terms of finance, operations, law, work safety, and reputation;
3. Provide input to the Company to have a broader perspective and critical work processes that have internal control weaknesses and plan necessary corrective actions.

Type of Violation

The types of violations that are covered and can be reported through WBS are:

1. Corruption;
2. Bribery;
3. Crime, including theft, violence against employees or leaders, extortion, drugs, harassment, and other crimes;
4. Violation of tax regulations;
5. Violations of laws and regulations related to the Company's business such as mining, environment, employment, and consumer protection;
6. Violation of the Company's internal rules;
7. Violation of the Employee Code of Conducts;
8. Obligations of the Board or violating the norms of general decency.

Complaint Channel

Violation reports can be submitted to the Company through the channel provided, namely:

Website : http://www.ptba.co.id
Email : spp@bukitasam.co.id
Telephone : +62 21 527 4635

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

Mekanisme penyampaian pengaduan dan penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No.06/DEKOM/VIII/2020 dan No. 395/0100/2020 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Bukit Asam Tbk. Pedoman Pelaporan Pelanggaran mengatur hal-hal pokok mengenai mekanisme Pelaporan, meliputi:

1. Informasi dan cara Pelaporan Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui SPP/WBS;
2. Pengelolaan Pelaporan;
3. Perlindungan Pelapor;
4. Tindak lanjut atas Laporan termasuk aturan sanksi yang diterapkan.

Adapun mekanisme penyampaian laporan pelanggaran, sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis maupun lisan (sebagai informasi awal).
2. Laporan tertulis dapat disampaikan melalui surat elektronik (e-mail) dan laporan lisan dapat disampaikan melalui telepon.
3. Pelapor memberikan informasi mengenai data diri secara jelas, karena pelaporan anonim tidak akan ditindaklanjuti.
4. Pelapor harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi masalah yang diadukan, pihak yang terlibat, lokasi kejadian, waktu kejadian, bagaimana terjadinya, apakah ada bukti, apakah kasus ini pernah dilaporkan kepada institusi/ pihak-pihak lain, dan apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya.

Sebaliknya, Perusahaan justru akan memberi sanksi bagi pelapor yang:

1. Membuka kerahasiaan komunikasi dan informasi yang timbul dalam proses penanganan Pelaporan.
2. Menyampaikan laporan yang tidak benar atau yang bersifat fitnah atau palsu. Sanksi tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan.

Mechanism for Violation Reports Submission

The mechanism for submitting complaints and handling complaints is implemented in accordance with the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No.06/DEKOM/VIII/2020 and No. 395/0100/2020 concerning Guidelines for the Violation Reporting System (Whistleblowing System) of PT Bukit Asam Tbk. The Guidelines for Reporting Violations regulate the main issues regarding the reporting mechanism, including:

1. Information and methods for reporting violations via WBS;
2. Reporting Management;
3. Whistleblower Protection;
4. Follow up on the Report including the sanctions rules applied.

The mechanism for violation reports submissions is as follows:

1. The reporter submits a written or oral report (as initial information).
2. Written reports can be submitted via electronic mail (e-mail) and oral reports can be submitted via telephone.
3. The reporter provides information regarding personal data. Anonymous reporting will not be followed up.
4. The reporter must provide initial indications that can be accounted for, including the problem being reported, the parties involved, the location of the incident, the time of the incident, the brief story, whether there is evidence, whether this case has ever been reported to other institutions/parties, and whether this case has ever been reported. or happened before.

On the other hand, the Company will impose sanctions on whistleblowers who:

1. Revealing the confidentiality of communications and information that arises in the Reporting handling process.
2. Submitting false reports. These sanctions are carried out in accordance with applicable laws and regulations and/or the Company's Collective Labor Agreement.

Struktur dan Mekanisme WBS
WBS Structure and Mechanism

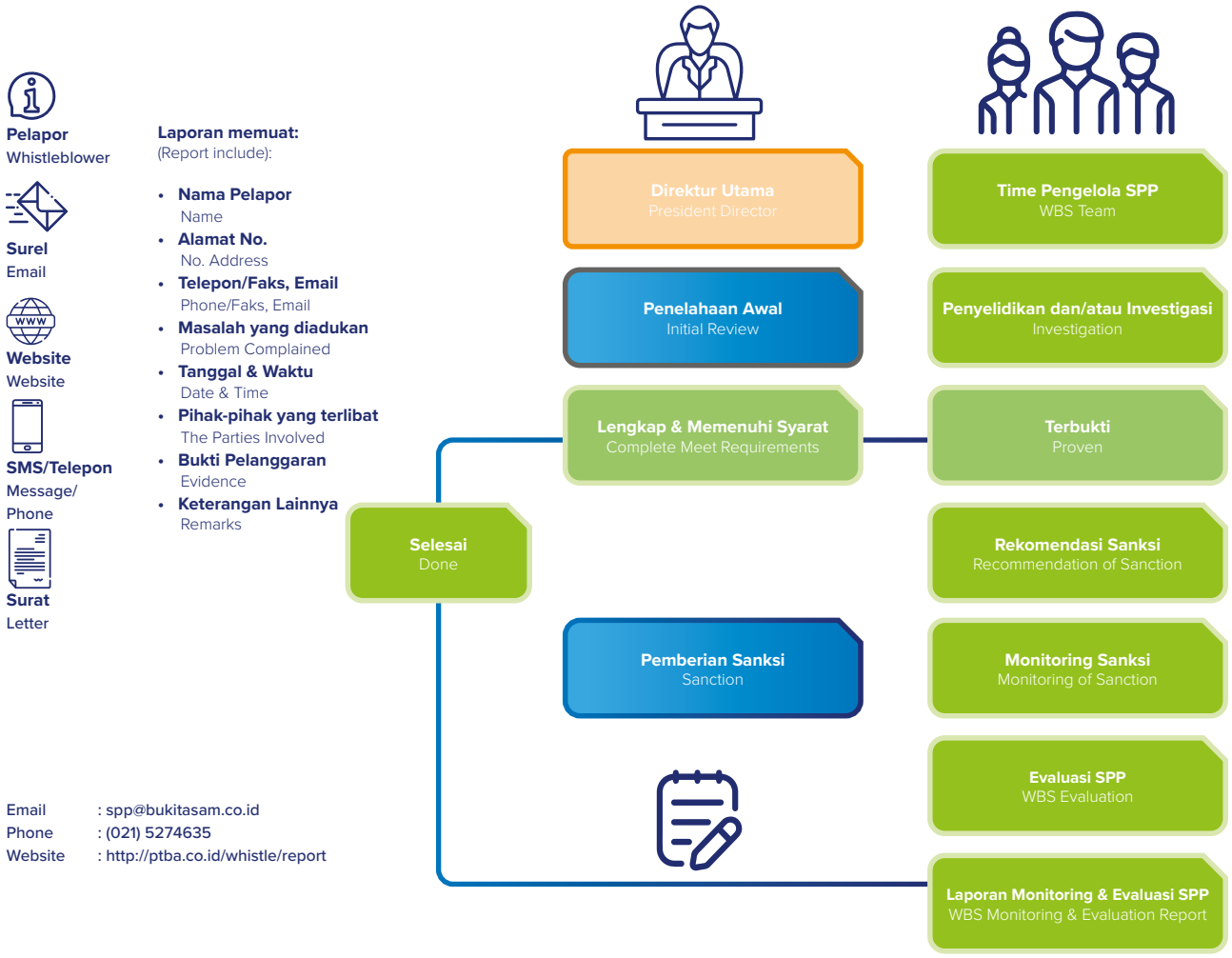

Sosialisasi SPP

Guna terwujud SPP yang efektif dan tepat sasaran, maka Perusahaan secara berkala melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan oleh Perusahaan kepada seluruh Insan Perusahaan dan Stakeholders. Tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan sosialisasi 14 kali selama periode TW I s.d TW IV 2023 kepada Internal Perusahaan.

WBS Socialization

In order to realize effective and on target WBS, the Company regularly carries out socialization to all Company Personnel and Stakeholders. In 2023, the Company has carried out 14 socializations from Q1 to Q4 to company internals.

No.	Penerima Sosialisasi Socialization Recipient	Jadwal Sosialisasi Socialization Schedule	Tempat Place	Agenda kegiatan Agenda
1	Satker Penanganan Angkutan Batubara Coal Transportation Handling Work Unit	16 Januari 2023 January 16, 2023	Ruang Rapat Satker PAB Coal Transportation Handling Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker PAB WBS socialization was carried out at the Opening of the Coal Transportation Handling Work Unit Operational Audit
2	Satker Perawatan Maintenance Work Unit	16 Januari 2023 January 16, 2023	Ruang Rapat Satker Perawatan Maintenance Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Perawatan WBS socialization was carried out at the opening of the Maintenance Work Unit Operational Audit
3	Satker Perencanaan Planning Work Unit	18 Januari 2023 January 18, 2023	Ruang Rapat Satker Perencanaan Planning Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Perencanaan WBS socialization was carried out at the opening of the Planning Work Unit Operational Audit

No.	Penerima Sosialisasi Socialization Recipient	Jadwal Sosialisasi Socialization Schedule	Tempat Place	Agenda kegiatan Agenda
4	Satker Penambangan Mining Work Unit	18 Januari 2023 January 18, 2023	Ruang Rapat Satker Penambangan Mining Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Penambangan WBS socialization was carried out at the opening of the Mining Work Unit Operational Audit
5	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	25 Januari 2023 January 25, 2023	Ruang Rapat masing-masing via zoom meeting Each meeting room via Zoom meeting	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Sekretaris Perusahaan WBS socialization was carried out at the opening of the Corporate Secretary Operational Audit
6	Satker Sustainibility Sustainability Work Unit	27 Maret 2023 March 27, 2023	Ruang Rapat Rechall Tanah Putih Rechall Tanah Putih Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Sharing Session dengan Manajemen Sustainability WBS socialization was carried out during Sharing Session with Sustainability Management
7	Satker K3L Korporat Corporate OHSE Work Unit	08 Mei 2023 May 8, 2023	Ruang Rapat Satker K3L Korporat Corporate OHSE Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker K3L Korporat WBS socialization was carried out at the opening of the Corporate OHSE Work Unit Operational Audit
8	Satker PLPT PLPT Work Unit	10 Mei 2023 May 10, 2023	Ruang Rapat Satker PLPT PLPT Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker PLPT WBS socialization was carried out at the opening of PLPT Work Unit Operational Audit
9	Satker Keuangan Korporat Corporate Finance Work Unit	22 Mei 2023 May 22, 2023	Ruang Rapat Satker Keuangan Korporat Corporate Finance Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Keuangan Korporat WBS Socialization was carried out at the opening of the Corporate Finance Work Unit Operational Audit
10	Satker Komersial Commercial Work Unit	22 Mei 2023 May 22, 2023	Ruang Rapat Satker Komersial Commercial Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Komersial WBS socialization was carried out at the opening of Commercial Work Unit Operational Audit
11	Satker Pengembangan Hilirisasi Downstream Development Work Unit	12 Juli 2023 July 12, 2023	Ruang kerja masing-masing via link zoom meeting Each working room via Zoom meeting	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Pengembangan Hilirisasi WBS socialization was carried out at the opening of Downstream Development Work Unit Operational Audit
12	Satker Pengembangan Energi Energy Development Work Unit	25 Juli 2023 July 25, 2023	Ruang Rapat Satker Pengembangan Energi Energy Development Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Pengembangan Energi WBS socialization was carried out at the opening of Energy Development Work Unit Operational Audit
13	Satker Hukum dan Regulasi, SMP & GCG, Manajemen Risiko, dan Sekretaris Perusahaan. Law and Regulation Work Unit, SMP & GCG, Risk Management, and Corporate Secretary	09 Oktober 2023 October 9, 2023	Ruang kerja masing-masing via link zoom meeting Each working room via Zoom meeting	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional GRC WBS socialization was carried out at the opening of the GRC operational audit
14	Satker Anggaran dan Akuntansi Budgeting and Accounting Work Unit	16 Oktober 2023 October 16, 2023	Ruang Rapat Satker Anggaran dan Akuntansi Budgeting and Accounting Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Anggaran & Akuntansi WBS Socialization was carried out at the opening of the Budgeting and Accounting Work Unit Operational Audit

Perlindungan bagi Pelapor Pelanggaran

Dalam mengelola Laporan Pengaduan Pelanggaran yang masuk ke Perusahaan, PTBA memberikan perlindungan terhadap pelapor, berupa:

1. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, faksimile, *email*, unit kerja);
2. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau lembaga;
3. Perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat/ jabatan, pemecatan, gugatan hukum, harta benda hingga tindakan fisik;
4. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelapor, tetapi dapat diperluas sampai dengan anggota keluarga pelapor.

Whistleblowers Protection

In managing Violation Complaint Reports submitted to the Company, PTBA provides protection for whistleblowers, in the form of:

1. Confidentiality of the whistleblower identity (name, address, telephone number, facsimile, email, work unit);
2. Protection against countermeasures from the reported party or institution;
3. Protection from pressure, postponement of promotion/ position, dismissal, lawsuits, property, to physical actions;
4. The protection does not only apply to the whistleblower but can be extended to the whistleblower family member.

Penanganan Pengaduan

Setiap laporan yang masuk ke Perusahaan, akan ditelaah terlebih dahulu untuk diperoleh keputusan tindak lanjut atas laporan tersebut. Laporan Pengaduan Pelanggaran minimal memuat informasi sebagai berikut:

1. Jenis pelanggaran yang diadukan dan pihak yang terlibat;
2. Waktu dan tempat terjadinya pelanggaran;
3. Kronologi ringkas kejadiannya;
4. Disertai adanya bukti-bukti pelanggaran.

Laporan yang telah diterima dan ditelaah oleh Perusahaan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut:

1. Direktur utama menerima dan menyampaikan setiap pengaduan pelanggaran kepada petugas SPP yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi data dan pengumpulan bukti awal yang cukup dan memadai serta mendokumentasikan laporan penerimaan pengaduan.
2. Direksi menetapkan tindak lanjut terhadap pengaduan yang telah diterima. Langkah-langkah tindak lanjut yang dapat ditempuh di antaranya:
   a. Investigasi oleh auditor internal, apabila substansi pengaduan dapat dilakukan investigasi oleh tim auditor internal.
   b. Investigasi oleh investigator eksternal, apabila substansi pengaduan membutuhkan kompetensi/ pengetahuan/ keahlian tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh tim auditor internal.
3. Tim investigasi melaksanakan kegiatan investigasi secara menyeluruh dan menyampaikan hasil investigasi pengaduan kepada Direksi untuk kemudian ditetapkan putusan terhadap pengaduan tersebut.

   Beberapa putusan yang dapat ditetapkan antara lain:
   a. Dihentikan dan dinyatakan selesai apabila hasil investigasi menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak benar atau tidak terbukti.
   b. Meneruskan hasil investigasi kepada forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (PKP) apabila hasil investigasi menyatakan bahwa pengaduan terbukti benar.
   c. Meneruskan kasus pelanggaran yang termasuk dalam kategori tindak pidana umum atau korupsi kepada penyidik untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

   Dalam hal ini, akan dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim dari Divisi Hukum guna memastikan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan dalam kegiatan investigasi dinyatakan cukup untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Perusahaan membentuk tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola, memverifikasi, dan memproses seluruh pengaduan laporan yang masuk.

Complaint Handling

Every report submitted to the Company will be reviewed to obtain a follow-up decision on the report. The Violation Complaint Report must contain at least the following information:

1. The type of violation that is being complained of and the parties involved;
2. The time and place of violation;
3. A brief chronology of events;
4. Accompanied by evidence of the violation.

Received and reviewed report will be followed-up on the following step:

1. President Director receives and submits every complaint of violation to appointed WBS officer to verify data, collect sufficient and adequate initial evidence, and document the complaint receipt report.

2. The Board of Directors determines follow-up actions for complaints that have been received. Follow-up steps that can be taken include:
   a. Investigation by internal auditors, if the substance of the complaint can be investigated by a team of internal auditors.
   b. Investigation by an external investigator, if the substance of the complaint requires certain competencies/ knowledge/expertise that cannot be fulfilled by the internal auditor team.
3. The investigation team carries out comprehensive investigation activities and submits the results of the complaint investigation to the Board of Directors to then determine a decision on the complaint.

   Some of the decisions that can be made include:
   a. It will be stopped and declared complete if the results of the investigation state that the complaint is false or unproven.
   b. Forward the results of the investigation to the Violation Case Discussion forum if the results of the investigation state that the complaint is proven to be true.

   c. Forwarding cases of violations that fall into the category of general crimes or corruption to investigators for further processing in accordance with applicable provisions and laws.

   In this case, communication and coordination will be carried out with the team from the Legal Division to ensure that the evidence that has been collected in the investigative activities is deemed sufficient to be submitted to the authorities.

Complaints Management Party

The company formed a Whistleblowing System Management team which was specifically assigned to manage, verify, and process all incoming complaints.

Tim SPP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTBA Nomor 02/SK/PTBA-DEKOM/X/2022 dan 400/0100/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Tim Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS). Adapun susunan tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

The WBS Team was formed based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PTBA Number 02/SK/PTBA-DEKOM/X/2022 and 400/0100/2022 dated October 7, 2022, concerning the Whistleblowing System (WBS) Team. The composition of the Violation Reporting System Management team can be seen in the following table:

Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran
WBS Mangement Team

No.	Susunan Anggota Composition	Kedudukan dalam Tim Position in the Team
1	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Ketua Chair
2	*Vice President* Hukum dan Regulasi Vice President of Law and Regulation	Wakil Ketua Deputy Chair
3	*Vice President* Satuan Pengawasan Intern Vice President of Internal Audit Unit	Anggota Member
4	*Vice President* Sumber Daya Manusia Operasional Vice President of Human Resources Operational	Anggota Member
5	*Vice President* Sistem Manajemen Perusahaan & GCG Vice President of Corporate Management System & GCG	Anggota Member
6	Assisstant Vice President Audit Operasional, Internal Control, dan Konsultansi Vice President Assistant for Operational Audit, Internal Control, and Consultation	Anggota Member
7	*Assisstant Vice* President Litigas dan Non Litigasi Assistant Vice President for Litigation and Non-Litigation	Anggota Member
8	Manajer GCG dan Kinerja Perusahaan GCG Manager and Company Performance	Anggota Member
9	Pemeriksa Muda Junior Auditor	Anggota Member
10	*Compliance Officer Muda, Spesialis* GCG Pratama, dan Spesialis Hukum Pratama Junior Compliance Officer, Senior GCG Specialist, and Senior Legal Specialist	Anggota Member

Kode Etik Tim Pengelola SPP

sebagaimana ketentuan Pedoman WBS PTBA, WBS dikelola secara internal oleh Tim Pengelola, untuk menjadi Tim Pengelola WBS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Petugas Perlindungan Pelapor
   Sebagai Petugas Perlindungan Pelapor, harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
   1. Dapat dipercaya;
   2. Mampu berkomunikasi dan berhubungan dengan baik serta dapat menyakinkan orang;
   3. Dapat berdiplomasi dengan baik dan cukup taktis, tanpa membuat marah lawan bicaranya dan;
   4. Mampu bersifat objektif dan tegas.

Code of Conduct for WBS Management Team

As stipulated in the PTBA WBS Guidelines, the WBS is managed internally by the Management Team. To become a WBS Management Team, they must fulfill the following requirements:

a. Whistleblower Protection Officer
   As a Whistleblower Protection Officer, the person concerned must have the following requirements:
   1. Trustworthy;
   2. Able to communicate, build good relationship, and can convince people;
   3. Can be diplomatic well and tactically enough, without angering the other person and;
   4. Able to be objective and firm.

b. Petugas Investigasi
Sebagai Petugas Investigasi, harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
1. Dapat dipercaya;
2. Mampu berkomunikasi dan berhubungan dengan baik serta dapat menyakinkan orang;
3. Dapat berdiplomasi dengan baik dan cukup taktis, tanpa membuat marah lawan bicaranya dan;
4. Mampu bersifat objektif dan tegas;
5. Mempunyai integritas tinggi;
6. Mempunyai kemampuan untuk melakukan investigasi;
7. Kemampuan analisa yang tinggi;
8. Kemampuan melakukan penilaian dengan baik (*sound of judgement*).

b. Investigating Officer
As an Investigation Officer, the person concerned must have the following requirements:
1. Trustworthy;
2. Able to communicate, build good relationship, and can convince people;
3. Can be diplomatic well and tactically enough, without angering the other person and;
4. Able to be objective and firm;
5. Have high integrity;
6. Have the ability to carry out investigations;
7. High analytical skills;
8. Ability to make good judgments (sound of judgment).

Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses

Tahun 2023, terdapat 7 laporan dugaan pelanggaran yang masuk melalui SPP, baik yang disampaikan melalui email, surat, telepon, faksimile, ataupun *website* Perusahaan.

Number of Complaints Received and Processed

In 2023, there were 7 reports of suspected violations submitted via WBS, whether submitted via email, letter, telephone, fax, or the Company's website.

	Media Pelaporan Reporting Media	Jumlah Laporan yang Masuk Number of Reports Received	Status Laporan per 31 Desember 2023 Reports Status per December 31, 2023
1	Email Email	7	7
2	Surat Letter	-	-
3	Telepon Telephone	-	-
4	Faksimile Fax	-	-
5	*Website* *Website*	-	-
Jumlah Total		7	7

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Telah Selesai Diproses pada Tahun 2023

Berdasarkan laporan pengaduan pelanggaran yang masuk ke Perusahaan, sebanyak 7 (tujuh) pengaduan masuk sampai dengan akhir tahun 2023. Seluruh laporan yang masuk telah selesai ditindaklanjuti.

Sanctions/Follow-Up for Complaints Completed in 2023

Based on reports of violations submitted to the Company, there were 7 (seven) complaints received by the end of 2023. All reports submitted have been followed up.

Kebijakan Insider Trading

Insider Trading Policy



Perusahaan menetapkan larangan penyalahgunaan jabatan dan pekerjaan Insan PTBA untuk mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan informasi investor. Informasi material adalah informasi yang belum dipublikasikan secara luas yang dapat mendorong seseorang untuk membeli, menjual, atau menahan saham Perusahaan.

Perusahaan memiliki kebijakan insider trading yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTBA No.250/0100/2023 dan No.15/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tentang Pedoman Transaksi Orang Dalam (Insider Trading). Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, terhitung tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, tidak pernah terjadi transaksi orang dalam yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, manajemen yang berada di bawah Direksi, dan Karyawan Perusahaan.

The company prohibits misuse of the position and work of PTBA employees to disclose material information that could influence investors' informed decisions. Material information is information that has not been widely published that could encourage someone to buy, sell, or hold Company shares.

The company has an insider trading policy which is stipulated in Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Director PTBA No.250/0100/2023 and No.15/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Concerning Guideline of Insider Trading. In the last 3 (three) years, starting from 2021 to 2023, there have never been any insider transactions involving the Board of Commissioners, Directors, Supporting Organs of the Board of Commissioners, management under the Directors, and Company Employees.

Kebijakan Antikorupsi
Anti-Corruption Policy

Perusahaan telah menetapkan kebijakan tentang anti korupsi yang dimuat dalam *Corporate Governance Policy, Board Manual, Code of Conduct, Pedoman Whistleblowing System*, dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, yang secara substansi mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Program dan Prosedur Penanganan Anti Korupsi

Perusahaan memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan praktik bisnis yang anti korupsi, demi terwujudnya iklim bisnis yang sehat. Dalam mendukung praktik anti korupsi, Perusahaan menciptakan budaya anti korupsi di lingkungan internal Perusahaan, melalui Kebijakan anti korupsi yang didukung dengan penandatanganan Pakta Integritas sebagai wujud komitmen. Perusahaan juga mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan Standar internasional Anti-Bribery Management System atau Manajemen Anti Suap ISO 37001:2016, sebagai wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan upaya membangun perusahaan yang bersih dari praktik korupsi. Atas komitmen Perusahaan dalam menerapkan SMAP, Bukit Asam menjadi BUMN tambang pertama yang memperoleh ISO 370001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Prosedur penanganan anti korupsi di Perusahaan diwujudkan melalui pembentukan SDM yang bertanggungjawab terhadap pengawasan, untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai prosedur audit dan pendeteksian risiko penyimpangan, serta meningkatkan *awareness* insan capital dengan mengikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan anti korupsi, khususnya pada unit-unit yang berpotensi untuk terpapar praktik korupsi, kecurangan, suap, gratifikasi dan sejenisnya.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi

Perusahaan memberikan pelatihan dan sosialisasi anti korupsi bagi Insan PTBA guna memberikan pemahaman dan pembekalan pengetahunan mengenai korupsi dan hal lain yang berkaitan dengan korupsi. Sepanjang tahun 2023 Perusahaan telah memberikan pelatihan dan sosialisasi anti korupsi (termasuk *anti-fraud dan anti bribery*) sebanyak 6 pelatihan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The company has established anti-corruption policies contained in the Corporate Governance Policy, Board Manual, Code of Conduct, Whistleblowing System Guidelines, and Gratification Control Guidelines, which substantially refer to Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.

Anti-Corruption Handling Programs and Procedures

The Company has a strong commitment to implement anti-corruption business practices in order to realize a healthy business climate. In supporting anti-corruption practices, the Company forms an anti-corruption culture in the Company's internal environment, through an anti-corruption policy which is supported by the signing of an Integrity Pact as a form of commitment. The Company also implements an Anti-Bribery Management System (SMAP) with the international standard Anti-Bribery Management System or Anti-Bribery Management ISO 37001:2016, as a form of implementing good corporate governance and an effort to build a company that is free from corrupt practices. Due to the Company's commitment to implementing SMAP, Bukit Asam became the first mining SOEs to obtain ISO 370001:2016 Anti-Bribery Management System.

Procedures to handle anti-corruption in the Company are realized through the formation of human capital who are responsible for supervision, to participate in education and training regarding audit procedures and detecting risks of irregularities, as well as increasing awareness of capital employees by involving them in anti-corruption education and training, especially in units with potential to be exposed to corrupt practices, fraud, bribery, gratification, and others.

Anti-Corruption Training/Socialization

The company provides anti-corruption training and socialization for PTBA employees to provide understanding and knowledge regarding corruption and other matters related to corruption. In 2023, the Company conducted 5 anti-corruption training and socialization (including anti-fraud and anti-bribery) as listed in the table below:

Jenis Type	Judul Pelatihan Training Title	Tempat dan Tanggal Place and Date	Jumlah Peserta Number of Participant	Penyelenggara Organizer
Training	Diklat Sertifikasi Audit Kecurangan (Fraud Audit)+Asesmen Fraud Audit Certification Training + Assessment	Green Forest Bogor Hotel, 13-19 Maret 2023 Green Horest Hotel Bogor, March 13-19, 2023	2	PPA&K - LSP Auditor Internal
Training	Audit Investigative Di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Investigative Audit Within the Government's Internal Supervisory Apparatus	Rizen Padjajaran Hotel, 08-12 Mei 2023 Rizen Padjajaran Hotel, May 8-12, 2023	1	Pusdiklatwas BPKP BPKP Education and Training Center
Training	Internal Audit Mind Id Group Mengenai "Audit Forensik Dan Investigasi" Internal Audit MIND ID Group on "Forensic Audit and Investigation"	Novotel Hotel Bandar Lampung, 04-05 September 2023 Novotel Hotel Bandar Lampung, September 4-5, 2023	6	PTBA & MIND ID
Training	Webinar Money Laundering : Kenali, Cegah, Dan Berantas Money Laundering Webinar: Recognize, Prevent, and Eradicate	Zoom Meeting Di Lokasi Kerja Pegawai, Tanjung Enim, 03 Mei 2023 Tanjung Enim, May 3, 2023, by Zoom meeting	5	Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) Indonesian Forensic Auditors Association (AAFI)
Training	Seminar (Hybrid) Anti Fraud Day Seminar (Hybrid) Anti Fraud Day	Hotel Js Luwansa, 03 Juli 2023 JS Luwansa Hotel, July 3, 2023	1	GRC Management
Webinar	Mining Industry, Aspek Penerapapan Manajemen Risiko, Fraud Risk Management Mining Industry, Aspek Penerapapan Manajemen Risiko, Fraud Risk Management	Virtual, 30 Maret 2023 March 30, 2023	6	Deloitte

Selain memberikan pelatihan kepada pegawai, PTBA juga tetap konsiten untuk menerapkan ISO-37001:2016 tentang SMAP. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya survey pemahaman yang ditujukan kepada seluruh pegawai PTBA di tahun 2023 atas penerapan SMAP tersebut. Alhasil, PTBA berhasil mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 berdasarkan hasil audit dari PT TUV NORD Indonesia selaku Badan Sertifikasi Independen.

Besides training to employees, PTBA also remains consistent in implementing ISO-37001:2016 regarding SMAP. This is proven by a survey for at all PTBA employees in 2023 regarding the implementation of the SMAP. As a result, PTBA succeeded in maintaining ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certification based on audit results from PT TUV NORD Indonesia as an Independent Certification Body.



Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Policy

PTBA memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa di Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PTBA No. 260/0100/2023, yang isinya mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Pedoman tersebut menjadi panduan Perusahaan dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien. Dalam Pedoman Barang dan Jasa PTBA, ditetapkan prinsip utama pengadaan barang dan jasa, yaitu efisien, efektif, transparan, adil dan wajar, akuntabel, dan mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance*.

Pengadaan barang dan jasa di Perusahaan menggunakan sistem bernama Spend Management System yang merupakan sistem pengadaan perusahaan yang terintegrasi, sehingga dapat menjamin praktik pengadaan yang bertanggung jawab. *Spend* PTBA dapat diakses oleh publik pada tautan *website* Perusahaan atau link https://spend.bukitasam.co.id/web/index.

PTBA has a policy regarding the procurement of goods and services in the Company which is determined based on the Decree of the Directors of PTBA No. 260/0100/2023, the contents of which refer to the Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and MIND ID Implementation Policy for Strategic Guidelines on Procurement and Logistics. These guidelines serve as the Company's guide in realizing effective and efficient procurement of goods and services. In the PTBA Goods and Services Guidelines, the main principles for procurement of goods and services are efficient, effective, transparent, fair and reasonable, accountable, and prioritizing the principles of Good Corporate Governance.

Procurement of goods and services in the Company uses a system called the Spend Management System, which is an integrated company procurement system, to guarantee responsible procurement practices. The system can be accessed by the public via the Company website link or the link https://spend.bukitasam.co.id/web/index.

Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control



Perusahaan melaksanakan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang merupakan standar etika Perusahaan dalam mengatur ketentuan pemberian dan penerimaan hadiah, pelaporan gratifikasi, pengawasan, dan sanksi. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 10/SK/PTBADEKOM/IX/2020 dan No. 400/0100/2020 tentang Penerapan Prinsip dan Praktik *Good Corporate Governance* untuk Kebijakan Anti Gratifikasi yang berlaku di PTBA. Adapun substansi yang diatur dalam kebijakan tersebut mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.
3. Peraturan Menteri BUMN No. 09/MBU/06/2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian BUMN.

The Company implements policies which constitute the Company's ethical standards in regulating the provisions for giving and receiving gifts, reporting gratuities, supervision, and sanctions. The Company's Gratification Control Policy is established through Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 10/SK/PTBADEKOM/IX/2020 and No. 400/0100/2020 concerning the Application of Good Corporate Governance Principles and Practices for the Anti-Gratification Policy in PTBA. The substances regulated in the policy refer to:

1. Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.
2. Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. SE-2/MBU/07/2019 dated July 29, 2019, concerning Clean Management of State-Owned Enterprises Through the Implementation of Prevention of Corruption, Collusion and Nepotism and Handling of Conflicts of Interest and Strengthening Internal Supervision.
3. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. 09/MBU/06/2021 concerning Gratification Reporting within the Ministry of SOEs.

Prinsip Umum Pemberian dan Penerimaan Hadiah

Insan PTBA dilarang menerima gratifikasi yang dianggap suap, dan wajib melaporkan kepada KPK atas penerimaan yang dilakukan.

Pemberian maupun penerimaan diperkenankan selama masih dalam batas kewajaran serta memenuhi peraturan yang ditetapkan secara khusus oleh Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan tidak dapat membenarkan pemberian maupun penerimaan hadiah dalam berbagai bentuk yang diberikan oleh jajaran Perusahaan ataupun pihak-pihak tertentu, dengan maksud memengaruhi keputusan jajaran Perusahaan atau untuk memberikan keuntungan bagi salah satu pihak di luar batas-batas kewajaran, baik secara hukum dan etika bisnis.

Maksud, Tujuan, dan Manfaat

Pengendalian Gratifikasi di lingkup Perusahaan dimaksudkan:

1. Sebagai Pedoman bagi karyawan PTBA untuk memahami, mencegah, dan menanggulangi gratifikasi di Perusahaan;
2. Sebagai Pedoman bagi karyawan PTBA dalam mengambil sikap yang tegas terhadap gratifikasi di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik;
3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Memberikan arah dan acuan bagi karyawan PTBA mengenai pentingnya Kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.

Mekanisme Pengendalian Gratifikasi

Pemberian

1. Perusahaan melarang setiap individu jajaran Perusahaan untuk memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung hadiah, suap, dan sejenisnya kepada Penyelenggara negara, Mitra Kerja, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan, di mana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga dapat digunakan untuk memengaruhi atau menggerakkan pihak-pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Selain pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian atau hibah untuk kegiatan pembinaan usaha kecil, sumbangan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, sumbangan kepada Pemerintah Daerah yang ditentukan berdasarkan *Memorandum of Understanding* (Mou) dimungkinkan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur hal tersebut.
3. Pemberian kepada pihak lain dalam rangka tanda terima kasih, bingkisan besar keagamaan, cinderamata, dan kenang-kenangan dapat diberikan dalam bentuk barang atau uang, dengan jumlah konfirmasi maksimal Rp3.000.000,00 per orang/ perusahaan per tahun kecuali untuk kegiatan promosi dan *sponsorship*.
4. Pemberian kepada pihak lain dalam rangka untuk kelancaran operasional Perusahaan dalam jumlah

General Principles of Giving and Receiving Gifts

PTBA employees are prohibited from accepting gratuities which are considered bribes, and are required to report to the Corruption Eradication Committee.

Giving or receiving is permitted within reasonable limits and meets the regulations specifically determined by the Company or applicable laws and regulations. The Company cannot justify giving or receiving gifts in various forms given by Company officials or certain parties, with the intention of influencing the decisions of Company officials or to provide benefits to one party beyond reasonable limits, both legally and in business ethics.

Aims, Objectives, and Benefits

Gratification Control within the Company is intended to:

1. As a guide for PTBA employees to understand, prevent, and deal with gratification in the Company;
2. As a guide for PTBA employees in taking a firm stance towards gratification in the Company to realize good Company management;
3. Realizing Company management that is free from all forms of Corruption, Collusion, and Nepotism;
4. Provide direction and reference for PTBA employees regarding the importance of compliance in reporting gratuities to protect themselves and their families from the possibility of being charged with the crime of bribery.

Gratification Control Mechanism

Giving

1. The Company prohibits any individual within the Company's ranks from giving or promising, either directly or indirectly, gifts, bribes, and others to State Officials, Business Partners, and other parties related to the Company, where such giving is known or reasonably suspected to be used to influence or force these parties to do or not do something in their position that is contrary to their obligations.

2. Apart from the gifts as intended in paragraph (1), gifts or grants for small business development activities, donations for social and religious activities, and donations to Regional Governments determined based on a Memorandum of Understanding (Mou) are possible as long as they are in accordance with the provisions of the governing laws and regulations
3. Gifts to other parties as a token of gratitude, religious gifts, and souvenirs can be given in the form of goods or money, with a maximum confirmation amount of Rp3,000,000,00 per person/company per year except for promotional activities and sponsorship.

4. Grants to other parties for the smooth operation of the Company in certain amounts may be carried out by

tertentu dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas setelah mendapat persetujuan dari Direksi.

5. Pemberian kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan batasan sebagai berikut:
   a. Pemberian berupa barang wajib mencantumkan logo Perusahaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari barang tersebut.
   b. Pemberian tidak dilakukan secara terus menerus terhadap satu pihak, maksimal 3 (tiga) kali/tahun.
   c. Pemberian tersebut tidak dimaksudkan untuk menyuap dan/atau mempengaruhi pihak yang bersangkutan yang dapat menyebabkan citra negatif Perusahaan.

Penerimaan

1. Perusahaan melarang setiap individu jajaran Perusahaan untuk:
   a. Menerima hadiah, suap, dan sejenisnya dari pihak mana pun yang diketahui dan patut diduga bahwa hadiah, suap, dan sejenisnya tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
   b. Meminta hadiah, suap, dan sejenisnya dari pihak mana pun yang diketahui atau patut diduga digunakan untuk memengaruhi pengambilan Keputusan baik keputusan sendiri maupun pejabat yang berwenang atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
   c. Memotong atau mengambil sebagian jumlah pembayaran kepada pihak ketiga sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
2. Setiap individu jajaran Perusahaan yang menerima hadiah, berapa pun nilainya dan dalam bentuk apa pun, wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan menggunakan Formulir 1.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan hadiah dari pihak mana pun dalam rangka promosi perusahaan, tanda terima kasih, bingkisan hari besar keagamaan, cinderamata dan kenang-kenangan yang dimaksudkan sebagai pemberian suap dan/atau bernilai kurang dari Rp3.000.000 per orang/perusahaan/tahun dapat diterima sebagai suatu Kepatutan dalam pergaulan sehari-hari dengan ketentuan:
   a. Mencantumkan logo/nama perusahaan pemberian yang merupakan bagian dari kegiatan promosi perusahaan pemberi.
   b. Pemberian tersebut tidak dilakukan secara terus menerus oleh pemberi yang sama kepada jajaran Perusahaan maksimal 3 (tiga) kali/tahun.
   c. Setiap individu jajaran Perusahaan tidak melakukan pembicaraan atau memberikan informasi internal Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau citra negatif Perusahaan.
4. Apabila individu jajaran Perusahaan menerima hadiah yang nilainya tidak melebihi ketentuan sebagaimana

prioritizing the principle of accountability after obtaining approval from the Board of Directors.

5. Gifts to other parties as intended in paragraph (3) and paragraph (4) are regulated with the following limitations:
   a. Gifts in the form of goods must include the Company logo which is an inseparable part of the goods.
   b. Gifts are not made continuously to one party, a maximum of 3 (three) times/year.
   c. These gifts are not intended to bribe and/or influence the parties concerned which could cause a negative image of the Company.

Receiving

1. The Company prohibits every individual within the Company's ranks from:
   a. Accepting gifts, bribes, and other forms from any party who is known and reasonably suspected that the gifts, bribes, and other forms were given to motivate them to do or not do something in their position which is contrary to their obligations.
   b. Requesting gifts, bribes, and other forms from any party who is known or reasonably suspected to be used to influence decision making, either his or her own decision or that of an authorized official or to encourage someone to do or not do something in their position that is contrary to their obligations.
   c. Withholding or taking part of the amount of payments to third parties as compensation for carrying out their duties and obligations.
2. Every individual within the Company who receives a gift, regardless of value and in whatever form, is required to report it to their direct supervisor using Form 1.
3. Excluded from the provisions as referred to in paragraph (1), are accepting gifts from any party in the context of company promotion, tokens of thanks, gifts for religious holidays, and souvenirs intended as a bribe and/or worth less than Rp3,000,000 per person/company/year can be accepted as propriety in daily interactions with the following conditions:
   a. Include the logo/name of the giving company which is part of the giving company's promotional activities.
   b. This gift is not made continuously by the same giver to the Company's ranks a maximum of 3 (three) times/year.
   c. Individuals within the Company's ranks do not hold discussions or provide internal information about the Company that could give rise to a conflict of interest or a negative image of the Company.
4. If an individual from the Company's ranks receives a gift whose value does not exceed the provisions as intended

dimaksud pada ayat (3), maka penerima hadiah tersebut, dengan persetujuan pimpinannya, dapat menyimpan dan memanfaatkan hadiah tersebut.

5. Jika hadiah yang diterima dianggap sebagai hal yang tidak patut, maka kewajiban bagi penerima hadiah untuk mengembalikan kepada si pemberi dengan mengucapkan terima kasih dan penjelasan mengenai Kebijakan ini, dengan menggunakan Formulir 2.
6. Jika pemberi tidak diketahui alamatnya atau alamatnya berada di tempat yang jauh atau di luar negeri, maka cukup Formulir 2 saja yang dikirimkan sedangkan hadiahnya diberikan kepada lembaga sosial yang ditentukan oleh Perusahaan.

in paragraph (3), then the recipient of the gift, with the approval of his or her management, can keep and utilize the gift.

5. If the gift received is considered inappropriate, it is the obligation of the recipient of the gift to return it with thanks and an explanation of this Policy, using Form 2.
6. If the giver's address is unknown or his address is in a distant place or abroad, then only Form 2 is sent while the prize is given to the social institution determined by the Company.

Sistem Pelaporan Gratifikasi

Pelaporan Gratifikasi dilakukan melalui aplikasi e-Gratifikasi yang dapat diakses melalui http://aplikasi.bukitasam.co.id/e-gratifikasi dan apabila di tempat penugasn Wajib Lapor Gratifikasi belum atau tidak terhubung dengan e-Gratifikasi, maka pelaporan dapat disampaikan secara manual (tertulis) atau pun melalui email yang ditujukan kepada Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Gratification Reporting System

Gratification reporting is carried out via the e-Gratification application which can be accessed via http://aplikasi.bukitasam.co.id/e-gratification. If the work location for the Mandatory Gratification Report is not connected to e-Gratification, then reporting can be submitted manually (in writing) or via email addressed to the Internal Audit Unit.

Sosialisasi Gratifikasi

Perusahaan melaksanakan sosialisasi gratifikasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran (*awareness*) Insan Perusahaan. Tahun 2023, Kegiatan sosialisasi gratifikasi dilaksanakan oleh SPI pada saat pembukaan audit operasional dan audit tujuan tertentu sebanyak 14 kali. Selain itu, kegiatan sosialisasi gratifikasi juga dilaksanakan bersama dengan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh Insan PTBA dan disampaikan pada tanggal 27 Maret serta 26 Juni 2023 melalui media *email blast* dari Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan & GCG.

Sebagai bentuk komitmen PTBA terhadap pengendalian gratifikasi, selain kepada Insan PTBA, sosialisasi gratifikasi juga dilakukan oleh Perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media koran dengan peredaran nasional dan lokal (Sumatera Selatan) menjelang Idul Fitri Tahun 2023.

Gratification Socialization

The company carries out the socialization of gratuities as an effort to increase awareness of company personnel. In 2023, gratification socialization activities had been carried out by Internal Audit at the opening of operational audits and audits for certain purposes 14 times. Apart from that, gratification socializations were also carried out together with anti-corruption socialization to all PTBA employees and were delivered on March 27 and June 26, 2023, via email blast from the Company Management Systems & GCG Work Unit.

As a form of PTBA's commitment to controlling gratuities, apart from PTBA's people, the Company also carries out socialization of gratuities to all stakeholders through newspapers with national and local circulation (South Sumatera) ahead of Eid al-Fitr 2023.

Jumlah Pengaduan

Sepanjang tahun 2023, tercatat tidak ada pengaduan atas penerimaan gratifikasi kepada KPK. Adapun rekapitulasi laporan gratifikasi tahun 2023, sebagai berikut:

Number of Complaints

Throughout 2023, there were no recorded complaints regarding the receipt of gratuities to the Corruption Eradication Commission (KPK). The recapitulation of the gratification report for 2023 is as follows:

Periode Laporan Reporting Period	Jumlah Laporan Masuk Number of Reports Received	Jumlah Tindak Lanjut Number of Follow-up	Status Status
Triwulan I 2023 Q1 of 2023	-	-	-
Triwulan II 2023 Q2 of 2023	-	-	-
Triwulan III 2023 Q3 of 2023	-	-	-
Triwulan IV 2023 Q4 of 2023	-	-	-
Jumlah Total	-	-	-

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Officials Wealth Report

Salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan turut serta mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Wujud pelaksanaannya adalah dengan menerapkan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada para pejabat Bukit Asam yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Negara, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tertulis dalam formulir LHKPN, yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK. Dalam hal ini, KPK menjalankan upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Pelaksanaan LHKPN memiliki tujuan untuk menciptakan penyelenggara negara yang taat pada asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap penyelenggara negara dituntut untuk mengungkapkan secara jujur, benar, dan lengkap kekayaannya kepada KPK.

Dasar Hukum

Dasar hukum penyampaian LHKPN di Bukit Asam, mengacu pada ketentuan berikut:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN);
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Menteri BUMN No. 10/ MBU/06/2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

One of the Company's form of commitment in implementing good corporate governance is by participating in supporting state administration that is free from the practices of Corruption, Collusion, and Nepotism as stipulated in Law no. 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism. The effort is carried out by implementing the obligation to submit the State Officials Wealth Report (LHKPN) to Bukit Asam officials who are designated as State Administrators, in accordance with Corruption Eradication Commission (KPK) Regulation No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration of Announcements and Examination of State Administration Assets.

LHKPN is a list of all State Officials' Assets written in the LHKPN form, which is determined by the Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in the KPK Decree. In this case, the Corruption Eradication Commission carries out efforts to prevent corruption, including through registration and examination of the LHKPN.

The implementation of LHKPN aims to realize state administrators who adhere to the general principles of state administration that are free from the practices of corruption, collusion, and nepotism, as well as other disgraceful acts. Every state administrator is required to disclose honestly, correctly, and completely his or her assets to the Corruption Eradication Commission.

Legal Basis

The legal basis for submitting LHKPN in Bukit Asam refers to the following provisions:

1. Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism;
2. KPK Regulation No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration of Announcements and Examination of State Administration Assets (LHKPN);
3. Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission;
4. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. 10/ MBU/06/2021 concerning Reporting the Assets of State Officials within the Ministry of State-Owned Enterprises.
5. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;

Pelaksanaan LHKPN di Lingkup Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Direksi PTBA No. 021/Kep/Int-0100/OT.01/2017, pejabat PTBA yang wajib menyampaikan LHKPN yaitu:

1. Dewan Komisaris;
2. Dewan Direksi;
3. Pejabat pada kategori jabatan manajer utama atau fungsional utama; dan
4. Manajer madya atau fungsional madya.

Realisasi LHKPN Tahun 2023

Realisasi penyampaian LHKPN oleh Wajib Lapor LHKPN PTBA pada tahun 2023 mencapai 99,06%.

Implementation of LHKPN within the Company

Based on PTBA Board of Directors Decree No. 021/Kep/Int-0100/OT.01/2017, PTBA officials who are required to submit LHKPN are:

1. Board of Commissioners;
2. Board of Directors;
3. Officials on the levels of senior manager or senior functional;
4. Mid-management or mid-functional.

LHKPN Realization in 2023

The realization of LHKPN submission by the PTBA LHKPN Mandatory Report in 2023 reached 99.06%.

Persentase Pelaporan
Reporting Percentage

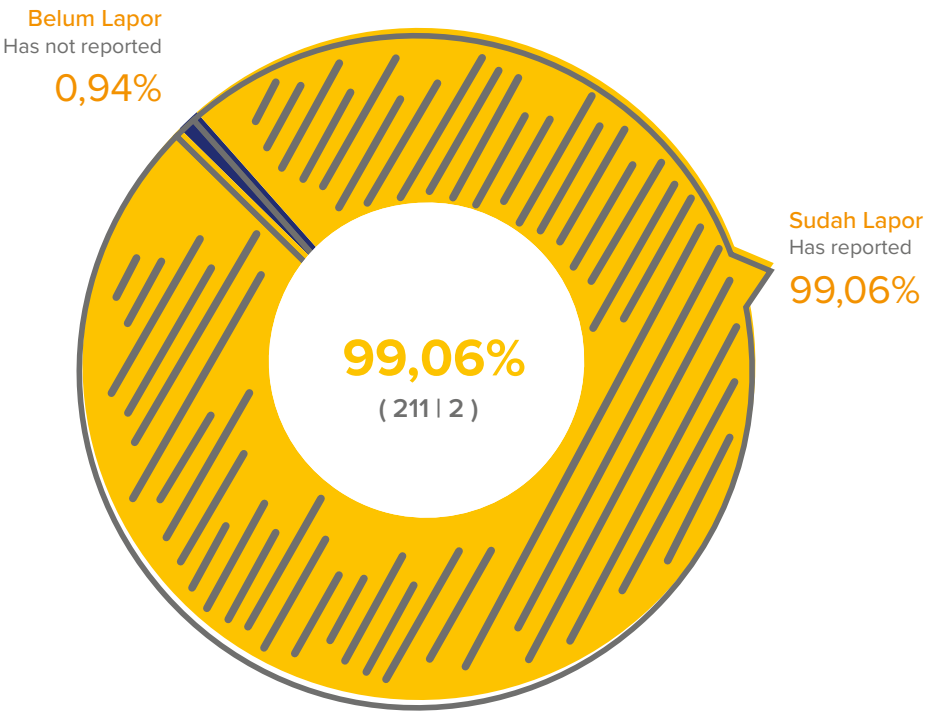

Benturan Kepentingan
Conflict of Interest

Guna menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan, Perusahaan memiliki Pedoman Benturan Kepentingan yang disahkan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 14/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 dan No. 404/0100/2020 tentang Penerapan Prinsip dan Praktik Good Corporate Governance untuk Kebijakan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) Perusahaan.

Benturan Kepentingan merupakan situasi/kondisi yang memungkinkan Insan PTBA memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimiliki dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif dan berimplikasi pada pencapaian kinerja dan citra Perusahaan dalam jangka panjang. Insan PTBA wajib menghindari segala bentuk potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan, melalui pembebasan diri dari situasi tersebut dengan melaporkannya kepada pimpinan atau yang bertanggungjawab atas penanganan benturan kepentingan.

Perusahaan menerapkan 2 (dua) prinsip utama yang harus diikuti seluruh jajaran Perusahaan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, yaitu:
1. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk ke pentingan orang atau pihak lain yang terkait dengan Perusahaan;
2. Menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat memengaruhi secara negatif terhadap independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan yang bertentangan dengan jabatan atau yang dapat merugikan Perusahaan.

In order to avoid potential conflicts of interest, the Company has Conflict of Interest Guidelines which were approved based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 14/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 and No. 404/0100/2020 concerning the Application of Good Corporate Governance Principles and Practices for Company Conflict of Interest Policies.

Conflict of Interest is a situation/condition that allows PTBA Personnel to take advantage of their position and authority within the Company for personal, family or group interests, so they cannot carry out their mandated tasks objectively and have implications for the Company's performance and image in the long term. PTBA personnel are obliged to avoid all forms of potential conflicts of interest that could be detrimental to the Company, by freeing themselves from the situation by reporting it to the management or those responsible for handling conflicts of interest.

The Company implements 2 (two) main principles that must be followed by all levels of the Company to prevent conflicts of interest, namely:
1. Do not use the position for personal interests or for the interests of other people or parties related to the Company;
2. Avoid any off-duty activities that could negatively affect independence and objectivity in making decisions that conflict with the position or that could be detrimental to the Company.

Penyediaan Dana untuk Kegiatan Politik
Provision of Funds for Political Activities

Perusahaan mengakui hak setiap Pegawai untuk menyalurkan aspirasi politiknya, dan tidak memaksa atau membatasi hak individu untuk menyalurkan aspirasi politiknya sebatas diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berkenaan dengan penyediaan dana oleh Perusahaan untuk kegiatan politik, sesuai dengan Kebijakan yang berlaku di PTBA, Perusahaan melarang penggunaan *asset* maupun memberikan dana atau sumbangan dalam bentuk apapun kepada partai politik ataupun kegiatan politik lainnya di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company recognizes the right of every employee to channel their political aspirations, and does not force or limit an individual's right to channel their political aspirations in the scope of applicable laws and regulations. However, regarding the provision of funds by the Company for political activities, in accordance with the applicable Policy in PTBA, the Company prohibits the use of assets or providing funds or donations in any form to political parties or other political activities outside the provisions of the applicable laws and regulations.

Pemenuhan Hak Terhadap Kreditor
Fulfillment of Rights Against Creditors

Perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan pemenuhan terhadap hak-hak kreditur, hal tersebut dilakukan sebagai wujud penerapan tata kelola perusahan yang baik. Pemenuhan hak-hak kreditur termasuk pembayarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/perikatan/kesepakatan antara PTBA dengan para kreditur. Sampai dengan akhir tahun 2023, tidak terdapat perkara sehubungan dengan penundaan pembayaran terhadap kreditor yang menyebabkan status PTBA diajukan gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh para kreditornya, sebagaimana disampaikan pada Bagian Pelanggaran Hukum Terkait Perburuhan, Ketenagakerjaan, Konsumen, Kepailitan, Komersial, Persaingan atau Lingkungan dalam Bab ini.

The company is committed to fulfill the rights of creditors, as a form of good corporate governance implementation. Fulfillment of creditors' rights, including payments, is carried out in accordance with the provisions of the agreement/commitment/agreement between PTBA and the creditors. Until the end of 2023, there were no cases relating to delays in payments to creditors which resulted in PTBA's status being filed for bankruptcy and/or Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) by its creditors, as stated in the Section on Law Violations Related to Labor, Employment, Consumers, Bankruptcy, Commercial, Competition or Environmental in this Chapter.

Transparansi Praktik *Bad Governance*

Transparency of Bad Governance Practices

Perusahaan menyadari pentingnya menghilangkan praktik *Bad Governance* di Perusahaan, yang dapat mengganggu sistem tata kelola perusahaan yang telah diupayakan Perusahaan selama ini. Hal ini sejalan dengan komitmen Perusahaan yang konsisten menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap aktivitas Perusahaan.

The Company realizes the importance of eliminating Bad Governance practices in the Company, which can disrupt the corporate governance system that the Company has strived for so far. This is in line with the Company's commitment to consistently implement Good Corporate Governance in every Company activity.

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak pernah/pernah mendapatkan laporan adanya aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan.

Report on Company Activities Polluting the Environment

Throughout 2023, the Company has never received any reports of Company activities that polluted the environment.

Pengungkapan Perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Perusahaan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat

Perusahaan mengungkapkan perkara penting yang berdampak material yang dihadapi oleh Perusahaan, Anak Perusahaan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dalam Laporan Tahunan, yang dapat dilihat pada Bagian Perkara Hukum dalam Bab ini.

Disclosure of Important Cases Being Faced by the Company, Subsidiaries, Active Members of the Board of Directors and/or Members of the Board of Commissioners

The Company discloses important cases that have a material impact faced by the Company, Subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who are currently serving in the Annual Report, which can be seen in the Legal Cases Section in this Chapter.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Perusahaan senantiasa patuh pada peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal perpajakan. Setiap tahunnya, Perusahaan taat dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, baik berupa pajak penghasilan, pajak badan, ataupun pajak lainnya. Perusahaan tidak pernah memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi berkaitan dengan sengketa perpajakan, sebagaimana disampaikan pada Bagian Perkara Hukum berkenaan dengan sengketa perpajakan dalam Bab ini.

Disclosure of Tax Obligations Fulfillment

The company always complies with laws and regulations, including tax. Every year, the Company complies with paying and reporting taxes, whether in the form of income tax, corporate tax, or other taxes. The Company has never obtained a guilty verdict from the tax court in relation to a tax dispute, as stated in the Legal Cases section relating to tax disputes in this Chapter.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan tahunan dan laporan keuangan dipublikasikan oleh Perusahaan secara tepat waktu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan segala informasi, analisa, dan pembahasan kinerja pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan tahun 2022 dan tahun 2023 yang telah diaudit oleh Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia).

Inconsistency in the Presentation of Annual Reports and Financial Reports with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

The annual report and financial reports are published by the Company on time, in accordance with applicable rules and regulations, and all information, analysis, and discussion of performance in this annual report refers to the 2022 and 2023 Financial Reports which have been audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia).

Perusahaan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia.

Kasus terkait Buruh dan Karyawan

Perusahaan membina hubungan kerja yang baik dengan karyawan berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik. Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat kasus hubungan industrial berkaitan dengan pegawai Bukit Asam, sebagaimana disampaikan pada Bagian Pelanggaran Hukum Terkait Perburuhan, Ketenagakerjaan, Konsumen, Kepailitan, Komersial, Persaingan atau Lingkungan dalam Bab ini.

Hubungan kerja antara Perusahaan dengan pegawai berjalan baik dan tidak terdapat konflik

Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan

Perusahaan telah menyajikan segmen operasi pada Laporan Keuangan Audited tahun 2023 sesuai dengan PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015). Di mana Perusahaan telah menyajikannya menurut pengelompokkan (segmen) jenis usaha antara lain bidang industri tambang batu bara dan berdasarkan lokasi geografis sebagai bentuk pelaporan segmen operasi, seperti yang telah disampaikan dalam Laporan Keuangan *Audited* tahun 2023 catatan.

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital

Laporan Tahunan Perusahaan baik yang disampaikan kepada Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan, maupun Laporan Tahunan Digital yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan, telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan, sehingga tidak terdapat perbedaan pada isi dan substansi.

The Company prepared and presented Financial Reports based on Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), including Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Indonesian Accountants Association.

Cases related to Workers and Employees

The Company maintains good working relationships with employees based on good corporate governance. Throughout 2023, there were no industrial relations cases related to Bukit Asam employees, as stated in the Section on Violations of Laws Related to Labor, Employment, Consumers, Bankruptcy, Commercial, Competition or the Environment in this Chapter.

The working relationship between the Company and employees runs well with no conflict.

Disclosure of Operational Segments in Financial Statement

The Company has presented operating segments in the 2023 Audited Financial Report in accordance with PSAK No. 5 (2015 Adjustment). Where the Company has presented it according to business segment, including the coal mining industry and based on geographical location as a form of operating segment reporting, as presented in the 2023 Audited Financial Report notes.

Compatibility of Annual Report Books and Digital Annual Reports

The Company's Annual Report, whether submitted to Shareholders, Stakeholders, or the Digital Annual Report which has been uploaded on the Company's official website, is in accordance with the Annual Report book printed and published by the Company. There are no differences in content and substance.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Perusahaan memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penerapan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mengacu pada prinsip ESG.

The Company is committed to supporting the achievement of sustainable development goals by implementing social and environmental responsibility activities that adhere to ESG principles.




CUKU NYI NYI
JALESVEVA JAYAMA

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan
Sustainable Performance Highlights

Aspek Ekonomi
Economic Aspect

2023 2022 2021

Kuantitas produk/jasa yang dijual
Quantity of Products/Services Sold

10 Produk Batu Bara
Coal Products

2022 : 10 Produk Batu Bara/Coal Products
2021 : 9 Produk Batu Bara/Coal Products

Kategori Produk
Product Category

Pendapatan
Revenue

38.488.867

2022 : 42.648.590
2021 : 29.261.468

Juta Rupiah
Million Rupiah

Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity

38.488.867

2022 : 42.648.590
2021 : 29.261.468

Juta Rupiah
Million Rupiah

Produk ramah lingkungan
Eco-Friendly Product

2 PLTS | SPPP

2022 : 2 PLTS | SPPP
2021 : 1 PLTS | SPPP

Unit Produk
Product Unit

Pelibatan pihak lokal (dalam negeri)
Local Supplier Involvement (Domestic)

455

2022 : 421
2021 : 457

Perusahaan/Mitra
Companies/Partners

Jumlah Pegawai Lokal
Total Local Employee

738 | 47%

2022 : 763 | 48%
2021 : 847 | 46%

Orang
Person

Aspek Lingkungan

Environmental Aspect

2023 2022 2021

Penggunaan BBM (Solar)

Fuel Consumption (Diesel)

338.550 | 13.096.478

2022 : 265.415 | 10.267.367
2021 : 174.819 | 6.762.855

Kiloliter
Gigajoule

Penggunaan Listrik

Electricity Consumption

131.428.080 | 473.457

2022 : 125.616.851 | 452.221
2021 : 119.923.281 | 431.724

kWh

Emisi Gas Rumah Kaca

Greenhouse Gas (GHG) Emission

1.028.230

2022 : 828.914
2021 : 558.038

ton CO_2e

Energi

Energy

13.570.094

2022 : 10.720.399
2021 : 7.194.688

Kiloliter
Gigajoule

Hasil Absolut Penurunan Emisi

Absolute Emission Reduction Results

323.296

2022 : 182.792
2021 : 165.524

ton CO_2e

Pengurangan (Penambahan) Air Limbah Non-B3

Reduction (Addition) of Non-Hazardous Waste Water

11.064

2022 : (90.085)
2021 : 54.761

Megaliter

Pengurangan (Penambahan) Limbah Padat Non-B3

Reduction (Addition) of Non-Hazardous Solid Waste

(5,73)

2022 : 2,78
2021 : (12,51)

Ton
Tons

Pengurangan (Penambahan) Limbah Padat dan Cair B3

Reduction (addition) of Hazardous Solid and Liquid Waste

(1.221,82)

2022 : (1.078,16)
2021 : (472,27)

Ton
Tons

Limbah yang Dikirim ke Pembuangan Akhir
Quantity of Products/Services Sold

1.024,39 | 45,73

2022 : 492,57 | 39,78
2021 : 321,48 | 56,64

Limbah Padat B3 | Limbah Padat Non B3
B3 Solid Waste | Non B3 Solid Waste

Ton
Tons

Limbah yang Dialihkan dari Pembuangan Akhir
Waste Redirected from Final Disposal

153,98 | 235,07

2022 : 80,45 | 220,67
2021 : 92,71 | 206,59

Limbah Padat B3 | Limbah Padat Non B3
B3 Solid Waste | Non B3 Solid Waste

Ton
Tons

Penggunaan Air
Water Consumption

2.029,72

2022 : 2.177,50
2021 : 1.605,03

Megaliter

Biaya Lingkungan
Environmental Costs

271.780

2022 : 173.228
2021 : 124.960

Juta Rupiah
Million Rupiah

Pelibatan Pihak Lokal (Dalam Negeri)
Local Supplier Involvement (Domestic)

13 Spesies Mamalia
Species of Mammals

122 Spesies Burung
Species of Birds

12 Spesies Herpetofauna
Species of Herpetofauna

22 Jenis Tanaman
Types of Plants

2022
13 Spesies Mamalia | Species of Mammals,
90 Spesies Burung | Species of Birds
2 Spesies Herpetofauna | Species of Herpetofauna
21 Jenis Tanaman | Plants

2021
12 Spesies Mamalia | Species of Mammals
90 Spesies Burung | Species of Birds
18 Jenis Tanaman | Plants

Spesies
Species

Aspek Sosial
Social Aspect

● 2023 ● 2022 ● 2021

Jumlah total pegawai
Total Number of Employee

1.561
2022 : 1.599
2021 : 1.827

Orang
Person

Jumlah pegawai wanita
Number of Female Employee

298
2022 : 125.616.851 | 452.221
2021 : 119.923.281 | 431.724

Orang
Person

Perputaran pegawai
Employee Turnover

0,26
2022 : 0,31
2021 : 0,49

Persen
Percent

Jumlah kecelakaan kerja
Number of Work Accident

3
2022 : 4
2021 : 2

Kasus
Case

Sumbangan
Donation

191.093
2022 : 277.261
2021 : 241.934

Juta Rupiah
Million Rupiah

Pendanaan UMK
MSE Funding

31.564
2022 : 8.500
2021 : 5.495

Juta Rupiah
Million Rupiah

Dana Bantuan untuk Kegiatan TJS Lainnya
Other CSR Activities Funding

66.936
2022 : 208.880
2021 : 166.205

Juta Rupiah
Million Rupiah

Kepuasan pelanggan
Customer Satisfaction

3,60
2022 : 3,57
2021 : 3,53

Skor dari skala 4
Score of Scale 4

Inisiatif Eksternal terkait Sustainability

External Initiatives related to Sustainability



Annual Report Award

Juara II Annual Report Award atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 pada Kategori Go Publik Non-Keuangan.

Second place in the Annual Report Award for the Annual Report Fiscal Year 2022 in the Non-Financial Go Public Category.



Corporate Governance Perception Index (CGPI)

PTBA meraih predikat The Most Trusted Company dengan nilai 90,03 yang diselenggarakan oleh The Institute for Corporate Governance (IICG) oleh Majalah SWA.

PTBA awarded as The Most Trusted Company with a score of 90.03 organized by The Institute for Corporate Governance (IICG) by SWA Magazine.



Sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)

ISO 37001:2016 Certification (Anti-Bribery Management System)

PTBA berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), hal ini menandakan komitmen kuat PTBA untuk anti korupsi dan suap.

PTBA has successfully maintained ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management System) certification, this indicates PTBA's strong commitment to anti-corruption and bribery.



Penghargaan PROPER

PROPER Award

PTBA mendapatkan 2 PROPER Emas untuk unit Pertambangan Tanjung Enim dan Pelabuhan Tarahan. Selain itu PTBA juga mendapatkan 1 PROPER Hijau untuk Dermaga Kertapati. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja lingkungan perusahaan.

PTBA awarded 2 PROPER Gold for Tanjung Enim Mining unit and Tarahan Port. Apart from that, PTBA also awarded 1 Green PROPER for Kertapati Barging Port. This award was given by the Ministry of Environment and Forestry for the company's environmental performance.



Asia Sustainability Reporting Rating (ASSRAT)

PTBA meraih predikat Platinum, merupakan predikat tertinggi atas *rating* Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2022. Penghargaan ini diberikan oleh National Center for Corporate Rating (NCSR).

PTBA awarded the Platinum predicate, which is the highest predicate for the 2022 Financial Year Sustainability Report rating. This award was given by the National Center for Corporate Ratings (NCSR).

Carbon Disclosure Project

Perusahaan mendapatkan rating "B" untuk kategori climate change, merupakan rata-rata tertinggi dari capaian industri sejenis di kelasnya, dan meningkat dibanding pencapaian tahun sebelumnya dengan rating “C”.

The company received a "B" rating in the climate change category, the highest average achievement of similar industries in its class, and increase compared to previous year's achievements with a rating of "C"

Informasi Lebih Lanjut
Further Information

Untuk Informasi Lebih Lanjut tentang kinerja keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PTBA tahun buku 2023, dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang terpisah dengan Laporan Tahunan ini.

For more details on PTBA's sustainability performance and Social and Environmental Responsibility in the 2023 fiscal year, please refer to the separate Sustainability and Social and Environmental Responsibility Report, distinct from this Annual Report.




PKBM
PESONA PULAU TEGA

Lampiran
Appendix





07

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2023 DAN 2022/
31 DECEMBER 2023 AND 2022

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2023 AND 2022

PT BUKIT ASAM Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Atas nama Dewan Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Arsal Ismail
   Alamat kantor : Jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim 31716
   Telepon : 0734-451098
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Farida Thamrin
   Alamat kantor : Jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim 31716
   Telepon : 0734-451098
   Jabatan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya ("Grup");

2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

1. *Name* : *Arsal Ismail*
   Office address : *Jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim 31716*
   Telephone : *0734-451098*
   Position : *President Director*

2. *Name* : *Farida Thamrin*
   Office address : *Jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim 31716*
   Telephone : *0734-451098*
   Position : *Finance and Risk Management Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Bukit Asam Tbk and its subsidiaries (the "Group");*

2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

3. *a. All information has been disclosed in a complete and truthful manner in the Group's consolidated financial statements;*
   b. The Group's consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and

4. *We are responsible for the Group's internal control systems.*

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi

For and on behalf of the Board of Directors



Arsal Ismail
Direktur Utama/*President Director*

Farida Thamrin
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Finance and Risk Management Director

JAKARTA
29 **Februari/*February* 2024**

PT BUKIT ASAM TBK
Kantor Pusat: Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan 31716, **T** (0734) 451 096, (0734) 452 352, **F** (0734) 451 095, (0734) 452 993
Kantor Jakarta: Menara Kadin Lt.15 Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5 Kav.2-3, Jakarta 12950, **T** (021) 525 4014, **F** (021) 525 4002
Pelabuhan Tarahan: Jl. Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan, Bandar Lampung 35242, **T** (0721) 31 545, (0721) 31 686, **F** (0721) 31 577
Dermaga Kertapati: Jl. Stasiun Kereta Api Palembang, Sumatera Selatan 30142, **T** (0711) 512 617, **F** (0711) 511 388
Pertambangan Ombilin: Jl. Manan Jatin No.1 Saringan Sawahlunto, Sumatera Barat 27421, **T** (0754) 61 021, **F** (0754) 61402

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF

PT BUKIT ASAM TBK

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian" pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Bukit Asam Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang

Lihat Catatan 2t (Informasi kebijakan akuntansi material – Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang), Catatan 4 (Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan – Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang) dan Catatan 18 (Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang) atas laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki kewajiban hukum dan konstruktif terkait dengan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang yang disebabkan oleh operasi penambangannya. Besarnya provisi tersebut ditentukan oleh estimasi dan berbagai asumsi utama, diantaranya:

- waktu kegiatan, estimasi biaya kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang di masa depan; dan
- tingkat diskonto dan tingkat inflasi.

Kami menganggap provisi tersebut menjadi hal audit utama karena saldo yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian, melibatkan penggunaan asumsi yang kompleks, dan pertimbangan tingkat tinggi untuk mengestimasi biaya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban reklamasi lingkungan dan penutupan tambang.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Prosedur audit kami meliputi sebagai berikut:

- Kami memperoleh pemahaman atas proses dan metodologi yang diadopsi oleh Grup untuk menghitung provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang;
- Kami memeriksa metodologi yang digunakan untuk menentukan asumsi terkait dengan waktu kegiatan dan estimasi biaya kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang di masa depan konsisten dengan rencana penutupan yang disusun oleh Grup dan disampaikan kepada Pemerintah Indonesia;
- Kami menguji akurasi perhitungan matematis yang atas provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang;
- Kami menilai kemampuan Grup untuk memperkirakan secara akurat dengan membandingkan asumsi biaya perkiraan historis dengan biaya aktual yang terjadi;dan

The key audit matter identified in our audit is outlined as follows.

Provision for environmental reclamation and mine closure

Refer to Note 2t (Material accounting policy information – Provision for environmental reclamation and mine closure), Note 4 (Significant accounting judgements, estimates and assumptions – Provision for environmental reclamation and mine closure) and Note 18 (Provision for environmental reclamation and mine closure) to the consolidated financial statements.

The Group has legal and constructive obligations associated with environmental reclamation and mine closure obligations as a result of its mining operations. The provision was determined using estimation and various key assumptions, which included:

- *the timing of the activities, estimated costs of future environmental reclamation and mine closure activities; and*
- *the discount rate and inflation rate.*

We considered the provision as a key audit matter due to the significance of the balance to the consolidated financial statements, the involvement of complex assumptions and the high degree of judgement to estimate the costs required to satisfy environmental reclamation and mine closure obligations.

How our audit addressed the Key Audit Matter

Our audit procedures include the following:

- *We understood the process and the methodology adopted by the Group to calculate the provision for environmental reclamation and mine closure;*
- *We checked that the methodology used to determine the assumptions related to timing of the activities and estimated costs of future environmental reclamation and mine closure activities were consistent with the closure plans prepared by the Group and submitted to the Indonesian Government;*
- *We tested the mathematical accuracy of calculation of the environmental reclamation and mine closure provision;*
- *We assessed the Group's ability to accurately forecast by comparing historical forecasted cost assumptions to actual costs incurred; and*

- Kami menilai tingkat diskonto dan tingkat inflasi yang digunakan dalam perhitungan provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang, termasuk membandingkan dengan informasi yang tersedia secara publik.

- *We assessed the discount rate and inflation rate adopted to calculate the provision for environmental reclamation and mine closure, including benchmarking to publicly available information.*

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

JAKARTA,
29 Februari/*February* 2024

Yusron, S.E., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0243

Biro Asam Tbk dan Entitas Anak
00223/2.1025/AU.1/02/0243-2/1/II/2024

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, except par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	5a	4,138,867	7,030,343	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha, neto	6	3,797,292	3,509,912	*Trade receivables, net*
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7	875,330	783,070	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*
Persediaan	8	5,499,614	3,837,187	*Inventories*
Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun	5b	541,818	8,929,196	*Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year*
Aset lancar lainnya		295,435	342,440	*Other current assets*
JUMLAH ASET LANCAR		**15,148,356**	**24,432,148**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang usaha, neto	6	188,271	232,678	*Trade receivables, net*
Piutang lainnya dari pihak berelasi	30b	18,683	29,407	*Other receivables from related parties*
Investasi pada entitas asosiasi	9a	-	25,314	*Investments in associates*
Investasi pada ventura bersama	9b	7,263,276	6,519,097	*Investments in joint ventures*
Properti penambangan	10	3,271,657	2,873,707	*Mining properties*
Aset tetap	11	8,566,210	8,410,051	*Fixed assets*
Tanaman produktif		72,820	52,679	*Bearer plants*
Pajak dibayar di muka:				*Prepaid taxes:*
- Pajak penghasilan badan	17a	25,370	160,284	*Corporate income tax -*
- Pajak lain-lain	17a	2,528,981	1,336,059	*Other taxes -*
Aset pajak tangguhan	17d	1,208,683	917,323	*Deferred tax assets*
Goodwill	12	102,077	102,077	*Goodwill*
Aset tidak lancar lainnya		370,805	268,383	*Other non-current assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**23,616,833**	**20,927,059**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET		**38,765,189**	**45,359,207**	***TOTAL ASSETS***

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, except par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	13	2,082,188	1,935,818	*Trade payables*
Biaya yang masih harus dibayar	14	4,857,830	4,485,018	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	15	852,007	1,331,997	*Short-term employee benefit liabilities*
Utang pajak:				*Taxes payable:*
- Pajak penghasilan badan	17b	295,176	893,655	*Corporate income tax -*
- Pajak lain-lain	17b	496,645	616,152	*Other taxes -*
Pinjaman bank	20	68,000	2,240	*Bank borrowings*
Liabilitas sewa	21	490,017	589,437	*Lease liabilities*
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	18	329,190	257,812	*Provision for environmental reclamation and mine closure*
Bagian jangka pendek dari liabilitas imbalan pascakerja	19	228,521	358,153	*Current maturities of post-employment benefit liabilities*
Utang jangka pendek lainnya	16	268,527	231,498	*Other current liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		**9,968,101**	**10,701,780**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas sewa	21	743,665	770,524	*Lease liabilities*
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	18	1,787,690	1,535,084	*Provision for environmental reclamation and mine closure*
Liabilitas imbalan pascakerja	19	4,625,311	3,333,429	*Post-employment benefit liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan	17d	77,226	102,344	*Deferred tax liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		**7,233,892**	**5,741,381**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		**17,201,993**	**16,443,161**	***TOTAL LIABILITIES***

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/3 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, except par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				***Equity attributable to owners of the parent entity***
Modal saham				*Share capital*
Modal dasar - 5 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.995 lembar saham Seri B				*Authorised - 5 Series A Dwiwarna shares and 39,999,999,995 Series B shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 11.520.659.245 lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham	22	1,152,066	1,152,066	*Issued and fully paid - 5 Series A Dwiwarna shares and 11,520,659,245 Series B shares with a value of Rp100 per share*
Tambahan modal disetor	22	594,303	594,303	*Additional paid-in capital*
Saham treasuri	23	(43,257)	(43,257)	*Treasury shares*
Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain		19,194	5,404	*Reserve for changes in financial assets at fair value through other comprehensive income*
Selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama		693,100	704,735	*Currency differences from translation of subsidiaries' and joint ventures' financial statements*
Saldo laba				*Retained earnings*
- Dicadangkan	25	13,730,400	13,730,400	*Appropriated -*
- Belum dicadangkan		5,288,732	12,561,417	*Unappropriated -*
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		**21,434,538**	**28,705,068**	***Total equity attributable to owners of the parent entity***
Kepentingan nonpengendali	9c	128,658	210,978	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**21,563,196**	**28,916,046**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**38,765,189**	**45,359,207**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/1 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham dasar dan dilusian)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, except for basic and diluted earnings per share)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pendapatan	26	38,488,867	42,648,590	***Revenue***
Beban pokok pendapatan	27a	(29,331,562)	(24,682,304)	***Cost of revenue***
Laba bruto		**9,157,305**	**17,966,286**	***Gross profit***
Beban umum dan administrasi	27b	(1,936,635)	(2,390,336)	*General and administrative expenses*
Beban penjualan dan pemasaran	27c	(656,362)	(953,120)	*Selling and marketing expenses*
Penghasilan lainnya, neto	27d	638,401	522,591	*Other income, net*
Laba usaha		**7,202,709**	**15,145,421**	***Operating profit***
Penghasilan keuangan	28a	584,339	428,033	*Finance income*
Biaya keuangan	28b	(204,038)	(200,203)	*Finance costs*
Bagian atas keuntungan neto entitas asosiasi dan ventura bersama	9b	571,303	829,063	*Share in net profit of associates and joint ventures*
Laba sebelum pajak penghasilan		**8,154,313**	**16,202,314**	***Profit before income tax***
Beban pajak penghasilan	17c	(1,861,792)	(3,422,887)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan		**6,292,521**	**12,779,427**	***Profit for the year***

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham dasar dan dilusian)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, except for basic and diluted earnings per share)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:				***Other comprehensive (loss)/ income for the year:***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	19	(1,039,691)	(615,196)	*Remeasurement of post-employment benefit liabilities*
Beban pajak penghasilan terkait	17d	228,732	135,316	*Related income tax expenses*
		(810,959)	(479,880)	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be reclassified to profit or loss:*
Selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama		(11,635)	509,960	*Currency differences from translations of subsidiaries' and joint ventures' financial statements*
Perubahan nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7	13,790	(43,141)	*Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income*
		(808,804)	**(13,061)**	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		**5,483,717**	**12,766,366**	***Total comprehensive income for the year***
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Profit for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		6,105,856	12,567,582	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	9c	186,665	211,845	*Non-controlling interests*
Laba tahun berjalan		**6,292,521**	**12,779,427**	***Profit for the year***
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Total other comprehensive income for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		5,297,052	12,554,521	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	9c	186,665	211,845	*Non-controlling interests*
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		**5,483,717**	**12,766,366**	***Total other comprehensive income for the year***
Laba per saham - dasar dan dilusian (nilai penuh)	31	**532**	**1,094**	***Earnings per share - basic and diluted (full amount)***

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to the owners of the parent entity*										
		Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saham treasuri/ *Treasury shares*	Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain/ *Reserve for changes in financial assets at fair value through other comprehensive income*	Selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama/ *Currency differences from translation of subsidiaries' and joint ventures' financial statements*	Saldo laba telah dicadangkan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba belum dicadangkan penggunaannya/ *Unappropriated retained earnings*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022		**1,152,066**	**594,303**	**(43,257)**	**48,545**	**194,775**	**13,730,400**	**8,382,833**	**24,059,665**	**194,059**	**24,253,724**	***Balance as at 1 January 2022***
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	12,567,582	12,567,582	211,845	12,779,427	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:												*Other comprehensive income:*
Perubahan dari aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7	-	-	-	(43,141)	-	-	-	(43,141)	-	(43,141)	*Changes in financial asset at fair value through other comprehensive income*
Selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama		-	-	-	-	509,960	-	-	509,960	-	509,960	*Currency differences from translation of subsidiaries' and joint ventures' financial statements*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	19, 17d	-	-	-	-	-	-	(479,880)	(479,880)	-	(479,880)	*Remeasurement of post-employment benefit liabilities, net of tax*
Dividen kas	9c, 24	-	-	-	-	-	-	(7,909,118)	(7,909,118)	(194,926)	(8,104,044)	*Cash dividends*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		**1,152,066**	**594,303**	**(43,257)**	**5,404**	**704,735**	**13,730,400**	**12,561,417**	**28,705,068**	**210,978**	**28,916,046**	***Balance as at 31 December 2022***
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	6,105,856	6,105,856	186,665	6,292,521	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:												*Other comprehensive income:*
Perubahan dari aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7	-	-	-	13,790	-	-	-	13,790	-	13,790	*Changes in financial asset at fair value through other comprehensive income*
Selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama		-	-	-	-	(11,635)	-	-	(11,635)	-	(11,635)	*Currency differences from translation of subsidiaries' and joint ventures' financial statements*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	19, 17d	-	-	-	-	-	-	(810,959)	(810,959)	-	(810,959)	*Remeasurement of post-employment benefit liabilities, net of tax*
Dividen kas	9c, 24	-	-	-	-	-	-	(12,567,582)	(12,567,582)	(268,985)	(12,836,567)	Cash *dividends*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		**1,152,066**	**594,303**	**(43,257)**	**19,194**	**693,100**	**13,730,400**	**5,288,732**	**21,434,538**	**128,658**	**21,563,196**	***Balance as at 31 December 2023***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 4/1 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED AS AT 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan		38,297,048	42,635,578	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan		(28,936,511)	(22,586,762)	*Cash paid to suppliers and employees*
Pembayaran royalti		(4,342,928)	(3,861,246)	*Payments of royalties*
Penerimaan pengembalian pajak		134,914	14,874	*Cash receipts from tax restitution*
Pembayaran pajak penghasilan		(2,521,878)	(3,957,385)	*Payments for income taxes*
Penerimaan bunga		590,051	422,842	*Receipt of interest income*
Pembayaran bunga		(115,989)	(140,462)	*Payment of interest*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		**3,104,707**	**12,527,439**	***Net cash flows provided from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penambahan aset tetap dan tanaman produktif		(937,246)	(780,546)	*Addition of fixed assets and bearer plants*
Penempatan deposito berjangka		(1,747,459)	(21,351,993)	*Placement of time deposits*
Pencairan deposito berjangka		10,134,836	21,433,783	*Withdrawal of time deposits*
Penambahan properti penambangan		-	(108,590)	*Addition of mining properties*
Penempatan dana reklamasi dan penutupan tambang		(72,311)	(15,678)	*Placement of reclamation and mine closure fund*
Pengeluaran pada aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7	(80,000)	(471,250)	*Addition of financial assets at fair value through other comprehensive income*
Penerimaan dari pengembalian investasi pada entitas asosiasi		198,665	-	*Cash receipts from refund of investment in associates*
Penambahan investasi pada ventura bersama	9b	(247,836)	-	*Addition of investments in joint ventures*
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi		**7,248,649**	**(1,294,274)**	***Net cash flows provided from/(used in) investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran dividen kepada pemegang saham induk	24	(12,567,582)	(7,909,118)	*Payment of dividends to owners of the parent entity*
Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali	9c	(268,985)	(194,926)	*Payments of dividends to non controlling interests*
Pembayaran pinjaman bank		(2,240)	(3,700)	*Proceeds from bank borrowings*
Penerimaan deviden dari entitas pengendalian bersama	9c	9,240	-	*Proceeds of dividends from non controlling interests*
Penerimaan atas pinjaman bank	35b	68,000	-	*Repayments of bank borrowings*
Pembayaran liabilitas sewa	35b	(473,351)	(560,870)	*Payment of lease liabilities*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		**(13,234,918)**	**(8,668,614)**	***Net cash flows used in financing activities***
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**(2,881,562)**	**2,564,551**	***NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	5	**7,030,343**	**4,394,195**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
EFEK PERUBAHAN KURS PADA KAS DAN SETARA KAS		**(9,914)**	**71,597**	***EFFECT OF CHANGES IN EXCHANGE RATE ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	5	**4,138,867**	**7,030,343**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***
Lihat Catatan 35a untuk informasi transaksi non-kas Grup.				*Refer to Note 35a for the Group's non-cash information.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

PT Bukit Asam Tbk ("Perusahaan" atau "PTBA") didirikan pada tanggal 2 Maret 1981, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1980 dengan Akta Notaris Mohamad Ali No. 1, yang diubah dengan Akta Notaris No. 5 tanggal 6 Maret 1984 dan No. 51 tanggal 29 Mei 1985 dari notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-7553-HT.01.04.TH.85 tanggal 28 November 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 33, Tambahan No. 550, tanggal 25 April 1986. Pada tahun 2008, Anggaran Dasar Perusahaan disesuaikan terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("PT") dan nama Perusahaan dapat disingkat menjadi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Perubahan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Ketetapan No. AHU-50395.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 76, Tambahan No. 18255 tanggal 19 September 2008.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), meski berubah statusnya, anggota *Holding* tetap diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal-hal yang sifatnya strategis. Negara memiliki pengendalian terhadap anggota *Holding*, baik secara langsung melalui saham Seri A "Dwiwarna", maupun tidak langsung melalui PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (sebelumnya MIND ID).

Perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui akta inbreng tanggal 28 November 2017 sehingga PT Bukit Asam (Persero) Tbk berubah nama menjadi PT Bukit Asam Tbk.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan terkait dengan, diantaranya, pengaturan tentang saham, pemindahan hak atas saham, dewan komisaris dan direksi, tugas wewenang dan kewajiban direksi dan dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham. Perubahan tersebut sebagaimana dimaksud pada Akta No. 61 Tahun 2023 dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.09-0138986 tanggal 12 Juli 2023.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ("RUPS") yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2023, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan Akta No. 62 Tahun 2023 dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.09-0130619 tanggal 22 Juni 2023.

1. GENERAL

PT Bukit Asam Tbk (the "Company" or "PTBA") was established on 2 March 1981 under Government Regulation No. 42 of 1980, based on Notarial Deed No. 1 of Mohamad Ali, as amended by the Notarial Deeds No. 5 dated 6 March 1984 and No. 51 dated 29 May 1985 of the same notary. The deed of establishment and its amendments were approved by the Minister of Justice in Decree No. C2-7553-HT.01.04.TH.85 dated 28 November 1985 and published in Supplement No. 550 of the State Gazette No. 33 dated 25 April 1986. In 2008, the Company's Articles of Association were amended to comply with Law No. 40, 2007 on Limited Liability Companies ("PT") and to gain approval for the abbreviation of the Company's name as PT Bukit Asam (Persero) Tbk. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights in his Decree No. AHU-50395.AH.01.02 of 2008 dated 12 August 2008 and was published in Supplement No. 18255 of State Gazette No. 76 dated 19 September 2008.

In accordance with Government Regulation No. 72 of 2016 on State Capital Administration and Administration Procedures at State-Owned Enterprises ("BUMN"), even if the ownership status changes, the Holding members will still be treated the same as state-owned enterprises for strategic matters. The state has control over the holding members either directly through the Series A "Dwiwarna" shares or indirectly through the PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (formerly MIND ID).

Based on the amendment approved by the Minister of State-Owned Enterprises through the deed of inbreng dated 28 November 2017, PT Bukit Asam (Persero) Tbk changed its name to PT Bukit Asam Tbk.

The most recent amendment to the Company's Articles of Association related to share arrangements, the transfer rights of shares, the board of commissioners and directors, roles authorisation and duties of the directors and board of commissioners, and general meetings of shareholders. The amendment was stipulated in Deed No. 61 of 2023 before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. which was received by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-AH.01.09-0138986 dated 12 July 2023.

Based on the Company's General Meeting of Shareholders ("GMS") that was held on 15 June 2023, there is an amendment of the composition of the Board of Commissioners was stipulated in Deed No. 62 of 2023 before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. and received by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-AH.01.09-0130619 dated 22 June 2023.

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 dan 46 Tahun 2022 serta Keputusan Menteri Keuangan No. 516/KMK.06/2022 Tahun 2022 dan Akta Penyertaan Saham dengan Pemasukan dalam Perseroan Terbatas PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ("MII") yang sebelumnya disebut sebagai MIND ID No. 137 pada tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn maka terhitung sejak tanggal 21 Maret 2023, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) memiliki 7.490.437.495 lembar saham seri B atau 65,02%. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2023, melanjutkan rangkaian transaksi tersebut, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) telah mengalihkan saham yang dimilikinya (saham treasuri yang dibeli pada tahun 2019) sebanyak 105.213.200 lembar saham seri B atau 0,91% kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) namun saham "Dwiwarna" tetap dimiliki oleh Pemerintah.

Perusahaan dan entitas anaknya (keseluruhan dirujuk sebagai "Grup") bergerak dalam bidang industri tambang batubara dan aktivitas terkait, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan perdagangan, pengelolaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industri pertambangan batubara beserta hasil olahannya, bidang pengembangan perkebunan, dan bidang pelayanan kesehatan.

Perusahaan berdomisili di Indonesia, dengan kantor yang terdaftar di Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

Pada bulan Desember 2002, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 346.500.000 saham yang terdiri dari 315.000.000 saham divestasi yang sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah dan 31.500.000 saham baru dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham dan harga penawaran Rp575 (nilai penuh) per saham. Penawaran Umum Saham Perdana tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Desember 2002.

***1. GENERAL** (continued)*

Based on Government Regulations no. 45 and 46 of 2022 and Minister of Finance Decree No. 516/KMK.06/2022 Year 2022 and Deed of Participation of Shares with Entry into a Limited Liability Company PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ("MII") which previously referred to as MIND ID No. 137 on 21 March 2023 before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, as of 21 March 2023, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) has 7,490,437,495 series B shares or 65.02%. Then on 6 April 2023, continuing the series of transactions, PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) transferred its shares (treasury shares purchased in 2019) of 105,213,200 series B shares or 0.91% to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) but "Dwiwarna" shares are still owned by the Government .

The scope of activities of the Company and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") covers coal mining and related activities, including general surveying, exploration, exploitation, processing, transportation and trading, management of special coal port facilities for internal and external needs, the operation of steam power plants for internal and external needs and the provision of consulting services related to the coal mining industry as well as its derivative products, plantation development activities and healthcare activities.

The Company is incorporated and domiciled in Indonesia. The address of its registered office is Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim, South Sumatra.

In December 2002, the Company conducted an Initial Public Offering ("IPO") of 346,500,000 shares which consisted of 315,000,000 divestment shares previously owned by the Government as well as 31,500,000 new shares with a par value of Rp500 (full amount) per share and an offering price of Rp575 (full amount) per share. The shares offered in the IPO were listed on the Indonesian Stock Exchange on 23 December 2002.

1. UMUM (lanjutan)

Perusahaan juga menerbitkan 173.250.000 waran Seri I yang diberikan kepada pemegang saham (kecuali kepada Negara Republik Indonesia) dengan harga pelaksanaan waran sebesar Rp675 (nilai penuh). Pada tanggal 31 Desember 2005, seluruh waran telah dikonversi.

Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan *Vice President* Satuan Pengawasan Internal merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Irwandy Arif	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Edmar Piterdono Hamzah	:	*Commissioners*
		Carlo Brix Tewu		
Komisaris Independen	:	Andi Pahril Pawi	:	*Independent Commissioner*
		Kurnia Toha		
		Rahmat Hidayat Pulungan		
Direktur Utama	:	Arsal Ismail	:	*President Director*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Farida Thamrin	:	*Finance and Risk Management Director*
Direktur Operasi dan Produksi	:	Suhedi	:	*Operation and Production Director*
Direktur Pengembangan Usaha	:	Rafli Yandra	:	*Business Development Director*
Direktur Sumber Daya Manusia	:	Suherman	:	*Human Resources Director*

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Agus Suhartono	:	*President Commissioner and Independent Commissioner*
Komisaris	:	Devi Pradnya Paramita	:	*Commissioners*
		Edmar Piterdono Hamzah		
		Carlo Brix Tewu		
		Irwandy Arif		
Komisaris Independen	:	Andi Pahril Pawi	:	*Independent Commissioner*
Direktur Utama	:	Arsal Ismail	:	*President Director*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Farida Thamrin	:	*Finance and Risk Management Director*
Direktur Operasi dan Produksi	:	Suhedi	:	*Operation and Production Director*
Direktur Pengembangan Usaha	:	Rafli Yandra	:	*Business Development Director*
Direktur Sumber Daya Manusia	:	Suherman	:	*Human Resources Director*

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Andi Pahril Pawi	:	*Chairman*
Wakil Ketua	:	Kurnia Toha	:	*Vice Chairman*
Anggota	:	Dodi Masykur	:	*Members*
		Fadhila Achmadi Rosyid		

***1. GENERAL** (continued)*

The Company also issued 173,250,000 Series I warrants to the shareholders (except the Government of the Republic of Indonesia) at an exercise price of Rp675 (full amount). As at 31 December 2005, these warrants were fully exercised.

The Board of Commissioners, the Board of Directors, the Company's Corporate Secretary and the Vice President of the Internal Control Department are the key management personnel of the Company.

As at 31 December 2023, the composition of the Company's Board of Commissioners and its Board of Directors were as follows:

As at 31 December 2022, the composition of the Company's Board of Commissioners and its Board of Directors were as follows:

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2023 were as follows:

1. UMUM (lanjutan)

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Andi Pahril Pawi	:	*Chairman*
Wakil ketua	:	Edmar Piterdono Hamzah	:	*Vice Chairman*
Anggota	:	Dodi Masykur	:	*Members*
		Fadhila Achmadi Rosyid		

***1. GENERAL** (continued)*

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2022 were as follows:

Pada 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki 1.561 karyawan tetap (2022: 1.599 karyawan tetap) (tidak diaudit).

As at 31 December 2023, the Company had 1,561 permanent employees (2022: 1,599 permanent employees) (unaudited).

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan kepemilikan tidak langsung pada entitas anak berikut ini:

The Company has direct and indirect ownership of the following subsidiaries:

	Kegiatan usaha/ *Business activity*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Tahun beroperasi secara komersial/ *Commencement of commercial operations*	Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh induk Perusahaan/ *Proportion of ordinary shares held by parent*		Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh Grup/ *Proportion of ordinary shares held by the Group*		Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh kepentingan nonpengendali/ *Proportion of ordinary shares held by non-controlling interests*		Total asset* (sebelum eliminasi konsolidasi)/ *Total assets* (before consolidation elimination)*	
				31 Des/ *Dec* 2023 %	31 Des/ *Dec* 2022 %	31 Des/ *Dec 2023* %	31 Des/ *Dec* 2022 %	31 Des/ *Dec 2023* %	31 Des/ *Dec* 2022 %	31 Des/*Dec* 2023	31 Des/*Dec* 2022
Entitas anak melalui kepemilikan langsung/ *Directly owned subsidiaries*											
PT Batubara Bukit Kendi ("BBK")[a)]	Penambangan batubara/ *Coal mining*	Tanjung Enim, Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	1997	99.39	98.00	98.00	98.00	2.00	2.00	54,320	12
PT Bukit Asam Prima ("BAP")	Perdagangan batubara/ *Coal trading*	Jakarta	2007	99.99	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	784,394	402,271
PT Internasional Prima Coal ("IPC")	Penambangan batubara/ *Coal mining*	Palaran, Kalimantan Timur/*East Kalimantan*	2010	51.00	51.00	51.00	51.00	49.00	49.00	773,924	1,030,487
PT Bukit Asam Metana Ombilin ("BAMO")	Penambangan gas metana batubara/ *Coal methane gas mining*	Jakarta	Belum beroperasi/ *Not yet operating*	99.99	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	34	34
PT Bukit Asam Metana Enim ("BAME")	Penambangan gas metana batubara/ *Coal methane gas Mining*	Jakarta	Belum beroperasi/ *Not yet operating*	99.99	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	73	73
PT Bukit Asam Banko ("BAB")	Pertambangan dan perdagangan/ *Coal mining and trading*	Tanjung Enim, Sumatera Selatan/*South Sumatra*	Belum beroperasi/ *Not yet operating*	99.99	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	313	313
PT Bukit Multi Investama ("BMI")	Melakukan investasi pada perusahaan lain/ *Investments in other companies*	Jakarta	2014	99.91	99.99	99.99	99.99	0.09	0.01	3,079,751	2,946,135
PT Bukit Energi Investama ("BEI")	Melakukan investasi pada perusahaan lain/ *Investments in other companies*	Jakarta	2015	99.60	99.99	99.99	99.99	0.04	0.01	262,089	225,834
Entitas anak melalui kepemilikan tak langsung/*Indirectly owned subsidiaries*											
PT Bumi Sawindo Permai ("BSP")	Perkebunan kelapa sawit dan hasil olahan kelapa sawit/ *Palm plantation and palm processing*	Tanjung Agung, Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	2007	-	-	99.99	99.99	0.01	0.01	435,565	375,682

*) total aset 31 Desember 2022 sudah diaudit dan total aset 31 Desember 2023 tidak diaudit

**) total assets 31 December 2022 was using the audited figure and total assets 31 December 2023 was using the unaudited figure*

1. UMUM (lanjutan)

***1. GENERAL** (continued)*

	Kegiatan usaha/ *Business activity*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Tahun beroperasi secara komersial/ *Commencement of commercial operations*	Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh induk Perusahaan/ *Proportion of ordinary shares held by parent*		Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh Grup/ *Proportion of ordinary shares held by the Group*		Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh kepentingan nonpengendali/ *Proportion of ordinary shares held by non-controlling interests*		Total aset* (sebelum eliminasi konsolidasi)/ *Total assets* (before consolidation elimination)*	
				31 Des/ *Dec* 2023 %	31 Des/ *Dec* 2022 %	31 Des/ *Dec 2023* %	31 Des/ *Dec* 2022 %	31 Des/ *Dec 2023* %	31 Des/ *Dec* 2022 %	31 Des/*Dec* 2023	31 Des/*Dec* 2022
Entitas anak melalui kepemilikan tak langsung (lanjutan)/ ***Indirectly owned subsidiaries*** *(continued)*											
PT Bukit Prima Bahari ("BPB")	Pelayaran/ *Sea voyages*	Jakarta	2014	-	-	99.99	99.99	0.01	0.01	392,239	232,721
PT Pelabuhan Bukit Prima ("PBP")	Jasa pelabuhan/ *Port service*	Jakarta	2014	-	-	99.99	99.99	0.01	0.01	148,341	126,410
PT Bukit Asam Medika ("BAM")	Rumah sakit, klinik, poliklinik, poliklinik Spesialis, dan balai pengobatan/ *Hospital, clinic, polyclinic, specialist polyclinic, and medical services*	Tanjung Enim, Sumatera Selatan/*South Sumatra*	2014	-	-	97.50	97.50	2.50	2.50	69,010	54,085
PT Satria Bahana Sarana ("SBS")	Jasa penambangan dan sewa/*Mining service and rental*	Tanjung Enim, Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	2014	-	-	95.00	95.00	5.00	5.00	1,969,428	1,936,525
PT Bukit Energi Servis Terpadu ("BEST")	Perdagangan, jasa, perbengkelan, pembangunan, perindustrian, dan pengangkutan/ *Trading, service, workshop, construction, industry, and transportation*	Jakarta	2015	-	-	99.62	99.62	0.38	0.38	177,369	140,745
PT Penajam Internasional Terminal ("PIT")	Jasa pelabuhan/ *Port services*	Jakarta	2016	-	-	72.00	72.00	28.00	28.00	25,780	17,079
PT Bukit Multi Properti ("BMP")	Real estat dan konstruksi/ *Real estate and Construction*	Jakarta	2019	-	-	99.90	99.90	0.10	0.10	19,686	11,180

*) total aset 31 Desember 2022 sudah diaudit dan total aset 31 Desember 2023 tidak diaudit

**) total assets 31 December 2022 was using the audited figure and total assets 31 December 2023 was using the unaudited figure*

Catatan:

a) Operasi penambangan dihentikan sementara.

Notes:

a) Mining operations have been temporarily suspended.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. VIII.G.7 mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang diakui berdasarkan nilai wajar, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank, dan deposito dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain. Lihat Catatan 2d untuk informasi mata uang fungsional.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area di mana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 4.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

Presented below are the material accounting policies adopted for the preparation of the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Basis of the preparation of the consolidated financial statements

The Group's consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards and with the Regulations of the Financial Services Authority ("OJK") No. VIII.G.7 concerning Guidance on Financial Statements Presentation.

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for financial assets at fair value through other comprehensive income which is recognised at fair value and using the accrual basis except for the consolidated statements of cash flows.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with a maturity of three months or less.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified. Refer to Note 2d for information on the functional currency.

The preparation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK")

Penerapan dari amendemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" tentang Reformasi Pajak Internasional Ketentuan Model Pilar Dua

Standar baru dan amendemen tertentu telah diterbitkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan antara lancar dan tidak lancar
- PSAK 74 "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK 74 "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif"
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan
- Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang sewa jual dan sewa balik

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS")

The adoption of the following amendments to accounting standards which are effective from 1 January 2023 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

- *The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about disclosure of accounting policies*
- *The amendments to SFAS 16 "Property, Plant and Equipment" about proceeds before intended use*
- *The amendments to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" about definition of accounting estimates*
- *Amendment SFAS 46 "Income taxes" about Deferred Tax arising related to Assets and Liabilities arising from a single transactions*
- *Amendment SFAS 46 "Income taxes" about International Tax Reform – Pillar Two Model Rules*

New standards and amendments have been published that are not mandatory for the year ended on 31 December 2023 and have not been adopted early by the Group:

- *The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities between current and non-current*
- *SFAS 74 "Insurance Contracts"*
- *Amendment to SFAS 74 "Insurance Contracts regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information"*
- *The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants*
- *The amendment to SFAS 73 "Leases" about leases on sale and leaseback*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") (lanjutan)

Standar baru dan amendemen terhadap standar akuntansi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, kecuali PSAK 74 dan Amendemen PSAK 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Mulai 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK diubah sebagaimana diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan Amendemen pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

c. Prinsip-prinsip konsolidasi

i. Entitas anak

i.1. Konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), di mana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") *(continued)*

New standards and amendments to the above accounting standards are effective from 1 January 2024, except for SFAS 74 and Amendment to SFAS 74 which is effective beginning 1 January 2025, but early adoption is permitted.

Beginning 1 January 2024, references to the individual PSAKs and ISAKs will be changed as published by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK-IAI").

As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards and amendments on the Group's consolidated financial statements.

c. Principles of consolidation

i. Subsidiaries

i.1. Consolidation

Subsidiaries include all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are de-consolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

i.1. Konsolidasi (lanjutan)

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakusisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup.

Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset atau liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi untuk setiap akuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

i.2. Akuisisi

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Principles of consolidation** (continued)*

***i. Subsidiaries** (continued)*

***i.1. Consolidation** (continued)*

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group.

The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. The identifiable assets acquired, liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition dates.

The Group recognises any non-controlling interest in an acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statements of financial position, separately from the owner's equity of the parent.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

i.2. Acquisition

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at the acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed an asset or liability are recognised in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for in equity.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

i.2. Akuisisi (lanjutan)

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

ii. Entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan. Secara umum, Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Ventura bersama ini menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

i. Subsidiaries *(continued)*

i.2. Acquisition *(continued)*

The excess of the consideration transferred, the amount of non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired, and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

ii. Associates and joint ventures

Associates are entities over which the Group has significant influence but not control. Generally, the Group owns 20% or more of the voting rights but not exceeding 50%. Investments in associates are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

A joint venture is a joint arrangement under which the parties which share joint control have the rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

ii. Entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- **Metode ekuitas**

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan apabila diperlukan agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Principles of consolidation** (continued)*

***ii. Associates and joint ventures** (continued)*

- ***Equity method of accounting***

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's or joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate or joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make payments or has made payments on behalf of the associate or joint venture.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates or joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate or joint venture will be changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividend receivables from an associate or a joint venture are recognised as reductions in the carrying amounts of the investment.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

ii. Entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- **Metode ekuitas** (lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

- **Pelepasan**

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan. Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama di mana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

d. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Principles of consolidation** (continued)*

***ii. Associates and joint ventures** (continued)*

- ***Equity method of accounting** (continued)*

At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate or joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or joint venture and its carrying value and recognises the amount in profit or loss.

- ***Disposals***

An investment in an associate or joint venture is derecognised when the Group loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date on which significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

Gains and losses arising from partial the disposal or dilution of an investment in an associate and a joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss, and only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

d. Foreign currency transactions

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan berdasarkan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* ("JISDOR") dan kurs transaksi yang diterbitkan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***d. Foreign currency transactions** (continued)*

ii. Transaction and balance

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the dates of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates on such dates. Foreign exchange gains and losses arising from the settlement of such transactions in foreign currencies, and from the translation at the end of year exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

The exchange rates used are based on the Jakarta Interbank Spot Dollar Rate ("JISDOR"). The transaction rates published by Bank Indonesia were as follows:

	2023	2022	
1 Dolar Amerika Serikat ("AS$")	15,439	15,592	*United States Dollars ("US$")*
1 Dolar Australia ("AU$")	10,565	10,581	*Australian Dollars ("AU$")*
1 Dolar Singapura ("SG$")	11,712	11,659	*Singapore Dollars ("SG$")*
1 Euro ("€")	17,139	16,713	*Euro ("€")*

iii. Entitas dalam Grup

Hasil usaha operasi dan posisi keuangan dari seluruh entitas anak Grup yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang penyajian Perusahaan, ditranslasikan dalam mata uang penyajian Perusahaan sebagai berikut:

(a) Aset dan liabilitas yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dijabarkan pada kurs penutup tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian tersebut;
(b) Penghasilan dan beban untuk setiap laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata (kecuali jika rata-rata tersebut bukan perkiraan wajar efek kumulatif dari kurs yang berlaku pada tanggal transaksi, maka penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs tanggal transaksi); dan
(c) Seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

iii. Entities within the Group

The results of the operations and the financial position of all the Group's subsidiaries that have a functional currency different from the Company's presentation currency are translated into the Company's presentation currency as follows:

(a) The assets and liabilities presented in the consolidated statement of financial position are translated at the closing rate on the date of the consolidated statement of financial position;
(b) The income and expenses for each profit or loss are translated at the average exchange rates of the period (unless the average does not provide a reasonable approximation of the cumulative effect of the rates prevailing on the transaction dates, in which case the income and expenses are translated at the rates prevailing on the dates of the transactions); and
(c) All of the resulting exchange differences are recognised in other comprehensive income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

iii. Entitas dalam Grup (lanjutan)

Perubahan nilai wajar efek moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dianalisis antara selisih pejabaran yang timbul dari perubahan biaya perolehan diamortisasi efek dan perubahan nilai tercatat efek lainnya. Selisih penjabaran terkait dengan perubahan biaya perolehan diamortisasi diakui di dalam laba rugi, dan perubahan nilai tercatat lainnya diakui pada laba komprehensif lainnya.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

f. Piutang

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas penjualan barang atau jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha biasa. Piutang lainnya adalah jumlah piutang pihak ketiga atau pihak berelasi diluar kegiatan usaha biasa. Jika penagihan diperkirakan diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***d. Foreign currency transactions** (continued)*

***iii. Entities within the Group** (continued)*

Changes in the fair values of monetary securities denominated in foreign currency classified as financial assets at fair value through other comprehensive income are analysed between based on the translation differences arising from changes in the amortised cost of the security and other changes in the carrying amounts of the securities. Translation differences related to changes in amortised cost are recognised in profit or loss, and other changes in carrying amount are recognised in other comprehensive income.

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity periods of three months or less at original that are not used as collateral or restricted.

f. Receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold or services performed in the ordinary course of business. Other receivables are amounts due from third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Piutang (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian kerugian penurunan nilai bersih dalam laba usaha. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap item baris yang sama.

Lihat Catatan 2o untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Grup.

Piutang non-usaha dari pihak berelasi pada awalnya disajikan sebagai aset tidak lancar kecuali jika ada alasan tertentu untuk disajikan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu, sesuai dengan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.G.7, entitas berelasi dengan Pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

h. Persediaan

Persediaan batubara dan produksi perkebunan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang atas biaya yang terjadi selama tahun berjalan dan terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, serta alokasi biaya *overhead* berdasarkan kapasitas operasi normal yang berkaitan dengan aktivitas penambangan dan perkebunan. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***f. Receivables** (continued)*

Impairment losses on receivables are presented as part of the net impairment losses within operating profit. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

See Note 2o for further information regarding the policy on the determination of the amount for the loss allowance on the Group's receivables.

Non-trade receivables from related parties are initially presented as non-current assets unless there are specific reasons for them to be presented as current assets in the consolidated statement of financial position.

g. Transactions with related parties

The Group has entered into transactions with certain related parties, as defined in SFAS 7, "Related Party Disclosures".

Based on OJK Regulation No. VIII.G.7, Government-related entities include any entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the Government.

h. Inventories

Coal and plantation inventories are valued at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined based on the weighted average cost incurred during the year and comprises materials, labour and overheads based on normal operating capacity related to mining and plantation activities. The net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Persediaan (lanjutan)

Perlengkapan dan suku cadang diakui pada harga perolehan, ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang, setelah dikurangi penyisihan untuk persediaan usang dan bergerak lambat.

Penyisihan untuk perlengkapan dan suku cadang yang usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. Bahan pendukung kegiatan pemeliharaan dicatat sebagai beban produksi pada tahun yang digunakan.

i. Aset eksplorasi dan evaluasi

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi mencari sumber daya mineral setelah Grup memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu, menentukan kelayakan teknis dan menilai komersial atas sumber daya mineral spesifik.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi termasuk biaya yang berhubungan langsung dengan:

- perolehan hak untuk eksplorasi;
- kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika;
- pengeboran eksplorasi;
- pemaritan dan pengambilan contoh; dan
- aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatu *area of interest* dibebankan pada saat terjadinya kecuali biaya tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan *area of interest*, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

(i) terdapat hak untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi suatu area dan biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi di *area of interest* tersebut atau melalui penjualan atas *area of interest* tersebut; atau

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***h. Inventories** (continued)*

Materials and spare parts are valued at cost, determined on a weighted average method, less the provision for obsolete and slow-moving inventory.

The provision for obsolete and slow-moving materials and spare parts is determined on the basis of the estimated future usage of individual inventory items. Supplies and materials are charged to production costs in the year in which they are used.

i. Exploration and evaluation assets

Exploration and evaluation activity involves searching for mineral resources after the Group has obtained the legal right to explore a specific area, determining the technical feasibility and assessing the commercial viability of an identified resource.

Exploration and evaluation expenditure includes costs that are directly attributable to the following:

- *acquisition of rights to explore;*
- *topographical, geological, geochemical and geophysical studies;*
- *exploratory drilling;*
- *trenching and sampling; and*
- *activities involved in evaluating the technical feasibility and commercial viability of extracting mineral resources.*

Exploration and evaluation expenditure related to an area of interest is written off as incurred, unless it is capitalised and carried forward, on an area of interest basis, provided that one of the following conditions is met:

(i) the tenure rights of an area are current and it is considered probable that the costs will be recouped through the successful development and exploitation of the area of interest or, alternatively, through its sale; or

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan)

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatu *area of interest* dibebankan pada saat terjadinya kecuali biaya tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan *area of interest*, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini: (lanjutan)

(ii) kegiatan eksplorasi dalam *area of interest* tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut.

Biaya yang dikapitalisasi mencakup biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* yang relevan, tidak termasuk aset berwujud yang dicatat sebagai aset tetap. Biaya umum dan administrasi dialokasikan sebagai aset eksplorasi atau evaluasi hanya jika biaya tersebut berkaitan langsung dengan menemukan sumber daya mineral pada *area of interest* yang relevan.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang dikapitalisasi dihapusbukukan ketika kondisi di atas tidak lagi terpenuhi.

Oleh karena aset eksplorasi dan evaluasi tidak tersedia untuk digunakan, maka aset tersebut tidak disusutkan.

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan adanya penurunan nilai. Aset eksplorasi dan evaluasi juga diuji penurunan nilainya ketika terjadi penemuan cadangan komersial, sebelum aset tersebut ditransfer ke "properti penambangan - tambang dalam pengembangan".

Pengeluaran yang terjadi sebelum entitas memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu area spesifik dibiayakan pada saat terjadinya.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***i. Exploration and evaluation assets** (continued)*

Exploration and evaluation expenditure related to an area of interest is written off as incurred, unless it is capitalised and carried forward, on an area of interest basis, provided that one of the following conditions is met: (continued)

(ii) exploration activities in the area of interest have not yet reached a stage which permits a reasonable assessment of the existence or otherwise of economically recoverable reserves and active and significant operations in or in relation to the area of interest are ongoing.

Capitalised costs include costs directly related to exploration and evaluation activities in the relevant area of interest, and exclude physical assets which are recorded in fixed assets. General and administrative costs are allocated to exploration or evaluation assets only to the extent that those costs can be related directly to finding mineral resources in the relevant area of interest.

Capitalised exploration and evaluation expenditure is written off when the above conditions are no longer satisfied.

As the exploration and evaluation assets are not available for use, they are not depreciated.

Exploration and evaluation assets are assessed for impairment if facts and circumstances indicate that impairment may exist. Exploration and evaluation assets are also tested for impairment once commercial reserves are found, before the assets are transferred to "mining properties - mines under development".

Expenditure incurred before the entity has obtained the legal right to explore a specific area is expensed as incurred.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Properti penambangan

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasikan secara terpisah untuk setiap *area of interest* pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah yang dicatat sebagai aset tetap.

Saldo properti penambangan diamortisasi selama umur properti menggunakan metode unit produksi sejak tanggal dimulainya operasi komersial. Amortisasi tersebut menggunakan basis estimasi cadangan. Perubahan dalam estimasi cadangan dilakukan secara prospektif, dimulai dari awal tahun terjadinya perubahan.

Ketika keputusan pengembangan telah diambil, jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* tertentu dipindahkan sebagai "tambang dalam pengembangan" pada akun properti penambangan dan digabung dengan pengeluaran biaya pengembangan selanjutnya.

"Tambang dalam pengembangan" direklasifikasi ke "tambang yang berproduksi" pada akun properti penambangan pada akhir tahap komisioning, ketika tambang tersebut mampu beroperasi sesuai dengan rencana manajemen.

"Tambang dalam pengembangan" tidak diamortisasi sampai direklasifikasi menjadi "tambang yang berproduksi".

Ketika timbul biaya pengembangan lebih lanjut atas properti penambangan setelah dimulainya produksi, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai bagian dari "tambang yang berproduksi" apabila terdapat kemungkinan besar tambahan manfaat ekonomi masa depan sehubungan dengan biaya tersebut akan mengalir ke Grup. Apabila tidak, biaya tersebut dibebankan sebagai biaya produksi.

"Tambang yang berproduksi" (termasuk biaya eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, serta pembayaran untuk memperoleh hak penambangan dan sewa) diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi, dengan perhitungan terpisah yang dibuat untuk setiap *area of interest*. "Tambang yang berproduksi" dideplesi menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terduga.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

j. Mining properties

Development expenditure incurred by or on behalf of the Group is accumulated separately for each area of interest in which economically recoverable resources have been identified. Such expenditure comprises costs directly attributable to the construction of a mine and the related infrastructure and excludes physical assets and land rights which are recorded as fixed assets.

The balance of mining properties is amortised over the life of the property using the units of production method from the date of the commencement of commercial operations. The amortisation is based on estimated reserves. Changes in estimated reserves are accounted for on a prospective basis from the beginning of the year in which the change occurs.

Once a development decision has been taken, the carrying amount of the exploration and evaluation assets in respect of the area of interest is transferred to "mines under development" within mining properties and aggregated with the subsequent development expenditure.

"Mines under development" are reclassified as "mines in production" within mining properties at the end of the commissioning phase, when the mine is capable of operating in the manner intended by management.

No amortisation is recognised for "mines under development" until they are reclassified to "mines in production".

When further development expenditure is incurred on a mining property after the commencement of production, the expenditure is carried forward as part of "mines in production" when it is probable that additional future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group. Otherwise, such expenditure is classified as a cost of production.

"Mines in production" (including reclassified exploration, evaluation and development expenditure, and payments to acquire mineral rights and leases) are amortised using the units of production method, with separate calculations being made for each area of interest. "Mines in production" will be depleted using the units of production method on the basis of proven and probable reserves.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Properti penambangan (lanjutan)

Properti penambangan teridentifikasi yang diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset sebesar nilai wajarnya. Pengeluaran pengembangan yang terjadi setelah akuisisi properti penambangan dicatat berdasarkan kebijakan akuntansi yang dijelaskan di atas.

"Tambang dalam pengembangan" dan "tambang yang berproduksi" diuji penurunan nilainya dengan mengacu pada kebijakan akuntansi pada Catatan 2m.

k. Aset tetap

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 16, "Aset Tetap" yaitu hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Aset tetap, kecuali hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya historis termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada saat akuisisi aset. Apabila terdapat kewajiban untuk membongkar dan memindahkan aset tetap maka beban yang terkait akan ditambahkan ke biaya perolehan aset tetap yang bersangkutan dan kewajiban atas biaya terkait tersebut diakui.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***j. Mining properties** (continued)*

Identifiable mining properties acquired in a business combination are initially recognised as assets at their fair value. Development expenses incurred subsequent to the acquisition of the mining properties are accounted for in accordance with the accounting policy outlined above.

"Mines under development" and "mines in production" are tested for impairment in accordance with the policy described in Note 2m.

k. Fixed assets

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS 73, "Leases". If the land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS 16, "Property, Plant and Equipment" under which land rights are recognised at cost and not depreciated.

Fixed assets, except land rights, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items. In the case of mandatory dismantling and asset removals the related costs are added to the cost of the relevant assets and provisions are recognised to cover the costs.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap disusutkan berdasarkan metode garis lurus hingga mencapai nilai sisa, selama periode yang lebih rendah antara estimasi masa manfaat aset, umur tambang, atau masa Izin Usaha Pertambangan ("IUP"), yang dinyatakan sebagai berikut:

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***k. Fixed assets** (continued)*

Fixed assets are depreciated using the straight-line method to their estimated residual value over the lesser of the estimated useful lives of the assets, the life of the mine or the term of the mining licence ("IUP") as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	5 - 20	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	4 - 20	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	3 - 4	*Office and hospital equipments*

Biaya-biaya yang terjadi setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang digantikan dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan dalam laba rugi dalam tahun keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the assets' carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amounts of the replaced parts are derecognised. Repairs and maintenance expenses are charged to profit or loss during the financial year in which they are incurred.

Masa manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The useful lives, residual values and depreciation methods of fixed assets are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 2o).

An assets' carrying value is written down immediately to its recoverable amount if the assets' carrying value is greater than its estimated recoverable amount (Note 2o).

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, mesin, peralatan dan kendaraan dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

The accumulated costs of the construction of buildings, machinery, equipment and vehicles are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to the fixed asset accounts when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. *Goodwill*

Goodwill timbul dari akuisisi entitas anak dan merupakan selisih imbalan yang ditransfer terhadap kepemilikan dalam nilai wajar neto atas aset, liabilitas, dan liabilitas kontinjensi teridentifikasi dan nilai wajar kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi.

Untuk pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK"), atau kelompok UPK, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi *goodwill* menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang *goodwill*-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal. *Goodwill* dipantau pada level segmen operasi.

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas, misalnya *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap digunakan, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Aset yang memiliki umur manfaat terbatas, diamortisasi atau didepresiasi, dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahaan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset.

Dalam menentukan penurunan nilai, aset pada tingkat yang paling rendah di mana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

l. Goodwill

Goodwill arises from the acquisition of subsidiaries and represents the excess of the consideration transferred over the interest in the net fair value of the net identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the acquiree and the fair value of the non-controlling interest in the acquiree.

For the purposes of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated to each Cash-Generating Unit ("CGU"), or group of CGUs, that is expected to benefit from the synergies of the combination. Each CGU or group of CGUs to which the goodwill is allocated represents the lowest level within the entity at which goodwill is monitored for internal management purposes. Goodwill is monitored at the operating segment level.

m. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life, for example, goodwill or intangible assets not ready to use, are not subject to amortisation but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Assets that have a definite useful life are subject to amortisation or depreciation and are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised at the amount by which the assets' carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an assets' fair value less costs of disposal and its value in use.

For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash inflows. Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Pembalikan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

n. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

o. Aset keuangan

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

(i) aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
(ii) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
(iii) aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***m. Impairment of non-financial assets** (continued)*

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill is recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the assets' recoverable amount since the last impairment testing was carried out. The reversal of impairment losses will be recognised immediately in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised at the date on which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill are not reversed.

n. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

o. Financial assets

i. Classification, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets into the following categories:

(i) financial assets measured at amortised cost;
(ii) financial assets measured at fair value through profit or loss; and
(iii) financial assets at fair value through other comprehensive income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual ketika menentukan apakah arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

(ii) Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual di mana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

- Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian dan keuntungan dan kerugian dari selisih kurs diakui pada laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***o. Financial assets** (continued)*

***i. Classification, recognition and measurement** (continued)*

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification made at initial adoption.

(i) Financial assets measured at amortised cost

This classification applies to debt instruments which are held under a hold to collect business model and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" criteria.

(ii) Financial assets at fair value through other comprehensive income

The classification applies to the following financial assets:

- *Debt instruments that are held under a business model where they are held for collection of contractual cash flows and also for sale ("collect and sell") and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" criteria.*

- *All movements in the fair value of these financial assets are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue (including transaction costs by applying the effective interest method), gains or losses arising on derecognition and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative fair value of gain or loss previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset keuangan (lanjutan)

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

Ketika aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain, akumulasi penyesuaian nilai wajar yang diakui pada ekuitas dimasukkan ke dalam ekuitas sebagai bagian dari "Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain" dan akan direklasifikasi ke laba rugi.

iii. Penurunan nilai aset keuangan

Grup menilai dengan dasar perkiraan masa yang akan datang kerugian kredit ekspektasian ("KKE") terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah KKE. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***o. Financial assets** (continued)*

ii. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or been transferred and the Group has transferred substantially all of the risks and rewards of ownership.

When financial assets are classified as financial assets at fair value through other comprehensive income, the accumulated fair value adjustments recognised in equity are included in the "Reserve for changes in financial assets at fair value through other comprehensive income" and will be reclassified to profit or loss.

iii. Impairment of financial assets

The Group assesses on a forward-looking basis the expected credit losses ("ECL") associated with its debt instruments carried at amortised cost and fair value through other comprehensive income. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of ECL. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that are indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset keuangan (lanjutan)

iii. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lainnya dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan KKE termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang usaha, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit, misalnya, *letters of credit*, dan garansi bank. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

iv. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

p. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***o. Financial assets** (continued)*

***iii. Impairment of financial assets** (continued)*

The Group applies the "simplified approach" to measure the ECL which uses a lifetime ECL on a forward-looking basis for all trade receivables balance and other receivables and contract assets without significant financing component and the "general approach" for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception. The ECL reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment considers the use of credit enhancements, for example, letters of credit and bank guarantee. To measure the ECL, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

iv. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

p. Lease

The Group as a lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup akan menilai apakah:

- grup memiliki hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian; dan
- grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna pada saat di awal, diukur pada biaya perolehan, di mana meliputi:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa;
- biaya langsung awal yang dikeluarkan; dan
- estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa, Grup tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Aset dan liabilitas yang timbul dari perjanjian sewa pada awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat diskonto.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***p. Lease** (continued)*

***The Group as a lessee** (continued)*

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group will assess whether:

- *the Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use; and*
- *the Group has the right to direct the use of the identified asset.*

At the commencement date of the lease, the Group recognises a right-of-use asset and a lease liability. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the following:

- *the initial amount of the lease liability;*
- *lease payment made at the commencement date, less any lease incentive;*
- *initial direct cost incurred; and*
- *an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease.*

For a contract that contains a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Group does not separate non-lease components from lease components on lease by class of underlying assets.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Assets and liabilities arising from lease arrangements are initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

q. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam keadaan seperti ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***p. Lease** (continued)*

***The Group as a lessee** (continued)*

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- *fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and*
- *penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets as part of "Fixed assets" in the consolidated statements of financial position.

Short term leases and low-value asset leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and low-value leases. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

q. Taxation

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan di negara di mana perusahaan dan entitas anaknya beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan mencukupi untuk dikompensasikan dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas anak dan asosiasi, tidak dibentuk pajak penghasilan tangguhan, karena saat pembalikan perbedaan sementara dikendalikan oleh Grup dan sangat mungkin perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa mendatang.

r. Liabilitas imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Grup mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek ketika jasa diberikan oleh karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah jasa tersebut diberikan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

q. Taxation *(continued)*

The current income tax is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date in the countries where the Company and its subsidiaries operate and generate taxable income. Management periodically evaluates the positions taken in the annual tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither the accounting nor the taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at the reporting period end and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax is not provided on temporary differences arising on investment in subsidiaries and associates, because the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

r. Employee benefit liabilities

Short-term employee benefit

The Group recognises short-term employee benefit liabilities when services are rendered and the compensation for such services is to be paid within 12 months after such services have been rendered.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun

Grup memiliki berbagai program pensiun sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan kebijakan Grup.

Program pensiun imbalan pasti

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Kontrak Kerja Bersama ("KKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau KKB adalah program imbalan pasti.

Liabilitas program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang di mana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi pemerintah.

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui pada beban imbalan kerja dalam laba rugi yang mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***r. Employee benefit liabilities** (continued)*

Pension benefits

The Group has various pension schemes in accordance with prevailing Law and Group's policy.

Defined benefit plan

A defined pension benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually depending on one or more factors, such as age, years of service or compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Manpower Law or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the Manpower Law or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position with respect to the defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation as at the consolidated statement of financial position date, less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of government bonds are used.

The current service cost of the defined benefit plan is recognised in profit or loss in employee benefit expense, which reflects the increase in the defined obligations resulting from employee service in the current year.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Program pensiun imbalan pasti (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program pensiun pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laba rugi.

Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya.

Pada tanggal 21 Oktober 2002, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan (No. KEP-245/KM.6/2002) untuk membentuk Lembaga (*Trust*) terpisah yang mengelola dana pensiun dalam bentuk Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") bernama Dana Pensiun Bukit Asam ("DPBA"), untuk mengelola, atas nama para anggota, semua kekayaan agar dapat memenuhi kewajiban pensiun dari Perusahaan.

Program pensiun iuran pasti

Program pensiun iuran pasti adalah sebuah program pensiun di mana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Perusahaan memiliki program tabungan pensiun karyawan untuk semua karyawan tetapnya. Program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi dihitung secara periodik oleh perusahaan asuransi. Para karyawan mengkontribusikan persentase tertentu dari gaji dasar dan sisa kontribusi ditanggung oleh Perusahaan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***r. Employee benefit liabilities** (continued)*

***Defined benefit plan** (continued)*

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss.

Remeasurement gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

On 21 October 2002, the Company received approval from the Ministry of Finance (No. KEP-245/KM.6/2002) to establish a separate, trustee-administered pension fund as a defined benefit retirement plan ("PPMP"), namely Dana Pensiun Bukit Asam ("DPBA"), to hold, on behalf of plan members, assets held to satisfy the pension obligations of the Company.

Defined contribution plan

A defined pension contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity (a pension fund) and will have no legal nor constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years.

The Company has a contributory employee savings programme covering all of its qualified permanent employees. The programme is managed by Pension Fund ("DPLK"). Contributions are calculated on a periodic basis by the insurance company. The employees contribute a certain percentage of their basic salary and the Company contributes the remaining balance of the required amount.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pascakerja lainnya, seperti uang penghargaan, santunan kematian, cuti jangka panjang, penghargaan pengabdian, dan uang pisah.

Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Santunan kematian diberikan bila pegawai dan anggota keluarga tertentu meninggal dunia. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada peraturan Perusahaan. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Grup memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara: (i) ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

s. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***r. Employee benefit liabilities** (continued)*

Other long-term employee benefits

The Company also provides other long-term employment benefits, such as long service rewards, death allowances, long service leave, jubilee rewards, and separation rewards.

The long service reward is paid when the employees reach their retirement age. Death allowance is paid when the employee or the qualifying family members pass away. The reward is based on the Company's regulations. Meanwhile the separation reward benefit is paid to employees in the event of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the entity recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

s. Revenue and expense recognition

Revenue

Revenue recognition has to fulfil the following five steps of assessment:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut: (lanjutan)

3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.

5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atas jasa tersebut).

Pendapatan dari penjualan produk batubara diakui ketika pengendalian dialihkan kepada pelanggan. Terdapat kondisi di mana pertimbangan diperlukan berdasarkan lima indikator pengendalian berikut:

1. Pelanggan telah memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset dan memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari barang.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***s. Revenue and expense recognition** (continued)*

***Revenue** (continued)*

Revenue recognition has to fulfill the following five step assessment: (continued)

3. Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee that will be paid during the contract period.

4. Allocate the transaction price to each obligation on the basis of the relative standalone selling prices of each distinct good or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price is estimated based on expected cost plus margin.

5. Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring the promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

Revenue from sales of coal and palm oil products is recognised when control transfers to the customer. There may be circumstances when judgement is required based on the following five indicators of control:

1. The customer has the significant risks and rewards of ownership and has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, the goods.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut: (lanjutan)

2. Pelanggan memiliki kewajiban kini untuk membayar sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak penjualan.

3. Pelanggan telah menerima barang. Penjualan barang dapat tergantung pada penyesuaian berdasarkan inspeksi terhadap pengiriman oleh pelanggan. Dalam hal ini, penjualan diakui berdasarkan estimasi terbaik Grup terhadap kualitas dan/atau kuantitas saat pengiriman, dan penyesuaian kemudian dicatat dalam akun pendapatan. Secara historis, perbedaan antara kualitas dan kuantitas, estimasi dan/atau aktual tidak signifikan.

4. Pelanggan telah memiliki hak kepemilikan legal atas barang.

5. Pelanggan telah menerima kepemilikan fisik atas barang.

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

1. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau

2. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

s. Revenue and expense recognition *(continued)*

Revenue *(continued)*

Revenue recognition has to fulfill the following five step assessment: (continued)

2. The customer has a present obligation to pay in accordance with the terms and conditions of the sales contract.

3. The customer has accepted the goods. Sales revenue may be subject to adjustment based on the inspection of shipments by the customer. In these cases, sales are recognised based on the Group's best estimate of the grade and/or quantity at the time of shipment, and any subsequent adjustments are recorded against revenue. Historically, the differences between estimated and actual quality and/or quantity are not significant.

4. The customer has legal title to the goods.

5. The customer has physical possession of the goods.

A performance obligation may be satisfied at either of the following:

1. Point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or

2. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan berasal dari penjualan batubara Grup dan pendapatan lainnya.

i. Penjualan produk batubara

Pendapatan penjualan diakui pada setiap penjualan individu ketika pengendalian beralih ke pelanggan. Pengendalian beralih ke pelanggan dan pendapatan penjualan diakui ketika produk dimuat ke kapal di mana batubara akan dikirim ke pelabuhan tujuan atau tempat pelanggan.

Grup menjual batubara dengan syarat *Free on Board* ("FOB"), di mana Grup tidak memiliki tanggung jawab untuk pengangkutan atau asuransi setelah kontrol barang telah berlalu di pelabuhan muat. Untuk jangka waktu ini hanya ada satu kewajiban kinerja, yaitu untuk penyediaan produk pada titik di mana kontrol lewat. Selain itu juga, Grup menjual batubara dengan syarat *Cost, Insurance and Freight* ("CIF"), tetapi berdasarkan perjanjian penjualan, kepemilikan dan risiko kerugian atas batubara akan tetap berada pada Grup sampai batubara melewati pelabuhan bongkar. Dalam kondisi ini, Grup menganggap bahwa biaya asuransi dan pengangkutan bukan merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah melainkan satu kesatuan dengan kewajiban pelaksanaan dengan penjualan batubara dikarenakan kontrol atas persediaan batubara berpindah ke pembeli pada saat batubara tersebut sudah sampai di lokasi pembeli. Oleh karena itu, Grup tidak memiliki kewajiban pelaksanaan terpisah untuk jasa pengangkutan dan asuransi yang disediakan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

s. Revenue and expense recognition *(continued)*

Revenue *(continued)*

Revenue represents revenue from the sale of the Group's coal and other revenues.

i. Sales of coal products

Sales revenue is recognised on each individual sale when control transfers to the customer. Control passes to the customers and sales revenue is recognised when the product is loaded onto the vessel on which the coal will be shipped to the destination port or the customers' premises.

The Group sells its coal products Free on Board ("FOB"), where the Group has no responsibility for freight or insurance once control of the goods has been passed on at the loading port. For this term there is only one performance obligation, which is for the provision of the product at the point where control passes. In addition, the Group also sells coal on terms of Cost, Insurance and Freight ("CIF"), but under the sales agreement, the title and risk of loss of coal shall remain with the Group until such coal passes at the discharging port. Under this condition, the Group considers that the insurance and freight costs are not separate performance obligations but one performance obligation for the sale of coal due to the control over coal supplies passing to the buyer when the coal has arrived at the buyer's location. Accordingly, the Group does not have any separate performance obligations for the transportation and insurance services provided.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

ii. Pendapatan lainnya

Pendapatan lainnya Grup diperoleh dari penjualan minyak sawit mentah, inti sawit, dan penjualan obat-obatan.

Pendapatan dari penjualan tersebut diakui pada suatu titik waktu saat pengendalian barang telah dialihkan kepada pelanggan.

Pendapatan diakui sepanjang waktu menggunakan metode *output* berdasarkan pengukuran langsung atas jasa yang dialihkan kepada pelanggan sampai saat ini secara relatif terhadap sisa jasa yang dijanjikan dalam kontrak.

Beban

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 72 dan diakui sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

Beban-beban lainnya diakui pada saat terjadinya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

s. Revenue and expense recognition *(continued)*

Revenue *(continued)*

ii. Other revenue

The Group's other revenue derives from sales of crude palm oil, palm kernels, and medicine.

Revenue from sales above is recognised at the point in time when the control of goods has been transferred to the customer.

Revenue is recognised over time using the output method as the basis of direct measurement of the services transferred to date relative to the remaining services promised under the contract.

Expense

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or are incremental to obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. Therefore, these costs are eligible for capitalisation under SFAS 72 and recognised as other current assets. Such cost will be amortised on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

Other expenses are recognised when they are incurred.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang

Grup memiliki kewajiban hukum dan konstruktif terkait dengan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang yang disebabkan oleh operasi penambangannya. Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban konstruktif yang berkaitan dengan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang area penambangan. Kewajiban reklamasi lingkungan dan penutupan tambang dalam jumlah yang setara dengan jumlah liabilitas dikapitalisasi sebagai bagian dari suatu aset tertentu dan kemudian disusutkan atau dideplesikan selama masa manfaat aset tersebut. Kewajiban ini diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Perubahan dalam pengukuran liabilitas yang timbul selama tahap produksi juga dibebankan sebagai beban pokok pendapatan. Pengaruh nilai waktu berjalan yang timbul dari mendiskontokan kewajiban yang diestimasi tersebut dicatat sebagai biaya keuangan.

Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang merupakan estimasi terbaik dari nilai kini dari pengeluaran masa depan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan reklamasi dan tutup tambang pada tanggal pelaporan, berdasarkan peraturan hukum yang berlaku saat ini.

Untuk itu, estimasi mengenai jumlah kewajiban untuk reklamasi dan penutupan tambang, membutuhkan manajemen untuk mempertimbangkan waktu kegiatan, estimasi biaya kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang di masa depan, tingkat diskonto, dan tingkat inflasi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

t. Provision for environmental reclamation and mine closure

The Group has legal and constructive obligation associated with environmental reclamation and mine closure obligation as result of its mining operations. These obligations are recognised as liabilities when a constructive obligation with respect to the environmental reclamation and mine closure of the mine area is incurred. The reclamation and mine closure obligations that are equivalent to these liabilities are capitalised as part of the related assets' carrying value and is subsequently depreciated or depleted over the assets' useful life. These obligations are measured at the present value of the expenditure that is expected to be required to settle the obligation using a discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. Changes in the measurement of a liability which arise during production are also charged to the cost of revenue. The unwinding of the effect of discounting the estimated liability is recognised as a finance cost.

The provision for environmental reclamation and mine closure represents the best estimate of the present value of the future expenditure required to undertake the reclamation and mine closure as at the reporting date, based on current legal requirements.

The estimate of the liability for reclamation and mine closure costs, therefore, requires management to make judgements regarding the timing of the activities, estimated costs of future environmental reclamation and mine closure activities, discount rate and inflation rate.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang (lanjutan)

Perubahan dalam pengukuran kewajiban reklamasi lingkungan dan penutupan tambang yang timbul dari perubahan estimasi waktu kegiatan, tingkat inflasi atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada periode berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Grup akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan memperhitungkan setiap kerugian dari penurunan nilai yang terjadi.

u. Pelaporan segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional utama. Pengambil keputusan operasional utama, yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, serta membuat keputusan strategis adalah Direksi.

v. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas, dan biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

Ketika entitas Grup membeli modal saham ekuitas Perusahaan (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas Perusahaan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***t. Provision for environmental reclamation and mine closure** (continued)*

The changes in the measurement of environmental reclamation and mine closure obligations that result from changes in the estimated timing of the activities, inflation rate or amount of the outflow of resources embodying economic benefits (e.g. cash flow) that required settlement of the obligations, or a change in the discount rate, will be added to or deducted from the cost of the related asset in the current year. The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognised immediately in profit or loss. If the adjustment results in addition to the cost of an asset, the Group will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If there is any such indication, the Group will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount and will account for any impairment losses incurred.

u. Segment reporting

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing the performance of the operating segments and making strategic decisions, is the Board of Directors.

v. Share capital

Ordinary shares are classified as equity, and incremental costs directly attributable to the issuance of new shares are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

Where any Group company purchases the Company's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the Company's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Company's equity holders.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Laba bersih per saham

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

Laba bersih per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perusahaan yang telah disesuaikan dengan biaya keuangan dan keuntungan atau kerugian selisih kurs atas utang obligasi konversi, serta pengaruh pajak yang bersangkutan, dengan jumlah tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan, berdasarkan asumsi bahwa semua opsi telah dilaksanakan dan seluruh utang obligasi konversi telah dikonversikan.

x. Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup dalam tahun ketika pembagian dividen telah diumumkan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

w. Earnings per share

Earnings per share are calculated by dividing profit for the year attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share are calculated by dividing the profit for the year attributable to owners of the parent of the Company adjusted for finance costs and foreign exchange gains or losses on convertible bonds and their related tax effects, by the weighted average number of issued and fully paid-up shares during the year, assuming that all options have been exercised and all convertible bonds have been converted.

x. Dividends

Dividend distributions to the Group's shareholders are recognised as liabilities in the Group's consolidated financial statements in the year in which the dividends are declared.

3. MANAJEMEN RISIKO

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga komoditas, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Tujuan dari proses manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko dijalankan oleh Direksi Grup. Direksi bertugas untuk menjamin kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan terhadap risiko-risiko keuangan, yang meliputi identifikasi risiko secara akurat, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko-risiko keuangan. Direksi menentukan prinsip manajemen risiko secara keseluruhan, sekaligus juga menetapkan kebijakan-kebijakan yang mencakup risiko-risiko dalam bidang tertentu.

3. RISK MANAGEMENT

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including the effects of foreign currency exchange rate risk, commodity price risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The objectives of the Group's risk management processes are to identify, measure, monitor and manage key risks in order to safeguard the Group's long-term business continuity and to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Group.

Risk management is carried out by the Group's Board of Directors. The Board ensures the sufficiency of all procedures and methodologies of financial risk management, which consists of ensuring the accuracy of risk identification, measurement, monitoring and financial risks control. The Board of Directors provides principles for overall risk management, as well as policies covering specific areas.

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Grup menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, nilai tukar dan risiko harga lainnya, analisis umur piutang untuk risiko kredit dan analisis beta untuk menentukan risiko pasar dari portofolio investasi.

Sementara itu, Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Direksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

a. Risiko pasar

(i) Risiko mata uang asing

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Sebagian pendapatan dan pengeluaran operasional Grup didenominasi dalam mata uang Dolar AS. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersil di masa yang akan datang serta aset dan liabilitas yang diakui.

Manajemen telah membuat kebijakan untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang fungsional Grup. Risiko nilai tukar mata uang asing dapat dikelola oleh Grup dengan melakukan transaksi penjualan dalam mata uang Dolar AS, sehingga Grup dapat menjaga kecukupan kas dan aset lainnya, seperti piutang dalam mata uang Dolar AS yang dapat digunakan untuk melakukan pelunasan liabilitas sewa pembiayaan dalam mata uang Dolar AS.

Pada tanggal 31 Desember 2023, jika Rupiah melemah/menguat sebesar 10% terhadap Dolar AS dengan variabel lain konstan, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp308,76 miliar (31 Desember 2022: Rp570,66 miliar) (nilai penuh) terutama diakibatkan keuntungan/kerugian dari penjabaran kas dan setara kas, aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain, piutang usaha, utang usaha, pinjaman bank dan liabilitas sewa yang didenominasikan dalam mata uang asing.

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

The Group uses various methods to measure risk to which it is exposed. These methods include sensitivity analysis in the case of interest rate, foreign exchange rate and other price risks, aging analysis for credit risk and beta analysis in respect to investments portfolio to determine market risk.

Meanwhile, the Risk Management Committee has a responsibility to assist the Board of Directors in ensuring that risk management has been implemented in accordance with these principles.

a. Market risk

(i) Foreign exchange risk

Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to changes in foreign currency exchange rates.

A portion of the Group's revenue and operational expenditure is denominated in US Dollars. Foreign currency exchange risk arises from future commercial transactions, and assets and liabilities which are recognised in a foreign currency.

Management has set up a policy to require companies within the Group to manage their foreign exchange risk against their functional currency. Foreign exchange risk is managed by the Group by entering sales transactions in US Dollars, in order to keep sufficient amounts of cash and other assets, such as receivables denominated in US Dollars, that will be used to settle lease liabilities denominated in US Dollars.

As at 31 December 2023, if the Rupiah had weakened/strengthened by 10% against the US Dollar with all other variables remaining constant, post-tax profit for the year would have been Rp308.76 billion (31 December 2022: Rp570.66 billion) (full amount) higher/lower, mainly as a result of foreign exchange gains/losses on translation of cash and cash equivalents, financial assets at fair value through other comprehensive income, trade receivables, trade payables, bank borrowings and lease liabilities denominated in foreign currency.

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko harga

Grup terekspos terhadap risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga dari harga komoditas yang diperdagangkan di pasar batubara dunia. Namun, aset dan liabilitas keuangan Grup tidak terekspos terhadap fluktuasi harga dikarenakan penyelesaian aset dan liabilitas keuangan berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak jual beli batubara yang ditentukan pada saat pengiriman.

Grup terekspos risiko harga yang berasal dari investasi dalam aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek utang, Grup melakukan analisis terkait besarnya bunga kupon yang ditawarkan pada obligasi dan tingkat imbal hasil yang secara umum diharapkan oleh pasar. Kinerja investasi tersedia untuk dijual Grup dimonitor secara periodik.

Pada tanggal 31 Desember 2023, apabila harga atas aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain 10% lebih tinggi atau lebih rendah dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan, maka total ekuitas akan naik atau turun sebesar Rp16,92 miliar (31 Desember 2022: Rp15,61 miliar).

(iii) Risiko suku bunga

Risiko tingkat suku bunga Grup timbul dari pinjaman bank dan deposito berjangka. Risiko suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman jangka panjang dalam mata uang Rupiah. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga variabel mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga arus kas.

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Market risk** (continued)*

(ii) Price risk

The Group is exposed to market risks related to the price volatility of commodity prices traded on world coal markets. However, the Group's financial assets and liabilities are not exposed to price volatility because the settlement of financial assets and liabilities is based on the prices stipulated in the coal sales and purchase agreements which are determined at the time of delivery.

The Group is exposed to security price risk from investment which comprises financial assets at fair value through other comprehensive income. To manage price risk arising from investments in debt securities, the Group performs an analysis of the coupon rates offered on bonds and the required rate of return which is generally expected by the market. The performance of the Group's available-for-sale investments is monitored periodically.

As at 31 December 2023, if the price of financial assets at fair value through other comprehensive income had been 10% higher or lower with all other variables held constant, total equity would have increased or decreased by Rp16.92 billion (31 December 2022: Rp15.61 billion).

(iii) Interest rate risk

The Group's interest rate risk arises from bank borrowings and time deposits. The Group's interest rate risk arises from long-term borrowing denominated in Rupiah. Borrowings issued at variable rates expose the Group to cash flow interest rate risk.

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko suku bunga (lanjutan)

Grup menganalisis eksposur dari risiko bunga secara dinamis. Beberapa skenario disimulasikan dengan beberapa pertimbangan seperti pembiayaan kembali, memperbaharui dari kondisi yang ada dan alternatif lain pembiayaan. Berdasarkan skenario tersebut diatas, Grup mengelola risiko arus kas dari suku bunga dengan melakukan pembiayaan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.

b. Risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp9,97 triliun (31 Desember 2022: Rp20,82 triliun) (nilai penuh). Risiko kredit terutama berasal dari penjualan dengan memberikan kredit, kas di bank, deposito berjangka, aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain, jaminan reklamasi dan penutupan tambang, piutang usaha, piutang lainnya dari pihak berelasi dan piutang lainnya dari pihak ketiga.

Grup menganalisis eksposur dari risiko bunga secara dinamis. Beberapa skenario disimulasikan dengan beberapa pertimbangan seperti pembiayaan kembali, memperbaharui dari kondisi yang ada, dan alternatif lain pembiayaan. Berdasarkan skenario tersebut diatas, Grup mengelola risiko arus kas dari suku bunga dengan melakukan pembiayaan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.

Pada akhir periode pelaporan, tidak terdapat saldo pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang.

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Market risk** (continued)*

(iii) Interest rate risk (continued)

The Group analyses its interest rate exposure on a dynamic basis. Various scenarios are simulated taking into consideration the refinancing of existing positions, and alternative financing. Based on the above scenarios, the Group manages its cash flows interest rate risk by refinancing borrowings at a lower interest rate.

b. Credit risk

As at 31 December 2023, the total maximum exposure from credit risk was Rp9.97 trillion (31 December 2022: Rp20.82 trillion) (full amount). Credit risk arises from sales under credit, cash in banks, time deposits, financial assets at fair value through other comprehensive income, reclamation and mine closure funds, trade receivables, other receivables from related parties and other receivables from third parties.

The Group analyses its interest rate exposure on a dynamic basis. Various scenarios are simulated taking into consideration the refinancing of existing positions, and alternative financing. Based on the above scenarios, the Group manages its cash flow interest rate risk by refinancing borrowings at a lower interest rate.

As at the end of reporting period, the Group had no outstanding floating rate bank borrowings.

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki perjanjian yang jelas dengan pelanggan, perjanjian yang mengikat terutama untuk transaksi penjualan batubara dan secara historis mempunyai tingkat yang rendah untuk piutang usaha yang bermasalah.

Kebijakan umum Grup untuk meminimalisasi risiko kredit yang mungkin muncul adalah sebagai berikut:

- memilih pelanggan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik;
- menerima pelanggan baru dan penjualan batubara disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan delegasi kekuasaan Grup; dan
- meminta pembayaran dengan menggunakan *letter of credit* untuk pelanggan luar negeri dan dalam negeri selain dari transaksi dengan Grup PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN").

Semua kas di bank, deposito berjangka, dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya ditempatkan di bank asing dan lokal yang memiliki reputasi.

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan menekan risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Manajemen berkeyakinan bahwa manajer investasi yang mengelola aset keuangan tersebut memiliki reputasi yang baik.

Seluruh saldo terutang dari piutang usaha dan piutang lainnya di atas terutama berasal dari pelanggan/pihak ketiga/pihak berelasi yang sudah bertransaksi dengan Grup lebih dari 12 bulan dan tidak memiliki sejarah wanprestasi.

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

Management is confident in its ability to maintain minimal exposure to credit risk given that the Group has clear agreements with customers, binding agreements primarily in place for coal sales transactions and historically low levels of bad debt.

The Group's general policies to minimise the potential credit risk which may arise are as follows:

- *selecting customers with a strong financial conditions and good reputations;*
- *acceptance of new customers and sales of coal being approved by authorised personnel according to the Group's delegation of authority policy; and*
- *requesting payments by letter of credit for all customers except for transactions with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") Group.*

All the cash in banks, time deposits and restricted time deposits are placed in reputable foreign and local banks.

The Group manages credit risk exposure from its financial assets at fair value through other comprehensive income by monitoring the reputation and, credit ratings and reducing the aggregate risk of each individual counterparty. Management believes that the investment managers who manage the financial assets have a good reputation.

The entire outstanding balances from trade receivables and other receivables are mostly derived from customers/third parties/related parties which have transacted with the Group for more than 12 months and do not have any history of default.

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi di mana posisi arus kas Grup mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Dalam kebijakan manajemen risiko likuiditas, Grup melakukan monitor dan menjaga level kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional Grup dan mengurangi pengaruh fluktuasi dalam arus kas. Manajemen Grup juga secara rutin melakukan monitor atas perkiraan arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman, dan secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana.

Tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Grup berdasarkan jatuh temponya. Jumlah yang terdapat di tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto:

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

c. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as the risk that arises in situations where the Group's cash flow indicates that the cash inflow from short-term revenue is not enough to cover the cash outflow of short-term expenditure. As part of its liquidity risk management policy, the Group monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group's operational activities and to mitigate the effect of fluctuations in cash flow. The Group's management also regularly monitors projected and actual cash flows, including their loan maturity profiles, and continuously assesses financial markets for opportunities to raise funds.

The table below describes the Group's financial liabilities based on their maturities. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows:

	Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan/ *Contractual maturities of financial liabilities*			
	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	**Antara 3 bulan sampai 1 tahun/ *Between 3 months and 1 year***	**Antara 1 sampai 5 tahun/ *Between 1 and 5 years***	**Jumlah/*Total***
31 Desember/*December* 2023				
Utang usaha/*Trade payables*	2,082,188	-	-	2,082,188
Biaya yang masih harus dibayar/ *Accrued expenses*	4,857,830	-	-	4,857,830
Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*	208,901	372,011	817,396	1,398,308
Pinjaman bank/*Bank borrowings*	68,086	-	-	68,086
Utang jangka pendek lainnya/ *Other current liabilities*	268,527	-	-	268,527
Jumlah liabilitas/*Total liabilities*	**7,485,532**	**372,011**	**817,396**	**8,674,939**
31 Desember/*December* 2022				
Utang usaha/*Trade payables*	1,935,818	-	-	1,935,818
Biaya yang masih harus dibayar/ *Accrued expenses*	4,485,018	-	-	4,485,018
Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*	112,975	152,212	1,223,296	1,488,483
Pinjaman bank/*Bank borrowings*	1,009	1,356	-	2,365
Utang jangka pendek lainnya/ *Other current liabilities*	231,498	-	-	231,498
Jumlah liabilitas/*Total liabilities*	**6,766,318**	**153,568**	**1,223,296**	**8,143,182**

d. Manajemen permodalan

Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

d. Capital risk management

In managing its capital, the Group safeguards its ability to continue as a going concern and to maximise benefits to the shareholders and other stakeholders.

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Manajemen permodalan (lanjutan)

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Grup juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Tidak ada perubahan pada pendekatan Grup dalam mengelola permodalannya selama tahun berjalan.

e. Nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di:

- pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup menganalisis aset keuangan yang dimiliki yang diukur pada nilai wajar. Tabel di halaman berikutnya menganalisis instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan model penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- tingkat 1 - harga kuotasi (tidak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- tingkat 2 - teknik-teknik lain atas semua input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- tingkat 3 - teknik yang menggunakan input yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat yang tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***d. Capital risk management** (continued)*

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditure and also consideration of future capital needs.

The Group also seeks to maintain a balance between its level of borrowing and equity position in order to ensure the optimal capital structure and return. There were no changes in the Group's approach to capital management during the year.

e. Fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *in the principal market for the asset or liability, or*
- *in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The Group analyses its financial assets which are measured at fair value. The table on the next page analyses financial instruments carried at fair value, by the level of valuation method. The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- *level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

e. Nilai wajar (lanjutan)

Aset dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan nilai wajarnya adalah sebagai berikut:

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***e. Fair value** (continued)*

Financial assets and liabilities that are recorded based on fair value were as follows:

	31 Desember/*December* 2023				
	Tingkat/*Level 1*	Tingkat/*Level 2*	Tingkat/*Level 3*	Jumlah/*Total*	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	875,330	-	-	875,330	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*

	31 Desember/*December* 2022				
	Tingkat/*Level 1*	Tingkat/*Level 2*	Tingkat/*Level 3*	Jumlah/*Total*	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	783,070	-	-	783,070	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*

Selain instrumen keuangan yang dijabarkan di atas, Grup tidak memiliki aset dan/atau kewajiban lain yang dicatat pada nilai wajarnya.

Other than the financial instrument described above, the Group did not have any other assets and/or liabilities that were recorded at their fair values.

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi terkini antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, bukan dalam penjualan yang dipaksakan atau penjualan likuidasi.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current arm's length transaction between knowledgeable willing parties, other than in a forced or liquidation sale.

Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang diasumsikan sama dengan nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

The fair values of current financial assets and liabilities with maturities of one year or less are assumed to be approximately the same as their carrying amounts due to their short-term nature.

Jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan lainnya kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.

The carrying amount of other financial assets and liabilities approximates their fair value.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut di mana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan di mana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

Pertimbangan

Perpajakan

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan beban yang dapat dikurangkan dalam mengestimasi provisi pajak penghasilan Grup. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Grup melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang pajaknya tidak pasti dalam kegiatan usaha biasa.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun di mana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, di mana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas, dan lain-lain, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

***4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group reported in future years.

Judgement

Taxation

Judgements and assumptions are required to determine the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for the Group. Specifically, in calculating income tax expenses, the Group involves the interpretation of applicable tax laws and regulations. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

All judgements and estimates made by management as discussed above may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which depends on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimates and assumptions regarding the expected production levels, sales volumes, commodity prices and other factors, which are subject to risk and uncertainty. Hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

- struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah.
- ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  a. bentuk legal dari kendaraan terpisah;
  b. persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
  c. fakta dan kondisi lainnya, jika relevan.

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, PT Bukit Pembangkit Innovative (“BPI”), PT Huadian Bukit Asam Power (“HBAP”), dan PT Bukit Asam Transpacific Railway (“BATR”). Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa

Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan sebuah ventura bersama.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Judgement *(continued)*

Interests in joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the financial, operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required in order to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers the following:

- *the structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle.*
- *when the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:*
  a. the legal form of the separate vehicle;
  b. the terms of the contractual arrangement; and
  c. other relevant facts and circumstances

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and whether the arrangement is a joint operation or a joint ventures, may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures, being PT Bukit Pembangkit Innovative (“BPI”), PT Huadian Bukit Asam Power (“HBAP”) and PT Bukit Asam Transpacific Railway (“BATR”).

These structures and the terms of the contractual arrangements indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangement. The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded that the arrangements are joint ventures.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Manajemen melakukan penilaian dalam menentukan komponen pembayaran sewa, apakah pembayaran tersebut mengandung komponen pebayaran tetap atau variabel. Bila Grup wajib melakukan pembayaran minimum maka Grup perlu melakukan pencatatan atas aset hak guna dan liabilitas sewa.

Sebaliknya, jika tidak terdapat pembayaran minimum maka sewa mengandung komponen pembayaran variabel dan dibukukan sebagai biaya dalam laba rugi. Hal ini memerlukan penilaian dan pertimbangan manajemen yang perlu diperbaharui dari waktu ke waktu.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Untuk sewa bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan, berikut merupakan faktor-faktor yang pada umumnya paling relevan:

- jika terdapat penalti yang signifikan untuk mengakhiri (atau tidak memperpanjang), Grup biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri).
- jika prasarana diperkirakan mempunyai nilai sisa yang signifikan, Grup biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri).
- jika tidak, Grup mempertimbangkan faktor lain termasuk jangka waktu sewa historis dan biaya dan gangguan bisnis yang timbul untuk menggantikan aset sewa tersebut.

***4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

Estimates and assumptions

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use and the right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Management perform assessment on determining lease payment component, whether the payments contain fixed or variable payment component. If the Group is required to make a minimum payments, the Group should record right-of-use assets and lease liabilities.

In the other hand, if there is no minimum payments, then the lease contain variable payment component and should be booked as expense at profit or loss. These need management's assessment and consideration which require periodical updates from time to time.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. In determining incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

For leases of buildings, vehicles, machinery and equipment, the following factors are normally the most relevant:

- *if there are significant penalties to terminate (or not extend), the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *if any leasehold improvements are expected to have a significant remaining value, the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *otherwise, the Group considers other factors including historical lease durations and the costs and business disruption required to replace the leased asset.*

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat atas aset tetap

Grup mengestimasi masa manfaat dari aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat dikaji paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Namun, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Estimasi cadangan batubara

Cadangan batubara adalah estimasi jumlah produk yang dapat secara ekonomis maupun legal diekstraksi dari properti penambangan Grup. Grup menentukan dan melaporkan cadangan batubara berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Australasian Joint Ore Reserves Committee* ("JORC") untuk Pelaporan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih. Untuk memperkirakan cadangan batubara, perlu ditentukan asumsi mengenai faktor-faktor geologis, teknis dan ekonomis termasuk jumlah produksi, teknik produksi, nisbah kupasan, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas, dan nilai tukar mata uang.

Memperkirakan jumlah dan/atau nilai kalori cadangan batubara membutuhkan ukuran, bentuk dan kedalaman tubuh batubara atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu, dan data geologi tambahan dihasilkan selama operasi. Oleh karena itu, perkiraan cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

- nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan;

***4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

***Estimates and assumptions** (continued)*

Estimated useful lives of fixed assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilisation as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behaviour. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Group's collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

The estimated useful lives are reviewed at least at each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. However, it is possible that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

Coal reserve estimates

Coal reserves are estimates of the amounts of product that can be economically and legally extracted from the Group's mining properties. The Group determines and reports its coal reserves under the principles incorporated in the Australasian Joint Ore Reserves Committee (the "JORC") for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. In order to estimate coal reserves, assumptions are required about a range of geological, technical and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratio, production costs, transportation costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

Estimating the quantity and/or calorific value of coal reserves requires the size, shape and depth of coal bodies or fields to be determined by analysing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgements to interpret the data.

The economic assumptions used to estimate reserves change from period to period and additional geological data is generated during the course of operations. Therefore, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Group's financial results and financial position in a number of ways, including the following:

- *assets' carrying values may be affected due to changes in estimated future cash flows;*

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Estimasi cadangan batubara (lanjutan)

- penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dan dapat berubah apabila beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika masa manfaat ekonomi umur aset berubah;
- provisi untuk aktivitas purnaoperasi, restorasi lokasi aset, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini; dan
- nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

Dalam melakukan penilaian estimasi cadangan, Grup juga mempertimbangkan dampak potensial yang timbul dari perubahan iklim.

Provisi untuk reklamasi lingkungan dan penutupan tambang

Kebijakan akuntansi Grup atas pengakuan provisi untuk reklamasi lingkungan dan penutupan tambang membutuhkan estimasi dan asumsi yang signifikan seperti persyaratan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang relevan, waktu kegiatan dan estimasi biaya kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang di masa depan. Dengan demikian, waktu kegiatan dan jumlah arus kas di masa mendatang yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pada setiap tanggal pelaporan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang signifikan. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan rentang berbagai kemungkinan hasil. Perubahan pada waktu kegiatan dan estimasi biaya kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang di masa depan, tingkat diskonto dan tingkat inflasi dapat mempengaruhi secara material laporan keuangan konsolidasian Grup.

Jika jumlah pengeluaran pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi pada tahun berjalan sehubungan dengan kegiatan tahun lalu lebih besar daripada jumlah yang telah dibentuk, maka selisihnya dibebankan di laba rugi pada tahun kelebihan tersebut timbul. Provisi yang diakui pada setiap lokasi ditinjau secara berkala dan diperbarui berdasarkan fakta-fakta dan keadaan pada saat itu.

***4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

***Estimates and assumptions** (continued)*

Coal reserve estimates (continued)

- *depreciation and amortisation charged in profit or loss and may change where such charges are determined on a units of production basis, or where the useful economic lives of assets change;*
- *decommissioning, site restoration and environmental provision may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities; and*
- *the carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.*

In assessing the reserve estimates, the Grup also considered the potential impact arising from climate change.

Provision for environmental reclamation and mine closure

The Group's accounting policy for the recognition of environmental reclamation and mine closure provision requires significant estimates and assumptions such as requirements of the relevant legislative and regulatory requirements, the timing of the activities and estimated costs of the future environmental and mine closure activities. As such, the timing of the activities and amounts of future cash flows required to settle the obligations at each of the reporting dates are subject to significant uncertainty. These uncertainties may result in a wide range of possible measurement outcomes. Changes in timing of the activities and estimated costs of future environmental reclamation and mine closure activities, the discount rate and inflation rate could have a material impact on the Group's consolidated financial statements.

If the total current year expenditure related to past activity is higher than the existing balance, the differences will be charged to profit or loss of the year where the excess arises. The provision recognised for each site is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at the time.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya/(penghasilan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa depan, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup, periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan, tren biaya kesehatan dan biaya rata-rata kesehatan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun.

Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Penentuan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan harga masa lalu, tren harga, dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'Estimasi cadangan batubara'), biaya operasi, biaya penutupan tambang dan reklamasi, tingkat diskonto dan belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan perubahan situasi yang dapat mengubah proyeksi ini, sehingga dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

***4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

***Estimates and assumptions** (continued)*

Post-employment benefits obligation

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future salary increase, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy, expected remaining periods of service of employees, medical cost trend and average medical cost. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligation.

In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds (considering there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Impairment of non-financial assets

The recoverable amount of a cash-generating asset or group of assets is measured at the higher of its fair value less cost of disposal or value in use. The determination of fair value less cost of disposal or value in use requires management to make judgement, estimates and assumptions regarding expected production levels, sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'Coal reserve estimates'), operating costs, mine closure and reclamation costs, discount rate and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying values of the assets may be further impaired or the impairment charges may be reduced with the impact being recorded in profit or loss.

5. KAS DAN SETARA KAS DAN DEPOSITO BERJANGKA / *5. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND TIME DEPOSITS*

a. Kas dan setara kas / *a. Cash and cash equivalents*

Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

The details of cash and cash equivalents are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Kas	**524**	**469**	***Cash on hand***
Kas di bank			***Cash in banks***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 30b)	547,168	981,963	*Related parties (Note 30b)*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
PT Bank Permata Tbk ("Permata")	4,607	26,818	*PT Bank Permata Tbk ("Permata")*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ("BPD Sumsel Babel")	1,164	58,065	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan and Bangka Belitung ("BPD Sumsel Babel")*
PT Bank UOB Indonesia ("UOB")	542	7,157	*PT Bank UOB Indonesia ("UOB")*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	1,191	5,629	*Others (each below Rp10,000)*
Dolar AS			*US Dollars*
Pihak berelasi (Catatan 30b)	677,441	889,521	*Related parties (Note 30b)*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
Permata	2,004	77,320	*Permata*
UOB	1,855	4,159	*UOB*
Deutsche Bank AG	1,146	5,385	*Deutsche Bank AG*
Dolar Australia			*Australian Dollars*
Pihak berelasi (Catatan 30b)	555	22,926	*Related party (Note 30b)*
Euro			*Euro*
Pihak berelasi (Catatan 30b)	2,658	-	*Related party (Note 30b)*
Jumlah kas di bank	**1,240,331**	**2,078,943**	***Total cash in banks***
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 30b)	970,523	4,012,035	*Related parties (Note 30b)*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
PT Bank Mega Tbk	133,297	282,150	*PT Bank Mega Tbk*
BPD Sumsel Babel	95,000	267,500	*BPD Sumsel Babel*
PT Bank Mega Syariah	-	217,106	*PT Bank Mega Syariah*
Dolar AS			*US Dollars*
Pihak berelasi (Catatan 30b)	181,408	172,140	*Related parties (Note 30b)*
Jumlah deposito berjangka	**1,380,228**	**4,950,931**	***Total time deposits***
Deposito berjangka untuk devisa hasil ekspor			***Time deposits for cash proceeds from export sales***
Dolar AS			*US Dollars*
Pihak berelasi (Catatan 30b)	1,517,784	-	*Related parties (Note 30b)*
Jumlah kas dan setara kas	**4,138,867**	**7,030,343**	***Total cash and cash equivalents***

5. KAS DAN SETARA KAS DAN DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

a. Kas dan setara kas (lanjutan)

Tingkat suku bunga kontraktual dari deposito berjangka adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Rupiah	2.25% - 7.05%	2.25% - 6.25%	*Rupiah*
Dolar AS	4.00% - 5.41%	0.30% - 1.25%	*US Dollars*

Deposito berjangka untuk devisa hasil ekspor merupakan deposito berjangka dengan jatuh tempo tiga bulan yang ditempatkan oleh Grup sebagai salah satu pemenuhan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023. Lihat Catatan 29m untuk Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana yang dijabarkan di atas.

***5. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND TIME DEPOSITS** (continued)*

***a. Cash and cash equivalents** (continued)*

Contractual interest rates on time deposits are as follows:

Time deposites for cash proceeds from export sales represent time deposits with maturity of three months placed by the Group to fulfill one of the obligations as required in Government Regulation No. 36 of 2023. Refer to Note 29m for Government Regulation No.36 of 2023.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents as mentioned above.

b. Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun			***Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 30b)	541,818	6,782,720	*Related parties (Note 30b)*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
PT Bank Mega Tbk	-	1,501,696	*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank Mega Syariah	-	644,780	*PT Bank Mega Syariah*
Jumlah deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun	**541,818**	**8,929,196**	***Total time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year***

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Rupiah	6.10% - 6.75%	2.50% - 5.90%	*Rupiah*

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari deposito berjangka sebagaimana yang dijabarkan di atas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of time deposits as mentioned above.

6. PIUTANG USAHA, NETO / *6. TRADE RECEIVABLES, NET*

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The details of trade receivables are as follows:*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Sumber Segara Primadaya	95,835	209,513	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Bukit Batu Mulia	50,831	100,790	*PT Bukit Batu Mulia*
PT Indocement Tunggal Perkasa	22,549	27,983	*PT Indocement Tunggal Perkasa*
PT Kutai Refinery Nusantara	-	31,151	*PT Kutai Refinery Nusantara*
Lainnya	122,854	98,948	*Others*
Dolar AS			*US Dollars*
Motion Shipping and Trading Pte. Ltd.	376,354	-	*Motion Shipping and Trading Pte. Ltd.*
Century Commodities Solution Pte.	272,852	139,741	*Century Commodities Solution Pte.*
Hua Qin International Trading	214,826	-	*Hua Qin International Trading*
Cashin Resource Company Limited	136,223	-	*Cashin Resource Company Limited*
Kowa Asia Pacific Pte. Ltd.	92,685	-	*Kowa Asia Pacific Pte. Ltd.*
Suek AG	91,498	-	*Suek AG*
KNK Energy Pte. Ltd.	88,435	-	*KNK Energy Pte. Ltd.*
Indopacific Energy Pte. Ltd.	82,383	99,881	*Indopacific Energy Pte. Ltd.*
Ares Asia Resources Pte. Ltd.	77,151	-	*Ares Asia Resources Pte. Ltd.*
Noble Resources International Pte. Ltd.	32,146	122,493	*Noble Resources International Pte. Ltd.*
Avra International AG.	16,954	121,311	*Avra International AG.*
Rex Commodities Pte. Ltd.	-	215,796	*Rex Commodities Pte Ltd.*
Adani Global Pte. Ltd.	-	123,591	*Adani Global Pte. Ltd.*
Dragon Energy Co. Ltd.	-	110,278	*Dragon Energy Co. Ltd.*
Falcon Power Co. Ltd.	-	102,063	*Falcon Power Co. Ltd.*
Coal Trans Indo Pte. Ltd.	-	98,450	*Coal Trans Indo Pte. Ltd.*
Lainnya	33,684	25,089	*Others*
Dolar Singapura			*Singapore Dollars*
Lainnya	22,130	4,922	*Others*
Jumlah piutang usaha - pihak ketiga	**1,829,390**	**1,632,000**	***Total trade receivables - third parties***
Pihak berelasi (Catatan 30b)			***Related parties*** *(Note 30b)*
Rupiah	2,307,951	1,818,079	*Rupiah*
Dolar AS	-	390,149	*US Dollars*
Jumlah piutang usaha	**4,137,341**	**3,840,228**	***Total trade receivables***
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(151,778)	(97,638)	*Provision for impairment*
Jumlah piutang usaha, neto	**3,985,563**	**3,742,590**	***Total trade receivables, net***
Bagian lancar	**(3,797,292)**	**(3,509,912)**	***Current portion***
Bagian tidak lancar	**188,271**	**232,678**	***Non-current portion***

6. PIUTANG USAHA, NETO (lanjutan)

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Lancar	3,252,026	2,795,911	*Current*
Jatuh tempo 1-30 hari	353,581	732,593	*Overdue by 1-30 days*
Jatuh tempo 31-90 hari	132,783	135,709	*Overdue by 31-90 days*
Jatuh tempo lebih dari 90 hari	398,951	176,015	*Overdue by more than 90 days*
	4,137,341	3,840,228	
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(151,778)	(97,638)	*Provision for impairment*
	3,985,563	**3,742,590**	

Perubahan cadangan kerugian piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Saldo awal	97,638	225,534	*Beginning balance*
Penambahan	54,685	6,257	*Addition*
Pemulihan	(545)	(134,153)	*Recovery*
Saldo akhir	**151,778**	**97,638**	***Ending balance***

Grup telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung KKE sesuai dengan PSAK 71 yang mengizinkan penggunaan cadangan KKE seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi atas penurunan nilai piutang tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2023, tidak ada piutang usaha Grup yang dijaminkan (2022: Rp5,11 miliar (nilai penuh)). Lihat Catatan 30b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

***6. TRADE RECEIVABLES, NET** (continued)*

The aging analysis of trade receivables is as follows:

The changes in the loss allowance of trade receivables are as follows:

The Group applies the simplified approach to provide for ECL prescribed by SFAS 71 which permits the use of the lifetime expected loss allowance for all trade receivables. To measure the ECL, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Management believes that the provision for impairment of receivables is adequate to cover loss on uncollectible trade receivables.

As at 31 December 2023, no trade receivables of the Group had been used as collateral (2022: Rp5.11 billion (full amount)). Refer to Note 30b for information on the details of transactions and balances with related parties.

7. ASET KEUANGAN YANG DINILAI PADA NILAI WAJAR MELALUI PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

7. *FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain terdiri dari investasi pada instrumen utang dalam bentuk di bawah ini:

As at 31 December 2023 and 2022, financial assets at fair value through other comprehensive income represent investments in debt securities in the form of the following:

Perusahaan penerbit/ *Issuer entity*	**Mata uang/ *Currency***	**Tingkat suku bunga/ *Interest rate***	**Tenor/*Tenure***
Medium term notes			
PT TIMAH Tbk	Rupiah/*IDR*	7.20%	2 tahun/*years*
Obligasi/*Bonds*			
PT Pertamina (Persero)	Dolar AS/*USD*	6.45%	20 tahun/*years*
PLN	Rupiah/*IDR*	8.65%	12 tahun/*years*
KAI	Rupiah/*IDR*	7.10%	4 tahun/*years*
Danareksa	Rupiah/*IDR*	7.50%	2 tahun/*years*
SMI Seri A	Rupiah/*IDR*	5.90%	1 tahun/*years*
SMI Seri B	Rupiah/*IDR*	6.70%	3 tahun/*years*
Obligasi pemerintah/ *Government bonds*			
Seri FR0090	Rupiah/*IDR*	5.13%	3 tahun/*years*

Di bawah ini adalah mutasi aset keuangan Grup yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain:

The movement of the Group's financial assets at fair value through other comprehensive income is shown below:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Saldo awal	783,070	341,821	*Beginning balance*
Penambahan	80,000	471,250	*Addition*
Efek nilai tukar	(1,530)	13,140	*Exchange rate effect*
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	13,790	(43,141)	*Unrealised gain/(loss) from financial assets at fair value through other comprehensive income*
Saldo akhir	**875,330**	**783,070**	***Ending balance***

Manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya bukti objektif penurunan nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain. Oleh karena itu, tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atas aset keuangan tersebut.

The Group's management is of the opinion that there are no events or changes of circumstances which indicate a permanent decline in the fair value of the financial assets at fair value through other comprehensive income. Therefore, no provision for impairment in the value of the above financial assets is necessary.

Penghasilan bunga efektif yang diperoleh dari aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain selama tahun berjalan adalah Rp53.178 (2022: Rp25.802) (lihat Catatan 28a).

Effective interest income earned from financial assets at fair value through other comprehensive income during the year amounted to Rp53,178 (2022: Rp25,802) (see Note 28a).

Nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain berdasarkan harga penawaran yang berlaku dalam pasar yang aktif. Lihat Catatan 3e untuk informasi lebih lanjut mengenai metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar.

The fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income is based on the current bid price in active markets. See Note 3e for further information about the methods used and assumptions applied in determining fair value.

Lihat Catatan 30b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 30b for information on the details of transactions and balances with related parties.

8. PERSEDIAAN / *8. INVENTORIES*

Persediaan terdiri dari: / *Inventories consisted of the following:*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Persediaan batubara	5,292,138	3,644,984	*Coal inventories*
Perlengkapan dan suku cadang	336,570	316,027	*Materials and spare parts*
Minyak kelapa sawit dan kernel	5,141	916	*Crude palm oil and kernels*
	5,633,849	3,961,927	
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan persediaan usang	(134,235)	(124,740)	*Provision for obsolete inventories*
Jumlah persediaan, neto	**5,499,614**	**3,837,187**	***Total inventories, net***

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut: / *Movements of provision for obsolete inventories were as follows:*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Saldo awal	(124,740)	(114,524)	*Beginning balance*
Penambahan penyisihan persediaan usang	(9,495)	(10,216)	*Addition of provision for obsolete inventories*
Saldo akhir	**(134,235)**	**(124,740)**	***Ending balance***

Grup berpendapat bahwa nilai tercatat persediaannya tidak melebihi nilai realisasi bersihnya pada tanggal 31 Desember 2023. / *The Group is of the opinion that the carrying values of its inventories do not exceed their net realisable values as at 31 December 2023.*

Pada tanggal 31 Desember 2023 tidak ada persediaan yang dijaminkan. Pada 31 Desember 2022 terdapat persediaan Grup sebesar Rp6,74 miliar (nilai penuh) dijaminkan kepada BRI. / *On 31 December 2023 there is no inventories pledged as collateral. On 31 December 2022 certain inventories of the Group amounting to Rp6.74 billion (full amount) were used as collateral to BRI.*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh persediaan tidak diasuransikan. Manajemen berpendapat bahwa risiko kerugian yang berkaitan dengan persediaan adalah rendah. / *As at 31 December 2023 and 2022, all inventories were not insured. Management considers the risks of losses associated with inventories to be low.*

9. INVESTASI / *9. INVESTMENTS*

a. Investasi pada entitas asosiasi / *a. Investments in associates*

Jumlah investasi pada entitas asosiasi yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut: / *The amounts of investment in associates recognised in the consolidated financial statements are as follows:*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Investasi pada entitas asosiasi			***Investments in associates***
TPR	-	106,718	*TPR*
MHB	-	85,064	*MHB*
Jumlah	**-**	**191,782**	***Total***
Cadangan penurunan nilai			***Allowance for impairment***
TPR	-	(87,282)	*TPR*
MHB	-	(79,186)	*MHB*
Jumlah	**-**	**25,314**	***Total***

9. INVESTASI (lanjutan)

a. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Investasi pada entitas asosiasi yang dimiliki Grup adalah sebagai berikut:

Nama entitas/ *Name of entity*	Lokasi usaha/ *Place of business*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/ *December 2023*	31 Desember/ *December 2022*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*
TPR	Indonesia	-	34.17%	Catatan/*Note a*
MHB	Indonesia	-	34.17%	Catatan/*Note b*
SINERGI ID	Indonesia	25.00%	25.00%	Catatan/*Note c*

Catatan:

a) TPR memiliki tambang batubara di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pada tanggal 18 April 2023, PT IPC telah melakukan pemindahan hak atas saham TPR kepada Mitra Cakrawala International ("MCI"). Kementrian ESDM telah menyetujui pemindahan hak atas saham.
b) MHB memiliki dermaga di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Selatan. Pada tanggal 18 April 2023, PT IPC telah melakukan pemindahan hak atas saham MHB kepada MC. Kementrian ESDM telah menyetujui pemindahan hak atas saham.
c) Sinergi Mitra Lestari Indonesia ("Sinergi ID") sebelumnya disebut PT Nasional Hijau Lestari ("NHL") menyediakan jasa penanggulangan limbah B3. Sinergi ID telah beroperasi pada bulan Juli 2019.

Ringkasan informasi keuangan atas investasi pada TPR, MHB dan Sinergi ID pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

9. *INVESTMENTS* *(continued)*

a. Investments in associates *(continued)*

Investments in associates owned by the Group are as follows:

Notes:

a) TPR has a coal mine at Tabalong Regency, South Kalimantan. On 18 April 2023, PT IPC have performed transfer of rights to TPR shares to Mitra Cakrawala Internasional ("MCI"). Ministry of Energy and Mineral Resources have approved the transfer of rights.

b) MHB has a port at South Barito Regency, Central Kalimantan. On 18 April 2023, PT IPC have performed transfer of rights to MHB shares to MCI. Ministry of Energy and Mineral Resources have approved the transfer of rights.

c) Sinergi Mitra Lestari Indonesia ("Sinergi ID") previously named PT Nasional Hijau Lestari ("NHL") provide B3 waste management. Sinergi ID started its operation in July 2019.

A summary of financial information related to investments in TPR, MHB and Sinergi ID as at 31 December 2023 and 2022 is as follows:

Asosiasi/ *Associates*	Tahun/ *Year*	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	(Rugi)/laba/ *(Loss)/profit*	Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif/ *Total comprehensive (loss)/income*
Sinergi ID	2023	61,592	(97,921)	(1,428)	(1,428)
Sinergi ID	2022	24,695	(51,316)	(7,410)	(7,410)
TPR	2022	86,269	(23,118)	(533)	(533)
MHB	2022	352,336	(64,042)	6,649	6,649

9. INVESTASI (lanjutan)

b. Investasi pada ventura bersama

Jumlah yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Investasi pada ventura bersama			***Investments in joint ventures***
HBAP	4,569,200	3,956,399	*HBAP*
BPI	2,688,651	2,557,273	*BPI*
BATR	5,425	5,425	*BATR*
Jumlah	**7,263,276**	**6,519,097**	***Total***

Mutasi investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Pada awal tahun	6,519,097	5,174,429	*At the beginning of the year*
Bagian keuntungan	571,303	829,063	*Share of profit*
Penambahan investasi	247,836	-	*Addition of investments*
Dividen	(9,240)	-	*Dividen*
Efek translasi	(65,720)	515,605	*Translation effect*
Pada akhir tahun	**7,263,276**	**6,519,097**	***At the end of the year***

Investasi pada ventura bersama yang dimiliki Grup adalah sebagai berikut:

Nama entitas/ *Name of entity*	**Lokasi usaha/ *Place of business***	**% kepemilikan/ *% of ownership***	**Sifat hubungan/ *Nature of relationship***	**Metode pengukuran/ *Measurement method***
BATR	Indonesia	10.00%	Catatan/*Note a*	Ekuitas/*Equity*
BPI	Indonesia	59.75%	Catatan/*Note b*	Ekuitas/*Equity*
HBAP	Indonesia	45.00%	Catatan/*Note c*	Ekuitas/*Equity*

Catatan:

a) BATR didirikan untuk prasarana perkeretaapian batubara. Pada tanggal 31 Desember 2023, BATR belum beroperasi.
b) BPI melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") Mulut Tambang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
c) HBAP melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN untuk PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8 di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sejak 7 Oktober 2023, HBAP sudah menjalankan kegiatan operasionalnya.

***9. INVESTMENTS** (continued)*

b. Investments in joint ventures

The amounts recognised in the consolidated financial statements are as follows:

The movements of investments in joint ventures are as follows:

Investments in joint ventures owned by the Group are as follows:

Notes:

a) BATR was established to operate a coal railway infrastructure. As at 31 December 2023, BATR was not yet in operation.
b) BPI entered into a power purchase agreement with PLN related to Mine Mouth Power Plant at Lahat Regency, South Sumatra.
c) HBAP entered into a power purchase agreement with PLN related to Mine Mouth Power Plant South Sumatra 8 at Muara Enim Regency, South Sumatra. As at 7 October 2023, HBAP has carried out its operational activities.

9. INVESTASI (lanjutan)

***9. INVESTMENTS** (continued)*

b. Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

***b. Investments in joint ventures** (continued)*

Berikut ini merupakan ringkasan informasi keuangan dari BPI, ventura bersama yang signifikan bagi Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Below is the summarised financial information for BPI, a significant joint venture for the Group as at 31 December 2023 and 2022:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Ringkasan laporan posisi keuangan			***Summarised statements of financial position***
Aset lancar			***Current assets***
Kas dan setara kas	209,818	46,288	*Cash and cash equivalents*
Aset keuangan	411,835	234,353	*Financial assets*
Aset lancar lainnya	262,061	99,338	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	**883,714**	**379,979**	***Total current assets***
Aset tidak lancar			***Non-current assets***
Aset keuangan	4,217,120	4,675,315	*Financial assets*
Aset tidak lancar lainnya	213,520	380,352	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar	**4,430,640**	**5,055,667**	***Total non-current assets***
Jumlah aset	**5,314,354**	**5,435,646**	***Total assets***
Jumlah liabilitas jangka pendek	**(223,225)**	**(567,085)**	***Total current liabilities***
Jumlah liabilitas jangka panjang	**(591,295)**	**(588,606)**	***Total non-current liabilities***
Aset neto	**4,499,834**	**4,279,955**	***Net assets***
Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			***Summarised statements of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan	1,068,125	1,063,862	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(791,553)	(702,319)	*Cost of revenue*
Beban umum dan administrasi	(92,586)	(92,587)	*General and administrative expenses*
Depresiasi dan amortisasi	(13,442)	-	*Depreciation and amortisation*
Penghasilan keuangan	1,943	1,171	*Finance income*
Biaya keuangan	(141)	(5,982)	*Finance cost*
Penghasilan lainnya, neto	166,954	227,497	*Other expenses, net*
Laba sebelum pajak penghasilan	339,300	491,642	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan	(62,385)	(122,256)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	**276,915**	**369,386**	***Profit for the year***
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain	**(41,572)**	**345,837**	***Other comprehensive (loss)/income***
Jumlah penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan	**235,343**	**715,223**	***Total other comprehensive income for the year***

9. INVESTASI (lanjutan)

***9. INVESTMENTS** (continued)*

b. Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

***b. Investments in joint ventures** (continued)*

Berikut ini merupakan ringkasan informasi keuangan dari HBAP, ventura bersama yang signifikan bagi Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Below is the summarised financial information for HBAP, a significant joint venture for the Group as at 31 December 2023 and 2022:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Ringkasan laporan posisi keuangan			***Summarised statements of financial position***
Aset lancar			***Current assets***
Kas dan setara kas	897,199	745,078	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	1,131,679	190,188	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	**2,028,878**	**935,266**	***Total current assets***
Aset tidak lancar			***Non-current assets***
Aset keuangan	31,986,035	28,727,550	*Financial assets*
Aset tidak lancar lainnya	34,670	8,090	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar	**32,020,705**	**28,735,640**	***Total non-current assets***
Jumlah liabilitas jangka pendek	**(6,090,944)**	**(3,709,772)**	***Total current liabilities***
Liabilitas jangka panjang			***Non-current liabilities***
Liabilitas keuangan	(16,664,642)	(16,223,453)	*Financial liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(1,140,218)	(945,684)	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas jangka panjang	**(17,804,860)**	**(17,169,137)**	***Total non-current liabilities***
Aset neto	**10,153,779**	**8,791,997**	***Net assets***

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			***Summarised statements of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan	4,813,428	5,707,749	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(1,941,954)	(512,515)	*Cost of revenue*
Beban umum dan administrasi	(70,211)	(52,536)	*General and administrative expenses*
Biaya keuangan	(1,656,909)	(1,053,722)	*Finance costs*
Penghasilan keuangan	610	875	*Finance income*
Beban lainnya, neto	(62,256)	(2,370,979)	*Other expenses, net*
Laba sebelum pajak penghasilan	1,082,708	1,718,872	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan	(180,824)	(366,973)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	**901,884**	**1,351,899**	***Profit for the year***
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain	**(90,848)**	**686,594**	***Other comprehensive (loss)/income***
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	**811,036**	**2,038,493**	***Total other comprehensive income for the year***

9. INVESTASI (lanjutan)

b. Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

Perusahaan telah menjaminkan seluruh saham yang dimilikinya di entitas HBAP baik yang dimiliki pada saat penandatanganan Akta Gadai Saham atau saham tambahan dimasa yang akan datang kepada China Export-Import Bank dalam rangka pemberian pinjaman untuk pendanaan proyek HBAP. Penjaminan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri BUMN pada tanggal 17 Mei 2018.

Pada tahun 2021, PLN telah mengajukan surat permintaan untuk menunda tanggal operasi komersial ("COD") pembangkit listrik milik HBAP. Pada bulan Juli 2022, PLN dan HBAP telah sepakat untuk melakukan beberapa penyesuaian atas *Power Purchase Agreement* ("PPA") yang terdiri dari penyesuaian tanggal operasi komersial pembangkit listrik milik HBAP dan penyesuaian lainnya.

Pada bulan Agustus 2022, HBAP menandatangani *side agreement* dengan PLN untuk menunda COD pembangkit listrik milik HBAP. Sebagai dampak atas penundaan tanggal operasi komersial tersebut, HBAP telah mengestimasi tambahan biaya konstruksi dan biaya operasional lainnya ("tambahan biaya"). Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah membukukan dampak dari tambahan biaya pada keuntungan neto entitas asosiasi dan ventura bersama.

Pada tanggal 7 Mei 2023, HBAP menyelesaikan penyaluran tegangan listrik untuk umpan tenaga listrik dari PLN *(backfeeding power)* dari jalur transmisi 275 kV Lumut Balai - Muara Enim ke PLTU HBAP.

PLTU HBAP telah memasuki fase COD sejak tanggal 7 Oktober 2023.

Ringkasan informasi keuangan atas investasi pada BATR tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

***9. INVESTMENTS** (continued)*

***b. Investments in joint ventures** (continued)*

The Company has pledged all of its existing share ownership in HBAP at the signing of the Deed of Shares Pledge and any future shares to the China Export-Import Bank as collateral for the loan obtained for the HBAP project. The guarantee was approved by the Minister of State-Owned Enterprise ("SOE") on 17 May 2018.

In 2021, PLN submitted a letter of request to delay the commercial operation date ("COD") of HBAP's power plant. In July 2022, PLN and HBAP agreed to adjust the Power Purchase Agreement ("PPA"), which consisted of adjusting the operation date of HBAP's power plant and other adjustments.

In August 2022, HBAP signed a side agreement with PLN to delay the commercial operation date of HBAP's power plant. As the impact of the delay of the COD of HBAP's power plants, HBAP has estimated additional construction costs and other operational costs ("additional costs"). As at 31 December 2022, the Company has recorded the impact from additional costs in share in net profit of associates and joint ventures.

On 7 May 2023, HBAP has succesfully carried out the distribution of voltage for electric power feed from PLN (backfeeding power) from the 275 kV transmission line Lumut Balai – Muara Enim to the HBAP's PLTU.

HBAP's PLTU has entered the COD phase since 7 October 2023.

The summary of financial information related to investments in BATR as at 31 December 2023 and 2022:

Tahun/ *Year*	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Rugi/ *Loss*	Penghasilan komprehensif lainnya/ *Other comprehensive income*	Jumlah rugi komprehensif/ *Total comprehensive loss*
2023	112,627	(258,590)	(131)	-	(131)
2022	112,647	(258,479)	(125)	-	(125)

9. INVESTASI (lanjutan)

c. Kepentingan nonpengendali

Informasi kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak adalah sebagai berikut:

Kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak:

***9. INVESTMENTS** (continued)*

c. Non-controlling interests

Information on non-controlling interests in the net assets of subsidiaries is as follows:

Non-controlling interests in the net assets of subsidiaries:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
IPC			***IPC***
Persentase kepemilikan 49%			*Percentage of ownership 49%*
Nilai tercatat - awal	231,811	214,842	*Carrying amount - beginning*
Bagian atas laba bersih	186,522	211,895	*Share of net income*
Deklarasi dividen	(268,985)	(194,926)	*Declaration of dividend*
	149,348	231,811	
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)			***Others (each below 5%)***
Nilai tercatat - awal	(20,833)	(20,783)	*Carrying amount - beginning*
Bagian atas laba/(rugi) bersih	143	(50)	*Share of net income/(loss)*
	(20,690)	(20,833)	
Jumlah kepentingan nonpengendali	**128,658**	**210,978**	***Total non-controlling interests***

Kepentingan nonpengendali atas laba/(rugi) entitas anak:

Non-controlling interests in income/(loss) of subsidiaries:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
IPC	186,522	211,895	*IPC*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp5.000)	143	(50)	*Others (each below Rp5,000)*
Jumlah	**186,665**	**211,845**	***Total***

Seluruh entitas ventura bersama dan asosiasi adalah perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar kuotasian yang tersedia atas saham perusahaan tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi cukup untuk menutupi adanya kerugian penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi.

All joint venture and associates are unlisted private companies, and there are no quoted market prices available for their shares. Management believes that the allowance for impairment of investments in associates is sufficient to cover any impairment losses on the investments in associates.

10. PROPERTI PENAMBANGAN / *10. MINING PROPERTIES*

	31 Desember/*December* 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ Currency differences due to financial *statement translations***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Area yang telah menemukan cadangan terbukti						***Areas with proven reserves***
Nilai perolehan						***Acquisition costs***
Tambang yang berproduksi						*Producing mines*
- Perusahaan						*The Company -*
Muara Tiga Besar	445,629	26,927	-	-	472,556	*Muara Tiga Besar*
Banko Barat	485,104	136,530	-	-	621,634	*Banko Barat*
Air Laya	807,619	128,980	-	-	936,599	*Air Laya*
Banko Tengah	651,003	208,214	1,019,895	-	1,879,112	*Banko Tengah*
- Entitas anak						*Subsidiaries -*
IPC - Palaran	384,896	-	-	(9,089)	375,807	*IPC - Palaran*
BBK - Bukit Kendi	9,662	-	-	-	9,662	*BBK - Bukit Kendi*
Subjumlah	**2,783,913**	**500,651**	**1,019,895**	**(9,089)**	**4,295,370**	***Subtotal***
Tambang dalam pengembangan						*Mines under development*
- Perusahaan						*The Company -*
Banko Tengah	1,019,895	-	(1,019,895)	-	-	*Banko Tengah*
Peranap	42,551	-	-	-	42,551	*Peranap*
Jumlah	**3,846,359**	**500,651**	**-**	**(9,089)**	**4,337,921**	***Total***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortisation***
Tambang yang berproduksi						*Producing mines*
- Perusahaan						*The Company -*
Muara Tiga Besar	(161,000)	(16,710)	-	-	(177,710)	*Muara Tiga Besar*
Banko Barat	(101,650)	(12,908)	-	-	(114,558)	*Banko Barat*
Air Laya	(262,467)	(10,720)	-	-	(273,187)	*Air Laya*
Banko Tengah	(16,880)	(55,317)	-	-	(72,197)	*Banko Tengah*
Subjumlah	**(541,997)**	**(95,655)**	**-**	**-**	**(637,652)**	***Subtotal***
- Entitas anak						*Subsidiaries -*
IPC - Palaran	(327,357)	(11,817)	-	13,860	(325,314)	*IPC - Palaran*
BBK - Bukit Kendi	(9,662)	-	-	-	(9,662)	*BBK - Bukit Kendi*
Jumlah	**(879,016)**	**(107,472)**	**-**	**13,860**	**(972,628)**	***Total***
Penyisihan penurunan nilai	**(93,636)**	**-**	**-**	**-**	**(93,636)**	***Provision for impairment***
Nilai buku bersih	**2,873,707**				**3,271,657**	***Net book value***

10. PROPERTI PENAMBANGAN (lanjutan) / ***10. MINING PROPERTIES** (continued)*

	31 Desember/*December* 2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ Currency differences due to financial *statement translations***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Area yang telah menemukan cadangan terbukti						***Areas with proven reserves***
Nilai perolehan						***Acquisition costs***
Tambang yang berproduksi						*Producing mines*
- Perusahaan						*The Company* -
Muara Tiga Besar	393,884	51,745	-	-	445,629	*Muara Tiga Besar*
Banko Barat	420,882	64,222	-	-	485,104	Banko Barat
Air Laya	696,331	111,288	-	-	807,619	Air Laya
Banko Tengah	-	625,091	25,912	-	651,003	Banko Tengah
- Entitas anak						*Subsidiaries* -
IPC - Palaran	362,316	10,431	-	12,149	384,896	IPC - Palaran
BBK - Bukit Kendi	9,662	-	-	-	9,662	BBK - Bukit Kendi
Subjumlah	**1,883,075**	**862,777**	**25,912**	**12,149**	**2,783,913**	***Subtotal***
Tambang dalam pengembangan						*Mines under development*
- Perusahaan						*The Company* -
Banko Tengah	1,045,807	-	(25,912)	-	1,019,895	Banko Tengah
Peranap	42,551	-	-	-	42,551	Peranap
Jumlah	**2,971,433**	**862,777**	**-**	**12,149**	**3,846,359**	***Total***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortisation***
Tambang yang berproduksi						*Producing mines*
- Perusahaan						*The Company* -
Muara Tiga Besar	(147,500)	(13,500)	-	-	(161,000)	Muara Tiga Besar
Banko Barat	(70,719)	(30,931)	-	-	(101,650)	Banko Barat
Air Laya	(242,601)	(19,866)	-	-	(262,467)	Air Laya
Banko Tengah	-	(16,880)	-	-	(16,880)	Banko Tengah
Subjumlah	**(460,820)**	**(81,177)**	**-**	**-**	**(541,997)**	***Subtotal***
- Entitas anak						*Subsidiaries* -
IPC - Palaran	(307,861)	(16,732)	-	(2,764)	(327,357)	IPC - Palaran
BBK - Bukit Kendi	(9,662)	-	-	-	(9,662)	BBK - Bukit Kendi
Jumlah	**(778,343)**	**(97,909)**	**-**	**(2,764)**	**(879,016)**	***Total***
Penyisihan penurunan nilai	**(93,636)**	**-**	**-**	**-**	**(93,636)**	***Provision for impairment***
Nilai buku bersih	**2,099,454**				**2,873,707**	**Net book value**

Seluruh amortisasi properti penambangan dialokasikan ke beban pokok pendapatan.

All of the amortisation of mining properties was allocated to the cost of revenue.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai properti penambangan cukup untuk menutup kerugian penurunan nilai properti penambangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Management is of the opinion that the provision for the impairment of mining properties is adequate for covering any losses from the impairment of mining properties as at 31 December 2023 and 2022.

11. ASET TETAP / *11. FIXED ASSETS*

	31 Desember/*December* 2023						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ *Currency differences due to financial statement translations***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan							***Acquisition costs***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Tanah	958,287	1,065	-	36,565	(1,674)	994,243	*Land*
Bangunan	2,678,388	2,906	(12,908)	103,531	(106)	2,771,811	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	8,917,859	771,072	(20,138)	299,697	(137)	9,968,353	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	190,220	18,976	(6,328)	-	(13)	202,855	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**12,744,754**	**794,019**	**(39,374)**	**439,793**	**(1,930)**	**13,937,262**	***Subtotal***
Aset dalam penyelesaian	555,886	738,717	-	(313,820)	-	980,783	*Construction in progress*
Aset hak guna							*Right-of-use asset*
Bangunan	25,694	932	(14,730)	-	-	11,896	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	2,272,579	367,419	(380,302)	(125,973)	-	2,133,723	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	18,832	287	(12,704)	-	-	6,415	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**2,317,105**	**368,638**	**(407,736)**	**(125,973)**	**-**	**2,152,034**	***Subtotal***
Jumlah	**15,617,745**	**1,901,374**	**(447,110)**	**-**	**(1,930)**	**17,070,079**	***Total***
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Bangunan	(914,182)	(127,401)	3,637	-	(21)	(1,037,967)	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	(5,155,568)	(1,075,263)	10,060	(62,229)	(22)	(6,283,022)	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	(165,670)	(12,524)	6,522	-	(3)	(171,675)	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**(6,235,420)**	**(1,215,188)**	**20,219**	**(62,229)**	**(46)**	**(7,492,664)**	***Subtotal***
Aset hak guna							*Right-of-use asset*
Bangunan	(19,676)	(58)	14,730	-	-	(5,004)	*Buildings*
Mesin dan peralatan kendaraan	(876,113)	(503,540)	380,302	62,229	-	(937,122)	*Machinery and equipment vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	(14,894)	(5,298)	12,704	-	-	(7,488)	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**(910,683)**	**(508,896)**	**407,736**	**62,229**	**-**	**(949,614)**	***Subtotal***
Jumlah	**(7,146,103)**	**(1,724,084)**	**427,955**	**-**	**(46)**	**(8,442,278)**	***Total***
Cadangan penurunan nilai	(61,591)	-	-	-	-	(61,591)	*Allowance for impairment*
Nilai buku bersih	**8,410,051**					**8,566,210**	***Net book value***

11. ASET TETAP (lanjutan) / ***11. FIXED ASSETS** (continued)*

	31 Desember/*December* 2022						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ *Currency differences due to financial statement translations***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan							***Acquisition costs***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Tanah	942,943	1,069	-	-	14,275	958,287	*Land*
Bangunan	2,637,412	9,073	(1,685)	31,818	1,770	2,678,388	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	7,909,229	328,365	(35,290)	712,888	2,667	8,917,859	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	173,857	25,448	-	(9,290)	205	190,220	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**11,663,441**	**363,955**	**(36,975)**	**735,416**	**18,917**	**12,744,754**	***Subtotal***
Aset dalam penyelesaian	912,608	311,636	-	(668,358)	-	555,886	*Construction in progress*
Aset hak guna							*Right-of-use asset*
Bangunan	24,746	948	-	-	-	25,694	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	1,557,113	829,201	(46,677)	(67,058)	-	2,272,579	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	18,832	-	-	-	-	18,832	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**1,600,691**	**830,149**	**(46,677)**	**(67,058)**	**-**	**2,317,105**	***Subtotal***
Jumlah	**14,176,740**	**1,505,740**	**(83,652)**	**-**	**18,917**	**15,617,745**	***Total***
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Bangunan	(829,341)	(141,027)	1,685	56,137	(1,636)	(914,182)	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	(4,292,685)	(803,032)	35,048	(92,707)	(2,192)	(5,155,568)	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	(161,354)	(17,971)	-	13,857	(202)	(165,670)	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**(5,283,380)**	**(962,030)**	**36,733**	**(22,713)**	**(4,030)**	**(6,235,420)**	***Subtotal***
Aset hak guna							*Right-of-use asset*
Bangunan	(11,777)	(7,899)	-	-	-	(19,676)	*Buildings*
Mesin dan peralatan kendaraan	(489,817)	(454,092)	46,581	21,215	-	(876,113)	*Machinery and equipment vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	(8,944)	(5,950)	-	-	-	(14,894)	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**(510,538)**	**(467,941)**	**46,581**	**21,215**	**-**	**(910,683)**	***Subtotal***
Jumlah	**(5,793,918)**	**(1,429,971)**	**83,314**	**(1,498)**	**(4,030)**	**(7,146,103)**	***Total***
Cadangan penurunan nilai	(61,591)	-	-	-	-	(61,591)	*Allowance for impairment*
Nilai buku bersih	**8,321,231**					**8,410,051**	***Net book value***

11. ASET TETAP (lanjutan)

Grup menyewa berbagai mesin, peralatan, kendaraan, dan alat berat berdasarkan perjanjian sewa yang tidak dapat dibatalkan. Masa sewa berkisar antara dua sampai lima tahun dan Grup memegang kepemilikan atas aset. Tidak ada dari aset sewa tersebut yang disewakan kembali oleh Grup kepada pihak ketiga.

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dialokasikan sebagai berikut:

***11. FIXED ASSETS** (continued)*

The Group leases machinery, equipment, vehicles and heavy equipment under non-cancellable lease agreements. The lease terms are between two and five years, and ownership of the assets lies within the Group. None of the leased assets were sub-leased by the Group to third parties.

Depreciation expense for the years ended on 31 December 2023 and 2022 was allocated as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 27a)	1,412,333	1,163,819	*Cost of revenue (Note 27a)*
Beban di luar beban pokok pendapatan	311,751	266,152	*Expenses other than cost of revenue*
Jumlah	**1,724,084**	**1,429,971**	***Total***

Nilai tercatat bruto aset tetap yang disusutkan penuh tetapi masih digunakan oleh Grup adalah sebesar:

The gross amount of fully depreciated fixed assets which were still being used by the Group amounted to the following:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Bangunan	182,758	182,331	*Buildings*
Mesin, peralatan, dan kendaraan	1,517,097	1,490,229	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	134,868	134,447	*Office and hospital equipment*
Jumlah	**1,834,723**	**1,807,007**	***Total***

Sebagian besar tanah yang dimiliki oleh Grup masih dalam proses pengurusan sertifikat.

Most of the land rights owned by the Group are still in the certification process.

Aset tetap tertentu termasuk alat tambang utama yang berada di Area Pertambangan Tanjung Enim, Pelabuhan Kertapati, Pelabuhan Tarahan, Pelabuhan Teluk Bayur, Area Pertambangan Ombilin, Unit Pengusahaan Briket dan beberapa lokasi lain telah diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) untuk semua risiko dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp12,76 triliun (nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2023 (2022: Rp11,24 triliun (nilai penuh)). Manajemen Grup berpendapat bahwa aset tetap telah diasuransikan secara memadai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Certain fixed assets, including the main mining equipment located in the Tanjung Enim Mine Area, Kertapati Port, Tarahan Port, Teluk Bayur Port, Ombilin Mine Area, Coal Briquette Operating Unit, and several other locations were insured with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) for all risks with the sum insured amounting to Rp12.76 trillion (full amount) as at 31 December 2023 and (2022: Rp11.24 trillion (full amount)). The Group's management is of the opinion that the fixed assets were adequately insured as at 31 December 2023 and 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023 tidak ada aset tetap Grup yang dijaminkan. Pada 31 Desember 2022 terdapat aset tetap Grup sebesar Rp24 miliar (nilai penuh) dijaminkan kepada BRI.

On 31 December 2023 there is no assets pledged as collateral. On 31 December 2022 certain fixed assets of the Group amounting to Rp24 billion (full amount) were used as collateral to BRI.

11. ASET TETAP (lanjutan)

Jika aset tetap dicatat sebesar nilai wajar maka jumlahnya adalah sebesar:

***11. FIXED ASSETS** (continued)*

If the fixed assets were stated on a fair value basis, the amounts would be as follows:

	31 Desember/ *December* 2023		31 Desember/ *December* 2022		
	Nilai buku/ *Book value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai buku/ *Book value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Tanah	994,243	4,014,746	958,287	3,978,792	*Land*
Bangunan	1,733,844	2,294,582	1,764,206	2,320,290	*Buildings*
Mesin dan peralatan	3,716,511	6,366,521	3,786,841	6,524,565	*Machinery and equipment*
Jumlah	**6,444,598**	**12,675,849**	**6,509,334**	**12,823,647**	***Total***

Selain tanah, bangunan, mesin dan peralatan tidak ada perbedaan yang material antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

Penentuan nilai wajar aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan laporan penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Amin, Nirwan, Alfiantori, dan Rekan tanggal 15 Februari 2023. Metode penilaian ditentukan dengan pendekatan data pasar. Penilai independen melakukan perbandingan beberapa transaksi jual beli dari aset serupa untuk menentukan nilai wajar aset tersebut (hierarki nilai wajar tingkat 3). Penentuan nilai wajar aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 adalah setelah mempertimbangkan nilai wajar 31 Desember 2022 dan pergerakan nilai buku selama tahun 2023.

There is no material difference between the fair value and carrying value of fixed assets, other than land, buildings, machinery and equipment.

The determination of the fair value of the property, plant and equipment as at 31 December 2022 was based on an appraisal report from Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Amin, Nirwan, Alfiantori, and Rekan dated 15 February 2023. The valuation method was determined through the market data approach. An independent appraiser compares several sale and purchase transactions in the market for similar items to determine the fair value of those assets (fair value hierarchy level 3). The determination of the fair value of the property, plant and equipment as at 31 December 2023 was after considering the fair value as at 31 December 2023 and the movement of the book value during 2023.

Aset dalam penyelesaian

Aset dalam penyelesaian merupakan proyek yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

Construction in progress

Construction in progress represents projects that have not been completed as at the date of the consolidated statements of financial position with details as follows:

	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ *Accumulated costs*	Tahun perkiraan penyelesaian/ *Estimated year of completion*	
31 Desember 2023				*31 December 2023*
Kawasan Industri Tanjung Enim – Bukit Asam Coal Based Industrial Estate Tahap 1 – 3 (Industri Batubara) (sebelumnya Kawasan Ekonomi Khusus (Industri Batubara))	2.70%	142,812	Desember/ *December 2039*	*Kawasan Industri Tanjung Enim Bukit Asam Coal Based Industrial Estate Phase 1 - 3 (Coal Industry) (previously Kawasan Ekonomi Khusus (Coal Industry))*
Konstruksi kapal	89.82%	140,519	Maret/ *March* 2024	*Ship construction*
Betonisasi jalan tambang	37.00%	126,606	September/ *September* 2024	*Mine road concreting*
Revitalisasi kantor	97.00%	122,977	Juni/ June 2024	*Office revitalisation*
Pengadaan tanah Tarahan	75.00%	88,543	Desember/ *December* 2024	*Tarahan land procurement*

11. ASET TETAP (lanjutan) / ***11. FIXED ASSETS** (continued)*

Aset dalam penyelesaian (lanjutan) / ***Construction in progress** (continued)*

	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	**Akumulasi biaya/ *Accumulated costs***	**Tahun perkiraan penyelesaian/ *Estimated year of completion***	
31 Desember 2023 (lanjutan)				*31 December 2023 (continued)*
Rumah Dinas Duren Tiga	99.00%	80,579	Maret/ *March* 2024	*Duren Tiga Employee Housing*
Pemindahan *Bucket-wheel Excavator ("BWE")* 204 ke Banko	82.60%	57,967	Juni/ *June* 2024	*Transfer of Bucket-wheel excavator ("BWE")204 to Banko*
Lainnya	7.31% sd 95%	220,780	Desember/*December* 2024 - 2025	*Others*
Jumlah		**980,783**		***Total***

	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	**Akumulasi biaya/ *Accumulated costs***	**Tahun perkiraan penyelesaian/ *Estimated year of completion***	
31 Desember 2022				*31 December 2022*
Kawasan Ekonomi Khusus (Industri Batubara)	15.54%	131,135	Desember/ *December* 2025	*Special Economic Zone (Coal Industry)*
Coal Handling Facility ("CHF") *Supply* PLTU Sumsel-8	98.78%	104,002	Maret/ *March* 2023	*Coal Handling Facility ("CHF") Supply for Power Plants Sumsel-8*
Rumah Dinas Duren Tiga	99.00%	77,539	Maret/ *March* 2023	*Duren Tiga Employee Housing*
Rumah Dinas Tarahan	99.36%	54,483	Maret/ *March* 2023	*Tarahan Employee Housing*
Pemindahan *Bucket-wheel Excavator ("BWE")* 204 ke Banko	69.00%	41,324	Maret/ *March* 2023	*Transfer of Bucket-wheel excavator ("BWE")204 to Banko*
Lainnya	15% - 95%	147,403	Desember/*December* 2023 - 2024	*Others*
Jumlah		**555,886**		***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai aset tetap telah dibentuk secara memadai.

As at 31 December 2023 and 2022, management believed that allowance for impairment of the carrying values of fixed assets was adequate.

12. *GOODWILL*

Saldo *Goodwil* sebesar Rp102,077 merupakan saldo yang timbul karena akuisisi kepemilikan atas SBS sebagai akibat dari pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas milik SBS pada tanggal akuisisi.

12. GOODWILL

Goodwill balance amounting to Rp102.077 represents the balance arising from acquisition of ownership in SBS, as a result of fair value measurement of assets and liabilities owned by SBS as at the acquisition date.

12. *GOODWILL* (lanjutan)

Grup menggunakan pendekatan pendapatan untuk menguji penurunan nilai UPK tertentu. Pendekatan pendapatan didasarkan atas nilai arus kas masa depan yang akan dihasilkan oleh suatu bisnis. Metode diskonto arus kas meliputi proyeksi arus kas dan mendiskontokannya menjadi nilai kini. Proses pendiskontoan menggunakan tingkat pengembalian yang sesuai dengan risiko terkait dengan bisnis atau aset dan nilai waktu uang.

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan jumlah terpulihkan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Tingkat pertumbuhan jangka panjang	3.00%	3.55%	*Long-term growth rate*
Tingkat diskonto sebelum pajak (untuk perhitungan nilai pakai)	12.27%	15.40%	*Discount rate before tax (for value in use)*

Asumsi utama lainnya termasuk pendapatan dan biaya operasi jangka panjang.

Manajemen menentukan asumsi utama berdasarkan kombinasi pengalaman masa lalu dan sumber eksternal.

Nilai wajar yang ditentukan dalam perhitungan nilai aset yang dapat dipulihkan diklasifikasikan sebagai Tingkat 3 dalam hierarki nilai wajar.

Berdasarkan hasil pengujian penurunan nilai *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada rugi penurunan nilai yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

12. GOODWILL *(continued)*

The Group used an income approach to assess the impairment value of certain CGUs. The income approach is predicated upon the value of the future cash flows that a business will generate going forward. The discounted cash flow method was used which involves projecting cash flows and converting it to a present value equivalent through discounting. The discounting process uses a rate of return that is commensurate with the risk associated with the business or asset and the time value of money.

The key assumptions used for recoverable amount calculations as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

Other key assumptions include the long-term operating revenue and expenses.

Management determines key assumptions based on a combination of past experience and external sources.

The fair value determined in the calculation of the recoverable amount of assets is classified as Level 3 in the fair value hierarchy.

Based on the results of the test for impairment of goodwill as at 31 December 2023 and 2022, there is no impairment loss recorded as at 31 December 2023 and 2022.

13. UTANG USAHA / *13. TRADE PAYABLES*

Akun ini merupakan liabilitas usaha kepada pihak ketiga dan berelasi dengan rincian sebagai berikut:

This account represents liabilities to third parties and related parties with the details as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	1,056,458	1,162,844	*Rupiah*
Euro	1,704	1,140	*Euro*
Dolar AS	16	-	*US Dollars*
	1,058,178	1,163,984	
Pihak berelasi (Catatan 30b)			*Related parties (Note 30b)*
Rupiah	892,847	601,222	*Rupiah*
Dolar AS	131,163	170,612	*US Dollars*
	1,024,010	771,834	
Jumlah utang usaha	**2,082,188**	**1,935,818**	***Total trade payable***

Saldo utang usaha terutama berasal dari pembelian bahan bakar, suku cadang, jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa pengangkutan batubara, dan jasa penambangan batubara.

Trade payables balances mainly arose from the purchase of fuel, spare parts, repair and maintenance services, coal transportation services and coal mining services.

14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *14. ACCRUED EXPENSES*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Jasa penambangan	2,139,376	1,499,153	*Mining services*
Jasa angkutan kereta api	786,964	1,330,847	*Coal railway services*
Suku cadang dan peralatan	479,852	168,236	*Spare parts and equipment*
Sewa alat berat	408,524	407,037	*Heavy equipments rent*
Jasa pihak ketiga	331,237	344,042	*Third party services*
Aset dalam penyelesaian	329,477	70,857	*Construction in progress*
Sumbangan	41,645	52,045	*Donations*
Denda	-	42,878	*Penalty*
Lainnya	340,755	569,923	*Others*
Jumlah	**4,857,830**	**4,485,018**	***Total***

Biaya yang masih harus dibayar atas aset dalam penyelesaian terdiri dari beban akrual atas pembuatan kapal yang dilakukan oleh PT Dok dan Perkapalan Air Kantung ("DAK"). Selain akrual konstruksi kapal terdapat akrual atas pembelian aset tetap yang belum siap digunakan dan betonisasi jalan.

Construction in progress accrued expense consists of accrued expense related to shipbuilding performed by PT Dok dan Perkapalan Air Kantung ("DAK"). Other than ship construction accrual there is accruals related to fixed assets purchase which were not yet ready to use and road concreting.

Lihat Catatan 30b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 30b for information on the details of transactions and balances with related parties.

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK / *15. SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES*

Pada tanggal 31 Desember 2023, liabilitas imbalan kerja jangka pendek terdiri dari akrual bonus karyawan dan tantiem sebesar Rp852.007 (31 Desember 2022: Rp1.331.997).

As at 31 December 2023, short-term employee benefit liabilities consisted of employee bonuses and tantiem accruals amounting to Rp852,007 (31 December 2022: Rp1,331,997).

16. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA / *16. OTHER CURRENT LIABILITIES*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pendapatan diterima di muka	95,449	129,958	*Unearned revenue*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	173,078	101,540	*Others (each below Rp10,000)*
Jumlah	**268,527**	**231,498**	***Total***

17. PERPAJAKAN / *17. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pajak penghasilan badan:			*Corporate income taxes:*
Pasal 28A	25,370	160,284	*Article 28A*
Pajak lainnya:			*Other taxes:*
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	2,528,981	1,252,382	*Value Added Tax ("VAT")*
Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") dan pajak lainnya	-	83,677	*Land and Buildings Tax ("PBB") and other taxes*
Jumlah	**2,554,351**	**1,496,343**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pajak penghasilan badan:			*Corporate income taxes:*
Pasal 25	8,247	354,739	*Article 25*
Pasal 29	286,929	538,916	*Article 29*
Pajak lainnya:			*Other taxes:*
PBB	128,118	158,388	*PBB*
PPN	147,870	198,529	*VAT*
Pasal 23/26	70,267	50,876	*Article 23/26*
Pasal 21	145,083	203,754	*Article 21*
Pasal 22	4,680	4,360	*Article 22*
Pasal 15	627	245	*Article 15*
Jumlah	**791,821**	**1,509,807**	***Total***

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expenses*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Perusahaan			***The Company***
Kini	1,725,736	3,169,638	*Current*
Penyesuaian tahun lalu	42,578	120,684	*Prior year's adjustment*
Tangguhan	(50,298)	(13,174)	*Deferred*
Entitas anak			***Subsidiaries***
Kini	181,224	145,739	*Current*
Penyesuaian tahun lalu	-	-	*Prior year's adjustment*
Tangguhan	(37,448)	-	*Deferred*
Konsolidasian			***Consolidated***
Kini	1,906,960	3,315,377	*Current*
Penyesuaian tahun lalu	42,578	120,684	*Prior year's adjustment*
Tangguhan	(87,746)	(13,174)	*Deferred*
Jumlah pajak penghasilan	**1,861,792**	**3,422,887**	***Total income tax expenses***

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan dengan taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

***17. TAXATION** (continued)*

***c. Income tax expenses** (continued)*

The reconciliation between the profit before income tax of the Company and the Company's estimated taxable income for the year ended on 31 December 2023 and 2022 is as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	8,154,313	16,202,314	*Consolidated profit before income tax*
Dikurangi:			*Less:*
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(804,255)	(880,532)	*Profit before income tax - subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	**7,350,058**	**15,321,782**	***Profit before income tax - the Company***
Koreksi pajak:			***Fiscal corrections:***
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	316,946	639,678	*Provision for environmental reclamation and mine closure*
Properti penambangan	(447,635)	(697,401)	*Mining properties*
Liabilitas imbalan pascakerja	122,559	(47,514)	*Post-employment benefit liabilities*
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	327,370	222,418	*Difference between commercial and tax net book value of fixed assets*
Selisih liabilitas sewa dengan pembayaran liabilitas sewa	5,420	(21,005)	*Difference between lease liabilities and right-of-use assets*
Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai piutang	(96,025)	(59,709)	*Provision for obsolete inventories and impairment of receivables*
Sumbangan	102,346	218,227	*Donations*
Bagian atas keuntungan neto entitas asosiasi dan ventura bersama	(571,303)	(829,063)	*Share in net profit of associates and joint ventures*
Penghasilan kena pajak final	(581,149)	(437,743)	*Income subject to final tax*
Penyesuaian penjualan atas penetapan PP 15	1,133,882	-	*Sales adjustment upon application of GR 15*
Lainnya	181,785	97,775	*Others*
	494,196	(914,337)	
Taksiran penghasilan kena pajak - Perusahaan	**7,844,254**	**14,407,445**	***Estimated taxable income - the Company***
Beban pajak penghasilan - kini Perusahaan	**1,725,736**	**3,169,638**	***Current income tax expenses - the Company***

17. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***17. TAXATION** (continued)*

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / ***c. Income tax expenses** (continued)*

Rekonsiliasi antara beban pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba akuntansi sebelum manfaat pajak penghasilan dan beban pajak seperti yang dilaporkan dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

The reconciliation between tax expenses computed using the prevailing tax rates on the accounting profit before income tax benefit and the tax expenses as reported in profit or loss is as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	**8,154,313**	**16,202,314**	***Consolidated profit before income tax***
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 22%	1,793,949	3,564,509	*Tax expense computed using the prevailing tax rate of 22%*
Penghasilan kena pajak final	(218,490)	(193,904)	*Income subject to final tax*
Sumbangan	22,516	48,010	*Donations*
Bagian atas keuntungan neto entitas asosiasi dan ventura bersama	(125,687)	(182,394)	*Share in net profit of associates and joint venture*
Penyesuaian penjualan atas penetapan PP 15	249,454	-	*Sales adjustment upon application of GR 15*
Penyesuaian tahun lalu	42,578	120,684	*Prior year adjustment*
Beban pajak yang tidak dapat dikurangkan secara pajak	97,472	65,982	*Non-deductible expense*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**1,861,792**	**3,422,887**	***Consolidated corporate income tax***

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan saat SPT tahunan disampaikan ke DJP.

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when annual tax returns are submitted to DGT.

d. Pajak tangguhan / ***d. Deferred tax***

Perhitungan beban pajak dan aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The computation of deferred income tax expenses and deferred tax assets is as follows:

	31 Desember/*December* 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan ke laba rugi/ *Credited to profit or loss*	Dikreditkan ke ekuitas/ *Credited to equity*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Perusahaan					***The Company***
Aset pajak tangguhan, neto					***Deferred tax assets, net***
Liabilitas imbalan pascakerja	816,700	26,963	228,732	1,072,395	*Post-employment benefit liabilities*
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	375,788	69,728	-	445,516	*Provision for environmental reclamation and mine closure*
Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai piutang	79,054	(21,126)	-	57,928	*Provision for obsolete inventories and impairment of receivables*
Penurunan nilai aset tidak lancar	21,991	-	-	21,991	*Impairment for non-current assets*
Selisih liabilitas sewa dengan nilai buku aset-hak-guna	9,663	1,192	-	10,855	*Difference between lease liabilities and right-of-use assets*
Properti penambangan	(359,595)	(98,480)	-	(458,075)	*Mining properties*
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(49,126)	72,021	-	22,895	*Difference between commercial and tax book value of fixed assets*
Manfaat pajak tangguhan		50,298	228,732		*Deferred tax benefits*
Jumlah aset pajak tangguhan, neto	**894,475**			**1,173,505**	*Total deferred tax assets, net*

17. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***17. TAXATION** (continued)*

d. Pajak tangguhan (lanjutan) / ***d. Deferred tax** (continued)*

	31 Desember/*December* 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss***	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke ekuitas/ *Credited/ (charged) to equity***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Entitas anak					***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan					***Deferred tax assets***
Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai piutang	14,036	-	-	14,036	*Provision for obsolete inventories and impairment of receivables*
Rugi pajak yang dapat dibawa ke masa depan	1,003	-	-	1,003	*Tax loss carry-forward*
Lainnya	7,809	12,330	-	20,139	*Others*
Total aset pajak tangguhan	22,848	12,330	-	35,178	*Total deferred tax assets*
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(23,525)	-	-	(23,525)	*Difference between commercial and tax book value of fixed assets*
Pembayaran liabilitas sewa	(78,819)	25,118	-	(53,701)	*Payment for lease liabilities*
Total liabilitas pajak tangguhan	(102,344)	25,118	-	(77,226)	*Total deferred tax liabilities*
Beban pajak tangguhan		37,448	-		*Deferred tax expenses*
Konsolidasian					***Consolidated***
Aset pajak tangguhan	917,323			1,208,683	*Deferred tax assets*
Liabilitas pajak tangguhan	(102,344)			(77,226)	*Deferred tax liabilities*
Manfaat pajak tangguhan		87,746	228,732		*Deferred tax benefits*

	31 Desember/*December* 2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss***	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke ekuitas/ *Credited/ (charged) to equity***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Perusahaan					***The Company***
Aset pajak tangguhan, neto					***Deferred tax assets, net***
Liabilitas imbalan pascakerja	691,837	(10,453)	135,316	816,700	*Post-employment benefit liabilities*
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	235,059	140,729	-	375,788	*Provision for environmental reclamation and mine closure*
Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai piutang	92,190	(13,136)	-	79,054	*Provision for obsolete inventories and impairment of receivables*
Penurunan nilai aset tidak lancar	21,991	-	-	21,991	*Impairment for non-current assets*
Selisih liabilitas sewa dengan nilai buku aset-hak-guna	4,512	5,151	-	9,663	*Difference between lease liabilities and right-of-use assets*
Properti penambangan	(201,546)	(158,049)	-	(359,595)	*Mining properties*
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(98,058)	48,932	-	(49,126)	*Difference between commercial and tax book value of fixed assets*
Manfaat pajak tangguhan		13,174	135,316		*Deferred tax benefits*
Jumlah aset pajak tangguhan, neto	745,985			894,475	*Total deferred tax assets, net*

17. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***17. TAXATION** (continued)*

d. Pajak tangguhan (lanjutan) / ***d. Deferred tax** (continued)*

	31 Desember/*December* 2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss***	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke ekuitas/ *Credited/ (charged) to equity***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Entitas anak					***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan					***Deferred tax assets***
Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai piutang	14,036	-	-	14,036	*Provision for obsolete inventories and impairment of receivables*
Rugi pajak yang dapat dibawa ke masa depan	1,003	-	-	1,003	*Tax loss carry-forward*
Lainnya	7,809	-	-	7,809	*Others*
Total aset pajak tangguhan	22,848	-	-	22,848	*Total deferred tax assets*
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(23,525)	-	-	(23,525)	*Difference between commercial and tax book value of fixed assets*
Pembayaran liabilitas sewa	(78,819)	-	-	(78,819)	*Payment for lease liabilities*
Total liabilitas pajak tangguhan	(102,344)	-	-	(102,344)	*Total deferred tax liabilities*
Beban pajak tangguhan		-	-		*Deferred tax expenses*
Konsolidasian					***Consolidated***
Aset pajak tangguhan	768,833			917,323	*Deferred tax assets*
Liabilitas pajak tangguhan	(102,344)			(102,344)	*Deferred tax liabilities*
Manfaat pajak tangguhan		13,174	135,316		*Deferred tax benefits*

e. Administrasi / ***e. Administration***

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung, menetapkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Under the Taxation Laws of Indonesia, the companies within the Group which are domiciled in Indonesia submit their tax returns on the basis of self-assessment. The DGT may assess and amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

f. Sengketa pajak / ***f. Tax disputes***

PBB / ***PBB***

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ("SPPT") atas PBB sebagai berikut:

As at the date of these consolidated financial statements, the Company had received the following Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") and Notification of Tax Due ("SPPT") on PBB as follows:

Jenis pajak/ *Tax type*	**Tahun pajak/ *Fiscal year***	**KPP penerbit/ *Issuing tax office***	**Surat ketetapan pajak/ *Assessment letter***	**Periode surat ketetapan pajak/ *Period of tax assessment letter***	**Jumlah berdasarkan keputusan terakhir/ *Amount based on the latest decision* (dalam jutaan/ *in millions*)**	**Jumlah (kompensasi)/ pembayaran terakhir/ *Total latest (compensation)/ payment* (dalam jutaan/ *in millions*)**	**Status/ *Status***
PBB	2007	KPP Prabumulih	SKPKB	Desember/ *December* 2013	109	(153,558)[a)]	Peninjauan kembali oleh DJP/ *Judicial review by DGT*
PBB	2012	KPP Prabumulih	SPPT	Agustus/ *August* 2012	49,984	(9,613)	Peninjauan kembali oleh Perusahaan/ *Judicial review by the Company*

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

***17. TAXATION** (continued)*

f. Sengketa pajak (lanjutan)

***f. Tax disputes** (continued)*

PBB (lanjutan)

***PBB** (continued)*

Jenis pajak/ *Tax type*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	KPP penerbit/ *Issuing tax office*	Surat ketetapan pajak/ *Assessment letter*	Periode surat ketetapan pajak/ *Period of tax assessment letter*	Jumlah berdasarkan keputusan terakhir/ *Amount based on the latest decision* (dalam jutaan/ *in millions*)	Jumlah (kompensasi)/ pembayaran terakhir/ *Total latest (compensation)/ payment* (dalam jutaan/ *in millions*)	Status/ *Status*
PBB	2012	KPP Lahat	SPPT	Agustus/ *August* 2012	19,655	(354)	Peninjauan kembali oleh Perusahaan/ *Judicial review by the Company*
PBB	2015	KPP Prabumulih	SPPT	April/*April* 2015	35,833	35,740[b)]	Peninjauan kembali oleh DJP/ *Judicial review by DGT*
PBB	2015	KPP Lahat	SPPT	April/*April* 2015	3,340	(1,639)[b)]	Peninjauan kembali oleh DJP/ *Judicial review by DGT*
PBB	2016	KPP Prabumulih	SPPT	April/*April* 2016	68,106	(7,299)[b)]	Peninjauan kembali oleh DJP/ *Judicial review by DGT*
PBB	2016	KPP Lahat	SPPT	April/*April* 2016	4,959	(317)[b)]	Peninjauan kembali oleh DJP ditolak/ *Judicial review by DGT rejected*
PBB	2019	KPP Prabumulih	SPPT	April/*April* 2019	214,737	121,880	Banding/*Appeal*
PBB	2019	KPP Lahat	SPPT	April/*April* 2019	47,932	25,255	Banding/*Appeal*
PBB	2014	KPP Prabumulih	SKPKB	September/ *September* 2019	-	(55,541)[c)]	Banding diterima/ *Appeal Approved*
PBB	2014	KPP Lahat	SKPKB	September/ *September* 2019	-	(2,002)[c)]	Banding diterima/ *Appeal Approved*
PBB	2014	KPP Prabumulih	STP	Desember/ *December* 2019	3,332	-	Peninjauan kembali oleh DJP/ *Judicial review by DGT*
PBB	2014	KPP Lahat	STP	Desember/ *December* 2019	240	240	Peninjauan kembali oleh Perusahaan Ditolak/Judicial *review by Company rejected*
PBB	2017	KPP Prabumulih	STP	Oktober/ *October* 2019	-	137[d)]	Peninjauan kembali oleh DJP ditolak/ *Judicial review by DGT rejected*
PBB	2018	KPP Prabumulih	STP	Oktober/ *October* 2019	-	7,252[d)]	Peninjauan kembali oleh DJP ditolak/ *Judicial review by DGT rejected*

Catatan:

a) Kompensasi berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ("SPMKP") tertanggal 21 Februari 2018 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki lebih bayar PBB sebesar Rp293 miliar, dari sengketa pajak tahun 2004-2008, 2009-2010 dan 2014. Pada Februari 2018, Perusahaan telah menerima restitusi pajak sebesar Rp176 miliar. Jumlah sisanya Rp111 miliar akan dikompensasikan untuk sengketa PBB tahun 2015, 2016 dan 2017.

b) Kompensasi atas sengketa pajak PBB tahun 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp35 miliar, Rp28 miliar dan Rp47 miliar.

c) Pada September 2019, DJP menerbitkan SKP PBB atas PBB tahun 2014 yang ditelah diperiksa ditingkat Mahkamah Agung sebelumnya. SKP tersebut dilakukan upaya hukum keberatan dan banding oleh perusahaan. Per tanggal 31 Desember 2023 telah terbit putusan pengadilan pajak dengan amar putusan menerima permohonan banding perusahaan.

d) Kompensasi berdasarkan SPMKP sebesar Rp7,3 miliar untuk STP PBB 2017 dan 2018.

Notes:

a) Compensation based on SPMKP dated 21 February 2018 stated the Company has overpayment on PBB amounting to Rp 293 billion, from PBB dispute 2004-2008, 2009-2010, and 2014. On February 2018, the Company received payment for a tax refund amounting to Rp176 billion. The remaining balance amounting to Rp111 billion is compensated to PBB dispute year 2015, 2016 and 2017.

b) Compensation for the 2015, 2016 and 2017 PBB disputes, amounted to Rp35 billion, Rp28 billion and Rp47 billion, respectively.

c) As of September 2019, DGT issued SKP for PBB 2014 which previously was examined at the Supreme Court level. The SKP is subject to legal objections and appeals by the Company. As of 31 December 2023, the Tax Court's decision has been issued with a decision to accept the company's appeal.

d) Compensation based on SPMKP amounted to Rp7.3 billion for STP PBB 2017 and 2018.

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Sengketa pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menerima SKPKB atas pajak penghasilan sebagai berikut:

***17. TAXATION** (continued)*

***f. Tax disputes** (continued)*

Income Tax

As at the date of these consolidated financial statements, the Company had received the following SKPKB on income tax as follows:

Jenis pajak/ *Tax type*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	KPP penerbit/ *Issuing tax office*	Surat ketetapan pajak/ *Assessment letter*	Periode surat ketetapan pajak/ *Period of tax assessment letter*	Jumlah berdasarkan keputusan terakhir/ *Amount based on the latest decision* (dalam jutaan/ *in millions*)	Jumlah (kompensasi)/ pembayaran terakhir/ *Total latest (compensation)/ payment* (dalam jutaan/ *in millions*)	Status/ *Status*
PPh 23	2011	KPP Wajib Pajak Besar 3	SKPKB	Desember/ *December* 2012	38,600	38,600	Peninjauan kembali oleh DJP/ *Judicial review by DGT*
PPh badan	2016	KPP Wajib Pajak Besar 3	SKPLB	Agustus/ *August* 2018	(1,548)	(101,646)	Peninjauan kembali oleh DJP/ *Judicial review by DGT*
PPh badan	2017	KPP Wajib Pajak Besar 3	SKPKB	September/ *September* 2022	145,000	72,500	Keberatan/ *Objection*

18. PROVISI REKLAMASI LINGKUNGAN DAN PENUTUPAN TAMBANG

Penyisihan dilakukan atas reklamasi lingkungan dan penutupan tambang yang berhubungan dengan reklamasi dan bagian provisi penutupan tambang pada saat berakhirnya masa tambang dan kegiatan reklamasi yang berjalan dari tahun ke tahun. Mutasi nilai provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

18. PROVISION FOR ENVIRONMENTAL RECLAMATION AND MINE CLOSURE

The provision for environmental reclamation and mine closure relates to the reclamation and mine closure provision to be incurred at the end of the life of the mine and ongoing reclamation activities from year to year. Movements in the provision for environmental reclamation and mine closure were as follows:

		Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang/ *Provision for environmental reclamation and mine closure*				
Nama/ *Name*	Lokasi/ *Location*	1 Januari/ *January* 2023	Penambahan/ (pengurangan)/ *Additions/ (deductions)*	Akresi/ *Accretion*	Pengeluaran reklamasi lingkungan/ *Reclamation expenditure*	31 Desember/ *December* 2023
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Air Laya	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	417,574	128,979	17,533	(125,331)	438,755
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Muara Tiga Besar	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	322,380	26,927	17,719	(43,515)	323,511
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Banko Barat	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	428,963	136,530	24,929	(43,114)	547,308
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Sawahlunto	Ombilin - Sumatera Barat/ *West Sumatra*	5,409	-	-	-	5,409
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Bukit Kendi	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	51,663	3,768	-	-	55,431
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Peranap	Peranap - Riau/ *Riau*	6,875	-	-	-	6,875
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* IPC	Kalimantan Timur/ *East Kalimantan*	33,100	3,272	-	-	36,372
IUP Operasi Produksi/- *Operation Production* Banko Tengah	Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	526,932	208,213	27,893	(59,819)	703,219
Jumlah/*Total*		**1,792,896**	**507,689**	**88,074**	**(271,779)**	**2,116,880**

18. PROVISI REKLAMASI LINGKUNGAN DAN PENUTUPAN TAMBANG (lanjutan)

18. PROVISION FOR ENVIRONMENTAL RECLAMATION AND MINE CLOSURE (continued)

Nama/ *Name*	Lokasi/ *Location*	Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang/ *Provision for environmental reclamation and mine closure* — 1 Januari/ *January* 2022	Penambahan/ (pengurangan)/ *Additions/ (deductions)*	Akresi/ *Accretion*	Pengeluaran reklamasi lingkungan/ *Reclamation expenditure*	31 Desember/ *December* 2022
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Air Laya	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	423,839	111,287	15,815	(133,367)	417,574
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Muara Tiga Besar	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	267,628	51,745	17,413	(14,406)	322,380
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Banko Barat	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	364,704	64,222	25,313	(25,276)	428,963
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Sawahlunto	Ombilin - Sumatera Barat/ *West Sumatra*	5,409	-	-	-	5,409
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Bukit Kendi	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	51,663	-	-	-	51,663
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Peranap	Peranap - Riau/ *Riau*	6,875	-	-	-	6,875
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* IPC	Kalimantan Timur/ *East Kalimantan*	24,497	7,582	1,200	(179)	33,100
IUP Operasi Produksi/- *Operation Production* Banko Tengah	Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	-	526,932	-	-	526,932
Jumlah/*Total*		**1,144,615**	**761,768**	**59,741**	**(173,228)**	**1,792,896**

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Saldo akhir tahun	2,116,880	1,792,896	*Balance at the end of the year*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	**(329,190)**	**(257,812)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**1,787,690**	**1,535,084**	***Non-current portion***

Estimasi manajemen atas jumlah provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang adalah sebesar Rp2.116.880 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp1.792.896) sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 2t.

Management's estimate of total environmental reclamation and mine closure provisions amounts to Rp2,116,880 for the year ended on 31 December 2023 (31 December 2022: Rp1,792,896) in accordance with the accounting policies disclosed in Note 2t.

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The key assumptions used for the provision of environmental reclamation and mine closure calculations as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Tingkat inflasi	3.60%	5.51%	*Inflation rate*
Tingkat diskonto	6.36% - 6.84%	5.52% - 7.26%	*Discount rate*

Manajemen berkeyakinan bahwa pencadangan yang dilakukan telah mencukupi taksiran kewajiban yang akan timbul pada saat realisasi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang.

Management believes that the provision is adequate to cover the liability that will arise at the time of environmental reclamation and mine closure realisation.

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA / *19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES*

Liabilitas imbalan karyawan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaria independen, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan.

Employee benefit liabilities as at 31 December 2023 and 2022 were calculated by an independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari penyisihan, beban dan mutasi saldo penyisihan untuk imbalan pensiun, imbalan kesehatan pascakerja dan imbalan kerja lainnya:

The following table summarises the provision, expenses and movements in the obligation for pension benefits, post-employment healthcare benefits and other employment benefits:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Kewajiban posisi keuangan untuk:			*Financial position obligations for:*
Imbalan pensiun	204,699	385,292	*Pension benefits*
Imbalan kesehatan pascakerja	4,458,003	3,166,609	*Post-employment healthcare benefits*
Imbalan kerja lainnya	191,130	139,681	*Other employment benefits*
Jumlah	**4,853,832**	**3,691,582**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	**(228,521)**	**(358,153)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**4,625,311**	**3,333,429**	***Non-current portion***

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Dibebankan pada laba rugi konsolidasian:			*Charged to consolidated profit or loss:*
Imbalan pensiun	34,511	38,139	*Pension benefits*
Imbalan kesehatan pascakerja	319,608	226,916	*Post-employment healthcare benefits*
Imbalan kerja lainnya	56,828	6,554	*Other employment benefits*
	410,947	**271,609**	
Pengukuran kembali untuk:			*Remeasurements for:*
Imbalan pensiun	(27,772)	62,770	*Pension benefits*
Imbalan kesehatan pascakerja	1,055,041	531,702	*Post-employment healthcare benefits*
Imbalan kerja lainnya	12,422	20,724	*Other employment benefits*
	1,039,691	**615,196**	

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan) / *19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)*

a. Imbalan pensiun / *a. Pension benefits*

Perusahaan telah menerima persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Kep-245/KM.6/2003 tanggal 21 Oktober 2002 untuk mendirikan dana pensiun terpisah, Dana Pensiun Bukit Asam, di mana pekerja tertentu, setelah memenuhi periode bakti tertentu, berhak atas imbalan pasti saat pensiun, cacat atau kematian, serta imbalan kesehatan pascakerja.

The Company received approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. Kep-245/KM.6/2003 dated 21 October 2002 to establish a separate pension fund, Dana Pensiun Bukit Asam. After serving a qualifying period, certain employees are entitled to defined benefits upon retirement, disability or death, and also post-employment healthcare benefits.

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Nilai kini kewajiban yang didanai	(2,126,519)	(2,097,578)	*Present value of funded obligation*
Nilai wajar aset program	1,921,820	1,712,286	*Fair value of plan assets*
Jumlah liabilitas imbalan pascakerja	(204,699)	(385,292)	*Total post-employment benefit liabilities*

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefit obligations for the year ended on 31 December 2023 were as follows:

	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligation*	Nilai wajar aset program/*Fair value of plan assets*	Jumlah/ *Total*	
1 Januari 2023	**2,097,578**	**(1,712,286)**	**385,292**	***1 January 2023***
Biaya jasa kini	11,029	-	11,029	*Current service cost*
Biaya/(penghasilan) bunga	155,850	(132,368)	23,482	*Interest cost/(income)*
Subjumlah yang diakui dalam laba rugi	**166,879**	**(132,368)**	**34,511**	***Subtotal amounts recognised in profit or loss***
Pengukuran kembali diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya:				*Remeasurement recognised as other comprehensive income:*
Laba dari perubahan asumsi demografi	(201,137)	-	(201,137)	*Gain from changes in demographic assumptions*
Rugi dari perubahan asumsi keuangan	140,991	-	140,991	*Losses from changes in financial assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	2,468	-	2,468	*Experience adjustment on obligation*
Hasil dari aset program	-	29,906	29,906	*Return on plan assets*
Subjumlah biaya diakui dalam penghasilan komprehensif lain	**(57,678)**	**29,906**	**(27,772)**	***Subtotal expenses recognised in other comprehensive income***
Iuran yang dibayar:				*Contributions paid by:*
Grup	-	(187,332)	(187,332)	*The Group*
Pembayaran manfaat oleh:				*Benefits paid by:*
Aset program	(80,260)	80,260	-	*Plan assets*
31 Desember 2023	**2,126,519**	**(1,921,820)**	**204,699**	***31 December 2023***

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan) / *19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)*

a. Imbalan pensiun (lanjutan) / *a. Pension benefits (continued)*

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The movements in the defined benefit obligations during the year ended on 31 December 2022 were as follows:

	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligation*	Nilai wajar aset program/*Fair value of plan assets*	Jumlah/ *Total*	
1 Januari 2022	**1,895,340**	**(1,535,528)**	**359,812**	***1 January 2022***
Biaya jasa kini	12,309	-	12,309	*Current service cost*
Biaya/(penghasilan) bunga	143,098	(117,268)	25,830	*Interest cost/(income)*
Subjumlah yang diakui dalam laba rugi	**155,407**	**(117,268)**	**38,139**	***Subtotal amounts recognised in profit or loss***
Pengukuran kembali diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya:				*Remeasurement recognised as other comprehensive income:*
Rugi dari perubahan asumsi keuangan	31,252	-	31,252	*Losses from changes in financial assumptions*
Kerugian dari perubahan asumsi demografi	59,396	-	59,396	*Losses from changes in demographic assumptions*
Kerugian dari perubahan asumsi tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	16,390	-	16,390	*Losses from increase in pension basic income rate*
Rugi dari perubahan kombinasi asumsi	2,768	-	2,768	*Losses from changes in combination of assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	16,214	-	16,214	*Experience adjustment on obligation*
Hasil dari aset program	-	(63,250)	(63,250)	*Return on plan assets*
Subjumlah biaya diakui dalam penghasilan komprehensif lain	**126,020**	**(63,250)**	**62,770**	***Subtotal expenses recognised in other comprehensive income***
Iuran yang dibayar:				*Contributions paid by:*
Aset program	-	(75,429)	(75,429)	*Plan assets*
Pembayaran manfaat oleh:				*Benefits paid by:*
Aset program	(79,189)	79,189	-	*Plan assets*
31 Desember 2022	**2,097,578**	**(1,712,286)**	**385,292**	***31 December 2022***

Jumlah yang diakui pada laba rugi adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in profit or loss are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Biaya jasa kini	11,029	12,309	*Current service costs*
Iuran karyawan ke dalam aset program	(1,126)	(1,424)	*Employee contributions to plan assets*
Biaya bunga	24,608	27,254	*Interest cost*
Jumlah	**34,511**	**38,139**	***Total***

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

a. Imbalan pensiun (lanjutan)

a. Pension benefits *(continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2023, dari total beban, Rp17.44 miliar (2022: Rp19,27 miliar) (nilai penuh) dan Rp17.07 miliar (2022: Rp18,87 miliar) (nilai penuh) masing-masing dimasukkan sebagai "Beban pokok pendapatan" dan "Beban umum dan administrasi".

As at 31 December 2023, of the total charge, Rp17,44 billion (2022: Rp19.27 billion) (full amount) and Rp17,07 billion (2022: Rp18.87 billion) (full amount) were included in "Cost of revenue" and "General and administrative expenses", respectively.

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman di setiap wilayah. Di Indonesia, asumsi mortalitas yang digunakan adalah GAM 1971 *male*.

Assumptions regarding future mortality are based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience in each territory. In Indonesia, the mortality assumptions used are based on the GAM 1971 male.

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Tingkat diskonto	6.86%	7.43%	*Discount rate*
Hasil aset program yang diharapkan	7.50%	7.50%	*Expected return on plan assets*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	11.50%	11.50%	*Pension basic income rate*
Tingkat mortalitas yang diterapkan untuk karyawan aktif	100% GAM 1971	100% TMI IV	*Mortality rate applied for active employee*
Tingkat mortalitas yang diterapkan untuk pensiunan	100% GAM 1971	100% GAM 1971	*Mortality rate applied for pensioners*

Sensitivitas liabilitas pensiun secara keseluruhan terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the overall pension liability to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	**Dampak terhadap liabilitas secara keseluruhan/*Impact on overall liability***	
31 Desember/ *December* 2023			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp237 miliar/*billion* naik/*increase by* Rp287 miliar/*billion*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* Rp12 miliar/*billion* turun/*decrease by* Rp12 miliar/*billion*	*Increase pension basic income rate*
31 Desember/ *December* 2022			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp256 miliar/*billion* naik/*increase by* Rp316 miliar/*billion*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* Rp12 miliar/*billion* turun/*decrease by* Rp12 miliar/*billion*	*Increase pension basic income rate*

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan) / *19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)*

a. Imbalan pensiun (lanjutan) / *a. Pension benefits (continued)*

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial di mana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir tahun) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption, with all other assumptions remaining constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated by the projected unit credit method at the end of the reporting year) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

Komposisi nilai wajar aset program		***Composition of fair value assets programme***
Surat berharga negara	59.61%	*Government bonds*
Obligasi	16.76%	*Bonds*
Tanah dan bangunan	7.94%	*Land and buildings*
Sukuk	7.11%	*Sukuk*
Deposito berjangka	3.65%	*Time deposits*
Saham	3.51%	*Stocks*
Lainnya	1.42%	*Others*
Jumlah	**100.00%**	***Total***

b. Imbalan kesehatan pascakerja / *b. Post-employment healthcare benefits*

Perusahaan memiliki beberapa skema imbalan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dengan skema pensiun imbalan pasti. Seluruh program ini tidak didanai.

The Company operates a number of post-employment healthcare benefits schemes. The method of accounting, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for defined benefit pension schemes. All of these plans are unfunded.

Total liabilitas imbalan kesehatan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ditentukan sebagai berikut:

Post-employment healthcare benefit liabilities recognised in the consolidated statements of financial position as at 31 December 2023 and 2022 are computed as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Nilai kini kewajiban	4,458,003	3,166,609	*Present value of obligation*

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan) / ***19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES*** *(continued)*

b. Imbalan kesehatan pascakerja (lanjutan) / ***b. Post-employment healthcare benefits*** *(continued)*

Nilai kini imbalan kesehatan pascakerja adalah sebagai berikut: / *Present values of post-employment healthcare benefits are as follows:*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Saldo awal	**3,166,609**	**2,473,771**	***Beginning balance***
Biaya jasa kini	84,329	40,146	*Current service cost*
Biaya bunga	235,279	186,770	*Interest cost*
	319,608	226,916	
Pengukuran kembali diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya:			*Remeasurement recognised as other comprehensive income:*
Rugi dari perubahan asumsi keuangan	1,176,423	55,824	*Losses from change in financial assumptions*
(Laba)/rugi dari perubahan asumsi demografi	(536,620)	177,025	*(Gain)/lossess from change in demographics assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	415,238	298,853	*Experience adjustment on obligation*
	1,055,041	531,702	
Pembayaran manfaat oleh Grup	(83,255)	(65,780)	*Benefit paid by the The Group*
Saldo akhir	**4,458,003**	**3,166,609**	***Ending balance***

Jumlah yang diakui pada laba rugi adalah sebagai berikut: / *The amounts recognised in profit or loss were as follows:*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Biaya jasa kini	84,329	40,146	*Current service cost*
Biaya bunga	235,279	186,770	*Interest cost*
Jumlah tercakup dalam biaya karyawan	319,608	226,916	*Total included in employee costs*

Pada tanggal 31 Desember 2023, dari total beban, Rp161,51 miliar (2022: Rp114,67 miliar) (nilai penuh) dan Rp158,10 miliar (2022: Rp112,25 miliar) (nilai penuh) masing-masing dimasukkan sebagai "Beban pokok pendapatan" dan "Beban umum dan administrasi".

As at 31 December 2023, of the total charges, Rp161.51 billion (2022: Rp114.67 billion) (full amount) and Rp158.10 billion (2022: Rp112.25 billion) (full amount) were included in "Cost of revenue" and "General and administrative expenses", respectively.

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

b. Imbalan kesehatan pascakerja (lanjutan)

b. Post-employment healthcare benefits *(continued)*

Berikut asumsi pokok aktuaria yang digunakan:

Below are the principal actuarial assumptions used:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Tingkat diskonto untuk jaminan kesehatan	6.95%	7.43%	*Discount rate for healthcare benefits*
Tren biaya kesehatan	9.30%	7.89%	*Medical cost trend*
Tingkat mortalitas yang diterapkan untuk pensiunan	100% GAM 1971	100% GAM 1971	*Mortality rate applied for pensioners*

Sensitivitas liabilitas imbalan kesehatan pascakerja secara keseluruhan terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the overall post-employment healthcare benefits liability to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	**Dampak terhadap liabilitas secara keseluruhan/ *Impact on overall liability***	
31 Desember/ *December* 2023			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp682 miliar/*billion* naik/*increase by* Rp895 miliar/*billion*	*Discount rate*
Tren biaya kesehatan	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* Rp887 miliar/*billion* turun/*decrease by* Rp691 miliar/*billion*	*Medical cost trend*
31 Desember/ *December* 2022			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp459 miliar/*billion* naik/*increase by* Rp593 miliar/*billion*	*Discount rate*
Tren biaya kesehatan	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* Rp584 miliar/*billion* turun/*decrease by* Rp461 miliar/*billion*	*Medical cost trend*

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial di mana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated.

Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti kesehatan atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti kesehatan dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir tahun) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

When calculating the sensitivity of the defined medical benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined medical benefit obligation is calculated by using the projected unit credit method at the end of the reporting year) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

c. Imbalan kerja lainnya

Selain imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja, Perusahaan juga memberikan imbalan pascakerja lainnya berupa:

Program lainnya:

- Program untuk pengunduran diri dan cacat; dan
- Imbalan pascakerja lainnya berdasarkan UU dan peraturan perusahaan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya:

- Imbalan pascakerja untuk penghargaan purnakarya; dan
- Imbalan kerja jangka panjang lainnya berdasarkan peraturan perusahaan.

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

c. Other employment benefits

Other than pension benefits and post-employment healthcare benefits, the Company also provides its employees with several other employee benefits:

Other benefits:

- *Program for resignation and disability; and*
- *Other post-employment benefits based on laws and company's regulations.*

Other long-term employee benefits:

- *Employment benefit for post-service reward; and*
- *Other long-term employee benefits based on company's regulations.*

The amounts recognised in the consolidated statements of financial position are determined as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Program lainnya	55,356	37,915	*Other benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	135,774	101,766	*Other long-term employee benefits*
Nilai kini kewajiban imbalan kerja lainnya	191,130	139,681	*Present value of other employment benefits*

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

c. Imbalan kerja lainnya (lanjutan)

c. *Other employment benefits* *(continued)*

Mutasi kewajiban imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefit obligations for the year ended on 31 December 2023 and 2022 is as follows:

Program lainnya / ***Other programmes***

	Nilai kini kewajiban/*Present value obligation*		
	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Awal tahun	**37,915**	**203,138**	***At the beginning of the year***
Biaya jasa kini	5,159	3,745	*Current service cost*
Biaya bunga	2,802	1,981	*Interest cost*
Biaya jasa lalu dan (keuntungan) yang timbul dari penyelesaian	-	(38,528)	*Past service cost and (gain) on settlement*
	7,961	(32,802)	
Pengukuran kembali diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya:			*Remeasurement recognised as other comprehensive income:*
Rugi/(laba) dari perubahan asumsi keuangan	2,843	(1,515)	*Loss/(gain) from changes in financial assumptions*
Rugi dari perubahan Asumsi demografi	13,431	-	*Loss from changes in demographic assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	(3,852)	22,239	*Experience adjustment on obligation*
	12,422	20,724	
Pembayaran manfaat oleh:			*Benefits paid by the plan:*
Grup	(2,942)	(11,059)	*The Group*
Penyelesaian	-	(142,086)	*Settlement*
	(2,942)	(153,145)	
Akhir tahun	**55,356**	**37,915**	***At the end of the year***

Imbalan jangka panjang lainnya / ***Other long-term employee benefits***

	Nilai kini kewajiban/*Present value obligation*		
	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Awal tahun	**101,766**	**87,179**	***At the beginning of the year***
Biaya jasa kini	35,849	8,849	*Current service costs*
Biaya bunga	7,521	6,330	*Interest cost*
	43,370	15,179	
Pengukuran kembali diakui pada laba rugi:			*Remeasurement recognised in profit or loss:*
Rugi dari perubahan asumsi keuangan	7,801	4,418	*Loss from changes in financial assumptions*
Rugi dari perubahan asumsi demografi	1,913	-	*Loss from changes in demographic assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	(4,217)	19,759	*Experience adjustment on obligation*
	5,497	24,177	
Pembayaran manfaat oleh:			*Benefits paid by the plan:*
Grup	(14,859)	(24,769)	*The Group*
Akhir tahun	**135,774**	**101,766**	***At the end of the year***

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

c. Imbalan kerja lainnya (lanjutan)

c. Other employment benefits *(continued)*

Jumlah yang diakui pada laba rugi adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in profit or loss were as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Biaya jasa kini	41,008	12,594	*Current service costs*
Biaya bunga	10,323	8,311	*Interest expenses*
Biaya jasa lalu dan (keuntungan) yang timbul dari penyelesaian	-	(38,528)	*Past service cost and (gain) on settlement*
Pengukuran kembali diakui pada laba rugi:			*Remeasurement recognised in profit or loss:*
Rugi dari perubahan asumsi keuangan	7,801	4,418	*Losses from changes in financial assumptions*
Rugi dari perubahan asumsi demografi	1,913	-	*Losses from changes in demographic assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	(4,217)	19,759	*Experience adjustment on obligation*
Jumlah tercakup dalam biaya karyawan	**56,828**	**6,554**	***Total included in employee costs***

Pada tanggal 31 Desember 2023, dari total beban, Rp28,72 miliar (nilai penuh) (2022: Rp3,31 miliar (nilai penuh)) dan Rp28,11 miliar (nilai penuh) (2022: Rp3,24 miliar (nilai penuh)) masing-masing dimasukkan pada "Beban pokok pendapatan" dan "Beban umum dan administrasi".

As at 31 December 2023, of the total charges, Rp28.72 billion (full amount) (2022: Rp3.31 billion (full amount)) and Rp28.11 billion (full amount) (2022: Rp3.24 billion (full amount)) were included in "Cost of revenue" and "General and administrative expenses", respectively.

Berikut asumsi pokok aktuaria yang digunakan:

The principal actuarial assumptions used are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Tingkat diskonto untuk imbalan kerja lainnya	6.85%	7.39%	*Discount rate for other employment benefits*
Kenaikan gaji masa datang	10.00%	10.00%	*Future salary increases*

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

c. Imbalan kerja lainnya (lanjutan)

c. Other employment benefits *(continued)*

Sensitivitas liabilitas imbalan kerja lainnya terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the overall other employment benefits liability to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	**Dampak terhadap liabilitas secara keseluruhan/ *Impact on overall liability***	
31 Desember/ *December* 2023			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp20 miliar/*billion* naik/*increase by* Rp23 miliar/*billion*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by 1*%	naik/*decrease by* Rp24 miliar/*billion* turun/*increase by* Rp21 miliar/*billion*	*Salary growth rate*
31 Desember/ *December* 2022			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp12 miliar/*billion* naik/*increase by* Rp13 miliar/*billion*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by 1*%	naik/*increase by* Rp13 miliar/*billion* turun/*decrease by* Rp12 miliar/*billion*	*Salary growth rate*

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial di mana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi.

The sensitivity analysis is based on a change in one assumption, while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated.

Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti kesehatan atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti kesehatan dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir tahun) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

When calculating the sensitivity of the defined medical benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined medical benefit obligation calculated by the projected unit credit method at the end of the year) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

d. Program pensiun iuran pasti

d. Defined contribution pension plan

Perusahaan juga menyelenggarakan program pensiun iuran pasti ("PPIP") untuk semua karyawan tetapnya. Program tersebut dikelola oleh DPLK BNI, bersama-sama disebut sebagai pengelola PPIP. Kontribusi dihitung secara periodik oleh pengelola PPIP. Para karyawan mengkontribusikan 3% dari gaji dasar dan perusahaan berkontribusi sebesar 20,5%, 21%, dan 22,5% dari gaji dasar karyawan untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan. Jumlah kontribusi yang dibayar ke dana pensiun lembaga keuangan dimaksud untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp71,95 miliar (2022: Rp70,41 miliar) (nilai penuh).

The Company also has a defined contribution pension programme covering all of its qualified permanent employees. The programme is managed by DPLK BNI, collectively referred to as defined contribution fund manager. Contributions are computed periodically by the fund manager, whereby the employees contribute 3% of their basic salary and the Company contributes 20.5%, 21%, and 22.5% of the employee's basic salary to achieve the required amounts. Total contributions paid to the pension fund for the year ended on 31 December 2023 amounted to Rp71.95 billion (2022: Rp70.41 billion) (full amount).

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

e. Manajemen risiko terkait program imbalan kerja

Perusahaan terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Perusahaan hanya memiliki aset program untuk kewajiban manfaat pensiun, yang dikelola oleh DPBA. Untuk manfaat kesehatan pascakerja dan manfaat jangka panjang lainnya, Grup melakukan investasi secara sendiri dan tidak memiliki atau mendirikan aset program.

Kewajiban program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Terkait dengan program manfaat pensiun, investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada surat utang negara, meskipun DPBA juga berinvestasi pada obligasi, properti, sukuk, deposito berjangka, instrumen saham, reksadana, dan kontrak investasi kolektif. DPBA meyakini bahwa surat utang negara memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Terkait dengan manfaat kesehatan pascakerja dan manfaat jangka panjang lainnya, Grup melakukan investasi pada instrumen obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Investasi pada instrumen ini dinilai aman oleh manajemen untuk melindungi kepastian Grup dalam memenuhi kewajiban manfaat karyawan di masa depan.

Harapan umur hidup

Manfaat pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program. Sementara itu, imbalan kerja jangka panjang lainnya diberikan pada saat karyawan berhenti bekerja.

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

e. Risk management related to employee benefit programme

The Company is exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans and post-employment healthcare plans. The most significant risks areas are as follows:

Asset volatility

The Company only has plan assets for its pension benefits, which are managed by DPBA. For its post-employment healthcare and other long-term benefits, the Group does not establish plan assets and only manages its liability through investments in the corporate level.

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. If plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

In relation to the pension benefit programme, investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets. The largest proportion of assets is invested in government bonds, although DPBA also invests in bonds, property, sukuk, time deposits, equity instruments, mutual funds, and collective investment contract. DPBA believes that government bonds offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

In relation to post-employment healthcare and other long-term benefits, the Group has invested in corporate bonds listed on the Indonesia Stock Exchange. Investment in this instrument is considered safe to prevent the Group from defaulting in fulfilling its obligation to employees in the future.

Life expectancy

Pension benefits and post-employment healthcare benefits are to provide benefits for the life of the member, so increases in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities. Meanwhile, other post-employment benefits are provided to employees while they are retired.

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

e. Manajemen risiko terkait program imbalan kerja (lanjutan)

e. Risk management related to employee benefit programme *(continued)*

Harapan umur hidup (lanjutan)

Rata-rata durasi kewajiban untuk pensiun, imbalan kesehatan pascakerja, dan imbalan kerja lainnya, masing-masing adalah 17,16 tahun, 19,45 tahun dan 19,69 tahun.

Perubahan imbal hasil obligasi

Penurunan imbal hasil obligasi korporasi akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun, imbalan kesehatan pascakerja, dan imbalan kerja lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Life expectancy (continued)

The weighted average durations of the pension benefits, post-employment healthcare benefits and other benefits are 17.16 years, 19.45 years and 19.69 years, respectively.

Changes in bond yields

A decrease in corporate bond yields will increase the plan's liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plan's bond holdings.

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits, post-employment healthcare benefits and other employment benefits is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	1 sampai 5 tahun/ *Between 1-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Imbalan pensiun	96,621	460,806	5,815,654	6,373,081	*Pension benefits*
Imbalan kesehatan pascakerja	124,281	625,666	82,928,326	83,678,273	*Post-employment healthcare benefits*
Imbalan kerja lainnya	16,582	52,710	1,885,564	1,954,856	*Other employment benefits*
Jumlah	**237,484**	**1,139,182**	**90,629,544**	**92,006,210**	***Total***

20. PINJAMAN BANK

20. BANK BORROWINGS

	Jumlah tercatat/Carrying amount		
	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pinjaman bank			***Bank borrowings***
Mandiri	68,000	-	*Mandiri*
BRI	-	2,240	*BRI*
Jumlah	**68,000**	**2,240**	***Totals***

20. PINJAMAN BANK (lanjutan) / *20. BANK BORROWINGS (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai wajar pinjaman bank sama dengan jumlah tercatatnya karena dampak pendiskontoan tidak signifikan mengingat jatuh temponya kurang dari satu tahun. Pinjaman jangka panjang lainnya merupakan pinjaman dengan suku bunga mengambang sesuai dengan suku bunga pinjaman yang ada di pasar.

As at 31 December 2023, the fair value of short-term bank borrowings equals their carrying amount since the impact of discounting is not significant, as the borrowings are due in less than one year. Other long-term borrowings have a floating interest rate based on market interest rate.

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait dengan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Other significant information related to bank borrowings as at 31 December 2023 is as follows:

Kreditur/ *Creditor*	Mata uang/ *Currency*	Jumlah fasilitas/ *Total facility* (dalam ribuan/ *in thousands)*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Periode pembayaran bunga/*Interest payment period*	Tingkat suku bunga per tahun/*Annual interest rate*	Jenis suku bunga/ *Interest rate type*	Jaminan/*Collateral* (dalam jutaan/ *in millions)*
Mandiri	Rupiah	28,000,000	31 Okt/*Oct* 2023 -30 Jan/*Jan* 2024	Bulanan/ *Monthly*	0.50%	Tetap/ *Fixed*	Dana DHE SDA: Rp28,000
Mandiri	Rupiah	40,000,000	30 Nov/*Nov* 2023 -29 Feb/*Feb* 2024	Bulanan/ *Monthly*	0.50%	Tetap/ *Fixed*	Dana DHE SDA: Rp40,000

21. LIABILITAS SEWA / *21. LEASE LIABILITIES*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
PT Putra Perkasa Abadi	299,089	380,008	*PT Putra Perkasa Abadi*
PT Rifansi Dwi Putra	208,670	127,599	*PT Rifansi Dwi Putra*
PT Sumi Gita Jaya	185,025	263,313	*PT Sumi Gita Jaya*
PT Kosindo Supratama	99,794	43,314	*PT Kosindo Supratama*
PT Adil Utama	72,369	93,815	*PT Adil Utama*
PT Lematang	67,788	16,627	*PT Lematang*
PT Prima Indojaya Mandiri	56,530	98,100	*PT Prima Indojaya Mandiri*
PT Leo Anugerah Sukses	40,475	63,830	*PT Leo Anugerah Sukses*
PT Primatama Energi Nusantara	34,622	48,904	*PT Primatama Energi Nusantara*
PT Cakra Indo Pratama	26,819	43,892	*PT Cakra Indo Pratama*
PT Mitsubishi UFJ Financial Group (''MUFG'')	14,537	37,708	*PT Mitsubishi UFJ Financial Group (''MUFG'')*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp20.000)	127,964	142,851	*Others (each below Rp20,000)*
Jumlah	**1,233,682**	**1,359,961**	***Total***
Dikurang:			*Less:*
Bagian jangka pendek	**(490,017)**	**(589,437)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**743,665**	**770,524**	***Non-current portion***
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:			*The present value of lease liabilities is as follows:*
Tidak lebih dari 1 tahun	580,912	265,187	*No later than 1 year*
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	817,396	1,223,296	*Later than 1 year and no later than 5 years*
	1,398,308	1,488,483	
Dikurang:			*Less:*
Biaya keuangan di masa depan atas sewa	(164,626)	(128,522)	*Future finance costs on leases*
Nilai kini liabilitas sewa	**1,233,682**	**1,359,961**	***Present value of lease liabilities***

21. LIABILITAS SEWA (lanjutan) / *21. LEASE LIABILITIES (continued)*

Laporan laba rugi konsolidasian menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The consolidated statements of profit or loss show the following amounts related to leases:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Beban terkait sewa variabel	9,659,365	8,769,072	*Expenses relating to variable leases*
Beban terkait sewa jangka pendek	78,751	70,638	*Expenses relating to short-term leases*
Beban terkait sewa atas aset bernilai rendah	25,447	23,564	*Expenses relating to leases of low-value assets*
Jumlah	**9,763,563**	**8,863,274**	***Total***

Tidak ada pembatasan signifikan yang ditetapkan oleh pesewa dalam perjanjian sewa pembiayaan dengan Grup terkait dengan penggunaan aset atau pencapaian kinerja keuangan tertentu.

There is no significant restriction imposed by lease arrangements between lessors and the Group on use of the assets or achievement of certain financial performance.

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait dengan liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Other significant information related to lease liabilities as at 31 December 2023 is as follows:

Pesewa/ *Lessor*	Tanggal kontrak/ *Contract date*	Nomor kontrak/ *Contract number*	Mata uang/ *Currency*	Jumlah nilai pembiayaan (dalam nilai penuh)/*Total lease value (in full amount)*	Periode sewa/*Leasing period*	Suku bunga/ *Interest rate*	Simpanan jaminan (dalam nilai penuh)/ *Deposit guarantee (in full amount)*
MUFG	16 Agt/Aug 2019	SHS18041292-006	Rupiah	69,953,400,000	60 bulan/months	11.25%	Rp7,772,600,000

Grup memiliki perjanjian dengan perusahaan penyedia alat berat dan kendaraan untuk sewa dengan jangka waktu 2-5 tahun. Perusahaan dapat memperpanjang periode sewa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

The Group has an agreement with a heavy equipment and vehicle supplier for a period of 2-5 years. The Company can extend the lease period based on the agreement of both parties.

22. MODAL SAHAM / *22. SHARE CAPITAL*

Kepemilikan saham Perusahaan sebagai berikut:

The share ownership of the Company as follows:

	31 Desember/*December* 2023			
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor/*Number of issued and fully paid shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah/ *Amount*	
Pemegang saham				***Shareholders***
Saham preferen (Seri A Dwiwarna)				*Preferred stock (A Dwiwarna Share)*
Pemerintah	5	0.00%	-	*Government*
Saham biasa (Seri B)				*Common stock (B Shares)*
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	7,595,650,695	65.93%	759,565	*PT Mineral Industri Indonesia (Persero)*
Arsal Ismail (Direktur Utama)	304,900	0.00%	30	*Arsal Ismail (President Director)*
Suherman (Direktur Sumber Daya Manusia)	100,000	0.00%	10	*Suherman (Human Resources Director)*
Lainnya (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	3,891,153,750	33.78%	389,116	*Others (Each holding below 5%)*
Jumlah saham beredar	11,487,209,350	99.71%	1,148,721	*Total shares outstanding*
Saham treasuri	33,449,900	0.29%	3,345	*Treasury shares*
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	11,520,659,250	100%	1,152,066	*Number of shares issued and fully paid*

22. MODAL SAHAM (lanjutan) / *22. SHARE CAPITAL (continued)*

	31 Desember/*December* 2022			
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor/*Number of issued and fully paid shares*	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Jumlah/ *Amount***	
Pemegang saham				***Shareholders***
Saham preferen (Seri A Dwiwarna)				*Preferred stock (A Dwiwarna Share)*
Pemerintah	5	0.00%	-	*Government*
Saham biasa (Seri B)				*Common stock (B Shares)*
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	7,595,650,695	65.93%	759,565	*PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)*
Arsal Ismail (Direktur Utama)	304,900	0.00%	30	*Arsal Ismail (President Director)*
Suherman (Direktur Sumber Daya Manusia)	100,000	0.00%	10	*Suherman (Human Resources Director)*
Lainnya (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	3,891,153,750	33.78%	389,116	*Others (Each holding below 5%)*
Jumlah saham beredar	11,487,209,350	99.71%	1,148,721	*Total shares outstanding*
Saham treasuri	33,449,900	0.29%	3,345	*Treasury shares*
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	11,520,659,250	100%	1,152,066	*Number of shares issued and fully paid*

Lihat Catatan 29 untuk informasi perubahan kepemilikan saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ke PT Mineral Industri Indonesia (Persero).

Refer to Note 29 for information on the change in shares ownership from PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) to PT Mineral Industri Indonesia (Persero).

Perubahan jumlah saham yang beredar selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Changes in the number of outstanding shares during the year ended on 31 December 2023 and for the year ended on 31 December 2022 were as follows:

		Nilai nominal/*Nominal amount*			
	Jumlah lembar saham (nilai penuh)/ *Number of shares (full amount)*	**Saham biasa (dalam jutaan Rupiah)/ *Ordinary shares (in millions of Rupiah)***	**Tambahan modal disetor (dalam jutaan Rupiah)/ *Additional paid-in capital (in millions of Rupiah)***	**Saham treasuri (dalam jutaan Rupiah)/ *Treasury shares (in millions of Rupiah)***	
1 Januari 2022	**11,487,209,350**	**1,152,066**	**594,303**	**(43,257)**	***1 January 2022***
Penjualan saham treasuri	-	-	-	-	*Sale of treasury shares*
31 Desember 2022	**11,487,209,350**	**1,152,066**	**594,303**	**(43,257)**	***31 December 2022***
Penjualan saham treasuri	-	-	-	-	*Sale of treasury shares*
31 Desember 2023	**11,487,209,350**	**1,152,066**	**594,303**	**(43,257)**	***31 December 2023***

Saham biasa memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen dan hasil dari pembubaran perusahaan sesuai dengan proporsi jumlah dan jumlah yang dibayarkan atas saham yang dimiliki.

Ordinary shares entitle the holder to participate in dividends and proceeds on winding-up of the Company in proportion to the number of shares held and amounts paid.

23. SAHAM TREASURI / *23. TREASURY SHARES*

Pada tanggal 2 September 2015 sampai dengan 1 Desember 2015, Perseroan melakukan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar berfluktuasi signifikan yang diadasarkan pada Surat Edaran OJK No.22/SEOJK.04/2015. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret sampai dengan 16 Juni 2020, Perseroan dengan berdasarkan SEOJK No.3/SEOJK.04/2020 melakukan pembelian saham kembali.

On 2 September 2015 to 1 December 2015, the Company carried out share buybacks in significantly fluctuating market conditions based on OJK Circular Letter No.22/SEOJK.04/2015. Furthermore, from March 15 to June 16 2020, the Company, based on SEOJK No.3/SEOJK.04/2020, purchased shares back.

Mutasi jumlah lembar saham dan nilai saham treasuri untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The movement of number of share and the values of treasury shares for the year ended on 31 December 2023 and for the year ended on 31 December 2022 is as follows:

	Jumlah saham treasuri/ *Total treasury shares*		
	Lembar/ *Number of shares*	Jumlah/ *Total*	
Saldo 1 Januari 2022	**33,449,900**	**43,257**	***Balance as of 1 January 2022***
Pembelian saham treasuri	-	-	*Purchase of treasury shares*
Penjualan saham treasuri	-	-	*Sales of treasury shares*
Saldo 31 Desember 2022	**33,449,900**	**43,257**	***Balance as of 31 December 2022***
Pembelian saham treasuri	-	-	*Purchase of treasury shares*
Penjualan saham treasuri	-	-	*Sales of treasury shares*
Saldo 31 Desember 2023	**33,449,900**	**43,257**	***Balance as of 31 December 2023***

Saham treasuri yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2023 merupakan saham yang dibeli pada tahun 2015 yang telah kedaluwarsa di tahun 2021. Transaksi ini tetap diperbolehkan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") No.3/SEOJK.04/2020 dan SEOJK No.20/SEOJK.04 /2021 yang memberikan relaksasi kepada perusahaan publik dalam menjual dan membeli kembali sahamnya selama kondisi pasar berfluktuatif secara signifikan.

The remaining treasury shares as at 31 December 2023 were shares that were purchased in 2015 which has been expired in 2021. This transaction is allowed based on the Circular Letter of the Financial Services Authority ("SEOJK") No. 3/SEOJK.04/2020 and SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 which provides relaxation to public companies in selling and buying back their shares during significantly fluctuating market conditions.

Berdasarkan ketentuan Surat OJK No. S-68/D.04/2023 tanggal 02 Maret 2023, Perusahaan diwajibkan kembali untuk melakukan pelepasan saham treasuri terhitung setelah tanggal 31 Maret 2023 dengan batas waktu yang akan ditentukan kembali oleh OJK. Pada tanggal 4 September 2023, OJK menerbitkan Surat No.S-2222/PM.21/2023 yang memperjelas tata cara perhitungan terkait tenggat waktu pelepasan saham treasuri. Perusahaan telah mempertimbangkan surat tersebut dimana Perusahaan perlu melakukan penjualan saham treasuri sebagian pada tahun 2024 dan sisanya sampai dengan tahun 2029.

Based on the provisions of OJK Letter No. S-68/D.04/2023 dated 02 March 2023, the Company is required to release its treasury shares as of 31 March 2023 with a deadline that will be respecified by OJK. On 4 September 2023, OJK issued Letter No.S-2222/PM.21/2023 which clarifies procedures for calculating treasury shares release due date. The Company has considered the letter issued which the Company should release part of the treasury shares on 2024 and the remaining treasury shares up to 2029.

24. DIVIDEN / *24. DIVIDENDS*

Dividen kas yang telah diumumkan selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Cash Dividends declared during the year ended 31 December 2023 and for the year ended on 31 December 2022, were as follows:

	Tanggal dideklarasi/ *Date declared*	Tanggal pembayaran/ *Payment date*	Dividen per lembar saham (nilai penuh)/ *Dividend per share (full amount)*	Jumlah/ *Total*	
Dividen tahun 2022	15 Juni/ *June* 2023	14 Juli/ *July* 2023	1,094	12,567,582	*Dividend for the year 2022*
Dividen tahun 2021	24 Mei/ *May* 2022	23 - 24 Juni/ *June* 2022	689	7,909,118	*Dividend for the year 2021*

25. CADANGAN UMUM DAN LAINNYA / *25. GENERAL RESERVE AND OTHERS*

Di dalam akun ini terdapat cadangan yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 1/1995 yang diterbitkan di bulan Maret 1995, dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, yang mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

In this account there are reserve that was created to meet the requirement from Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 1/1995 which was introduced in March 1995, and amended by Law No. 40/2007, issued in August 2007, which requires the establishment of a general reserve from net income amounting to at least 20% of a company's issued and paid-up capital.

26. PENDAPATAN / *26. REVENUE*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pendapatan batubara			***Sales of coal***
Pihak berelasi (Catatan 30b)	18,204,595	20,641,240	*Related parties (Note 30b)*
Pihak ketiga	19,767,438	21,458,076	*Third parties*
Total pendapatan dari penjualan batubara	37,972,033	42,099,316	*Total revenue from sales of coal*
Pendapatan dari aktivitas lainnya			***Revenue from other activities***
Pihak berelasi (Catatan 30b)	40,800	24,837	*Related parties (Note 30b)*
Pihak ketiga	476,034	524,437	*Third parties*
Total pendapatan dari aktivitas lainnya	516,834	549,274	*Total revenue from other activities*
Jumlah pendapatan	**38,488,867**	**42,648,590**	***Total revenue***

Pendapatan dari aktivitas lainnya merupakan penjualan listrik, briket, minyak sawit mentah dan inti sawit, jasa kesehatan rumah sakit dan jasa sewa.

Revenue from other activities represents sales of power, briquettes, crude palm oil and kernels, healthcare services and rental services.

26. PENDAPATAN (lanjutan) / *REVENUE (continued)*

Rincian pelanggan yang memiliki transaksi pendapatan lebih dari 10% total pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of customers with revenue transactions that represent more than 10% of the total revenue are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pihak berelasi:			*Related parties:*
PLN Grup	12,383,348	10,758,011	*PLN Group*
MIND ID Trading Pte. Ltd	3,823,768	8,388,787	*MIND ID Trading Pte. Ltd*
Jumlah	**16,207,116**	**19,146,798**	***Total***

Lihat Catatan 30b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 30b for information on the details of transactions and balances with related parties.

27. BEBAN ATAU PENGHASILAN BERDASARKAN SIFAT / *EXPENSES OR INCOME BY NATURE*

a. Beban pokok pendapatan / *Cost of revenue*

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

The components of cost of revenue are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Biaya produksi:			***Production costs:***
Jasa penambangan	11,105,871	9,579,677	*Mining services*
Jasa angkutan kereta api	7,953,583	6,694,574	*Coal railway services*
Bahan bakar dan pelumas	1,495,025	1,885,105	*Fuel and lubricants*
Penyusutan (Catatan 11)	1,412,333	1,163,819	*Depreciation (Note 11)*
Gaji, upah, dan imbalan karyawan	1,025,230	1,231,217	*Salaries, wages, and employee benefits*
Perlengkapan dan suku cadang	805,184	711,844	*Spare parts and materials*
Sewa alat berat, kendaraan, dan peralatan	754,720	863,748	*Rental of heavy equipment, vehicles, and equipment*
Jasa pihak ketiga	492,674	488,959	*Third party services*
Pajak bumi dan bangunan	461,063	215,057	*Land and building taxes*
Amortisasi	105,224	102,594	*Amortisation*
Listrik	87,301	74,035	*Electricity*
Lainnya	574,826	487,222	*Others*
Subjumlah	26,273,034	23,497,851	*Subtotal*
Royalti ke Pemerintah	4,449,820	3,809,031	*Royalties to the Government*
Pembelian batubara	260,087	-	*Coal purchasing*
Persediaan batubara dan minyak kelapa sawit:			*Coal and palm oil inventories:*
Awal tahun (Catatan 8)	3,645,900	1,021,322	*Beginning of the year (Note 8)*
Akhir tahun (Catatan 8)	(5,297,279)	(3,645,900)	*End of the year (Note 8)*
Jumlah	**29,331,562**	**24,682,304**	***Total***

27. BEBAN ATAU PENGHASILAN BERDASARKAN SIFAT (lanjutan)

***27. EXPENSES OR INCOME BY NATURE** (continued)*

a. Beban pokok pendapatan (lanjutan)

***a. Cost of revenue** (continued)*

Rincian jasa pihak ketiga dan jasa lainnya dengan transaksi melebihi 10% total beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of third party services and other services with transactions that amount to more than 10% of the total cost of revenue are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pihak ketiga			*Third party*
PT Pamapersada Nusantara ("PAMA")	8,202,491	7,427,401	*PT Pamapersada Nusantara ("PAMA")*
Pihak berelasi			*Related party*
PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI")	7,953,583	6,694,574	*PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI")*
Jumlah	**16,156,074**	**14,121,975**	***Total***

b. Beban umum dan administrasi

b. General and administrative expenses

Beban umum dan administrasi terdiri dari:

General and administrative expenses consist of the following:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Gaji, upah, dan imbalan karyawan	836,734	1,291,564	*Salaries, wages and employee benefits*
Jasa pihak ketiga	321,153	259,093	*Third party services*
Sumbangan	191,093	277,261	*Donation*
Penyusutan (Catatan 11)	119,753	89,876	*Depreciation (Note 11)*
Perjalanan dinas	102,595	89,592	*Business travel*
Beban kantor	87,756	79,583	*Office expense*
Sewa kendaraan dan peralatan	39,805	41,863	*Rental of vehicles and equipment*
Retribusi	26,200	19,260	*Retribution*
Perlengkapan dan suku cadang	21,115	18,442	*Spare parts and materials*
Pelatihan	20,298	17,643	*Training*
Lainnya	170,133	206,159	*Others*
Jumlah	**1,936,635**	**2,390,336**	***Total***

c. Beban penjualan dan pemasaran

c. Selling and marketing expenses

Beban penjualan dan pemasaran terdiri dari:

Selling and marketing expenses consist of the following:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Gaji, upah, dan imbalan karyawan	231,731	305,659	*Salaries, wages and employee benefits*
Penyusutan (Catatan 11)	191,998	176,276	*Depreciation (Note 11)*
Jasa pihak ketiga	106,996	102,051	*Third party services*
Perlengkapan dan suku cadang	68,390	59,396	*Spare parts and materials*
Jasa angkutan	66,581	47,567	*Transportation*
Bahan bakar dan pelumas	36,059	33,752	*Fuel and lubricants*
Listrik	18,755	13,224	*Electricity*
(Pemulihan)/biaya *Domestic Market Obligation* ("DMO")	(135,769)	130,822	*Domestic Market Obligation ("DMO") (reversal)/expense*
Lainnya	71,621	84,373	*Others*
Jumlah	**656,362**	**953,120**	***Total***

Lihat Catatan 30b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 30b for information on the details of transactions and balances with related parties.

27. BEBAN ATAU PENGHASILAN BERDASARKAN SIFAT (lanjutan) / *27. EXPENSES OR INCOME BY NATURE (continued)*

d. Penghasilan lainnya, neto / *d. Other income, net*

Penghasilan lainnya, neto terdiri dari: / *Other income, net consists of the following:*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pendapatan kompensasi royalti	162,013	57,309	*Gain on royalty compensation*
Pemulihan provisi piutang lainnya	161,001	-	*Recovery of other receivables provisions*
Pendapatan denda	105,605	174,771	*Penalty income*
Restitusi pajak lainnya	94,124	-	*Other tax restitution*
Despatch	48,317	33,110	*Despatch*
(Rugi)/laba dari nilai tukar mata uang asing	(63,206)	209,315	*(Loss)/gain on foreign currency exchange*
Lainnya	130,547	48,086	*Others*
Jumlah	**638,401**	**522,591**	***Total***

28. PENGHASILAN DAN BIAYA KEUANGAN / *28. FINANCE INCOME AND COST*

a. Penghasilan keuangan / *a. Finance income*

Penghasilan keuangan terdiri dari: / *Finance income consists of the following:*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Penghasilan bunga dari penempatan kas di bank dan deposito berjangka	531,161	402,231	*Interest income from placement of cash in banks and time deposits*
Penghasilan bunga dari penempatan obligasi	53,178	25,802	*Interest income from placement of bonds*
Jumlah	**584,339**	**428,033**	***Total***

b. Biaya keuangan / *b. Finance cost*

Biaya keuangan terdiri dari : / *Finance cost consists of the following:*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Beban bunga dari liabilitas sewa	115,938	140,101	*Interest expense from lease liabilites*
Beban bunga dari pinjaman bank	26	361	*Interest expense from bank borrowings*
Beban akresi dari provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	88,074	59,741	*Accretion from provision for environmental reclamation and mine closure*
Jumlah	**204,038**	**200,203**	***Total***

Lihat Catatan 30b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi. / *Refer to Note 30b for information on the details of transactions and balances with related parties.*

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

a. Perjanjian jual beli batubara / *a. Coal sales and purchase agreements*

Pelanggan/ *Customer*	Harga jual/ *Sales price*	Penjualan (dalam Rp miliar)/*Sales (in billion IDR)* 31 Des/*Dec* 2023	31 Des/*Dec* 2022	Piutang usaha (dalam Rp miliar)/ *Account receivables (in billion IDR)* 31 Des/ *Dec* 2023	31 Des/ *Dec* 2022	Masa akhir kontrak/ *Contract period end*
BPI	AS$/*US$*39.39	423	442	55	233	Juni/*June* 2044
PLTU Suralaya (PLN Indonesia Power)[b]	Rp820,671 - Rp893,809 (berdasarkan nilai kalori/ *based on calorific value)*	2,873	3,053	10	425	Desember/ *December* 2025
PLTU Bukit Asam (PLN Nusantara Power)[c]	Rp636,645	567	581	47	80	Desember/ *December* 2023[a]
PLTU Tarahan (PLN Nusantara Power)[c]	Rp841,416	669	813	92	172	Desember/ *December* 2031
PLTU 10,000 MW Tahap I	Rp811,721 – Rp841,416 (berdasarkan nilai kalori/ *based on calorific value)*	8,262	6,242	1,079	670	Desember/ *December* 2032

a) Perpanjangan kontrak masih dalam proses negosiasi
b) PLN Indonesia Power merupakan subholding PT PLN (Persero) yang dibentuk pada tahun 2023
c) PLN Nusantara Power merupakan subholding PT PLN (Persero) yang dibentuk pada tahun 2023

a) The extentions of the contract is still in negotiation
b) PLN Indonesia Power is PT PLN (Persero) subholding established in 2023
c) PLN Nusantara Power is PT PLN (Persero) subholding established in 2023

Adapun rincian PLTU 10.000 MW Tahap I adalah sebagai berikut:

Details of these PLTU 10,000 MW Phase 1 are as follows:

PLN Grup/*PLN Group*

- PLTU Pelabuhan Ratu
- PLTU Lontar
- PLTU Labuan
- PLTU Pangkalan Susu
- PLTU Labuhan Angin
- PLTU Teluk Sirih
- PLTU Adipala
- PLTU Suralaya Baru
- PLTU Ombilin
- PLTU Barru
- PLTU Indramayu
- PLTU Pacitan
- PLTU Nagan Raya
- PLTU Paiton Baru
- PLTU Tanjung Awar-Awar
- PLTU Rembang
- PLTU Tenayan
- PLTU Sebalang

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

***29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

b. Perjanjian jasa pengangkutan batubara

b. Coal delivery agreements

Pemasok/ *Supplier*	Rute/ *Route*	Jumlah biaya (dalam Rp miliar)/ *Total cost (in billion IDR)* 31 Des/ *Dec* 2023	Jumlah biaya (dalam Rp miliar)/ *Total cost (in billion IDR)* 31 Des/ *Dec* 2022	Utang usaha (dalam Rp miliar)/ *Account payables (in billion IDR)* 31 Des/ *Dec* 2023	Utang usaha (dalam Rp miliar)/ *Account payables (in billion IDR)* 31 Des/ *Dec* 2022	Masa akhir kontrak/ *Contract period end*
KAI	Tanjung Enim - Tarahan	6,952	5,886	571	379	Desember/ *December* 2027
	Tanjung Enim - Kertapati	1,002	809	90	171	Desember/ *December* 2027

Pada 12 Oktober 2023 telah ditandatangani dengan PT KAI perjanjian jangka pendek untuk angkutan batubara relasi Tanjung Enim Baru - Tarahan dan Tanjung Enim Baru - Kertapati periode 2023 - 2027.

As at 12 October 2023, a short-term agreement was signed with PT KAI for coal transportation for the Tanjung Enim Baru - Tarahan and Tanjung Enim Baru - Kertapati relations for the period 2023 – 2027.

c. Perjanjian jasa penambangan batubara

c. Mining service agreements

Pemasok/ Supplier	Sifat/ Nature	Jumlah biaya (dalam Rp miliar)/ *Total cost (in billion IDR)* 31 Des/ Dec 2023	Jumlah biaya (dalam Rp miliar)/ *Total cost (in billion IDR)* 31 Des/ Dec 2022	Utang usaha (dalam Rp miliar)/ *Account payables (in billion IDR)* 31 Des/ Dec 2023	Utang usaha (dalam Rp miliar)/ *Account payables (in billion IDR)* 31 Des/ Dec 2022	*Masa akhir* kontrak/ *Contract* period end
PT Pamapersada Nusantara	Jasa penambangan/ Mining service	8,202	7,427	85	687	Februari/ *February* 2031
PT Putra Perkasa Abadi	Jasa pengupasan dan transportasi material/*Stripping and transportation services*	1,387	977	359	67	Februari/ *February* 2027

d. Pembayaran sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah

d. Payment of third party donations to the Regional Government

Perusahaan menandatangani kesepakatan dengan beberapa Pemerintah Daerah selama 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

The Company signed agreements with several Regional Governments during 31 December 2023 and 2022 as follows:

Pemerintah daerah/ *Local government*	Jenis bantuan dana/ *Type of donations*	Periode pemberian dana/ *Period of donation*
Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	Perbaikan *venue-venue* yang mengalami kerusakan akibat Bencana Angin Puting Beliung di Jakabaring Sport City/*Repair of venues damaged by the Whirlwind Disaster in Jakabaring Sport City;*	2018 - 2023
	Pembangunan gedung olahraga di wilayah Provinsi Sumatera Selatan/*Construction of a sports hall in the South Sumatra Province;*	
	Pembangunan fasilitas umum serta kendaraan pendukung tugas dan fungsi Pemprov/ *Constructing of public facilities and vehicles supporting the tasks and functions of the South Sumatra Province,*	
Muara Enim	Bantuan dana peran serta untuk pembangunan di Kabupaten Muara Enim/*Participation funding assistance for development in Muara Enim*	2021 - 2025

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

***29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

d. Pembayaran sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah (lanjutan)

***d. Payment of third party donations to the Regional Government** (continued)*

Pemerintah daerah/ ***Local government***	**Jenis bantuan dana/** ***Type of donations***	**Periode pemberian dana/** ***Period of donation***
Lahat	Bantuan dana peran serta untuk pembangunan di Kabupaten Lahat/*Participation funding assistance for development in Lahat*	2021 - 2023
Lampung	Bantuan dana peran serta untuk pembangunan di Kabupaten Lampung/*Participation funding assistance for development in Lampung*	2023
Sawahlunto	Bantuan dana peran serta untuk pembangunan di Kota Sawahlunto/*Participation funding assistance for development in Sawahlunto*	2023

e. Reklamasi tambang dan penutupan tambang

Grup terikat dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kewajiban reklamasi dan penutupan tambang. Kewajiban tersebut antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana pascatambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (bila diizinkan); dan (4) menyediakan jaminan pascatambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Perusahaan telah menyampaikan kewajiban rencana penutupan tambang ("RPT") dan rencana reklamasi ("RR") ke Kementerian ESDM dari waktu ke waktu. Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah menempatkan deposito berjangka untuk jaminan reklamasi IUP - Operasi Produksi di area TAL, MTB, Banko Barat, Banko Tengah, OP, dan Ombilin masing-masing sebesar Rp101,58 miliar, Rp76,95 miliar, Rp17,69 miliar, Rp28,58 miliar, Rp3,05 miliar, dan Rp8,39 miliar.

Pada 3 Februari 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("MESDM") telah menyetujui rencana reklamasi dan penutupan tambang BBK. Berdasarkan rencana reklamasi dan penutupan tambang terakhir, BBK telah menempatkan jaminan reklamasi dan penutupan tambang sebesar Rp40 miliar pada tanggal 7 Juni 2023.

e. Mine reclamation and mine closure

The Group is bound by various regulations in relation with reclamation and mine closure obligations. These obligations include to (1) prepare a five-year reclamation plan; (2) prepare post-mining plans; (3) provide reclamation guarantees that can be in the form of joint accounts or time deposits placed at state banks, bank guarantees, or accounting reserves (if allowed); and (4) provide post-mining guarantees in the form of time deposits placed at government banks.

The company has submitted mandatory mine closure plans ("MCP") and reclamation plans ("RP") to the Ministry of Energy and Mineral Resources from time to time. As at 31 December 2023, the Company had placed a time deposit for reclamation guarantees for IUP-Production Operation at TAL, MTB, Banko Barat, Banko Timur, OP, and Ombilin amounting to Rp101.58 billion, Rp76.95 billion, Rp17.69 billion, Rp28.58 billion, Rp3.05 billion, and Rp8.39 billion.

On 3 February 2023, Ministry of Energy and Mineral Resources ("MoEMR") has approved reclamation and mine closure plan of BBK. Based on latest reclamation and mine closure plan, BBK has placed reclamation and mine closure guarantee amounting to Rp40 billion on 7 June 2023.

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

f. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023

Pada 21 November 2022, Menteri ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM No.267.K/MB.01/MEM.B/2022 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri (“Kepmen ESDM 267/2022”), yang sekarang akan menjadi dasar baru terkait pemenuhan *Domestic Market Obligation* (“DMO”) untuk batubara. Keputusan Menteri ESDM ini diubah dengan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ("Kepmen ESDM 399/2023") yang mulai berlaku efektif sejak 17 November 2023.

a. Pemenuhan DMO

Dengan terbitnya Kepmen ESDM 399/2023 Persentase DMO ditetapkan sebesar 25% ditetapkan dari realisasi produksi batubara tahun berjalan bagi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan/atau kepentingan sendiri dan bahan baku/bahan bakar industri.

b. Penerapan Denda dan Kompensasi

Terhadap pelaku usaha pertambangan batubara yang tidak memenuhi persentase pemenuhan DMO dapat dikenai kewajiban pembayaran dana kompensasi, denda, denda dan dana kompensasi atau pelarangan penjualan batubara ke luar negeri. Ketidakpatuhan pada denda dan/atau kompensasi, dapat dikenai sanksi administratif secara berjenjang.

f. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 399.K/MB.01/MEM.B/ 2023

On 21 November 2022, the Minister of Energy and Mineral Resources issued Minister of Energy and Mineral Resources Decree No.267.K/MB.01/MEM.B/2022 Year 2022 concerning Fulfillment of Domestic Coal Needs (“Kepmen ESDM 267/2022”), which now become the new basis related to the fulfillment of the Domestic Market Obligation (“DMO”) for coal. This decision of the Minister of Energy and Mineral Resources was amended by the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 399.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Amendments to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 267.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Fulfillment of Coal Needs Domestic Affairs ("Kepmen ESDM 399/2023") which has been effective since 17 November 2023.

a. DMO compliance

With the issuance of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 399/2023, the Domestic Market Obligation (DMO) percentage is set at 25% based on the current year's coal production realization for the provision of electricity for public and/or self-interest, as well as industrial raw materials/fuels.

b. Application of Fines and Compensation

For coal mining business actors who do not fulfil the DMO fulfillment, are subject to obligation to pay compensation fund, fine, fines and compensation funds or prohibition of coal sales abroad. Non-compliance with fines and/or compensation fund, may be subject to administrative sanctions in stages.

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 (lanjutan)

c. Penentuan harga jual

- Harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar AS$70 per metrik ton *FOB Vessel*, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, *total moisture* 8%, *total sulphur* 0,8%, dan *ash* 15%.

- Dalam hal harga batubara acuan ("HBA") lebih dari atau sama dengan dan kurang dari AS$70 per metrik ton *FOB Vessel*, maka harga jual batubara dihitung menggunakan formula harga batubara sebagaimana ketentuan dalam Lampiran III Kepmen ESDM 267/2022.

d. Perhitungan HBA dalam penentuan harga jual

- HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk penjualan batubara secara *spot* adalah HBA pada saat transaksi sesuai dengan ketentuan keputusan menteri ini.

- HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk penjualan batubara secara jangka tertentu (*term*).

e. Pemenuhan Kewajiban Iuran Produksi/Royalti

- Regulasi ini mengatur formula penghitungan pemenuhan kewajiban iuran produksi/royalti oleh Pelaku Usaha Pertambangan Batubara atas penjualan batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum khusus untuk HBA yang lebih dari atau sama dengan AS$70 per metrik ton *FOB Vessel*, dan ketentuan formula penghitungan pemenuhan kewajiban iuran produksi/royalti oleh Pelaku Usaha Pertambangan Batubara atas penjualan batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum khusus untuk HBA yang Kurang Dari USD70 Per Metrik Ton FOB Vessel.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

f. Minister of Energy and Mineral Resources Number 399.K/MB.01/MEM.B/2023 *(continued)*

c. Selling price determination

- *The selling price of coal for the supply of electricity for the public interest is US$70 per metric ton FOB Vessel, which is based on reference specifications on calorific 6,322 kcal/kg GAR, total moisture 8%, total sulphur 0.8%, and ash 15%.*

- *In the event that the reference coal price ("HBA") is more than or equal to and less than US$70 per metric ton FOB vessel, the selling price of coal is calculated using the coal price formula as stipulated in Appendix III to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources 267/2022.*

d. HBA calculation in determining the selling price

- *The HBA used as a reference in determining the selling price of coal for the supply of electricity for public purposes for spot sales of coal is the HBA at the time of the transaction in accordance with the provisions of this Ministerial Decree.*

- *The HBA used as a reference in determining the selling price of coal for the supply of electric power for the public interest for coal sales for a certain period (term).*

e. Fulfillment of Production/Royalty Contribution Obligations

- *The regulation determines formula for calculating fulfillment of production contribution/ royalty obligations by Coal Mining Business Companies for the sale of coal for the Provision of Electricity for Public Interests specifically for HBAs more than or equal to US$70 per metric ton FOB Vessel, and calculate formula of fulfillment of production contribution/royalty obligations by Coal Mining Business Companies for the sale of coal for the Provision of Electricity for Public Interests specifically for HBAs Less Than USD70 Per Metric Ton FOB Vessel.*

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

g. Peraturan Pemerintah No. 45 dan 46 Tahun 2022

Pada bulan Desember 2022, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan juga telah menerbitkan Keputusan No. 516/KMK.06/2022 tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia akan mendirikan suatu Perusahaan Perseroan (Persero) sebagai perusahaan *holding* di Bidang Pertambangan ("*Holding* Pertambangan") dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal efektif pendirian, *Holding* Pertambangan akan memiliki saham pada perusahaan (Anggota *Holding*) sebagai berikut:

a. secara langsung saham Seri B terbanyak pada PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT TIMAH Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium; serta
b. secara langsung dan tidak langsung saham pada PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia PP Minerals dan MIND ID Trading, Pte. Ltd.

Perubahan kepemilikan saham tersebut diatas tidak berdampak pada perubahan pengendalian masing-masing Anggota *Holding* mengingat *Holding* Pertambangan tetap dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

g. Government Regulation No. 45 and 46 of 2022

In December 2022, the Government of Indonesia issued Government Regulation No. 45 Year 2022 regarding the Reduction of the Government of Republic of Indonesia's Equity Participation in PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero), a limited liability company, and Government Regulation No. 46 Year 2022 regarding the Government of Republic of Indonesia's Equity Participation in the Establishment of a Limited Liability Company in the Mining Sector. Further, the Minister of Finance issued the Decree No. 516/KMK.06/2022 regarding the Value Determination of the Government of Republic of Indonesia's Equity Participation in the Establishment of a Limited Liability Company in the Mining Sector.

Based on these regulations, the Government of the Republic of Indonesia will establish a Limited Liability Company that will be designated as a holding company in the Mining Sector ("Mining Holding"), in accordance with applicable regulation

At the effective date of the establishment, Holding Mining will acquire shares on the following entities ("Holding Members"):

a. directly majority B Series shares in PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT TIMAH Tbk, and PT Indonesia Asahan Aluminium; and
b. directly and indirectly shares in PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia PP Minerals and MIND ID Trading, Pte. Ltd.

The change in share ownership above does not affect the change in control of each Holding Member considering the Mining Holding is still controlled by the Government of the Republic of Indonesia.

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

h. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/ MBU/03/2023 Tahun 2023

Sebagai upaya mewujudkan Peraturan Menteri yang sinkron dan harmonis guna mendukung Pengelolaan BUMN yang terencana, terpadu dan berkelanjutan, maka pada 3 Maret 2023, Menteri BUMN menetapkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/02/2023 ("PERMEN BUMN 2/2023) Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dimana dalam PERMEN 2/2023 mengatur lebih lanjut terkait dengan Prinsip Tata Kelola BUMN, Penerapan Manajemen Risiko BUMN, Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, Perencanaan Strategis, Pedoman Kegiatan Korporasi Signifikan, Penyelenggaraan TI, dan Pelaporan.

i. Keputusan Menteri ESDM No.227.K/MB.01/MEM.B/2023

Pada Tanggal 11 Agustus 2023 Menteri ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 227.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara. Regulasi ini mencabut Keputusan Menteri ESDM No. 41.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara untuk meningkatkan efektivitas penggunaan harga patokan dalam penjualan komoditas batubara.

Keputusan tersebut merupakan ketentuan pelaksana Pasal 159 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yang mengatur bahwa Pemegang IUP dan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral dan Batubara yang menjual Mineral dan Batubara yang diproduksi wajib mengacu pada harga patokan, dan harga patokan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri berdasarkan:

a. Mekanisme Pasar; atau
b. Sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

h. Minister of SOE No. PER-2/MBU/03/2023 of 2023

As an effort to realise a synchronous and harmonious SOE Ministerial Regulation to support the planned, integrated and sustainable management of SOEs, on 3 March 2023, the Minister of SOEs stipulated a SOE Ministerial Regulation No. PER-2/ MBU/02/2023 ("SOE Ministerial Regulation 2/2023") Concerning Guidelines for Governance and Corporate Activities Significant State Enterprises, where SOE Ministerial Regulation No.2/2023 further regulates in relation to SOE Governance Principles, Implementation of SOE Risk Management, Assessment of SOE Soundness Level, Strategic Planning, Guidelines for Significant Corporate Activities, Implementation of IT, and Reporting.

i. Decree of MoEMR No. 227.K/MB.01/MEM.B/ 2023

On August 11 2023, the Minister of Energy and Mineral Resources issued Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 227.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Guidelines for Determining Benchmark Prices for Sales of Coal Commodities. This regulation revokes Minister of Energy and Mineral Resources Decree no. 41.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Guidelines for Determining Benchmark Prices for Sales of Coal Commodities to increase the effectiveness of using benchmark prices in selling coal commodities.

This decree is an implementing provision of Article 159 paragraph (2) of Government Regulation No. 96 of 2021, which stipulates that IUP and IUP holders at the Mineral and Coal Production Operation activity stage who sell the Mineral and Coal produced must refer to the benchmark price, and the price the benchmark referred to is determined by the Minister based on:

a. The market mechanism; or
b. In accordance with generally accepted prices in international markets.

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

i. Keputusan Menteri ESDM No.227.K/MB.01/MEM.B/2023 (lanjutan)

Dalam regulasi ini juga mengatur bahwa Harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik dan kepentingan umum serta pemenuhan bahan baku industry dalam negeri selain industry pengolahan dan pemurnian logam mengacu pada spesifikasi acuan dan perhitungan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang mentapkan harga jual batubara untuk kepentingan dimaksud.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

i. Decree of MoEMR No. 227.K/MB.01/MEM.B/ 2023 *(continued)*

This regulation also stipulates that the selling price of coal for the supply of electricity and public purposes as well as the fulfillment of raw materials for domestic industries other than the metal processing and refining industry refers to the reference specifications and calculations stipulated in the Ministerial Decree which determines the selling price of coal for the purposes in question.

j. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan ("PP 25 / 2023") yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 5 Mei 2023. Dengan berlakunya PP 25/2023 maka Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Menteri dapat memberikan penugasan Penyelidikan dan Penelitian pada WUP kepada Lembaga riset negara/daerah, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta untuk:

a. Penyiapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara; atau

b. Penyiapan WIUP Batubara untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

Terdapat jaminan pemanfaatan ruang, kawasan, zonasi, serta WIUP yang ditetapkan, dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan.

Dalam PP 25/2023 ini juga mengatur ketentuan baru yang mewajibkan Gubernur dan Bupati/wali kota untuk membentuk dan/atau menandai sebuah objek atau wilayah tertentu pada peta atas WUP yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah sesuai kewenangannya.

j. Government Regulation No. 25/2023

President of the Republic of Indonesia has stipulated Government Regulation No. 25 of 2023 concerning Mining Areas which will become effective from 5 May 2023. With the enactment of this Regulation, Government Regulation No. 22 of 2010 concerning Mining Areas is declared repealed and no longer valid.

The Minister may assign Investigations and Research assignments to Mining Business Area (MBA) to state/regional research institutions, BUMN, BUMD, and private business entities to:

a. The preparation of a metal mineral Mining Business Area ("MBPA") and Coal MBPA; or
b. The preparation of Coal MBPA for the development and/or utilisation of coal.

There is a guarantee for the use of space, area, zoning, and designated MBPAs, from the Central Government and Regional Government, that there is no change in the use of space and area.

On Government Regulation No. 25 of 2023 also stipulates a new provision which obliges Governors and Regents/Mayors to form and/or mark certain objects or areas on the map of WUPs that have been designated as Mining Areas in the Spatial Plans according to their authority.

k. Perjanjian Notional Pooling BRI

Perusahaan bersama-sama dengan anggota holding MIND ID lainnya, menandatangani perjanjian dengan BRI di mana BRI akan memberikan layanan jasa Notional Pooling yang merupakan jasa *cash management* untuk mengkonsolidasikan kebutuhan dana grup MIND ID dalam rangka optimalisasi likuiditas.

k. BRI Notional Pooling agreements

The Company together with other members of MIND ID holding, signed an agreement with BRI under which BRI will provide Notional Pooling services, which are essentially cash management services to consolidate the funding needs of MIND ID group with the aim of liquidity optimisation.

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

k. Perjanjian Notional Pooling mandiri (lanjutan)

Perusahaan bersama-sama dengan anggota holding MIND ID lainnya, menandatangani perjanjian dengan Mandiri di mana Mandiri akan memberikan layanan jasa Mandiri Notional Pooling ("MNP") yang merupakan jasa cash management untuk mengkonsolidasikan kebutuhan dana grup MIND ID dalam rangka optimalisasi likuiditas. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan dapat melakukan penarikan dari rekening MNP dalam batasan limit defisit yang ditentukan dalam perjanjian. Saldo defisit Perusahaan dari penarikan dana rekening MNP dapat ditutupi dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Global Line yang diberikan oleh Mandiri kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero), yang dapat digunakan oleh Perusahaan selaku peserta pooling untuk melakukan penihilan saldo defisit pada akhir bulan.

l. Pengalihan PLTU Pelabuhan Ratu

Grup saat ini mendukung terlaksananya program pemerintah terkait *Energy Transition Mechanism* (ETM) di Indonesia. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan percepatan pengakhiran (*early retirement*) operasi beberapa pembangkit listrik milik PT PLN, salah satunya adalah PLTU Pelabuhan Ratu. Komitmen ini dituangkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerangka dan Pokok-Pokok Kesepakatan Utama terkait Dengan Akselerasi Pengakhiran Lebih Awal Pembangkit Listrik Tenaga Uap Pelabuhan Ratu 3x350 MW dalam rangkaian agenda SOE *International Conference* di Bali pada 18 Oktober 2022 yang berpotensi meningkatkan pendapatan Grup dari pasokan batubara dan atas kepemilikan PLTU. Sampai tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang dalam melakukan proses uji tuntas didampingi oleh konsultan independen yang mencakup aspek keuangan, teknis, legal, dan risiko.

m. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023

Pada tanggal 12 Juli 2023, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 yang mengatur tentang devisa hasil ekspor, valuta asing dan pembayaran impor untuk bisnis di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, 30% dari devisa hasil ekspor, dengan nilai ekspor paling sedikit AS$250.000 atau ekuivalennya, wajib ditempatkan ke dalam rekening khusus dengan jangka waktu paling singkat tiga bulan. Peraturan ini berlaku efektif sejak 1 Agustus 2023. Grup telah melaksanakan kewajiban untuk menempatkan DHE SDA ke dalam rekening khusus dan deposito berjangka dan disajikan sebagai bagian dari "Kas dan setara kas" dalam laporan posisi keuangan.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

k. Mandiri Notional Pooling agreements *(continued)*

The Company together with other members of MIND ID holding, signed an agreement with Mandiri under which Mandiri will provide Mandiri Notional Pooling ("MNP") services, which are essentially cash management services to consolidate the funding needs of MIND ID group with the aim of liquidity optimisation. Based on this agreement, the Company can drawdown cash from the MNP account within the deficit limit set out in the agreement. The Company's deficit balance from the drawdown of the MNP account can be settled using the Global Line working capital loan facility provided by Mandiri to PT Mineral Industri Indonesia (Persero), which can be used by the Company as a pooling participant to settle the Company's deficit balance at the end of month.

l. The Transfer of PLTU Pelabuhan Ratu

The Group is currently supporting the implementation of government programmes related to the Energy Transition Mechanism (ETM) in Indonesia. One of the activities that will be carried out relates to the early retirement of several power plants owned by PT PLN, one of which is CFPP Pelabuhan Ratu. This commitment was stated in the signing of the Perjanjian Kerangka dan Pokok-Pokok Kesepakatan Utama terkait Dengan Akselerasi Pengakhiran Lebih Awal Pembangkit Listrik Tenaga Uap Pelabuhan Ratu 3x350 MW in the series of agendas for the SOE International Conference in Bali on 18 October 2022 which has the potential to increase the Group's revenue from coal supply and ownership of CFPP. Until the date of these consolidated financial statements, the Group is in the process of conducting due diligence accompanied by independent consultants covering financial, technical, legal and risk aspects.

m. Government Regulation No. 36 of 2023

On 12 July 2023, Government issued Government regulation No. 36 of 2023 which regulates the cash proceeds from export sales, foreign exchange and import payments for business in mining, plantation, forestry and fishery sectors.

Based on this Government Regulation, 30% of the cash proceeds from export sales that have export values of at least US$250,000 or its equivalent stated in an export customs declaration must be placed in the special account for a holding period of at least three months. This regulation became effective on 1 August 2023. The Group has carried out the obligation to place DHE SDA into the special accounts and time deposits and are presented as part of "Cash and cash equivalents" in the consolidated statements of financial position.

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI / *TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES*

a. Sifat hubungan dengan pihak berelasi / *The nature of the relationships*

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transactions and relationships with related parties is as follows:

Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan dengan pihak yang berelasi/ *Relationship with the related parties*	Transaksi/*Transaction*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) ("BRI") Tbk	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penempatan dana dan pinjaman bank/*Funds placement and bank borrowings*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) ("BNI") Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) ("Mandiri") Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) ("BTN") Tbk, PT Bank Tabungan Negara Syariah ("BTN Syariah") Tbk, PT Bank Syariah Indonesia ("BSI") Tbk, PT Bank Raya Indonesia ("Bank Raya") Tbk	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penempatan dana/ *Funds placement*
PT Mandiri Taspen ("Mandiri Taspen")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	PPIP/*Defined contribution pension programme*
PT Mandiri Tunas Finance ("MTF")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Sewa pembiayaan/ *Finance lease*
PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pengangkutan batubara dan penempatan obligasi/ *Coal transportation and bonds placement*
PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power, PT PLN Indonesia Power Bersama – sama disebut PLN Grup	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penjualan batubara, pemakaian listrik dan penempatan obligasi/ *Coal sales, electricity usage and bonds placement*
Dana Pensiun Bukit Asam ("DPBA")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pengelolaan dana pensiun/ *Pension fund management*
PT TIMAH Tbk ("TIMAH")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penjualan batubara dan penempatan MTN/*Coal sales and MTN placement*
PT Aneka Tambang Tbk ("ANTAM"), PT Indonesia Chemical Alumina, MIND ID Trading Pte.Ltd, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("Pusri"), PT Semen Tonasa, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk,	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penjualan batubara/ *Coal sales*
PT Solusi Bangun Indonesia ("SBI")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penjualan jasa perawatan PLTU/ *Power Plant maintenance services*
PT Dahana (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pembelian bahan peledak/ *Explosive material purchases*
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia DPLK BNI ("DPLK BNI")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	PPIP/*Defined contribution pension programme*

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Sifat hubungan dengan pihak berelasi (lanjutan)

a. The nature of the relationships *(continued)*

Pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat hubungan dengan pihak yang berelasi/** ***Relationship with the related parties***	**Transaksi/*Transaction***
PT Danareksa (Persero) ("Danareksa"), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penempatan Obligasi/ *Bonds placement*
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pembelian bahan bakar dan penempatan obligasi/ *Fuel purchase and bonds placement*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Premi asuransi/ *Insurance premiums*
PT Tanjung Alam Jaya	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pembelian batubara/ *Coal purchases*
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung (Persero) ("DAK")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pembelian Aset/ *Asset purchases*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Krakatau Engineering, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Konstruksi proyek/ *Project construction*
PT Huadian Bukit Asam Power ("HBAP"), PT Nasional Hijau Lestari ("SINERGI ID"), PT Bukit Asam Transpacific Railway ("BATR")	Entitas ventura bersama/ *Joint venture entity*	Piutang lainnya/ *Other receivables*
PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI")	Entitas ventura bersama/ *Joint venture entity*	Penjualan batubara/ *Coal sales*

Kebijakan Grup terkait penetapan harga untuk transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- Penjualan batubara ke pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan, yang pada umumnya menggunakan indeks internasional yang setara sebagai perbandingan dan disesuaikan dengan spesifikasi dari batubara dan lokasi pengiriman.

- Pengapalan dan pengangkutan batubara oleh pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak pengangkutan yang disepakati bersama berdasarkan hasil negosiasi dengan memperhatikan unsur-unsur biaya yang ada ditambah dengan margin tertentu.

The Group's pricing policies related to the transactions with related parties are as follows:

- *Sales of coal to related parties are set based on sales contracts, which generally use international indices as benchmarks adjusted for coal specifications and location of deliveries.*

- *Coal shipping and transportation by related parties are determined based on contracts agreed upon by each party after considering the cost components plus a certain margin.*

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Rincian transaksi dan saldo kepada pihak berelasi

b. Details of transactions and balances with related parties

Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Transactions and balances with related parties were as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Penjualan batubara dan pendapatan dari aktivitas lainnya			***Sale of coal and revenue from other activities***
PLN Grup	12,383,348	10,758,011	*PLN Group*
MIND ID Trading Pte. Ltd	3,823,768	8,388,787	*MIND ID Trading Pte. Ltd*
Pusri	547,707	450,002	*Pusri*
HBAP	532,493	-	*HBAP*
BPI	422,865	441,618	*BPI*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	183,906	188,037	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Indonesia Chemical Alumina	131,059	188,032	*PT Indonesia Chemical Alumina*
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	107,807	147,381	*PT Semen Baturaja (Persero) Tbk*
PT Semen Tonasa	55,258	27,171	*PT Semen Tonasa*
TIMAH	28,913	71,641	*TIMAH*
SBI	28,271	5,397	*SBI*
Jumlah	**18,245,395**	**20,666,077**	***Total***
Persentase terhadap jumlah pendapatan konsolidasian	47%	48%	*As a percentage of total consolidated revenue*
Pembelian barang/jasa			***Purchases of goods/services***
KAI	7,953,583	6,694,574	*KAI*
Pertamina	1,495,025	1,885,105	*Pertamina*
PT Tanjung Alam Jaya	260,087	-	*PT Tanjung Alam Jaya*
PT Dahana (Persero)	148,971	96,709	*PT Dahana (Persero)*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	123,663	25,970	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	107,757	-	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PLN Grup	93,113	103,852	*PLN Group*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	16,675	-	*PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)*
PT Surveyor Indonesia	1,294	-	*PT Surveyor Indonesia*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-	30,514	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Jumlah	**10,200,168**	**8,836,724**	***Total***
Persentase terhadap jumlah beban pokok penjualan dan beban usaha konsolidasian	35%	32%	*As a percentage of total consolidated cost of revenue and operating expenses*
Penghasilan keuangan			***Finance income***
Mandiri, BTN, BRI, BNI, BSI, Bank Raya dan BTN Syariah	374,277	325,983	*Mandiri, BTN, BRI, BNI, BSI Bank Raya and BTN Syariah*
TIMAH	19,015	4,226	*TIMAH*
Pertamina	9,976	9,733	*Pertamina*
PLN Grup	5,839	7,785	*PLN Group*
KAI	3,834	1,704	*KAI*
SMI	1,931	-	*SMI*
Danareksa	337	-	*Danareksa*
Jumlah	**415,209**	**349,431**	***Total***
Persentase terhadap jumlah penghasilan keuangan konsolidasian	**71%**	**82%**	*As a percentage to total consolidated finance income*

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Rincian transaksi dan saldo kepada pihak berelasi (lanjutan)

***b. Details of transactions and balances with related parties** (continued)*

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Pembayaran iuran dana pensiun			***Pension fund contribution payment***
DPLK BNI	71,945	70,409	*DPLK BNI*
DPBA	188,459	76,852	*DPBA*
Jumlah	**260,404**	**147,261**	***Total***
Persentase terhadap jumlah beban gaji konsolidasian	12%	5%	*As a percentage to total consolidated salary expense*
Biaya keuangan			***Finance costs***
Mandiri	26	-	*Mandiri*
BRI	-	361	*BRI*
Jumlah	**26**	**361**	***Total***
Persentase terhadap jumlah biaya keuangan konsolidasian	0.01%	0.18%	*As a percentage of total consolidated finance cost*

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Aset			***Assets***
Kas di bank			***Cash in banks***
Rupiah			*Rupiah*
BNI	224,442	250,412	*BNI*
Mandiri	224,330	707,801	*Mandiri*
BRI	91,990	11,573	*BRI*
BSI	2,959	2,191	*BSI*
BTN Syariah	1,499	907	*BTN Syariah*
BTN	1,415	1,809	*BTN*
Bank Raya	533	7,270	*Bank Raya*
Subjumlah	**547,168**	**981,963**	***Subtotal***
Dolar AS			*US Dollars*
Mandiri	309,852	523,864	*Mandiri*
BRI	297,845	109,465	*BRI*
BNI	69,744	253,602	*BNI*
BSI	-	2,590	*BSI*
Subjumlah	**677,441**	**889,521**	***Subtotal***
Dolar Australia			*Australian Dollars*
Mandiri	555	22,926	*Mandiri*
Euro			*Euro*
Mandiri	2,658	-	*Mandiri*
Jumlah	**1,227,822**	**1,894,410**	***Total***

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Rincian transaksi dan saldo kepada pihak berelasi (lanjutan)

***b. Details of transactions and balances with related parties** (continued)*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Aset (lanjutan)			***Assets** (continued)*
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rupiah			*Rupiah*
BTN	516,573	1,905,957	*BTN*
BRI	248,000	1,618,013	*BRI*
Mandiri	94,450	16,650	*Mandiri*
BNI	61,500	62,500	*BNI*
BTN Syariah	50,000	5,000	*BTN Syariah*
BSI	-	378,915	*BSI*
Mandiri Taspen	-	22,000	*Mandiri Taspen*
Bank Raya	-	3,000	*Bank Raya*
Subjumlah	**970,523**	**4,012,035**	***Subtotal***
Dolar AS			*US Dollars*
BNI	181,408	172,140	*BNI*
Subjumlah	**181,408**	**172,140**	***Subtotal***
Deposito berjangka untuk devisa hasil ekspor			***Time deposits for cash proceeds from export sales***
Dolar AS			*US Dollars*
BNI	724,282	-	*BNI*
Mandiri	527,180	-	*Mandiri*
BRI	266,323	-	*BRI*
Subjumlah	**1,517,784**	**-**	***Subtotal***
Jumlah	**2,669,715**	**4,184,175**	***Total***
Piutang usaha			***Trade receivables***
Rupiah			*Rupiah*
PLN Grup	1,641,085	1,366,918	*PLN Group*
HBAP	480,340	-	*HBAP*
Pusri	76,009	71,764	*Pusri*
BPI	54,937	232,678	*BPI*
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	20,526	65,783	*PT Semen Baturaja (Persero) Tbk*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	14,601	36,987	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Indonesia Chemical Alumina	13,681	8,873	*PT Indonesia Chemical Alumina*
BPJS kesehatan	4,520	-	*BPJS kesehatan*
SBI	2,252	-	*SBI*
PT Semen Tonasa	-	-	*PT Semen Tonasa*
TIMAH	-	35,076	*TIMAH*
Dolar AS			*US Dollars*
MIND ID Trading Pte. Ltd	-	390,149	*MIND ID Trading Pte. Ltd*
Subjumlah	**2,307,951**	**2,208,228**	***Subtotal***
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai - HBAP	(51,899)	-	*Provision for impairment HBAP -*
Jumlah	**2,256,052**	**2,208,228**	***Total***
Bagian lancar	**(2,067,781)**	**(1,975,550)**	***Current portion***
Bagian tidak lancar	**188,271**	**232,678**	***Non-current portion***

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Rincian transaksi dan saldo kepada pihak berelasi (lanjutan)

***b. Details of transactions and balances with related parties** (continued)*

	31 Desember/ *December 2023*	31 Desember/ *December 2022*	
Aset (lanjutan)			***Assets** (continued)*
Piutang lainnya			***Other receivables***
Rupiah			*Rupiah*
BPI	6,130	134,624	*BPI*
PLN Grup	5,972	19,220	*PLN Group*
HBAP	3,603	1,662	*HBAP*
SINERGI ID	1,893	1,893	*SINERGI ID*
BATR	1,085	1,085	*BATR*
Subjumlah	**18,683**	**158,484**	***Subtotal***
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai - BPI	-	(129,077)	*Provision for impairment BPI -*
Jumlah	**18,683**	**29,407**	***Total***
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain			***Financial assets at fair value through other comprehensive income***
Rupiah			*Rupiah*
TIMAH	391,250	391,250	*TIMAH*
PLN Grup	105,605	106,422	*PLN Group*
KAI	81,022	81,200	*KAI*
SMI	69,950	-	*SMI*
Danareksa	9,956	-	*Danareksa*
Dolar AS			*US Dollars*
Pertamina	169,225	156,160	*Pertamina*
Jumlah	**827,008**	**735,032**	***Total***
Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun			***Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year***
Rupiah			*Rupiah*
BRI	212,106	3,151,214	*BRI*
BSI	269,712	-	*BSI*
BTN Syariah	30,000	550,760	*BTN Syariah*
BRI Agro	30,000	-	*BRI Agro*
BTN	-	3,069,746	*BTN*
BNI	-	10,000	*BNI*
Mandiri	-	1,000	*Mandiri*
Jumlah	**541,818**	**6,782,720**	***Total***

Tingkat suku bunga kontraktual dari deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Contractual interest rates on time deposits are as follows:

	31 Desember/ *December 2023*	31 Desember/ *December 2022*	
Rupiah	6.10% - 6.75%	2.50% - 5.90%	*Rupiah*

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Rincian transaksi dan saldo kepada pihak berelasi (lanjutan)

***b. Details of transactions and balances with related parties** (continued)*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Aset (lanjutan)			***Assets** (continued)*
Aset tidak lancar lainnya			***Other non-current assets***
Jaminan reklamasi dan penutupan tambang			*Reclamation and mine closure*
Rupiah			*Rupiah*
Mandiri	222,168	196,877	*Mandiri*
Jumlah aset yang terkait dengan pihak berelasi	**7,763,266**	**16,030,849**	***Total assets associated with related parties***
Persentase terhadap jumlah aset konsolidasian	20%	35%	*As a percentage of total consolidated assets*

	31 Desember/ *December 2023*	31 Desember/ *December* 2022	
Liabilitas			***Liabilities***
Utang usaha			***Trade payables***
Rupiah			*Rupiah*
KAI	529,597	379,119	*KAI*
Pertamina	252,255	161,099	*Pertamina*
PT Waskita Karya	42,322	-	*PT Waskita Karya*
PT Dahana (Persero) Tbk	31,282	27,673	*PT Dahana (Persero) Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	21,005	30,567	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Sucofindo	7,280	-	*PT Sucofindo*
Lainnya (masing-masing dibawah Rp5.000)	9,106	2,764	*Others (each below Rp5,000)*
Dolar AS			*US Dollars*
KAI	131,163	170,612	*KAI*
Jumlah	**1,024,010**	**771,834**	***Total***
Biaya yang masih harus dibayar			***Accrued expenses***
Rupiah			*Rupiah*
KAI	703,315	1,013,219	*KAI*
DAK	140,519	-	*DAK*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	27,894	26,814	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Adhi Karya	26,182	-	*PT Adhi Karya*
Lainnya (masing-masing dibawah Rp5.000)	41	3,192	*Others (each below Rp5,000)*
Dolar AS			*US Dollars*
KAI	83,649	317,628	*KAI*
Jumlah	**981,600**	**1,360,853**	***Total***
Pinjaman bank			***Bank borrowings***
Rupiah			*Rupiah*
Mandiri	68,000	-	*Mandiri*
BRI	-	2,240	*BRI*
Liabilitas sewa			***Lease liabilities***
Rupiah			*Rupiah*
MTF	-	2,046	*MTF*
Jumlah liabilitas yang terkait dengan pihak berelasi	**2,073,610**	**2,136,973**	***Total liabilities associated with related parties***
Persentase terhadap jumlah liabilitas konsolidasian	12%	13%	*As a percentage of total consolidated liabilities*

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

c. Kompensasi manajemen kunci

Personil manajemen kunci adalah Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci Perusahaan. Kompensasi yang dibayar pada manajemen kunci dan persentase terhadap total beban kepegawaian adalah sebagai berikut:

c. Key management compensation

Key management personnel are the Board of Commissioners, Board of Directors and key employees of the Company. The compensation paid to key management and the percentage of total employee expenses is shown below:

	31 Desember/*December* 2023						
	Direksi/ *Board of Directors*		Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*		Personil manajemen kunci lainnya/ *Other key management personnel*		
	%	Rp	%	Rp	%	Rp	
Gaji, imbalan kerja, dan tunjangan lainnya	3.26	68,168	1.78	37,284	0.44	9,183	*Salaries, employee benefit and other allowances*
Jumlah	**3.26**	**68,168**	**1.78**	**37,284**	**0.44**	**9,183**	***Total***

	31 Desember/*December* 2022						
	Direksi/ *Board of Directors*		Komisaris/ *Board of Commissioners*		Personil manajemen kunci Dewan lainnya/ *Other key management personnel*		
	%	Rp	%	Rp	%	Rp	
Gaji, imbalan kerja, dan tunjangan lainnya	2.38	67,249	1.30	36,780	0.27	7,553	*Salaries, employee benefit and other allowances*
Jumlah	**2.38**	**67,249**	**1.30**	**36,780**	**0.27**	**7,553**	***Total***

31. LABA BERSIH PER SAHAM

31. EARNINGS PER SHARE

Laba tahun berjalan per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan termasuk pelepasan saham treasuri Perusahaan yang dilakukan selama periode berjalan (Catatan 22).

Profit for the year per share is calculated by dividing the net income attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period, including the release of the Company's treasury shares made during the period (Note 22).

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	6,105,856	12,567,582	*Profit for the year attributable to owners of the parent entity*
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (lembar)	11,487,209,350	11,487,209,350	*Weighted average number of ordinary shares outstanding (number of shares)*
Laba bersih per saham dasar dan dilusian (nilai penuh)	532	1,094	*Basic and diluted earnings per share (full amount)*

Grup tidak memiliki efek yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The Group does not have any dilutive ordinary shares as at 31 December 2023 and 2022.

32. INFORMASI SEGMEN / *32. SEGMENT INFORMATION*

a. Aktivitas / *a. Activities*

Segmen utama dari bisnis Grup adalah bidang industri tambang batubara, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain.

Grup juga memiliki segmen bisnis lainnya, yaitu jasa kontraktor, pengolahan briket, perkebunan sawit, pengolahan sawit dan jasa kesehatan.

The main segment of the Group's business is coal mining activities, which includes general surveying, exploration, exploitation, processing, refining, transportation and trading, maintenance of special coal port facilities for internal and external needs, and operation of steam power plants for internal and external needs.

The Group also has other business segments, which are mining services, briquette processing, palm plantation and palm processing and health services.

b. Informasi segmen / *b. Segment information*

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya, manajemen menetapkan segmen Grup berdasarkan produk. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

Informasi menurut segmen yang merupakan segmen primer adalah sebagai berikut:

Based on the financial information used by the chief operating decision-maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources, management considers the Group's segments based on the type of products. All transactions between segments have been eliminated.

Information concerning the segments that are considered the primary segments is as follows:

	31 Desember/*December* 2023					
	Batubara/ *Coal*	**Lainnya/ *Others***	**Jumlah sebelum eliminasi/ *Total before elimination***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Jumlah/ *Total***	
Pendapatan	37,972,033	3,804,375	41,776,408	(3,287,541)	38,488,867	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(28,917,974)	(3,305,168)	(32,223,142)	2,891,580	(29,331,562)	*Cost of revenue*
Laba bruto	**9,054,059**	**499,207**	**9,553,266**	**(395,961)**	**9,157,305**	***Gross profit***
Beban usaha	(2,938,485)	(187,769)	(3,126,254)	533,257	(2,592,997)	*Operating expenses*
Penghasilan/ (beban) lainnya, neto	717,142	58,555	775,697	(137,296)	638,401	*Other income/ (expenses), net*
Laba usaha	**6,832,716**	**369,993**	**7,202,709**	**-**	**7,202,709**	***Operating profit***
Penghasilan keuangan	571,154	53,760	624,914	(40,575)	584,339	*Finance income*
Biaya keuangan	(161,868)	(82,745)	(244,613)	40,575	(204,038)	*Finance costs*
Bagian atas keuntungan neto asosiasi dan ventura bersama	-	571,303	571,303	-	571,303	*Share in net profit profit of associates and joint ventures*
Laba sebelum pajak penghasilan	**7,242,002**	**912,311**	**8,154,313**	**-**	**8,154,313**	***Profit before income tax***
Beban pajak penghasilan	(1,829,598)	(32,194)	(1,861,792)	-	(1,861,792)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	**5,412,404**	**880,117**	**6,292,521**	**-**	**6,292,521**	***Profit for the year***
Aset segmen	**40,385,913**	**1,523,232**	**41,909,145**	**(3,143,956)**	**38,765,189**	***Segment assets***
Liabilitas segmen	**17,071,885**	**2,491,569**	**19,563,454**	**(2,361,461)**	**17,201,993**	***Segment liabilities***
Beban penyusutan dan amortisasi	1,384,815	418,788	1,803,603	-	1,803,603	*Depreciation and amortisation*
Penambahan aset tetap dan properti penambangan/ beban pengembangan tangguhan	1,410,549	490,825	1,901,374	-	1,901,374	*Additions to fixed assets and mining properties/ deferred development expenditure*

32. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / ***32. SEGMENT INFORMATION** (continued)*

b. Informasi segmen (lanjutan) / ***b. Segment information** (continued)*

	31 Desember/*December* 2022					
	Batubara/ *Coal*	**Lainnya/ *Others***	**Jumlah sebelum eliminasi/ *Total before elimination***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Jumlah/ *Total***	
Pendapatan	42,099,316	3,415,878	45,515,194	(2,866,604)	42,648,590	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(24,596,373)	(2,703,763)	(27,300,136)	2,617,832	(24,682,304)	*Cost of revenue*
Laba bruto	**17,502,943**	**712,115**	**18,215,058**	**(248,772)**	**17,966,286**	***Gross profit***
Beban usaha	(3,532,758)	(219,258)	(3,752,016)	408,560	(3,343,456)	*Operating expenses*
Penghasilan/ (beban) lainnya, neto	573,441	108,937	682,378	(159,787)	522,591	*Other income/ (expenses), net*
Laba usaha	**14,543,626**	**601,794**	**15,145,420**	**-**	**15,145,421**	***Operating profit***
Penghasilan keuangan	419,449	51,194	470,643	(42,609)	428,033	*Finance income*
Biaya keuangan	(130,220)	(112,593)	(242,813)	42,609	(200,203)	*Finance costs*
Bagian atas keuntungan neto asosiasi dan ventura bersama	-	829,063	829,063	-	829,063	*Share in net profit profit of associates and joint ventures*
Laba sebelum pajak penghasilan	**14,832,855**	**1,369,458**	**16,202,313**	**-**	**16,202,3143**	***Profit before income tax***
Beban pajak penghasilan	(3,287,822)	(135,065)	(3,422,887)	-	(3,422,887)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	**11,545,033**	**1,234,393**	**12,779,426**	**-**	**12,779,427**	***Profit for the year***
Aset segmen	47,948,194	17,785	47,965,979	(2,606,771)	45,359,208	*Segment assets*
Liabilitas segmen	15,798,347	2,807,967	18,606,314	(2,163,152)	16,443,162	*Segment liabilities*
Beban penyusutan dan amortisasi	1,234,774	297,791	1,532,565	-	1,532,565	*Depreciation and amortisation*
Penambahan aset tetap dan properti penambangan/ beban pengembangan tangguhan	2,165,913	202,603	2,368,516	-	2,368,517	*Additions to fixed assets and mining properties/ deferred development expenditure*

	31 Desember/ *December 2023*	**31 Desember/ *December 2022***	
Informasi penjualan menurut lokasi geografis:			***Sales information by geographic location:***
Indonesia	17,539,114	16,458,589	*Indonesia*
India	6,192,250	8,420,942	*India*
Tiongkok	3,041,885	3,472,734	*China*
Korea	4,334,176	3,784,065	*Korea*
Kamboja	1,416,057	1,037,507	*Cambodia*
Vietnam	1,185,323	140,423	*Vietnam*
Bangladesh	1,102,000	-	*Bangladesh*
Jepang	957,480	2,478,337	*Japan*
Thailand	765,090	2,197,063	*Thailand*
Filipina	757,218	445,544	*Philippines*
Taiwan	720,488	849,609	*Taiwan*
Malaysia	390,699	546,526	*Malaysia*
Italia	-	2,606,218	*Italy*
Lainnya (masing-masing dibawah Rp250.000)	87,087	211,033	*Others (each below Rp250,000)*
Jumlah	**38,488,867**	**42,648,590**	***Total***

32. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

b. Informasi segmen (lanjutan)

Seluruh aset tidak lancar selain instrumen keuangan berada di Indonesia. Perusahaan tidak memiliki aset dan hak imbalan kerja yang muncul dari kontrak asuransi.

***32. SEGMENT INFORMATION** (continued)*

***b. Segment information** (continued)*

All non-current assets other than financial instruments are domiciled in Indonesia. The Company has no employment benefit assets and rights arising from insurance contracts.

33. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Berikut ini adalah kategori aset dan liabilitas keuangan dari Grup:

33. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The information given below relates to the Group's financial assets and liabilities by category:

	Jumlah/ *Total*	Biaya amortisasi/ *Amortised cost*	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya/ *Fair value through other comprehensive income*	Nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit or loss*
31 Desember/*December* 2023				
Aset keuangan/*Financial assets*				
Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents*	4,138,867	4,138,867	-	-
Piutang usaha, neto/*Trade receivables, net*	3,985,563	3,985,563	-	-
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain/ *Financial assets at fair value through other comprehensive income*	875,330	-	875,330	-
Piutang lainnya dari pihak berelasi/*Other receivables from related parties*	18,683	18,683	-	-
Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun/ *Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year*	541,818	541,818	-	-
Aset lancar lainnya/*Other current asset*	295,435	295,435	-	-
Aset tidak lancar lainnya/ *Other non current asset*	370,805	370,805	-	-
Jumlah aset keuangan/ *Total financial assets*	**10,226,501**	**9,351,171**	**875,330**	**-**

	Jumlah/ *Total*	Biaya amortisasi/ *Amortised cost*	Nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit and loss*
31 Desember/*December* 2023			
Liabilitas keuangan/*Financial liabilities*			
Utang usaha/*Trade payables*	(2,082,188)	(2,082,188)	-
Biaya yang masih harus dibayar/ *Accrued expenses*	(4,857,830)	(4,857,830)	-
Pinjaman bank/*Bank borrowings*	(68,000)	(68,000)	-
Liabilitas sewa/*Lease liabilities*	(1,233,682)	(1,233,682)	-
Utang jangka pendek lainnya/ *Other current liabilities*	(268,527)	(268,527)	-
Jumlah liabilitas keuangan/ *Total financial liabilities*	**(8,510,227)**	**(8,510,227)**	**-**

33. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) / *33. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

	Jumlah/ *Total*	Biaya amortisasi/ *Amortised cost*	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya/ *Fair value through other comprehensive income*	Nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit or loss*
31 Desember/*December* 2022				
Aset keuangan/*Financial assets*				
Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents*	7,030,343	7,030,343	-	-
Piutang usaha, neto/*Trade receivables, net*	3,742,590	3,742,590	-	-
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain/ *Financial assets at fair value through other comprehensive income*	783,070	-	783,070	-
Piutang lainnya dari pihak berelasi/*Other receivables from related parties*	29,407	29,407	-	-
Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun/ *Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year*	8,929,196	8,929,196	-	-
Aset lancar lainnya/*Other current asset*	91,716	91,716	-	-
Aset tidak lancar lainnya/ *Other non current asset*	259,238	259,238	-	-
Jumlah aset keuangan/ *Total financial assets*	**20,865,560**	**20,082,490**	**783,070**	**-**

	Jumlah/ *Total*	Biaya amortisasi/ *Amortised cost*	Nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit and loss*
31 Desember/*December* 2022			
Liabilitas keuangan/*Financial liabilities*			
Utang usaha/*Trade payables*	(1,935,818)	(1,935,818)	-
Biaya yang masih harus dibayar/ *Accrued expenses*	(4,485,018)	(4,485,018)	-
Pinjaman bank/*Bank borrowings*	(2,240)	(2,240)	-
Liabilitas sewa/*Lease liabilities*	(1,359,961)	(1,359,961)	-
Utang jangka pendek lainnya/ *Other current liabilities*	(231,498)	(231,498)	-
Jumlah liabilitas keuangan/ *Total financial liabilities*	**(8,014,535)**	**(8,014,535)**	**-**

34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Grup memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut (dalam satuan penuh, kecuali jumlah setara Rupiah):

34. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

The Group has the following monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies (in full amounts, except Rupiah equivalent):

	31 Desember/*December* 2023					
	Dolar AS/ *US Dollars*	Dolar Singapura/ *Singapore Dollars*	Dolar Australia/ *Australian Dollars*	Euro/ *Euro*	Jumlah setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	
Aset						***Assets***
Kas di bank						*Cash in banks*
Pihak ketiga	324,173	-	-	-	5,005	*Third parties*
Pihak berelasi	43,878,554	-	52,574	155,055	680,654	*Related parties*
Deposito berjangka						*Time deposits*
Pihak ketiga	-	-	-	-	-	*Third parties*
Pihak berelasi	110,058,488	-	-	-	1,699,192	*Related parties*
Piutang usaha						*Trade receivables*
Pihak ketiga	98,140,424	1,889,573	-	-	1,537,321	*Third parties*
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	*Related parties*
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	10,960,878	-	-	-	169,225	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*
	263,362,517	**1,889,573**	**52,574**	**155,055**	**4,091,397**	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang usaha						*Trade payables*
Pihak ketiga	(1,135)	-	-	(99,419)	(1,720)	*Third parties*
Pihak berelasi	(8,495,548)	-	-	-	(131,163)	*Related parties*
	(8,496,683)	-	-	(99,419)	(132,883)	
Aset neto	**254,865,834**	**1,889,573**	**52,574**	**55,636**	**3,958,485**	***Net assets***

34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

34. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES *(continued)*

	31 Desember/*December* 2022					
	Dolar AS/ *US Dollars*	**Dolar Singapura/ *Singapore Dollars***	**Dolar Australia/ *Australian Dollars***	**Euro/ *Euro***	**Jumlah setara Rupiah/ *Rupiah equivalent***	
Aset						***Assets***
Kas di bank						*Cash in banks*
Pihak ketiga	5,571,062	-	-	-	86,864	*Third parties*
Pihak berelasi	57,049,833	-	2,166,714	-	912,447	*Related parties*
Deposito berjangka						*Time deposits*
Pihak ketiga	-	-	-	-	-	*Third parties*
Pihak berelasi	11,040,277	-	-	-	172,140	*Related parties*
Piutang usaha						*Trade receivables*
Pihak ketiga	74,313,301	422,163	-	-	1,163,615	*Third parties*
Pihak berelasi	25,022,383	-	-	-	390,149	*Related parties*
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	10,015,393	-	-	-	156,160	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*
	183,012,249	**422,163**	**2,166,714**	**-**	**2,881,375**	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang usaha						*Trade payables*
Pihak ketiga	-	-	-	(68,210)	(1,140)	*Third parties*
Pihak berelasi	(10,942,214)	-	-	-	(170,612)	*Related parties*
	(10,942,214)	**-**	**-**	**(68,210)**	**(171,752)**	
Aset neto	**172,070,035**	**422,163**	**2,166,714**	**(68,210)**	**2,709,623**	***Net assets***

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dijabarkan dengan menggunakan JISDOR dan kurs tengah mata uang asing pada tanggal di mana laporan keuangan konsolidasian diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan, maka aset neto dalam mata uang asing akan naik sekitar Rp70.343.

If the Group's assets and liabilities in foreign currencies as at 31 December 2023 had been translated using JISDOR and middle rates as at the date the consolidated financial statements were authorised for issue by the Board of Directors, the total net foreign currency assets of the Group would have increased by approximately Rp70,343.

35. INFORMASI ARUS KAS / *35. CASH FLOW INFORMATION*

a. Transaksi non-kas / *a. Non-cash transactions*

Tabel di bawah ini menunjukkan transaksi non-kas Grup selama tahun berjalan sebagai berikut:

The table below shows the Group's non-cash transactions during the year:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas			***Non-cash activities***
Pembelian aset tetap melalui utang dan akrual	632,346	80,705	*Purchase of fixed assets through payables and accruals*
Penambahan properti pertambangan melalui penambahan provisi reklamasi dan penutupan tambang	500,651	754,186	*Addition of mining property through addition provision for environmental reclamation and mine closure*
Penambahan aset tetap melalui liabilitas sewa	368,638	830,149	*Addition of fixed assets through lease liabilities*

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan / *b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities*

	31 Desember/*December* 2023				
	1 Januari/ January	***Penambahan/ Addition***	***Pembayaran/ Payments***	***31 Desember/ December***	
Pinjaman bank	2,240	68,000	(2,240)	68,000	*Bank borrowings*
Liabilitas sewa	1,359,962	347,071	(473,351)	1,233,682	*Lease liabilities*
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	**1,362,202**	**415,071**	**(475,589)**	**1,301,682**	***Total liabilities from financing activities***

	31 Desember/*December* 2022				
	1 Januari/ January	***Penambahan/ Addition***	***Pembayaran/ Payments***	***31 Desember/ December***	
Pinjaman bank	5,940	-	(3,700)	2,240	Bank borrowings
Liabilitas sewa	1,041,311	879,521	(560,870)	1,359,962	Lease liabilities
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	**1,047,251**	**879,521**	**(564,570)**	**1,362,202**	***Total liabilities from financing activities***

36. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN

Pada 26 Februari 2024, Perusahaan bersama-sama China Huadian Hongkong Company Limited (“CHDHK”) menandatangani Keputusan Sirkuler diluar Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS Sirkuler”) HBAP untuk melakukan tambahan setoran modal bagi HBAP sebesar USD66.638.000. Dengan kepemilikan Perusahaan pada HBAP sebesar 45%, maka porsi tambahan setoran modal Perusahaan adalah sebesar USD29.987.100. Tambahan setoran modal tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen dari para pemegang saham sebagaimana tertuang pada Shareholders Support Agreement untuk Proyek PLTU Sumsel-8 yang digarap oleh HBAP.

36. SIGNIFICANT EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

On 26 February 2024, the Company together with China Huadian Hongkong Company Limited ("CHDHK"), signed the Circular Resolution in lieu of the General Meeting of Shareholders ("Circular GMS") HBAP for the additional capital injection of HBAP amounted to USD66,638,000. With 45% of the Company’s share ownership in HBAP, the additional capital injection is USD29,987,100. This Capital Injection is the shareholders' commitment stipulated under the Shareholders Support Agreement for CFPP Sumsel-8 by HBAP.

37. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi untuk diterbitkan sesuai dengan resolusi Direksi Perusahaan tanggal 29 Februari 2024.

37. AUTHORISATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

These consolidated financial statements were authorised for issuance in accordance with a resolution of the Board of Directors of the Company on 29 February 2024.

Indeks Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI)

General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) Index

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris** Roles and Responsibilities of Board of Directors and Board of Commissioners		
1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of Board of Directors		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (corporate resilience) To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out the leadership role and seeks to achieve the following governance outcomes: a. competitive and focused on long-term performance; b. ethical and responsible in conducting business; c. contribute positively to society and the environment; as well as d. ability to survive and grow (corporate resilience)	Diterapkan Apply	Telah sesuai sebagaimana tertuang dalam *Corporate Governance Policy* PTBA 2023 It is appropriate as stated in the PTBA Corporate Governance Policy PTBA 2023
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporate mission, vision, goals, objectives, strategies and annual and mid-term plans are consistent with long-term goals, by making effective use of innovation and technology.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam penjelasan Visi dan Misi PTBA Contained in PTBA Vision and Mission explanation
Rekomendasi 3 & 4 **Recommendation 3 & 4**			

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporate implements an appropriate and effective risk management and internal control system that is aligned with the corporate vision, mission, goals, objectives and strategies and complies with applicable law regulations and standards.	Diterapkan Apply	Direksi telah mengeluarkan Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur terkait Manajemen Risiko dan sistem pengendalian internal. Direksi memastikan Manajemen risiko diterapkan pada setiap pengambilan keputusan strategis dan tahapan proyek-proyek strategis Perusahaan. Pada tahun 2023, telah disusun Pedoman Four Eyes Principle Pengambilan Keputusan PT Bukit Asam BAFEPDMM.02 kebijakan yang berlaku di MIND ID dan peraturan di bidang BUMN. Perusahaan juga memiliki Piagam SPI sebagaimana disusun pada tahun 2017 dan perubahan terakhir Piagam SPI pada tanggal 28 Februari 2023, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. The Board of Directors has issued Policies, Guidelines and Procedures related to Risk Management and internal control systems. The Board of Directors ensures that risk management is implemented in every strategic decision-making stage of the Company's strategic projects. Accordingly, in 2023, PT Bukit Asam prepared BAFEPDMM.02 Four Eyes Principle Guidelines for Decision Making based on Ministerial Regulation Number Per-8 MBU/08/2020 concerning the Strategic Plan of the Ministry of BUMN for 2020- 2024. The company also has an SPI Charter as drafted in 2017 and the last amendment to the SPI Charter on February 28, 2023, refers to the provisions of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Financial Services Authority Regulation No. 56/ POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporate accounting and financial reporting system and the timely and accurate disclosure of all material information about the corporate.	Diterapkan Apply	Direksi merupakan bagian Pengendalian Internal yang merancang dan menjalankan kepatuhan perusahaan termasuk menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu serta memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan. The Board of Directors ensures that risk management is implemented in every strategic decision making and stages of the Company's strategic projects. In 2023, the 4 Eyes Principles Guidelines have been developed.
Rekomendasi 5 **Recommendation 5**			

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared properly.	Diterapkan Apply	Laporan Keberlanjutan PTBA disusun berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI) dan POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Selain itu, PTBA juga melakukan pelaporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil PT Bukit Asam Tbk serta aktivitas keuangan dan arus kas yang kemudian diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, untuk kemudian dilaporkan dan disahkan dalam RUPS sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. PTBA's Sustainability Report is prepared based on Global Reporting Initiative (GRI) standards and POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies.
Rekomendasi 6 **Recommendation 6**			
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors establish a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with corporate business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate goals and strategies.	Diterapkan Apply	Bukit Asam telah menyusun dan menetapkan kebijakan strategis pengelolaan TI di lingkup Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; serta dibentuknya Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Prosedur TI yang disusun berdasarkan ISO 27001, ISO 20000 dan Framework COBIT/COSO-Internal Control. Bukit Asam has developed and established a strategic policy for managing IT within the Company based on the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/ MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and the formation of Information Technology Work Units and IT Procedures based on ISO 27001, ISO 20000, and the COBIT/COSO-Internal Control Framework.
Rekomendasi 7, 8 & 9 **Recommendation 7, 8 & 9**			
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporates that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting tools so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.	Penjelasan Explain	Perusahaan tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah The Company does not carry out business activities based on sharia principles
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of roles for the Directors individually which can be regulated in the Board of Directors Charter or by a decision letter of the Board of Directors.	Diterapkan Apply	Telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Pedoman Kerja Direksi PTBA yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 250H/0100/2023 tentang Pedoman Kerja Direksi (Charter to Board of Directors) PT Bukit Asam Tbk serta ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perusahaan terkait pembagian wewenang Direksi It is in accordance as stated in the PTBA Charter of Board of Directors stipulated in the Board of Directors Decree No. 250H/0100/2023 concerning the Charter to Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk dated 14 September 2020 and the provisions Article 12 paragraph (2) of the Company's Articles of Association regarding the division of authority of the Board of Directors.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of a member of the Board of Directors if they are involved in a financial crime and are proven to have made a mistake.	Diterapkan Apply	PTBA menerapkan aspek, prinsip, dan rekomendasi berdasarkan pendekatan "comply or explain" dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi tata kelola yang disampaikan oleh OJK. Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi juga diatur dalam Keputusan Direksi No. 250H/0100/2023 tentang Pedoman Kerja Direksi (Charter to Board of Directors) PT Bukit Asam Tbk serta Anggaran Dasar Perusahaan. PTBA implements aspects, principles and recommendations based on the "comply or explain" approach in Financial Services Authority Regulation No. 21 POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines and SEOJK No. 32/ SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance, there are 5 (five) aspects, 8 (eight) principles, and 25 (twenty five) governance recommendations submitted by OJK. The resignation policy for members of the Board of Directors is also regulated in the Board of Directors Decree No. 250H/0100/2023 concerning the Charter to Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk dated 14 September 2020 and the Company's Articles of Association.
1.2	Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya Performance Appraisal – Board of Directors and Members		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	Diterapkan Apply	Hasil evaluasi terhadap direksi secara kolegial maupun individu, dan hasil tersebut menjadi dasar untuk masa jabatan selanjutnya. The evaluation results of directors collegially and individually, and these results become the basis for the next term of office.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with the consideration of the Remuneration and Nomination Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	Diterapkan Apply	Komite Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Komite Asuransi, Risiko Usaha dan Pascatambang secara garis besar, membantu tugas Dewan Komisaris dalam memberikan pendapat terkait pengelolaan perusahaan yang berhubungan dengan risiko usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian signifikan termasuk dalam mengevaluasi Direksi berdasarkan rencana strategis Perusahaan sesuai Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/ PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM. The Committee for Nomination, Remuneration and Human Resources Development with the Insurance, Business Risk and Postmining Committee in general, assists the duties of the Board of Commissioners in providing opinions regarding the management of the company related to business risks that have the potential to cause significant losses including in evaluating the Board of Directors based on the Company's strategic plan in accordance Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated August 30, 2021 concerning Stipulation of the Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration and HR. Development Committee Charter.
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners		
Rekomendasi 1, 2, 3, 4, 5 & 6 **Recommendation 1, 2, 3, 4, 5 & 6**			
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the corporate mission, vision and strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, advise and approve the business plans and long-term financial plans and corporate short-term financial plans. The Board of Commissioners advise and monitor the Directors on their implementation management. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in decisions that are very important for the corporate, regulated in the articles of association of the corporate.	Diterapkan Apply	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris Perusahaan. Setiap tahun dilakukan pembahasan strategi, hal ini merupakan bagian dari proses persetujuan RJPP dan RKAT perusahaan, dalam rapat komisaris yang dihadiri direksi. Hasilnya tertuang dalam risalah rapat untuk dilakukan tindak lanjut oleh direksi. The duties and responsibilities of the Board of Commissioners are contained in the Company's Charter to Board of Commissioners. Strategy discussions are held every year, as part of the Company's RJPP and RKAT approval process, at the board of commissioners' meeting attended by the board of directors. The results are stated in the minutes of meeting to be followed up by the directors.
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan Types of decisions that require the approval of the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report	Diterapkan Apply	Hasil keputusan telah diungkapkan dalam laporan tahunan, pada Bab 5 Tata Kelola Perusahaan, pembahasan tentang Keputusan, Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris. The decision has been disclosed in the annual report, in Chapter 5 of Corporate Governance, discussion of Decisions, Recommendations and Implementation of Duties of the Board of Commissioners.
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. Considering the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee, the Board of Commissioners proposes to, and to be decided by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners pays attention to diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities regardless of ethnicity, religion, race, class and gender. The Board of Commissioners ensures that the process of nominating and selecting members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	Diterapkan Apply	Rekomendasi ini dilakukan setiap tahun dan merupakan hal yang diminta oleh pemegang saham. This recommendation is made every year and is requested by the shareholders.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function formulates a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors. The Board of Commissioners review the report on the implementation of the development and succession plan submitted by the President Director in every year.	Diterapkan Apply	Hal ini tertuang dalam kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021 tentang Penetapan Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM. Pedoman disusun sebagai acuan tata laksana tugas Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. This is stated in the policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/ SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated August 30, 2021 concerning Stipulation of the Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration and HR Development Committee Charter. The guidelines have been prepared as a reference for the implementation of the duties of the Business Risk Committee, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration and HR Development and Financial Services Authority Regulation No. 34/ POJK.04/2014 dated 8 December 2015 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.
1.3.5	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Board of Commissioners submit to the GMS, which may be preceded by a recommendation from the Committee that carries out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporate and shareholders; periodically reviewing the remuneration system for the Board of Directors and the Board of Commissioners.	Diterapkan Apply	Hasil reviu Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan pada Dewan Komisaris yang kemudian menjadi usulan kepada RUPS/Pemegang saham. The results of Nomination and Remuneration Committee review are submitted to the Board of Commissioners which then becomes a recommendation to the GMS/ Shareholders.
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners supervise the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	Diterapkan Apply	Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021 tentang Penetapan Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM. This is stated in the Policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/ SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated August 30, 2021 concerning Stipulation of the Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration and HR Development Committee Charter.
Rekomendasi 7 **Recommendation 7**			

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs corporates to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with corporate goals, objectives and strategies and comply with laws and regulations, codes of conduct and applicable standards.	Diterapkan Apply	Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021 tentang Penetapan Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM. Penerapan manajemen risiko dan sistempengendalian internal juga mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/ MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. This is stated in the Policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/ SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated August 30, 2021 concerning Stipulation of the Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration and HR Development Committee Charter. The application of risk management and internal control systems also refers to the provisions of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/ MBU/03/2023 dated March 24, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, and Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.
Rekomendasi 8 **Recommendation 8**			
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and direct the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.	Diterapkan Apply	Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021 kemudian apabila ada isu yang beresiko akan disampaikan menjadi agenda rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi Pelaksanaan Pengendalian Internal juga dilakukan sesuai dengan sistem pengendalian internal dengan kerangka yang diakui secara Internasional (COSOInternal Control Framework). This is stated in the Policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/ SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated 30 August 2021 then if there are issues that are at risk they will be submitted to the agenda for the Board of Commissioners meeting attended by the Directors Implementation of Internal Control is also carried out in accordance with the internal control system with an internationally recognized framework (COSO-Internal Control Framework).
Rekomendasi 9,10,11 & 12 **Recommendation 9,10,11 & 12**			
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews and approves the annual report and corporate sustainability report and ensures their integrity, and supervise the process of corporate disclosure and communication.	Diterapkan Apply	Persetujuan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan dan Keberlanjutan tertuang dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris. Proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi juga tertuang pada Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021. The Board of Commissioners' approval for the Annual and Sustainability Report is contained in the Annual Report and Sustainability Report, which is signed by all Members of Board of Commissioners. The process of corporate disclosure and communication is also contained in the Policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated 30 August 2021.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. Board of Commissioners charter is periodically reviewed.	Diterapkan Apply	Reviu piagam Dewan Komisaris termasuk organ Dewan Komisaris dilakukan reviu secara periodik The Board of Commissioners' charter including the organs of Board of Commissioners is reviewed periodically

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of a member of the Board of Commissioners if they are involved in a financial crime and are proven to have made a mistake.	Diterapkan Apply	Mengikuti ketentuan hukum yang berlaku Follow the applicable legal provisions
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, objektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are expected to be able to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at meetings of the Board of Commissioners.	Diterapkan Apply	Sesuai Board Manual PTBA dan ketentuan hukum yang berlaku In accordance with PTBA Board Manual and applicable legal provisions
Rekomendasi 13 **Recommendation 13**			
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner has a role as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures the effectiveness. The President Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialogue that allows a variety of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring timely enough available to discuss all the agenda. In addition, there should also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	Diterapkan Apply	Ketentuan dalam Corporate Governance Policy 2023 dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris 2023. Provisions in the Corporate Governance Policy 2023 and Charter of Board of Commissioners 2023.
1.3.13.1	Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web korporasi. Details of the President Commissioner duties are disclosed in the annual report and corporate website.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Laporan Tahunan pada Bab 5 Tata Kelola Perusahaan, Sub Bab Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. RIncian tugas utama Komisaris utama juga tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang telah ditayangkan di website Perusahaan dengan link www.ptba.co.id. It is contained in the Annual Report in Chapter 5 of Corporate Governance, Sub-Chapter Meetings of the Board of Commissioners and Directors. Details of the main duties of the main Commissioner are also contained in the Charter to Board of Commissioners which has been published on the Company's website with the link www.ptba.co.id
1.3.13.2	Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris. Details of President Commissioner duties are disclosed in annual report and corporate website, the President Commissioner coordinates the division of oversight roles among members of the Board of Commissioners, chairs the meetings of the Board of Commissioners and represents the Board of Commissioners in dealings with parties outside the Board of Commissioners.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk Decree of the Board of Stated in the decision of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk was issued No. 09/ SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk
1.3.13.3	Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama/anggota Direksi perlu menjadi Komisaris utama, maka Dewan Komisaris memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan. Former President Directors and members of the Board of Directors who are elected as members of the Board of Commissioners cannot be directly appointed as President Commissioners. There needs to be a gap period of 2 (two) years to be reappointed as President Commissioner. If the Board of Commissioners decides that a former President Director/member of the Board of Directors needs to become the President Commissioner, the Board of Commissioners will provide reasons and explanations in the Annual Report.	Diterapkan Apply	PTBA tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, terutama terkait pengangkatan Direksi Perseroan. PTBA is subject to and complies with laws and regulations, especially regarding the appointment of Board of Directors of the Company.
1.4	Pembentukan Komite Committee Formation		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporate has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee and Risk Management Monitoring Committee.	Diterapkan Apply	Dewan Komisaris PTBA telah memiliki Komite Audit dan Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM). Pedoman kerja komite-komite tersebut tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/ PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021 tentang Penetapan Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM. PTBA's Board of Commissioners already has an Audit Committee and Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration & Human Capital Development (HCD) Committee. The work guidelines for these committees are contained in the Policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated 30 August 2021 concerning Stipulation of the Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration and HR Development Committee Charter.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and other committees formed by the Board of Commissioners are the majority of the independent parties, and all members of the committee are competent, committed, and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan termasuk mengenai masa jabatan. Has been carried out in accordance with the provisions including regarding the term of office.
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan To ensure the monitoring of the duties implementation of Audit Committee is carried out objectively and independently, the President Commissioner may not be the chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be explained in the annual report	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Has been carried out in accordance with the provisions
1.5	Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Appraisal - Board of Commissioners and Members		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal objective evaluation to determine the effectiveness of the Board, the Committees and each individual commissioner.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Has been carried out in accordance with the provisions
1.6	Benturan Kepentingan Conflict of Interest		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Board of Directors Members who have concurrent positions outside the corporate must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chairman of the committee carrying out the nomination function, before accepting a new appointment as a director or commissioner of a publicly listed corporate, other directorships or other positions with significant time commitments.	Diterapkan Apply	Pemantauan pengelolaan benturan kepentingan dilaksanakan Dewan Komisaris sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No.14/SK/PTBA-DEKOM/ IX/2020 dan No. 04/0100/2020 tentang Penerapan Prinsip dan Praktik Good Corporate Governance untuk Kebijakan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) Perusahaan Monitoring the management of conflicts of interest is carried out by the Board of Commissioners in accordance with the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No.14/SK/PTBA-DEKOM/ IX/2020 and No. 04/0100/2020 concerning Application of Good Corporate Governance Principles and Practices for Company Conflict of Interest Policies.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages the potential of conflicts of interest for management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have conflicts of interest do not participate in monitoring and making decisions on potential conflicts of interest involving Commissioners or Affiliation of the Commissioner concerned	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Ada penandatanganan Piagam Benturan Kepentingan yang dilakukan pembaharuan tiap tahun Has been carried out according to the provisions. There is a signing of Conflict of Interest Charter which is renewed every year
1.7	Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Competency Improvement of Board of Directors and Board of Commissioners Members		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, characteristics and operations of the corporate, relevant laws and regulations and other applicable standards and obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their role on the Board.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Anggaran Dewan Komisaris salah satunya tentang pelatihan untuk peningkatan dan penyegaran pengetahuan. Has been carried out according to the provisions. One of the Board of Commissioners' budget is regarding training to increase and refresh knowledge.
2	**Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners		
2.1	Komposisi Direksi Board of Directors Composition		
Rekomendasi 1 & 2 **Recommendation 1 & 2**			
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining candidates for directors, the Board of Commissioners through the Remuneration and Nomination Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Remuneration and Nomination Committee can use independent sources to determine qualified candidates.	Diterapkan Apply	Dilakukan rapat khusus pada komite untuk melakukan validasi atas usulan yang disampaikan Dewan Komisaris, manajemen dan pemegang saham mayoritas. Hasilnya diberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Hal ini tertuang pada Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021. A special meeting was held at the committee to validate the proposals submitted by the Board of Commissioners, management and majority shareholders. The results are given recommendations to the Board of Commissioners. This is stated in the Policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/ PTBA-KOM/VIII/2021 dated 30 August 2021.
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities and expertise needed to properly fulfill the role of the Board of Directors and takes into account the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	Diterapkan Apply	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa calon Anggota Direksi telah sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini tertuang pada Anggaran Dasar dan , Corporate Governance Policy 2023, dan Pedoman Kerja Direksi 2023. The Board of Commissioners has ensured that the candidates for Members of the Board of Directors are in accordance with the terms and criteria that have been set. This is stated in PTBA's Articles of Association , Corporate Governance Policy 2023, dan Charter of Board of Directors 2023.
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The corporate policy regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	Diterapkan Apply	Telah dilaksanakan sesuai rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Has been implemented according to the recommendations of the Financial Services Authority as outlined in the Appendix to the Financial Services Authority Circular Letter No.32/ SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance
Rekomendasi 4 **Recommendation 4**			

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
2.1.4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired composition of the Board. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas Has been carried out according to the provisions. This process is carried out by the major shareholder
Rekomendasi 5 & 6 **Recommendation 5 & 6**			
2.1.5.	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee that performs the nomination function establishes nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' expertise matrix that has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the requirements set out in the expertise matrix and nomination criteria.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas Has been carried out according to the provisions. This process is carried out by the major shareholder
2.1.6.	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background and gender needed to properly fulfill the role of the Board of Commissioners.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas Has been carried out according to the provisions. This process is carried out by the major shareholder
Panduan Manual			
2.1.6.1.	Setidaknya ada satu Komisaris memiliki pengalaman sebelumnya pengalaman di sektor utama tempat korporasi beroperasi At least one Commissioner has previous experience in the main sector where the corporate operates.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas Has been carried out according to the provisions. This process is carried out by the major shareholder
2.1.6.2.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi korporasi. Determination of the number of Board of Commissioners members consider the condition of the corporate.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas Has been carried out according to the provisions. This process is carried out by the major shareholder
Rekomendasi 7 **Recommendation 7**			
2.1.7.	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran- peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide the independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles where there is a potential conflict of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with a limited term of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence. from a corporate point of view.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Dewan Komisaris melakukan supervisi dan penasehatan dalam rapat Dewan Komisaris yang menghadirkan Direksi. Hal ini tertuang pada Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021. Implementation has been carried out according to the provisions. The Board of Commissioners supervises and advises the Board of Commissioners' meetings which present the Directors. This is stated in the Policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated 30 August 2021.
Rekomendasi 8 **Recommendation 8**			

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
2.1.8.	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Remuneration and Nomination Committee ensures that there is a formal, rigorous and transparent process for the appointment and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG tertuang pada Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/ PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021 dengan penentuan kriteria dibuat transparan dan mengikuti ketentuan yang ada. Implementation has been carried out according to the provisions. This process is carried out by the Nomination, Remuneration and GCG Committee as stated in the Policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/ PTBA-KOM/VIII/2021 dated 30 August 2021 with the determination of criteria being made transparent and following existing regulations.
2.2	**Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
2.2.1.	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The Board of Directors' remuneration must be proposed, through the Remuneration and Nomination Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and corporate performance.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/ PTBA-KOM/ VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021. Implementation has been carried out in accordance with PT Bukit Asam Tbk Board of Commissioners Policy No. 06/ SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated 30 August 2021.
Panduan Manual			
2.2.1.1.	Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai korporasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat. The remuneration policy is reasonable and fair, both in structure and size, and is determined in the context of corporate values, internal reward structures, and encourages competition while remaining sensitive to stakeholder expectations and societal norms.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021. Implementation has been carried out in accordance with the provisions of PT Bukit Asam Tbk Board of Commissioners Policy No. 06/SK/PTBA-KOM/ VIII/2021 dated 30 August 2021.
2.2.1.2.	Korporasi memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayar (*clawback*). The corporate has a remuneration policy for members of the Board of Directors that is performance-based and aligned with the achievement of the long-term interests of the corporate, such as performance measures as follows: share ownership options, deferred bonuses, provision for returning part or all of bonuses/ incentives that have been paid (clawback).	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana tindak lanjut dari keputusan RUPS yang telah ditentukan pada Surat Dewan Komisaris No. 57/DEKOM/ VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Perihal Penetapan Perhitungan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 dan Gaji/Honorarium Berikut Tunjangan dan Fasilitas Tahun Buku 2023 PT Bukit Asam Tbk serta Surat Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Mineral Industri Indonesi (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. 271/E.DIRPPU/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 Perihal Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Gaji/Honorarium dan Penghasilan Tahun 2023 bagi Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk ("PTBA"). Implementation has been carried out in accordance with the provisions as a follow-up to the GMS decision which has been determined in the Letter of Letter of the Board of Commissioners No. 57/DEKOM/VIII/2023 on August 14, 2023, concerning the Determination of the Bonus Calculation for the Directors and Board of Commissioners for the 2022 Financial Year and Salary/Honorarium as well as the Benefits and Facilities for the 2023 Financial Year of PT Bukit Asam Tbk and the Portfolio Director's Letter and Business Development PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as Proxy for Series A Dwiwarna Shareholder No. 271/E.DIRPPU/VIII/2023 on August 11, 2023, Regarding the Determination of Bonus for the 2022 Financial Year and Salary, Honorarium, and Income for for Directors and Members of the Board of Commissioners PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") in 2023,

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
2.2.1.3.	Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham korporasi. The Board of Directors does not receive other facilities other than the facilities that have been provided based on the Corporate General Meeting of Shareholders.	Diterapkan Apply	Penetapan Remunerasi dan Fasilitas untuk Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Determination of Remuneration and Facilities for Board of Commissioners and Board of Directors refers to Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
2.2.2.	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and promotes long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation and corporate performance. In addition, the position of President Commissioner and chairman as well as the membership in committees must also be considered	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021. Implementation has been carried out in accordance with the provisions of PT Bukit Asam Tbk Board of Commissioners Policy No. 06/SK/PTBA-KOM/ VIII/2021 dated 30 August 2021.
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
2.2.3.	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that the remuneration package is determined based on the achievements, qualifications and competencies of the directors and commissioners with due regard to corporate operating performance, individual performance and market conditions, the Remuneration and Nomination Committee ensures that there are fair and transparent procedures for establishing remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021. Implementation has been carried out in accordance with the provisions of PT Bukit Asam Tbk Board of Commissioners Policy No. 06/SK/PTBA-KOM/ VIII/2021 dated 30 August 2021.
3.	**Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris** Working Relations between the Board of Directors and the Board of Commissioners		
3.1	Sifat Hubungan Kerja Working Relations Characteristic		
Rekomendasi 1, 2 & 3 **Recommendation 1,2 & 3**			

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners and between members of the Board of Directors and members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information so that confidential information does not leak.	Diterapkan Apply	Perusahaan memperhatikan diskusi terbuka maupun tertutup dengan mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham Selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pelaksanaan juga mengacu sesuai ketentuan Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021. The company pays attention to open and closed discussions by prioritizing independence and the interests of shareholders. In line with Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines and SEOJK No. 32/ SEOJK.04/2015 concerning Governance Guidelines Public company. Implementation also refers to the provisions of PT Bukit Asam Tbk Board of Commissioners Policy No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated 30 August 2021.
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing- masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors cooperates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision and strategy and regularly discusses their implementation.		Telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Corporate Governance Policy , Pedoman Kerja Dewan Komisaris, dan Pedoman Kerja Direksi 2023. It is in accordance as stated in the PTBA board manual stipulated in Corporate Governance Policy , Charter to Board of Commissioners, and Charter of Board of Directors 2023
3.1.3	Corporate Secretary memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan dengan mengacu ketentuan POJK Nomor 35/ POJK.04/2014. Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Sementara itu, terkait hubungan kerja dan komunikasi antara Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan telah dilaksanakan sesuai dengan Corporate Governance Policy, Pedoman Kerja Direksi, dan Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan serta Kode Etik dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 dan No. 277/0100/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). Selain itu, akses Dewan Komisaris didasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Implementation has been carried out in accordance with the provisions by referring to POJK provisions No. 35/POJK.04/2014. about the Corporate Secretary of the Issuer or Public Company. Meanwhile, regarding work relations and communication between the Board of Directors, Board of Commissioners, shareholders and stakeholders, this has been carried out in accordance with the Corporate Governance Policy, Charter of Board of Directors, and Charter of Corporate Secretary, and the Code of Ethics with the stipulation of Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 and No. 277/0100/2023 dated December 29, 2023, concerning the Behaviour and Business Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). and No. 408A/0100/2021. In addition, access to the Board of Commissioners is based on the provisions of the Company's Articles of Association.
3.2	Akses informasi Dewan Komsaris Access to information on the Board of Commissioners		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai.Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it is properly informed. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay and in a comprehensive manner on all matters relevant to the corporate. The Board of Commissioners may at any time request the Board of Directors to provide additional information.	Diterapkan Apply	Telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Corporate Governance Policy , Pedoman Kerja Dewan Komisaris, dan Pedoman Kerja Direksi 2023, serta Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 20/ SK/PTBA-DEKOM/2023 dan No. 277/0100/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). It is in accordance as stated in the PTBA board manual stipulated in Corporate Governance Policy , Charter to Board of Commissioners, Charter of Board of Directors 2023, and Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 and No. 277/0100/2023 dated December 29, 2023, concerning the Behaviour and Business Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct).
3.3	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi Responsibilities of Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structures on Corporate		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of the ownership structure on the corporate. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the shareholding structure and relationships between corporate shareholders which may impact the management and operations of the corporate.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Has been carried out according to the provisions.
4.	**Perilaku Etis dan bertanggung jawab** Ethical and responsible behavior		
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam This statement is stated in	Diterapkan Apply	
Rekomendasi 1 & 2 **Recommendation 1 & 2**			

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak- hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. This statement is set forth in the Code of Business Conduct and Ethics which must clearly state the corporate expectation that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners and employees will: a. Act in the best interests of the corporate; b. Act honestly and with a high standard of integrity; c. Be independent and act on full information, in good faith, with due diligence and prudence. d. Comply with laws and regulations that apply to corporates and their operations; e. Avoiding actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethics guidelines; f. Not involved or participating in any activities that will cause a conflict of interest with the best interests of the corporate or which will have a negative impact on the reputation of the corporate; g. Do not take advantage of property or information owned by the corporate, ownership of other assets or its customers for personal gain or which causes harm to the corporate and its customers. h. Does not take advantage of his position or opportunities generated by his position for personal gain. i. Avoiding the act of requesting or receiving from third parties payments, gratuities or other benefits for themselves or for other people that cause conflicts of interest/give benefits to third parties in violation of laws and regulations. j. Respect differences of opinion and the rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees. k. Ensure the complete, fair, accurate, timely and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporate to regulators and in other public communications	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PTBA dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 20/ SK/PTBA-DEKOM/2023 dan No. 277/0100/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). It is contained in PTBA's Code of Conduct and Business Ethics with the stipulation of the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 and No. 277/0100/2023 dated December 29, 2023, concerning the Behaviour and Business Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct)

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan (*antifraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes policies and practices on anti-money laundering and financing of terrorism, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, political involvement with reference to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other related standards.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PTBA dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 20/ SK/PTBA-DEKOM/2023 dan No. 277/0100/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct) Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait dengan kebijakan anti korupsi dan anti fraud dalam sebagaimana keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.10/SK/PTB-DEKOM/IX/2020 dan No.400/0100/2020 tentang Penerapan Prinsip dan Praktik Good Corporate Anti Gratifikasi di PT Bukit Asam Tbk. It is contained in PTBA's Code of Conduct and Business Ethics with the stipulation of Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 and No. 277/0100/2023 dated December 29, 2023, concerning the Behaviour and Business Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). The company already has policies related to anticorruption and anti-fraud policies in accordance with the joint decisions of the Board of Commissioners and Directors No.10/SK/PTB-DEKOM/IX/2020 and No.400/0100/2020 concerning Implementation of Good Corporate Anti-Gratification Principles and Practices at PT Bukit Asam Tbk.
4.2	Nilai-Nilai dan Budaya Organisasi Organizational Values and Culture		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilainilai korporasi Corporates articulate, grow and express corporate culture and values	Diterapkan Apply	Penerapan nilai – nilai dan budaya AKHLAK dalam seluruh kegiatan pekerjaan oleh seluruh pegawai Perusahaan yang telah diawali oleh sosialisasi penerapan AKHLAK yang diberikan oleh Manajemen PTBA. The application of AKHLAK values and culture in all work activities by all Company employees, which was initiated by the socialization of AKHLAK implementation by PTBA Management.
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya Communication and Enforcement of Code of Ethics, Values and Culture		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. Code of conduct and corporate code of ethics are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees, integrated into corporate strategy and operations including risk management system and remuneration structure, and enforced	Diterapkan Apply	Telah sesuai sebagaimana tertuang Kode Etik dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/ PTBA-DEKOM/2023 dan No. 277/0100/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). Diperkuat pada tahun 2023 sosialisasi dilakukan dengan cara membagikan buku Code of Conduct kepada seluruh pegawai Bukit Asam dan pengisian pakta integritas COC melalui aplikasi CISEA GCG dengan status 100% untuk seluruh pegawai. It is in accordance with the Code of Ethics with the stipulation of the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 and No. 277/0100/2023 dated December 29, 2023, concerning the Behaviour and Business Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). Strengthened in 2022 socialization is carried out by distributing Code of Conduct books to all Bukit Asam employees and filling out the COC integrity pact through the CISEA GCG application with 100% status for all employees.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
5.	**Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan** Risk Management, Internal Control and Compliance		
5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan Internal Control and Compliance		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors periodically reviews on the design accuracy and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and corporate compliance and reports the implementation and the results of the review are conveyed to the shareholders through the annual report of corporate.	Diterapkan Apply	Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang terbit secara berkala setiap tahun memuat hasil reviu Direksi atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan Perusahaan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disampaikan setiap tahun pada saat iklan panggilan RUPST. The Annual Report and Sustainability Report which are published regularly every year contain the results of the Board of Directors' review of the accuracy of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control, and the Company's compliance with the principles of Corporate Governance and applicable laws and regulations and are submitted every year. year at the time of the announcement of the AGMS summons.
5.2	Manajemen Risiko Risk Management		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
5.2.1.	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are one unit, disclosed in a transparent manner, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as in discussions at the meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.		Telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Corporate Governance Policy, Pedoman Kerja Direksi, Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Piagam Manajemen Risiko, dan kebijakan manajemen risiko Perseroan. It is in accordance as stated in the PTBA board manual stipulated in the Corporate Governance Policy, Charter of Board of Directors, Charter to Board of Commissioners, Charter of Risk Management, and the policy Company risk management.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
5.2.2.	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists the implementation of the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused and independent mechanism for oversight of corporate risk management.		Telah sesuai berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/ SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM. It is in accordance with Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/ PTBA-KOM/VIII/2021 dated August 30, 2021, concerning Determination of the Charter of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration and Human Capital Development Committee.
5.3.	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management and Compliance		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors builds an integrated system of governance, risk management and compliance (GRC), by handling various uncertainties in an integrated manner with high integrity, to ensure that the corporate can achieve its goals		Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan dan dibuktikan dengan diperolehnya berbagai penghargaan atas implementasi manajemen risiko di Perusahaan, diantaranya yaitu Corporate Governance Perception Index (CGPI) oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance dan Majalah SWA, dan Juara II Annual Report Award dengan kategori Go Public Non- Keuangan. The implementation has been carried out according to the provisions and is proven by obtaining various awards for the implementation of risk management in the Company, including the Corporate Governance Perception Index (CGPI) by The Indonesian Institute for Corporate Governance and SWA Magazine, and Runner of Annual Report Award in Category Go Public Non Finance

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Pan-duan Man-ual			
5.3.1.1	Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya. The Board of Directors ensures coordination and capacity building among the main GRC systems which include governance systems, strategic management, performance management, risk management, compliance management and internal audit systems so that the corporate stays on the right track in achieving its goals.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Pedoman Perilau dan Etika Bisnis PTBA dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 20/ SK/PTBA-DEKOM/2023 dan No. 277/0100/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). It is contained in PTBA's Code of Conduct and Business Ethics with the stipulation of the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 and No. 277/0100/2023 dated December 29, 2023, concerning the Behaviour and Business Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct).
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the division in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest	Diterapkan Apply	Tertuang dalam code of conduct governance perseroan It is contained in the company's code of conduct governance
5.4.	Audit Internal Internal Audit		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners through the Audit Committee monitors and ensures that the internal audit function helps the corporate to achieve its goals by approaching an objective and disciplined to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan Has been carried out according to the provisions.
6.	**Pengungkapan dan Transparansi** Disclosure and Transparency		
6.1	Kebijakan Pengungkapan Disclosure Policy		
Rekomendasi 1 & 2 **Recommendation 1 & 2**			
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi The corporate has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate secrets.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Bukit Asam dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 20/ SK/PTBA-DEKOM/2023 dan No. 277/0100/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). It is contained in Bukit Asam's Code of Conduct and Business Ethics with the stipulation of the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 and No. 277/0100/2023 dated December 29, 2023, concerning the Behaviour and Business Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct).
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' right to obtain regularly and timely material relevant information about the corporate must be fulfilled.	Diterapkan Apply	Perusahaan Patuh Pada Ketentuan POJKNo 42 Tahun 2020 & POJK No 17 Tahun 2022 The Company complies with POJK No 42 of 2020 & POJK No 17 of 2022

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reports		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The corporate discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that are not materially audited or reviewed by external auditors are accurate, complete, and provide investors with the right information to make the right investment decisions.	Diterapkan Apply	Perusahaan Patuh Pada Ketentuan PSAK, Peraturan Bursa X.K.2, dan POJK No 14 Tahun 2022 The Company Complies with PSAK, Stock Exchange Regulations X.K.2, and POJK No 14 of 2022
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. Audit Committee ensures the quality of financial report audits carried out by external auditors. This activity includes recommending the appointment, reappointment and, if necessary, the termination and remuneration of the external auditor.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Rekomendasi penunjukan auditor ektsernal dilakukan setiap tahun oleh Komite Audit Has been carried out according to the provisions. Recommendations for the appointment of external auditors are carried out annually by Audit Committee
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	Diterapkan Apply	Laporan Keberlanjutan PTBA telah disusun sesuai dengan POJK 51, Consolidated GRI Standards 2021, GRI G4 Mining and Metals Sector Disclosures, SASB, dan ICMM. The PTBA Sustainability Report has been prepared accordingly with POJK 51, Consolidated GRI Standards 2021 and the GRI G4 Mining and Metals Sector Disclosures, andSASB, dan ICMM.
Rekomendasi 4 **Recommendation 4**			
6.2.4	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan Perseroan telah memaparkan tentang kinerja keberlanjutan Perseroan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun, sehingga diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The corporate has issued a Sustainability Report which is an integral part of the Annual Report. The Corporate's Sustainability Report has presented the Corporate's sustainability performance which includes economic, social, environmental and governance aspects, which are presented in a 3-year comparison, so that it is expected to help shareholders and stakeholders understand the strategic goals of the corporate and its progress in creating sustainable value.	Diterapkan Apply	Laporan Keberlanjutan PTBA telah disusun sesuai dengan POJK 51, Consolidated GRI Standards 2021, GRI G4 Mining and Metals Sector Disclosures, SASB, dan ICMM. The PTBA Sustainability Report has been prepared accordingly with POJK 51, Consolidated GRI Standards 2021 and the GRI G4 Mining and Metals Sector Disclosures, and SASB, dan ICMM.
6.3	Diseminasi Informasi Information Dissemination		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels should provide users with equitable, timely and relatively inexpensive access to relevant information.	Diterapkan Apply	Perusahaan Patuh pada Ketentuan POJK No 31 Tahun 2015 Tentang Keterbukaan Informasi The Company complies with POJK No 31 of 2015 concerning Information Disclosure

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi 2 & 3 **Recommendation 2 & 3**			
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporate ensures that an annual statement on the application of the General Guidelines for Corporate Governance in Indonesia, including an explanation of the application of each Recommendation and Guide is available on the website for a minimum period of five years.	Penjelasan Explain	Situs Web PTBA belum memuat tentang pernyataan tahunan penerapan PUGKI. PTBA website does not yet contain an annual statement on PUGKI implementation.
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus didiungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporate listed on the capital market in jurisdictions other than the jurisdiction of origin, the applicable laws and regulations on corporate governance must be clearly disclosed. In the case of cross listing, the criteria and procedures for recognizing the listing requirements for the primary listing must be transparent and documented.	Penjelasan Explain	Hingga akhir tahun buku 2023, Perusahaan hanya mencatatkan/memperdagangkan saham di Bursa Efek Indonesia, tempat domisili Perusahaan. Until the end of 2023 fiscal year, the Company only lists/trades its shares on the Indonesia Stock Exchange, where the Company is domiciled.
7.	**Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham** Protection of the Rights of Shareholders		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor The corporate has a communication policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation	Diterapkan Apply	Melalui Website Perusahaan dan Public Expose Yang Diselenggarakan Tiap Tahun Through the Company's Website and Public Expose Held Every Year
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The corporate which is the parent entity ensures that its corporate governance policies apply to its subsidiaries and entities under common control corporate investment is significant.	Diterapkan Apply	Perusahaan turut memastikan implementasi kebijakan governansi juga berlaku bagi entitas anak dan entitas terkait dengan senantiasa melakukan monitoring pelaporan pemenuhan GCG secara berkala, melakukan reviu atas penerapan GCG, serta memfasilitasi penilaian (assessment) implementasi GCG. The company also ensures that the implementation of governance policies also applies to subsidiaries and related entities by constantly monitoring reports on GCG compliance on a regular basis, reviewing GCG implementation, and facilitating the assessment of GCG implementation
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. The corporate has rules and procedures governing acquisitions, acquisitions and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure transactions occur in a transparent and under reasonable conditions and protect the rights of all shareholders according to the class.	Diterapkan Apply	Implementasi prinsip GCG dan menggunakan jasa pihak ketiga secara konsisten untuk menilai kewajaran transaksi investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal, yang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal menjadi startegi perusahaan melindungi kepentingan para Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan. Consistent implementation of GCG principles and consistent use of third party services to assess the fairness of investment transactions, expansions, divestitures, business mergers/consolidations, acquisitions, and debt/capital restructuring, which are carried out in compliance with applicable provisions in the capital market sector, is the company's strategy to protect the interests of shareholders. Shareholders and all Stakeholders.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Manual			
7.1.3.1	Korporasi secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur tersebut sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi. Corporations clearly disclose these rules and procedures thus investors understand their rights and the right to obtain compensation.	Penjelasan Explain	Tertuang Dalam Prospektus dan Turunan atas ketentuan Anggaran Dasar yang diimplementasikan melalui prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan dalam Tata Tertib RUPS, di mana Tata Tertib RUPS diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan dijelaskan kembali oleh Pimpinan RUPS saat pembukaan RUPS. Set forth in the Prospectus and Derivatives of the provisions of the Articles of Association which are implemented through a voting procedure in making decisions in the GMS Rules, in which the GMS Rules are given to the Shareholders who are present and explained again by the Chairperson of the GMS at the opening of the GMS.
7.1.3.2	Taktik yang mencegah pengambilalihan, (*anti- take-over devices*) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas. The anti-takeover devices should not be used to protect the management and Board of Commissioners from accountability.	Penjelasan Explain	Perusahaan tidak memiliki taktik untuk mencegah pengambialihan (anti-take-over devices) The company does not have tactics to prevent takeover (anti-take-over devices)
7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment of Shareholders		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, Pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The Corporate have rules and procedures that ensure All shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally, Disclosure of such rules and procedures as well as disclosure of capital structure and arrangements that enable certain shareholders to acquire influence or control that is disproportionate to its shareholding.	Diterapkan Apply	PTBA memiliki aturan dan prosedur setara dan sesuai terkait jenis saham seperti kepemilikan Saham Seri B memiliki hak yang sama dengan hak yang dimiliki Saham Seri A, kecuali hak-hak istimewa atau hak-hak tertentu yang dimiliki Saham Seri A sebagaimana peraturan yang berlaku. PTBA has equal and appropriate rules and procedures regarding types of shares such as Series B Shares have the same rights as Series A Shares, except for special rights or certain rights owned by Series A Shares according to applicable regulations.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The corporate has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and executed in such a way as to ensure that the conflict of interests have been properly managed, and protect the interests of the corporate and shareholders.	Diterapkan Apply	PTBA telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 14/SK/PTBADEKOM/ IX/2020 dan No. 404/0100/2020 tentang Penerapan Prinsip dan Praktik Good Corporate Governance untuk Kebijakan Benturan Kepentingan di Perusahaan. PTBA already has a Conflict of Interest Guideline based on the Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 14/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 and No. 404/0100/2020 regarding the Application of Good Corporate Governance Principles and Practices for the Company's Conflict of Interest Policy.
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/ belum tersedia di pasar. The corporate has and discloses the policies to prevent insider trading. The corporate has clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by directors, commissioners and insiders to ensure that no one can benefit directly or indirectly from information that is not/not yet available in the market.	Diterapkan Apply	Kebijakan yang mencegah terjadinya insider trading tertuang dalamKeputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTBA No.250/0100/2023 dan No.15/ SK/PTBADEKOM/XII/2023 tentang Pedoman Transaksi Orang Dalam (Insider Trading). Policies that prevent insider trading are contained in the Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Director PTBA No.250/0100/2023 and No.15/SK/ PTBADEKOM/ XII/2023 Concerning Guideline of Insider Trading.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
7.3	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi The corporate calls for the GMS with the agenda and materials for the GMS as completely and as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide sufficient time and material for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed through electronic means such as through the corporate website	Diterapkan Apply	Perusahaan Patuh Pada Pojk No. 15 Dan 16 Tahun 2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Dimana Panggilan RJUPS dan Materi RUPS ditayangkan Paling Lambat 21 Hari Sebelum RUPS. The Company complies with POJK No. 15 and 16 of 2020 concerning GMS for Public Companies, where the Summons for GMS and the Material for GMS are published no later than 21 days before the GMS.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporate has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively in GMS.	Diterapkan Apply	Perusahaan Patuh Pada Pojk No. 15 dan 16 Tahun 2021 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dimana Pemegang Saham dapat berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The Company complies with POJK No. 15 and 16 of 2021 concerning Electronic Public Company GMS, where Shareholders can participate and vote effectively at the GMS.
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Corporate Governance Policy 2023 Contained in the Corporate Governance Policy 2023
Rekomendasi 4 **Recommendation 4**			
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporate ensures the transparency and accountability of the external auditor at the GMS.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam pernyataan transparansi dan akuntabilitas Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Laporan Keuangan Audited. Contained in the statement of transparency and accountability of Public Accountant and Public Accounting Firm in the Audited Financial Report.
Rekomendasi 5 **Recommendation 5**			
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. Submission of voting results and a complete summary of the minutes of the GMS will be announced to the public on the following working day.	Diterapkan Apply	Perusahaan Patuh Pada POJK No. 15 & 16 Tahun 2021 tentang RUPS Perusahaan Terbuka The Company complies with POJK No. 15 & 16 of 2021 concerning Public Company's GMS

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
8.	**Pemangku Kepentingan Lainnya** Other Stakeholders		
8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*stakeholder engagement*) Key Stakeholder Engagement		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
8.1.1	Korporasi melalui Corporate Secretary melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The Corporate through the Corporate Secretary carry out regular, transparent and effective communications with key stakeholders and involve them to understand their hopes and grievances and the impact the corporate has on them.	Diterapkan Apply	PTBA menyediakan kanal Pelaporan Keterbukaan Informasi Publik Pada Website resmi PTBA, yaitu www.ptba.co.id. PTBA provides Public Information Disclosure Reporting channel on PTBA's official website, namely www.ptba.co.id.
8.2	Komitmen Keberlanjutan dalam Model Bisnis Sustainability Commitment in Business Models		
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including setting corporate sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners incorporate sustainability considerations when carrying out their roles, including among others developing and implementing corporate strategies, business plans, key action plans and risk management.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan Has been carried out according to the provisions
8.3	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Protection of Stakeholders		
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the application of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporate and ensures that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with the rights of stakeholders.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Corporate Governance Policy 2023 As stated in the Corporate Governance Policy 2023
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages the employees to work for the long term interests of the corporate and prioritizes sustainability.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam perjanjian kerja bersama Perusahaan Contained in the Company's collective labor agreement

Referensi POJK No. 29/POJK.04/2016 dan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021

POJK NO. 29/POJK.04/2016 and SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 Reference

No.	Uraian Description	Halaman Page
1.	**Ketentuan Umum** General Terms	
	a. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai: • Khtisar data keuangan penting; • Informasi saham (jika ada); • Laporan Direksi; • Laporan Dewan Komisaris; • Profil Emiten atau Perusahaan Publik; • Analisis dan pembahasan manajemen; • Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; • Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; • Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan • Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan; a. The Annual Report shall at least include the following information: • An overview of important financial data; • Share information (if any); • Board of Directors' report; • Board of Commissioners' report; • Issuer or Public Company profiles; • Management discussion and analysis; • Issuer or Public Company governance; • Issuer or Public Company social and environmental responsibility; • Audited annual financial statements; and • statement from the Board of Directors and the Board of Commissioners on their responsibility for the Annual Report;	v
	b. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami/ Annual reports can present information in the form of pictures, graphs, tables, and / or diagrams clearly statingthe title and / or description, which is easy to read and understand	v
2.	**Uraian Isi Laporan Tahunan** Annual Report Contents Description	
A.	**Ikhtisar Data Keuangan Penting** Summary of Important Financial Data	
	Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Financial Highlights includes financial information presented in the form of comparison for 3 (three) financial years, or since starting a business if the Issuer's or the Public Company's business activities are less than 3 (three) years, and should at least include:	
	1. Pendapatan/penjualan; Revenue/sales;	20
	2. Laba bruto; Gross profit;	20
	3. Laba (rugi); Profit (loss);	20
	4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; Total profit (loss) attributable to owners of the parent and non-controlling interests;	20
	5. Total laba (rugi) komprehensif; Total comprehensive profit (loss);	20
	6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; Total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent and non- controlling interests;	20
	7. Laba (rugi) per saham; Profit (loss) per share;	20
	8. Jumlah aset; Total assets;	22
	9. Jumlah liabilitas; Total liabilities;	22
	10. Jumlah ekuitas; Total equities;	22
	11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; Profit (loss) to total assets ratio;	24

No.	Uraian Description	Halaman Page
	12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; Profit (loss) to equity ratio;	24
	13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; Profit (loss) to revenue/sales ratio;	24
	14. Rasio lancar; Current ratio;	24
	15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas; Liabilities to equity ratio;	24
	16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan Liabilities to total assets ratio;	24
	17. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. Other information and financial ratios relevant to the Issuer or a Public Company and its industry type;	24
B.	**Informasi Saham** Share Information	
	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Share information for a Public Company shall at least contain: 1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: Shares issued for each quarter are presented in the form of comparison for the last 2 (two) years, to include at least: a. Jumlah saham yang beredar; total outstanding shares; b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the Stock Exchange where the securities are listed; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan The highest, lowest, and closing share price based on the Stock Exchange where the securities are listed; and d. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. The volume of trading on the Stock Exchange where the securities are listed; e. Informasi dalam huruf b), huruf c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information on the letter b), c), and d) is only disclosed if the shares are listed on the Stock Exchange;	28-29
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: In the event of a corporate action that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the shares' nominal value, conversion securities issuance, as well as capital additions and deductions, share information as referred to in number 1) shall be added with, at least, explanation regarding: a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi; corporate action execution date; b. Rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares; c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of shares outstanding before and after the corporate action; d. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and e. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; share price before and after the corporate action;	30-31
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan In the event of share trading temporary suspension (suspension) and/or shares delisting during the fiscal year, the shares' suspension and/or delisting reasons shall be explained; and	30
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. If the share trading temporary suspension as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/ or cancellation of the share listing (delisting) shall be explained.	30
C.	**Laporan Direksi** Board of Directors Report	
	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' Report shall, at the minimum, contain a brief description of: 1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The Board of Directors' report shall, at the minimum, contain a brief description of:	
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; The strategy and strategic policy of the Issuer or Public Company;	54-57
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; The Board of Directors' role in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	58-59
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	58-59

No.	Uraian Description	Halaman Page
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan Comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	57-58
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; The constraints faced by the Issuer or Public Company;	56-57
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan Business prospects overview of the Issuer or Public Company; and	58
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. Governance implementation of the Issuer or Public Company.	61-62
D.	**Laporan Dewan Komisaris** Board of Commissioner Report	
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' Report shall, at the minimum, contain a brief description of: 1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; The Board of Directors' performance evaluation regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the strategies formulation and implementation for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	42-45
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan View on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors;	46
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. View on the Issuer or Public Company's application of governance;	47
E.	**Profil Emiten atau Perusahaan Publik** Profile of the Issuer or Public Company	
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: Profile of the Issuer or Public Company contains, at the minimum, information of: 1. Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; The name of the Issuer or Public Company, including if there was any change of name, the reason for the change, and effective date of the name change during the fiscal year;	68
	2. Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: Access to Issuer or Public Company, including any branch offices or representative offices, which allows the public access to information on the Issuer or Public Company, including: a. Alamat; Address; b. Nomor telepon; Telephone number; c. Alamat surat elektronik; dan Electronic mail address; and d. Alamat situs web; Website address;	68-69
	3. Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; A brief history of Issuer or Public Company;	70-72
	4. Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; The vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	74-78
	5. Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; Business activities according to the last articles of association, the business activities carried out during the fiscal year, as well as the type of goods and/or services produced;	79-85
	6. Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; The operational area of the Issuer or Public Company; Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. The operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operating activities.	86-88
	7. Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; The organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at the minimum, the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	90-93
	8. Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; A list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	89

No.	Uraian Description	Halaman Page
	9. Profil Direksi, paling sedikit memuat: The profile of Directors, to at least include: a. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; The name and position per the duties and responsibilities; b. Foto terbaru; A recent photograph; c. Usia; Age; d. Kewarganegaraan; Nationality; e. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; Educational and/or certification history; f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on: i. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; The legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned; ii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member, and other positions inside and outside the Issuer or Public Company. If a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and iii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Period of work experience both inside and outside the Issuer or Public Company. g. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including the names of affiliated parties. If the member has no affiliation relationship, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and h. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. If there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	94-100
	10. Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The profile of Board of Commissioners, to at least include: a. Nama dan jabatan; the name and position; b. Foto terbaru; A recent photograph; c. Usia; Age; d. Kewarganegaraan; Nationality; e. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; Educational and/or certification history; f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on: i. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; The legal basis for appointment as a member of the Board of Commissioners of the Issuer or Public Company concerned; ii. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; The legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned; iii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member, and other positions inside and outside the Issuer or Public Company. If a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and iv. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Period of work experience both inside and outside the Issuer or Public Company. g. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including the names of affiliated parties. If the member has no affiliation relationship, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and h. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. If there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed; i. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	102-111
	11. Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; In the event of changes in the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners' members that occurred after the fiscal year ends until the deadline for submission of the Annual Report, the composition to be included in the Annual Report is the latest and the previous composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners' members;	112

No.	Uraian Description	Halaman Page
	12. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	134-139
	13. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: Shareholders names and ownership percentage at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding: a. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; Shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company; b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares in the Issuer or Public Company. If all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and c. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Community shareholder group, namely the group of shareholders whom each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	140-145
	14. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; The shares' indirect ownership percentage of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. If all members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	144
	15. 1jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: The number of shareholders and the percentage of ownership at the fiscal year-end based on the classification of: a. Kepemilikan institusi lokal; Local institutions ownership; b. Kepemilikan institusi asing; Foreign institutional ownership; c. Kepemilikan individu lokal; dan Local individual ownership; and d. Kepemilikan individu asing; Foreign individual ownership;	143
	16. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; Information regarding the major and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, to the individual owners, presented in the form of schematics or charts;	146-148
	17. Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; The name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	149-157
	18. Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); A chronological listing of shares, number of shares, nominal value, and the offer price from the start of recording until the end of the financial year and the name of the Stock Exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	158-159
	19. Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18, yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); Other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	160

No.	Uraian Description	Halaman Page
	20. Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: Information on the use of the services of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) and their networks/associations/allies include: a. Nama dan alamat; Name and address; b. Periode penugasan; Assignment period; c. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; Information on audit and/or non-audit services provided; d. Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan Audit and/or non-audit fee for each assignment given during the fiscal year; and e. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan If AP and KAP and their networks/associations/allies, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and f. Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/allies can be presented in tabular form.	160
	21. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.	161-164
F.	**Analisis dan Pembahasan Manajemen** Management Discussion and Analysis	
	Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management Discussion and Analysis shall include analysis and discussion of the financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred during the fiscal year, to at least have: 1. Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: A review of operations per operating segment based on the Issuer or Public Company's type of industry, to name a few: a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; Production, including the process, capacity, and its development; b. Pendapatan/penjualan; dan Revenue / sales; and c. Profitabilitas; Profitability;	201-207
	2. Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: Comprehensive financial performance including a comparison of financial performance in the last 2 (two) years, an explanation of the cause of any changes and the impact of such changes, to name a few: a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; Current assets, non-current assets, and total assets; b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; c. Ekuitas; Equity; d. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan Revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and e. Arus kas; Cash flow;	208-224
	3. Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; Ability to pay the debt by presenting the relevant ratios;	225-227
	4. Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; The collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	227-228
	5. Struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; Capital structure and management policies on capital structure accompanied by the basis for determining the policy;	229-230
	6. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: Discussion on material commitments for capital investments with explanations, to name a few: a. Tujuan dari ikatan tersebut; The purpose of such commitments; b. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; Sources of funds to meet such commitments; c. Mata uang yang menjadi denominasi; dan Currency-denominated; and d. Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; Planned measures by the Issuer or Public Company to cover the risks of foreign currency positions;	231
	7. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: Discussion regarding capital goods investments realized in the last fiscal year, to name a few: a. Jenis investasi barang modal; Type of capital goods investments; b. Tujuan investasi barang modal; dan Capital goods investment objectives; and c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; Value of capital goods investments realized;	232

No.	Uraian Description	Halaman Page
	8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); Material information and facts occurring after the date of the auditor's report (if any);	233
	9. Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; Business prospects of the Issuer or Public Company based on the condition of the industry, the general economy, and the international markets supporting quantitative data from trusted data sources;	252-256
	10. Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: Comparison between the targets/projections at the beginning of the year with the results achieved (realized), including: a. Pendapatan/penjualan; Revenue / sales; b. Laba (rugi); Profit (loss); c. Struktur modal (capital structure); atau Capital structure; or d. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; Other matters that are considered important for the Issuer or Public Company;	234-235
	11. Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: Targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for one (1) year ahead, including: a. Pendapatan/penjualan; Revenues / sales; b. Laba (rugi); Profit (loss) c. Struktur modal (capital structure); Capital structure; d. Kebijakan dividen; atau Dividend policy; or e. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; Other matters that are considered important for the Issuer or Public Company;	236
	12. Spek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; The Issuer or Public Company's marketing of goods and/or services, at least including the marketing strategy and market share;	198-200
	13. Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: Description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least: a. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; Dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income; b. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; Date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends; c. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan The amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and d. Jumlah dividen per tahun yang dibayar; The amount of dividends paid annually; e. Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. If the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	237-238
	14. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: Realization of the use of proceeds from the public offering, provided that: a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan If, during the fiscal year, the Issuer must submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; If there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	240

No.	Uraian Description	Halaman Page
	15. Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: Material information (if any), among others regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing: a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi; The date, value, and object of the transaction; b. Nama pihak yang melakukan transaksi; The name of the party conducting the transaction; c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada); The nature of the affiliation relationship (if any); d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; Explanation of the fairness of the transaction; e. Pemenuhan ketentuan terkait; dan Compliance with related provisions; and f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: If there is an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information: i. Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle); dan A statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out following generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle; and ii. Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*); The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out following generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle;	241-246
	g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; For affiliated or material transactions, which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. If the affiliated or material transactions have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added. h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added; i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; If there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction; then this matter shall be disclosed;	
	16. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan Changes in regulations and legislation that significantly impact the Issuer or Public Company and the impact on the financial statements (if any); and	247-249
	17. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). Changes in accounting policies, reasons, and impact on the financial statements (if any);	250

No.	Uraian Description	Halaman Page
G.	**Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik** Corporate Governance of Issuer or Public Company	
	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall, at the minimum, contain a brief description of: 1. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at the minimum, contains:	297-315
	a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year include:	
	i. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan The GMS' resolutions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year are realized in the fiscal year; and	305-315
	ii. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that has not been realized and the reasons for not realizing them;	305-315
	b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; If the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	305
	2. Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at the minimum, contains:	
	a. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. The duties and responsibilities of each member of the Board of Directors are described and can be presented in tabular form.	354-362
	b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; A statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	351
	c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Policies and implementation of the Board of Directors' meeting frequency, Board of Directors' meeting with the Board of Commissioners, and the Board of Directors member's attendance level in the meeting including attendance at the GMS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the Board of Directors member's level of attendance at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in tabular form.	304 367 367-376
	d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: Training and/or competency improvement of the Board of Directors members:	377-378
	i. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan Training and/or improving the competence of members of the Board of Directors policy, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	377
	ii. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	377 172-175
	e. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: The Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain: i. Prosedur penilaian kinerja; dan Performance appraisal procedures; and ii. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan The criteria used, such as performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and	378-381 378-381
	f. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. If the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	378
	3. Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at the minimum, contains:	
	a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	319-327
	b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; A statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	316
	c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Policies and implementation of the Board of Commissioners meeting frequency, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in such meetings including attendance at the GMS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the Board of Commissioners members' attendance level at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	304 333-334 335 333-342

No.	Uraian Description	Halaman Page
	d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	342-348
	i. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan Policy on training and/or improving the Board of Commissioners members' competence, including orientation programs for Newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	342 343
	ii. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	343 170-172
	e. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at the minimum containing:	382-388
	i. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; Procedures for implementing performance appraisals;	382 385
	ii. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan The criteria used such as performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and	382 385
	iii. Pihak yang melakukan penilaian; dan The party conducting the assessment; and	382 385
	f. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: The Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	350
	i. Prosedur penilaian kinerja; dan Performance appraisal procedures; and	350
	ii. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; The criteria used such as performance achievements during the fiscal year, competence, and attendance at meetings;	350
4.	Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	
	a. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Nomination procedure, including a brief description of the policies and members nomination process of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners; and	390
	b. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	391-395
	i. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	392-393
	ii. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus, and others; and	394-395
	iii. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	395-396
5.	Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The Sharia Supervisory Board, the Issuer or Public Company that runs the business activities based on Islamic principles as stated in the articles of association shall, at the minimum, include: a. Nama; Names; b. Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; The legal basis for the appointment of the sharia supervisory board; c. Periode penugasan dewan pengawas syariah; The period of assignment of the sharia supervisory board; d. Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan Duties and responsibilities of the Shariah Supervisory Board; and e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; Frequency and mode of administration advice and suggestions as well as monitoring compliance with Sharia Principles in the Capital Market of the Issuer or Public Company;	N/A
6.	Komite audit, paling sedikit memuat: The Audit Committee, including, at the minimum:	
	a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Names and positions of the committee members;	408-411
	b. Usia; Age;	408-411
	c. Kewarganegaraan; Nationality;	408-411
	d. Riwayat pendidikan; Education background;	408-411

No.	Uraian Description	Halaman Page
	e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position background, including:	406-410
	f. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Legal basis for appointment as a committee member;	408-411 424
	i. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or members of committees as well as other positions (if any); and	408-411
	ii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience both inside and outside the Issuer or Public Company;	408-411
	g. Periode dan masa jabatan anggota komite audit; Period and tenure of Audit Committee members;	424
	h. Pernyataan independensi komite audit; Statement of Audit Committee independence;	425
	i. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement that has been followed in the fiscal year (if any);	428 176
	j. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan Policy and implementation of Audit Committee meeting frequency and level of attendance of Audit Committee members at the meetings;	426-428
	k. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; Implementation of Audit Committee activities in the fiscal year in the Audit Committee guidelines or charter;	429
7.	Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at the minimum, containing:	
	a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Names and positions of the committee members;	418-420
	b. Usia; Age;	418-420
	c. Kewarganegaraan; Nationality;	418-420
	d. Riwayat pendidikan; Education background;	418-420
	e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position background, including:	416-419
	i. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Legal basis for appointment as a committee member;	418-420
	ii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or members of committees as well as other positions (if any); and	418-420
	iii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience both inside and outside the Issuer or Public Company;	418-420
	f. Periode dan masa jabatan anggota komite; Period and tenure of committee members;	418-420 435
	g. Pernyataan independensi komite; Statement of committee independence;	436-437
	h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement that has been followed in the financial year (if any);	440 176
	i. Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of duties and responsibilities;	437-438
	j. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); Statement that it has established committee guidelines or charter;	433
	k. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; Policy and implementation of committee meeting frequency and level of attendance of committee members at the meetings;	439-440
	l. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan A brief description of the committee's activities in the fiscal year;	441
	m. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: If no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	
	i. Alasan tidak dibentuknya komite; dan Reasons for not forming the committee; and	-
	ii. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; The party carrying out the nomination and remuneration function;	-

No.	Uraian Description	Halaman Page
8.	Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Other committees owned by Issuers or Public Companies to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and responsibilities of the Board of Commissioners, at the minimum, containing:	N/A
a.	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Name and position in committee membership;	412-417
b.	Usia; Age;	412-417
c.	Kewarganegaraan; Nationality;	412-417
d.	Riwayat pendidikan; Educational history;	412-417
e.	Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:	
f.	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Legal basis for appointment as a committee member;	412-417 435-436
ii.	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	412-417
iii.	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience and period both inside and outside the Issuer or Public Company;	412-417
f.	Periode dan masa jabatan anggota komite; The period and term of office of the committee members;	412-417 435-436
g.	Pernyataan independensi komite; Statement of committee independence;	436-437
h.	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan Training and/or competency improvement that has been followed in the fiscal year (if any); and	440 177
i.	Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of duties and responsibilities;	437-438
j.	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; A statement that the committee has had guidelines or charters;	433
k.	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan Policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members in those meetings; and	439-440
i.	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; A brief description of the committee's activities for the fiscal year;	441
9.	Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate Secretary, including, at the minimum:	
a.	Nama; Name;	447-448
b.	Domisili; Domicile;	447-448
c.	Riwayat jabatan, meliputi: Position history, including:	446
d.	Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan Legal basis for appointment as Corporate Secretary; and	447-448
i.	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience both inside and outside the Issuer or Public Company;	447-448
e.	Riwayat pendidikan; Education background;	447-448
f.	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan Training and/or competence improvement followed during the fiscal year; and	456 177
	Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; A brief description of the Corporate Secretary activities in the fiscal year;	451-456
10.	Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal Audit Unit, including, at the minimum:	
a.	Nama kepala unit audit internal; Name of the Internal Audit Unit head;	461-462
b.	Riwayat jabatan, meliputi: Position background, including:	460
i.	Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan The legal basis for the appointment as Internal Audit Unit head; and	461-462
ii.	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience with its period both inside and outside of the Issuer or Public Company;	461-462

No.	Uraian Description	Halaman Page
	c. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); Professional internal audit qualifications or certifications (if any);	465
	d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; Training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	465 177
	e. Struktur dan kedudukan unit audit internal; Structure and positions within the Internal Audit Unit;	465
	f. Uraian tugas dan tanggung jawab; Duties and responsibilities description;	463
	g. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan Statement that it has established Internal Audit Unit guidelines or charter; and	459
	h. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; A brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year, including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	466
11.	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: Description of the internal control system applied by the Issuer or Public Company, at the minimum, including:	
	a. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; Financial and operational control and compliance with other laws and regulations; and	488
	b. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan Review of the internal control system effectiveness;	491
	c. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	491
12.	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: Description of the risk management system applied by the Issuer or Public Company, at the minimum, including:	
	a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; A general description of the Issuer or Public Company risk management system;	492
	b. Jenis risiko dan cara pengelolaannya; Risks types and their management; and	497-500
	c. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan Review of the Issuer or Public Company risk management system effectiveness;	503-504
	d. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the risk management system;	505
13.	Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners (if any), at the minimum, contain:	516-521
	a. Pokok perkara/gugatan; case / litigation description;	516-520
	b. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan case / litigation settlement status; and	516-520
	c. Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; Impact on the Issuer or Public Company condition;	516-520
14.	Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); Information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any)	521
15.	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: information regarding the Issuer or Public Company code of ethics, including:	
	a. Pokok-pokok kode etik; Code of ethics content;	526
	b. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan Form of code of ethics socialization and enforcement efforts; and	527-528
	c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Issuer or Public Company	527
16.	Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP);	515

No.	Uraian Description	Halaman Page
	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	
	a. Jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options;	N/A
	b. Jangka waktu pelaksanaan; implementation period;	N/A
	c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and	N/A
	d. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price;	N/A
17.	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: A brief description of the information disclosure policy regarding:	522
	a. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	522 144
	b. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; Implementation of the said policy;	522 144
18.	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: Description of the whistleblowing system in the Issuer or a Public Company (if any), including:	
	a. Cara penyampaian laporan pelanggaran; Violation report submission;	530-531
	b. Perlindungan bagi pelapor; Protection for whistle-blowers;	532
	c. Penanganan pengaduan; Complaint handling;	533
	d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan The party managing the complaint;	533-534
	e. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: Complaint handling results, at the minimum:	535
	i. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan Number of complaints received and processed during the fiscal year; and	535
	ii. Tindak lanjut pengaduan; Complaint follow up; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. If the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter must be disclosed.	535
19.	Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: A description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at the minimum containing:	
	a. Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan Programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratuities in Issuers or Public Companies; and	537
	b. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. If the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy must be explained.	537-538
20.	Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: Implementation of Code of Corporate Governance guidelines by the Issuer that issues equity securities or the Public Company, including:	287-292
	a. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau Statement regarding recommendations have been implemented; and/or	287-292
	b. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). Description of the recommendations that have not been implemented, the reasons, and the implementation alternatives (if any); Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	287-292

No.	Uraian Description	Halaman Page
H.	**Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik (Lampiran SEOJK 16/2021)** Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company (SEOJK 16/2021 Attachment)	
	Bagian Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik disajikan dalam bentuk Laporan Keberlanjutan (Sustainability Reporting) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini. The Social and Environmental Responsibility section of the Issuer or Public Company is presented in the form of a Sustainability Report, which is an integral part of this Annual Report.	
I.	**Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit** Audited Annual Financial Report	
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial statements contained in the Annual Report are prepared following financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulate the periodic reports of securities companies if the Issuer is a securities company.	
J.	**Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan.** Board of Directors and Board of Commissioners' Statement on Responsibility for The Annual Report	
	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Board of Directors and Board of Commissioners' Affidavit on the responsibility for the Annual Report prepared following the format of the Board of Directors and Board of Commissioners' Statement on Responsibility for the Annual Report.	63-64

2023
LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

PT Bukit Asam Tbk

Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim
Muara Enim, Sumatera Selatan
Indonesia 31716

T +62-734-451 096, 452 352
F +62-734-451 095, 452 993
E corsec@bukitasam.co.id

www.ptba.co.id